

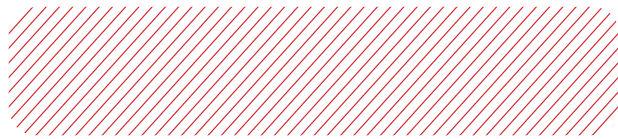


Mewujudkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

2015
LAPORAN TAHUNAN
//////







Mewujudkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa, infrastruktur merupakan katalis yang sangat diperlukan. Keberadaan infrastruktur yang baik disuatu wilayah dapat menjadi daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik pada aspek perekonomian, sosial-kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan.

Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian.

Jasa Marga sebagai salah satu BUMN penyedia jasa infrastruktur jalan tol mempunyai posisi yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan dan pengoperasian jalan tol sebagai prasarana distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun sebagai prasarana pembentuk struktur ruang wilayah.

Dalam masa hingga tahun 2019 kedepan pembangunan jalan tol merupakan salah satu prioritas pembangunan



infrastruktur, pemerintah telah menargetkan pembangunan infrastruktur melalui penambahan panjang jalan tol sepanjang 1000 km. Jasa Marga berkomitmen untuk turut serta mewujudkan pencapaian target tersebut melalui pembangunan ruas-ruas jalan tol potensial untuk dibangun.

Komitmen Jasa Marga yang berkelanjutan tersebut merupakan upaya yang sejalan dengan visi dan misi Jasa Marga untuk tetap menjadi perusahaan jalan tol yang terpercaya dan unggul. Jasa Marga saat ini terus merampungkan ruas-ruas jalan tol yang konsesinya telah dimiliki dan tengah dalam pembangunan, hingga akhir tahun 2015 Jasa Marga memiliki jalan tol yang beroperasi sepanjang 590 km dan 987 km hingga tahun 2018.

Dengan panjang jalan tol beroperasi yang terus bertambah, akan mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia. Memperlancar proses produksi, pasar dan konsumsi akhir, meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik dan terwujud akan menjadi salah kunci dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Melalui pengalaman, kemampuan dan sumber daya yang mumpuni Jasa Marga siap untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.



Laporan Manajemen

Mewujudkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1
Daftar Isi	2
Profil Jasa Marga	4
Identitas Jasa Marga	4
Logo Jasa Marga	6
Visi & Misi dan Strategi Jasa Marga	7
Tata Nilai dan Budaya Jasa Marga	8
Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan (Corporate Culture) yang Dimiliki Perseroan	8
Pokok-pokok Budaya Jasa Marga	9
Sosialisasi Tata Nilai Perseroan	10
Sekilas Jasa Marga	12
Perjalanan Penting Jasa Marga	12
Riwayat Singkat Jasa Marga	14
Proses Bisnis Jasa Marga	16
Perkembangan Industri Jalan Tol di Indonesia	18
Perkembangan Usaha Jasa Marga	18
Struktur Organisasi Jasa Marga	20
Pemegang Saham Utama, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	22
Struktur Korporasi Grup Jasa Marga	22
Entitas Anak	23
Tentang Entitas Anak	24
Entitas Asosiasi	27
Wilayah Operasi dan Proyek-proyek Jalan Tol Baru	28
Konsesi-konsesi yang Dimiliki Perseroan	29
Profil Sumber Daya Manusia	32
Profil Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Pejabat Senior Jasa Marga	34
Profil Dewan Komisaris	34
Profil Direksi	36
Profil Komite Audit	38
Profil Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko	39
Profil Pejabat Senior Jasa Marga	40
Alamat Kantor Cabang, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Jasa Marga	46
Lembaga dan Profesi Penunjang	48
Situs Web Jasa Marga	49
Ikhtisar 2015	50
Ikhtisar Keuangan 2011-2015	50
Ikhtisar Operasional 2011-2015	52
Ikhtisar Saham	53
Saham JSMR	53
Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham JSMR Selama Tahun 2015	56
Ikhtisar Obligasi	57
Kronologis Pencatatan Saham dan Emisi Obligasi Jasa Marga	58
Kronologis Pencatatan Saham Jasa Marga	58
Kronologis Pencatatan Obligasi Jasa Marga	58
Komposisi Kepemilikan Saham JSMR	59
Kepemilikan Saham Jasa Marga oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan	60
Pemegang Saham dan Obligasi Terbesar	60
Dua Puluh Terbesar Pemegang Saham Jasa Marga	60
Sepuluh Terbesar Pemegang Obligasi Jasa Marga	61



Analisa Dan Pembahasan Manajemen

Perubahan Peraturan Perundang Undangan yang Bergengaruh Signifikan Terhadap Perseroan	151
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Alasan dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Perseroan	151
Pengembangan Proyek Baru	154
Pengembangan Usaha Jalan Tol	157
Prospek Industri Jalan Tol	157
Pengembangan Usaha Jalan Tol Perseroan	157
Kinerja Pengembangan Jalan Tol di tahun 2015	159
Target Kinerja Tahun 2016	173
Pengembangan Usaha Lain	173
Pengembangan Proyek Properti Oleh PT Jasamarga Properti	173
Pengembangan Jasa Pemeliharaan Jalan Tol Oleh PT Jasa Layanan Pemeliharaan	174
Pengembangan Jasa Layanan Operasional Jalan Tol Oleh PT Jasa Layanan Operasi	174
Pengembangan Tempat Istirahat Dan Pelayanan (TIP)	175
Pengembangan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Oleh PT Pilar Sinergi Bumn Indonesia	175
Pengelolaan Human Capital	176
Transformasi Human Capital: Membangun Kinerja	179
Efektivitas Organisasi	180
Survei Keterikatan Karyawan (Employee Engagement Survey)	181
Perencanaan dan Rekrutmen SDM	182
Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Karyawan	183
Kebijakan Suksesi Direksi	187
Sistem Manajemen Kinerja dan Kompetensi Karyawan	188
Pengembangan Karir Karyawan Berbasis Kompetensi	189
Kesejahteraan Karyawan	192
Hubungan Industrial dan Kebebasan Berserikat	195
Manfaat Pasca Kerja Karyawan	195
Pengelolaan Tenaga Alih Daya	196
Produktivitas Karyawan	196
Penghargaan Terkait Pengelolaan Human Capital	196
Pengelolaan Transformasi Human Capital	197
Biaya Sumber Daya Manusia	197
Tata Kelola Perusahaan	198
Dasar Hukum Penerapan GCG Jasa Marga	201
Sosialisasi dan Internalisasi GCG	203
Komitmen Jasa Marga dalam Penerapan GCG	204
Tujuan Penerapan GCG Jasa Marga	205
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	205
Hasil Penilaian Implementasi GCG Jasa Marga	210
Struktur, Kebijakan dan Mekanisme Penerapan Tata Kelola Perusahaan	214
Mekanisme Tata Kelola	216
Peristiwa Penting 2015	62
Sertifikat dan Penghargaan 2015	68
Sertifikasi	72
Laporan Manajemen	74
Laporan Dewan Komisaris	76
Perubahan Komposisi Dewan Komisaris	77
Penilaian Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya	78
Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan yang Disusun Oleh Direksi dan Dasar Pertimbangannya	80
Penilaian Kinerja Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris	80
Laporan Direksi	82
Perubahan Komposisi Direksi	84
Analisa Kinerja Perseroan	84
Prospek Usaha Perseroan ke Depan	86
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkesinambungan	87
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	87
Penilaian Atas Kinerja Komite-Komite yang Berada Di Bawah Direksi	87
Analisa dan Pembahasan Manajemen	88
Tinjauan Umum	91
Tinjauan Kinerja Perseroan vs Industri Jalan Tol	92
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha	92
Dasar Penerapan Segmen Usaha Jasa Marga	92
Strategi Pengembangan Segmen Usaha	93
Kinerja Segmen Usaha Perseroan 2014 dan 2015	94
Segmen Usaha Pengoperasian Jalan Tol	94
Segmen Usaha Pengembangan Usaha Lain	114
Analisa Kinerja Keuangan Komprehensif	115
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	115
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	126
Laporan Arus Kas Konsolidasian	144
Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang	146
Struktur Modal	147
Kebijakan Struktur Modal	147
Perbandingan Target 2015 dan Realisasi 2015	147
Target/Proyeksi yang Ingin Dicapai Tahun 2016	147
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal	147
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan	147
Prospek Usaha, Kondisi Industri dan Kondisi Ekonomi	148
Strategi Pemasaran dan Pangsa Pasar	148
Kebijakan Dividen dan Pembayaran Dividen Tunai	148
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	149
Peningkatan/penurunan Material dari Pendapatan Bersih Terkait dengan Volume Penjualan atau Jasa Baru	150
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan restrukturisasi utang/modal	151
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi	151

198



Tata Kelola Perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham	217
Pemegang Saham Jasa Marga	217
Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham RUPS	217
Proses Penyelenggaraan RUPS	217
Penyelenggaraan RUPS Jasa Marga di tahun 2015	218
Ketentuan Korum dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi	221
Tanya Jawab	222
Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara	222
Mata Acara, Keputusan, Hasil Voting dan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan	223
Dewan Komisaris	230
Komposisi Dewan Komisaris	230
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Board Charter)	231
Persyaratan dan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris	231
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	233
Independensi Dewan Komisaris dan Komisaris Independen	241
Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Perusahaan Lain	242
Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan	242
Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris	243
Rapat Dewan Komisaris	243
Keputusan-keputusan Dewan Komisaris tahun 2015	246
Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris-Direksi Selama Tahun 2015	246
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2015	246
Prosedur, Dasar Penetapan dan Besarnya Remunerasi Anggota Dewan Komisaris	247
Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris	248
Direksi	249
Komposisi Direksi	249
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board Charter)	250
Persyaratan dan Keberagaman Komposisi Direksi	250
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	252
Independensi Direksi dan Direktur Independen	258
Kriteria Direktur Independen	259
Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Perusahaan Lain	259
Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan	260
Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi	261
Rapat Direksi	261
Keputusan-keputusan Direksi tahun 2015	264
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (KPI) Direksi Tahun 2015	264
Prosedur, Dasar Penetapan dan Besarnya Remunerasi Anggota Direksi	265
Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi	267
Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi	271

334



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Assessment Dewan Komisaris dan Direksi	271
Proses Pelaksanaan Assesmen	271
Kriteria Penilaian Kinerja	271
Hasil Assessment GCG Dewan Komisaris dan Direksi	272
Indikator Penilaian Kinerja Direksi	272
Pihak yang Melakukan Assessment	273
Komite-komite	274
Komite Audit	274
Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko	279
Sekretaris Dewan Komisaris	286
Sekretaris Perusahaan	286
Struktur Organisasi Corporate Secretary	286
Pelaksanaan Tugas Corporate Secretary	287
Riwayat Jabatan dan Pengembangan Kompetensi	287
Profil Corporate Secretary	288
Unit Internal Audit	289
Pengangkatan dan Pemberhentian Head of Internal Audit	289
Struktur dan Kedudukan Unit Internal Audit	289
Pedoman Kerja Unit Internal Audit	290
Kode Etik Auditor Internal	290
Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit	291
Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Internal Audit dan Sertifikasi Profesi Audit	291
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Internal Audit Tahun 2015	292
Hasil Audit Unit Internal Audit	293
Kegiatan Pendukung Audit Lainnya	293
Evaluasi Kinerja Unit Internal Audit	293
Sistem Pengendalian Internal Perusahaan	294
Sosialisasi Pemahaman Kerangka Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP)	294
Review atas Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP)	294
Laporan Manajemen Risiko	295
Perjalanan Pengelolaan Risiko Jasa Marga	296
Kebijakan Manajemen Risiko	296
Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko	298
Risiko Perseroan dan Pengelolaannya	301
Top Risk RKAP 2015 Per Bidang	301
Implementasi Program Kerja Manajemen Risiko Tahun 2015	305
Perkara Penting yang Dihadapi	310
Perkara Tanah	311
Kasus Korporasi	313
Kasus Hubungan Industrial	314
Kasus Lain-lain	314
Perkara di Anak Perusahaan	315
Perkara yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	315
Informasi tentang Sanksi Administratif	316
Kepatuhan terhadap Peraturan-peraturan Baru	316
Kode Etik	317
Pedoman Perilaku	317
Pokok-pokok Kode Etik	317
Isi dan Keberlakuan Pedoman Perilaku	318

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (MSOP/ESOP)	320
Program MSOP/ESOP Jasa Marga	320
Jumlah Saham ESA	320
Jangka Waktu ESA	320
Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen yang Berhak	320
Harga Exercise	320
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)	321
Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)	321
Landasan Penyusunan Whistleblowing System	321
Maksud, Tujuan dan Manfaat Whistleblowing System	322
Sosialisasi Whistleblowing System	322
Ruang Lingkup Whistleblowing System	322
Sarana Penyampaian Pelaporan Pelanggaran	323
Mekanisme Penanganan Pelaporan Pelanggaran	323
Alur Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran	323
Perlindungan Terhadap Pelapor	324
Implementasi Whistleblowing System Tahun 2015	324
Konsistensi Penerapan GCG	325
Perlakuan yang Sama terhadap Seluruh Pemegang Saham	325
Pengadaan Barang dan Jasa	325
Tata Kelola Teknologi Informasi	327
Auditor Eksternal	331
Proses Penunjukan Auditor Eksternal	331
Jasa Lain	331
Akses terhadap Informasi dan Data Perseroan	333
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	334
Strategi dan Kebijakan Umum	337
Tanggung Jawab Lingkungan Hidup	338
Kebijakan	338
Kegiatan yang Dilakukan	339
Tanggung Jawab Ketenagakerjaan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja	340
Ketenagakerjaan	340
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	345
Laporan Tanggung Jawab Sosial	349
Komitmen Jasa Marga dalam Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan	349
Pengembangan Sosial dan Masyarakat	349
Kegiatan yang Dilakukan	349
Tanggung Jawab Terhadap Konsumen	355
Kebijakan	355
Kegiatan yang Dilakukan	355
Perlindungan terhadap Konsumen	357
Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Tahunan 2015	361
Lampiran	364
Daftar Istilah	364
Referensi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6	365
Laporan Keuangan Konsolidasi	

Profil Jasa Marga



Identitas Jasa Marga

Nama dan Kedudukan

Nama Perusahaan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Kedudukan: Berkedudukan di Jakarta

Kantor Pusat

Alamat : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Jakarta 13550 Indonesia

Tel. 62-21 841 3526, 841 3630

Faks. 62-21 841 3540

Email: jasmar@jasamarga.com,

sekper@jasamarga.co.id

Website: www.jasamarga.com

Informasi Pendirian

Tanggal Pendirian: 01 Maret 1978

Dasar Hukum Pendirian:

Peraturan Pemerintah No. 04 tahun 1978

Modal Dasar: Rp 9,52 triliun

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

Rp 3,4 triliun

Informasi Saham

Kepemilikan: Pemerintah Indonesia 70%

Publik 30%

Nama Bursa: PT Bursa Efek Indonesia/BEI (The

Indonesia Stock Exchange/IDX)

Tanggal IPO: 12 November 2007

Kode Bursa:

BEI/IDX: JSMR

Bloomberg: JSMR IJ

Reuters: JSMR.JK

Pusat Informasi Lalu Lintas dan Pelayanan Lainnya

JMTIC (Jasa Marga Traffic Information Center)

Call Center **14080**



KEGIATAN USAHA

Kegiatan Usaha Sesuai Anggaran Dasar

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Tambahan No. 27404 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Desember 2008 No. 100, dan perubahan-perubahannya Akta No. 33 tanggal 05 April 2011 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta berikut persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-20288.AH.01.02 Tahun 2011 tertanggal 21 April 2011 dan Akta No. 95 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta berikut surat penerimaan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian HAM No. AHU.AH.01.10-25313 tanggal 10 Juli 2012 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta berikut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Plt. Direktur Administrasi Hukum Umum Kementerian HAM No. AHU-AH.01.03-0019825 tanggal 27 Maret 2015 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036530.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusaha jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama




1. Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol.
2. Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatot) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatot untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Bidang pengembangan properti di wilayah yang berdekatan dengan koridor jalan tol.
2. Bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda-moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol.
3. Bidang jasa dan perdagangan untuk layanan konstruksi, pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol.

Logo Jasa Marga

Perubahan Logo Jasa Marga dari Masa ke Masa

Tahun	Logo
» 1978 - 1993	
» 1993-2007	
» 2007-2015	

Konfigurasi jalan membentuk huruf "J" (huruf pertama nama Perseroan) yang merupakan cermin perjalanan historis Perseroan, mencitrakan Perseroan yang semakin dinamis.



Warna biru dan kuning pada logo mencerminkan harapan dan masa depan, serta semangat dan komitmen.

Bola berwarna biru menunjukkan bahwa Jasa Marga menuju perusahaan yang memiliki standar global. Pelayanan jalan tol terus dikembangkan untuk memenuhi standar tersebut.

JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

Visi & Misi dan Strategi Jasa Marga

Perumusan Visi, Misi, dan Tata Nilai Perseroan dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait, yaitu antara lain: Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan, serta memperhatikan kepentingan dari para pemangku kepentingan.

Visi, Misi, dan Tata Nilai Perseroan ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui Keputusan Direksi No. 50/KPTS/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan.

Tahapan Penyusunan Visi, Misi dan Tata Nilai Jasa Marga

1. Direksi melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan kekuatan internal Perseroan.
2. Direksi melakukan evaluasi terhadap perubahan strategis lingkungan eksternal Perseroan dan mempertimbangkan peluang bisnis di masa akan datang.
3. Direksi melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.
4. Dengan mempertimbangkan Kekuatan Internal dan Peluang Eksternal serta harapan para pemangku kepentingan, Direksi merumuskan Visi dan Misi Perseroan.
5. Visi dan Misi tersebut kemudian disampaikan dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris yang kemudian ditetapkan dan disepakati bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Direksi menetapkan Visi dan Misi Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi.



Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala setiap tahun melakukan evaluasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Perseroan.

Visi & Misi Jasa Marga

Untuk memberikan kejelasan arah (*clarity of direction*) dan tujuan bersama yang akan dicapai (*unifying focal point*), dilakukan review kembali terhadap Visi Perseroan dengan melakukan evaluasi terhadap kekuatan Perseroan dan peluang bisnis dalam jangka panjang baik di jalan tol maupun usaha lain.

VISI JASA MARGA

Visi Tahun 2017

Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia.

Yang dimaksud Perusahaan Terkemuka adalah sebagai berikut:

- Memiliki keuntungan finansial (*financial soundness*) yang relatif tinggi di Industrinya dan memberikan nilai investasi dalam jangka panjang (*long-term investment value*).
- Menjadi *market leader* di industrinya.
- Selalu melakukan inovasi sehingga mempunyai kualitas produk dan layanan yang ekselen, melalui inovasi yang terus-menerus.
- Memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan.
- Mempunyai Manajemen Perusahaan yang berkualitas.
- Menjadi panutan dalam pengelolaan *Human Capital* bagi perusahaan lain dan menjadi pilihan untuk berkarir bagi orang-orang yang bertalenta.

Dalam melakukan perumusan Misi Perseroan, dilakukan evaluasi kembali terhadap alasan keberadaan Perseroan (*reason for being*), tujuan Perseroan (*fundamental purpose*) serta mengkomunikasikan manfaat Perseroan (*value*).

MISI JASA MARGA

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Jalan Tol.
2. Menyediakan Jalan Tol yang Efisien dan Andal.
3. Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa

Arti dari Misi Perseroan adalah bahwa Perseroan secara sadar memahami keberadaan Perseroan dalam kegiatan usaha pengembangan dan pengoperasian jalan tol, mempunyai tugas untuk mewujudkan percepatan pembangunan jalan tol untuk mendukung program pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintah. Selain itu, Perseroan juga memahami bahwa keberadaan jalan tol yang dikelola oleh Perseroan harus memberikan manfaat bagi pengguna jalan yang membutuhkan jalan tol yang efisien dan andal serta membutuhkan kelancaran distribusi barang dan jasa.

Strategi Jasa Marga

STRATEGI UTAMA

Untuk mencapai Visi dan Misinya, Perseroan menetapkan 3 strategi utama sebagai berikut:

- a. Pengembangan Bisnis Jalan Tol
 - Menambah panjang jalan tol untuk meningkatkan nilai Perseroan dan untuk tetap mempertahankan pangsa pasar paling sedikit 50% panjang jalan tol.
- b. Pengoperasian Jalan Tol
 - Mengoperasikan jalan tol yang efisien, aman, dan bermutu tinggi untuk meningkatkan kinerja operasional.
 - Memberikan pelayanan yang ekselen bagi pengguna jalan, masyarakat, dan Pemerintah.
- c. Pengembangan Bisnis Lain
 - Mengembangkan usaha lain yang secara strategis memperkuat strategi pengembangan dan pengoperasian jalan tol.
 - Meningkatkan pendapatan usaha dengan memanfaatkan sumber daya Perseroan.

STRATEGI PENDUKUNG

- a. Pengendalian Keuangan
 - Pengendalian keuangan untuk meningkatkan nilai Perseroan, mendukung pertumbuhan Perseroan dan mempertahankan financial sustainability.
- b. Organisasi dan Human Capital
 - Peningkatan kompetensi dan penyiapan kader pimpinan serta karyawan bertalenta yang mendukung transformasi organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan Perseroan.
- c. Teknologi Informasi dan Rekayasa Teknik
 - Rekayasa teknik dan implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kinerja Perseroan.
- d. Kepatuhan dan Manajemen Risiko
 - Pengelolaan risiko dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai Perseroan.

Evaluasi Pelaksanaan RJPP 2013-2015

Sejak ditetapkannya Visi dan Misi Perseroan pada tahun 2013, Perseroan melakukan langkah-langkah strategis guna tercapainya Visi tahun 2017 "Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia".

Secara berkala, Perseroan melakukan review terhadap Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Review RJPP dianggap penting mengingat semakin pesatnya perkembangan industri jalan tol di Indonesia. Pada tahun 2014 dan 2015 dilakukan review pada aspek berikut:

Pengembangan Usaha

- Pengembangan Usaha Jalan Tol
 - Pada tahun 2015, Perseroan berhasil menambah 3 hak konsesi jalan tol dengan diakuisisinya Jalan Tol Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, dan Cinere-Serpong. Dengan penambahan 3 ruas jalan tol tersebut, maka Perseroan memiliki hak konsesi jalan tol sepanjang 987 km dengan panjang jalan tol beroperasi sepanjang 590 km. Hal ini menjadikan Perseroan tetap sebagai leader dalam industri jalan tol Indonesia dengan menguasai pangsa pasar jalan tol beroperasi sebesar 63% dari total seluruh panjang jalan tol beroperasi di Indonesia.

- Pengembangan Usaha Lain
 - Untuk mendukung bisnis jalan tol yang terus berkembang ke depan, pada tahun 2015, Perseroan membentuk PT Jasa Layanan Operasi yang bergerak di bisnis pengoperasian jalan tol baik jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan maupun Badan Usaha Jalan Tol lain.

Operasional

Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jalan tol dengan mengoperasikan jalan tol yang efisien, aman dan bermutu dengan terus menambahkan Gardu Tol Otomatis (GTO), Papan Informasi Lalu Lintas (VMS), CCTV dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Keuangan

Untuk mendukung pendanaan, Perseroan telah menerbitkan Obligasi sebesar Rp 2,1 triliun pada tahun 2013 dan Rp 1 triliun pada tahun 2014 yang dipergunakan untuk ekspansi jalan tol dan refinancing obligasi jatuh tempo. Sementara di tengah meningkatnya suku bunga di tahun 2015, Perseroan menunda penerbitan obligasi dan melakukan pinjaman kredit modal kerja untuk pendanaan Perseroan dikarenakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis jalan tol ke depan, Perseroan berkomitmen untuk mempersiapkan kader dengan melakukan rekrutmen karyawan baru serta melakukan pendidikan dan pelatihan hingga memberikan beasiswa kepada karyawan berprestasi.

Dengan usaha-usaha tersebut, Perseroan optimis mampu menggapai visi tahun 2017 "Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia".

Tata Nilai dan Budaya Jasa Marga

Untuk mencapai Visi dan menjalankan Misinya, Jasa Marga telah menyusun Tata Nilai yang menjadi pedoman prinsip (*guiding principles*) dalam berperilaku (*behavior*) dan membuat keputusan (*decision making*). Untuk itu, Jasa Marga membangun Tata Nilai atas dasar empat nilai pokok yang diakui dan dikembangkan bersama, yaitu **JSMR (Jujur – Sigap – Mumpuni – Respek)**.

Tata Nilai ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan Keputusan Direksi No. 50/KPTS/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan. Sebagai suatu bentuk keseriusan dan untuk memantau efektivitas penerapan tata nilai perseroan, dibuat suatu pedoman sosialisasi dan evaluasi Visi, Misi dan Tata Nilai perusahaan yang tertuang pada Keputusan Direksi No. 173/KPTS/2014 tanggal 15 Oktober 2014.

Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) yang Dimiliki Perseroan

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan berhasil dilaksanakan apabila disokong oleh budaya perusahaan yang kuat. Pendekatan internalisasi budaya dilakukan melalui intervensi pada ketiga aspek yaitu kepemimpinan, sistem dan karyawan. Dengan pendekatan tersebut, budaya Jasa Marga selain tertulis dalam kebijakan dan prosedur, juga menjadi suatu disiplin (*soft skills*) yang dipraktikkan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

EMPAT NILAI POKOK JASA MARGA YANG DIAKUI DAN DIKEMBANGKAN BERSAMA, SERTA DIGUNAKAN SEBAGAI LANDASAN INSAN JASA MARGA DALAM BERINTERAKSI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

J | JUJUR

Jasa Marga dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu JUJUR, adil, transparan dan bebas dari benturan kepentingan.

S | SIGAP

Jasa Marga SIGAP melayani pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dengan bertindak peduli dan proaktif serta tetap mengedepankan kehati-hatian.

M | MUMPUNI

Jasa Marga MUMPUNI dalam bekerja atas dasar kompetensi, konsisten dan inovatif.

R | RESPEK

Jasa Marga RESPEK terhadap pemangku kepentingan dalam bersinergi mencapai prestasi.



Untuk menyesuaikan dengan arah pertumbuhan dan pengembangan jangka panjang perusahaan dimana potensi bisnis jalan tol untuk masa yang akan datang masih besar, serta untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan, maka Tata Nilai Jasa Marga pada tahun 2013 diubah menjadi: Jujur, Sigap, Mumpuni, dan Respek. Empat Nilai inilah yang menjadi landasan dalam interaksi Insan Jasa Marga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pokok-pokok Budaya Jasa Marga

Perseroan telah menetapkan Tata Nilai Jasa Marga sebagai budaya perusahaan yang menjadi landasan dalam interaksi Insan Jasa Marga dengan para *stakeholders*. Penjabaran Tata Nilai Jasa Marga berdasarkan Keputusan Direksi Jasa Marga No. 08/KPTS/2016 tentang Penjabaran Tata Nilai PT Jasa Marga (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:

PENJABARAN TATA NILAI JSMR SEBAGAI BUDAYA PERSEROAN

Tata Nilai	Definisi	Penjabaran
J JUJUR	Jasa Marga dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu JUJUR, adil, transparan dan bebas dari benturan kepentingan.	<p>Jujur: Semangat integritas dari hati nurani, bukan hanya mematuhi peraturan.</p> <p>Adil: Menjunjung tinggi kesetaraan dan fairness.</p> <p>Transparan dan Bebas dari Benturan Kepentingan: Independen dan obyektif.</p>
S SIGAP	Jasa Marga SIGAP melayani pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dengan bertindak peduli dan proaktif serta tetap mengedepankan kehati-hatian.	<p>Sigap Melayani: Bertindak dengan semangat tinggi dalam melayani.</p> <p>Peduli: Memberikan perhatian dengan penuh empati.</p> <p>Proaktif dengan Mengedepankan Kehati-hatian: Mempersiapkan tindakan ke depan dengan mempertimbangkan risiko.</p>
M MUMPUNI	Jasa Marga MUMPUNI dalam bekerja atas dasar kompetensi, konsisten dan inovatif.	<p>Kompeten: Memiliki kemampuan dan kemauan melaksanakan pekerjaan.</p> <p>Konsisten: Berani bersikap dan menjadi teladan (<i>role model</i>).</p> <p>Inovatif: Mengembangkan gagasan untuk melakukan perbaikan berkesinambungan.</p>
R RESPEK	Jasa Marga RESPEK terhadap pemangku kepentingan dalam bersinergi mencapai prestasi.	<p>Respek: Menghargai pihak lain secara proporsional.</p> <p>Sinergi dalam mencapai prestasi: Menjunjung tinggi kerjasama kelompok dan mengelola keberagaman untuk memberi nilai tambah.</p>

Sosialisasi Tata Nilai Perseroan

Untuk menjamin penerapan Tata Nilai JSMR tersebut ke dalam kegiatan Perseroan sehari-hari, Perseroan secara terus-menerus melakukan sosialisasi kepada segenap Insan Jasa Marga. Penyebaran dan sosialisasi tata nilai ini dilakukan melalui situs internal dan eksternal Perseroan, penayangan slide tata nilai di setiap kegiatan pelatihan ataupun rapat, pemasangan *banner* di tempat-tempat strategis di Perseroan.

TUJUAN IMPLEMENTASI TATA NILAI JSMR



Beberapa program yang telah dilakukan pada tahun 2015 adalah:

1. Kewajiban pencantuman Tata Nilai Perseroan dalam dokumen pengadaan barang/jasa di lingkungan Perseroan dan pada saat dilakukannya *aanwijzing* (rapat penjelasan).
2. Dilakukannya evaluasi Visi, Misi dan Tata Nilai Perseroan pada seluruh unit kerja dan Cabang. Evaluasi mencakup evaluasi pemahaman terhadap Visi, Misi dan Tata Nilai serta evaluasi terhadap tingkat efektivitas sosialisasi Visi, Misi dan Tata nilai.
3. Dilakukannya penjabaran Visi, Misi dan Tata Nilai sampai dengan tingkat operasional oleh konsultan.
4. Sosialisasi dan survey pemahaman dan efektifitas sosialisasi Keputusan Direksi No. 173/KPTS/2014 tanggal 15 Oktober 2014 perihal pedoman sosialisasi dan evaluasi Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan pada Oktober 2014.

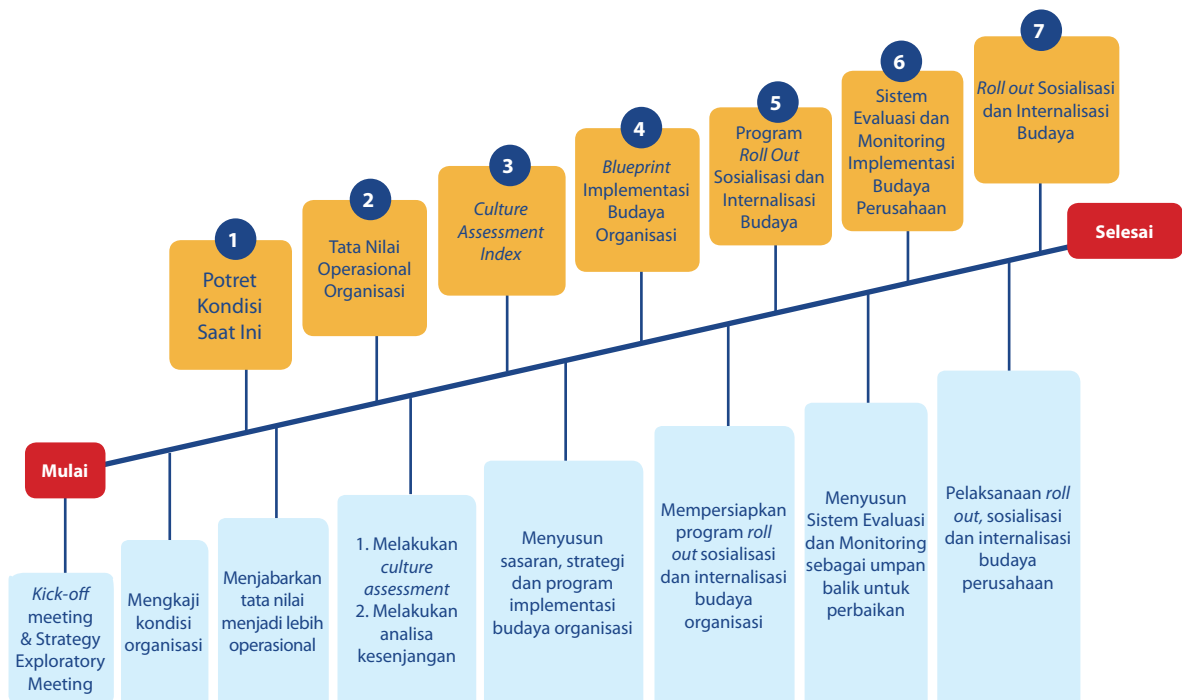
Program peluncuran awal Tata Nilai JSMR telah dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2014 sesuai dengan SK Direksi No. 173/KPTS/2014, baik secara langsung maupun berjenjang (*cascading*), namun belum diukur efektifitasnya. Dengan bantuan Konsultan Manajemen, maka tanggal 06-22 Maret 2015 telah dilakukan *Culture Assessment* (Pengukuran Budaya) secara *online* yang ditujukan kepada seluruh responden Jasa Marga, dengan mempertimbangkan upaya sosialisasi dan internalisasi yang telah dilakukan oleh Jasa Marga beberapa waktu yang lalu.

Culture Assessment (Pengukuran Budaya) JSMR lebih dititikberatkan kepada:

1. Pengenalan (*awareness*).
2. Pemahaman (*understanding*).
3. Indeks Budaya.

Selanjutnya *Culture Assessment* (Pengukuran Budaya) JSMR akan dilakukan secara berkala setiap tahun untuk mengevaluasi dan memantau perkembangan implementasi Tata Nilai JSMR. Dengan demikian semua kegiatan terkait dengan implementasi Tata Nilai JSMR dapat terukur efektifitasnya dan dapat dipahami kelebihan serta kekurangannya sehingga terkelola dengan baik.

TAHAPAN IMPLEMENTASI BUDAYA



Dengan mempertimbangkan hasil *Culture Assessment* (Pengukuran Budaya) JSMR tersebut, Perseroan merancang program peluncuran ulang penjabaran JSMR yang bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat dalam menerapkan JSMR lebih lanjut dengan memperhatikan upaya sosialisasi dan internalisasi yang telah dilakukan dinilai cukup berhasil dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PENGUKURAN BUDAYA JSMR TAHUN 2015

Tingkat	Hasil (%)
Tingkat Pengenalan (<i>awareness</i>)	91,11
Tingkat Pemahaman (<i>understanding</i>)	27,43
Indeks Budaya	78,12

Sekilas Jasa Marga

Perjalanan Penting Jasa Marga

1978



- Jasa Marga didirikan dengan bidang usaha pengelolaan, pemeliharaan dan pengadaan jaringan jalan tol.
- Jagorawi sebagai jalan tol pertama di Indonesia mulai beroperasi.

1983



1984

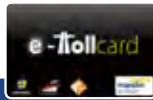
Pengoperasian
Jalan Tol
Semarang.

- Pengoperasian Jalan Tol Jakarta-Tangerang.
- Pengoperasian Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo. (Jalan Tol Bandara)

1986

- Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Gempol.
- Pengoperasian Jalan Tol Belmera (Belawan-Medan-Tanjung Morawa).

2009



- Pengoperasian Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (Seksi 1 Ruas Sentul Selatan-Kedung Halang).
- Implementasi e-Toll Card.
- Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Cengkareng-Kunciran.
- Akuisisi Jalan Tol Surabaya - Mojokerto

2011

- Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Seksi 1A Ruas Waru-Sepanjang) dan Jalan Tol Semarang-Solo (Seksi 1 Ruas Semarang-Ungaran).
- Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa.

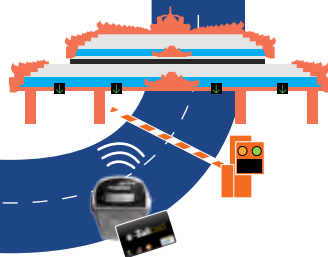
- Pengoperasian Jalan Tol Semarang-Solo (Seksi 2 Ruas Ungaran-Bawen), Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (Seksi 2A Kedung Halang-Kedung Badak) dan Jalan Tol JORR W2 Utara (Ruas Ciledug-Ulujami).
- Memenangkan tender hak pengusahaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

2013

Pengoperasian Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Jalan Tol Bali Mandara) dan Jalan Tol JORR W2 Utara (Ruas Kebon Jeruk-Ciledug).

2012

Implementasi e-Toll Pass.



2014



1987



1988

1990

1991

- Pemerintah membuka kesempatan pihak swasta berpartisipasi dalam mengoperasikan jalan tol melalui sistem Build, Operate and Transfer (BOT) dengan Jasa Marga.
- Jalan Tol Dalam Kota mulai dioperasikan oleh Jasa Marga secara bertahap.

Pengoperasian Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Pengoperasian Jalan Tol Padaleunyi (Padalarang-Cileunyi).

Pengoperasian Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (Seksi S Ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung).



2008



Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Kunciran-Serpong.

1998

Pengoperasian Jalan Tol Palikanci (Palimanan-Kanci).

2003

Pengoperasian Jalan Tol Cipularang (Cikampek-Purwakarta-Padalarang).

2004

Fungsi Otorisator dikembalikan kepada Pemerintah (Departemen Pekerjaan Umum c.q. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).



2007



- Perubahan Logo Jasa Marga yang Menggambarkan Modernisasi dan Transformasi Perseroan.
- Jasa Marga menjadi perusahaan terbuka melalui Initial Public Offering (IPO) dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.
- Jalan tol JORR terintegrasi dari Ulujami-Cilincing.

2006

Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Bogor Outer Ring Road, PPJT Semarang-Solo, PPJT Gempol-Pasuruan, PPJT Gempol-Pandaan, PPJT JORR W2 Utara, PPJT Surabaya-Mojokerto dan 13 ruas jalan tol yang telah dioperasikan oleh Perseroan.

2015

- Akuisisi Jalan Tol Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, dan Cinere-Serpong
- Pengoperasian Jalan Tol Gempol-Pandaan



Riwayat Singkat Jasa Marga

1985



2015



Pertumbuhan Wilayah di sekitar Semanggi, Jakarta

DASAR PENDIRIAN

Untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan jaringan jalan yang handal. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 04 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan, pemeliharaan dan pengadaan jaringan jalan tol, serta ketentuan-ketentuan pengusaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 04 tahun 1978 juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/KMK.06/1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga tanggal 27 Februari 1978).

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 01 Maret 1978, dengan nama, "PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation)", yang kemudian diubah berdasarkan Akta No. 187 tanggal 19 Mei 1981 dan nama Perseroan diubah menjadi "PT Jasa Marga (Persero)", keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH., pada saat itu Notaris di Jakarta.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 12 September 2007 tentang perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, perubahan nilai nominal dan klasifikasi saham, perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan perubahan nama Perseroan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporatama) Tbk. atau PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Keputusan mengenai perubahan seluruh Anggaran Dasar tersebut dinyatakan dalam Akta No. 27 tanggal 12 September 2007 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. W7- 10487 HT.01.04-TH.2007 tanggal 21 September 2007.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan Anggaran Dasar terakhir telah diumumkan dalam Tambahan No. 27404 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Desember 2008 No. 100 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33 tanggal 05 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Wasito, SH., Notaris di Jakarta sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-20228. AH.01.02 tahun 2011 tanggal 21 April 2011, dan terakhir diubah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 95 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris

di Jakarta dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-25313 tanggal 10 Juli 2012, dan terakhir diubah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 dan No. 61 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito., SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0019734 tanggal 27 Maret 2015.

Perubahan Nama Perseroan

Selain perubahan nama terkait perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, Perseroan tidak pernah melakukan perubahan nama.

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang perusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol.
2. Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatot) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatot untuk tempat istirahat dan pelayanan, berikut dengan fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya.

Kegiatan usaha tersebut dilakukan Perseroan melalui proses merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol.

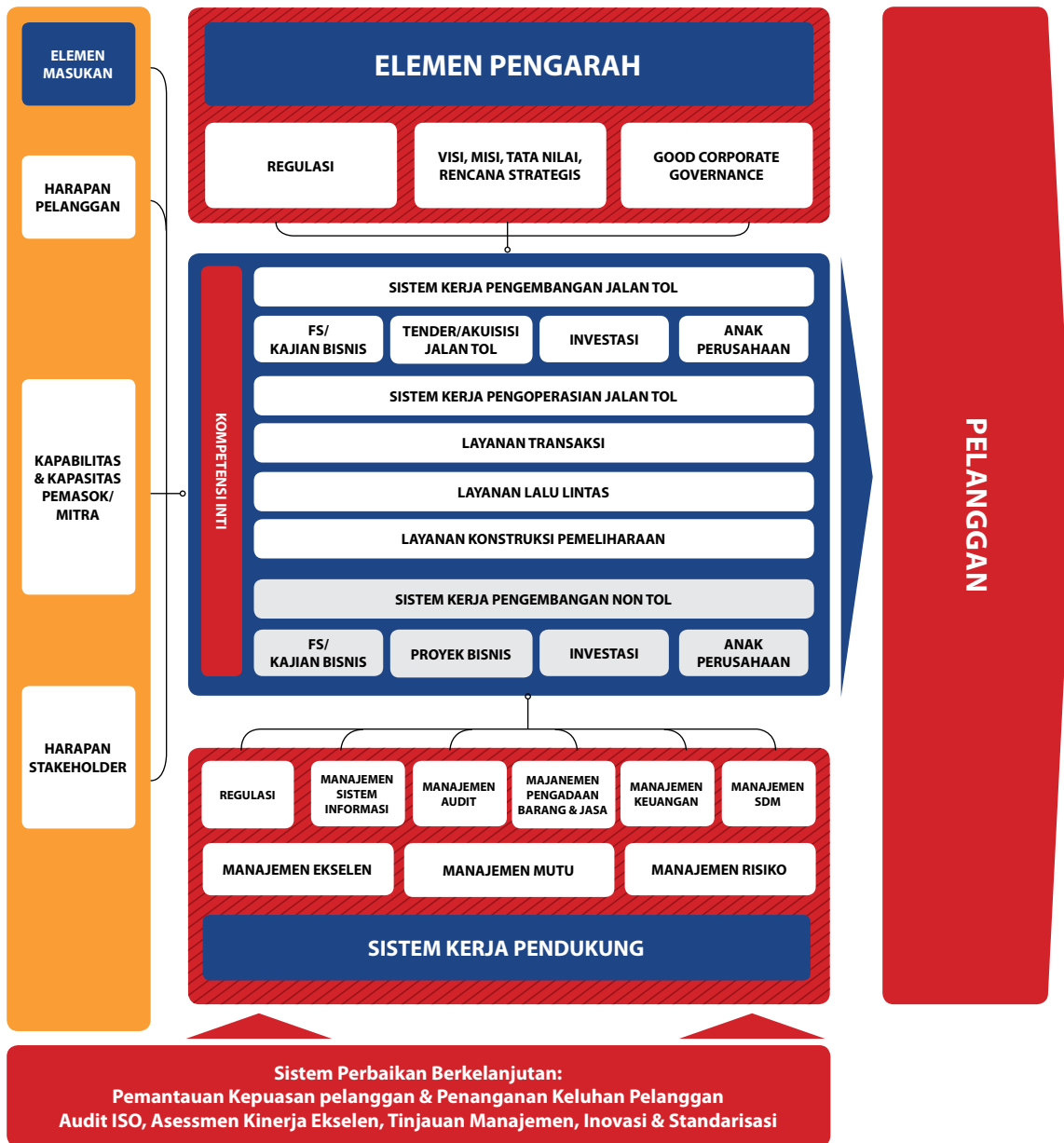
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, selain melakukan kegiatan usaha utama, Perseroan juga melakukan kegiatan usaha penunjang, yaitu:

1. Bidang pengembangan properti di wilayah yang berdekatan dengan koridor jalan tol.
2. Bidang pengembangan jasa untuk usaha-usaha yang terkait dengan moda-moda/sarana transportasi, pendistribusian material cair/padat/gas, jaringan sarana informasi, teknologi dan komunikasi, terkait dengan koridor jalan tol.
3. Bidang jasa dan perdagangan untuk layanan konstruksi, pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol.

Proses Bisnis Jasa Marga

PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah memiliki proses bisnis yang saling terintegrasi di dalam mengoperasikan dan membangun jalan tol di Indonesia demi memberikan nilai tambah bagi para stakeholders termasuk pelanggan. Adapun sistem kerja utama terdiri dari 3 (tiga) sistem yaitu Sistem Kerja Pengembangan Jalan Tol, Sistem Kerja Pengoperasian Jalan Tol, dan Sistem Kerja Pengembangan Non Tol.

Sistem utama tersebut memperhatikan 3 (tiga) elemen masukan yaitu Harapan Pelanggan, Kapabilitas dan Kapasitas Pemasok Mitra, serta Harapan Stakeholders. Sistem utama tersebut ditopang oleh sistem kerja pendukung sebagaimana dijelaskan dalam gambar dibawah ini yaitu Regulasi, Manajemen Sistem Informasi, Manajemen Audit, Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen Ekselen, Manajemen Mutu dan Manajemen Risiko.



PRODUK YANG DITAWARKAN

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan jaringan jalan yang handal. Melalui Peraturan Pemerintah No. 04 tahun 1978, pada tanggal 01 Maret 1978, Pemerintah mendirikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tugas utama Jasa Marga adalah merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum bukan tol. Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagaimana tercermin dalam Visi dan Misinya, Jasa Marga menawarkan jasa layanan jalan tol yang meliputi pengembangan dan pengoperasian jalan tol.

KOMPETENSI INTI

Kompetensi Inti Perseroan saat ini sampai dengan tahun 2017 adalah perusahaan yang unggul dalam investasi pengembangan jalan tol dan inovatif dalam pengoperasian, dengan tata kelola yang baik. Kompetensi Inti Perseroan tahun 2017-2022 adalah perusahaan pengembangan dan pengoperasian jalan tol yang Unggul dan Inovatif berbasis teknologi terkini.

PROFIL TENAGA KERJA

Jumlah karyawan Perseroan terus menurun dari tahun 2008. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan produktivitas melalui modernisasi dan perbaikan proses bisnis hingga jumlah karyawan tetap dapat diturunkan mencapai rasio karyawan yang ideal.

Sekitar 70% dari total karyawan tetap adalah karyawan yang berada pada level operasional, hal ini disebabkan karena sebagian besar sistem pengoperasian jalan tol masih menggunakan teknologi yang masih harus didukung oleh orang. Oleh sebab itu, pada segmen tingkat pendidikan karyawan Perseroan, mayoritas karyawan Perseroan merupakan lulusan SMA.

PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan mempunyai 4 (empat) Pemangku Kepentingan Utama (*Key Stakeholders*) dan 3 (tiga) Pemangku Kepentingan Pendukung yang juga mempunyai peran penting dalam mencapai sasaran bisnis Perseroan.

Pemangku Kepentingan Utama

1. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)
BPJT adalah lembaga Pemerintah di bawah Departemen Pekerjaan Umum yang memiliki kewenangan sebagai otorisator pengelolaan jalan tol di Indonesia. BPJT mempunyai peran penting bagi kepentingan bisnis Perseroan, karena

BPJT menentukan besaran dan kelayakan kenaikan tarif jalan tol setiap 2 (dua) tahun sekali yang didasarkan oleh pertimbangan inflasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu BPJT juga berwenang dalam melakukan lelang terhadap ruas-ruas jalan tol baru serta berwenang dalam pemantauan dan evaluasi perusahaan jalan tol dan pengawasan pelayanan jalan tol.

2. Kementerian BUMN

Kementerian BUMN merupakan pemangku kepentingan penting bagi Perseroan karena Kementerian BUMN adalah lembaga yang bertugas melakukan pembinaan BUMN dan sekaligus sebagai pemegang saham pengendali Perseroan yang menguasai 70% saham Perseroan. Kementerian BUMN berkepentingan meningkatkan Tata Kelola Perusahaan agar kinerja Perseroan semakin baik yang dicerminkan semakin meningkatnya peningkatan pelayanan, peningkatan Aset dan Laba Bersih serta peningkatan Dividen yang dapat disetor Perseroan kepada Pemegang Saham.

3. Pemegang Saham Publik

Selaku perusahaan terbuka, Pemegang Saham Publik yang menguasai 30% saham Perseroan merupakan salah satu pemangku kepentingan utama Perseroan. Pemegang Saham Publik merupakan salah satu penentu harga saham Perseroan, dimana tinggi/rendahnya harga saham Perseroan dapat mencerminkan Nilai Perseroan di mata Investor.

4. Pengguna Jalan Tol

Selaku pengembang dan operator jalan tol, Pendapatan Usaha terbesar Perseroan berasal dari Pendapatan Tol yang dihasilkan dari pendapatan atas layanan pemakaian jalan tol oleh pengguna jalan tol. Jumlah pengguna jalan tol merupakan salah satu penentu tercapai atau tidaknya target Pendapatan Tol.

Pemangku Kepentingan Pendukung:

1. Karyawan

Bagi Perseroan, karyawan merupakan aset penting yang akan mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan Perseroan, karena karyawan merupakan salah satu pemangku kepentingan yang menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan juga melakukan inovasi untuk meningkatkan Aset, Pendapatan dan Laba Perseroan.

2. Mitra Usaha

Dalam menjalankan usahanya Perseroan tidak terlepas dari kerja sama dengan mitra untuk mendukung kelancaran proses bisnisnya, baik dari sisi pengembangan bisnis jalan tol

dan pengoperasian jalan tol. Mitra usaha Perseroan antara lain adalah Kontraktor/Konsultan/Rekanan Penyedia Layanan Jasa Pembangunan Jalan Tol, Penyedia Jasa Pemeliharaan Jalan Tol, Penyedia Jasa Peralatan Tol.

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu elemen pendukung keberhasilan Perseroan khususnya dalam rangka pembebasan lahan. Berbagai kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilakukan untuk dapat meningkatkan citra Perseroan.

SEGMENTASI PELANGGAN

Pelanggan utama Perseroan adalah Pengguna Jalan Tol, dan Segmen Pasar Utama Perseroan adalah pengguna kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beraktivitas di sekitar jalan tol yang bersangkutan.

Perkembangan Industri Jalan Tol di Indonesia

1978

Sejarah perkembangan industri jalan tol di Indonesia dimulai ketika pada tahun 1978, Jalan Tol Jagorawi resmi dioperasikan untuk pertama kalinya. Pembangunan Jalan Tol Jagorawi, yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi, dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri, yang diserahkan kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai penyertaan modal.

1980

Pada akhir dasawarsa tahun 1980-an Pemerintah Indonesia mulai mengikutsertakan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol melalui mekanisme Build, Operate and Transfer (BOT).

2004

Penerbitan Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan yang menggantikan Undang Undang No. 13 tahun 1980 serta terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 yang mengatur lebih spesifik tentang jalan tol, terjadi perubahan mekanisme bisnis jalan tol di antaranya adalah dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator industri jalan tol di Indonesia, serta penetapan tarif tol oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan penyesuaian setiap dua tahun berdasarkan angka inflasi.

Perkembangan Usaha Jasa Marga

Pada awal berdirinya, Perseroan berperan tidak hanya sebagai operator tetapi memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987 Perseroan adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol di Indonesia yang pengembangannya dibiayai Pemerintah dengan dana berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi Jasa Marga. Sebagai jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh Perseroan, Jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di Tanah Air yang mulai dioperasikan sejak tahun 1978.

Pada dasawarsa tahun 1990-an Perseroan lebih berperan sebagai lembaga otoritas yang memfasilitasi investor-investor swasta yang sebagian besar ternyata gagal mewujudkan proyeknya. Beberapa jalan tol yang diambil alih Perseroan antara lain adalah JORR (Jakarta Outer Ring Road) dan Cipularang.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 yang mengatur tentang jalan tol, peran otorisator dikembalikan dari Perseroan kepada Pemerintah. Sebagai konsekuensinya, Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol yang akan mendapatkan ijin penyelenggaraan tol dari Pemerintah.

Pembangunan dan pengoperasian jalan tol sejak saat itu didasarkan kepada konsep investasi dimana Perseroan sebagai investor akan berinvestasi pada jalan-jalan tol yang mempunyai tingkat kelayakan pengembalian secara finansial sesuai dengan masa konsesi. Proses untuk mendapatkan konsesi jalan tol baru juga harus melalui pembentukan entitas bisnis usaha tersendiri. Perolehan konsesi jalan tol didapatkan melalui tiga cara yaitu dengan berpartisipasi dalam tender ruas jalan tol yang diselenggarakan oleh pemerintah, akuisisi dengan menambah kepemilikan saham pada ruas-ruas tol potensial dan *unsolicited way* dimana Perseroan mengajukan kepada pemerintah untuk membangun suatu ruas jalan tol yang tidak terdapat dalam rencana pemerintah.

Untuk mendukung ekspansi dan pengembangan Perseroan, Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) sejak Pemerintah melepas 30% sahamnya kepada masyarakat pada tanggal 12 November 2007.

PERKEMBANGAN USAHA TOL

Melalui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang ditandatangani pada tanggal 07 Juli 2006, 13 (tiga belas) ruas jalan tol Perseroan yang sudah beroperasi saat itu mempunyai masa konsesi selama 40 tahun berlaku efektif sejak 01 Januari 2005, dengan pengecualian PPJT JORR Seksi S yang pada tahun 2013, Jasa Marga telah ditunjuk sebagai operator sementara berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 80.1/KPTS/M/2013 tentang Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR S). Dalam perkembangannya, Perseroan terus melakukan upaya untuk menambah kepemilikan konsesi jalan tol baru. Sejak tahun 2006, Perseroan telah menandatangani 6 (enam) perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) yaitu Jalan Tol Bogor Outer Ring Road yang konsesinya dipegang oleh PT Marga Sarana Jabar, Jalan Tol Semarang-Solo oleh PT Trans Marga Jateng, Jalan Tol Gempol-Pasuruan oleh PT Transmarga Jatim Pasuruan, PPJT Gempol-Pandaan oleh PT Jasamarga Pandaan Tol, Jalan Tol JORR W2 Utara oleh PT Marga Lingkar Jakarta, dan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto oleh PT Marga Nujyasumo Agung.

Selain terus berupaya menambah jumlah konsesi jalan tol baru, Perseroan juga menambah porsi kepemilikan di Anak Perusahaan pemegang konsesi jalan tol. Tahun 2009, Perseroan meningkatkan penyertaan kepemilikan saham dan menjadi pemegang saham mayoritas pada PT Marga Kunciran Cengkareng, pemegang konsesi Jalan Tol Cengkareng-Kunciran; PT Marga Trans Nusantara, pemegang konsesi Jalan Tol Kunciran-Serpong; dan PT Marga Nujyasumo Agung, pemegang konsesi Jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang mempunyai masa konsesi 35 tahun. Tahun 2011, Perseroan meningkatkan penyertaan kepemilikan saham hingga menjadi pemegang saham mayoritas dengan melakukan pembelian saham pemegang saham eksisting pada PT Marga Bumi Adhikaraya sebagai pemilik konsesi Jalan Tol Gempol-Pandaan dengan masa konsesi 35 tahun. Selain itu, bersama konsorsium 4 (empat) BUMN, BUMD dan Pemerintah Daerah, Perseroan ditunjuk sebagai pemrakarsa proyek Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa di Bali dengan masa konsesi 45 tahun.

Pada tahun 2014, bersama 3 (tiga) konsorsium BUMN, Perseroan memenangkan tender pengusahaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2014 melalui Anak Perusahaan yang dibentuk Perseroan dengan beberapa partner usaha dimana Perseroan mempunyai kepemilikan mayoritas lebih dari 51%, Perseroan memiliki tambahan 10 (sepuluh) ruas jalan tol baru dengan panjang 273 km.

Sedangkan pada tahun 2015, Perseroan mengakuisisi Jalan Tol Solo-Ngawi, Jalan Tol Ngawi-Kertosono, dan Jalan Tol Cinere-Serpong. Sehingga sampai dengan 31 Desember 2015, melalui 9 (sembilan) Cabang dan 13 (tiga belas) Anak Perusahaan di bidang usaha jalan tol, Perseroan adalah pemegang konsesi untuk 26 ruas jalan tol yang 19 ruas di antaranya dengan panjang 590 km telah beroperasi, termasuk empat ruas baru yang dioperasikan secara bertahap yaitu Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Ruas Sentul Selatan-Kedung Badak (5,9 km); Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Semarang-Bawen (23,1 km); Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Ruas Waru-Sepanjang (2,3 km) dan Ruas Krian-Mojokerto (18,6 km); serta mengoperasikan secara penuh Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (10 km); Jalan Tol JORR W2 Utara (7,7 km); dan Jalan Tol Gempol-Pandaan (13,61 km). Sehingga sampai dengan akhir tahun 2015, Perseroan menguasai 63% pangsa pasar industri jalan tol dari segi panjang jalan (km) di Indonesia.

PERKEMBANGAN USAHA LAINNYA

Selain bergerak dalam bisnis jalan tol, Perseroan juga melakukan beberapa kegiatan usaha lain untuk mensinergikan dan memaksimalkan pengembangan aset-aset yang dimiliki Perseroan. Kegiatan usaha tersebut diperkuat dengan mendirikan tiga entitas anak perusahaan yaitu PT Jasa Layanan Pemeliharaan (JLP), dahulu PT Sarana Marga Utama, yang didirikan pada tahun 1988 dan diakuisisi sejak tahun 2010 bergerak dalam bidang jasa konstruksi, perdagangan dan persewaan kendaraan dan PT Jasamarga Properti yang didirikan pada tahun 2013 dan bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa terkait properti. Pada kedua entitas tersebut, Perseroan merupakan pemegang saham mayoritas serta PT Jasa Layanan Operasi yang didirikan pada tahun 2015 dan bergerak dalam bidang usaha layanan pengoperasian Jalan Tol.

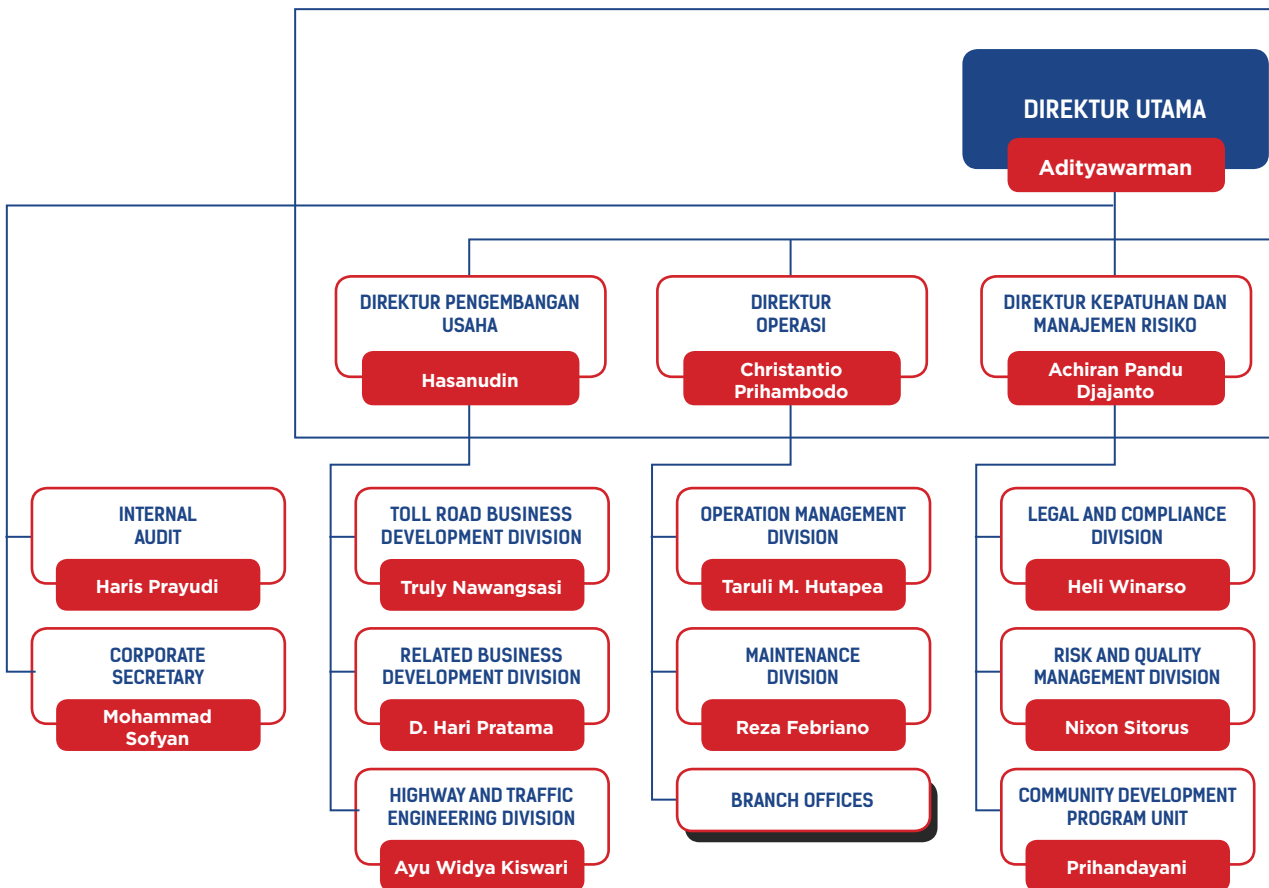
Berdasarkan jenis usaha yang dilakukan maka pendapatan usaha Perseroan berasal dari transaksi kendaraan yang melewati jalan tol (pendapatan tol) dan pendapatan usaha lain yang terdiri dari sewa lahan, pendapatan iklan, tempat peristirahatan dan jasa pengoperasian jalan tol pihak lain serta jasa pemeliharaan.

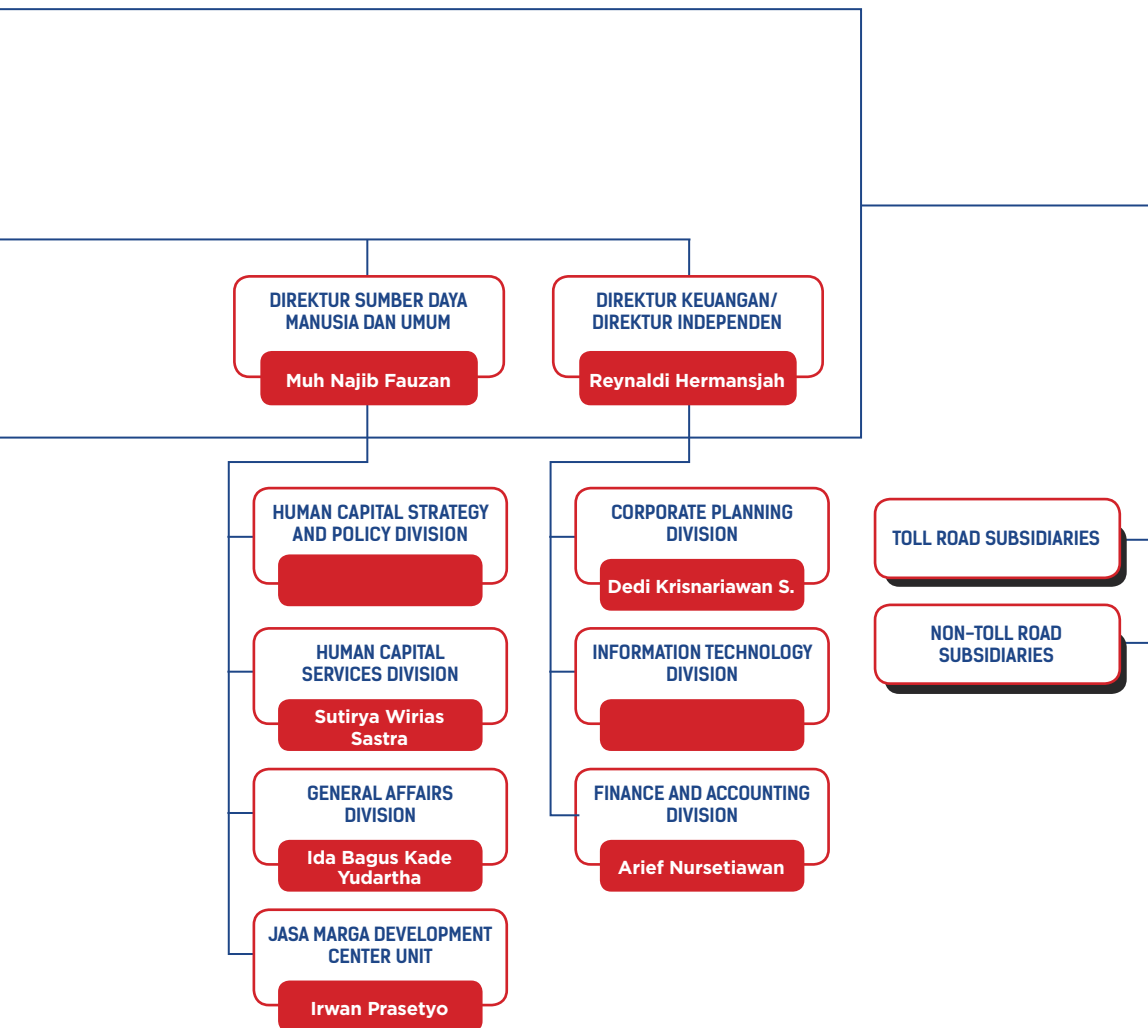
Struktur Organisasi

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta rencana strategis bisnis Perseroan dan sesuai dengan kebijakan strategis di bidang human capital yang berbasis pada kompetensi, Perseroan memerlukan organisasi yang merupakan pengelompokan fungsi dengan pendekatan *hard* dan *soft competencies* untuk menunjang efektifitas dan kinerja organisasi.

Struktur Organisasi Jasa Marga

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 70/KPTS/2015 tanggal 01 April 2015

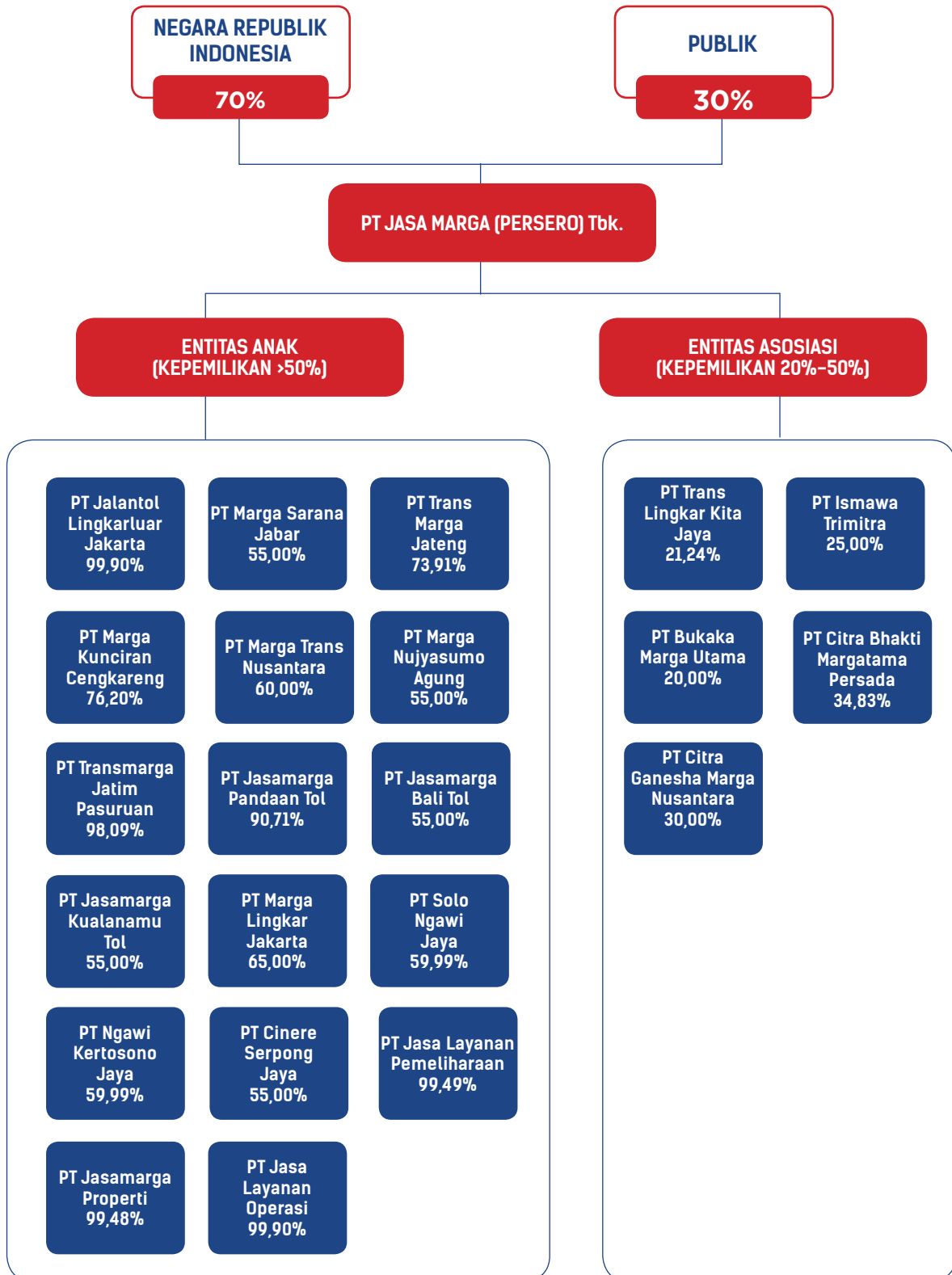




Pemegang Saham Utama, Entitas Anak & Entitas Asosiasi

Struktur Korporasi Grup Jasa Marga

(per 31 Desember 2015)



Entitas Anak

ENTITAS ANAK JASA MARGA (PER 31 DESEMBER 2015)

No.	Nama Entitas	Kepemilikan Saham	Bidang Usaha	Status*
1	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 99,90% Inkopkar Jasa Marga: 0,1% 	Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jakarta Outer Ring Road	Beroperasi
2	PT Marga Sarana Jabar	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 55,00% PT CMNP Tbk: 30,00% PT Jasa Sarana: 15,00% 	Pengusahaan Jalan Tol Ruas Bogor Outer Ring Road	Beroperasi
3	PT Trans Marga Jateng	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 73,91% PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah: 1,09% PT Astratel Nusantara: 25,00% 	Pengusahaan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo	Beroperasi
4	PT Marga Kunciran Cengkareng	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 76,20% CMS WL: 21,00% PT Wijaya Karya: 2,10% PT Nindya Karya: 0,28% PT Istaka Karya: 0,42% 	Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cengkareng-Kunciran	Belum Beroperasi
5	PT Marga Trans Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 60,00% PT Astratel Nusantara: 30,00% PT Transumata Arya Sejahtera: 10,00% 	Pengusahaan Jalan Tol Ruas Kunciran-Serpong	Belum Beroperasi
6	PT Marga Lingkar Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 65,00% PT Jakarta Marga Jaya: 35,00% 	Pengusahaan Jalan Tol Ruas JORR W2 Utara	Beroperasi
7	PT Marga Nujyasumo Agung	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 55,00% Moeladi Grup: 25,00% PT Wijaya Karya: 20,00% 	Pengusahaan Jalan Tol Ruas Surabaya-Mojokerto	Beroperasi
8	PT Transmarga Jatim Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 98,09% PT Jatim Marga Utama: 1,91% 	Pengusahaan Jalan Tol Ruas Gempol-Pasuruan	Belum Beroperasi
9	PT Jasamarga Pandaan Tol	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 90,71% Perusahaan Daerah Jalan Tol Kabupaten Pasuruan: 9,29% 	Pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pandaan	Beroperasi
10	PT Jasamarga Bali Tol	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 55,00% PT Angkasa Pura I: 8,00% PT Pelindo III: 17,58% PT Pengembangan Pariwisata Bali: 1,00% PT Adhi Karya: 1,00% PT Hutama Karya: 1,00% Pemerintah Provinsi Bali: 8,01% Pemerintah Kabupaten Badung: 8,01% PT Wijaya Karya: 0,40% 	Pengusahaan Jalan Tol Ruas Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	Beroperasi
11	PT Jasa Marga Kualanamu Tol	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 55,00% PT Waskita Karya: 15,00% PT Pembangunan Perumahan: 15,00% PT Hutama Karya: 15,00% 	Pengusahaan Jalan Tol Ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	Belum Beroperasi
12	PT Solo Ngawi Jaya	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 59,99% PT Waskita Toll Road: 40,00% PT Ferino Putra: 1 lembar saham 	Pengusahaan Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi	Belum Beroperasi
13	PT Ngawi Kertosono Jaya	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 59,99% PT Waskita Toll Road: 40,00% PT Ferino Putra: 1 lembar saham 	Pengusahaan Jalan Tol Ruas Ngawi-Kertosono	Belum Beroperasi
14	PT Cinere Serpong Jaya	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 55,00% PT Waskita Toll Road: 35,00% PT Jakarta Propertindo: 10,00% PT Waskita Karya: 1 lembar saham 	Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cinere-Serpong	Belum Beroperasi
15	PT Jasa Layanan Pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 99,49% Inkopkar Jasa Marga: 0,51% 	Jasa Konstruksi, Pemeliharaan Jalan Tol, Persewaan Kendaraan Tol	Beroperasi
16	PT Jasamarga Properti	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 99,48% Inkopkar Jasa Marga: 0,52% 	Bisnis Pengembangan Properti, serta Perdagangan dan Jasa	Beroperasi
17	PT Jasa Layanan Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Marga: 99,90% Inkopkar Jasa Marga: 0,1% 	Layanan Operasi Jalan Tol	Beroperasi

Keterangan:

*) Status merupakan status pengoperasian jalan tol untuk bidang usaha jalan tol dan status jasa/usaha lain untuk bidang usaha lain.

Tentang Entitas Anak

01



JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA
PENYELENGGARA JALAN TOL JORR
Kelompok Usaha Jasa Marga

1. PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ)

JLJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang bergerak dalam bidang jasa pengoperasian jalan tol. Pendapatan utama JLJ diperoleh dari pengoperasian, pemeliharaan dan pengamanan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR). JLJ didirikan pada tanggal 22 Desember 2000.

IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	130,89	144,34	10,27

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Komisaris Utama: Firmansjah CES
- Komisaris: Ferry Andrianto
- Direktur Utama: Yudhi Krisyunoro
- Direktur: Edwin Cahyadi

02



PT MARGA SARANA JABAR
PENYELENGGARA JALAN TOL BOGOR RING ROAD

2. PT Marga Sarana Jabar (MSJ)

MSJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi 1 sepanjang 3,8 km dioperasikan sejak tanggal 23 November 2009 dan Seksi 2A sepanjang 2 km dioperasikan sejak 04 Juni 2014. MSJ didirikan pada tanggal 11 Mei 2007.

IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	860,38	868,63	0,96

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Komisaris Utama: Dr. Drs. Aggi Tjetje, SKed., SH., SS., SE., SIP, SIKom., MA., MM., CAAE.
- Komisaris: Sarwono Oetomo
- Komisaris: Dyah S.H. Wahyu Sari
- Direktur Utama: Hendro Atmodjo
- Direktur Keuangan: Muhdor Nurohman
- Direktur Teknik & Operasi: George IMP Manurung

03



TRANS MARGA JATENG
PENYELENGGARA JALAN TOL SEMARANG - SOLO
Kelompok Usaha Jasa Marga

3. PT Trans Marga Jateng (TMJ)

TMJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol Semarang-Solo yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Jalan Tol Semarang-Solo Seksi 1 sepanjang 10,8 km telah beroperasi sejak 12 November 2011 dan Seksi 2 sepanjang 12,3 km beroperasi sejak 04 April 2014. TMJ didirikan pada tanggal 07 Juli 2007.

IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	3.729,26	4.038,49	8,29

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Komisaris Utama: Irawan Santoso
- Komisaris: Ir. Reynaldi Hermansjah
- Komisaris: Ir. Sunaryo, MURP, PhD
- Direktur Utama: Ir. Djadja Sudradjat
- Direktur Administrasi & Keuangan: Halim Wahjana
- Direktur Teknik & Operasi: Ir. Ari Irianto

04



PT Marga Nujyasumo Agung (MNA)
SURABAYA-MOJOKERTO TOLL ROAD

4. PT Marga Nujyasumo Agung (MNA)

MNA merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam penyelenggaraan proyek yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. MNA didirikan pada tanggal 19 Agustus 1994. Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1A sepanjang 2,3 km telah beroperasi sejak 05 September 2011.

IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	2.287,88	2.997,76	31,03

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Komisaris Utama: Agung Yunanto
- Komisaris: Raymond Ramanan
- Komisaris: Muh Najib Fauzan
- Direktur Utama: Budi Pramono
- Direktur Keuangan: Syafaruddin A.R.
- Direktur Teknik dan Operasional: Ari Wibowo
- Direktur Administrasi & Umum: Kamil Rusnandar

05



JASAMARGA BALI TOL
HIGHWAY CORPORATION

5. Jasamarga Bali Tol (JBT)

JBT merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang undangan yang berlaku. JBT didirikan pada tanggal 22 Agustus 2011. Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa sepanjang 10 km diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 24 September 2013.

IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	2.074,01	1.984,83	(4,30)

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Komisaris Utama: Abdul Hadi Hs
- Komisaris: I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, M.M.
- Komisaris: I Gusti Putu Nuriata
- Komisaris: I Wayan Suambara
- Komisaris: Ir. Robert Daniel Waloni
- Komisaris: Ir. I Wayan Blayu Suarjaya
- Direktur Utama: Ir. Akhmad Tito Karim
- Direktur Keuangan: Drs. Ronny Haryanto
- Direktur Teknik & Operasional: Ir. Rismarture Sidabutar

06



6. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)

MLJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol JORR W2 Utara, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol JORR W2 Utara serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang undangan yang berlaku. MLJ didirikan pada tanggal 24 Agustus 2009. Jalan Tol JORR W2 Utara diresmikan pengoperasiannya oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada tanggal 27 Desember 2013 dan beroperasi secara penuh sepanjang 7,7 km pada tanggal 22 Juli 2014.


IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	2.026,71	2.000,95	(1,27)

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Komisaris Utama: Abdul Hadi Hs
- Komisaris: Frans S Sunito
- Komisaris: Taruli M. Hutapea
- Direktur Utama: Subakti Syukur
- Direktur Keuangan: Diaz Moreno

07



TRANSMARGA JATIM PASURUAN
PENYELENGGARA JALAN TOL GEMPOL-PASURUAN
Kelompok Usaha Jasa Marga

7. PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)
TJP merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pasuruan, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol Gempol-Pasuruan serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. TJP didirikan pada tanggal 28 Juni 2010. Sampai dengan 31 Desember 2015, Jalan Tol Gempol-Pasuruan belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi. Diharapkan Jalan Tol Gempol-Pasuruan dapat beroperasi pada tahun 2017.


IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	932,90	1.134,57	21,62

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Komisaris Utama: Christantio Prihambodo
- Komisaris: Moh. Noor Marzuki
- Komisaris: Drs. Imron, Ak
- Direktur Utama: Agus Purnomo
- Direktur Keuangan: Syachriani Atim
- Direktur Teknik: Rahardjo

08



JASAMARGA
PANDAAN TOL

8. PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)
JPT merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Gempol-Pandaan, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol Gempol-Pandaan serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. JPT didirikan pada tanggal 25 September 1996. Jalan Tol Gempol-Pandaan sepanjang 13,61 km diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 12 Juni 2015.


IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	1.153,80	1.243,77	7,80

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Komisaris Utama: Drs. Muslim
- Komisaris: Ir. Rudy Hermawan Karsaman
- Direktur Utama: Ir. Setiyono
- Direktur Keuangan & SDM: Dra. Tri Rianingsih
- Direktur Operasi & Umum: Drs. Nursyam, S.E., MM.

09



MARGA TRANS NUSANTARA
PENYELENGGARA JALAN TOL KUNCIRAN-SERPONG

9. PT Marga Trans Nusantara (MTN)
MTN merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Serpong, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. MTN didirikan pada tanggal 14 Mei 2008. Sampai dengan 31 Desember 2015, Jalan Tol Kunciran-Serpong belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan.

IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	788,35	849,33	7,73

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Presiden Komisaris: Irawan Santoso
- Wakil Presiden Komisaris: Subagyo
- Komisaris: Wiwiek Dianawati Santoso
- Presiden Direktur: Ir. Agus Achmadi
- Direktur: Rachmat Souliwa

10



MARGA KUNCIRAN CENKARENG
PENYELENGGARA JALAN TOL KUNCIRAN-CENKARENG
Kelompok Usaha Jasa Marga

10. PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC)
MKC merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol Kunciran-Cengkareng serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. MKC didirikan pada tanggal 14 Mei 2008. Sampai dengan 31 Desember 2015, Jalan Tol Kunciran-Cengkareng belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan.

IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	940,95	988,30	5,03

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Komisaris Utama: Dedi Krisnariawan Sunoto
- Komisaris: Mohamad bin Husin
- Direktur Utama: Saut Parlindungan Simatupang
- Direktur Keuangan: Zaidi bin Ibrahim

11



JASAMARGA
KUALANAMU TOL

11. PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT)
JMKT merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. JMKT didirikan pada tanggal 25 November 2014. Sampai dengan 31 Desember 2015, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	80,29	301,97	276,09

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Komisaris Utama: Ir. JB Eddy Bambang S
- Komisaris: Jonni Hutahean, SE.
- Direktur Utama: Ir. Agus Suharjanto
- Direktur Keuangan: Drs Asmuji
- Direktur Teknik dan Operasional: Ir. Agus Chaliq

12



PT SOLO NGAWI JAYA (SNJ)

12. PT Solo Ngawi Jaya (SNJ)
SNJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Solo-Ngawi, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol Solo-Ngawi serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. SNJ didirikan pada tanggal 24 Maret 2009. Sampai dengan 31 Desember 2015, Jalan Tol Solo-Ngawi belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.

IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	-	1.666,51	-

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Komisaris Utama: Wasquito Pandu
- Komisaris: Didi Triyono
- Direktur Utama: David Wijayatno
- Direktur Teknik: Thorry Hendrarto
- Direktur Keuangan & Umum: Okty Dwi Riza

Tentang Entitas Anak

13



13. PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)
NKJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Ngawi-Kertosono, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol Ngawi-Kertosono serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang undangan yang berlaku. NKJ didirikan pada tanggal 24 Maret 2009. Sampai dengan 31 Desember 2015, Jalan Tol Ngawi-Kertosono belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi.


IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	-	544,34	-

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Komisaris Utama: A. Pandu Djajanto
- Komisaris: Munib Lusianto
- Direktur Utama: Iwan Moedyarno
- Direktur Teknik: Yudhi Dharmawan
- Direktur Keuangan: Mei Prabowo

14



14. PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)
CSJ merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Cinere-Serpong, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol Cinere-Serpong serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang undangan yang berlaku. CSJ didirikan pada tanggal 10 Juli 2008. Sampai dengan 31 Desember 2015, Jalan Tol Cinere-Serpong belum beroperasi karena masih dalam tahap pembebasan lahan.

IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	-	64,72	-

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Komisaris Utama: Adityawarman
- Komisaris: Antonius Yulianto Tyas Nugroho
- Komisaris: Abdul Hadi Hs
- Direktur Utama: Silvester Aryan Widodo
- Direktur: Mokh. Sadali
- Direktur: Sri Dewi Mustika Rini

15



15. PT Jasa Layanan Pemeliharaan (JLP)
JLP, sebelumnya bernama PT Sarana Marga Utama, merupakan entitas anak Jasa Marga yang didirikan dalam rangka pengusahaan jasa konstruksi dan pemeliharaan jalan tol, jasa sewa peralatan tol, serta jasa sewa kendaraan. JLP didirikan pada tanggal 26 Agustus 1988.

IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	157,90	211,45	33,91

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Komisaris Utama: Muh. Najib Fauzan
- Komisaris: Arief Witjaksono
- Direktur Utama: Adi Prasetyanto
- Direktur Keuangan dan Umum: Surta Nababan

16



16. PT Jasmarga Properti (JP)
JP merupakan entitas anak Jasa Marga yang bergerak dalam bidang pengembangan bisnis properti. JP didirikan pada tanggal 15 Januari 2013.


IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	120,39	447,11	271,37

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Komisaris Utama: Ibnu Purna Muchtar
- Komisaris: Reynaldi Hermansjah
- Direktur Utama: M. Agus Setiawan
- Direktur Pengembangan Bisnis dan Teknik: Irwan Artigyo Sumadiyo
- Direktur Keuangan: Eko Hari Purwanto

17



17. PT Jasa Layanan Operasi (JLO)
JLO merupakan entitas anak Jasa Marga yang bergerak dalam bidang jasa layanan pengoperasian jalan tol, baik untuk ruas-ruas jalan tol yang hak pengusahannya dimiliki Perseroan maupun Badan Usaha Jalan Tol lainnya. JLO didirikan pada tanggal 21 Agustus 2015.

IKHTISAR KEUANGAN (Rp miliar)

Keterangan	2014	2015	Pertumbuhan (%)
Total Aset	-	47,90	-

SUSUNAN PENGURUS per 31 Desember 2015

- Komisaris Utama: Sutirya Wirias Sastra
- Komisaris: Mohammad Sofyan
- Direktur Utama: Septerianto Sanaf
- Direktur: Benny Soediarto Diadi

Entitas Asosiasi

01

1. PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)

TLKJ didirikan berdasarkan Akta No. 18 tanggal 19 Januari 2005 dari Notaris Agus Madijdi, SH, dalam rangka pengusahaan ruas tol Cinere-Jagorawi. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-03269/HT.01.01 tanggal 07 Februari 2006. Anggaran Dasar TLKJ telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir bersarkan Akta Notaris No. 76 tanggal 29 November 2012 dari Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. Akta ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-42662 tanggal 30 November 2012. TLKJ berdomisili di Jakarta. Perseroan memiliki 131.688 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 131.688.000.000 (Rupiah penuh), yang merupakan 21,24% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2015.

per 31 Desember 2015

Kepemilikan Saham Jasa Marga (%): 21,24
Bidang Usaha: Operator Jalan Tol Cinere-Jagorawi
Status: Beroperasi

02

2. PT Bukaka Marga Utama (BMU)

BMU didirikan berdasarkan Akta No. 05 tanggal 17 Februari 1997 dari Notaris Sri Rahayu Sedhyono, SH. Penyertaan pada BMU dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Ciawi-Sukabumi. Perseroan memiliki 4.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 2.359 per lembar saham atau setara dengan Rp 9.436.000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 20% kepemilikan. Pemegang saham mayoritas BMU tidak dapat memberi kepastian atas pembangunan ruas jalan tol yang telah disetujui sesuai dengan PKP. Perseroan mengakui kerugian penurunan nilai atas penyertaan saham pada BMU sebagai beban tahun 2005 sebesar Rp 9.435.999.000 (Rupiah penuh).

per 31 Desember 2015

Kepemilikan Saham Jasa Marga (%): 20,00
Bidang Usaha: Operator Jalan Tol Ciawi-Sukabumi
Status: Belum Beroperasi

03

3. PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP)

CBMP didirikan berdasarkan Akta No. 50 tanggal 11 Desember 1995 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH. Penyertaan pada CBMP dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol JORR Seksi E2-E3-N (Cikunir-Cakung-Cilincing-Tanjung Priok) untuk jangka waktu 33 tahun yang berakhir pada tahun 2028. Perseroan memiliki 56.787.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 56.787.000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 34,83% kepemilikan. Pembangunan jalan tol oleh CBMP dibiayai dari fasilitas pinjaman sindikasi bank. Krisis ekonomi telah menyebabkan ketidakpastian terhadap kemampuan CBMP dalam menyelesaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo dan dalam merealisasikan fasilitas pinjaman untuk pembiayaan jalan tol tahap konstruksi. Restrukturisasi perbankan yang dilakukan terhadap sebagian dari kreditur CBMP telah mengakibatkan penghentian pelaksanaan pembangunan jalan tol. Adanya surat Perseroan kepada CBMP No. AA.02.1009 tanggal 25 Juli 2000 mengenai pengakhiran PKP No. 96 tanggal 16 Desember 1995 mengakibatkan penyertaan Perseroan pada entitas asosiasi ini tidak memiliki nilai ekonomis. Perseroan mengakui kerugian penurunan nilai penyertaan saham pada CBMP pada tahun 2000 sebesar Rp 56.786.999.000 (Rupiah penuh).

per 31 Desember 2015

Kepemilikan Saham Jasa Marga (%): 34,83
Bidang Usaha: Operator Jalan Tol
Status: Pengakhiran PKP

04

4. PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN)

CGMN didirikan berdasarkan Akta No. 300 tanggal 22 Desember 1993 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH, juncto Akta No. 67 tanggal 07 Juli 1994 dari Notaris Sri Laksmi Damayanti, SH. Penyertaan pada CGMN dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Cikampek-Padalarang. Perseroan memiliki 5.310 saham dengan nilai nominal Rp 1.841 per lembar saham atau setara dengan Rp 9.775.710.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 30% kepemilikan. Berdasarkan surat Perseroan kepada CGMN No. AA.HK01.1273 tanggal 25 Juli 2001 mengenai pengakhiran PKP No. 297 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia (Menkimpraswil) No. 417 tanggal 18 Juli 2001 mengenai pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 321/KPTS/1994, tanggal 24 Oktober 1994 mengenai Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan Jalan Tol Cikampek-Padalarang kepada Perseroan dalam bentuk usaha patungan dengan CGMN mengakibatkan penyertaan Perseroan pada entitas asosiasi ini tidak memiliki nilai ekonomis. Perseroan mengakui kerugian penurunan nilai penyertaan saham pada CGMN sebagai beban tahun 2001 sebesar Rp 16.914.266.000 (Rupiah penuh).

per 31 Desember 2015

Kepemilikan Saham Jasa Marga (%): 30,00
Bidang Usaha: Operator Jalan Tol
Status: Pengakhiran PKP

05

5. PT Ismawa Trimitra (IT)

IT didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 69 tanggal 14 Juni 1995 dibuat oleh Imas Fatimah, SH, dalam rangka pengusahaan jasa sewa ruang perkantoran dan tempat istirahat di ruas jalan tol. Anggaran Dasar IT telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 04 September 2014 dari Lumassia, SH. Akta perubahan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27882.40.22.2014 tanggal 04 September 2014. IT berdomisili di Jakarta. Perseroan memiliki 6.250.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp 6.250.000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan 25% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2015.

per 31 Desember 2015

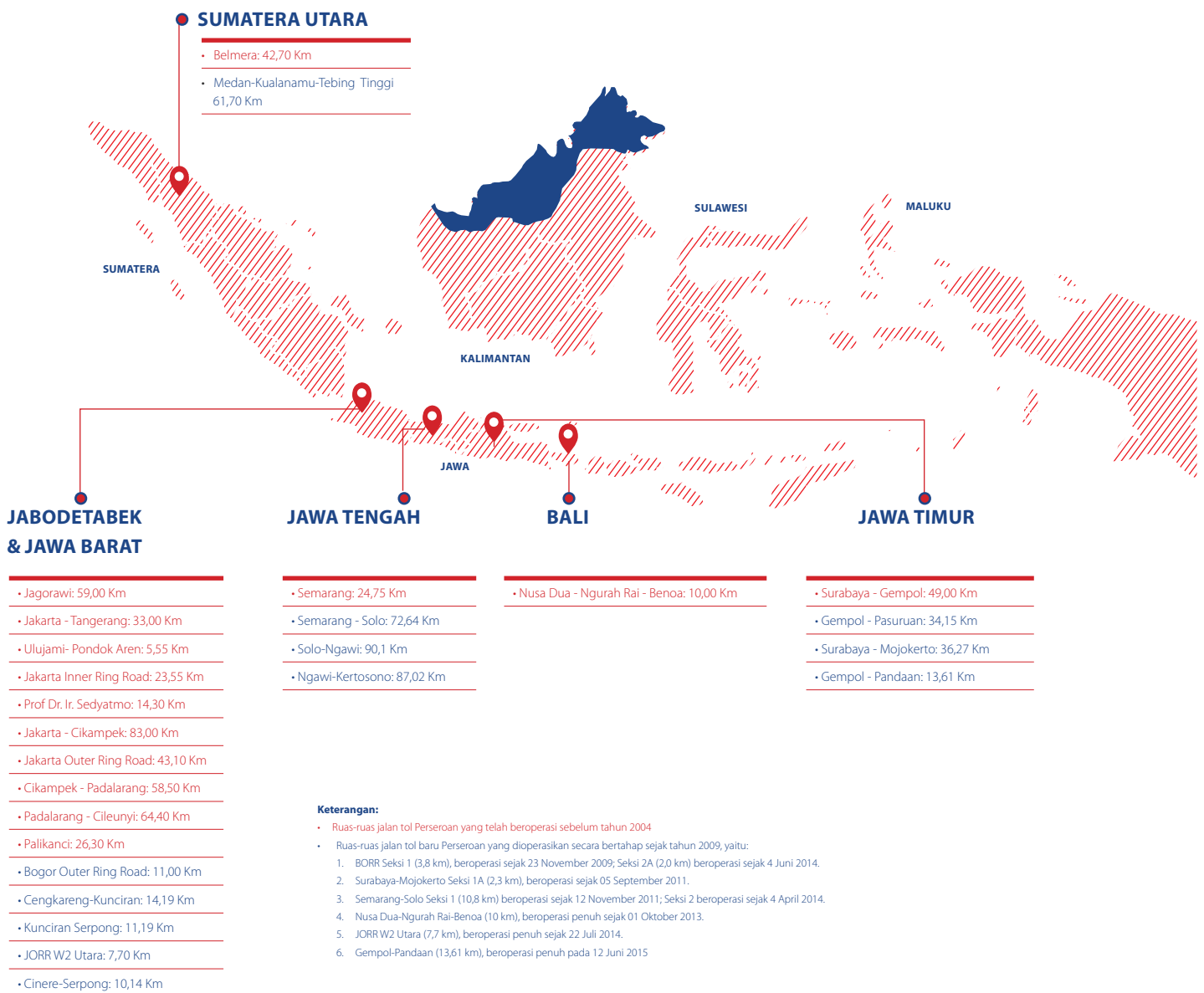
Kepemilikan Saham Jasa Marga (%): 25,00
Bidang Usaha: Sewa dan Pengelolaan Gedung
Status: Beroperasi

Wilayah Operasi dan Proyek-proyek Jalan Tol Baru

Lokasi ruas-ruas jalan tol yang dioperasikan Perseroan di seluruh Indonesia dapat dilihat pada peta sebagai berikut:

PETA LOKASI RUAS-RUAS JALAN TOL JASA MARGA

31 Desember 2015



Konsesi-konsesi yang Dimiliki Perseroan

Ruas-ruas jalan tol yang dimiliki Jasa Marga memiliki masa konsesi yang berkisar antara 35 sampai dengan 45 tahun. Sebanyak 26 ruas jalan tol yang dioperasikan Jasa Marga mempunyai konsesi 40 tahun dimulai sejak tahun 2005 (kecuali JORR Seksi S). Sehingga sampai dengan akhir tahun 2015, masa konsesi yang dimiliki oleh Perseroan masih panjang.

Sampai dengan akhir tahun 2015, status dan masa konsesi ruas-ruas jalan tol Perseroan adalah sebagai berikut:

<p>01 JAGORAWI (JAKARTA-BOGOR-CIAWI)</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>1978</td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>59,00</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	2005	1978	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	59,00	40	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006		<p>02 JAKARTA - TANGERANG</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>1984</td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>33,00</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	2005	1984	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	33,00	40	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006		<p>03 Prof. Dr. Ir. SEDYATMO</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>1984</td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>14,30</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	2005	1984	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	14,30	40	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006	
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
2005	1978																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
59,00	40																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006																																
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
2005	1984																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
33,00	40																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006																																
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
2005	1984																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
14,30	40																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006																																
<p>04 JAKARTA INNER RING ROAD (JIRR)</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>1987</td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>23,55</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	2005	1987	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	23,55	40	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006		<p>05 JAKARTA-CIKAMPEK</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>1988</td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>83,00</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	2005	1988	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	83,00	40	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006		<p>06 PADALEUNYI (PADALARANG-CILEUNYI)</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>1990</td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>64,40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	2005	1990	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	64,40	40	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006	
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
2005	1987																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
23,55	40																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006																																
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
2005	1988																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
83,00	40																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006																																
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
2005	1990																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
64,40	40																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006																																
<p>07 CIPULARANG (CIKAMPEK-PURWAKARTA-PADALARANG)</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>2003</td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>58,50</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	2005	2003	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	58,50	40	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006		<p>08 PALIKANCI (PALIMANAN-KANCI)</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>1998</td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>26,30</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	2005	1998	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	26,30	40	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006		<p>09 SEMARANG</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>1983</td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>24,75</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	2005	1983	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	24,75	40	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006	
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
2005	2003																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
58,50	40																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006																																
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
2005	1998																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
26,30	40																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006																																
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
2005	1983																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
24,75	40																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006																																

Konsesi-konsesi yang Dimiliki Perseroan

<p>10 SURABAYA – GEMPOL</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>1986</td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>49,00</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	2005	1986	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	49,00	40	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006		<p>11 BELMERA (BELAWAN-MEDAN-TANJUNG MORAWA)</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>1986</td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>42,70</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	2005	1986	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	42,70	40	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006		<p>12 JAKARTA OUTER RING ROAD* (JORR)</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>1991</td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>43,10</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006</td> </tr> </table> <p><small>* Tidak Termasuk JORR Seksi S</small></p>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	2005	1991	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	43,10	40	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006	
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
2005	1986																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
49,00	40																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006																																
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
2005	1986																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
42,70	40																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006																																
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
2005	1991																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
43,10	40																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006																																
<p>13 ULUJAMI-PONDOK AREN</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>2001</td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>5,55</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	2005	2001	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	5,55	40	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006		<p>14 BOGOR OUTER RING ROAD</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>2009</td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>11,00</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 29-05-2006</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	2009	2009	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	11,00	45	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 29-05-2006		<p>15 JORR W2 UTARA</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>7,70</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	2005	2014	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	7,70	40	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006	
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
2005	2001																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
5,55	40																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006																																
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
2009	2009																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
11,00	45																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 29-05-2006																																
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
2005	2014																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
7,70	40																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 07-07-2006																																
<p>16 CENGKARENG-KUNCIRAN</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>— <small>(Konstruksi belum dimulai)</small></td> <td>— <small>(Pembebasan Lahan)</small></td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>14,19</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 02-03-2009</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	— <small>(Konstruksi belum dimulai)</small>	— <small>(Pembebasan Lahan)</small>	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	14,19	35	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 02-03-2009		<p>17 KUNCIRAN-SERPONG</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>— <small>(Konstruksi belum dimulai)</small></td> <td>— <small>(Pembebasan Lahan)</small></td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>11,19</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 22-09-2008</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	— <small>(Konstruksi belum dimulai)</small>	— <small>(Pembebasan Lahan)</small>	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	11,19	35	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 22-09-2008		<p>18 SEMARANG-SOLO</p> <table border="1"> <tr> <td>TAHUN MULAI KONSESI</td> <td>OPERASI SEJAK TAHUN</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td>PANJANG (KM)</td> <td>MASA KONSESI (TAHUN)</td> </tr> <tr> <td>72,64</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 15-12-2006</td> </tr> </table>	TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN	2010	2011	PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)	72,64	45	TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 15-12-2006	
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
— <small>(Konstruksi belum dimulai)</small>	— <small>(Pembebasan Lahan)</small>																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
14,19	35																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 02-03-2009																																
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
— <small>(Konstruksi belum dimulai)</small>	— <small>(Pembebasan Lahan)</small>																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
11,19	35																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 22-09-2008																																
TAHUN MULAI KONSESI	OPERASI SEJAK TAHUN																															
2010	2011																															
PANJANG (KM)	MASA KONSESI (TAHUN)																															
72,64	45																															
TANGGAL PENANDATANGANAN PPJT 15-12-2006																																

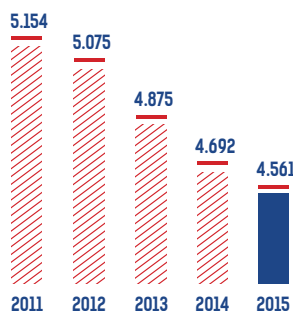
Konsesi-konsesi yang Dimiliki Perseroan

No	Wilayah	Tahun Mulai Konsesi	Operasi Sejak Tahun	Panjang (KM)	Masa Konsesi (Tahun)	Tanggal Penandatanganan PPJT
19	SURABAYA-MOJOKERTO	2007	2011	36,27	42	06-04-2006
20	GEMPOL-PASURUAN	2013	- (Pembebasan Lahan & Konstruksi)	34,15	45	29-05-2006
21	GEMPOL-PANDAAN	2012	2015	13,61	37	19-12-2006
22	NUSA DUA-NGURAH RAI-BENOA	2012	2013	10,00	45	16-12-2011
23	MEDAN-KUALANAMU-TEBING TINGGI	-	- (Pembebasan Lahan & Konstruksi)	61,70	40	05-01-2015
24	SOLO-NGAWI	-	- (Pembebasan Lahan & Konstruksi)	90,10	35	28-06-2011
25	NGAWI-KERTOSONO	-	- (Pembebasan Lahan & Konstruksi)	87,02	35	28-06-2011
26	CINERE-SERPONG	-	- (Pembebasan Lahan)	10,14	35	28-06-2011

Profil Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, saat ini Perseroan berusaha mengoptimalkan pendayagunaan SDM yang ada. Jumlah Karyawan Tetap Induk pada tahun 2015 mencapai 4.561 orang, turun 2,79% dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 4.692 orang. Jumlah ini juga semakin menurun jika dibandingkan dengan jumlah Karyawan Tetap Induk di tahun 2013 yang mencapai 4.875 orang, 2012 mencapai 5.075, dan tahun 2011 yang mencapai 5.154 orang.

JUMLAH KARYAWAN TETAP INDUK 2011-2015
orang



KOMPOSISI KARYAWAN TETAP INDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	2014		2015	
	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
S3	1	0,02	1	0,02
S2	86	1,83	106	2,32
S1	464	9,89	1.307	28,66
Akademi	13	0,28	92	2,02
SMA	4.067	86,68	3.004	65,86
SMP	23	0,49	21	0,46
SD	38	0,81	30	0,66
Jumlah	4.692	100,00	4.561	100,00

KOMPOSISI KARYAWAN TETAP INDUK BERDASARKAN LEVEL JABATAN

Level Jabatan	2014		2015	
	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
Manajemen Puncak	64	1,36	66	1,45
Manajemen Madya	143	3,05	146	3,20
Manajemen Dasar	214	4,56	197	4,32
Pelaksana	4.271	91,03	4.152	91,03
Jumlah	4.692	100,00	4.561	100,00

KOMPOSISI KARYAWAN TETAP INDUK BERDASARKAN USIA

Usia (Tahun)	2014		2015	
	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
≤25	16	0,34	58	1,27
26-30	91	1,94	118	2,59
31-35	185	3,94	105	2,30
36-40	914	19,48	688	15,08
41-45	1.078	22,98	1.049	23,00
46-50	1.383	29,48	1.304	28,59
>51	1.025	21,85	1.239	27,17
Total	4.692	100,00	4.561	100,00

KOMPOSISI KARYAWAN INDUK BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Status	2014		2015	
	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
Karyawan Tetap	4.692	99,28	4.561	98,89
Karyawan Tidak Tetap	34	0,72	51	1,11
Jumlah	4.726	100,00	4.612	100,00

KEBIJAKAN DALAM KESEMPATAN KERJA

Kebijakan dalam hal kesempatan kerja di Perseroan, dilakukan secara selektif dan terbuka, tanpa diskriminasi (gender, ras, suku, agama). Untuk pengelolaan karir karyawan termasuk penempatan dan promosi/rotasi karyawan dengan memperhatikan prestasi kerja, kemampuan dan kompetensi Karyawan.

BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Selama tahun 2015, Perseroan mengeluarkan biaya sebesar Rp 15,75 miliar untuk pendidikan dan pelatihan karyawan.

BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2014 DAN 2015

(dalam miliar Rupiah)

Jenis	2014	2015
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	15,55	15,75

Profil Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Pejabat Senior Jasa Marga

Profil Dewan Komisaris



Refly Harun
**KOMISARIS UTAMA/
KOMISARIS INDEPENDEN**

- Diangkat menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen sejak tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015.
- Berdomisili di Jakarta.
- Meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1995), gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2002), dan gelar LL.M. (Master Hukum) dari University of Notre Dame, Amerika Serikat (2007).
- Saat ini juga menjadi Konsultan Hukum Tata Negara pada Refly Harun & Partners (sebelumnya Harpa Law Firm) (sejak 2009), Pengajar (tidak tetap) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (sejak 2014), serta Pendiri dan Ketua Rumah Konstitusi (sejak 2016). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Hukum (Desember 2014-Maret 2015), Direktur Eksekutif Constitutional and Electoral Reform Centre (2013-2014), Staf Ahli Kelompok DPD di MPR (2009-2014), Peneliti Senior Centre for Electoral Reform (2008-2013), dan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi (2003-2007).
- Usia per 31 Desember 2015 adalah 45 tahun.



Akhmad Syakhroza
KOMISARIS

- Diangkat menjadi Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. 33/MBU/2006 Tanggal 14 Maret 2006 yang diperpanjang berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Maret 2011 dan RUPS Tahunan tanggal 14 Juni 2011. Diangkat kembali menjadi Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012.
- Berdomisili di Jakarta.
- Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1987), S2 bidang Accounting, Finance and Information System di Cleveland State University, Ohio, USA (1991) dan S3 bidang Organization Behavior and Management Accounting di Faculty of Business and Public Management Edith Cowan University, Perth, Australia (2002).
- Saat ini juga menjabat sebagai Profesor Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (sejak 2004), Staf Pengajar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (sejak 1986) dan Staf Ahli Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (sejak 2009). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Deputi Pengendali Keuangan BPMIGAS/SKK Migas (2011-2014), Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (2009-2012), Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Tata Kelola Organisasi (2009-2012) dan Tenaga Ahli Badan Pemeriksa Keuangan RI Bidang Manajemen dan Organisasi (2005-2007). Sebelumnya pernah berkarir di Citibank Jakarta (1989-1990), Bimantara Group (1988-1989), Kantor Akuntan Publik Deloitte Touche Tohmatsu (1987-1988) dan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf (1986-1988).
- Usia per 31 Desember 2015 adalah 52 tahun.



Boediarso Teguh Widodo
KOMISARIS

- Diangkat menjadi Komisaris sejak tanggal 11 Maret 2014 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 11 Maret 2014.
- Berdomisili di Jakarta.
- Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi di Universitas Diponegoro, Semarang (1980), S2 Magister Ekonomi Keuangan Publik di Universitas Indonesia (2005) dan meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia (2012).
- Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (sejak 2013). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Pupuk Petrokimia (2012-2014), Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara (2012-2013), Anggota Dewan Komisaris PT Bank Bukopin (2005-2009) dan Anggota Dewan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (2004-2009).
- Usia per 31 Desember 2015 adalah 57 tahun.



Hambra
KOMISARIS

- Diangkat menjadi Komisaris sejak tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015.
- Berdomisili di Jakarta.
- Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Universitas Pattimura (1994) dan S2 Magister Hukum Bisnis di Universitas Gadjah Mada (2008).
- Saat ini menduduki Jabatan sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN (sejak Februari 2016). Sebelumnya pernah menjabat beberapa jabatan di Kementerian BUMN di antaranya Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial (sejak Juli 2015), Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN (sejak 2012), Kepala Bagian Peraturan Perundang Undangan (2010-2012), Kepala Bagian GCG dan Peraturan Perundang Undangan (2006-2010) dan Kepala Sub Bagian Humas BUMN (2002-2006).
- Usia per 31 Desember 2015 adalah 47 tahun.



Taufik Widjono
KOMISARIS

- Diangkat menjadi Komisaris sejak tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015.
- Berdomisili di Jakarta.
- Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung (1981) dan S2 Jurusan Highway Engineering di University of Strathclyde, Glasgow, Inggris (1993).
- Saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR (sejak 2015). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum/PU (2014-2015), Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PU (2013-2014) dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian PU (2011-2013).
- Usia per 31 Desember 2015 adalah 59 tahun.



Sigit Widyanan
KOMISARIS INDEPENDEN

- Diangkat menjadi Komisaris Independen sejak tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015.
- Berdomisili di Karanganyar.
- Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (1988) dan S2 Magister Akuntansi di Universitas Indonesia (2001).
- Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur PT Roda Pembangunan Jaya, Yogyakarta (2003-2015), Direktur Keuangan Roda Jati Group (2002-2013), Kepala Bagian Perpajakan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (1994-1997) dan Kepala Bagian Keuangan PT Wijaya Karya Beton (1997-2001).
- Usia per 31 Desember 2015 adalah 50 tahun.

Profil Direksi



Adityawarman
DIREKTUR UTAMA

- Bergabung dengan Jasa Marga sejak tahun 1983. Diangkat menjadi Direktur Utama berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 30 Januari 2012.
- Berdomisili di Jakarta.
- Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Diponegoro (1982) dan S2 di Magister Management Universitas Trisakti (2005).
- Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Cinere Serpong Jaya (sejak 2015). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Operasi Jasa Marga (2008-2012), Komisaris PT Citra Waspphutowa (2006-2008), Komisaris Utama PT Citra Margatama Surabaya (2002-2009), Direktur Operasi & Pengembangan Usaha PT CMNP (2002-2007), Direktur Operasi PT CMNP (2000-2002), Komisaris PT CMNP (1998-2000), Kepala Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng (1997-2000) dan Kepala Cabang Jagorawi (1993-1997).
- Usia per 31 Desember 2015 adalah 60 tahun.



Christantio Prihambodo
DIREKTUR OPERASI

- Bergabung dengan Jasa Marga sejak tahun 1988. Diangkat menjadi anggota Direksi berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 18 Maret 2015.
- Berdomisili di Bogor.
- Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Indonesia (2002).
- Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Transmarga Jatim Pasuruan (sejak 2015). Sebelumnya pernah menjabat sebagai VP Highway and Traffic Engineering (2015), GM Surabaya-Gempol (2014-2015) dan GM Purbaleunyi (2012-2014).
- Usia per 31 Desember 2015 adalah 52 tahun.



Hasanudin
DIREKTUR PENGEMBANGAN USAHA

- Bergabung dengan Jasa Marga sejak tahun 1988. Diangkat menjadi anggota Direksi berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012.
- Berdomisili di Depok.
- Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil Transportasi di Institut Teknologi Sepuluh Noverber, Surabaya (1987) dan meraih gelar S2 Master Engineering bidang Transportasi dari University of New South Wales, Sydney, Australia (1994).
- Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Trans Lingkar Kita Jaya (sejak 2015). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris PT Trans Marga Jateng (2012-2015), Kepala Divisi Pemeliharaan (2006-2012), Komisaris PT Marga Mandala Sakti (2008-2010), dan Pemimpin Proyek Pembangunan Jalan Tol Cipularang (2004-2005).
- Usia per 31 Desember 2015 adalah 52 tahun.



Reynaldi Hermansjah
DIREKTUR KEUANGAN/DIREKTUR
INDEPENDEN

- Diangkat menjadi anggota Direksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. 32/MBU/2006 tanggal 14 Maret 2006 yang diperpanjang berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Maret 2011 dan RUPS Tahunan tanggal 14 Juni 2011. Diangkat kembali berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012. Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 18 Maret 2015 juga menjabat sebagai Direktur Independen.
- Berdomisili di Tangerang.
- Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti (1991).
- Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Trans Marga Jateng (sejak 2015) dan Komisaris PT Jasamarga Properti (sejak 2015). Memiliki pengalaman selama 15 tahun di bidang investasi dan pasar modal di sektor keuangan. Karirnya dimulai tahun 1991 di Nomura Securities dan setelah itu menjabat pada posisi kunci di beberapa perusahaan multinasional. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris PT Marga Sarana Jabar (sejak 2011-2015), Komisaris Utama PT Trans Lingkar Kita Jaya (2012-2015) dan Presiden Direktur PT PNM Investment Management (2003-2006). Saat ini memiliki lisensi manajer investasi dari Bapepam No. KEP-38/PM-PI/1993.
- Usia per 31 Desember 2015 adalah 48 tahun.



Achiran Pandu Djajanto
DIREKTUR KEPATUHAN &
MANAJEMEN RISIKO

- Diangkat menjadi anggota Direksi berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 18 Maret 2015.
- Berdomisili di Bekasi.
- Menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada (1983), meraih gelar S2 Magister Manajemen dari STIE IPWI Jakarta (1997) dan gelar S3 Bidang Hukum Korporasi dari Universitas Gadjah Mada (2015).
- Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Ngawi Kertosono Jaya (sejak 2015). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Tata Kelola dan Sinergi (2014-2015), Staf Ahli Menteri BUMN Bidang SDM dan Teknologi (2013-2014), Deputy Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis (2010-2013), Staf Ahli Menteri Negara BUMN Bidang Tata Kelola Perusahaan (2005-2010) dan pernah menjabat Komisaris di beberapa perusahaan BUMN sebelum 2015.
- Usia per 31 Desember 2015 adalah 57 tahun.



Muh Najib Fauzan
DIREKTUR SUMBER DAYA
MANUSIA & UMUM

- Bergabung dengan Jasa Marga sejak tahun 1990. Diangkat menjadi anggota Direksi berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012.
- Berdomisili di Jakarta.
- Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung (1985) dan meraih gelar S2 Magister Teknik Jalan Raya dari Institut Teknologi Bandung (1989).
- Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Marga Nujujasumo Agung (sejak 2009) dan Komisaris Utama PT Jasa Layanan Pemeliharaan (sejak 2014). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Perusahaan (2006-2012) dan Ketua Tim IPO Jasa Marga (2007).
- Usia per 31 Desember 2015 adalah 55 tahun.

Profil Komite Audit



Sigit Widyanan
KETUA

- Menjadi Ketua Komite Audit Jasa Marga sejak April 2015.
- Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Jasa Marga.
- Profil dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris



Rustam Wahjudi
ANGGOTA

- Menjadi Anggota Komite Audit Jasa Marga sejak tahun 2011.
- Meraih gelar S1 Sarjana Akuntansi dari Institut Ilmu Keuangan Departemen Keuangan (1981).
- Mulai berkarir di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) pada tahun 1975. Beberapa jabatan penting di BPKP yang pernah dijabat sebelumnya di antaranya adalah Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II pada BPKP Pusat (2008-2010), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau (2005-2008) dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (2004-2005).
- Usia per 31 Desember 2015 adalah 63 tahun.



Agita Widjanto
ANGGOTA

- Menjadi Anggota Komite Audit Jasa Marga sejak tahun 2011.
- Meraih gelar Insinyur Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1995) dan gelar Master dalam Bidang Teknik Terowongan dari International Institute for Infrastructures, Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) Delft, Netherlands (2001).
- Saat ini juga menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Kontruksi, Direktorat Jenderal Bina Kontruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sejak 2015). Sebelumnya pernah menjadi Kepala Bidang Pengembangan Pola Investasi, Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi, Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum (2011-2015), dan Kepala Sub Bidang Pengendalian Investasi, Bidang Investasi, Sekretariat BPJT, Departemen Pekerjaan Umum (2005-2011). Sejak 2005 aktif dalam berbagai kepanitiaan tender, kelompok kerja, proyek, task force, dan lain-lain di Kementerian Pekerjaan Umum.
- Usia per 31 Desember 2015 adalah 44 tahun.

Profil Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko



Refly Harun
KETUA

- Menjadi Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Jasa Marga sejak Desember 2015.
- Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama/ Komisaris Independen Jasa Marga
- Profil dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris



Akhmad Syakhroza
WAKIL KETUA

- Menjadi Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Jasa Marga sejak 2015.
- Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Jasa Marga.
- Profil dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris



Eduard T. Pauner
ANGGOTA

- Menjadi Anggota Komite Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko (sebelumnya bernama Komite Investasi dan Risiko Usaha) Jasa Marga sejak 01 Maret 2013.
- Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung (1977) dan meraih gelar S2 Teknik Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia (2002).
- Saat ini juga merupakan Staf Pengajar Manajemen Risiko Program Pasca Sarjana Universitas Parahyangan Bandung dan Program Pasca Sarjana ITS (sejak 2012), serta merupakan pemegang lisensi Certified Risk Management Professional dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Sistem Jaringan Prasarana, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (2003-2005), Anggota Komite Risiko PT Hutama Karya (Persero) (2006-2010), Anggota Komite Audit PT Brantas Abipraya (Persero) (2008-2012), dan Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Brantas Abipraya (Persero) (2012).
- Usia per 31 Desember 2015 adalah 62 tahun.



Nasikhin Ahsanto
ANGGOTA

- Menjadi Anggota Komite Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko (sebelumnya bernama Komite Investasi dan Risiko Usaha) Jasa Marga sejak tahun 2014.
- Meraih gelar S1 Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (2003).
- Pemegang lisensi Certified Risk Management Professional dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko. Sejak tahun 2001 aktif berperan dalam berbagai studi dan kajian di daerah-daerah di Indonesia yang diselenggarakan berbagai instansi, di antaranya BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Intelijen & Keamanan Mabes Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Bank Indonesia, beberapa Pemerintah Daerah, PT Pelindo, Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), dan lain-lain.
- Usia per 31 Desember 2015 adalah 37 tahun.

Profil Pejabat Senior Jasa Marga

KANTOR PUSAT

Direktorat Utama



Mohammad Sofyan
CORPORATE SECRETARY

Menjabat Sejak: 01 Juli 2015

Di Jasa Marga Sejak: 1997

Pendidikan: S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Sepuluh Noverember Surabaya (1996)
S2 Project Management dari Universitas Indonesia (2003)
S2 Business & IT dari The University of Melbourne (2007)

Riwayat Jabatan: VP Corporate Planning (2012-2015)

Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Perusahaan Biro Perencanaan Perusahaan (2010-2012)

Kepala Bagian Analisa Pengembangan Teknologi Biro Teknologi Informasi Perusahaan (2008-2010)



Haris Prayudi
HEAD OF INTERNAL AUDIT

Menjabat Sejak: 29 Juni 2015

Di Jasa Marga Sejak: 1987

Pendidikan: Akuntansi di STIE YAI Jakarta (1990)

Riwayat Jabatan: Direktur Keuangan PT Jasamarga Properti (2013-2015)

General Manager PT Marga Lingkar Jakarta (2009-2013)

Kepala Biro Keuangan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2001-2007)

Profil Pejabat Senior Jasa Marga

Direktorat Pengembangan Usaha



Truly Nawangsasi
VP TOLL ROAD BUSINESS
DEVELOPMENT

Menjabat Sejak: 02 Februari 2015

**Di Jasa Marga
Sejak:** 1996

Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1992)

**Riwayat
Jabatan:** VP Highway Traffic and Engineering (2014-2015)

AVP Toll Road Investment Development, Divisi Toll Road Business Development (2010-2014)



Hari Pratama
VP RELATED BUSINESS
DEVELOPMENT

Menjabat Sejak: 01 Juli 2015

**Di Jasa Marga
Sejak:** 1997

Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1995)
S2 Teknik Sipil, Queensland University of Technology Australia (2001)

**Riwayat
Jabatan:** VP Information Technology (2013-2015)

Pemimpin Proyek Bisnis Pengembangan Properti di Koridor Jalan Tol di Jawa Timur (2012-2013)
Kepala Divisi Pengembangan Usaha Lain (2010-2012)



Ayu Widya Kiswari
VP HIGHWAY AND TRAFFIC
ENGINEERING

Menjabat Sejak: 10 April 2015

**Di Jasa Marga
Sejak:** 1995

Pendidikan: S1 Teknik Sipil Perhubungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994)

**Riwayat
Jabatan:** VP Maintenance (2014-2015)

Kepala Sub Divisi Pengendalian Pemeliharaan, Divisi Pemeliharaan (2009-2011)
Kepala Sub Divisi Program, Persiapan dan Tata Laksana Pemeliharaan, Divisi Pemeliharaan (2007-2009).



Yudhi Krisyunoro
DIREKTUR UTAMA
PT JALANTOL
LINGKARLUAR JAKARTA

Menjabat Sejak: 27 Agustus 2015

**Di Jasa Marga
Sejak:** 1986

Pendidikan: S1 Teknik Sipil Struktur, Institut Teknologi Bandung (1985)
S2 Teknik Sipil Transportasi, Universitas Indonesia (1998)
GM Jakarta-Cikampek (2012-2015)

**Riwayat
Jabatan:**

Pimpinan Proyek Penambahan Lajur Jalan Tol Jagorawi dan Relokasi Gerbang Tol Taman Mini (2010-2012)
Kepala Bagian Pelayanan Lalu Lintas dan Keamanan Ketertiban, Cabang Jagorawi (2009-2010)



Hendro Atmodjo
DIREKTUR UTAMA
PT MARGA SARANA JABAR

Menjabat Sejak: 29 Juni 2015

**Di Jasa Marga
Sejak:** 1989

Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1986)

**Riwayat
Jabatan:** S2 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (2008)

Kepala Cabang Jagorawi (2009-2012)

Direktur Teknik PT Marga Kunciran Cengkareng (2008-2015)



Djadjat Sudrajat
DIREKTUR UTAMA
PT TRANS MARGA JATENG

Menjabat Sejak: November 2011

**Di Jasa Marga
Sejak:** 1986

Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1985)

**Riwayat
Jabatan:** Kepala Divisi Pembangunan (2006-2009)

Direktur Utama PT Marga Nujyasumo Agung (2009-2011)



Budi Pramono
DIREKTUR UTAMA
PT MARGA NUJYASUMO
AGUNG

Menjabat Sejak: 10 Juli 2014

**Di Jasa Marga
Sejak:** 1986

Pendidikan: S1 Teknik Sipil Transportasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1985)

**Riwayat
Jabatan:** Kepala Cabang Jakarta-Cikampek (2009-2011)

Kepala Cabang Jagorawi (2005-2006)



A. Tito Karim
DIREKTUR UTAMA
PT JASAMARGA BALI TOL

Menjabat Sejak: 02 Desember 2011

**Di Jasa Marga
Sejak:** 1986

Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Universitas Sriwijaya (1984)
S2 Manajemen SDM, Ikopin Bandung (2006)

**Riwayat
Jabatan:** Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar (2010-2011)

Direktur Operasi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2007-2010)



Subakti Syukur
DIREKTUR UTAMA
PT MARGA LINGKAR JAKARTA

Menjabat Sejak: 20 Januari 2014

**Di Jasa Marga
Sejak:** 1986

Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1986)

**Riwayat
Jabatan:** S2 Manajemen, Universitas Kristen Indonesia (2010)

GM Cawang-Tomang-Cengkareng (2005-2006 dan 2008-2014)

Kepala Cabang Surabaya-Gempol (2006-2008)



Agus Purnomo
DIREKTUR UTAMA
PT TRANSMARGA JATIM
PASURUAN

Menjabat Sejak: 01 Juli 2015

**Di Jasa Marga
Sejak:** 1988

Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1987)

**Riwayat
Jabatan:** Head of Internal Audit (2015)

GM Cawang-Tomang-Cengkareng (2014)
Kepala Cabang Surabaya-Gempol (2008-2014)



Setiyono
DIREKTUR UTAMA
PT JASAMARGA PANDAAN TOL

Menjabat Sejak: 01 Januari 2012

**Di Jasa Marga
Sejak:** 1985

Pendidikan: S1 Teknik Sipil Transportasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1985)

**Riwayat
Jabatan:** Kepala Sub Divisi Keselamatan Lalu Lintas, Divisi Manajemen Lalu Lintas (2001-2006)

Kepala Bagian Teknik, Cabang Jakarta-Tangerang (1998-2001)

Direktorat Pengembangan Usaha



Agus Achmadi
DIREKTUR UTAMA
PT MARGA TRANS
NUSANTARA

Menjabat Sejak: 2014

Di Jasa Marga Sejak: -

Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Universitas Diponegoro (1983)

Riwayat Jabatan: Direktur Teknik dan Operasi PT Marga Lingkar Jakarta (2012-2014)
Project Manager, PT Marga Lingkar Jakarta (2010-2012)



Saut Parlindungan Simatupang
DIREKTUR UTAMA
PT MARGA KUNCIRAN
CENGKARENG

Menjabat Sejak: 2008

Di Jasa Marga Sejak: 1984

Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1982)
S2 Magister Manajemen Internasional, ST PPM (2001)

Riwayat Jabatan: Pemimpin Proyek Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Padalarang (2002-2004)
Pemimpin Proyek Pembangunan Jalan Tol Pluit-Grogol (2001-2002)



Agus Suharjanto
DIREKTUR UTAMA
PT JASA MARGA
KUALANAMU TOL

Menjabat Sejak: 02 Februari 2015

Di Jasa Marga Sejak: 1986

Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada (1986)

Riwayat Jabatan: VP Toll Road Business Development (2014)
Direktur Utama PT Marga Trans Nusantara (2011-2014)



David Wijayatno
DIREKTUR UTAMA
PT SOLO NGAWI JAYA

Menjabat Sejak: 02 Februari 2015

Di Jasa Marga Sejak: 1988

Pendidikan: S1 Teknik Sipil Transportasi, Universitas Gadjah Mada (1986)

Riwayat Jabatan: Corporate Secretary (2012-2015)
Pemimpin Proyek Bisnis Pengembangan Properti JORR 2, BORR, Semarang-Solo dan Surabaya-Mojokerto (2010-2012)
Kepala Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng (2006-2008)



Iwan Moedyarno
DIREKTUR UTAMA
PT NGAWI
KERTOSONO JAYA

Menjabat Sejak: 01 Juli 2015

Di Jasa Marga Sejak: 1986

Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1985)
S2 Bisnis, IIM-Pittsburgh State University (1993)

Riwayat Jabatan: Direktur Utama PT Ismawa Trimitra (2013-2015)
Pemimpin Proyek Pengembangan Properti di Lahan Ex-Workshop dan Kantor Cabang Jagorawi (2010-2015)
Kepala Divisi Pengembangan Usaha Lain (2008-2010)



Silvester Aryan Widodo
DIREKTUR UTAMA
PT CINERE SERPONG JAYA

Menjabat Sejak: 02 Januari 2010

Di Jasa Marga Sejak: 1985

Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1985)

Riwayat Jabatan: Pemimpin Proyek Bisnis Pengembangan Usaha Teknologi Informasi & Komunikasi (2010-2015)
Kepala Divisi Teknik, PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2003-2007)
Kepala Sub Divisi Administrasi Teknik, Divisi Perencanaan Teknik (1997-2003)



Adi Prasetyanto
DIREKTUR UTAMA
PT JASA LAYANAN
PEMELIHARAAN

Menjabat Sejak: 2015

Di Jasa Marga Sejak: 1997

Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Universitas Diponegoro (1996)
S2 Manajemen Proyek, Universitas Indonesia (2003)

Riwayat Jabatan: Direktur Teknik PT Jasa Layanan Pemeliharaan (2015)
AVP Area 1 Subsidiary Management, Divisi Toll Road Business Development (2014)
Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol JORR W2 Utara, PT Marga Lingkar Jakarta (2012)
Kepala Sub Divisi Teknik dan Pengadaan Lahan Jalan Tol Semarang-Solo, PT Trans Marga Jateng (2009)



Mohamad Agus Setiawan
DIREKTUR UTAMA
PT JASAMARGA PROPERTI

Menjabat Sejak: 06 Maret 2014

Di Jasa Marga Sejak: 1996

Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1995)
S2 Teknik Pengelolaan Jaringan Jalan Departemen Pekerjaan Umum, Universitas Parahyangan Bandung (2009)

Riwayat Jabatan: VP Related Business Development (2012-2014)
Kepala Sub Divisi Perencanaan Investasi Usaha Lain, Divisi Pengembangan Usaha Lain (2010-2012)



Septerianto Sanaf
DIREKTUR UTAMA
PT JASA LAYANAN
OPERASI

Menjabat Sejak: 27 Agustus 2015












Di Jasa Marga Sejak: 1986

Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Universitas Khatolik Parahyangan Bandung (1986)

Riwayat Jabatan: Direktur Utama PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2013-2015)
Kepala Divisi Manajemen Operasi (2006-2012)
Kepala Divisi Pengumpulan Tol (2003-2006)

Profil Pejabat Senior Jasa Marga

Direktorat Operasi

 <p>Taruli M. Hutapea VP OPERATION MANAGEMENT</p> <p>Menjabat Sejak: 01 Juli 2012</p> <p>Di Jasa Marga Sejak: 1986</p> <p>Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Universitas Indonesia (1999)</p> <p>Riwayat Jabatan: Kepala Sub Divisi Manajemen Pengumpulan Tol, Divisi Manajemen Operasi (2007-2008) Kepala Sub Divisi Pengendalian Sistem Pengumpulan Tol, Divisi Pengumpulan Tol (2001-2007)</p>	 <p>Reza Febriono VP MAINTENANCE</p> <p>Menjabat Sejak: 10 April 2015</p> <p>Di Jasa Marga Sejak: 2003</p> <p>Pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran Bandung (2002) S1 Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2003) S2 Teknik Sipil, Universitas Indonesia (2007)</p> <p>Riwayat Jabatan: AVP Traffic Engineering, Divisi Highway Traffic Engineering (2014-2015) Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan, Proyek Penambahan Lajur Jalan Tol Jagorawi & Relokasi Gerbang Tol Taman Mini Utama (2013-2014) Kepala Bagian Pengendalian Proyek Pembangunan Jalan Tol JORR W2 Utara Paket 3 Ruas Joglo-Ciledug (2010-2013)</p>	 <p>Bagus Cahya Arinta B. GM JAGORAWI</p> <p>Menjabat Sejak: 01 Agustus 2015</p> <p>Di Jasa Marga Sejak: 1995</p> <p>Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Universitas Brawijaya Malang (1993)</p> <p>Riwayat Jabatan: GM Semarang (2014-2015) AVP Traffic Management, Divisi Operation Management (2013-2014) Kepala Sub Divisi Manajemen Lalu Lintas, Divisi Manajemen Operasi (2011-2013)</p>	 <p>Roy Ardian Darwis GM CAWANG-TOMANG-CENGKARENG</p> <p>Menjabat Sejak: 02 Februari 2015</p> <p>Di Jasa Marga Sejak: 1993</p> <p>Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Institut Sains & Teknologi Nasional (1991) S2 SDM, Universitas Krisnadwipayana (2004)</p> <p>Riwayat Jabatan: GM Palikanci (2014) GM Belmera (2009-2014)</p>
 <p>Sari Purnawarman GM JAKARTA-TANGERANG</p> <p>Menjabat Sejak: 23 Mei 2014</p> <p>Di Jasa Marga Sejak: 1986</p> <p>Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Universitas Diponegoro (2003)</p> <p>Riwayat Jabatan: GM Semarang (2012-2014) Kepala Bagian Manajemen Lalu Lintas, Cabang Jagorawi (2010-2012)</p>	 <p>Dadang Sumaryana GM JAKARTA-CIKAMPEK</p> <p>Menjabat Sejak: 27 Agustus 2015</p> <p>Di Jasa Marga Sejak: 1988</p> <p>Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Universitas Krisnadwipayana Jakarta (1999)</p> <p>Riwayat Jabatan: Direktur Utama PT Jasa Layanan Pemeliharaan (2015) Direktur Teknik PT Jasa Layanan Pemeliharaan (2014) GM Palikanci (2011-2013)</p>	 <p>Ricky Distawardhana GM PURBALEUNYI</p> <p>Menjabat Sejak: 20 Januari 2014</p> <p>Di Jasa Marga Sejak: 1989</p> <p>Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1989)</p> <p>Riwayat Jabatan: VP Maintenance (2012-2014) Kepala Cabang Jakarta-Tangerang (2009-2012)</p>	 <p>Teddy Rosady GM PALIKANCI</p> <p>Menjabat Sejak: 02 Februari 2015</p> <p>Di Jasa Marga Sejak: 1995</p> <p>Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura Pontianak (1993)</p> <p>Riwayat Jabatan: Deputy General Manager Traffic Management, Cabang Jakarta-Cikampek (2012-2015) Kepala Bagian Manajemen Lalu Lintas, Cabang Jakarta-Tangerang (2010-2012)</p>
 <p>Raddy R. Lukman GM SURABAYA-GEMPOL</p> <p>Menjabat Sejak: 02 Februari 2015</p> <p>Di Jasa Marga Sejak: 1996</p> <p>Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Universitas Indonesia (1994)</p> <p>Riwayat Jabatan: GM Belmera (2014) Deputy General Manager Toll Collection Management, Cabang Jakarta-Cikampek (2012-2014)</p>	 <p>R. Kristianto GM SEMARANG</p> <p>Menjabat Sejak: 01 Agustus 2015</p> <p>Di Jasa Marga Sejak: 1989</p> <p>Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Universitas Indonesia (1988)</p> <p>Riwayat Jabatan: Kepala Bagian Pengumpulan Tol, Cabang Jagorawi (2001-2007) Kepala Bagian Manajemen Lalu Lintas, Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng (2007-2012)</p>	 <p>Setia Budi GM BELMERA</p> <p>Menjabat Sejak: 02 Februari 2015</p> <p>Di Jasa Marga Sejak: 1997</p> <p>Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Universitas Khatolik Parahyangan (1996)</p> <p>Riwayat Jabatan: AVP Traffic Management, Divisi Operation Management (2014) Kepala Divisi Manajemen Operasi, PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (2012-2014)</p>	

Profil Pejabat Senior Jasa Marga

Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko



Heli Winarso
VP LEGAL & COMPLIANCE

Menjabat Sejak: 02 Mei 2014
Di Jasa Marga Sejak: 1989
Pendidikan: S1 Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (1988)
Riwayat Jabatan: AVP Corporate and Legal Business, Divisi Legal (2013-2014)
Kepala Bagian Perjanjian dan Korporasi, Biro Hukum (2007-2013)



Prihandayani
GM COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

Menjabat Sejak: 01 Juli 2015
Di Jasa Marga Sejak: 1987
Pendidikan: S1 Akuntansi, STIE YAI Jakarta (-)
Riwayat Jabatan: AVP Services Business Development, Divisi Related Business Development (2013-2015)
Kepala Bagian Administrasi Keuangan & Pengendalian Program, Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (2007-2013)



Nixon Sitorus
VP RISK AND QUALITY MANAGEMENT

Menjabat Sejak: 02 Februari 2015
Di Jasa Marga Sejak: 1997
Pendidikan: S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung (1995)
S2 Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia (2005)
Riwayat Jabatan: Deputy General Manager Toll Collection Management Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng (2008-2014)
Kepala Sub Bagian Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pemeliharaan Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng (2006)

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum



Sutirya Wirias Sastra
GM HUMAN CAPITAL SERVICES

Menjabat Sejak: 01 Juli 2013
Di Jasa Marga Sejak: 1981
Pendidikan: S1 Manajemen Perekonomian, STIA LAN Jakarta (1999)
Riwayat Jabatan: Kepala Unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (2011-2013)
Kepala Bagian SDM dan Umum, Cabang Jakarta-Cikampek (2007-2011)



Ida Bagus Kade Yudarta
GM GENERAL AFFAIRS

Menjabat Sejak: 01 September 2014
Di Jasa Marga Sejak: 1988
Pendidikan: S1 Akuntansi, Universitas Pancasila Jakarta (1988)
Riwayat Jabatan: Senior Manager Procurement and Logistic, Divisi General Affairs (2013-2014)
Kepala Bagian Logistik, Biro Umum (2008-2013).



Irwan Prasetyo
GM JASA MARGA DEVELOPMENT CENTER

Menjabat Sejak: 02 Februari 2015
Di Jasa Marga Sejak: 1989
Pendidikan: S1 Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung (1988)
S2 Master of Public Management, Carnegie Mellon University (1995)
S3 Teknik Sipil Transportasi, Tokyo Institute of Technology (2002)
Riwayat Jabatan: AVP Toll Road Investment Development, Divisi Toll Road Business Development (2014)
AVP Area 1 Subsidiary Management, Divisi Toll Road Business Development (2012-2014)

Direktorat Keuangan



**Dedi Krisnariawan
Sunoto**
VP CORPORATE PLANNING

Menjabat Sejak: 01 Juli 2015

**Di Jasa Marga
Sejak:** 1989

Pendidikan: S1 Teknik Sipil,
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta (1988)

**Riwayat
Jabatan:** VP Related Business
Development (2014-2015)
VP Toll Road Business
Development (2006-2014)



Arief Nursetiawan
VP FINANCE AND
ACCOUNTING

Menjabat Sejak: 02 Februari 2015

**Di Jasa Marga
Sejak:** 1995

Pendidikan: S1 Akuntansi,
Universitas Gadjah Mada
(1993)

**Riwayat
Jabatan:** Senior Auditor,
Internal Audit (2014)
AVP Accounting,
Divisi Finance and
Accounting (2007-2013)

KANTOR PROYEK



Hidayatullah
PEMIMPIN PROYEK
PENGEMBANGAN JALAN TOL
PORONG-GEMPOL

Menjabat Sejak: 03 September 2014

**Di Jasa Marga
Sejak:** 1989

Pendidikan: S1 Teknik Sipil, Universitas
Muhamadiyah Jakarta
(2000)

S2 Manajemen, Institut
Pengembangan
Wiraswasta Jakarta

**Riwayat
Jabatan:** Staf Utama Bidang
Pengendalian
Pelaksanaan,
PT Transmarga Jatim
Pasuruan (2010)



Bambang Eko
PEMIMPIN PROYEK
PENATAAN DAN PERLUASAN
KANTOR PUSAT, GERBANG
TOL TAMAN MINI UTAMA,
KANTOR CABANG
JAGORAWI DAN SEKITARNYA

Menjabat Sejak: 01 September 2013

**Di Jasa Marga
Sejak:** 1985

Pendidikan: S1 Teknik Sipil,
Universitas Jaya Raya (1998)

**Riwayat
Jabatan:** Pemimpin Proyek
Penambahan Lajur Ruas
Tangerang-Kebon Jeruk
Jalan Tol Jakarta-Tangerang
(2010-2011)

Kepala Bagian Pengendalian
Pelaksanaan III, Proyek
Pelebaran Elevated Jalan
Tol Prof. Dr. Ir. Sedijatmo Sisi
Selatan (2008-2010)



Ari Kristopo
PEMIMPIN PROYEK
PENAMBAHAN LAJUR
JALAN TOL JAGORAWI DAN
RELOKASI GERBANG TOL
TAMAN MINI UTAMA

Menjabat Sejak: 20 Januari 2014

**Di Jasa Marga
Sejak:** 1995

Pendidikan: S1 Teknik Sipil
Transportasi, Universitas
Islam Indonesia
Yogyakarta (1994)

**Riwayat
Jabatan:** Direktur Teknik PT Sarana
Marga Utama (2012-2014)

Kepala Divisi Manajemen
Operasi, PT Jalantol
Lingkarluar Jakarta
(2009-2011)

Alamat Kantor Cabang, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Jasa Marga

Kantor Cabang dan Unit Bisnis

No.	Kantor	Alamat	Telepon/Fax/Email
1	Cabang Jagorawi	Jln. Raya Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560	Tel. (62 21) 841 3632, 840 0732 Fax. (62 21) 840 0055 e-mail: jagorawi@jasamarga.co.id
2	Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng	Plaza Tol Cililitan Jln. Cililitan Besar Jakarta 13510	Tel. (62 21) 8088 7227 Fax. (62 21) 8088 7228 e-mail: ctc@jasamarga.co.id
3	Cabang Jakarta-Cikampek	Jln. Teuku Umar, Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu Bekasi 17114	Tel. (62 21) 821 6515, 8243 0045/48 Fax. (62 21) 821 6507 e-mail: jakpek@jasamarga.co.id
4	Cabang Jakarta-Tangerang	Plaza Tol Tangerang Jln. Raya Serpong Tangerang 15001	Tel. (62 21) 5575 3904/6237 Fax. (62 21) 5575 4029 e-mail: janger@jasamarga.co.id
5	Cabang Palikanci	Jln. Jend. Sudirman No. 138 Ciperna Cirebon 45171	Tel. (62 231) 489 800, 484 268 Fax. (62 231) 483 457 e-mail: palikanci@jasamarga.co.id
6	Cabang Purbaleunyi	Plaza Tol Pasteur Jln. Dr. Djundjuran No. 257 Bandung 40164	Tel. (62 22) 200 0867/68 Fax. (62 22) 201 1433 e-mail: purbaleunyi@jasamarga.co.id
7	Cabang Semarang	Plaza Tol Manyaran Jln. Tol Semarang Semarang 50147	Tel. (62 24) 760 6012/14 Fax. (62 24) 762 3940 e-mail: semarang@jasamarga.co.id
8	Cabang Surabaya-Gempol	Plaza Tol Kota Satelit Jln. Mayjen. Sungkono Surabaya 60189	Tel. (62 31) 567 9401/2008 Fax. (62 31) 732 9941 e-mail: surgem@jasamarga.co.id
9	Cabang Belmera	Jln. Simpang Tanjung No. 1A Medan 20241	Tel. (62 61) 661 1701/2920 Fax. (62 61) 661 1055 e-mail: belmera@jasamarga.co.id
10	Unit Bisnis Rest Area	Jalan Tol Purbaleunyi KM 88 Jalur B Sukatani, Purwakarta 41167	Tel. (62 264) 8280388 Fax. (62 264) 8260288

Entitas Anak

No.	Kantor	Alamat	Telepon/Fax/Email
1	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	Plaza Tol Jati Asih Bekasi 17423	Tel. (62 21) 822 3232 Fax. (62 21) 820 5151 e-mail: layanan@jlj.co.id
2	PT Marga Sarana Jabar	Plaza Tol Sentul Barat Jalan Tol Lingkar Luar Bogor 16710	Tel. (62 21) 2925 5000 Fax. (62 21) 2925 9942
3	PT Trans Marga Jateng	Jln. Murbei No. 1 Sumur Boto Banyumanik Semarang Jawa Tengah	Tel. (62 24) 3305 6666 Fax. (62 24) 747 5735 e-mail: admin@transmargajateng.com
4	PT Marga Nujyasumo Agung	Gedung MNA, Jl, Raya Taman, Plaza Tol Waru I & Ramp, Sidoarjo 61257	Tel. (62 31) 787 9994, 787 9995 Fax. (62 31) 787 9993
5	PT Jasmarga Bali Tol	Kawasan Ikat Plaza Jln By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 505 Pemogan 80221, Denpasar, Bali	Tel. (62 361) 725 326 Fax. (62 361) 725 327
6	PT Marga Lingkar Jakarta	Plaza 3 Blok B No. 7 Pondok Indah Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310	Tel. (62 21) 7590 0256 Fax. (62 21) 766 0547
7	PT Transmarga Jatim Pasuruan	Gedung Jasa Marga Pandaan Tol, Lt.3 Toll Plaza Pandaan, Pandaan- Pasuruan Jawa Timur	Tel. (62 343) 674 1324 Fax. (62 343) 674 1323 e-mail: tjp_gempas@yahoo.com
8	PT Jasmarga Pandaan Tol	Plaza Tol Pandaan, Jalan Tol Gempol-Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur	Tel. (62 343) 565 0727-30 Fax. (62 343) 565 0727 e-mail: jasmarga.pandaantol@gmail.com
9	PT Marga Kunciran Cengkareng	Business Park Tangerang City Blok A19 Jl. Jend. Sudirman No. 1 Tangerang 15117 – Banten – Jawa Barat	Tel. (62 21) 5578 2453 Fax. (62 21) 5578 2456 e-mail: margakuncirancengkareng@gmail.com
10	PT Marga Trans Nusantara	Ruko Bidex Blok H No. 7 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan	Tel. (62 21) 5315 4680 Fax. (62 21) 5315 4681
11	PT Jasmarga Kualanamutol	Gedung Graha TB Simatupang Wing 2B Lantai 11 Jln. TB Simatupang Kav. 38, Jakarta Selatan 12450	Tel. (62 21) 782 9407 Fax. (62 21) 782 9408 e-mail: jasmarga.kualanamutol@gmail.com
12	PT Solo Ngawi jaya	Graha TB Simatupang – Tower 2 B Lantai 2 - Jl. T.B. Simatupang Kav. 38 - Jakarta Selatan	Tel. (62 21) 2971 2752 Fax. (62 21) 2971 2778 e-mail: solongawijaya@gmail.com
13	PT Ngawi Kertosono Jaya	Graha TB Simatupang – Tower 2 B Lantai 2 - Jl. T.B. Simatupang Kav. 38 - Jakarta Selatan – Indonesia	Tel. (62 21) 2971 2753 Fax. (62 21) 2971 2778 e-mail: ngawikertosonojaya@gmail.com
14	PT Cinere Serpong Jaya	Kompleks Bina Marga No. 21 Jln. Bina Marga Cipayung Jakarta Timur	Tel (021) 844 5659 Fax: - e-mail: cserpongjaya@gmail.com
15	PT Jasa Layanan Pemeliharaan	Komplek Bina Marga No. 2, RT 001/RW 05 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung Jln. Bina Marga, Cipayung Jakarta Timur 13840	Tel. (62 21) 844 4640 Fax. (62 21) 8459 8768 e-mail: jasalayananpemeliharaan@yahoo.com
16	PT Jasmarga Properti	Gedung Workshop PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Jalan Raya TMII I, Jakarta Timur 13560	Tel. (62 21) 841 3632 Fax. - e-mail: jmp@jasmargaproperti.co.id
17	PT Jasa Layanan Operasi	18 Office Park Jl. TB. Simatupang No. 18 Tower A Lt. 5 Unit F, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Tel. (62 21) 2270 1977 Fax. (62 21) 2270 1976 e-mail: pt.jlo@ptjlo.co.id

Entitas Asosiasi

No.	Kantor	Alamat	Telepon/Fax/Email
1	PT Trans Lingkar Kita Jaya	Jln. Gas Alam Kp. Pedurenan RT/RW.06/07 Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis Depok 16954	Tel. (62 21) 8775 7676 Fax. (62 21) 8775 0141 e-mail: sekr@translingkar.co.id
2	PT Ismawa Trimitra	Graha Iskandarsyah Jln. Iskandarsyah Raya 66 C, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160	Tel. (62 21) 7207 5858 Fax. (62 21) 7209 935 e-mail: ismawa@cbn.net.id
3	PT Jatim Marga Utama	Jln. Puncak Permai Utr II 15 Gadel, Sukomanunggal Surabaya 60188 Jawa Timur	Tel. (62 21) 7344 279
5	PT Citra Bhakti Margatama Persada	Jln. P. Komaruddin Km 23 Jakarta 13910	Tel. (62 21) 461 9649
6	PT Citra Ganesha Marga Nusantara	Jln. HR Rasuna Said Kav. X-6 No. 8 Jakarta	Tel. (62 21) 522 2010 Fax. (62 21) 522 9327

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE) PT Datindo Entrycom

Alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jln. Jend.Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Tel. (62 21) 570 9009
Fax. (62 21) 570 9026, 570 8914
www.datindo.com

Jasa Memelihara daftar pemegang saham (DPS) dan melaksanakan pencatatan perubahan-perubahan pada DPS di pasar sekunder

PERUSAHAAN PEMERINGKAT PT Pemeringkat Efek Indonesia

Alamat Panin Tower Senayan City 17th Floor
Jln. Asia Afrika Lot 19
Jakarta 10720
Tel. (62 21) 7278 2380
Fax. (62 21) 7278 2370
www.pefindo.com

Jasa Melakukan pemerinkatan atas Obligasi Jasa Marga (Obligasi XII Seri Q Tahun 2006, Obligasi XIII Seri R Tahun 2007, Obligasi XIV Seri JM-10 Tahun 2010, Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri S tahun 2013 dan Obligasi Berkelanjutan Tahap II Seri T tahun 2014).

NOTARIS**Ashoya Ratam, SH., MKn.**

Alamat Jln. Suryo No. 54, Kebayoran Baru
Jakarta 12180
Tel. (62 21) 2923 6060
Fax. (62 21) 2923 6070

Jasa Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015

KONSULTAN HUKUM**Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015**

Alamat The Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 21st Floor
Sudirman Central Business District
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (62 21) 2960 8888
Fax. (62 21) 2960 8999
www.hhp.co.id

Jasa Konsultan hukum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015.

AKUNTAN PUBLIK**KAP Purwanto, Sungkoro & Surja
(Firma Anggota Ernst & Young Global Limited)**

Alamat Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 2 Lt. 7
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (62 21) 5289 5000
Fax. (62 21) 5289 4100
www.ey.com/id

Jasa

- Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
- Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
- Audit Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku pada tahun buku 2015.
- Audit Kepatuhan terhadap sistem pengendalian internal Perusahaan.

Situs Web Jasa Marga

Jasa Marga telah memiliki situs web resmi dengan alamat **www.jasamarga.com** yang merupakan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi bagi stakeholders, di samping sebagai bentuk kepatuhan Perseroan sebagai perusahaan publik dalam hal keterbukaan informasi.

Selain informasi yang bersifat umum, situs web Perseroan juga memberikan informasi yang lebih spesifik, di antaranya terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur korporasi grup Jasa Marga.
2. Informasi kepemilikan saham JSMR.
3. Profil Dewan Komisaris dan Direksi Jasa Marga.
4. Analisa kinerja keuangan.
5. Laporan keuangan tahunan dan triwulanan lebih dari 5 tahun terakhir.
6. Laporan tahunan lebih dari 5 tahun terakhir.

Informasi tambahan dapat dilihat di bagian Akses terhadap Informasi dan Data Perseroan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Ikhtisar 2015

Ikhtisar Keuangan 2011–2015

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN	2011	2012	2013*	2014*	2015
Pendapatan	6.486	9.070	10.271	9.173	9.848
Beban Pendapatan	(4.155)	(6.094)	(8.012)	(5.483)	(5.720)
Laba Usaha	2.330	2.975	2.259	3.072	3.477
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.590	2.055	1.310	1.850	2.068
Beban Pajak Penghasilan	(411)	(519)	(383)	(613)	(749)
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:					
Pemilik Entitas Induk	1.196	1.602	1.027	1.421	1.466
Kepentingan Non Pengendali	(17)	(66)	(98)	(185)	(147)
Total Laba Tahun Berjalan	1.179	1.535	928	1.237	1.319
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:					
Pemilik Entitas Induk	1.198	1.602	1.026	1.365	1.449
Kepentingan Non Pengendali	(17)	(66)	(98)	(184)	(146)
Total Penghasilan Komprehensif	1.180	1.536	928	1.180	1.302
DATA SAHAM					
Jumlah Saham yang Beredar (juta lembar)	6.775	6.800	6.800	6.800	6.800
Laba Bersih per Saham (Rupiah penuh)	177	236	151	209	215
Dividen per Saham (Rupiah penuh)	79	94	79	72	**
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
Total Aset	20.915	24.753	28.064	31.859	36.724
Total Liabilitas	12.555	14.965	17.875	20.839	24.356
Total Ekuitas	8.360	9.787	10.189	11.021	12.368
Belanja Modal	2.304	1.832	4.931***	4.788***	4.158***
Investasi pada Perusahaan Asosiasi	201	176	179	171	166
Modal Kerja Bersih	228	(2.117)	(1.083)	(755)	(4.015)
RASIO KEUANGAN (%)					
Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset	5,72	6,47	3,66	4,46	3,99
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas	14,31	16,37	10,08	12,90	11,86
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan	18,45	17,66	10,01	15,50	14,89
Rasio Lancar	98,21	68,16	77,77	82,44	48,16
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	150,00	152,90	175,41	189,09	196,92
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	60,03	60,46	63,69	65,41	66,32
RASIO INDUSTRI					
Rasio Pendapatan Tol terhadap Panjang Jalan (Rp miliar/km)	8,89	10,24	10,36	11,54	12,02
Rasio Pendapatan Tol terhadap Jumlah Karyawan (Rp penuh/orang)	0,94	1,10	1,19	1,42	1,55

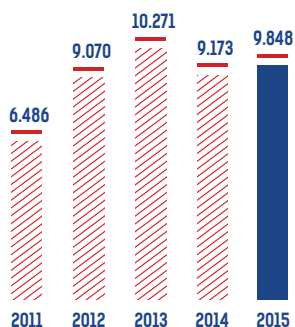
*) Disajikan kembali

**) Akan ditentukan dalam RUPS Tahunan pada tahun 2016

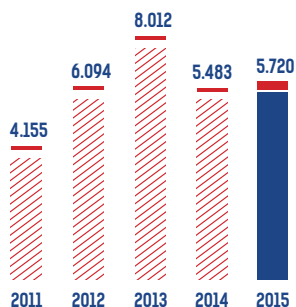
***) Total Belanja Modal Konsolidasi

Pencapaian Keuangan 2011 - 2015

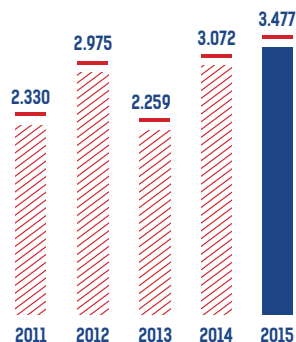
PENDAPATAN (miliar Rupiah)



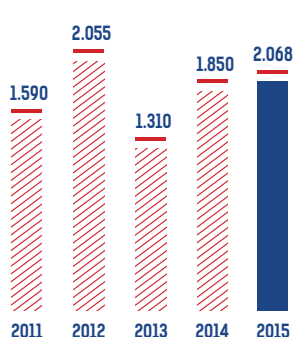
BEBAN PENDAPATAN (miliar Rupiah)



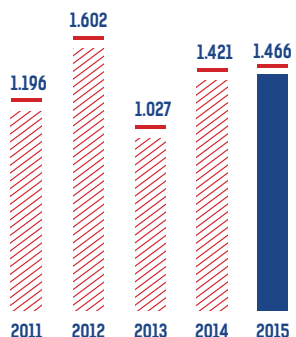
LABA USAHA (miliar Rupiah)



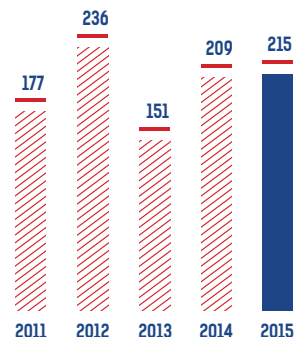
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (miliar Rupiah)



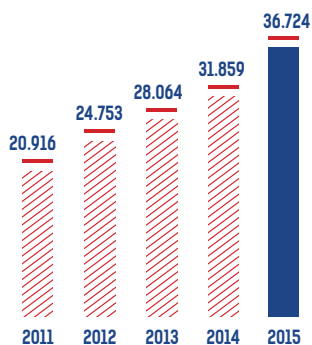
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (miliar Rupiah)



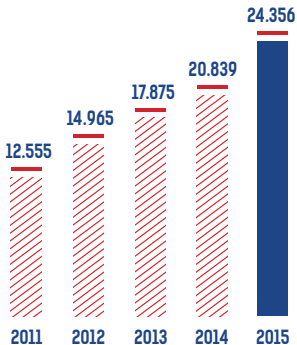
LABA BERSIH PER SAHAM (Rupiah Penuh)



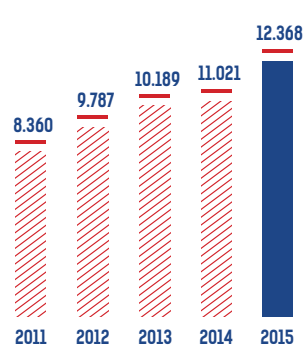
ASET (miliar Rupiah)



LIABILITAS (miliar Rupiah)



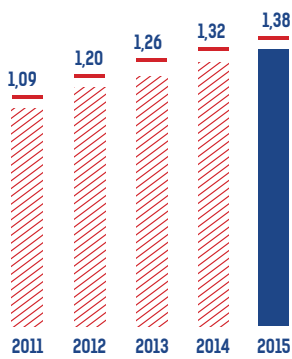
EKUITAS (miliar Rupiah)



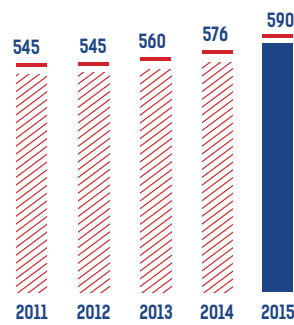
Ikhtisar Operasional 2011-2015

Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
Panjang Jalan Tol (km)	545	545	560	576	590
Volume Lalu Lintas Transaksi (miliar transaksi kendaraan)	1,09	1,20	1,26	1,32	1,38
Pemenuhan SPM	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Jumlah Karyawan Tetap (Orang)	5.154	5.075	4.875	4.692	4.561
Jumlah Petugas Pengumpulan Tol/Pultol (Orang)	3.805	4.724	4.917	5.094	4.509
Volume Lalu Lintas Transaksi Harian Rata-rata (kendaraan)	2.991.176	3.291.413	3.447.999	3.613.699	3.779.640
Pendapatan Tol Harian Rata-rata (ribuan Rupiah)	13.269.123	15.292.473	15.897.897	18.209.295	19.509.657

VOLUME LALU LINTAS TRANSAKSI 2011-2015
(miliar transaksi kendaraan)



PERKEMBANGAN PANJANG JALAN TOL YANG KONSESINYA DIMILIKI OLEH JASA MARGA 2011-2015
(km)



Ikhtisar Saham

Saham JSMR

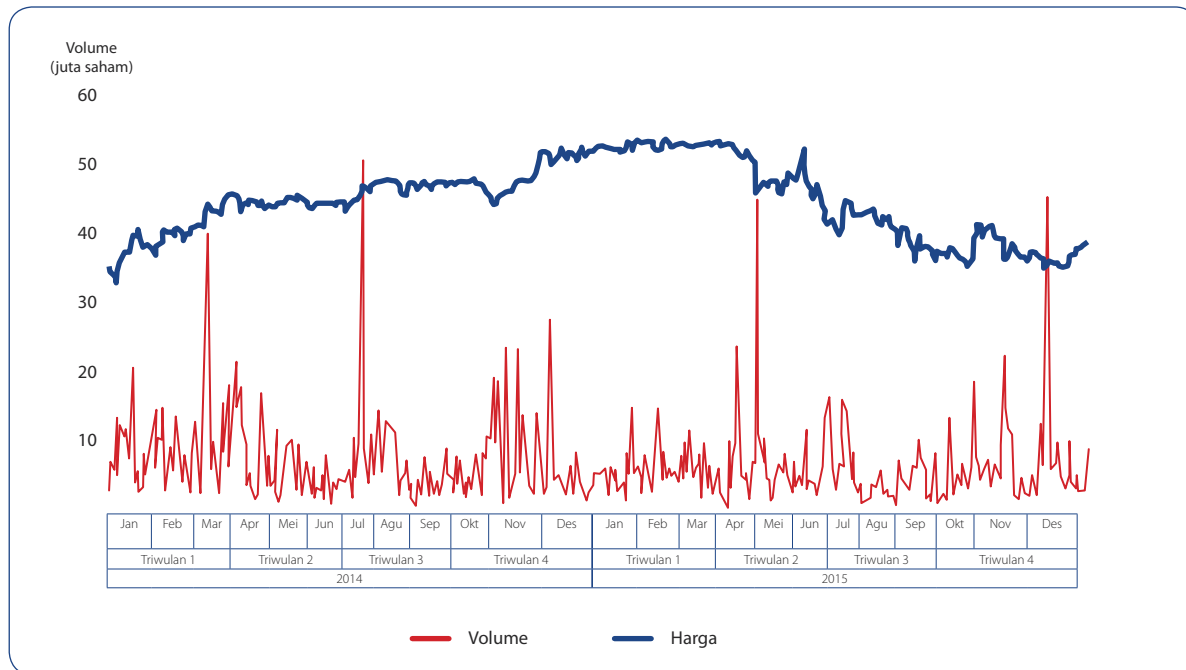
INFORMASI HARGA & VOLUME PERDAGANGAN SAHAM JSMR DI BURSA EFEK INDONESIA PER TRIWULAN 2007-2015

Tahun Kalender	Triwulan	Harga Tertinggi (Rp penuh)	Harga Terendah (Rp penuh)	Harga Penutupan (Rp penuh)	Volume Perdagangan (lembar)	Jumlah Saham Beredar (lembar)	Kapitalisasi Pasar (Rp miliar)
2007	4	2.200	1.700	1.900	7.779.000	6.800.000.000	12.920
	1	2.025	1.220	1.400	844.500	6.800.000.000	9.520
2008	2	1.450	1.150	1.160	2.034.500	6.800.000.000	7.888
	3	1.380	830	1.010	667.500	6.800.000.000	6.868
—	4	1.000	610	910	10.152.500	6.800.000.000	6.188
	1	1.060	830	900	11.740.000	6.800.000.000	6.120
2009	2	1.740	900	1.550	1.768.000	6.800.000.000	10.540
	3	1.920	1.540	1.870	6.375.000	6.800.000.000	12.716
—	4	1.940	1.710	1.810	5.534.500	6.775.476.500	12.264
	1	1.900	1.660	1.790	12.074.000	6.775.476.500	12.128
2010	2	2.200	1.750	2.025	7.123.000	6.775.476.500	13.720
	3	3.375	2.000	3.200	8.456.500	6.775.476.500	21.682
—	4	3.900	3.150	3.425	9.506.500	6.775.476.500	23.206
	1	3.575	2.925	3.400	10.509.500	6.775.476.500	23.037
2011	2	3.650	3.250	3.625	16.022.000	6.775.476.500	24.561
	3	4.275	3.400	3.975	6.335.500	6.775.476.500	26.933
—	4	4.275	3.550	4.200	2.323.500	6.775.476.500	28.457
	1	5.150	4.125	5.150	17.973.000	6.775.476.500	34.894
2012	2	5.700	4.875	5.400	8.058.500	6.800.000.000	36.720
	3	6.000	5.300	5.850	10.731.500	6.800.000.000	39.780
—	4	5.950	5.450	5.450	10.019.500	6.800.000.000	37.060
	1	5.950	5.100	5.950	17.130.000	6.800.000.000	40.460
2013	2	6.950	5.700	6.050	16.095.500	6.800.000.000	41.140
	3	6.000	5.300	5.200	11.699.000	6.800.000.000	35.360
—	4	5.800	4.525	4.725	4.192.000	6.800.000.000	32.130
	1	6.000	4.450	6.000	8.783.600	6.800.000.000	40.800
2014	2	6.175	5.800	5.975	6.053.800	6.800.000.000	40.630
	3	6.625	5.925	6.450	5.031.500	6.800.000.000	43.860
—	4	7.050	5.950	7.050	5.713.100	6.800.000.000	47.940
	1	7.250	6.900	7.200	6.392.800	6.800.000.000	48.960
2015	2	7.200	5.275	5.475	11.233.600	6.800.000.000	37.230
	3	6.075	4.680	4.825	5.138.600	6.800.000.000	32.810
—	4	5.625	4.500	5.225	9.124.700	6.800.000.000	35.530

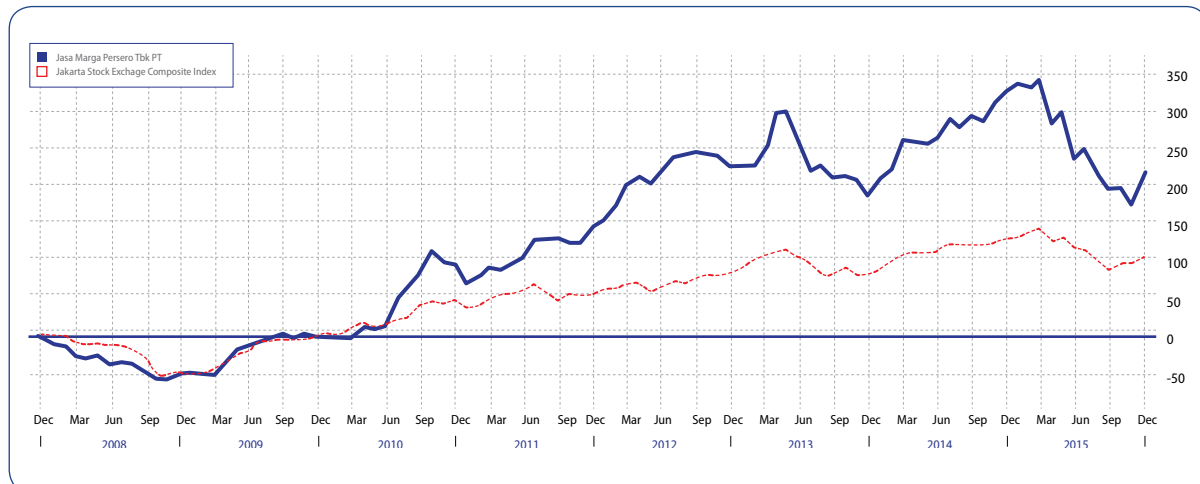
Catatan:

*) Pada Triwulan 4 Tahun 2009, Perseroan melakukan Buyback sebesar 24.523.500 lembar saham dan pada Triwulan 2 Tahun 2012 Perseroan melakukan penjualan kembali saham buyback tersebut.

VOLUME DAN HARGA SAHAM JAS MARGA (JSMR) TAHUN 2014 DAN 2015















KOMPARASI TINGKAT PENGEMBALIAN JSMR VS IHSG 2007-2015



Sejak tercatat di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 12 November 2007 sampai dengan 31 Desember 2015, JSMR memberikan tingkat pengembalian sebesar 218,82%.

Sampai dengan 31 Desember 2015, JSMR juga tercatat dalam beberapa Indeks Lokal dan Internasional.

INDEKS DENGAN SAHAM JASA MARGA (JSMR) SEBAGAI KONSTITUEN PER 31 DESEMBER 2015

No.	Indeks	Deskripsi	Definisi	Jasa Marga Masuk Pertama Kali (tahun)
1	 LQ45	Jakarta Stock Exchange LQ45 Index	Index dari 45 saham yang terpilih berdasarkan Likuiditas perdagangan saham dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar yang disesuaikan setiap enam bulan	n.a.
2	 JAKINFR	Jakarta Stock Exchange Infrastructure Utility and Transportation Index	Index yang berisi perusahaan tercatat dalam bidang Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi di Indonesia	n.a.
3	 JAKISL	Jakarta Stock Exchange Jakarta Islamic Index	Indeks dari 30 saham yang mengakomodasi syariat investasi dalam Islam atau Indeks yang berdasarkan syariah Islam	2012
4	 SKEHATI	Sustainable Responsible Investment Index – SRI KEHATI INDEX	Indeks dari 25 saham perusahaan tercatat yang dipilih dengan mempertimbangkan kriteria emiten-emiten yang memiliki kinerja sangat baik dalam mendorong usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.	2009
5	 INVE33	Investor33	Indeks dari 33 konstituen yang terdiri dari saham/emiten yang dipilih berdasarkan kriteria kapitalisasi pasar, likuiditas pasar dan faktor-faktor fundamental.	n.a.
6	 ISSI	Indonesia Sharia Index	Indeks yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah.	2015
7	 SMINFRA18	Jakarta Stock Exchange dan PT SMI Infrastructure Index	Indeks yang berisi 18 saham yang dipilih dari daftar saham sektor infrastruktur dan penunjangnya yang berperan dalam pembangunan infrastruktur dengan faktor fundamental yang baik, memiliki kapitalisasi pasar besar, serta memiliki free float saham dan aktivitas transaksi saham yang tinggi (nilai, frekuensi, dan hari transaksi).	n.a.
8	 KOMPAS100	Kompas 100 Index	Indeks 100 saham perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang secara resmi diterbitkan oleh BEI bekerja sama dengan koran Kompas.	2011
9	 MNC36	MNC 36 Index	Indeks yang berisi 36 saham yang dipilih berdasarkan kriteria kapitalisasi pasar, likuiditas transaksi dan faktor fundamental.	2013
10	 MSCI	MSCI Indices	Indeks-indeks Morgan Stanley Capital International	n.a.
11	 FTSE	FTSE Indices	Indeks-indeks Financial Times Stock Exchange	n.a.
12	 Bloomberg	Bloomberg Indices	Indeks-indeks Bloomberg	n.a.

Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Bloomberg

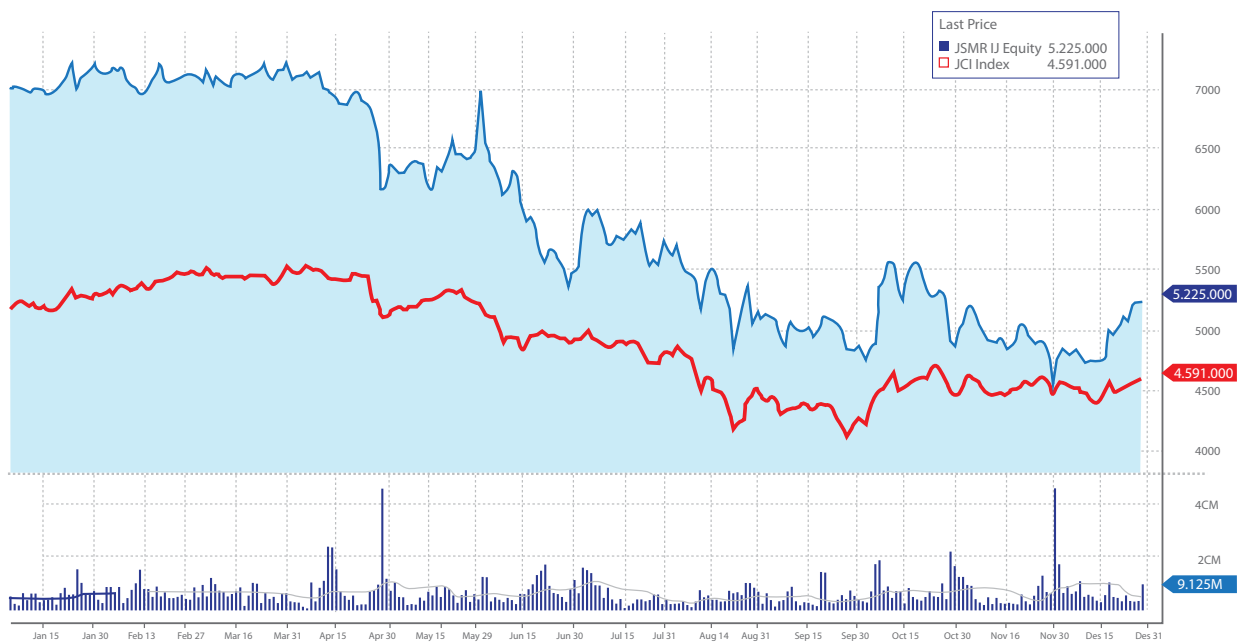
Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham JSMR Selama Tahun 2015

Sepanjang tahun 2015, kondisi ekonomi global dan perpolitikan Indonesia sangat mempengaruhi kondisi pasar modal dalam negeri. Pada tahun 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka pada level 5.242,769 dan ditutup pada level 4.593 atau menurun 12,39%.

Kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi yang fokus pada pembangunan infrastruktur belum memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja saham JSMR dikarenakan realisasi penyerapan anggaran pada sektor ini pada tahun 2015 masih tergolong kecil.

Pada awal tahun 2015, saham JSMR dibuka pada level 7.100 dan pada akhir tahun 2015 ditutup pada level 5.225 atau menurun 26,41%.

PERGERAKAN SAHAM JSMR DAN IHSG 2015



Ikhtisar Obligasi

OBLIGASI BEREDAR JASA MARGA 2014

No.	Obligasi **	Kode	Jumlah (Rp Juta)	Tingkat Bunga (%)	Jatuh Tempo	Peringkat
1.	JORR II (A) *	-	77.377	15,25	2016	-
2.	JORR II (B) *	-	77.377	15,25	2018	-
3.	JORR II (C) *	-	104.400	15,50	2021	-
4.	Jasa Marga XII (Q)	JMPD12Q	1.000.000	13,50	2016	^{id} AA
5.	Jasa Marga XIII (R)	JMPD13R	1.500.000	10,25	2017	^{id} AA
6.	Jasa Marga XIV (JM-10)	JMPD14JM10	1.000.000	9,35	2020	^{id} AA
7.	Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri A	JSMR01ACN1S	700.000	8,40	2014	^{id} AA
8.	Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri B	JSMR01BCN1S	400.000	8,70	2016	^{id} AA
9.	Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri C	JSMR01CCN1S	1.000.000	8,90	2018	^{id} AA
10.	Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T	JSMR01CN2T	1.000.000	9,85	2019	^{id} AA

Keterangan: * Tidak Dicatatkan

** Seluruh Obligasi Jasa Marga dicatatkan di Bursa Efek Indonesia

OBLIGASI BEREDAR JASA MARGA TAHUN 2015

No.	Obligasi **	Kode	Jumlah (Rp Juta)	Tingkat Bunga (%)	Jatuh Tempo	Peringkat
1.	JORR II (A) *	-	77.377	15,25	2016	-
2.	JORR II (B) *	-	77.377	15,25	2018	-
3.	JORR II (C) *	-	104.400	15,50	2021	-
4.	Jasa Marga XII (Q)	JMPD12Q	1.000.000	13,50	2016	^{id} AA
5.	Jasa Marga XIII (R)	JMPD13R	1.500.000	10,25	2017	^{id} AA
6.	Jasa Marga XIV (JM-10)	JMPD14JM10	1.000.000	9,35	2020	^{id} AA
7.	Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri B	JSMR01BCN1S	400.000	8,70	2016	^{id} AA
8.	Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri C	JSMR01CCN1S	1.000.000	8,90	2018	^{id} AA
9.	Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T	JSMR01CN2T	1.000.000	9,85	2019	^{id} AA

Keterangan: * Tidak Dicatatkan

** Seluruh Obligasi Jasa Marga dicatatkan di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan surat Pefindo kepada Perseroan No. 837/PEF-DIR/VI/2015, No. 838/PEF-DIR/VI/2015, No. 838A/PEF-DIR/VI/2015 dan No. 839/PEF-DIR/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 atas Obligasi Jasa Marga di atas, ditetapkan peringkat idAA (double A) dengan outlook negatif.

Definisi Peringkat



^{id}AA merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen finansial jangka panjang dalam pembayaran hutangnya relatif terhadap obligor Indonesia lainnya.

Kronologis Pencatatan Saham dan Emisi Obligasi Jasa Marga

Kronologis Pencatatan Saham Jasa Marga

Tanggal	Aksi Korporasi	Komposisi Kepemilikan						
		Pemerintah Republik Indonesia			Publik		Saham Pembelian Kembali (Buyback)	
		Saham Seri A	Saham Seri B	%	Saham Seri B	%	Saham Seri B	%
Status Sebelum IPO		1	4.759.999.999	100	-	-	-	-
12 November 2007	IPO di Bursa Efek Jakarta	1	4.759.999.999	70	2.040.000.000	30	-	-
13 Oktober 2008 - 12 Januari 2009	Pembelian Saham Kembali (Buyback)	1	4.759.999.999	70	2.015.476.500	29,6	24.523.500	0,4
05 April 2012 - 25 Juni 2012	Penjualan Kembali Saham Buyback	1	4.759.999.999	70	2.040.000.000	30	(24.523.500)	-
Status per 31 Desember 2015		1	4.759.999.999	70	2.040.000.000	30	-	-

Kronologis Pencatatan Obligasi Jasa Marga

No.	Obligasi **	Jumlah (Rp Juta)	Tenor (Tahun)	Tanggal Penerbitan (tgl-bln-thn)	Tanggal Jatuh Tempo (tgl-bln-thn)	Peringkat	Status
1	Jasa Marga I (A)	23.718	5	11-03-1983	11-03-1988		Lunas
2	Jasa Marga II/1 (B)	40.000	5	31-10-1983	31-10-1988		Lunas
3	Jasa Marga II/2 (C)	20.000	5	06-02-1984	06-02-1989		Lunas
4	Jasa Marga II/2 (D)	20.000	5	05-03-1984	05-03-1989		Lunas
5	Jasa Marga II/2 (E)	20.000	5	31-03-1984	31-03-1989		Lunas
6	Jasa Marga III/1 (F/1)	40.000	5	28-12-1984	28-12-1989		Lunas
7	Jasa Marga III/2 (F/2)	30.000	5	01-03-1985	01-03-1990		Lunas
8	Jasa Marga IV/1 (G/1)	40.000	5	27-12-1985	27-12-1990		Lunas
9	Jasa Marga IV/2 (G/2)	60.000	5	24-03-1986	24-03-1991		Lunas
10	Jasa Marga V/1 (H)	60.000	5	06-07-1987	06-07-1992		Lunas
11	Jasa Marga V/2 (I)	40.000	5	19-11-1987	19-11-1992		Lunas
12	Jasa Marga VI/1 (J)	75.000	8	20-6-1988	20-06-1996		Lunas
13	Jasa Marga VI/2 (K)	50.000	8	01-02-1989	01-02-1997		Lunas
14	Obligasi Indeks Pendapatan Tahap I	40.000	12	31-07-1989	31-07-2001		Lunas
15	Obligasi Indeks Pendapatan Tahap II	30.000	12	21-09-1989	21-09-2001		Lunas
16	Jasa Marga VII (L)	100.000	8	08-06-1990	08-06-1998		Lunas
17	Jasa Marga VIII (M)	150.000	8	27-03-2000	27-03-2008		Lunas
18	Jasa Marga IX (N)	400.000	5	12-04-2002	12-04-2007		Lunas
29	Jasa Marga X (O)	650.000	8	04-12-2002	04-12-2010		Lunas
20	Jasa Marga XI (P)	1.000.000	10	10-10-2003	10-10-2013	id _{AA}	Lunas
21	Jasa Marga I (JM-10)	500.000	3	10-12-2010	10-12-2013	id _{AA}	Lunas
22	JORR I *)	274.260	10	19-11-2003	19-11-2013	-	Lunas
23	JORR II (A) *)	77.377	10	05-01-2006	05-01-2016	-	Belum Lunas
	JORR II (B) *)	77.377	12	05-01-2006	05-01-2018	-	Belum Lunas
	JORR II (C) *)	104.400	15	05-01-2006	05-01-2021	-	Belum Lunas
24	Jasa Marga XII (Q)	1.000.000	10	06-07-2006	06-07-2016	id _{AA}	Belum Lunas
25	Jasa Marga XIII (R)	1.500.000	10	21-06-2007	21-06-2017	id _{AA}	Belum Lunas
26	Jasa Marga XIV (JM-10)	1.000.000	10	12-10-2010	12-10-2020	id _{AA}	Belum Lunas

Kronologis Pencatatan Obligasi Jasa Marga (lanjutan)

No.	Obligasi **	Jumlah (Rp Juta)	Tenor (Tahun)	Tanggal Penerbitan (tgl-blh-thn)	Tanggal Jatuh Tempo (tgl-blh-thn)	Peringkat	Status
27	Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri A	700.000	370 hari	27-09-2013	02-10-2014	id,AA	Lunas
	Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri B	400.000	3	27-09-2013	27-09-2016	id,AA	Belum Lunas
	Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-Seri C	1.000.000	5	27-09-2013	27-09-2018	id,AA	Belum Lunas
28	Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T	1.000.000	5	22-09-2014	19-09-2019	id,AA	Belum Lunas

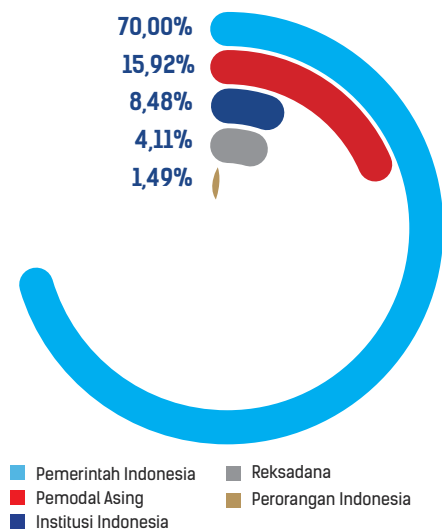
Keterangan: * Tidak Dicatatkan ** Semua Obligasi Jasa Marga dicatangkan di Bursa Efek Indonesia

Komposisi Kepemilikan Saham JSMR

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM JSMR PER 31 DESEMBER 2015

Keterangan	Jumlah Pemilik	Jumlah Saham (lembar)	Komposisi (%)
Negara RI	1	4.760.000.000	70,00
Publik	9.325	2.040.000.000	30,00
Pemodal Nasional			
Perorangan Indonesia	8.128	101.038.124	1,48
Lembaga/Badan Usaha Indonesia	83	256.409.537	3,77
Asuransi	78	218.942.200	3,21
Yayasan	18	9.511.700	0,14
Koperasi	6	963.481	0,01
Dana Pensiun	141	90.985.600	1,33
Reksadana	204	279.306.123	4,10
Pemodal Asing			
Perorangan	44	1.060.000	0,01
Badan Usaha Asing	623	1.081.783.235	15,90
Total	9.326	6.800.000.000	100,00

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM JSMR PER 31 DESEMBER 2015



KEPEMILIKAN SAHAM JSMR YANG MENCAPI 5% ATAU LEBIH

per 31 Desember 2015

Nama	Status Pemilik	Jumlah Saham (lembar)	Persentase (%)
Negara Republik Indonesia	Negara Republik Indonesia	4.760.000.000	70,00

KEPEMILIKAN SAHAM JSMR YANG KURANG DARI 5%

per 31 Desember 2015

Nama	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Persentase (%)
Pemodal Nasional	8.658	957.156.765	14,08
Pemodal Asing	667	1.082.843.235	15,92

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Utama memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna dan 4.760.000.000 lembar Saham Biasa Seri B. Sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Negara Republik Indonesia memiliki hak-hak istimewa dalam hal menambah atau mengurangi modal dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, penggabungan, peleburan, pengambilalihan serta pembubaran dan likuidasi Perseroan.

Kepemilikan Saham Jasa Marga oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

KEPEMILIKAN SAHAM JASA MARGA OLEH DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KARYAWAN

per 31 Desember 2015

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase (%)
Refly Harun	Komisaris Utama/Komisaris Independen	0	0
Akhmad Syakhroza	Komisaris	0	0
Boediarso Teguh Widodo	Komisaris	0	0
Hambra	Komisaris	0	0
Taufik Widjoyono	Komisaris	0	0
Sigit Widyanan	Komisaris Independen	0	0
Adityawarman	Direktur Utama	134.500	0,0020
Christantio Prihambodo	Direktur Operasi	0	0
Hasanudin	Direktur Pengembangan Usaha	8.500	0,0001
Reynaldi Hermansjah	Direktur Keuangan	200.000	0,0029
Muh Najib Fauzan	Direktur SDM & Umum	110.200	0,0016
Achiran Pandu Djajanto	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	0	0
Total Kepemilikan Saham Dewan Komisaris & Direksi		453.200	0,0067
Kepemilikan Saham Karyawan		8.856.761	0,1303
Total Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, Direksi & Karyawan		9.309.961	0,1369

Pemegang Saham dan Obligasi Terbesar

Dua Puluh Terbesar Pemegang Saham Jasa Marga

No.	Nama	Jumlah Saham	Persentase (%)
1	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	4.760.000.000	70,00
2	BPJS KETENAGAKERJAAN-JHT	188.688.200	2,77
3	BNYM SA/NV AS CUST OF EMPLOYEES PROVIDENT FD BOARD-2039844119	116.758.700	1,71
4	JPMORGAN CHASE BANK NA RE NON-TREATY CLIENTS - 2157804006	87.152.255	1,28
5	PT TASPEN (PERSERO) - THT	38.122.200	0,56
6	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16	37.711.300	0,55
7	PT AIA FINL - UL EQUITY	33.516.400	0,49
8	JPMCB-JPMORGAN FUNDS -2157804185	33.491.700	0,49
9	BBH BOSTON S/A VANGRD EMG MKTS STK INFD	32.773.800	0,48
10	SMARTLINK RUPIAH EQUITY FUND	30.124.000	0,44
11	GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	27.942.612	0,41
12	BPJS KETENAGAKERJAAN - JKK	25.915.400	0,38
13	PT. ASURANSI SINAR MAS	21.184.200	0,31
14	RD BNP PARIBAS EKUITAS - 897634000	20.661.100	0,30
15	REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS-908294000	19.890.100	0,29
16	JPMCB-VANGUARD TOTAL INTERNL STOCK INDEX FUND -2157804327	19.200.400	0,28
17	REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI DINAMIS	17.789.400	0,26
18	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	17.396.300	0,25
19	REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	16.032.600	0,23
20	SSB 28TS S/A BP PENSION FUND-2144615949	15.190.490	0,22

Sepuluh Terbesar Pemegang Obligasi Jasa Marga

per 31 Desember 2015

OBLIGASI JORR II (A)

No.	Nama	Jumlah Efek (Rp miliar)	%
1.	PT Bank Bukopin	4,45	5,76
2.	Bank DKI	3,32	4,29
3.	PT Bank Antar Daerah	0,09	0,11
4.	PT Bank Windu Kentjana	0,20	0,26
5.	Arjuna Finance	0,43	0,56
6.	Depkeu RI cq. DJKN cq. Ditjen Kekayaan Negara Lain2	0,47	0,61
7.	PT Bank of India Indonesia Tbk. d/h Bank Swadesi	0,13	0,17
8.	PT Bank Panin Tbk	67,41	87,12
9.	PT Bank Bisnis Internasional	0,11	0,14
10.	HSBC Securities Services as Custody of Bank Ekonomi	0,14	0,19

OBLIGASI JORR II (B)

No.	Nama	Jumlah Efek (Rp miliar)	%
1.	PT Bank Bukopin	4,45	5,76
2.	Bank DKI	3,32	4,29
3.	PT Bank Antar Daerah	0,09	0,11
4.	PT Bank Windu Kentjana	0,20	0,26
5.	Arjuna Finance	0,43	0,56
6.	Depkeu RI cq. DJKN cq. Ditjen Kekayaan Negara Lain2	0,47	0,61
7.	PT Bank of India Indonesia Tbk. d/h Bank Swadesi	0,13	0,17
8.	PT Bank Panin Tbk	67,41	87,12
9.	PT Bank Bisnis Internasional	0,11	0,14
10.	HSBC Securities Services as Custody of Bank Ekonomi	0,14	0,19

OBLIGASI JORR II (C)

No.	Nama	Jumlah Efek (Rp miliar)	%
1.	PT Bank Bukopin	5,94	5,69
2.	Bank DKI	4,43	4,24
3.	PT Bank Antar Daerah	0,12	0,11
4.	PT Bank Windu Kentjana	0,27	0,26
5.	Arjuna Finance	0,58	0,55
6.	Depkeu RI cq. DJKN cq. Ditjen Kekayaan Negara Lain2	0,63	0,60
7.	PT Bank of India Indonesia Tbk. d/h Bank Swadesi	0,17	0,17
8.	PT Bank Panin Tbk	89,89	86,10
9.	PT Bank Bisnis Internasional	0,14	0,14
10.	Bpk. Wiantono/Bpk. Wijaya Pangestu	1,23	1,18

OBLIGASI JASA MARGA XII (Q)

No.	Nama	Jumlah Efek (Rp miliar)	%
1	BPJS Ketenagakerjaan JHT (dh PT Jamsostek)	207,00	20,70
2	PT Taspen (Persero) - THT	150,00	15,00
3	BCA- TREASURY DEPT	100,00	10,00
4	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)- DIVISI TREASURY	74,00	7,40
5	DP BNI	51,00	5,10
6	Dana Pensiun PLN	50,00	5,00
7	DP.Telkom	50,00	5,00
8	RD MANDIRI INVESTA PASAR UANG- 983194000	47,00	4,70
9	DANA PENSIUN BRI	30,00	3,00
10	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)- DIVISI TREASURY	20,00	2,00

OBLIGASI JASA MARGA XIII (R)

No.	Nama	Jumlah Efek (Rp miliar)	%
1	PT Taspen (Persero) - THT	323,00	21,53
2	BCA- TREASURY DEPT	231,00	15,40
3	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)- DIVISI TREASURY	199,00	13,27
4	BPJS Ketenagakerjaan JHT (dh PT Jamsostek)	74,00	4,93
5	DANA PENSIUN BRI	60,00	4,00
6	PT ASURANSI ASTRA BUANA	48,00	3,20
7	DANA PENSIUN PERTAMINA	35,00	2,33
8	Treasury bank bjb	30,00	2,00
9	BPJS KETENAGAKERJAAN - (TRD-JHT)	30,00	2,00
10	PT. JASA RAHARJA (PERSERO)	29,00	1,93

OBLIGASI JASA MARGA XIV (JM-10)

No.	Nama	Jumlah Efek (Rp miliar)	%
1	BPJS Ketenagakerjaan JHT (dh PT Jamsostek)	230,00	23,00
2	BPJS KESEHATAN	100,00	10,00
3	BCA- TREASURY DEPT	90,00	9,00
4	PT. JASA RAHARJA (PERSERO)	80,00	8,00
5	PT AJ BRINGIN JIWA SEJAHTERA	59,00	5,90
6	PT ASURANSI ASTRA BUANA	35,00	3,50
7	REKSADANA OPTIMA PENDAPATAN ABADI	30,00	3,00
8	RDPT TRIM Performa Dinamis Terbatas	29,90	2,99
9	BNI TREASURY	25,00	2,50
10	Reksa Dana Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal	25,00	2,50

OBLIGASI BERKELANJUTAN I JASA MARGA TAHAP I TAHUN 2013 SERI S-SERI B

No.	Nama	Jumlah Efek (Rp miliar)	%
1	BATAVIA PROTEKSI ANDALAN 11	68,50	17,13
2	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	60,00	15,00
3	BDI Treasury ALM Family	40,00	10,00
4	DP. Jasa marga	30,00	7,50
5	PT AIA FINANCIAL	26,00	6,50
6	DPLK Bank BNI	25,00	6,25
7	Treasury bank bjb	20,00	5,00
8	PT BANK RIAU KEPRI	20,00	5,00
9	YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PT BRI	20,00	5,00
10	REKSA DANA MANDIRI OBLIGASI UTAMA	20,00	5,00

OBLIGASI BERKELANJUTAN I JASA MARGA TAHAP I TAHUN 2013 SERI S-SERI C

No.	Nama	Jumlah Efek (Rp miliar)	%
1	BPJS Ketenagakerjaan JHT (dh PT Jamsostek)	120,00	12,00
2	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	110,00	11,00
3	DPLK Bank BNI	70,00	7,00
4	BPJS KETENAGAKERJAAN - JKK	50,20	5,02
5	PT. Bank Internasional Indonesia	50,00	5,00
6	PT. JASA RAHARJA (PERSERO)	50,00	5,00
7	MANDIRI SEKURITAS, PT.	50,00	5,00
8	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)-DIVISI TREASURY	38,00	3,80
9	BPJS KETENAGAKERJAAN - BPJS	36,23	3,62
10	DP BNI	30,00	3,00

OBLIGASI BERKELANJUTAN I JASA MARGA TAHAP II TAHUN 2014 SERI T

No.	Nama	Jumlah Efek (Rp miliar)	%
1	PT Bank Mandiri	155,00	15,50
2	BPJS Ketenagakerjaan JHT (dh PT Jamsostek)	100,00	10,00
3	Dana Pensiun PLN	75,00	7,50
4	DPLK Bank BNI	70,00	7,00
5	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)-DIVISI TREASURY	51,00	5,10
6	PT. JASA RAHARJA (PERSERO)	50,00	5,00
7	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	50,00	5,00
8	REKSA DANA TERPROTEKSI BNI-AM PROTEKSI XXXIX	50,00	5,00
9	REKSA DANA TERPROTEKSI AVRIST PROTECTED FUND I	45,00	4,50
10	RDPT Danareksa Investa Optima	27,00	2,70

Peristiwa Penting 2015



5 JANUARI
Penandatanganan PPJT Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi

Anak Perusahaan Jasa Marga yang mengelola Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), PT Jasamarga Kualanamu Tol melakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, jalan tol dengan masa konsesi 40 tahun dan total panjang 61,70 km.

23 JANUARI
Penandatanganan Kontrak Manajemen dan Pakta Integritas Tahun 2015

Direksi Jasa Marga beserta seluruh Kepala Unit Kerja dan Direktur Anak Perusahaan melakukan Penandatanganan Kontrak Manajemen dan Pakta Integritas Tahun 2015 di Ruang Pertemuan Jasa Marga Development Center (JMDC).



31 JANUARI
Deklarasi 2015 Gerakan Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna Narkoba

Jasa Marga sebagai salah satu Pegiat Anti Narkoba ikut mendukung Pemerintah bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, Polri dan Mahasiswa serta lapisan Masyarakat melakukan Deklarasi 2015 Gerakan Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna Narkoba di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta dan dihadiri banyak pihak



01

02

03

2015

2 FEBRUARY
Jasa Marga Berikan Bibit Pohon dan Biopori

Jasa Marga memberi 5.000 bibit pohon dan 1.000 alat biopori bagi warga rumah susun Jalan Komarudin, Cakung, Jakarta Timur dengan tujuan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, hijau, dan asri.



18 MARET
RUPS Tahunan Tahun Buku 2014

Jasa Marga melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun buku 2014 di Ruang Rimbawan 1, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat. Rapat antara lain memutuskan perubahan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris.



19 MARET
Jasa Marga Raih Obsession Awards 2015

Jasa Marga meraih penghargaan pada Obsession Awards 2015 yang dilaksanakan di Bali Room Kempinski Hotel, Jakarta. Jasa Marga memperoleh penghargaan Best State-Owned Companies Achievers, sub category Construction & Infrastructure.





10 APRIL
JMTIC Kembali Raih Penghargaan CCSEA dengan Predikat Excellent

Jasa Marga Traffic Information Center (JMTIC) kembali menerima penghargaan Contact Center Service Excellence Award (CCSEA) tahun 2015 dan selama tiga kali berturut-turut berhasil meraih predikat Excellent dalam Service Performance untuk kategori Public Service dengan nilai 88.965

30 APRIL
Groundbreaking Jalan Tol Ngawi-Kertosono

Presiden Joko Widodo membuka acara Percepatan Pembangunan Jalan Tol Solo-Ngawi & Groundbreaking Jalan Tol Ngawi-Kertosono di Desa Klitik, Geneng, Ngawi, Jawa Timur.



22 MEI
Jasa Marga Raih Penghargaan Seviles Quality Award 2015

Jasa Marga kembali membuktikan diri sebagai perusahaan yang mengedepankan pelayanan kepada para pengguna jalan tol dengan meraih penghargaan Services Quality Award 2015 yang diselenggarakan Carre-Center for Customer Satisfaction & Loyalty (Carre-CCSL) dan Majalah Service Excellence. Jasa Marga berhasil memperoleh Service Quality Diamond Award 2015, kategori Toll Road dengan nilai indeks kepuasan pelanggan untuk perusahaan jalan tol 4,0574.

04

05

06

26 MARET
Jasa Marga Raih 2 Penghargaan di IHCA 2015

Jasa Marga mendapat 2 penghargaan pada Indonesia Human Capital Award (IHCA) 2015 di Grand Sahid Jaya Hotel, yang diikuti oleh semua perusahaan BUMN, BUMD, Tbk, Swasta dan Multinasional. Dalam acara yang bertema "Grow BIG Through Human Capital", Jasa Marga mendapatkan penghargaan kategori Best Performance Management dan kategori Top 10-Best Indonesia Human Capital.



12 JUNI
Pengoperasian Jalan Tol Gempol-Pandaan

Jasa Marga melalui salah satu Anak Perusahaannya PT Jasamarga Pandaan Tol secara resmi mengoperasikan Jalan Tol Gempol-Pandaan (13,6 km). Jalan tol ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.



Peristiwa Penting 2015



9 JULI

Jasa Marga Raih Penghargaan dari Majalah SWA

Jasa Marga memperoleh penghargaan The 12th Rank of SWA 100: Indonesia Best Public Companies (Overall) 2014 dan The 1st Rank of SWA 100: Indonesia Best Public Companies 2014 Industry, Category Transportation dalam acara Asean Best Public Companies SWA 100, Best Wealth Creator 2015, yang diselenggarakan oleh majalah SWA di Jakarta.

12 JULI

Jasa Marga Selenggarakan Mudik Bareng 2015

Direksi Jasa Marga melepas 1.300 peserta Mudik Bareng 2015 di Gedung Pencak Silat TMII dalam rangka menyambut Lebaran 2015.



07

08

2015

06 AGUSTUS

Jasa Marga Raih Penghargaan Sindo Weekly CSR Award 2015

Jasa Marga menjadi salah satu dari 12 perusahaan yang mendapat apresiasi dalam Sindo Weekly CSR Award 2015 yang dilaksanakan di Jakarta.



14 AGUSTUS

Jasa Marga Hadir Untuk Negeri

Dalam rangka menyambut HUT RI ke-70 dengan tema "70 Tahun Indonesia Merdeka Jasa Marga Hadir untuk Negeri", Jasa Marga memberikan bantuan air bersih, obat-obatan dan pengobatan gratis di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Kegiatan yang juga merupakan bagian dari Program Bina Lingkungan (CSR) Jasa Marga dilaksanakan di seluruh Cabang Jasa Marga dengan program 17.8.45 berupa bantuan renovasi 17 Sekolah Dasar dengan jumlah sekitar Rp 1.700.000.000, bantuan air bersih selama 8 hari dengan nilai Rp 615.000.000, dan bantuan 45 buah sepeda motor untuk guru-guru teladan dengan nilai Rp 675.000.000.



21 AGUSTUS

Pendirian PT Jasa Layanan Operasi (JLO)

Sebagai langkah memperkuat layanan operasional, Jasa Marga membentuk Anak Perusahaan baru, PT Jasa Layanan Operasi (JLO). Penandatanganan Akta Pendirian PT JLO dilaksanakan di Jasa Marga Development Center (JMDC) Kantor Pusat.





5 SEPTEMBER

**Jasa Marga Meraih
Penghargaan dalam BUMN
Marketeers Award 2015**

Jasa Marga meraih penghargaan pada ajang BUMN Marketeers Award 2015 di Jakarta dengan meraih 2 penghargaan pada kategori Strategic Marketing dan Tactical Marketing.

09

25 AGUSTUS

**Jasa Marga Raih
Penghargaan Social
Business Innovation
Award 2015**

Jasa Marga meraih penghargaan pada ajang Social Business Innovation Award 2015 & Green CEO Award 2015 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi Intelligenci Unit (WEIU) di Jakarta. Jasa Marga meraih penghargaan Social Business Innovation Award 2015 untuk kategori Infrastruktur.



26 AGUSTUS

**Jasa Marga Raih
Predikat Excellent
di Ajang IGCGA 2015**

Jasa Marga meraih penghargaan pada ajang Indonesia Good Corporate Governance Award (IGCGA) 2015 yang diselenggarakan oleh Economic Review dan IPMI International Business School di Jakarta. Jasa Marga memperoleh penghargaan pada kategori Toll Road Sector Infrastructure, Utilities & Transportation dengan nilai di atas 90 untuk kategori A (Excellent).

27 AGUSTUS

**Jasa Marga Raih
Penghargaan APTI
2015**

Jasa Marga menerima penghargaan dalam ajang Anugerah Perusahaan Terbuka Indonesia (APTI) 2015 yang diselenggarakan oleh Economic Review dan IPMI Internasional Business School di Jakarta. Jasa Marga meraih 2 penghargaan untuk kategori Corporate of the Year 2015 dan penghargaan CEO The Most Innovative bagi Direktur Utama Adityawarman.



31 AGUSTUS

**Peresmian Sinergi
4 Bank BUMN untuk
e-Toll Nasional**

Jasa Marga selaku penyedia jalan tol BUMN terbesar di Indonesia bersama 4 Bank BUMN yaitu BNI, BRI, BTN dan Mandiri yang disebut Himbara (Himpunan Bank Negara) melaksanakan peresmian sinergi BUMN untuk mengimplementasikan pembayaran Elektronik Tol atau e-Toll Nasional dengan menandatangani MoU Pembayaran Elektronik Tol Nasional.



Peristiwa Penting 2015

07 OKTOBER

Jasa Marga meraih penghargaan CSR Nusantara Awards 2015

Jasa Marga meraih penghargaan CSR Nusantara Awards 2015 untuk kategori Peningkatan Mutu Pendidikan dan Program Pembinaan Anak Jalanan dan Putus Sekolah dalam Festival CSR Nusantara 2015 (CSR Fest) yang Diselenggarakan oleh The La Tofi School of CSR di Yogyakarta. Selain pemberian penghargaan, juga diadakan diskusi tentang mencari solusi permanen penghentian kebakaran lahan melalui CSR dan diadakan kongres Stakeholders CSR dengan tema "Membangun Sinergi CSR dari Berbagai Pemangku Kepentingan".



16 OKTOBER

Pembentukan PT Kereta Cepat Indonesia-China.

Penandatanganan Joint Venture Agreement di Jakarta antara Konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia (PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nasional VIII) dengan BUMN China (China Railway International Co. Ltd.) dalam meresmikan pembentukan anak usaha patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia-China.

10

11

2015

6 NOVEMBER

Jasa Marga Raih Penghargaan Top Infrastructure 2015

Jasa Marga mendapatkan penghargaan dalam rangkaian acara Indonesia Infrastructure Week (Pameran Konstruksi Indonesia) 2015 di Jakarta, sebagai Top Infrastructure on Toll Road, Port, Air Port 2015 dalam penghargaan TOP Infrastructure 2015.



11 NOVEMBER

Public Expose Jasa Marga

Jasa Marga menyelenggarakan Public Expose pada acara Investor Summit and Capital Market Expo 2015 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta.



10 DESEMBER

Sinergi BUMN untuk transformasi Indonesia

Jasa Marga berpartisipasi dalam acara Forum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertajuk "Sinergi BUMN untuk Transformasi Indonesia" di Jakarta. Selain bertujuan untuk membuka wawasan mengenai praktik-praktik sinergi dan ide-ide inovatif antar perusahaan BUMN serta mempersiapkan BUMN menjadi pemain dunia dalam berbagai sektor industri, acara ini diharapkan dapat memberikan informasi terkini mengenai kondisi BUMN di Indonesia terkait dengan program pemerintah, masalah pelemahan ekonomi, dan tantangan global yang akan dihadapi.

12

16 NOVEMBER

Jasa Marga Menerima Penghargaan dari IICD

Jasa Marga menerima penghargaan dari the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dalam acara the 7th IICD Corporate Governance Conference and Award bertema "Implementing ASEAN Corporate Governance Scorecard: A Road to ASEAN Capital Market Integration" dengan bekerja sama dengan Majalah Investor serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas). Sebagai domestic ranking body atas ASEAN Corporate Governance Scorecard di Indonesia, IICD melaksanakan penilaian tata kelola perusahaan terhadap 100 perusahaan terbuka di Indonesia dengan kapitalisasi pasar terbesar.

- Jasa Marga meraih The Best 11-20 dalam Top 50 Publicly Listed Companies dan menjadi salah satu dari 50 emiten dengan skor corporate governance tertinggi.



- Jasa Marga meraih The Best Non-Financial Sector dan menjadi salah satu dari 24 perusahaan terbuka dengan praktik corporate governance terbaik tahun 2014 dalam 9 kategori.

25 NOVEMBER

Jasa Marga Meraih Penghargaan "Best of The Best"

Jasa Marga meraih penghargaan "Best of The Best" dari Forbes Indonesia dalam acara pemberian penghargaan kepada 50 perusahaan terbaik di Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta dan merupakan tahun penyelenggaraan ke-5 sejak tahun 2011.



Sertifikat & Penghargaan 2015



JAKARTA, 19-03-2015
Obsession Awards 2015
Kategori: Best State-Owned Companies Achievers
Sub Kategori: Construction & Infrastructure

Majalah Men's Obsession



JAKARTA, 26-03-2015
Indonesia Human Capital Award (IHCA) 2015
Kategori: Top 10-Best Indonesia Human Capital

Majalah BUMN Track



JAKARTA, 26-03-2015
Indonesia Human Capital Award (IHCA) 2015
Kategori: Best Performance Management

BUMN Track



JAKARTA, 10-04-2015
Contact Center Service Excellence Award (CCSEA) 2015
Predikat: Excellent
Kategori: Public Service

Carre CCSL (Center for Customer Satisfaction and Loyalty) dan Majalah Service Excellence



JAKARTA, 23-04-2015
Indikator BUMN Award (IBA) 2015
Kategori: Kinerja Keuangan

Majalah BUMN Track dan INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)



JAKARTA, 24-04-2015
Penghargaan atas Dukungan dan Partisipasi pada Konferensi Asia Afrika ke-60 di Bandung

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia



JAKARTA, 22-05-2015
Services Quality Award 2015
Peringkat: Diamond ke 2 (dua) Nasional dengan Nilai Indeks 4,0574

Carre CCSL dan Majalah Service Excellence



JAKARTA, 10-06-2015
Corporate Image Award 2015
"The Best Building and Managing Corporate Image"

Majalah Tempo Kategori: Toll Road Infrastructure



JAKARTA, JULI 2015
Penghargaan atas dukungan pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tingkat Nasional Terpadu 2015

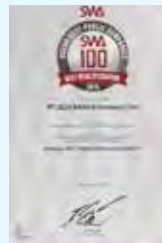
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia



JAKARTA, 09-07-2015
ASEAN Best Public Companies SWA 100, Best Wealth Creator 2015

The 12th Rank of SWA 100: Indonesia Best Public Companies (Overall) 2014

Majalah SWA



JAKARTA, 09-07-2015
ASEAN Best Public Companies SWA 100, Best Wealth Creator 2015

The 1st Rank of SWA 100 Indonesia Best Public Companies 2014 Industry Kategori: Transportation

Majalah SWA



JAKARTA, 09-07-2015
US\$ 68 Million Brand Value & AA-Indonesia's Top 100 Most Valuable Brands 2015

Majalah SWA



JAKARTA, 06-08-2015
Penghargaan Program CSR "Best Education" 2015

Majalah Sindo Weekly



JAKARTA, 25-08-2015
Social Business Innovation Award 2014

Kategori: Infrastruktur

Majalah Warta Ekonomi



JAKARTA, 26-08-2015
Indonesia GCG Award 2015
(Score A: Excellent)

Majalah Economic Review



JAKARTA, 27-08-2015
Corporate of the Year 2015

Majalah Economic Review

Sertifikat & Penghargaan 2015



JAKARTA, 27-08-2015

The Most Innovative
(CEO Jasa Marga)

Majalah Economic
Review



JAKARTA, 27-08-2015

**Peringkat I Industri
Jalan Tol**

Economic Review



JAKARTA, 05-09-2015

**Strategic
Marketing**

Kategori: Bronze

BUMN Marketeers
Award 2015



JAKARTA, 05-09-2015

Tactical Marketing

Kategori: Bronze

BUMN Marketeers
Award 2015



BATAM, 17-09-2015

**Good Governance
Excellent Performance
2015**

FKSPI (Forum Komunikasi
Satuan Pengawasan
Intern)



YOGYAKARTA, 07-10- 2015

**CSR Nusantara Awards
2015**

Festival CSR Nusantara 2015
(CSR Fest)

Kategori: Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Program
Pembinaan Anak Jalanan dan
Putus Sekolah

La Tofi School of CSR



JAKARTA, 22-10-2015

**Best of Human
Capital Initiative on
Career Management
2015**

IHCS (Indonesia Human
Capital Study)



JAKARTA, 06-11-2015

**Indonesia
Infrastructure Week
(Pameran Konstruksi
Indonesia) 2015**

TOP Infrastructure 2015
Kategori TOP
Infrastructure on Toll Road,
Port, Air Port

Business News Indonesia
Magazine



**PENANG, MALAYSIA,
25-11-2015**

**“Successful Construction
and Completion of Nusa
Dua-Ngurah Rai-Benoa
(Bali Mandara) Toll Road
Project”**

PII (Persatuan Insinyur
Indonesia)



JAKARTA, 16-11-2015

**The 7th IICD Corporate
Governance Conference
and Award**

The Best 11-20 Public Listed
Company

Kategori: TOP 50 Publicly
Listed Companies based
on ASEAN CG Scorecard
IICD (the Indonesian
Institute for Corporate
Directorship)



JAKARTA, 16-11-2015

**The 7th IICD Corporate
Governance Conference
and Award**

The Best Non-Financial
Sector

IICD (the Indonesian
Institute for Corporate
Directorship)



JAKARTA, 25-11-2015

**Forbes Indonesia
Best of The Best
Awards**

Majalah Forbes



JAKARTA, 17-12-2015

**GCG Award 2015
Indonesia Most
Trusted Companies**

Most Trusted Company
Based on Corporate
Governance Perception
Index (CGPI)

IICG (the Indonesian
Institute for Corporate
Governance) dan Majalah
SWA



JAKARTA, 17-12-2015

**GCG Award 2015
Indonesia Most Trusted
Companies**

Trusted Company Based
on Investors and Analysts'
Assessment Survey

IICG (the Indonesian
Institute for Corporate
Governance) dan Majalah
SWA

Sertifikasi

Sertifikasi Mutu Pengelolaan Jalan Tol dan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Seluruh Kantor Cabang Jasa Marga telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 untuk mutu pengoperasian jalan tol dan sertifikat OHSAS 18001:2007 untuk keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bukti Jasa Marga telah memenuhi standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau kualitas dan standar internasional untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bertujuan untuk mengelola aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada setiap proses kerja di tempat kerja. Sertifikasi di seluruh Cabang Jasa Marga dilakukan oleh Badan Sertifikasi SGS.

Manfaat Penerapan ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 antara lain sebagai berikut:

OHSAS 18001:2007	ISO 9001:2008
<ul style="list-style-type: none"> Melindungi pekerja dari berbagai bahaya kerja yang juga dapat mengganggu kesehatan saat kerja Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja dengan mencegah/mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja Meningkatkan cost efficiency dengan meminimalkan kehilangan waktu kerja karena kecelakaan, penurunan kesehatan dan biaya kompensasi hukum Meningkatkan kepercayaan konsumen Meningkatkan image positif Perseroan dengan adanya verifikasi pihak independen berdasarkan standar yang diakui Menerapkan peraturan Pemerintah terkait perlindungan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kepercayaan pelanggan Memberikan jaminan kualitas produk dan proses Meningkatkan produktivitas Perseroan dan market gain Meningkatkan motivasi, moral dan kinerja karyawan serta komunikasi internal Meningkatkan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok Meningkatkan cost efficiency dan keamanan produk dengan adanya sistem yang terdokumentasi Meningkatkan image positif Perseroan dengan adanya verifikasi pihak independen berdasarkan standar yang diakui

SERTIFIKASI MUTU PENGOPERASIAN JALAN TOL JASA MARGA

No.	Cabang	Sertifikasi OHSAS 18001:2007			
		Lembaga Audit	Sertifikasi Sejak (tahun)	Masa Validitas/ Berlaku Sertifikat (tgl-bln-thn)	Nomor Registrasi
1	Jagorawi	SGS	2011	23-03-2014 s.d. 23-03-2017	ID11/1102954096
2	Cawang-Tomang-Cengkareng	SGS	2011	03-03-2014 s.d. 03-03-2017	ID11/1102954092
3	Jakarta-Cikampek	SGS	2011	31-01-2014 s.d. 31-01-2017	ID11/1102954070
4	Jakarta-Tangerang	SGS	2011	04-01-2013 s.d. 04-01-2016	ID11/1102954016
5	Purbaleunyi	SGS	2013	28-12-2013 s.d. 28-12-2016	ID11/1102954054
6	Semarang	SGS	2014	25-10-2014 s.d. 25-10-2017	ID11/01882
7	Palikanci	SGS	2012	24-09-2015 s.d. 24-09-2018	ID12/02180
8	Surabaya-Gempol	SGS	2011	10-05-2014 s.d. 10-05-2017	ID11/1102954122
9	Belmera	SGS	2014	21-09-2014 s.d. 21-09-2017	ID14/02870



Sertifikasi ISO 9001:2008


Lembaga Audit	Sertifikasi Sejak (tahun)	Masa Validitas/ Berlaku Sertifikat (tgl-blm-thn)	Nomor Registrasi
SGS	2000	23-08-2014 s.d. 23-08-2017	ID00/17172
SGS	2005	15-02-2014 s.d. 15-02-2017	ID04/D0554
SGS	2005	04-02-2014 s.d. 04-02-2017	ID05/D0550.01
SGS	2013	26-06-2013 s.d. 26-06-2016	ID04/D0516
SGS	2004	22-12-2013 s.d. 22-12-2016	ID04/D0515
SGS	2005	06-01-2014 s.d. 06-01-2017	ID05/D0530.01
SGS	2004	21-07-2013 s.d. 21-07-2016	ID04/D0439
SGS	2001	19-04-2013 s.d. 19-04-2016	ID04/D0376
SGS	2004	12-10-2013 s.d. 12-10-2016	ID04/D0481





03

Laporan Manajemen

- 
- LAPORAN DEWAN KOMISARIS
 - LAPORAN DIREKSI
- 



Refly Harun
Komisaris Utama

Laporan Manajemen

Laporan Dewan Komisaris

Pencapaian kinerja positif diraih dalam bidang keuangan dan pengembangan usaha. Hal ini tercapai berkat kerjasama dan kerja keras Direksi dan jajaran manajemen di bawahnya serta pengawasan yang efektif dan intensif dari Dewan Komisaris.

Pemegang Saham yang terhormat,

Seiring dengan berakhirnya tahun buku 2015, kami mengucapkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-NYA, sehingga Dewan Komisaris dapat mengakhiri tugas dan kewajibannya selama tahun 2015 dengan baik.

Tahun 2015 merupakan tahun periode pertama masa bakti dari sebagian anggota Komisaris yang dipilih dan diangkat dalam RUPS Tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk di awal tahun. Kami Dewan komisaris saat ini mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris masa bakti periode 2012-2015 atas pengabdianya dalam mengemban tugas pengawasan Perseroan. Kami memandang bahwa apa yang telah dirintis dan di bangun oleh Dewan Komisaris sebelumnya merupakan modal yang sangat berharga untuk dapat membawa Perseroan menjadi semakin lebih maju, efektif dan efisien.

Sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban, ijin kami dalam kesempatan ini untuk menyampaikan pokok-pokok penjelasan atas pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris dalam mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Perseroan mengawali tahun 2015 dengan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. RUPS Tahunan dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 18 Maret 2015 dan penyelenggaraannya telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, serta menghasilkan keputusan-keputusan yang telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Perseroan. Dalam RUPS Tahunan 2015, Pemegang Saham mengangkat Refly Harun sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen, Hambra sebagai Komisaris, Taufik Widjoyono sebagai Komisaris dan Sigit Widyanan sebagai

Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah melakukan dengan baik pengelolaan Perseroan pada tahun 2015

Komisaris Independen. Dan memberhentikan secara hormat Agoes Widjanarko sebagai Komisaris Utama, Ibnu Purna sebagai Komisaris, Samsuedin sebagai Komisaris Independen dan Michael Dendron Primanto sebagai Komisaris Independen yang telah selesai masa baktinya. Berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014, susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama/Komisaris Independen: Refly Harun
2. Komisaris Independen: Sigit Widyawan
3. Komisaris: Akhmad Syakhroza
4. Komisaris : Boediarso Teguh Widodo
5. Komisaris: Hambra
6. Komisaris : Taufik Widjoyono

Pembagian tugas dan uraian tugas masing-masing anggota Komisaris diatur kembali dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-070/IV/2015 tanggal 30 April 2015. Dengan adanya penggantian dan perubahan Pengurus Perseroan tersebut, kedepan kinerja Perseroan diharapkan akan meningkat dan menjadi lebih baik lagi.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, dilakukan pembagian tugas masing-masing anggota Komisaris sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP- 0031/II/2012 tanggal 20 Februari 2012. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah menetapkan indikator KPI) untuk Dewan Komisaris berlandaskan pada beberapa parameter sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Sebagai gambaran dapat kami sampaikan bahwa KPI Dewan Komisaris tahun 2015 terdiri

dari 9 perspektif dengan 17 indikator kinerja. Langkah-langkah ini dilakukan dengan tujuan agar selalu tercipta peningkatan kinerja Dewan Komisaris dalam mengemban pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan. Melalui metode *self assesment*, hasil evaluasi menunjukkan hasil penilaian yang sangat baik, dimana diperoleh skor penilaian sebesar 4,94 dari maksimal skor sebesar 5,00. Hasil ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,78. Selain penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui metode *self assesment*, juga telah dilakukan penilaian penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (atau GCG) di PT Jasa Marga pada akhir tahun 2015 yang dilakukan oleh Konsultan Independen. Untuk lingkup Dewan Komisaris diperoleh skor penilaian sebesar 97,38%, meningkat dari tahun 2014 yang sebesar 96,26%. Untuk lingkup Direksi diperoleh nilai sebesar 97,16% dan juga mengalami peningkatan dari nilai tahun 2014 yang sebesar 96,84%. Sedang dilingkup PT Jasa Marga, diperoleh nilai 96,77% yang sedikit diatas peroleh skor tahun 2014 yang sebesar 96,63%. Dengan ketekunan dan semangat untuk berbuat yang lebih baik lagi bagi kemajuan Perseroan, Dewan Komisaris dengan dukungan dari seluruh staf Sekretariat Dewan Komisaris, terus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara lebih konsisten dan membudaya dalam setiap aktivitas kegiatannya dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Penilaian Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya

Dengan mengacu kepada program kerja tahunan Dewan Komisaris tahun 2015 yang disusun dan disahkan Dewan Komisaris pada tanggal 20 Januari tahun 2015, Dewan Komisaris dapat secara teratur dan terstruktur melakukan aktivitas – aktivitas pengawasan dan pemberian nasihatnya kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan.

Untuk meningkatkan efektivitas pencapaian target dan sasaran-sasaran strategis tahun anggaran 2015 Dewan Komisaris telah mereview dan menyetujui perubahan rencana belanja modal (Capex) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2015 dan yang tidak kalah pentingnya Dewan Komisaris telah menyetujui dan menetapkan bersama Direksi RKAP Tahun Buku 2016 pada tanggal 24 Nopember 2015, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Direksi telah menyampaikan usulan RKAP Tahun Buku 2016 dan kemudian Dewan Komisaris bersama Direksi membahas dan menetapkan usulan RKAP Tahun

2016 tersebut sebagai RKAP Tahun Buku 2016. Selain itu, Dewan Komisaris juga mengkaji progres pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2013 – 2017 sampai dengan tahun 2015 sebagai tahun ke – 3 RJPP tersebut dan menyetujui dan menetapkan hasil reviewnya sebagai dokumen perubahan RJPP Tahun 2013 – 2017.

Untuk mengecek sampai dimana kebijakan pengelolaan perusahaan dan strategi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan dalam RKAP Tahun 2015 telah difahami dan dilaksanakan oleh cabang-cabang Perusahaan, Dewan Komisaris secara rutin melakukan kunjungan kerja ke Cabang-Cabang. Selama tahun 2015 ini telah dilakukan 9 kali kunjungan dan hasilnya dinilai cukup efektif untuk mengenali masalah-masalah di Cabang, memberikan saran solusi secara langsung kepada para Kepala Cabang dan memberitahu hasil kunjungan ke Direksi disertai saran dan solusi yang menjadi wewenang Direksi.

Secara periodik, Dewan Komisaris melakukan kajian terhadap Laporan-Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan maupun Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Laporan Bulanan Investasi serta laporan lainnya yang disampaikan oleh Direksi. Dari hasil evaluasi terhadap laporan tersebut Dewan Komisaris memperoleh gambaran atas capaian kinerja Direktur dimasing-masing bidangnya, tingkat efisiensi dan efektivitas investasi yang dilakukan untuk menghasilkan keuntungan dan menambah aset perusahaan, perkembangan dalam upaya menambah hak pengusahaan jalan tol, progres pembangunan jalan tol baru dan kualitas pemberian pelayanan kepada pengguna jalan tol. Kemudian masukan-masukan tersebut dibahas dan diputuskan dalam rapat internal Dewan Komisaris sebagai saran masukan dan nasihat bagi Direksi untuk ditindak lanjuti atau saran-masukan dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi Dewan Komisaris yang mengundang kehadiran Direksi. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat koordinasi Dewan Komisaris, secara berkala setiap bulannya diagendakan rapat-rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut keputusan rapat koordinasi Dewan Komisaris sehingga dengan demikian keputusan-keputusan rapat yang berupa saran dan solusi yang terkait dalam bisnis jalan tol yang telah disepakati dalam rapat, dipastikan telah ditindak lanjuti atau sedang dan segera ditindak lanjuti, agar proses dan hasilnya sesuai dengan jadwal, mutu, biaya dan substansi hasil yang diharapkan.

Sebagai hasil dari pengawasan dan nasihat-nasihat yang dilaksanakan secara intensif oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2015 tersebut diatas, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Direksi dalam pengelolaan perusahaan, disamping tentunya juga karena kerja keras Direksi dan jajaran manajemen di bawahnya, serta kerjasama yang baik dengan Dewan Komisaris dan stakeholder lainnya. Diberbagai bidang usaha secara umum mencapai hasil yang sangat baik dan menunjukkan trend peningkatan, walaupun berbagai hambatan dan rintangan yang dihadapi Perusahaan dan Manajemen cukup berat dan menantang karena perubahan lingkungan bisnis yang dapat berpengaruh besar terhadap usaha atau kinerja Perseroan tersebut diatas.

Dari segi Kinerja Keuangan, tertundanya pengoperasian Jalan Tol serta perlambatan ekonomi turut berdampak pada pencapaian Pendapatan Usaha (diluar Pendapatan Konstruksi) pada tahun 2015 sebesar Rp 7,63 triliun lebih rendah dari target 4,05% namun tetap tumbuh 5,57% dari pencapaian Tahun 2014. Dengan tidak tercapainya pendapatan usaha tersebut, Perseroan melakukan berbagai macam upaya efisiensi khususnya pada beban-beban yang tidak berdampak langsung pada Pelayanan pada pengguna Jalan. Dari upaya efisiensi tersebut, pada tahun 2015 Perseroan membukukan Laba Bersih sebesar Rp 1,46 triliun tumbuh sebesar 3,14% dari tahun 2014 dan lebih tinggi dari rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Selain itu, Perseroan dalam tahun 2015 juga berhasil menambah aset Perusahaan dengan pertumbuhan sebesar sebesar 15,37% dari Rp 31,85 triliun menjadi Rp 36,75 triliun. Sebagaimana halnya tahun lalu, capaian kinerja dibidang keuangan ini diikuti dengan keberhasilan bidang pengembangan usaha yaitu dengan menambah panjang jalan tol yang dioperasikan Jasa Marga sepanjang 13,61 Km untuk ruas jalan tol Gempol – Pandaan dan hak konsesi pembangunan jalan tol baru sepanjang 187,26 Km yang terdiri dari: Jalan Tol Solo-Ngawi sepanjang 90,10 km, Jalan Tol Ngawi-Kertosono sepanjang 87,02 km dan Jalan Tol Cinere-Serpong sepanjang 10,14 km.

Pada tahun 2015 Perseroan secara keseluruhan memegang hak konsesi jalan tol sepanjang 987 Km atau tumbuh 23,38% dibanding tahun 2014. Keseluruhan Proyek Jalan Tol Baru tersebut diharapkan semuanya sudah selesai dan dioperasikan pada tahun 2018.

Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan Yang Disusun Oleh Direksi dan Dasar Pertimbangannya

Sepanjang tahun 2015 telah diselenggarakan 16 (enam belas) kali rapat internal Dewan Komisaris dan 13 (tiga belas) kali rapat koordinasi Dewan Komisaris yang mengundang kehadiran Direksi (rapat gabungan) dengan tingkat kehadiran rata-rata 81 % (untuk rapat internal Dewan Komisaris) dan 87% (untuk rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi) dan rapat Dewan Komisaris dengan Cabang-Cabang PT Jasa Marga sebanyak 11 (sebelas) kali. Tingkat kehadiran rata-rata anggota Dewan Komisaris ini menurun sedikit dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 95%. Dalam forum rapat – rapat tersebut memberikan kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk menyampaikan masukan, arahan dan atau mendiskusikan hal-hal penting mengenai jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi dan Cabang-Cabang, serta memberikan informasi jika ada perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perseroan, seperti lesunya perekonomian dunia khususnya di Tiongkok, turunnya harga minyak, tuntutan kenaikan upah buruh yang juga berpengaruh pada karyawan Perseroan untuk ikut menuntut kenaikan upah dengan ancaman untuk mogok kerja, ada kecenderungan adanya penurunan atau stagnansi tingkat kenaikan lalu lintas kendaraan di jalan tol. Kondisi eksternal lainnya yang perlu diantisipasi adalah akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada awal tahun 2016. Namun perlu diantisipasi juga tekad Pemerintah Indonesia untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, termasuk pembangunan jalan tol di luar Jawa, memberikan peluang Perseroan untuk berpartisipasi dalam investasi pembangunan jalan-jalan tol di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Pemerintah telah dan akan menyediakan dana yang diperlukan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mulai diberlakukan secara efektif tahun 2015, sangat membantu percepatan pelaksanaan pembebasan lahan, yang otomatis mempercepat konstruksi jalan tol.

Pengembangan Usaha Lain mempunyai potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan dan dibenahi manajemennya, mengingat masih banyak aspek dari bidang usaha ini yang belum tertangani secara baik dan maksimal, seperti iklan, pengembangan bisnis properti, Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) dan sebagainya. Penataan & pengembangan usaha lain juga

harus disertai peningkatan profesional & kompetensi SDM-nya serta visi-misi dan kebijakannya, diikuti perbaikan sistem & prosedur tata caranya. Dengan demikian nantinya diharapkan dapat menghasilkan pendapatan usaha lain yang cukup signifikan yang memberi kontribusi yang besar untuk menopang pendapatan usaha Perseroan.

Untuk meningkatkan pelayanan bagi para pengguna jalan tol dan mengamankan pendapatan tol, Dewan Komisaris terus fokus untuk capaian target peningkatan pembangunan & penggunaan gerbang tol otomatis (GTO). Penggunaan GTO ini juga dalam rangka mengamankan pendapatan tol serta meminimalisasi risiko kebocoran akibat sistem transaksi yang masih bersifat manual. Manfaat lainnya adalah diperolehnya data keuangan secara *online* dan *real time* dari seluruh gardu tol Perseroan. Langkah konkrit yang dilakukan adalah dengan memperbanyak pemasangan GTO (Gardu Tol Otomatis) untuk meningkatkan penetrasi e-toll card dan penggunaan OBU (*On Board Unit*). Dengan memperbanyak GTO diharapkan akan meningkatkan kelancaran transaksi dan mengurangi kemacetan akibat antrian di gardu-gardu tol pada saat melakukan transaksi pembayaran tol. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan efektif untuk mendorong masyarakat pengguna jalan tol bersedia berlangganan e-toll card, sehingga tercapai keseimbangan dan keserasian kelancaran di GTO dan Non GTO di seluruh gerbang-gerbang tol Perseroan. Rencana Direksi tentang pemasangan GTO tersebut dilakukan secara bertahap sebagai berikut : akhir tahun 2014 sebesar 30 % dari gardu operasi, 2015 sebesar 40% dan tahun 2016 menjadi sebesar 50%.

Penilaian Kinerja Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit serta Komite Nominasi Remunerasi dan Risiko untuk memberikan masukan dan pandangan terhadap pengelolaan Perseroan yang dijalankan Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit selalu berpedoman pada Program Kerja Komite Audit (PKKA) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Rapat Internal Dewan Komisaris. Dalam hal pencapaian indikator kinerja kunci atau *key performance indicator* (KPI) sebagai gambaran kinerja Komite Audit selama tahun 2015, Komite Audit berhasil mencapai nilai 5,07 dari target nilai 5,00.

Dewan Komisaris sangat berkepentingan dan menaruh perhatian penuh atas sistim dan terlaksananya manajemen pembinaan kemampuan SDM dan karir pegawai, remunerasi Direksi dan risiko usaha yang efektif dan baik di Perseroan. Oleh karena itu pada tanggal 24 April 2015, Dewan Komisaris mengubah Komite Investasi dan Risiko Usaha menjadi Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko. Pada periode-periode tertentu Dewan Komisaris mengagendakan pemantauan dan evaluasi atas hasil kinerja Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko agar tugas Komite untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen pembinaan SDM, karir pegawai, dan risiko usaha yang dilaksanakan oleh Direksi dan jajarannya, dilakukan dengan baik sesuai ketentuan perarturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semua keputusan yang diambil manajemen telah mempertimbangkan segala sesuatu, dengan perhitungan yang tepat dan menghindarkan Perseroan dari kerugian yang tidak perlu. Pada tahun 2015, Pencapaian KPI Komite Nominasi Remunerasi dan Risiko atas 4 perspektif adalah sebesar 83 dari target 100.

Penutup

Pada kesempatan yang baik ini, ijinkan kami untuk menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih atas kerja sama dan keberhasilan Direksi beserta seluruh jajarannya dalam meningkatkan kinerja Perseroan tahun buku 2015. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kerja samanya selama ini. Akhir kata, bersama Direksi dan seluruh jajaran PT Jasa Marga (Persero) Tbk., kami senantiasa berkomitmen untuk menjadikan Jasa Marga sebagai Perseroan yang berdaya saing tinggi, dan secara berkelanjutan berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan Negara Indonesia.



Refly Harun
Komisaris Utama/Komisaris Independen



Akhmad Syakhroza
Komisaris



Boediarso Teguh Widodo
Komisaris



Hambra
Komisaris



Taufik Widjoyono
Komisaris



Sigit Widyan
Komisaris Independen



Adityawarman
Direktur Utama

Laporan Manajemen

Laporan Direksi

Tahun 2015 adalah tahun yang memberikan optimisme yang lebih baik dalam upaya-upaya Perseroan meningkatkan aset Perseroan melalui penambahan panjang jalan tol untuk meningkatkan nilai Perseroan dalam jangka panjang.

Pemegang Saham yang terhormat,

Tahun 2015 adalah tahun yang memberikan optimisme yang lebih baik dalam upaya-upaya Perseroan meningkatkan aset Perseroan melalui penambahan panjang jalan tol untuk meningkatkan nilai Perseroan dalam jangka panjang.

Untuk dapat meningkatkan daya saing Nasional serta pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas Nasional baik melalui Darat, Laut dan Udara. Untuk meningkatkan konektivitas di darat, Pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 km Jalan Tol baru. Ditetapkannya target tersebut memberikan optimisme dan keyakinan kepada kami untuk lebih meningkatkan kinerja untuk mendukung program-program Pemerintah, khususnya dalam pembangunan jalan tol serta meningkatkan nilai Perseroan dalam jangka panjang.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan Laporan Tahunan 2015 yang menggambarkan pencapaian kinerja Perseroan tahun 2015, serta berbagai upaya Manajemen dalam meningkatkan daya saing dan memperkokoh posisi Perseroan di Industri Jalan Tol di masa-masa mendatang.

Sampai saat ini Perseroan tetap mampu mempertahankan posisi sebagai pemimpin di Industri Jalan Tol dengan menguasai $\pm 63\%$ pangsa pasar Jalan Tol beroperasi dan $\pm 80\%$ pangsa pasar volume lalu lintas transaksi di Indonesia. Dalam upaya mendorong Perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang, Perseroan menerapkan strategi baik untuk pengembangan usaha jalan tol maupun usaha lain. Pengembangan usaha jalan tol merupakan fokus utama bisnis Perseroan. Sampai dengan akhir tahun 2015, Perseroan telah mempunyai hak pengelolaan jalan tol sepanjang 987 km, dimana 590 km telah beroperasi. Perseroan akan menyelesaikan ± 400 km dengan nilai investasi sebesar \pm Rp 25 triliun dan dioperasikan secara bertahap hingga tahun 2018/2019.

Manajemen akan terus menambah panjang Jalan Tol beroperasi dan terus meningkatkan kinerja pengoperasian Jalan Tol, serta melakukan diversifikasi usaha lain yang mendukung Pengembangan dan Pengoperasian Jalan Tol. Hal tersebut merupakan upaya Perseroan untuk mencapai Visi sebagai salah satu Perusahaan Terkemuka di Indonesia dan juga meningkatkan konektivitas Nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional melalui penyediaan infrastruktur jalan tol. Untuk mendukung strategi pencapaian Visi Perseroan, Perseroan juga melakukan transformasi dibidang organisasi dan pengelolaan SDM serta transformasi di bidang Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas.

Perseoran akan menyelesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang ±400 km dengan nilai investasi sebesar ± Rp 25 triliun dan dioperasikan secara bertahap hingga tahun 2018/2019.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 tanggal 18 Maret 2015, Pemegang Saham menerima pengunduran diri Abdul Hadi Hs sebagai Direktur Perseroan dan mengangkat Christantio Prihambodo dan Achiran Pandu Djajanto sebagai Direktur serta menetapkan Reynaldi Hermansjah sebagai Direktur Independen. Pembagian tugas dan wewenang selanjutnya bagi setiap anggota Direksi beserta penetapan nomenklatur bagi setiap anggota Direksi di luar Direktur Utama ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Sebagai tindak lanjut dari keputusan RUPS Tahunan Perseroan tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 71 tahun 2015 tanggal 01 April 2015, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. Direktur Utama: Adityawarman
2. Direktur Operasi: Christantio Prihambodo
3. Direktur Pengembangan Usaha: Hasanudin
4. Direktur Keuangan: Reynaldi Hermansjah
5. Direktur SDM dan Umum: Muh Najib Fauzan
6. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko: Achiran Pandu Djajanto

Analisis Kinerja Perseroan

KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN

Dalam mencapai target Perseroan pada 2015, Kami melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pengembangan Usaha Jalan Tol
Perseroan terus berusaha untuk dapat menambah ruas-ruas Jalan Tol beroperasi dengan fokus pada pembangunan tiga

belas ruas Jalan Tol baru yang dimiliki oleh Perseroan. Pada saat yang bersamaan Perseroan juga menjajaki penambahan hak pengusahaan Jalan Tol baik melalui mekanisme tender, akuisisi dan pemrakarsa/ inisiator proyek pada ruas-ruas Potensial.

2. Pengoperasian Jalan Tol
Peningkatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan layanan volume lalu lintas yang terus meningkat. Peningkatan pelayanan tersebut difokuskan pada modernisasi sistem pengoperasian dan peningkatan kapasitas gerbang. Modernisasi dilakukan dengan terus menambah Gardu Tol Otomatis (GTO) dan meningkatkan akses informasi layanan lalu lintas yang *real time*.
3. Pengembangan Usaha Lain
Tahun 2015 Perseroan merestrukturisasi Usaha Lain untuk dapat terus mendukung strategi Pengembangan dan Pengoperasian Jalan Tol melalui Jasa Pemeliharaan Jalan Tol, Jasa Pengoperasian Jalan Tol, Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan, Sewa Lahan untuk iklan dan bisnis Properti.

PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN KINERJA PERSEROAN

Tahun 2015 merupakan tahun yang menarik untuk industri Jalan Tol pada umumnya dan Perseroan khususnya di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tahun 2015. Hal ini tercermin dengan telah terbitnya Perpres Pembebasan Lahan No. 30 tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Meskipun Perpres tersebut belum berjalan sepenuhnya efektif dalam pelaksanaan pembebasan lahan di lapangan mengingat penerapannya masih dalam tahap awal, namun hal tersebut tetap memberikan optimisme bagi kami bahwa pembebasan lahan di masa yang datang akan semakin membaik.

Selama tahun 2015, Pemerintah juga cukup agresif dalam melakukan beberapa tender jalan tol. Tender dilakukan untuk ruas-ruas jalan tol yang menjadi prioritas bagi pemerintah untuk mengembangkan wilayah. Ruas-ruas tersebut antara lain adalah Jalan Tol Manado-Bitung, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Tol Pandaan-Malang dan Jalan Tol Semarang-Batang. Hingga akhir tahun 2015 proses tender jalan tol tersebut masih dalam proses persiapan.

Perseroan secara aktif turut berpartisipasi dalam tender yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memastikan Perseroan tetap mampu mendominasi Pangsa Pasar Panjang Jalan Tol di Indonesia melalui kepemilikan konsesi jalan tol baru.

Mekanisme lain untuk menambah kepemilikan konsesi jalan tol baru dilakukan Perseroan melalui akuisisi. Pada tahun 2015 Perseroan telah berhasil mengakuisisi Jalan Tol Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono dan Cinere-Serpong sepanjang 187,26 km. Dengan berhasilnya akuisisi Ruas-ruas Jalan Tol tersebut, maka total Hak Konsesi Panjang Jalan Tol yang dimiliki Perseroan menjadi 987 km atau tumbuh sebesar 23,38% dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Kebijakan Perseroan dalam kepemilikan jalan tol baru adalah Jasa Marga tetap menjadi pemilik mayoritas pada Anak Perusahaan yang dibentuk untuk mengelola konsesi tersebut.

Untuk mewujudkan pengoperasian jalan tol baru, pada Tahun 2015, Perseroan telah berhasil mengoperasikannya Jalan Tol Gempol-Pandaan di wilayah Jawa Timur sepanjang 13,6 km. Dengan beroperasinya Jalan Tol Gempol-Pandaan maka Perseroan telah mengoperasikan sepenuhnya 3 Ruas Jalan Tol Baru selain Jalan Tol Bali Mandara dan JORR W2 Utara. Usaha Perseroan untuk terus menambah Jalan Tol beroperasi merupakan bentuk komitmen Manajemen untuk terus mempertahankan posisi Perseroan sebagai pemimpin di Industri Jalan Tol di Indonesia serta mendorong terwujudnya konektivitas antar wilayah.

Di pertengahan Tahun 2015, Pemerintah mengeluarkan kebijakan penerapan tarif khusus selama periode arus mudik Lebaran 2015 yang berlaku pada seluruh jalan tol di Indonesia, baik yang dioperasikan oleh Perseroan, maupun oleh operator lain. Kebijakan tersebut memberikan konsekuensi terhadap pencapaian target pendapatan tol Perseroan. Dilain pihak, penerapan kebijakan khusus tersebut, dimaksudkan untuk membantu masyarakat di tengah perlambatan ekonomi melalui penurunan biaya tol. Sementara itu, sesuai dengan UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali oleh BPJT berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan angka inflasi, pada tahun 2015 juga dilakukan penyesuaian terhadap tarif tol 12 ruas yang dikelola oleh Perseroan. Besaran angka penyesuaian tarif ke 12 ruas tersebut rata-rata sebesar 13%. Hal ini menunjukkan, Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga iklim investasi yang baik pada industri jalan tol di Indonesia. Pencapaian Pendapatan Tol Perseroan pada tahun 2015 dibandingkan dengan target adalah sebesar 97,5%, namun tetap tumbuh sebesar 7,14% dibandingkan tahun 2014.

Dari kinerja aspek Pengoperasian Jalan Tol, pencapaian target Volume Lalu Lintas Transaksi adalah sebesar 99,6% atau sebesar 1,38 miliar transaksi kendaraan. Selain itu pada tahun 2015 Volume Lalu Lintas Transaksi juga tumbuh sebesar 4,54%, dari tahun 2014. Hal ini kami pandang cukup menggembirakan karena di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, volume Lalu Lintas di jalan tol yang dioperasikan Perseroan masih dapat tumbuh.

Di bidang pelayanan pengoperasian jalan tol, Perseroan melakukan peningkatan pelayanan pada pemakai jalan melalui modernisasi transaksi di gardu. Upaya tersebut dilakukan dengan menambah GTO sebanyak 110 GTO. Hal ini dilakukan untuk mendorong dan memfasilitasi kemudahan bertransaksi di gardu tol melalui penggunaan e-Toll card. Usaha penambahan GTO tersebut berdampak positif terhadap penggunaan e-Toll card, hal ini tercermin pada peningkatan penggunaan e-toll card dari sebelumnya 11,57% dari total volume transaksi menjadi 15,61% pada tahun 2015.

Selain itu modernisasi juga dilakukan dalam rangka memberikan informasi lalu lintas yang real time kepada pengguna jalan dengan menambah papan informasi lalu lintas *Variable Message Sign* (VMS) sebanyak 88 buah dan terus meningkatkan pelayanan dari Traffic Information Center antara lain dengan memperkenalkan perubahan nomor call centre baru dari 021-80880123 menjadi 14080 yang akan memudahkan pengguna jalan mengakses informasi kondisi lalu lintas pada jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga.

Pada Tahun 2015, Pengembangan Usaha Lain masih ditopang oleh Jasa Pemeliharaan Jalan Tol, Jasa Pengoperasian Jalan Tol, Sewa lahan untuk Iklan dan Tempat Istirahat dan Pelayanan. Di Tahun 2015, Pendapatan Usaha Lain perseroan turun 12,3% dari tahun 2014, penurunan tersebut lebih banyak disebabkan karena perlambatan ekonomi dimana aktivitas yang terkait dengan pemasangan iklan dan jasa pemeliharaan turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Khusus untuk Jasa Pemeliharaan, Kami melakukan upaya *refocusing* business pada PT Jasa Layanan Pemeliharaan yang bergerak dalam bidang pemeliharaan Jalan Tol untuk fokus pada pemeliharaan Jalan Tol yang dimiliki oleh Perseroan. Upaya tersebut dilakukan agar Perseroan tetap dapat memenuhi penyediaan kualitas jalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh regulator jalan tol (BPJT). Disamping itu, Perseroan juga melihat peluang dan potensi dari internal yang masih sangat besar mengingat Perseroan saat ini juga agresif dalam menambah ruas-ruas Jalan Tol Baru.

Dalam jangka waktu ke depan, Perseroan akan semakin aktif dalam mengembangkan bisnis Jalan Tol. Namun Perseroan juga menyadari adanya kompleksitas pengoperasian Jalan Tol yang semakin tinggi disamping prospek potensi bisnis Industri Jalan Tol yang semakin baik. Untuk itu Kami membentuk PT Jasa Layanan Operasi (JLO) yang bergerak dalam bidang pengoperasian Jalan Tol yang ada di Indonesia khususnya Jalan Tol yang dimiliki oleh Perseroan. Dengan dibentuknya JLO kami optimis kedepan dapat mengefisienkan pengoperasian Jalan Tol yang ada.

Dari segi Kinerja Keuangan, tertundanya pengoperasian Jalan Tol serta perlambatan ekonomi turut berdampak pada pencapaian Pendapatan Usaha (diluar Pendapatan Konstruksi) pada tahun 2015 sebesar Rp 7,63 triliun lebih rendah dari target 4,05% namun tetap tumbuh 5,57% dari pencapaian Tahun 2014. Dengan tidak tercapainya pendapatan usaha tersebut, Perseroan melakukan berbagai macam upaya efisiensi khususnya pada beban-beban yang tidak berdampak langsung pada Pelayanan pada pengguna Jalan. Dari upaya efisiensi tersebut, pada tahun 2015 Perseroan membukukan Laba Bersih sebesar Rp 1,46 triliun tumbuh sebesar 3,14% dari tahun 2014 atau lebih tinggi dari rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Usaha-usaha kami dalam mengembangkan Perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang dapat terlihat dari penambahan asset Perseroan sebesar 15,37%, tumbuh dari Rp 31,85 triliun menjadi Rp 36,75 triliun.

Usaha Perseroan untuk terus menambah Jalan Tol Beroperasi merupakan bentuk komitmen Manajemen untuk terus mempertahankan posisi Perseroan sebagai pemimpin di Industri Jalan Tol di Indonesia serta mendorong terwujudnya konektivitas antar wilayah

Pada tahun 2015 Perseroan juga telah menerapkan metode baru Amortisasi Perusahaan Jalan Tol, yaitu dengan menggunakan *Unit of Usage* yang didasarkan pada Volume Lalu Lintas kendaraan. Kebijakan ini dilakukan agar kinerja keuangan Perseroan lebih dapat mencerminkan kondisi yang relevan dengan kondisi sebenarnya.

Untuk menjaga Potensi pertumbuhan Jalan Tol yang pesat dan pencapaian visi Perseroan tahun 2017, Perseroan melanjutkan transformasi organisasi untuk menjembatani dan mempersiapkan karyawan Perseroan menjadi kader-kader pemimpin di masa yang akan datang melalui pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi dan kepemimpinan. Disamping itu, juga dilakukan rekrutmen 94 karyawan baru setingkat sarjana untuk mempersiapkan *Man Power Planning* dan regenerasi kader pimpinan perusahaan.

KENDALA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Perseroan memandang, kendala terbesar yang dihadapi pada tahun 2015 masih tetap ada pada upaya pembebasan lahan. Untuk memastikan proses pembebasan lahan tersebut berjalan sesuai dengan waktu yang dijanjikan, Kami secara konsisten melanjutkan koordinasi dengan Pemerintah melalui tim percepatan pembebasan lahan yang telah dibentuk sebelumnya secara internal.

Pada aspek pendanaan jalan tol baru ke depan, Perseroan akan dihadapi kendala pada terbatasnya dana yang dimiliki untuk melakukan ekspansi secara masif pada bisnis Jalan Tol. DER Perseroan berpotensi melebihi *covenant* yang telah ditetapkan

dengan pihak kreditur. Untuk itu Perseroan telah mengusulkan penambahan modal melalui Right Issue termasuk Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 1,25 Triliun. PMN tersebut untuk meningkatkan kapasitas keuangan Perseroan dalam menghadapi peluang bisnis yang ada. Rencana PMN tersebut, telah masuk dalam APBN Tahun 2016 yang pelaksanaannya tertunda mengingat Anggaran untuk PMN akan dibahas kembali pada APBN-P 2016. Oleh karenanya Perseroan akan memaksimalkan Kapasitas Keuangan yang ada untuk dapat mengembangkan Bisnis Perseroan serta mencari solusi alternatif pendanaan lainnya.

Pada Bidang Operasional kendala telah terlampainya Tingkat Layanan Jalan (V/C Ratio rata-rata sudah mencapai 0,85), di seluruh Ruas Tol Jabotabek, berdampak pada kemacetan khususnya di Jakarta. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi kemacetan tersebut diantaranya adalah memberikan informasi kepada pengguna jalan melalui Traffic Information Center (TIC), Papan Informasi Elektronik pada akses-akses masuk jalan tol dan membangun jaringan jalan baru di wilayah Jakarta sangat diperlukan agar distribusi kendaraan dapat tersebar dengan baik. Salah satu upaya yang telah dilakukan Perseroan adalah dengan melakukan percepatan pembangunan Ruas JORR W2 Utara yang merupakan missing link Ruas Tol JORR yang menghubungkan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Merak. Namun solusi ini hanya berdampak sementara mengingat jumlah kendaraan yang melintas jauh melebihi kapasitas jalan tol yang ada. Oleh karenanya Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah dalam rangka pembebasan lahan Ruas JORR 2 agar dapat dibangun secepatnya untuk mendistribusikan pergerakan lalu lintas kendaraan secara lebih baik.

Prospek Usaha Perseroan ke Depan

Tahun 2016 hingga 2018 merupakan periode yang penting bagi Perseroan. Pada periode tersebut seluruh ruas jalan tol baru yang kami miliki direncanakan dapat sepenuhnya beroperasi. Khusus pada tahun 2016 kami akan merencanakan pengoperasian tiga ruas tol tambahan, yaitu: Surabaya-Mojokerto Seksi Krian-Mojokerto, Semarang-Solo seksi Bawen-Salatiga dan Solo-Ngawi seksi Solo-Seragen.

Perseroan juga akan turut berperan dalam membangun beberapa proyek baru untuk meningkatkan konektivitas nasional serta mendukung visi Pemerintah Indonesia membangun 1000 km Jalan Tol baru di Indonesia dengan mengikuti tender pada Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Tol Manado-Bitung, Jalan Tol Pandaan-Malang dan Jalan Tol Semarang-Batang serta Perseroan memprakarsai Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2 Sisi Selatan dan Jakarta-Cikampek Elevated.

Dengan beroperasinya ruas-ruas baru tersebut serta upaya efisiensi biaya pengoperasian pada ruas-ruas yang telah beroperasi, kami optimis kinerja Perseroan akan tumbuh signifikan dimasa yang akan datang.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkesinambungan

Perseroan berkomitmen memastikan aktivitas pengelolaan bisnis dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan terus berupaya menyempurnakan praktik-praktik GCG yang selama ini telah diterapkan. Untuk memperkuat implementasi GCG, Perseroan secara aktif telah melakukan sosialisasi penerapan *Whistleblowing System*, Komitmen Pakta Integritas serta Program Pengendalian Gratifikasi

Upaya untuk selalu meningkatkan praktik-praktik GCG tercermin dalam kemampuan Perseroan mempertahankan hasil penilaian Skor GCG Perseroan, dimana untuk tahun 2015 Perseroan berhasil meraih predikat Sangat Baik dengan nilai 96,77%.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) diarahkan untuk menunjang keberlanjutan bisnis Perseroan, yang meliputi tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain melakukan penanaman pohon pada jalan tol-jalan tol yang dioperasikan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari kontribusi Perseroan terhadap pengurangan dampak pemanasan global serta menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan disekitar pengoperasian jalan tol. Program TJSP terhadap lingkungan ini juga dilakukan dengan melibatkan berbagai institusi yang peduli terhadap lingkungan.

Dibidang sosial kemasyarakatan Perseroan mengupayakan kondisi yang kondusif bagi kelangsungan usaha Perseroan dengan didukung oleh masyarakat melalui kegiatan-kegiatan bina lingkungan.

Penilaian atas Kinerja Komite-komite yang Berada di bawah Direksi

Pada tahun 2015, Perseroan tidak memiliki komite yang berada di bawah Direksi.

Penutup

Dengan semangat kerja yang tinggi serta disertai kebersamaan yang erat, kami optimis Kinerja Perseroan dimasa yang akan datang akan terus membaik serta Perseroan mampu berkontribusi dalam meningkatkan konektivitas Nasional sesuai dengan tema Laporan Tahunan Tahun 2015 ini "Mewujudkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional".

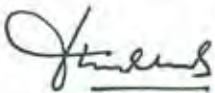
Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan sehingga Jasa Marga dapat mencapai kinerja yang baik selama tahun 2015. Semua pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan dedikasi para karyawan Jasa Marga yang telah memberikan kontribusi positif kepada Perseroan.

Direksi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham atas segala dukungan yang diberikan, sehingga pada tahun 2015 Perseroan dapat terus melaksanakan berbagai pengembangan. Penghargaan juga kami sampaikan kepada Pemerintah, masyarakat, pengguna jalan tol serta para mitra kerja dan stakeholders lainnya atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan kepada Jasa Marga.

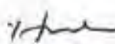
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karuniaNya kepada kita semua.



Adityawarman
Direktur Utama



Christantio Prihambodo
Direktur Operasi



Hasanudin
Direktur Pengembangan Usaha



Reynaldi Hermansjah
Direktur Keuangan/Direktur Independen



Achiran Pandu Djajanto
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko



Muh Najib Fauzan
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum



An aerial photograph of a coastal city, likely in Indonesia, showing a dense residential area with many small houses, a major highway with multiple lanes and a bridge, and a river or canal winding through the city. The sky is clear and blue. The image is framed by a red diagonal striped pattern in the top right and bottom right corners.

04

Analisa dan Pembahasan Manajemen

- TINJAUAN UMUM
- TINJAUAN KINERJA PERSEROAN DIBANDINGKAN DENGAN INDUSTRI JALAN TOL
- KINERJA PER SEGMENT USAHA 2014 DAN 2015
- ANALISA KINERJA KEUANGAN KOMPREHENSIF

Analisa dan Pembahasan Manajemen



Dengan panjang jalan tol beroperasi yang terus bertambah, akan mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia. Memperlancar proses produksi, pasar dan konsumsi akhir, meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik dan terwujud akan menjadi salah kunci dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Tinjauan Umum

Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dengan populasi sekitar 250 juta orang pada tahun 2015. Laju pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata 1,49% dari tahun 2000 s.d. 2010, dan jumlah penduduk diperkirakan tumbuh menjadi 300 juta orang pada tahun 2030. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di wilayah ASEAN. Jumlah penduduk perkotaan mencapai 50% pada tahun 2010 menurut Badan Pusat Statistik dan diperkirakan mencapai 67% pada tahun 2035. Hal ini berimplikasi pada pola konsumsi dan kebutuhan infrastruktur yang layak untuk mendukung meningkatnya penduduk perkotaan. Tingkat kepemilikan mobil di Indonesia masih rendah di angka 69 mobil per 1.000 orang pada tahun 2011 dan sekitar 77 mobil per 1.000 orang tahun 2015, relatif rendah jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai 800 mobil per 1.000 orang. Hal ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar karena Indonesia diproyeksikan melampaui Jerman untuk menjadi negara dengan perekonomian ketujuh terbesar di dunia pada tahun 2030, menurut perkiraan McKinsey & Company.

Selama tahun 2015, perekonomian Indonesia masih mengalami pertumbuhan. Hal ini terlihat dari indikator-indikator ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,79%. Di lain pihak inflasi mencapai 3,35% (data BPS), dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika melemah pada kisaran Rp 13.795 (data Bloomberg). Namun indikator terakhir tersebut, tidak terlalu signifikan berpengaruh bagi bisnis Perseroan mengingat Perseroan tidak mempunyai transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang asing. Pertumbuhan ekonomi yang masih tumbuh tersebut tercermin dari kebutuhan penguatan konektivitas nasional. Salah satu upaya untuk memperkuat konektivitas nasional tersebut, dibutuhkan penambahan jaringan jalan tol yang merupakan salah satu program RPJMN 2015-2019, dimana salah satu targetnya adalah menambah panjang jalan tol beroperasi sepanjang 1.000 km.

Volume Lalu Lintas Transaksi

1,38 miliar kendaraan

↑ 4,54%

Pendapatan Tol

Rp 7,12 triliun

↑ 7,14%

Aset Perusahaan

Rp 36,72 triliun

↑ 15,27%

Tinjauan Kinerja Perseroan vs Industri Jalan Tol

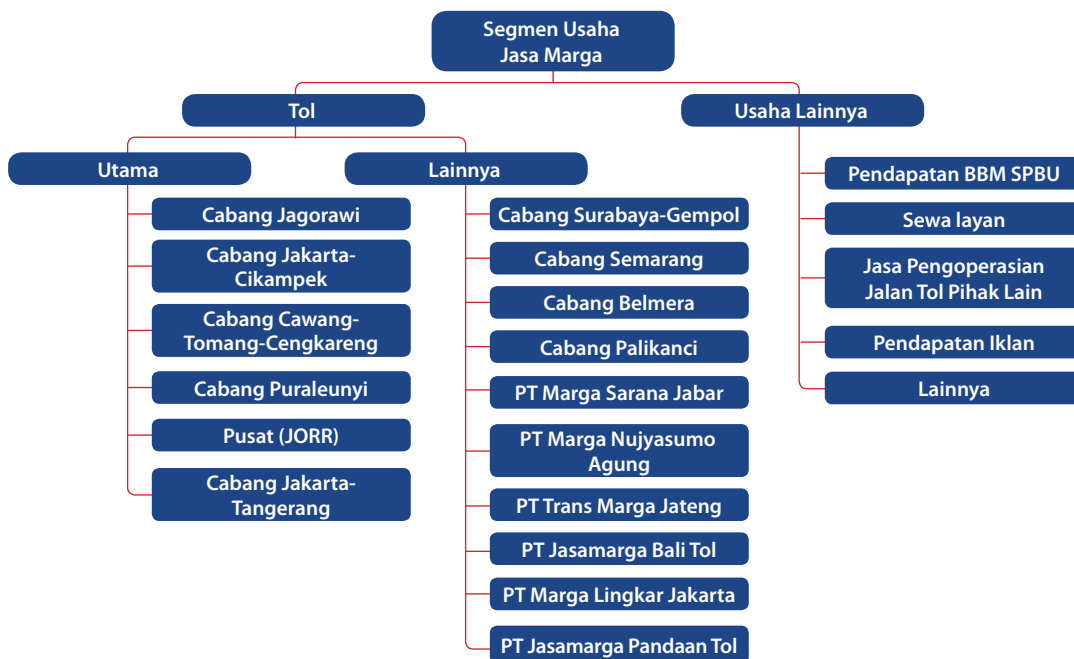
Perseroan sampai dengan saat ini telah mengoperasikan 590 km jalan tol, atau 63% dari keseluruhan total panjang jalan tol beroperasi di Indonesia ±940 km. Sampai dengan tahun 2018, Perseroan berencana akan menambah ± 400 km jalan tol baru sehingga total jalan tol yang dioperasikan pada tahun 2018 akan menjadi 987 km. Di sisi lain, jumlah kendaraan yang melewati jalan tol pun, sekitar 80% melewati jalan tol yang dioperasikan oleh Perseroan. Dengan kondisi-kondisi tersebut di atas, Perseroan memimpin (leading) dalam industri jalan tol di Indonesia baik dari sisi panjang jalan tol beroperasi maupun volume lalu lintas transaksi yang melalui jalan tol.

Panjang Jalan	
Jasa Marga	Industri Jalan Tol
Pada tahun 2015 panjang jalan tol Perseroan mencapai 590 km atau tumbuh 2,43% dari angka 576 km di akhir tahun 2014. Pangsa pasar Perseroan di akhir tahun 2015 adalah 63%.	Panjang jalan tol nasional tumbuh sebesar 17,20%, dari posisi ±802 km pada tahun 2014 menjadi ±940 km pada tahun 2015.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Dasar Penerapan Segmen Usaha Jasa Marga

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, pendekatan segmen usaha Jasa Marga dibagi berdasarkan sifat usaha Perseroan, dimana sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang diadopsi oleh Perusahaan, Segmen Usaha Perseroan adalah sebagai berikut:



I. **Segmen Usaha Pengoperasian Jalan Tol**

Sesuai PSAK 5 (Revisi 2009) mengenai Segmen Operasi, Segmen Usaha Pengoperasian Jalan Tol Perseroan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar. Kelompok pertama merupakan 6 (enam) segmen dengan hasil usaha terbesar atau segmen-segmen dengan hasil usaha yang digabungkan sebesar 75% dari total hasil usaha. Sedangkan kelompok kedua adalah Segmen Lainnya yang bukan merupakan bagian dari segmen pada kelompok pertama, atau yang memenuhi 10% dari total hasil usaha.

II. **Segmen Usaha Lain**

Sebagai bagian dari optimalisasi aset Perseroan sebagaimana Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, Pengembangan Usaha Lain terbagi atas beberapa segmen usaha.

Informasi detail terkait informasi segmen usaha dapat dilihat pada catatan 47 Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Strategi Pengembangan Segmen Usaha

Pada prinsipnya strategi utama pengembangan Segmen Usaha adalah sebagai berikut:

- **Bidang Pengembangan Usaha dengan sasaran menambah pendapatan Tol dan usaha terkait lainnya untuk meningkatkan pendapatan dan keuangan Perseroan.**

Strategi Pengembangan Segmen Usaha Jalan Tol

Dalam rangka meningkatkan pendapatan tol, Perseroan telah berhasil mengoperasikan Jalan Tol Gempol-Pandaan sepanjang 13,6 km pada awal bulan Juni 2015. Perseroan juga telah berhasil mendapatkan Hak Penguasaan Jalan Tol Solo-Ngawi (90 km), Jalan Tol Ngawi-Kertosono (87 km) dan Jalan Tol Cinere-Serpong (10 km). Selain itu, Perseroan juga berkomitmen untuk dapat menyelesaikan ketiga belas proyek baru pada tahun 2018.

Strategi Pengembangan Segmen Usaha Lain

Pada bidang pengembangan Usaha Lain, upaya peningkatan pendapatan usaha lain dilakukan dengan mengoptimalkan aset perusahaan dan mensinergikan pengembangan usaha lain dengan bisnis jalan tol. Optimalisasi aset dilakukan antara lain dengan memanfaatkan ruang milik jalan tol sebagai lokasi pemasangan iklan dan utilitas serta mengembangkan rest area pada titik-titik tertentu pada jalan tol. Peningkatan pendapatan diperoleh melalui kenaikan biaya sewa pemasangan iklan dan utilitas serta kenaikan pendapatan dari pengelolaan TIP.

Untuk mendukung pengembangan dan pengoperasian jalan tol, Perseroan telah mendirikan PT Jasa Layanan Operasi dengan kompetensi inti jasa layanan operasional jalan tol. Tujuan pembentukan anak perusahaan tersebut adalah agar pengembangan kompetensi bidang operasional dapat difokuskan pada kedua anak perusahaan tersebut dan secara konsolidasi dapat tercapai efisiensi dalam beban operasional perseroan.

Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan usaha lain, Perseroan juga melaksanakan pengembangan properti dengan melakukan land banking dan akuisisi properti pada kawasan di sekitar koridor jalan tol melalui anak perusahaan, PT Jasamarga Properti. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan berupa peningkatan nilai tanah dan properti seiring dengan pengembangan jalan tol perseroan.

- **Bidang Pengoperasian Jalan Tol dengan sasaran modernisasi operasional untuk mengamankan pendapatan dan terus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pelanggan.**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jalan tol, Perseroan terus berusaha untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2014 tanggal 17 Oktober 2014. Upaya Perseroan untuk terus meningkatkan kinerja operasional melalui pemenuhan SPM dan peningkatan pelayanan pada tahun 2015, mendapatkan apresiasi yang baik dari Pemerintah dengan disesuaikannya tarif tol untuk 12 Ruas jalan tol yang dikelola oleh Perseroan. Dalam rangka upaya menciptakan situasi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas, Perseroan bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (sebagai inisiator) melakukan Kegiatan Operasi Zebra di Seluruh Ruas Jalan Tol yang dikelola oleh Perseroan. Kegiatan Operasi Zebra meliputi kegiatan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran seperti melanggar batas kecepatan, kelebihan muatan, pelanggaran marka jalan, dan lain-lain. Di samping itu, modernisasi sistem transaksi menggunakan e-Toll card juga terus dilakukan dengan menambah Gardu Tol Otomatis (GTO) untuk menggantikan Gardu Tol Reguler. Pada tahun 2015, Perseroan melakukan penambahan GTO sebanyak 110 GTO atau sebesar 40% dari total gardu operasi. Di samping itu, guna memberikan kemudahan kepada pengguna jalan tol dalam menggunakan e-Toll, pada bulan Februari 2015, Perseroan telah menerapkan transaksi Top Up Tunai di dalam Gardu pada 12 gardu tol.

Kinerja Segmen Usaha Perseroan 2014 dan 2015

Berikut adalah hasil kinerja segmen usaha Perseroan untuk tahun 2014 dan 2015.

Segmen Usaha Pengoperasian Jalan Tol

Untuk tahun 2015, total Volume Lalu Lintas Transaksi Perseroan mencapai 1,38 miliar kendaraan, naik 4,54% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 370/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol yang Sudah Beroperasi dan Besarnya Tarif Tol pada Beberapa Ruas Jalan Tol, ditetapkan Golongan jenis kendaraan sebagai berikut:

Golongan	Jenis Kendaraan
I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil dan Bus
II	Truk dengan 2 (dua) gandar
III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
V	Truk dengan lima (lima) gandar

Untuk tahun 2015, total volume lalu lintas transaksi Perseroan mencapai 1,38 miliar kendaraan, dengan 87,51% merupakan kendaraan golongan I (sedan, pick up) dan 12,49% merupakan

golongan kendaraan besar (truk dan bus). Kontribusi terbesar volume lalu lintas transaksi Perseroan diperoleh dari Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng yang mengoperasikan Ruas Jalan Tol Dalam Kota dan Ruas Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo, dimana kontribusinya mencapai 284,66 juta kendaraan atau 20,63% dari total transaksi secara keseluruhan.

Dengan pencapaian volume lalu lintas transaksi tersebut, Pendapatan Tol Perseroan mencapai Rp 7,12 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng yang mengoperasikan Ruas Jalan Tol Dalam Kota dan Ruas Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo, dimana kontribusinya mencapai Rp 1,25 triliun atau 17,51% dari total Pendapatan Tol Perseroan.

Meningkatnya Pendapatan Tol antara lain disebabkan oleh adanya penyesuaian tarif tol pada jalan tol milik Perseroan. Ketentuan penyesuaian tarif telah ditetapkan dalam Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan Pasal 48 dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa operator jalan tol dapat menyesuaikan tarif setiap dua tahun sekali berdasarkan laju inflasi.

Sampai saat ini kenaikan tarif tol masih sesuai dengan jadwal yang diatur dalam UU tersebut di atas. Pemerintah telah menunjukkan konsistensinya dalam memelihara iklim investasi jalan tol yang kondusif. Penyesuaian tarif tol ini bertujuan untuk memberikan kepastian pengembalian atas investasi yang dilakukan oleh investor. Besarnya penyesuaian tarif tol pada tahun 2015 mengikuti besaran inflasi kumulatif daerah yaitu rata-rata sekitar 13%. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 507/KPTS/M/2015 tanggal 28 Oktober 2015, ruas tol Perseroan yang mengalami penyesuaian tarif adalah sebagai berikut:

RUAS-RUAS JALAN TOL YANG MENGALAMI PENYESUAIAN TARIF TAHUN 2015

No.	Segmen	Ruas	Cabang/Anak Perusahaan
1.	Jagorawi	1. Jagorawi	Jagorawi
2.	Cawang-Tomang-Cengkareng	2. Dalam Kota Jakarta/JIRR	Cawang-Tomang-Jakarta
3.	Purbaleunyi	3. Padaleunyi	Purbaleunyi
		4. Cipularang	
4.	Jakarta-Tangerang	5. Jakarta-Tangerang	Jakarta-Tangerang
5.	Pusat (PT JLJ)	6. Jakarta Outer Ring Road / JORR	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta dan PT Marga Lingkar Jakarta
		7. Ulujami-Pondok Aren	
6.	Segmen Lainnya	8. Surabaya-Gempol	Surabaya-Gempol
		9. Semarang	Semarang
		10. Palikanci	Palikanci
		11. Belmera	Belmera
		12. Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	PT Jasamarga Bali Tol

Sehubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1436 H/Tahun 2015 dan dalam rangka meningkatkan pelayanan jalan tol, Pemerintah meminta kepada Badan Usaha Jalan Tol untuk memberikan potongan tarif tol sebesar 25% dan khusus untuk ruas-ruas jalan tol yang dioperasikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 35% sejak H-10 sampai H+5 Hari Raya Idul Fitri 1436 H, sesuai dengan Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. KU.09.01-Mn/450 tanggal 12 Juni 2015 tentang Potongan Tarif Tol dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Jalan Tol selama Hari Raya Idul Fitri 1436 H/Tahun 2015.

Berikut adalah hasil segmen usaha Perseroan untuk tahun 2014 dan 2015

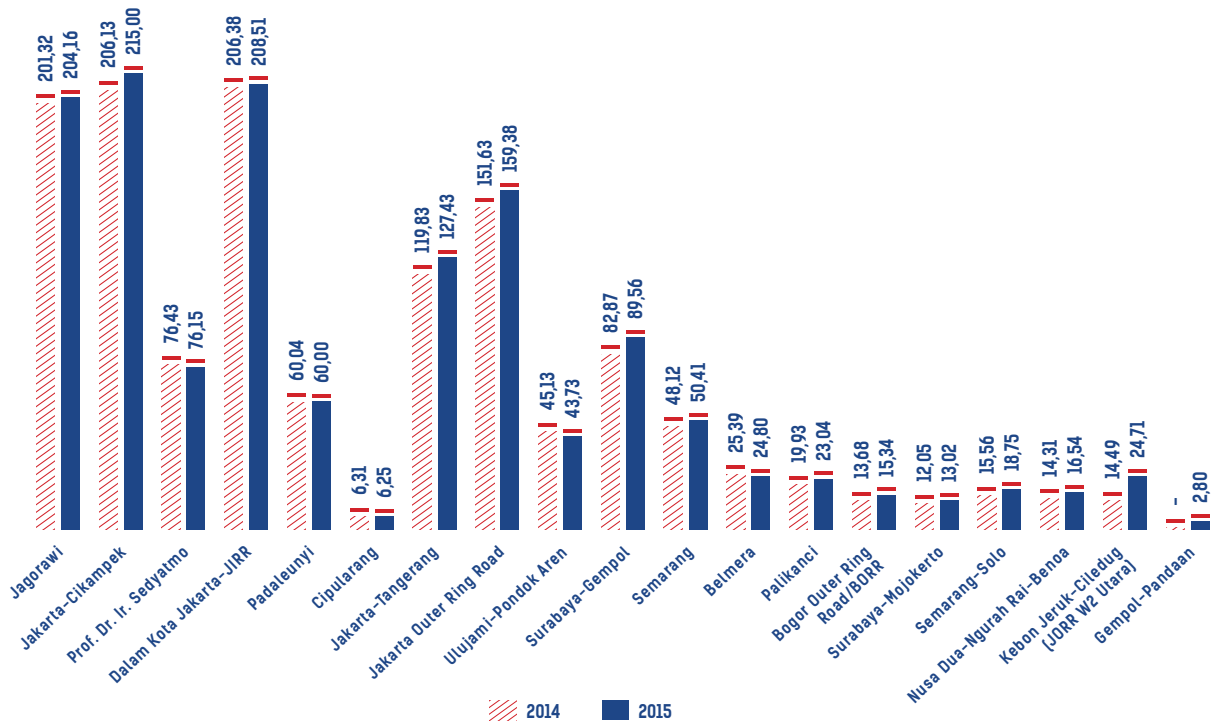
PENCAPAIAN VOLUME LALU LINTAS TRANSAKSI 2014 DAN 2015

(juta transaksi kendaraan)

No.	Segmen	Ruas	Cabang/Anak Perusahaan	2014		2015		Δ	Δ%
				Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)		
1	Jagorawi	Jagorawi	Jagorawi	201,32	15,26	204,16	14,80	2,84	1,41
2	Jakarta-Cikampek	Jakarta-Cikampek	Jakarta-Cikampek	206,13	15,62	215,00	15,58	8,87	4,30
3	Cawang-Tomang-Cengkareng	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	Cawang-Tomang-Cengkareng	76,43	5,79	76,15	5,52	(0,28)	(0,36)
		Dalam Kota Jakarta/JIRR		206,38	15,64	208,51	15,11	2,13	1,03
4	Purbaleunyi	Padaleunyi	Purbaleunyi	60,04	4,55	60,00	4,35	(0,05)	(0,08)
		Cipularang		6,31	0,48	6,25	0,45	(0,06)	(1,00)
5	Jakarta-Tangerang	Jakarta-Tangerang	Jakarta-Tangerang	119,83	9,08	127,43	9,24	7,60	6,34
6	Pusat (PT JLJ)	Jakarta Outer Ring Road/JORR	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	151,63	11,49	159,38	11,55	7,75	5,11
		Ulujami-Pondok Aren	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	45,13	3,42	43,73	3,17	(1,40)	(3,09)
7	Segmen Lainnya	Surabaya-Gempol	Surabaya-Gempol	82,87	6,28	89,56	6,49	6,69	8,07
		Semarang	Semarang	48,12	3,65	50,41	3,65	2,28	4,75
		Belmera	Belmera	25,39	1,92	24,80	1,80	(0,59)	(2,32)
		Palikanci	Palikanci	19,93	1,51	23,04	1,67	3,11	15,60
		Bogor Outer Ring Road/BORR	PT Marga Sarana Jabar	13,68	1,04	15,34	1,11	1,66	12,11
		Surabaya-Mojokerto	PT Marga Nujyasumo Agung	12,05	0,91	13,02	0,94	0,97	8,03
		Semarang-Solo	PT Trans Marga Jateng	15,56	1,18	18,75	1,36	3,19	20,48
		Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	PT Jasamarga Bali Tol	14,31	1,08	16,54	1,20	2,23	15,56
		Kebon Jeruk-Ciledug (JORR W2 Utara)	PT Marga Lingkar Jakarta	14,49	1,10	24,71	1,79	10,22	70,58
		Gempol-Pandaan	PT Jasa Marga Pandaan Tol			2,80	0,20	2,80	n/a
TOTAL				1.319,60	100,00	1.379,57	100,00	59,97	4,54

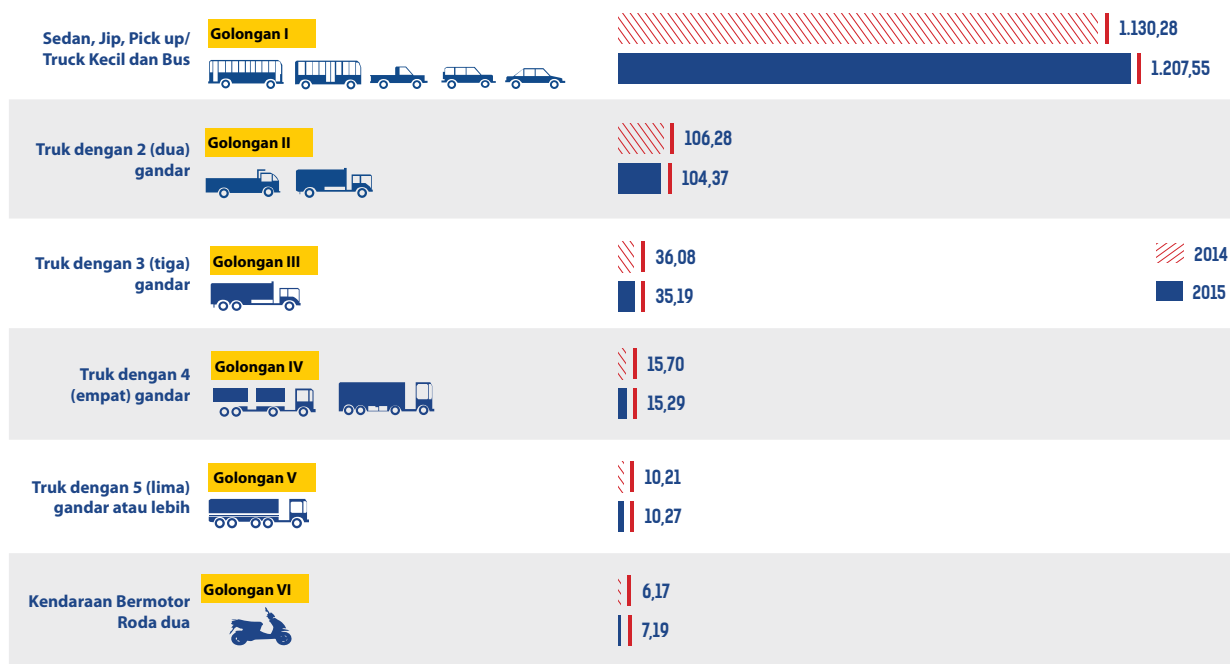
PENCAPAIAN VOLUME LALU LINTAS TRANSAKSI 2015

(juta transaksi kendaraan)



PENCAPAIAN VOLUME LALU LINTAS TRANSAKSI PER GOLONGAN 2015

(juta transaksi kendaraan)



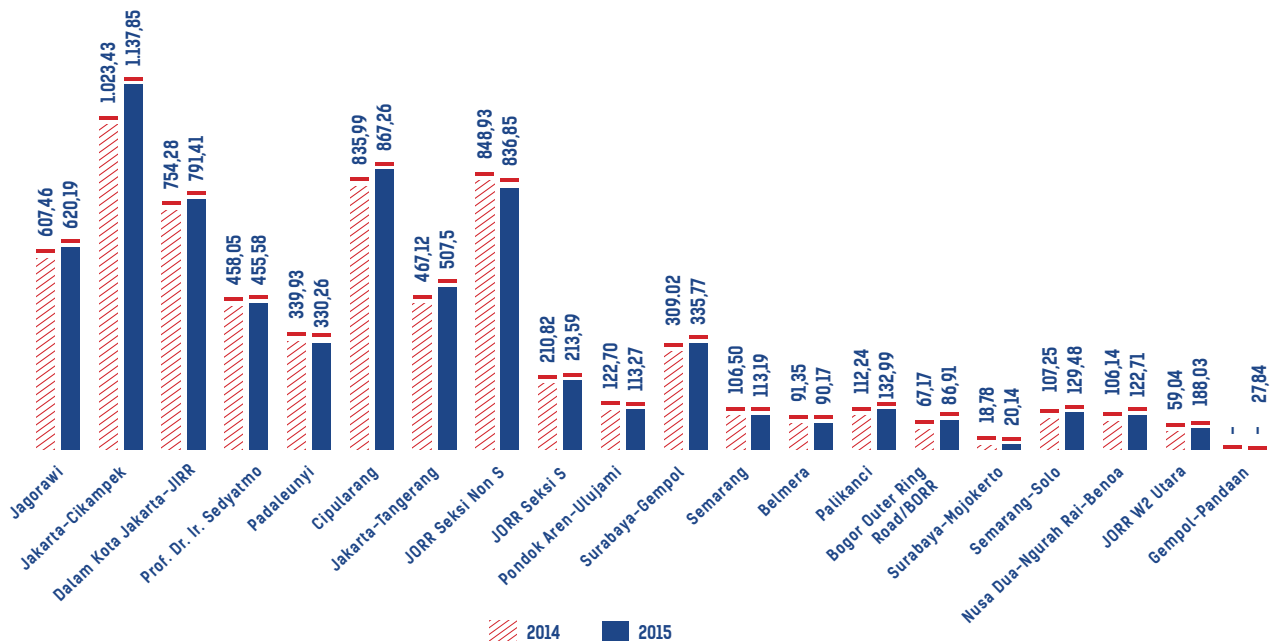
2014 2015

PENCAPAIAN PENDAPATAN TOL 2015

(dalam miliar Rupiah)

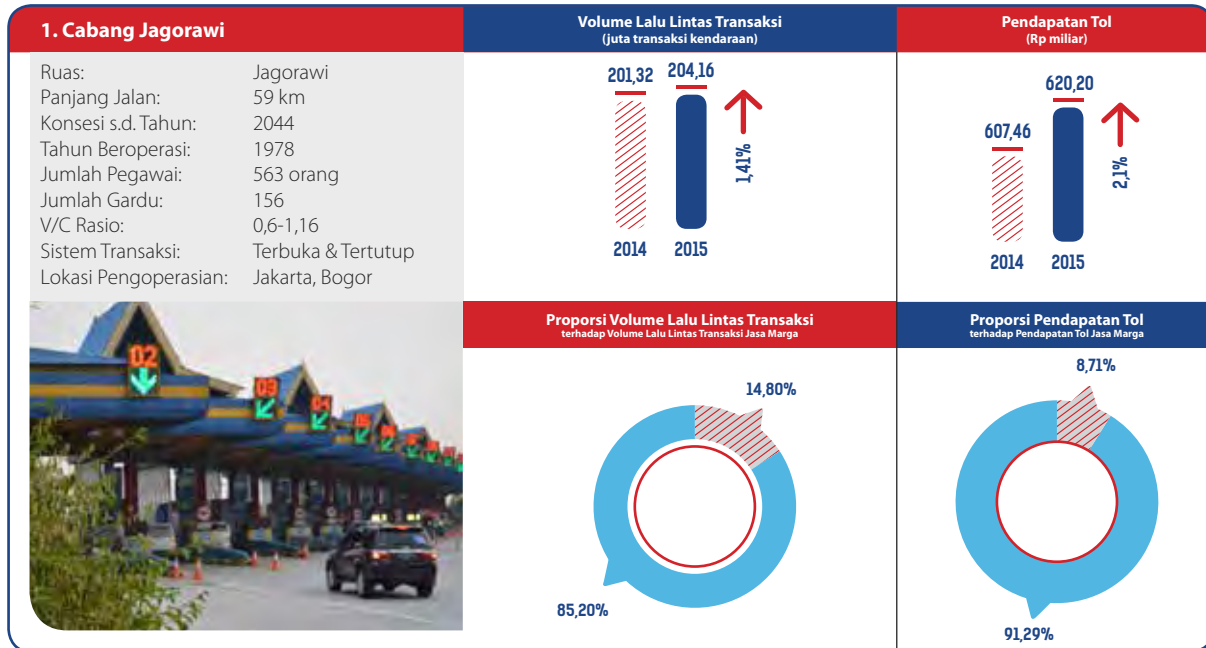
No	Segmen	Cabang/Anak Perusahaan	Ruas	2014		2015		Δ	Δ%
				Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)		
1	Jagorawi	Jagorawi	Jagorawi	607,46	9,14	620,19	8,71	12,73	2,10
2	Jakarta-Cikampek	Jakarta-Cikampek	Jakarta-Cikampek	1.023,43	15,40	1.137,85	15,98	114,42	11,18
3	Cawang-Tomang-Cengkareng	Cawang-Tomang-Cengkareng	Jalan Tol Dalam Kota	754,28	11,35	791,41	11,11	37,14	4,92
4	Purbaleunyi	Purbaleunyi	Prof. Dr. Sedyatmo	458,05	6,89	455,58	6,40	(2,47)	-0,54
			Padaleunyi	339,93	5,11	330,26	4,64	(9,67)	-2,85
			Cipularang	835,99	12,58	867,26	12,18	31,27	3,74
5	Jakarta-Tangerang	Jakarta-Tangerang	Jakarta-Tangerang	467,12	7,03	507,52	7,13	40,41	8,65
6	Pusat (PT JLI)	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	JORR Non S	848,93	12,77	836,85	11,75	(12,08)	-1,42
			JORR S	210,82	3,17	213,59	3,00	2,77	1,31
			Pondok Aren-Ulujami	122,70	1,85	113,27	1,59	(9,43)	-7,68
7	Lainnya	Surabaya-Gempol	Surabaya-Gempol	309,02	4,65	335,77	4,72	26,75	8,66
		Semarang	Semarang	106,50	1,60	113,19	1,59	6,69	6,28
		Belmera	Belmera	91,35	1,37	90,17	1,27	(1,18)	-1,29
		Palikanci	Palikanci	112,44	1,69	132,99	1,87	20,55	18,28
		PT Marga Sarana Jabar	Bogor Outer Ring Road	67,17	1,01	86,91	1,22	19,74	29,39
		PT Marga Nujyasumo Agung	Surabaya-Mojokerto	18,78	0,28	20,14	0,28	1,36	7,23
		PT Trans Marga Jateng	Semarang-Solo	107,25	1,61	129,48	1,82	22,23	20,73
		PT Jasamarga Bali Tol	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	106,14	1,60	122,71	1,72	16,57	15,61
		PT Marga Lingkar Jakarta	JORR W2 Utara	59,04	0,89	188,03	2,64	129,00	218,51
		PT Jasamarga Pandaan Tol	Gempol-Pandaan	-	-	27,84	0,39	-	-
TOTAL				6.646,39	100,00	7.121,02	100,00	474,63	7,14

PENCAPAIAN PENDAPATAN TOL 2015
(miliar Rupiah)



Segmen Usaha Pengoperasian Jalan Tol

Segmen Utama



Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015, Volume Lalu Lintas Transaksi Cabang Jagorawi tercatat sebesar 204,16 juta kendaraan, naik sebesar 1,41% dibandingkan dengan Volume Lalu Lintas Transaksi tahun 2014 sebesar 201,32 juta kendaraan. Tahun 2015, kontribusi Cabang Jagorawi terhadap Total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 14,80%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 620,2 miliar, naik sebesar 2,1% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 607,46 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol mencapai 8,71% terhadap Total Pendapatan Tol.

Rasio kapasitas layanan jalan (perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas lajur yang tersedia) pada tahun 2015 secara menyeluruh telah mencapai 0,8. Berdasarkan pengukuran waktu tempuh perjalanan pada jalan tol Jagorawi jika dibandingkan dengan jalan non tol mencapai 2,3 kali.

Profitabilitas

Tahun 2015, Laba setelah pajak Cabang Jagorawi mencapai sebesar Rp 328,75 miliar, naik 12,80% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 291,44 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2015

Pendapatan Tol Cabang Jagorawi tumbuh 2,1% dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas transaksi sebesar 1,41% dan penyesuaian tarif tol pada November 2015. Peningkatan

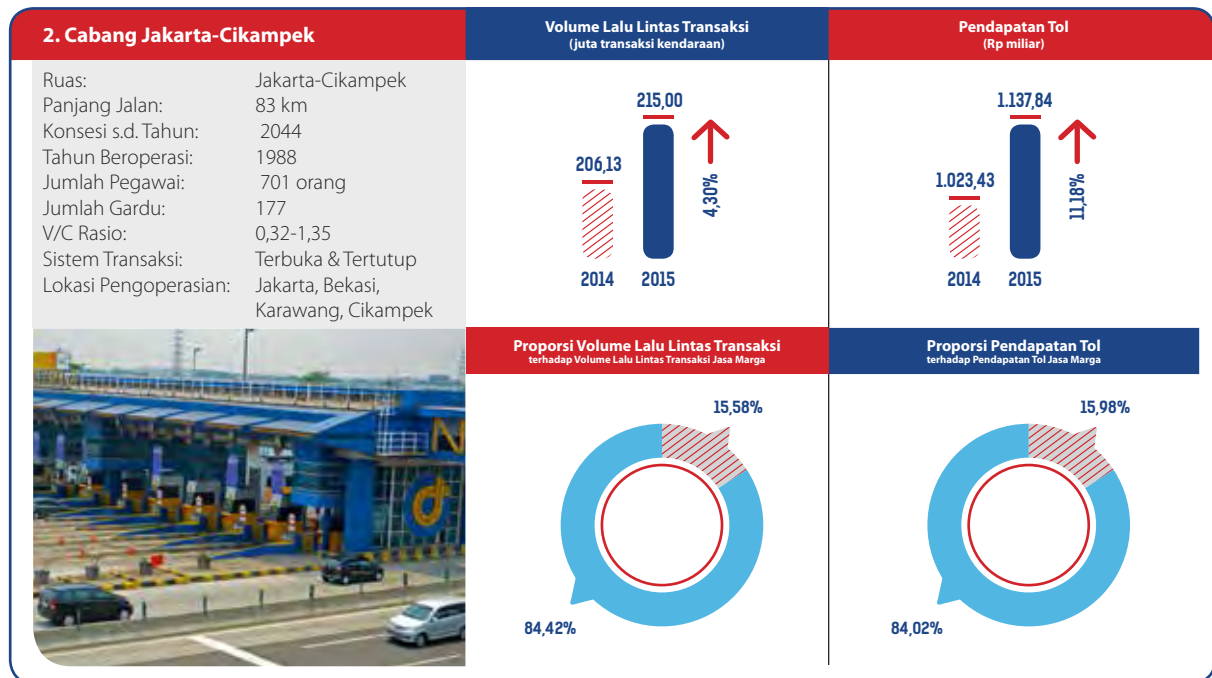
volume lalu lintas transaksi disebabkan oleh perkembangan daerah pemukiman di sekitar Cibubur, Sentul dan Bogor yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi pada Kota Bogor. Selain itu, peningkatan volume lalu lintas transaksi juga dipengaruhi oleh beroperasinya Jalan Tol Bogor Outer Ring Road sejak tahun 2009 Jalan Tol Cinere-Jagorawi sejak tahun 2012.

Prospek Usaha

Pada tahun 2015, Jalan Tol Jagorawi mengalami pertumbuhan lalu lintas sebesar 1,41%. Pertumbuhan tersebut antara lain disebabkan oleh pengoperasian Jalan Tol JORRW2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami) pada bulan Juli 2014.

Di tengah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 yang hanya mencapai 4,79%, pertumbuhan volume lalu lintas transaksi pada gerbang-gerbang tol di wilayah Jalan Tol Jagorawi seperti Ciawi, Bogor, Sentul City, Cibinong, Gunung Puteri dan Cimanggis dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan trend pertumbuhan yang positif. Trend positif tersebut menunjukkan volume lalu lintas transaksi di Jalan Tol Jagorawi masih akan tumbuh.

Ke depan, pertumbuhan volume lalu lintas transaksi di Jalan Tol Jagorawi akan ditopang oleh adanya pengembangan wilayah di sekitar Jalan Tol Jagorawi khususnya yang mengarah ke wilayah Ciawi, serta pengoperasian Jalan Tol Cinere – Jagorawi (Cijago) yang rencananya akan dioperasikan secara penuh pada tahun 2020.



Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015, Volume Lalu Lintas Transaksi Cabang Jakarta-Cikampek tercatat sebesar 215,00 juta kendaraan, naik sebesar 4,30% dibandingkan dengan Volume Lalu Lintas Transaksi tahun 2014 sebesar 206,13 juta kendaraan. Tahun 2015, kontribusi Cabang Jakarta-Cikampek terhadap Total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 15,58%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 1.137,8 miliar, naik sebesar 11,18% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 1.023,43 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol mencapai 15,98% terhadap Total Pendapatan Tol.

Profitabilitas

Tahun 2015, Laba setelah pajak Cabang Jakarta-Cikampek mencapai sebesar Rp 512,44 miliar, naik 56,34% dibandingkan tahun dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 327,77 miliar.

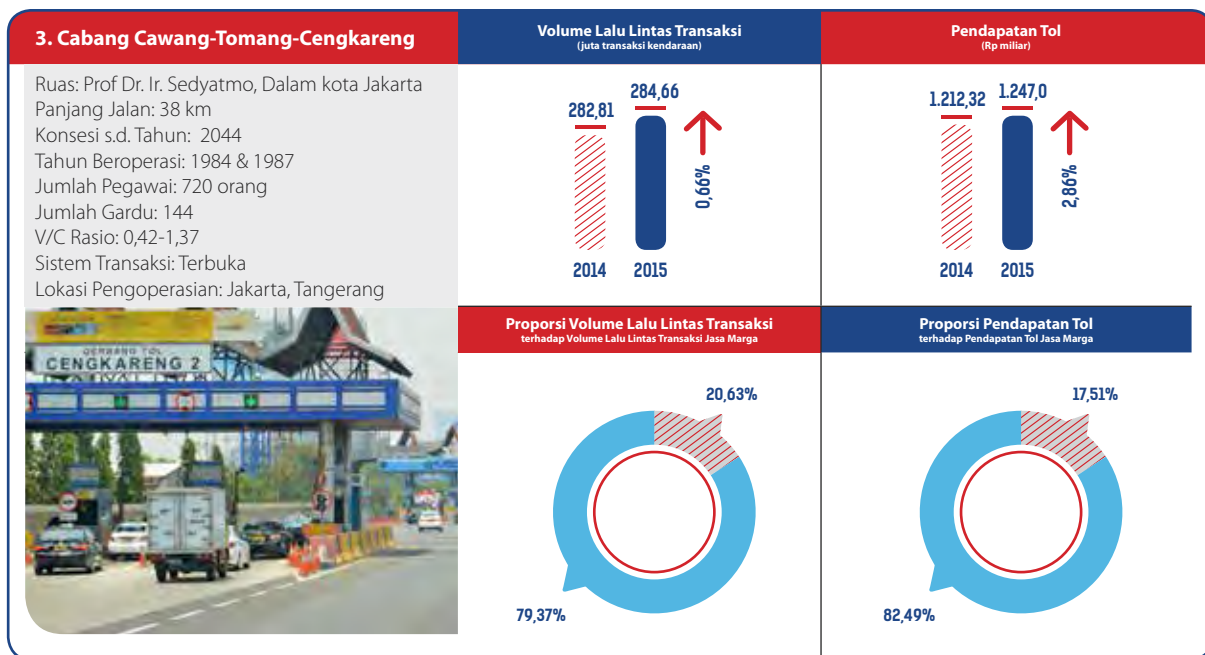
Analisa Kinerja Tahun 2015

Pendapatan Tol Cabang Jakarta-Cikampek tumbuh 11,18% dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas

transaksi sebesar 4,30% dan penyesuaian tarif tol pada November 2015. Pertumbuhan volume lalu lintas transaksi disebabkan oleh pengoperasian Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang menghubungkan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dengan Jalan Tol Palimanan-Kanci sejak bulan Juni 2015. Selain itu, pertumbuhan volume lalu lintas transaksi juga disebabkan oleh perkembangan wilayah Bekasi, Cikarang dan Karawang yang berdampak pada peningkatan aktivitas lalu lintas wilayah tersebut.

Prospek Usaha

Sejak tahun 2011 hingga 2015, rata-rata pertumbuhan lalu lintas Jalan Tol Jakarta-Cikampek adalah sekitar 5%. Pada tahun 2015, pertumbuhan volume lalu lintas Jalan Tol Jakarta-Cikampek adalah sebesar 4,30%, dengan wilayah-wilayah yang mengalami pertumbuhan volume lalu lintas transaksi yang tinggi adalah Cikarang Utama, Karawang Barat, Karawang Timur dan Cikarang Barat.



Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015, Volume Lalu Lintas Transaksi Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng tercatat sebesar 284,66 juta kendaraan, naik sebesar 0,66% dibandingkan dengan Volume Lalu Lintas Transaksi tahun 2014 sebesar 282,81 juta kendaraan. Tahun 2015, kontribusi Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng terhadap total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 20,63%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 1.247,0 miliar, naik sebesar 2,86% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 1.212,32 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng mencapai 17,51% terhadap Total Pendapatan Tol.

Profitabilitas

Tahun 2015, Laba setelah pajak Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng mencapai sebesar Rp 863,40 miliar, naik 0,98% dibandingkan dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 855,03 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2015

Pendapatan Tol Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng tumbuh 2,86% dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas transaksi sebesar 0,66%, penyesuaian tarif pada jalan tol Dalam Kota Jakarta (JIRR) pada November 2015, kebijakan pembatasan waktu truk masuk tol guna memperlancar arus lalu lintas dalam kota, serta terintegrasinya Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) secara penuh pada bulan Juli 2014. Selain itu, perkembangan kawasan pemukiman baru di sekitar jalan tol juga turut mempengaruhi pertumbuhan volume lalu lintas pada Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng. Guna meningkatkan pelayanan terhadap Pengguna Jalan Tol Dalam Kota, Perseroan memberlakukan sistem Petugas Jemput Transaksi (PUTTRA), yang juga berdampak pada pencapaian kenaikan volume lalu lintas transaksi.

Prospek Usaha

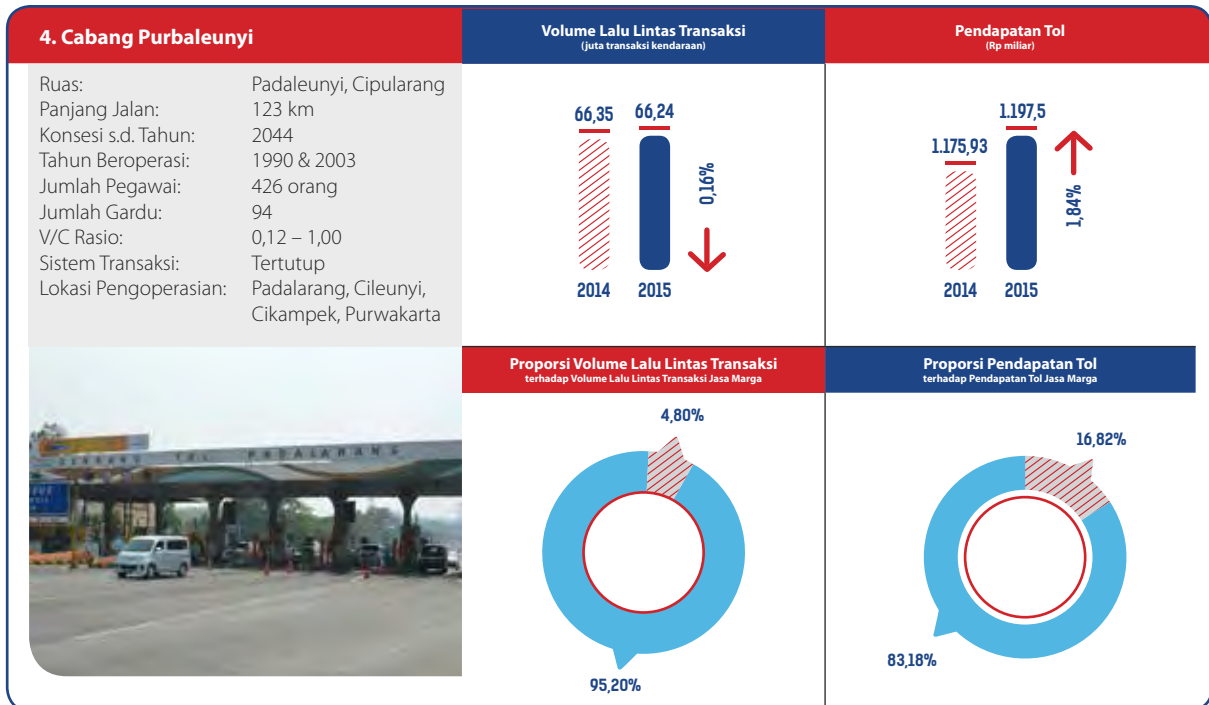
Jalan Tol Dalam Kota

Pada tahun 2015, Jalan Tol Cawang – Tomang – Pluit mengalami pertumbuhan lalu lintas sebesar 1,03%. Wilayah Cawang, Tomang dan Pluit merupakan kawasan padat perkantoran (pusat kegiatan) yang terus berkembang dimana masyarakat masih terfokus menggunakan jalan tol dan jalan non-tol sebagai jaringan prasarana transportasi utama. Kegiatan masyarakat yang terus meningkat tanpa didukung pertumbuhan jaringan jalan akan menimbulkan kejenuhan pergerakan lalu lintas. Hal tersebut menjadi *uncontrolled factor* yang menyebabkan pertumbuhan volume lalu lintas di wilayah ini sulit tumbuh secara signifikan.

Pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang menghubungkan wilayah Cawang – Cibubur, Bekasi Timur – Cibubur dan Dukuh Atas – Cawang dan direncanakan beroperasi pada tahun 2017 memberikan alternatif moda transportasi bagi masyarakat. Hal tersebut diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi kelancaran pergerakan lalu lintas di jalan tol, sehingga pertumbuhan volume lalu lintas Jalan Tol Cawang – Tomang – Pluit menjadi lebih stabil.

Jalan Tol Prof. Sedyatmo

Ke depan, pertumbuhan volume lalu lintas transaksi di Jalan Tol Prof. Sedyatmo akan ditopang oleh penyelesaian perluasan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 2016. Perluasan Terminal 3 tersebut akan meningkatkan aktivitas di wilayah Cengkareng, yang berdampak pada kenaikan lalu lintas.



Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015, Volume Lalu Lintas Transaksi Cabang Purbaleunyi tercatat sebesar 66,24 juta kendaraan, turun sebesar 0,16% dibandingkan dengan Volume Lalu Lintas Transaksi tahun 2014 sebesar 66,35 juta kendaraan. Tahun 2015, kontribusi Cabang Purbaleunyi terhadap total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 4,80%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 1.197,5 miliar, naik sebesar 1,84% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 1.175,93 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari Cabang Purbaleunyi mencapai 16,82% terhadap Total Pendapatan Tol.

Profitabilitas

Tahun 2015, Laba setelah pajak Cabang Purbaleunyi mencapai sebesar Rp 886,47 miliar, meningkat 0,27% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 884,13 miliar.

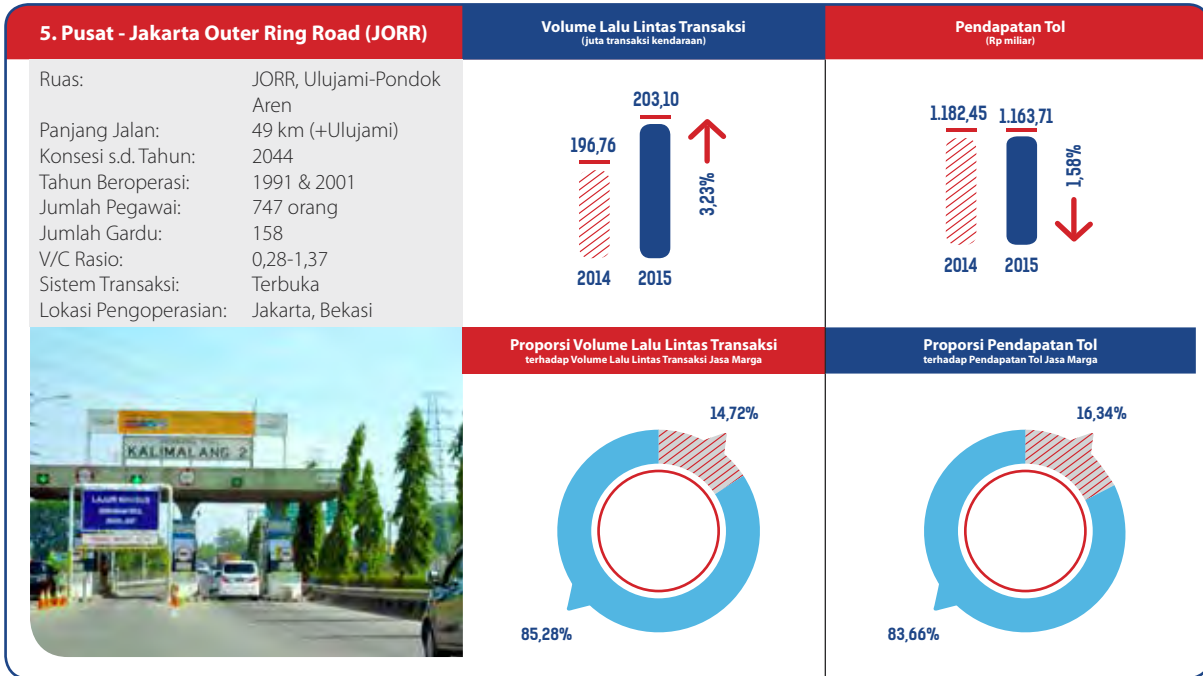
Analisa Kinerja Tahun 2015

Pendapatan Tol Cabang Purbaleunyi tumbuh 1,84% dari tahun lalu disebabkan penyesuaian tarif tol pada November 2015. Volume lalu lintas transaksi turun sebesar 0,16% disebabkan adanya perubahan pola perjalanan menuju arah Palimanan karena pengoperasian Jalan Tol Cikopo-Palimanan pada bulan

Juni 2015. Pengguna Jalan Tol yang akan menuju Palimanan melalui Jalur Pantura akan keluar di Gerbang Tol Kalihurip, Cikampek dan Sadang. Namun, sejak beroperasinya Jalan Tol Cikopo-Palimanan, Pengguna Jalan memiliki alternatif untuk keluar di Gerbang Tol Cikopo dan menggunakan Jalan Tol Cikopo – Palimanan.

Prospek Usaha

Sejak tahun 2011 hingga 2014 Ruas Purbaleunyi terus mengalami pertumbuhan lalu lintas. Wilayah Sadang, Jatiluhur, Cikamuning dan Cileunyi merupakan wilayah yang mengalami pertumbuhan cukup besar. Namun pada tahun 2015, Ruas Purbaleunyi mengalami penurunan dibawah 1%, hal ini disebabkan karena adanya perpindahan pola pergerakan lalu lintas akibat terkoneksinya Ruas Cikampek – Palimanan. Pengguna Jalan dari wilayah Purwakarta tidak lagi melewati Sadang untuk menuju Cirebon, hal ini umum terjadinya apabila ada ruas jalan tol baru yang terkoneksi. Walaupun tahun 2015 mengalami penurunan lalu lintas, diprediksi tahun mendatang ruas jalan tol Purbaleunyi tetap akan mengalami pertumbuhan lalu lintas yang cukup stabil.



Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015, Volume Lalu Lintas Transaksi Pusat (Ruas JORR) tercatat sebesar 203,10 juta kendaraan, naik sebesar 3,23% dibandingkan dengan Volume Lalu Lintas Transaksi tahun 2014 sebesar 196,76 juta kendaraan. Tahun 2015, kontribusi Pusat (JORR) terhadap total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 14,72%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 1.163,71 miliar, turun sebesar 1,58% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 1.182,45 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari Pusat (JORR) mencapai 16,34% terhadap Total Pendapatan Tol.

Profitabilitas

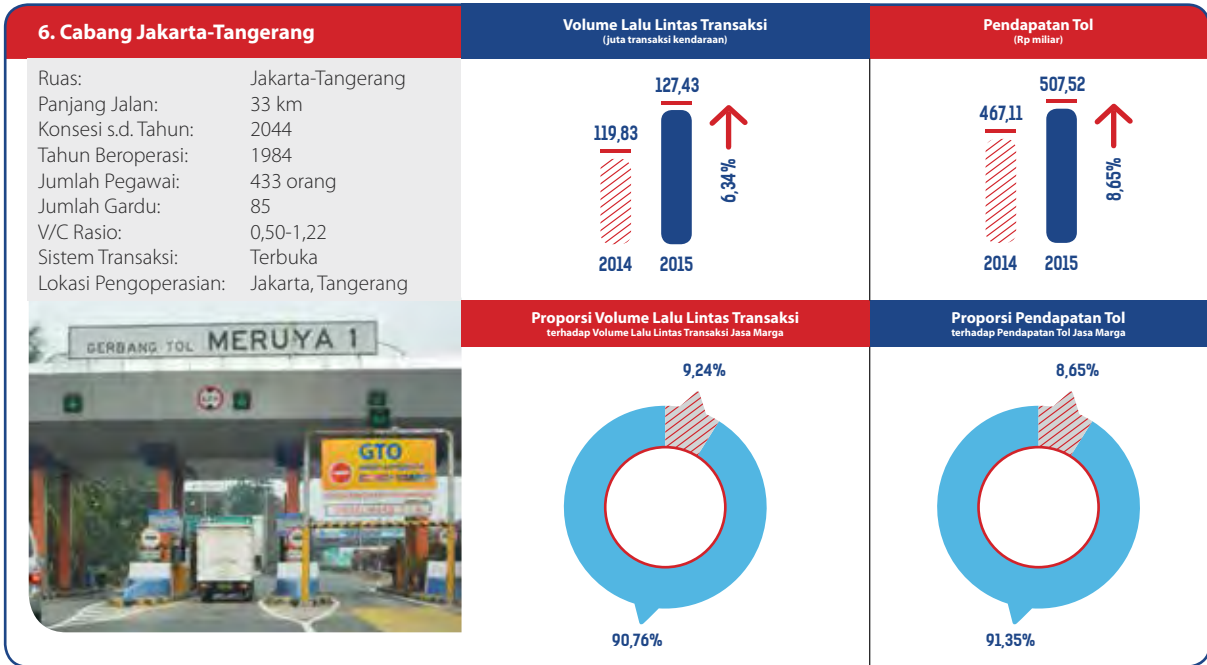
Tahun 2015, rugi setelah pajak Pusat-Jakarta Outer Ring Road (JORR) mencapai sebesar Rp 968,19 miliar, sedangkan rugi tahun 2014 sebesar Rp 804,84 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2015

Peningkatan volume lalu lintas transaksi disebabkan oleh telah terintegrasinya JORR secara penuh (W2U, W2S, S, E1, E2, E3) pada bulan Juli 2014.

Prospek Usaha

Beroperasinya Jalan Tol Ulujami – Kebun Jeruk (JORR W2 Utara) menyebabkan perpindahan pergerakan lalu lintas. Kendaraan besar dari Pulau Jawa yang biasanya menuju Pelabuhan Merak dengan melewati Jalan Tol Dalam Kota, beralih menggunakan Jalan Tol JORR. Ke depan, Jalan Tol JORR diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan volume lalu lintas karena menghubungkan beberapa wilayah seperti Bandara Soekarno - Hatta dan Pelabuhan Merak.



Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015, Volume Lalu Lintas Transaksi Cabang Jakarta-Tangerang tercatat sebesar 127,43 juta kendaraan, naik sebesar 6,34% dibandingkan dengan Volume Lalu Lintas Transaksi tahun 2014 sebesar 119,83 juta kendaraan. Tahun 2015, kontribusi Cabang Jakarta-Tangerang terhadap Total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 9,24%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 507,52 miliar, naik sebesar 8,65% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 467,11 miliar.

Profitabilitas

Tahun 2015, Laba setelah pajak Cabang Jakarta-Tangerang mencapai sebesar Rp 277,84 miliar, meningkat 24,62% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 222,95 miliar.

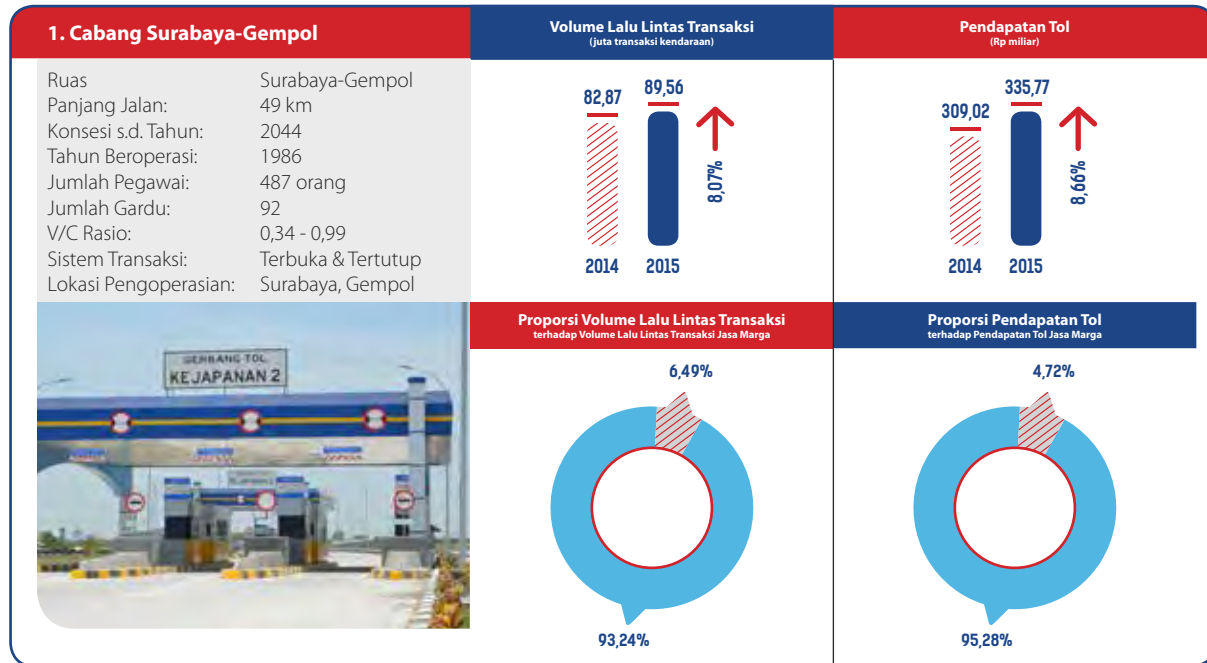
Analisa Kinerja Tahun 2015

Pendapatan Tol Cabang Jakarta-Tangerang tumbuh 8,65% dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas transaksi sebesar 6,34% dan penyesuaian tarif pada November 2015. Pertumbuhan volume lalu lintas transaksi disebabkan oleh pertumbuhan wilayah yang didorong oleh peningkatan pembangunan properti di kawasan Tangerang.

Prospek Usaha

Terintegrasinya Jalan Tol JORR secara penuh akan memberikan dampak kepada pertumbuhan volume lalu lintas transaksi di Jalan Tol Jakarta-Tangerang.

Segmen Lainnya



Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015, Volume Lalu Lintas Transaksi Cabang Surabaya-Gempol tercatat sebesar 89,56 juta kendaraan, naik sebesar 8,07% dibandingkan dengan Volume Lalu Lintas Transaksi tahun 2014 sebesar 82,87 juta kendaraan. Tahun 2015, kontribusi Cabang Surabaya-Gempol terhadap Total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 6,49%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 335,77 miliar, naik sebesar 8,66% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 309,02 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari Cabang Surabaya-Gempol mencapai 4,72% terhadap Total Pendapatan Tol.

Profitabilitas

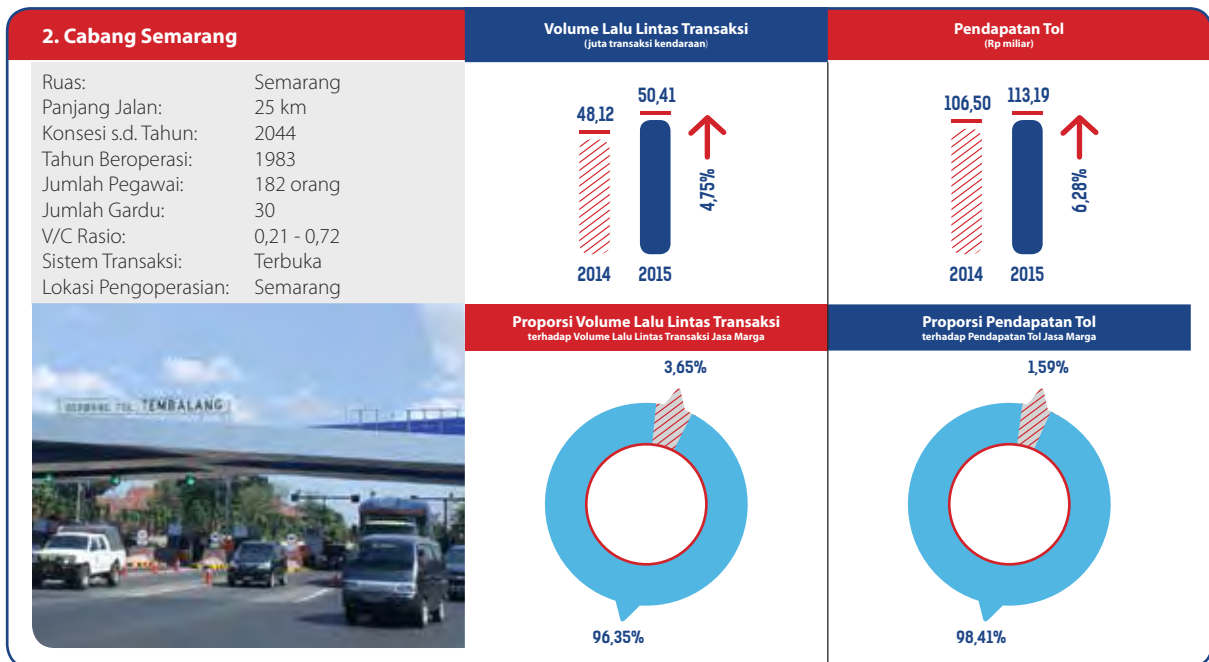
Tahun 2015, Laba setelah pajak Cabang Surabaya-Gempol mencapai sebesar Rp 180,48 miliar dibandingkan tahun 2014 laba sebesar Rp 186,81 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2015

Pendapatan Tol Cabang Surabaya-Gempol tumbuh 8,66% dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas transaksi 8,07% dan penyesuaian tarif pada November 2015. Pertumbuhan volume lalu lintas transaksi disebabkan perkembangan wilayah di sekitar Jalan Tol Surabaya-Gempol, serta beroperasinya relokasi Ruas Porong-Gempol Sistem Tertutup sejak tanggal 17 Mei 2015 dan Jalan Tol Gempol-Pandaan sejak tanggal 12 Juni 2015.

Prospek Usaha

Ke depan, pertumbuhan volume lalu lintas transaksi Jalan Tol Surabaya – Gempol akan terus tumbuh seiring dengan telah terkoneksi jalan tol ini dengan Jalan Tol Gempol – Pandaan yang beroperasi pada tahun 2015. Selain itu, pengoperasian Jalan Tol Gempol - Pasuruan pada tahun 2018 juga akan turut memberikan kontribusi pada pertumbuhan volume lalu lintas Jalan Tol Surabaya-Gempol.



Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015, Volume Lalu Lintas Transaksi Cabang Semarang tercatat sebesar 50,41 juta kendaraan, naik sebesar 4,75% dibandingkan dengan Volume Lalu Lintas Transaksi tahun 2014 sebesar 48,12 juta kendaraan. Tahun 2015, kontribusi Cabang Semarang terhadap Total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 3,65%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 113,19 miliar, naik sebesar 6,28% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 106,50 miliar.

Profitabilitas

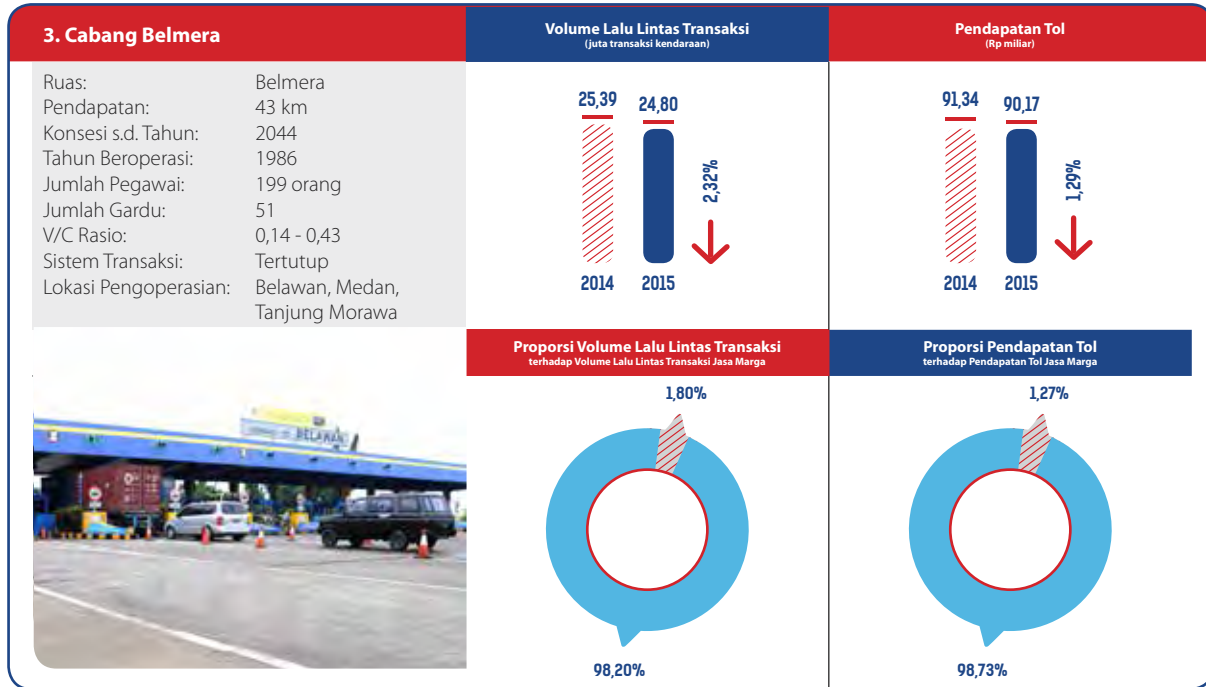
Tahun 2015, Laba setelah pajak Cabang Semarang mencapai sebesar Rp 27,50 miliar dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 28,54 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2015

Pendapatan Tol Cabang Semarang naik 6,28% dari tahun lalu disebabkan oleh naiknya volume lalu lintas transaksi 4,75% dan penyesuaian tarif pada November 2015. Peningkatan volume lalu lintas transaksi disebabkan oleh pengoperasian Jalan Tol Cikopo-Palimanan sejak bulan Juni 2015.

Prospek Usaha

Pengoperasian Jalan Tol Semarang - Solo Ruas Semarang – Bawen pada 4 April 2014 memberi dampak pertumbuhan lalu lintas pada Jalan Tol Semarang. Pertumbuhan volume lalu lintas di wilayah Manyaran, Gayamsari dan Muktiharjo menunjukkan trend yang positif. Kedepannya dipredikasi pertumbuhan volume lalu lintas di Jalan Tol Semarang akan terus tumbuh seiring dengan rencana beroperasinya secara penuh Ruas Semarang – Solo pada tahun 2018.



Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015, Volume Lalu Lintas Transaksi Cabang Belmera tercatat sebesar 24,80 juta kendaraan, turun sebesar -2,32% dibandingkan dengan Volume Lalu Lintas Transaksi tahun 2014 sebesar 25,39 juta kendaraan. Tahun 2015, kontribusi Cabang Belmera terhadap total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 1,80%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 90,17 miliar, turun sebesar 1,29% dibandingkan tahun sebesar Rp 91,35 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari Cabang Belmera mencapai 1,27% terhadap Total Pendapatan Tol.

Profitabilitas

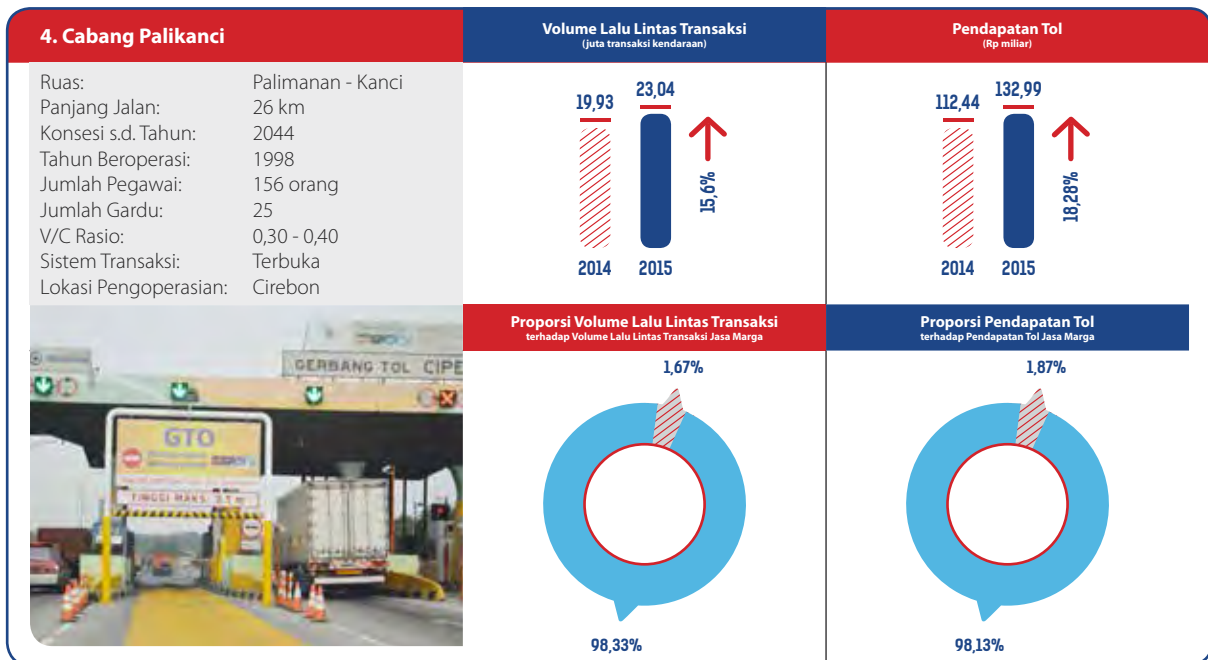
Tahun 2015, rugi setelah pajak Cabang Belmera mencapai sebesar Rp 8,10 miliar dibandingkan tahun 2014 rugi sebesar Rp 7,51 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2015

Pendapatan Tol Cabang Belmera turun sebesar 1,29% dari tahun lalu disebabkan oleh penurunan volume lalu lintas transaksi 2,32% dan penyesuaian tarif di Bulan November 2015. Jalan Tol Belmera merupakan jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Barang Belawan menuju Medan dan Tanjung Morawa dimana kendaraan yang melewati ruas jalan tol ini sebagian besar adalah angkutan barang besar. Penurunan volume lalu lintas transaksi diakibatkan oleh uncontrol factor yaitu berkurangnya kegiatan bongkar muat barang sekitar 30% dan penurunan nilai ekspor sekitar 18% (berdasarkan data BPS) di Pelabuhan Belawan sebagai dampak dari melambatnya aktivitas ekonomi pada pertengahan tahun 2015.

Prospek Usaha

Ke depan, pertumbuhan volume lalu lintas Jalan Tol Belmera akan mengalami pertumbuhan seiring dengan adanya pengembangan Kawasan Industri Medan (KIM) dan terkoneksi jalan tol ini dengan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi yang akan beroperasi pada tahun 2018.



Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015, Volume Lalu Lintas Transaksi Cabang Palikanci tercatat sebesar 23,04 juta kendaraan, naik sebesar 15,60% dibandingkan dengan Volume Lalu Lintas Transaksi tahun 2014 sebesar 19,93 juta kendaraan. Tahun 2015, kontribusi Cabang Palikanci terhadap total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 1,67%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 132,99 miliar, naik sebesar 18,28% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 112,44 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari Cabang Palikanci mencapai 1,87% terhadap Total Pendapatan Tol.

Profitabilitas Tahun 2015

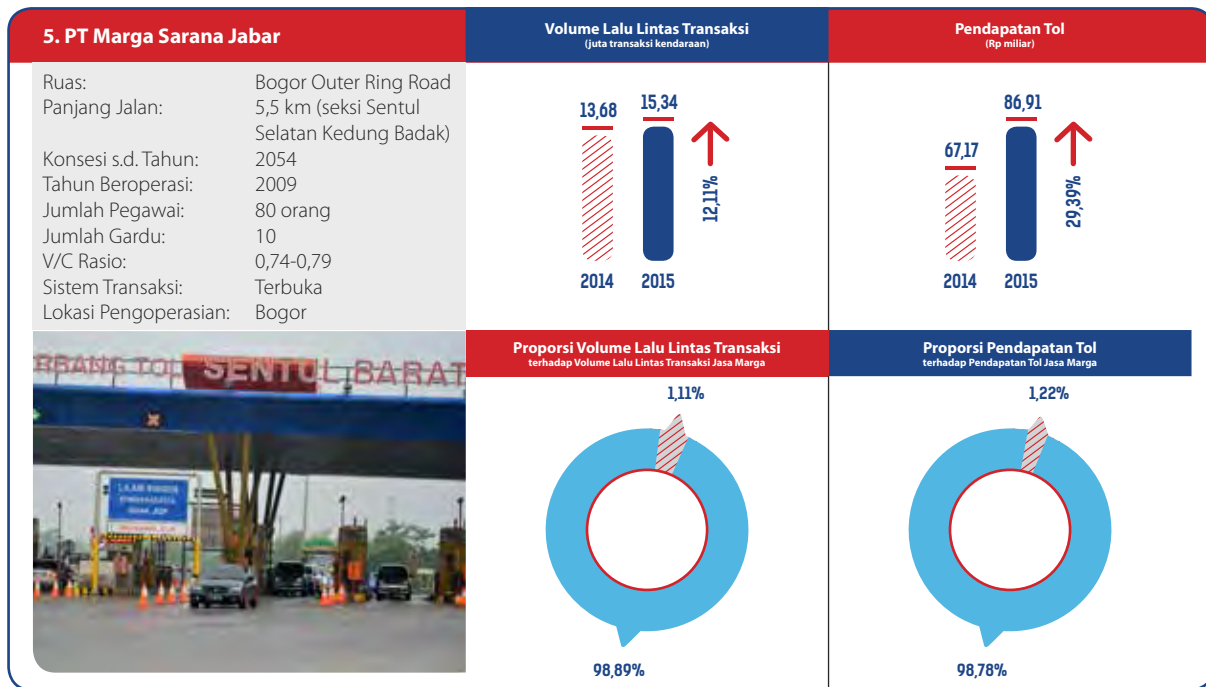
Tahun 2015, Laba setelah pajak Cabang Palikanci mencapai sebesar Rp 17,07 miliar dibandingkan tahun 2014 rugi sebesar Rp 6,31 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2015

Pendapatan Tol Cabang Palikanci tumbuh 18,28% dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas transaksi 15,62% dan penyesuaian tarif pada November 2015. Peningkatan volume lalu lintas transaksi disebabkan oleh pengoperasian Jalan Tol Cikopo-Palimanan sejak bulan Juni 2015 yang menghubungkan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dengan Jalan Tol Palimanan-Kanci dan perkembangan wilayah di sekitar Jalan Tol Palikanci.

Prospek Usaha

Berdasarkan data volume lalu lintas 5 Tahun terakhir, pertumbuhan lalu lintas pada Jalan Tol Palimanan – Kanci adalah 4 – 13 %. Pada tahun 2015, jalan tol ini tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 15,62%. Jalan Tol Palimanan-Kanci merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Pada 15 Juni 2015, jalan tol ini terkoneksi langsung dengan Jalan Tol Cikopo – Palimanan. Kedepan, jalan tol ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan volume lalu lintas yang tinggi, dikarenakan akan segera terkoneksi dengan ruas Trans Jawa Jakarta – Bandung yang rencananya akan dioperasikan pada tahun 2020.



Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015, Volume Lalu Lintas Transaksi ruas BORR tercatat sebesar 15,34 juta kendaraan, naik sebesar 12,11% dibandingkan dengan Volume Lalu Lintas Transaksi tahun 2014 sebesar 13,68 juta kendaraan. Tahun 2015, kontribusi BORR terhadap total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 1,11%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 86,91 miliar, naik sebesar 29,39% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 67,17 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari BORR mencapai 1,22% terhadap Total Pendapatan Tol.

Profitabilitas

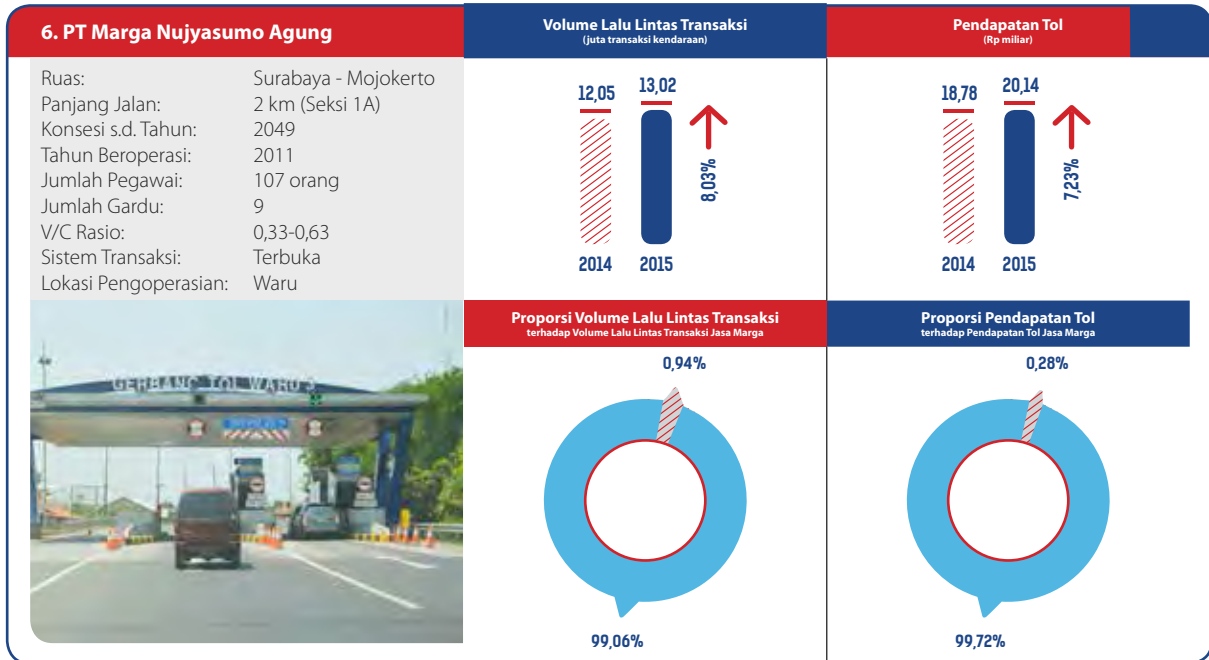
Pada tahun 2015, Rugi Setelah Pajak mencapai Rp 15,5 miliar, dibandingkan tahun 2014 rugi sebesar Rp 22,7 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2015

Pendapatan Tol ruas BORR tumbuh 29,39% dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas transaksi sebesar 12,11%. Pertumbuhan volume lalu lintas transaksi disebabkan oleh berkembangnya wilayah Bogor khususnya Sentul dan warga mulai mengenal jalur akses lewat Jalan Tol BORR.

Prospek Usaha

Jalan Tol BORR sepanjang 11 km ini menghubungkan wilayah Sentul Selatan hingga Dramaga. Saat ini Ruas Jalan Tol BORR baru beroperasi dari Sentul Selatan hingga Kedung Badak (5,7 Km). Kedepannya, volume lalu lintas Jalan Tol BORR diprediksi akan terus meningkat seiring dengan dioperasikannya jalan tol ini secara menyeluruh.



Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015, Volume Lalu Lintas Transaksi Ruas Surabaya-Mojokerto tercatat sebesar 13,02 juta kendaraan, naik sebesar 8,03% dibandingkan dengan Volume Lalu Lintas Transaksi tahun 2014 sebesar 12,05 juta kendaraan. Tahun 2015, kontribusi Ruas Surabaya-Mojokerto terhadap Total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 0,94%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 20,14 miliar, naik sebesar 7,23% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 18,78 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 1A mencapai 0,28% terhadap Total Pendapatan Tol.

Profitabilitas

Pada tahun 2015, Rugi setelah pajak mencapai Rp 36,9 miliar, dibandingkan tahun 2014 rugi sebesar Rp 42,5 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2015

Pendapatan Tol PT Marga Nujuyasumo Agung tumbuh 7,23% dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas transaksi sebesar 8,02%. Pertumbuhan volume lalu lintas transaksi disebabkan oleh peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah sekitar Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi Waru-Juanda.

Prospek Usaha

Jalan Tol Surabaya – Mojokerto merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dengan panjang 36,27 km dimana saat ini baru beroperasi sepanjang 2,30 km. Pada tahun 2015 pertumbuhan volume lalu lintas jalan tol ini adalah 8,02%, cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur pada Tahun 2015 sebesar 5,44% (data Badan Pusat Statistik Jawa Timur). Kedepannya diprediksi pertumbuhan volume lalu lintas pada jalan tol ini akan terus meningkat sejalan dengan terbangunnya Trans Jawa.



Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015, Volume Lalu Lintas Transaksi Ruas Semarang-Bawen tercatat sebesar 18,75 juta kendaraan, naik sebesar 20,48% dibandingkan dengan Volume Lalu Lintas Transaksi tahun 2014 sebesar 15,56 juta kendaraan. Tahun 2015, kontribusi Ruas Semarang-Bawen terhadap total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 1,36%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 129,48 miliar, naik sebesar 20,73% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 107,25 miliar. Kontribusi Pendapatan Tol dari Jalan Tol Semarang-Solo Seksi Semarang-Bawen mencapai 1,82% terhadap total Pendapatan Tol.

Profitabilitas

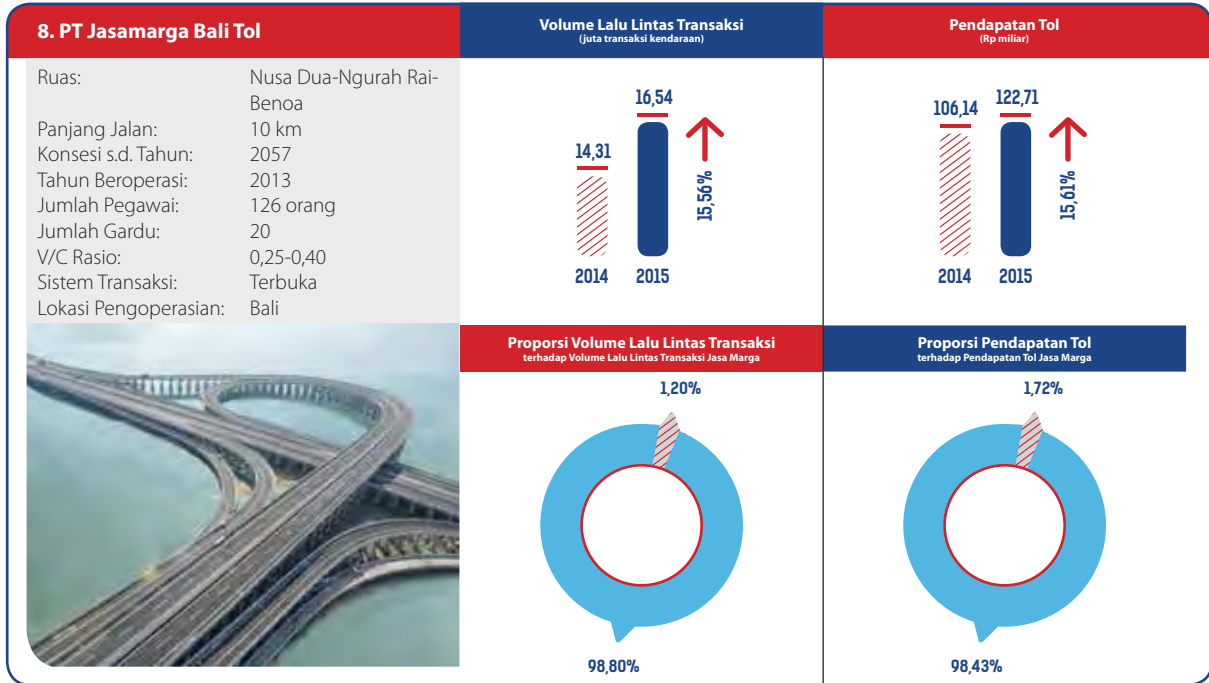
Pada tahun 2015, Rugi setelah pajak mencapai Rp 146,2 miliar, dibandingkan tahun 2014 rugi sebesar Rp 212,2 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2015

Pendapatan Tol PT Trans Marga Jateng tumbuh 20,73% dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas transaksi 20,45%. Peningkatan volume lalu lintas transaksi disebabkan oleh peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah Jalan Tol Semarang-Bawen.

Prospek Usaha

Ruas Jalan Tol Semarang - Solo merupakan bagian dari salah satu ruas Jalan Tol Trans Jawa dengan total panjang 72,64 Km. Hingga saat ini Jalan Tol Semarang – Solo yang baru beroperasi adalah Ruas Semarang-Bawen sepanjang 23,10 km. Pada Tahun 2015, tercatat pertumbuhan volume lalu lintas pada Ruas Semarang-Bawen adalah 20,45%, sangat tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2015 sebesar 5,4% (data BPS Jawa Tengah). Ke depan, pertumbuhan volume lalu lintas pada Jalan Tol Semarang-Solo diprediksi akan terus tumbuh seiring dengan rencana terkoneksi wilayah Semarang dan Solo Pada Tahun 2019.



Kinerja Tahun 2015

Pada tahun 2015, Volume Lalu Lintas Transaksi Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa tercatat sebesar 16,54 juta kendaraan dengan kontribusi terhadap total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 1,20%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 122,71 miliar yang merefleksikan kontribusi Pendapatan Tol sebesar 1,72% terhadap Total Pendapatan Tol.

Profitabilitas

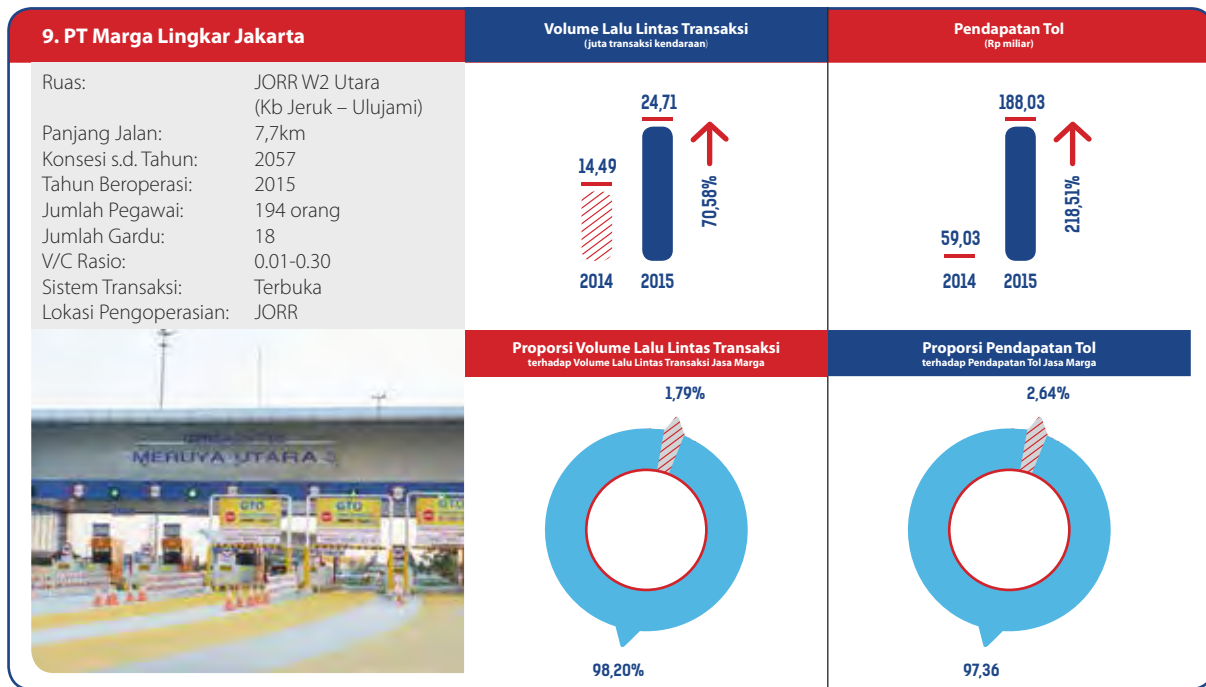
Pada tahun 2015, Rugi setelah pajak mencapai Rp 72,2 miliar, dibandingkan tahun 2014 rugi sebesar Rp 101,0 miliar.

Analisa Kinerja Tahun 2015

Pendapatan Tol PT Jasamarga Bali Tol tumbuh 15,61% dari tahun lalu disebabkan oleh pertumbuhan volume lalu lintas transaksi sebesar 15,58% dibandingkan tahun 2014.

Prospek Usaha

Pada Tahun 2015, Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Tanjung Benoa menunjukkan pertumbuhan lalu lintas sebesar 15,58%. Pertumbuhan ini sangat baik, mengingat pada Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali adalah 6,04% (data Badan Pusat Statistik Bali). Ke depan, pertumbuhan volume lalu lintas di jalan tol ini diprediksi akan terus tumbuh mengingat potensi wisata yang ada di Provinsi Bali.



Kinerja tahun 2015

Pada tahun 2015, Volume Lalu Lintas Transaksi PT Marga Lingkar Jakarta tercatat sebesar 24,71 juta kendaraan, kontribusi ruas PT Marga Lingkar Jakarta terhadap total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 1,79%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 188,03 miliar yang merefleksikan kontribusi Pendapatan Tol sebesar 2,64% terhadap Total Pendapatan Tol.

Profitabilitas

Pada tahun 2015, Rugi setelah pajak mencapai Rp 81,1 miliar, dibandingkan tahun 2014 rugi sebesar Rp 111,7 miliar.

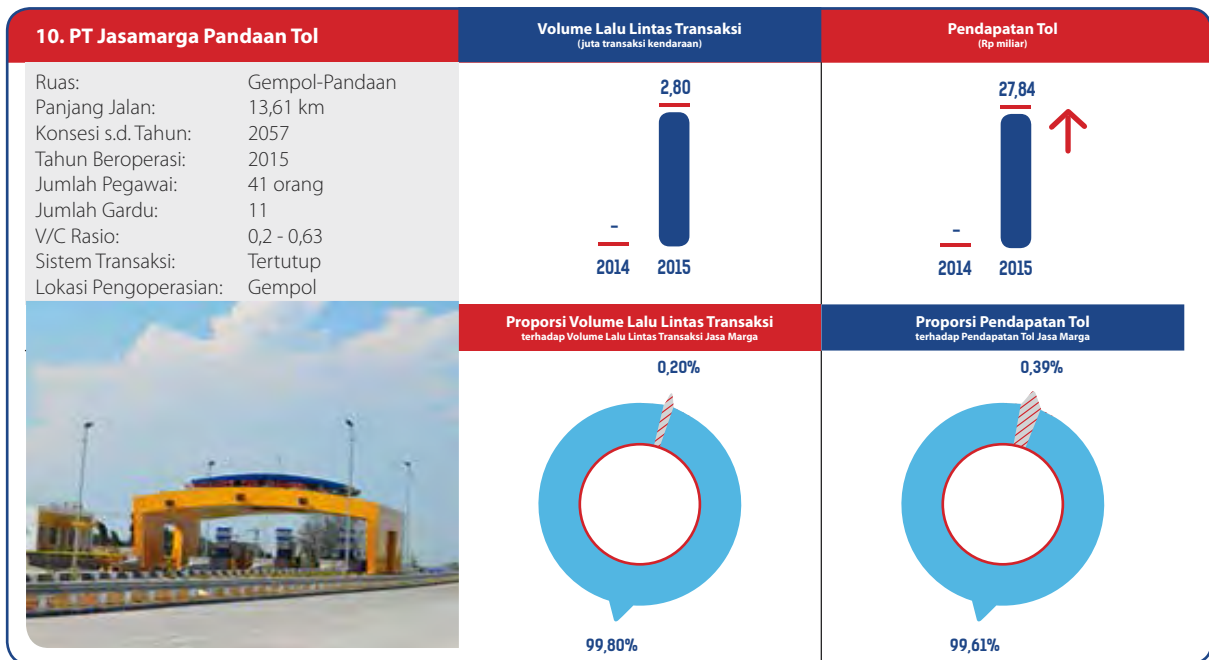
Analisa Kinerja Tahun 2015

Pendapatan tol PT Marga Lingkar Jakarta mencapai Rp188,03 miliar. Volume lalu lintas transaksi mencapai 24,71 juta kendaraan, tumbuh 70,57% dibandingkan tahun 2014.

Prospek Usaha

Jalan Tol Ulujami – Kebun Jeruk merupakan bagian dari Jalan Tol Jakarta Out of Ring Road (JORR). Sejak di operasikan pada Juli 2014, terjadi pertumbuhan lalu lintas yang sangat signifikan di ruas jalan tol ini. Pada tahun 2015 tercatat pertumbuhan sebesar 70,57%. Pengguna Jalan di sekitar wilayah Kampung Rambutan, Lenteng Agung, Ampera dan Ciputat yang biasa melewati Jalan Tol Jagorawi menuju Jalan Tol Dalam Kota lebih memilih menggunakan Jalan Tol JORR, sehingga terjadi peralihan pergerakan lalu lintas. Begitu pula dengan kendaraan-kendaraan besar yang biasanya melewati Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Merak, berpindah melewati Ruas JORR.

Kedepan, pertumbuhan volume lalu lintas Jalan Tol JORR W2 Utara akan terus tumbuh mengingat terkoneksinya Jalan tol ini dengan beberapa wilayah penting seperti Bandara Soekarno - Hatta dan Pelabuhan Merak.



Kinerja tahun 2015

Pada tahun 2015, Volume Lalu Lintas Transaksi PT Jasamarga Pandaan Tol tercatat sebesar 2,80 juta kendaraan, dengan kontribusi terhadap total Volume Lalu Lintas Transaksi mencapai 0,20%. Sementara itu, Pendapatan Tol mencapai Rp 27,84 miliar yang merefleksikan kontribusi Pendapatan Tol sebesar 0,39% terhadap Total Pendapatan Tol.

Profitabilitas

Pada tahun 2015, Rugi setelah pajak mencapai Rp 52,4 miliar, dibandingkan tahun 2014 rugi sebesar Rp 639,1 juta.

Analisa Kinerja Tahun 2015

Volume lalu lintas transaksi mencapai 2,80 juta kendaraan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan tol sebesar Rp 27,84. miliar.

Prospek Usaha

Sejak dioperasikan pada tanggal 12 Juni 2015, Jalan Tol Gempol – Pandaan mencatat jumlah lalu lintas harian transaksi di gerbang tol rata-rata sebesar 7.523 Kendaraan/hari. Kedepan, Pertumbuhan Lalu lintas di Ruas ini diprediksi akan meningkat pesat mengingat Ruas Jalan Tol ini merupakan akses dari Surabaya menuju Malang. Ditargetkan pada tahun 2018, konektivitas Ruas Jalan Tol Porong – Gempol dan Pandaan – Malang terhubung seluruhnya.

Segmen Usaha Pengembangan Usaha Lain

Segmen Usaha Lain merupakan segmen usaha yang berasal dari pemanfaatan aset perseroan baik *tangible* maupun *intangible* serta usaha yang berasal dari entitas anak perusahaan usaha lain.

Segmen usaha pengembangan usaha lain perseroan terdiri dari:

a. Pendapatan BBM SPBU

Pendapatan BBM SPBU merupakan pendapatan yang dihasilkan dari penerimaan BBM SPBU pada Unit Bisnis Rest Area untuk pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) KM 88 Jalur A dan B Jalan Tol Purbaleunyi serta TIP KM 226 Jalur A Jalan Tol Palikanci. Kontribusi Penjualan BBM sebesar 40,13% dari Total Pendapatan Usaha Lain.

b. Sewa Lahan

Sewa Lahan diperoleh dari penyewaan lahan untuk pemasangan iklan, pemasangan utilitas, sewa gedung dan pendapatan bagi hasil TIP milik mitra.

c. Jasa Pengoperasian Jalan Tol Pihak Lain

Jasa Pengoperasian Jalan Tol Pihak Lain diperoleh dari pendapatan Perseroan atau anak perusahaan atas pengoperasian jalan tol pihak lain. Kontrak jasa pengoperasian jalan tol yang dimiliki Perseroan antara lain pengoperasian Jembatan Jalan Tol Suramadu, Jalan Tol Ulujami-Pondok Aren dan Gerbang Tol Kapuk.

d. Pendapatan iklan

Pendapatan iklan diperoleh dari pendapatan iklan berupa iklan non permanen.

e. Lainnya

Pendapatan lainnya diperoleh dari pendapatan usaha lainnya tol yang tidak termasuk dalam segmen diatas termasuk pendapatan penjualan properti dan pendapatan jasa Layanan Pemeliharaan.

Berikut adalah Kinerja Segmen Usaha Pengembangan Usaha Lain tahun 2014 dan tahun 2015.

KINERJA SEGMENT USAHA PENGEMBANGAN USAHA LAIN

(Rp Miliar)

No.	Segmen	2014	2015	Δ (Rp)	Δ %	% Terhadap Total Pendapatan Usaha Lain
1.	Pendapatan BBM SPBU	178,71	204,56	25,85	14,47	40,13
2.	Sewa Lahan	104,36	123,54	19,18	18,38	24,24
3.	Jasa Pengoperasian Jalan Tol Pihak Lain	100,60	13,66	-86,94	-86,42	2,68
4.	Pendapatan Iklan	6,31	6,06	-0,25	-4,00	1,19
5.	Lainnya	193,12	161,83	-29,58	-15,45	31,75
	Total	581,39	509,65	-71,74	-12,34	100

Hasil segmen usaha Pengembangan Usaha Lain pada Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2015 disajikan sebagai Pendapatan Usaha Lain, dimana pada tahun tersebut Pendapatan Usaha Lain mencapai Rp 509,65 Miliar atau mengalami penurunan sebesar 12,34% dari pencapaian di tahun 2014. Komponen terbesar dari Pendapatan Usaha Lain pada tahun 2015 sebesar Rp 204,56 Miliar berasal dari Unit Bisnis Rest Area melalui kegiatan Pengelolaan SPBU Rest Area. Penurunan kinerja Segmen Usaha Pengembangan Usaha Lain pada tahun 2015 dikarenakan penurunan pendapatan PT Jasa Layanan Pemeliharaan dikarenakan PT Jasa Layanan Pemeliharaan sedang melakukan pembenahan manajemen serta restrukturisasi hutang. Ke depan, PT Jasa Layanan Pemeliharaan akan difokuskan untuk pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan tol di lingkungan Perseroan.

Analisa Kinerja Keuangan Komprehensif

Analisa kinerja keuangan komprehensif ini dibuat berdasarkan Informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwanto, Sungkoro & Surja ("PSS") firma anggota Ernst & Young Global Limited, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan **opini audit tanpa modifikasi**, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. RPC-260/PSS/2016 tanggal 29 Januari 2016

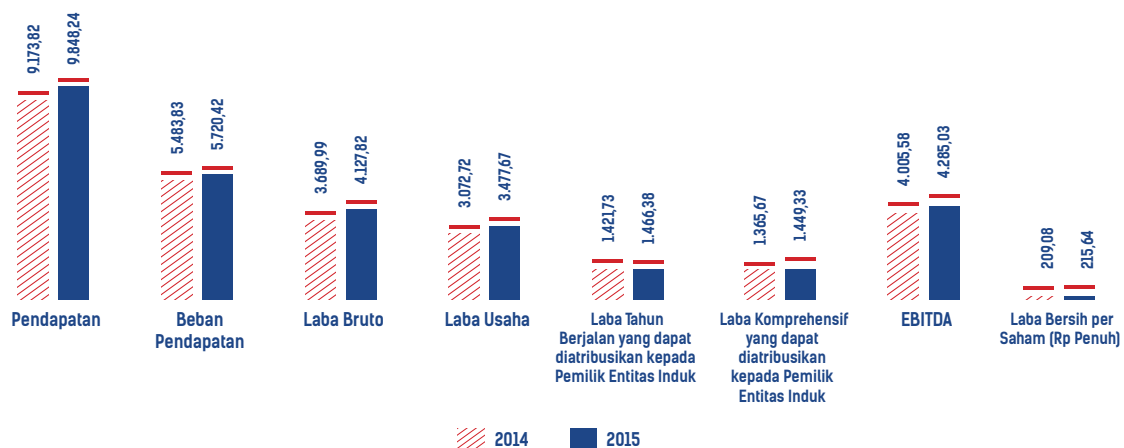
Pemahaman atas uraian tinjauan keuangan ini tetap memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

KINERJA KEUANGAN 2014 DAN 2015

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Pendapatan	9.173,82	9.848,24	674,42	7,35
Beban Pendapatan	5.483,83	5.720,42	236,60	4,31
Laba Bruto	3.689,99	4.127,82	437,83	11,87
Laba Usaha	3.072,72	3.477,67	404,94	13,18
Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.421,73	1.466,38	44,65	3,14
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.365,67	1.449,33	83,66	6,13
EBITDA	4.005,58	4.285,03	279,46	6,98
Laba Bersih per Saham (Rp Penuh)	209,08	215,64	6,56	3,14



Pada tahun 2015, Perseroan mampu mencatat kinerja yang cukup mengesankan. Kinerja yang cukup mengesankan ini diperoleh saat Perseroan sedang giat-giatnya melakukan investasi. Pencapaian Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp1,466 triliun, naik 3,14% atau Rp44,65 miliar dibandingkan tahun 2014. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Tol Perseroan yang terlihat dari naiknya

volume lalu lintas dan kenaikan tarif tol. Beberapa ruas baru yang sudah beroperasi sudah mulai memperlihatkan kontribusinya. Selain itu, perubahan metode amortisasi aset hak pengusahaan jalan tol untuk jalan dan jembatan tol, dari sebelumnya menggunakan metode *straight line* ke metode *unit of usage* dengan volume lalu lintas memperlihatkan pembebanan amortisasi jalan dan jembatan tol lebih aktual, karena disesuaikan dengan volume lalu lintas yang masuk ke ruas-ruas jalan tol Perseroan dan Anak Perusahaan.

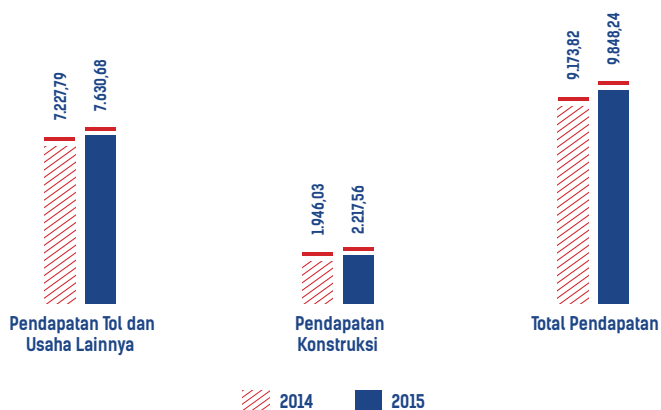
PENDAPATAN

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya	7.227,79	7.630,68	402,89	5,57
Pendapatan Konstruksi	1.946,03	2.217,56	271,53	13,95
Total Pendapatan	9.173,82	9.848,24	674,42	7,35

Standar yang Digunakan:

- PSAK 23: Pendapatan
- PSAK 30: Sewa
- PSAK 34: Kontrak Kontruksi
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.



Pendapatan adalah pendapatan dari aktivitas utama perusahaan sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar perusahaan.

Pendapatan Perseroan terdiri dari Pendapatan Tol dan Usaha Lain, serta Pendapatan Konstruksi. Selama tahun 2015, Pendapatan Perseroan mencapai Rp9,848 triliun atau naik 7,35% dari Pendapatan tahun 2014 sebesar Rp9,173 triliun. Dari segi

Pendapatan Tol dan Usaha Lain, terjadi peningkatan sebesar 5,57% dari Rp7,227 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp7,630 triliun pada tahun 2015. Untuk dapat melakukan analisa secara lebih tepat, diharapkan untuk dapat menggunakan Pendapatan diluar Pendapatan Konstruksi. Hal ini mengingat, Pendapatan Konstruksi akan net off dengan Beban Konstruksi, dan margin konstruksi yang didapatkan akan tidak signifikan.

PENDAPATAN TOL DAN USAHA LAINNYA

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Pendapatan Tol	6.646,39	7.121,02	474,63	7,14
Pendapatan Usaha Lainnya	581,39	509,65	-71,74	-12,34
Total	7.227,79	7.630,68	402,89	5,57

PENDAPATAN TOL

Pendapatan dari hasil pengoperasian jalan tol Kelompok Usaha diakui pada saat penjualan karcis tol. Pendapatan tol dari hasil kerjasama pengoperasian jalan tol dengan investor dengan kuasa penyelenggaraan diakui pada saat penjualan karcis tol setelah dikurangi bagian investor tersebut.

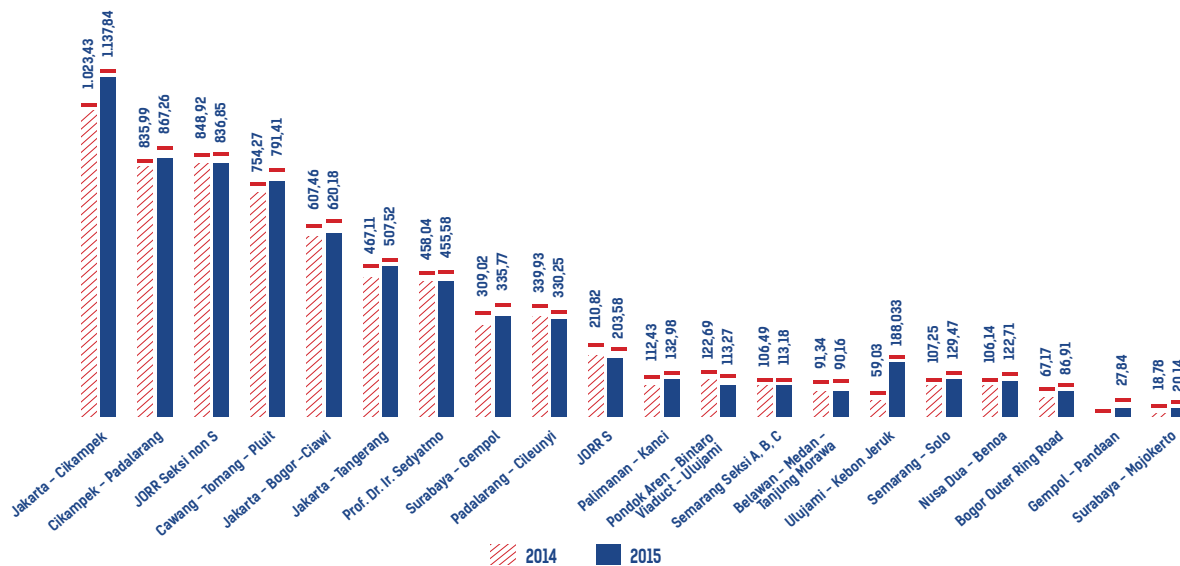
Pada tahun 2015 Pendapatan tol mencapai Rp7,121 triliun atau meningkat 7,14% dari tahun 2014 yang mencapai Rp6,646 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya volume lalu lintas transaksi dan adanya penyesuaian tarif yang terjadi pada tahun 2015. Selain itu, beberapa Anak Perusahaan telah

mulai berkontribusi terhadap pencapaian volume lalu lintas Perseroan, seperti Jalan Tol Bogor Ring Road seksi Sentul-Kedung Halang dan Kedung Halang-Kedung Badak, Jalan Tol Surabaya-Mojokerto seksi Waru-Sepanjang, Jalan Tol Semarang-Solo Seksi Semarang-Ungaran dan Ungaran-Bawen, Jalan Tol Bali- Mandara, Jalan Tol JORR W2 Utara seksi Kebon Jeruk-Cileduk dan Cileduk-Uluji, serta yang terbaru diresmikan beroperasi pada 12 Juni 2015, Jalan Tol Gempol-Pandaan.

Komposisi Pendapatan Tol tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sebagai berikut:

(Rp miliar)

Uraian	2014		2015		Δ	%
	Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)		
Kantor Cabang						
Jakarta - Cikampek	1.023,43	15,40	1.137,84	15,98	114,41	11,18
Cikampek - Padalarang	835,99	12,58	867,26	12,18	31,26	3,74
JORR Seksi non S	848,92	12,77	836,85	11,75	12,07	-1,42
Cawang - Tomang - Pluit	754,27	11,35	791,41	11,11	37,13	4,92
Jakarta - Bogor - Ciawi	607,46	9,14	620,18	8,71	12,72	2,10
Jakarta - Tangerang	467,11	7,03	507,52	7,13	40,40	8,65
Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	458,04	6,89	455,58	6,40	-2,46	-0,54
Surabaya - Gempol	309,02	4,65	335,77	4,72	26,74	8,66
Padalarang - Cileunyi	339,93	5,11	330,25	4,64	-9,67	-2,85
JORR S	210,82	3,17	213,58	3,00	2,76	1,31
Palimanan - Kanci	112,43	1,69	132,98	1,87	20,55	18,28
Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Uluji	122,69	1,85	113,27	1,59	-9,42	-7,68
Semarang Seksi A,B,C	106,49	1,60	113,18	1,59	6,69	6,28
Belawan - Medan - Tanjung Morawa	91,34	1,37	90,16	1,27	-1,17	-1,29
Total	6.288,00	94,61	6.545,90	91,92	257,89	4,10
Entitas Anak						
Uluji-Kebon jeruk	59,03	0,89	188,03	2,64	128,99	218,51
Semarang - Solo	107,25	1,61	129,47	1,82	22,22	20,73
Nusa Dua - Bena	106,14	1,60	122,71	1,72	16,56	15,61
Bogor Outer Ring Road	67,17	1,01	86,91	1,22	19,74	29,39
Gempol - Pandaan	-	-	27,84	0,39	27,84	n.a
Surabaya - Mojokerto	18,78	0,28	20,14	0,28	1,35	7,23
Total	358,38	5,39	575,12	8,08	216,73	60,48
Total	6.646,39	100,00	7.121,02	100,00	474,63	7,14



Dari tabel dan grafik diatas, terlihat pertumbuhan hampir disemua ruas tol Perseroan. Kontribusi terbesar pendapatan tol berasal dari ruas jalan tol Jakarta-Cikampek yang mencapai Rp1,137 triliun atau 15,98% dari total Pendapatan Tol secara keseluruhan, sedangkan ruas-ruas yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya masih penyumbang terbesar pendapatan yang diperoleh Perusahaan. Tahun 2015 total pendapatan tol yang berasal dari ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta (Cawang-Tomang-Pluit) mencapai Rp791 miliar dengan kontribusi sebesar 11,11% dari total keseluruhan pendapatan tol.

PENDAPATAN USAHA LAINNYA

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Pendapatan BBM SPBU	178,71	204,56	25,85	14,47
Sewa Lahan	104,36	123,54	19,18	18,38
Jasa Pengoperasian Jalan Tol Pihak Lain	100,60	13,56	-86,94	-86,42
Pendapatan Iklan	6,31	6,06	-0,25	-4,00
Lainnya	191,41	161,83	-29,58	-15,45
Total Pendapatan Usaha Lainnya	581,39	509,65	-71,74	-12,34



Pendapatan usaha lain merupakan pendapatan selain dari pendapatan tol dan pendapatan konstruksi. Contoh pendapatan usaha lainnya adalah pendapatan sewa iklan, lahan, alat berat, pendapatan BBM SPBU, dan tempat peristirahatan serta pendapatan jasa pengoperasian. Pendapatan sewa iklan, lahan dan tempat peristirahatan serta pendapatan jasa pengoperasian diakui sebagai pendapatan sesuai masa sewa.

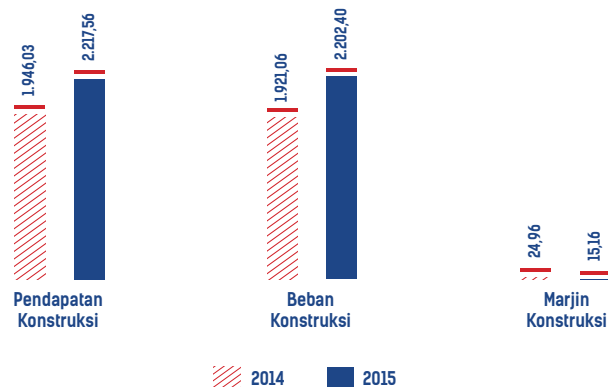
Pada 2015, Pendapatan Usaha Lainnya mencapai Rp509,65 miliar, turun sebesar 12,34% dibandingkan tahun 2014. Penurunan ini

terutama disebabkan dari Jasa Pengoperasian Jalan Tol Pihak Lain yang turun 86,42%. Hal ini terjadi karena penyediaan karyawan operasional yang sebelumnya oleh PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ), dialihkan ke PT Jasa Layanan Operasi (JLO). Selain itu, Entitas Anak selain Jalan Tol sedang dalam proses restrukturisasi, sehingga belum memperlihatkan kinerja yang maksimal, dimana PT Jasa Layanan Pemeliharaan (JLP) mengalami penurunan Pendapatan. Sementara itu, PT Jasa Marga Properti (JMP) telah mulai menyumbang Pendapatan dan diharapkan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan bisnis propertinya.

PENDAPATAN KONSTRUKSI

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Pendapatan Konstruksi	1.946,03	2.217,56	271,53	13,95
Beban Konstruksi	1.921,06	2.202,40	281,33	14,64
Marjin Konstruksi	24,96	15,16	-9,80	-39,26



Pendapatan konstruksi merupakan pendapatan jasa pembangunan jalan tol baru dan peningkatan kapasitas jalan tol. Pada fase konstruksi, Perseroan mencatat aset takberwujud sesuai dengan tahap penyelesaiannya dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan basis kontrak biaya-plus. Beban konstruksi diakui sejak kegiatan konstruksi dimulai sampai dengan proses pembangunan aset selesai dan siap untuk digunakan.

Tahun 2015, Pendapatan Konstruksi naik 13,95% menjadi Rp2,217 triliun. Hal yang sama juga terjadi dengan Beban Konstruksi.

Kenaikan Pendapatan dan Beban Konstruksi disebabkan karena telah beroperasinya jalan tol baru Perseroan pada tahun 2014, seperti Jalan Tol JORR W2 Utara (7,7km), Jalan Tol Semarang-Solo Seksi II Ungaran-Bawen, Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi IIA Ruas Kedung Halang-Kedung Badak. Pada Juni 2015 ini, Jalan Tol Gempol-Pandaan juga telah beroperasi. Selain itu, Perseroan melalui beberapa Entitas Anak juga telah mulai melakukan konstruksi atas jalan tol baru, seperti Jalan Tol Solo-Ngawi, Jalan Tol Ngawi-Kertosono, Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi IIB Kedung Badak-Yasmin, Jalan Tol Semarang Solo Seksi III Bawen-Salatiga, Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I Gempol-Rembang.

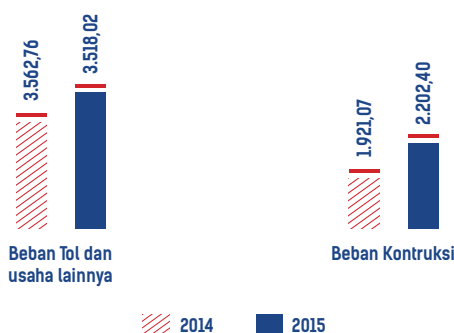
BEBAN PENDAPATAN

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Beban tol dan usaha lainnya	3.562,76	3.518,02	-44,74	-1,26
Beban konstruksi	1.921,07	2.202,40	281,33	14,64
Total Beban Pendapatan	5.483,83	5.720,42	236,60	4,31

Standar yang Digunakan:

- PSAK 16: Aset Tetap
- PSAK 19: Aset Takberwujud
- PSAK 24: Imbalan Kerja
- PSAK 34: Kontrak Konstruksi
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.



Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut distribusi kepada pemegang saham. Beban pendapatan adalah beban yang timbul dari aktivitas utama perusahaan sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar perusahaan. Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya.

Beban Pendapatan Perseroan terdiri dari Beban Tol dan Usaha Lainnya serta Beban Konstruksi. Beban tol merupakan beban yang timbul dari kegiatan di gerbang tol, pelayanan jalan tol serta pemeliharaan jalan tol. Contoh beban tol adalah beban patroli jalan tol, penyuluhan jalan tol, pelapisan ulang jalan tol, dan lainnya.

Tahun 2015, Beban Pendapatan Perseroan meningkat 4,31%, dari Rp5,483 triliun di tahun 2014, menjadi Rp5,720 triliun di tahun 2015. Hal ini terjadi terutama karena kenaikan Beban Konstruksi sebesar 14,64% dari sebelumnya Rp1,921 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp2,202 triliun pada tahun 2015. Kenaikan beban konstruksi seperti yang telah dijelaskan pada bagian Pendapatan Konstruksi, merupakan akibat telah mulai beroperasi jalan tol baru dan juga beberapa proyek yang baru saja mulai konstruksi. Sementara itu, beban tol dan usaha lain turun 1,26% dari Rp3,562 triliun tahun 2014 menjadi Rp3,518 triliun pada tahun 2015. Penurunan ini, salah satunya karena beban kerjasama operasi turun 6,01% dari sebelumnya Rp313,04 miliar menjadi Rp294,22 miliar dikarenakan telah selesainya kerjasama operasi antara Perseroan dengan PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) untuk ruas

Cibitung-Cikampek. Perjanjian kerjasama operasi ini telah selesai pada 10 Juli 2015. Selain itu, penurunan ini juga disebabkan turunnya beban amortisasi dan depresiasi sebesar 14,73%.

Beban Amortisasi mengalami penurunan karena mulai 1 Januari 2015, Perseroan memutuskan untuk mengganti metode amortisasi hak perusahaan jalan tol (hpjt) khusus jalan dan jembatan dari metode garis lurus selama masa konsesi menjadi metode *unit of usage* (pola konsumsi jalan tol yang diakibatkan oleh volume lalu lintas) selama masa konsesi. Perubahan metode amortisasi ini diterapkan secara prospektif. Dalam menentukan amortisasi hak perusahaan jalan tol, Perseroan memproyeksikan volume lalu lintas setelah tahun berjalan selama sisa periode perjanjian konsesi. Volume lalu lintas diproyeksikan berdasarkan jumlah kendaraan dan disesuaikan dengan perbandingan terhadap volume lalu lintas aktual. Namun seiring berjalannya waktu, volume lalu lintas aktual dapat berbeda dengan estimasi tersebut, bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tarif tol dan volume lalu lintas.

Perseroan bersama konsultan lalu lintas profesional independen telah melaksanakan studi lalu lintas pada semua ruas jalan tol, dan hal ini secara periodik dilakukan untuk mendapatkan proyeksi volume lalu lintas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2016, Perseroan akan menunjuk suatu konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas dan membuat penyesuaian yang tepat apabila terdapat perbedaan yang material antara proyeksi volume lalu lintas dan volume lalu lintas aktual.

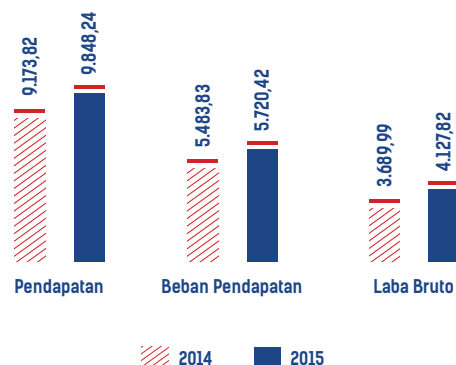
LABA BRUTO

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Pendapatan	9.173,82	9.848,24	674,42	7,35
Beban Pendapatan	5.483,83	5.720,42	236,60	4,31
Laba Bruto	3.689,99	4.127,82	437,83	11,87

Standar yang Digunakan:

- PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.



Laba bruto merupakan selisih dari pendapatan dan beban pendapatan Perseroan. Laba bruto Perseroan di tahun 2015 mencapai Rp4,127 triliun. Pencapaian tersebut lebih tinggi dari tahun 2014 yang mencapai Rp3,689 triliun. Hal ini relevan dengan pencapaian pendapatan dan beban pendapatan Perseroan.

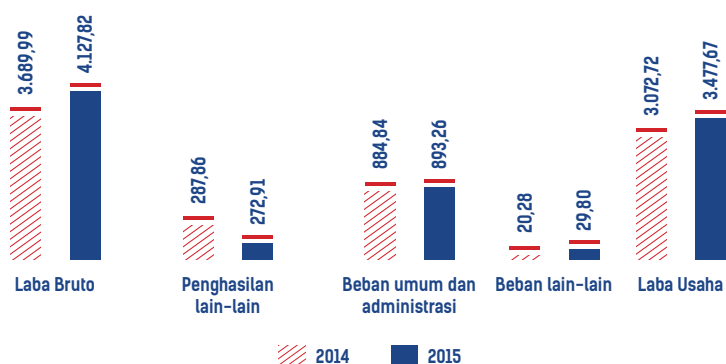
LABA USAHA

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Laba Bruto	3.689,99	4.127,82	437,83	11,87
Penghasilan lain-lain	287,86	272,91	-14,95	-5,19
Beban umum dan administrasi	884,84	893,26	8,42	0,95
Beban lain-lain	20,28	29,80	9,52	46,94
Laba Usaha	3.072,72	3.477,67	404,94	13,18

Standar yang Digunakan:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 14: Persediaan
- PSAK 16: Aset Tetap
- PSAK 24: Imbal Kerja
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.



Laba usaha merupakan hasil dari laba bruto dan penghasilan lain-lain dikurangi dengan beban umum dan administrasi serta beban lain-lain. Untuk tahun 2015, laba usaha Perseroan meningkat 13,18% atau sebesar Rp3,477 triliun.

Penghasilan lain-lain merupakan pendapatan diluar pendapatan usaha. Contohnya penghasilan dari bunga deposito, penghasilan jasa giro, keuntungan penjualan aset tetap, dan lain-lain.

Penghasilan lain-Lain Perseroan pada tahun 2015 mencapai Rp272 miliar atau turun sebesar 5,19% dibandingkan dengan tahun 2014. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penghasilan dari bunga deposito sebesar 36,93% dari tahun 2014 Rp 258 miliar menjadi Rp 163 miliar pada tahun 2015. Perseroan mengalihkan dana deposito untuk digunakan sebagai salah satu sarana pendanaan investasi kepada entitas anak yang memang sedang giat-giatnya melakukan konstruksi.

Beban umum dan administrasi merupakan beban operasional yang tidak terkait langsung dengan bisnis utama Perseroan. Contohnya adalah beban gaji dan tunjangan dari karyawan kantor pusat, pajak, iuran dan retribusi, biaya alat tulis kantor dan lain sebagainya. Pajak, iuran dan retribusi mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena adanya kenaikan dari beban pajak bumi dan bangunan (PBB).

Sementara itu, beban lain Perseroan yang merupakan beban administrasi bank, provisi pinjaman, penghapusan piutang dan lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp9,52 miliar.

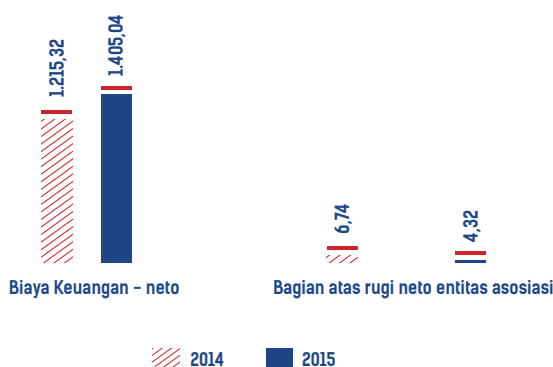
BIAYA KEUANGAN DAN BAGIAN ATAS RUGI NETO ENTITAS ASOSIASI

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Biaya keuangan - neto	1.215,32	1.405,04	189,72	15,61
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi	6,74	4,32	-2,42	-35,95

Standar yang Digunakan:

- PSAK dan ISAK lain yang relevan.
- PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama



Biaya keuangan terdiri dari beban bunga utang bank, utang obligasi dan utang lembaga keuangan bukan bank. Biaya Keuangan Perseroan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 15,61% menjadi Rp1,405 triliun. Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan menambah pembiayaan utang kepada beberapa bank, dan juga kepada lembaga keuangan bukan bank, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur.

Detail bagian atas rugi neto entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

(Rp Miliar)

No	Perusahaan Asosiasi	Kepemilikan (%)	Status	Bagian Laba (Rugi) Bersih	
				2014	2015
1	PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP)	34,83	Pengakhiran PKP	-	-
2	PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN)	30,00	Pengakhiran PKP	-	-
3	PT Ismawa Trimitra (IT)	25,00	Operasi	1,03	0,97
4	PT Bukaka Marga Utama (BMU)	20,00	Belum Operasi	-	-
5	PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)	21,24	Operasi	-7,77	-5,28
				-6,74	-4,31

Bagian atas rugi neto entitas asosiasi merupakan investasi pada suatu entitas di mana Perseroan mempunyai pengaruh signifikan. Investasi pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Pada tahun 2015, bagian atas rugi neto entitas asosiasi mengalami penurunan 35,95% dari Rp6,74 miliar menjadi Rp4,32 miliar.

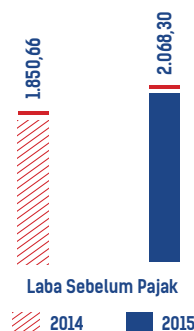
LABA SEBELUM PAJAK

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Laba Sebelum Pajak	1.850,66	2.068,30	217,64	11,76

Standar yang Digunakan:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK dan ISAK lain yang relevan



Pada tahun 2015, laba sebelum pajak perseroan mencapai Rp2,068 triliun, naik sebesar Rp217 miliar atau 11,76% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,850 triliun.

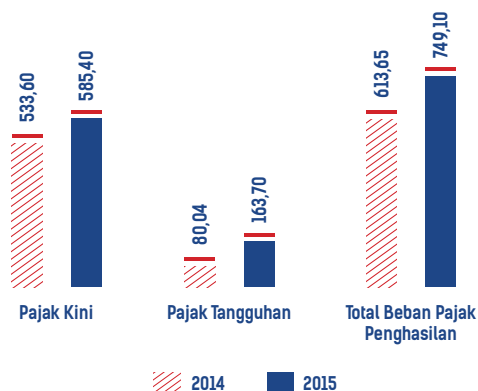
BEBAN PAJAK PENGHASILAN

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Pajak Kini	533,60	585,40	51,80	9,71
Pajak Tangguhan	80,04	163,70	83,66	104,52
Total Beban Pajak Penghasilan	613,65	749,10	135,46	22,07

Standar yang Digunakan:

- PSAK 46: Pajak Penghasilan
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.



Beban pajak penghasilan adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini merupakan Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak. Pajak tangguhan merupakan perhitungan akibat pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Beban pajak penghasilan Perseroan di tahun 2015 secara total naik sebesar 22,07% dari Rp613 miliar di tahun 2014 menjadi Rp749 miliar di tahun 2015. Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini yang naik 9,71% menjadi Rp585 miliar pada tahun 2015 dari sebelumnya Rp533 miliar, dan pajak tangguhan naik 104,52% menjadi Rp163 miliar pada tahun 2015 dari sebelumnya Rp80 miliar. Kenaikan beban pajak penghasilan dipengaruhi oleh kenaikan Laba sebelum Pajak dan juga koreksi atas perhitungan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak.

Untuk tahun 2015, terdapat koreksi pajak oleh Direktorat Jendral Pajak. Tanggal 23 Juni 2015, Perusahaan menerima Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Kantor Pajak sehubungan dengan pajak penghasilan (PPh) Badan tahun pajak 2011. Perusahaan berkewajiban untuk membayar kekurangan pajak penghasilan sebesar Rp56,865 miliar. Selanjutnya, Perusahaan juga berkewajiban untuk membayar kekurangan berbagai jenis pajak untuk tahun pajak 2011 sebesar Rp6,899 miliar. Saldo kurang bayar pajak sebagaimana dijelaskan di atas telah dibayar seluruhnya pada tanggal 15 Juli 2015 dan dibebankan pada laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2015.

Pada tanggal 22 Desember 2015, anak perusahaan Perseroan, PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak dari Kantor Pajak sehubungan dengan pajak penghasilan badan tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp2,005 miliar dan Rp807 juta. Selanjutnya, pada tanggal 13 Januari 2016, JLJ menerima SKPKB berkaitan dengan pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak yang di terima sebelumnya. JLJ berkewajiban untuk membayar kekurangan pajak penghasilan sebesar saldo yang dijelaskan di atas dengan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2016.

Sengketa Perpajakan yang dihadapi Perseroan

Selama tahun 2015 tidak ada sengketa pajak yang dihadapi Perseroan.

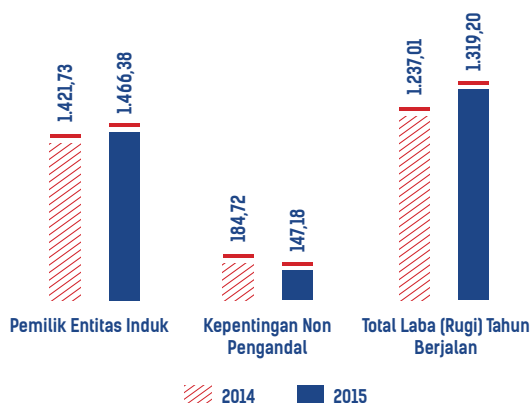
LABA TAHUN BERJALAN

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Pemilik Entitas Induk	1.421,73	1.466,38	44,65	3,14
Kepentingan Non Pengendali	184,72	147,18	-37,53	-20,32
Total Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.237,01	1.319,20	82,19	6,64

Standar yang Digunakan:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.



Labanya tahun berjalan Perseroan mencapai Rp 1,319 triliun, apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014, labanya tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar 6,64%. Labanya tahun berjalan diatribusikan antara lain kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali. Labanya tahun berjalan yang diatribusikan kepada entitas induk mencapai Rp1,466 triliun naik sebesar 3,14% di dibandingkan pencapaian tahun 2014. Sedangkan labanya tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali di 2015 mencapai Rp147,18 miliar.

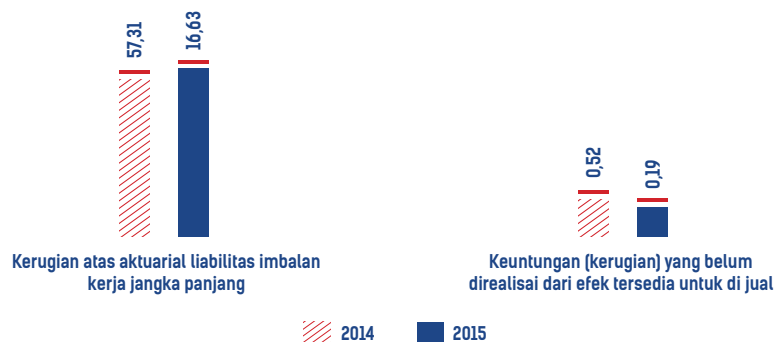
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Kerugian atas aktuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang	57,31	16,63	-40,68	-71,0
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	0,52	0,19	-0,33	-63,5

Standar yang Digunakan:

- PSAK 24: Imbalan Kerja
- PSAK 10: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK dan ISAK lain yang relevan
- PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama



Pada tahun 2015 didalam beban komprehensif lain, selain keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual, terdapat tambahan akun Kerugian atas aktuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Hal ini sesuai dengan PSAK 24 revisi 2013 tentang imbalan kerja.

Kerugian atas aktuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tahun 2014 mencapai Rp57,31 miliar. Hal ini karena pada tahun 2014, pembebanan biaya jasa lalu karyawan aktif masih diamortisasi sepanjang masa kerja karyawan. Namun, dengan PSAK 24 revisi 2013, mensyaratkan beban biaya jasa lalu karyawan aktif tidak dapat lagi diamortisasi sepanjang masa kerja karyawan, tapi harus langsung dibebankan pada tahun berjalan,

maka dengan jumlah karyawan aktif memiliki proporsi yang lebih besar dari jumlah pensiunan, biaya jasa lalu tahun 2014 menjadi besar. Sedangkan pada 2015 sebesar Rp16,63 miliar, sehingga dibandingkan tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 71%.

Program dana pensiun dan program purna karya Perseroan, sudah didanai dan dikelola oleh Lembaga Keuangan, sedangkan untuk kewajiban Pemeliharaan Kesehatan Pensiun masih dikelola oleh Perusahaan. Dengan adanya perubahan PSAK 24 revisi 2013 menyebabkan ketidakpastian atas nilai dari kewajiban imbalan kerja tersebut semakin tinggi, maka dengan menyerahkan sejumlah dana untuk dikelola oleh Lembaga Keuangan akan menekan laju pertumbuhan kewajiban pemeliharaan kesehatan pensiun.

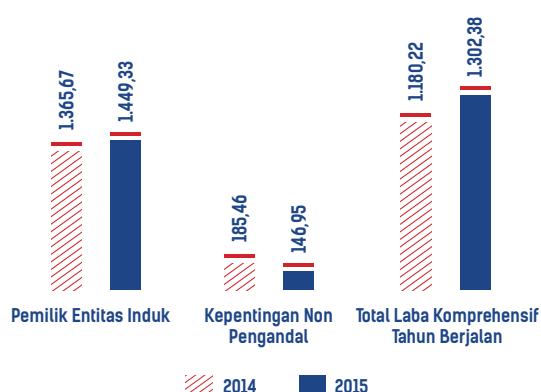
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Pemilik Entitas Induk	1.365,67	1.449,33	83,66	6,13
Kepentingan Non Pengendali	185,46	146,95	-38,51	-20,76
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	1.180,22	1.302,38	122,16	10,35

Standar yang Digunakan:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.



Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan mencapai Rp1,302 triliun, apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014, laba komprehensif tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar 10,35%. Laba komprehensif tahun berjalan diatribusikan antara lain kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali. Laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada entitas induk mencapai Rp1,449 triliun naik sebesar 6,13% di dibandingkan pencapaian tahun 2014. Sedangkan laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non pengendali di 2015 mencapai Rp146,95 miliar.

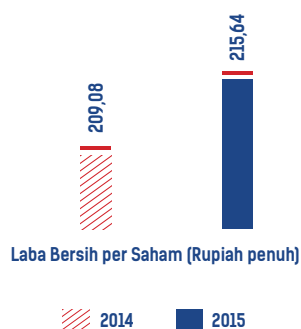
LABA BERSIH PER SAHAM

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Laba Bersih per Saham (Rupiah penuh)	209,08	215,64	6,56	3,14

Standar yang Digunakan:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK dan ISAK lain yang relevan



Laba bersih per saham dihitung dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham.

Tahun yang berakhir pada tanggal	Laba Tahun Berjalan yang Dapat diatribusikan kepada : Pemilik Entitas Induk	Jumlah rata - rata tertimbang saham selama tahun berjalan	Laba per saham
31 Desember 2015	1.466.381.586	6.800.000.000	215,64
31 Desember 2014	1.421.729.172	6.800.000.000	209,08

Tahun 2015 laba bersih per saham (Rupiah penuh) sebesar Rp215,64 naik sebesar 3,14% dari tahun 2014 yang mencapai Rp209,08. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan di tahun 2015 menunjukkan kinerja yang meningkat. Tahun ini, aset Perseroan tercatat sebesar Rp36,72 triliun atau tumbuh 15,27% dibandingkan tahun 2014. Pertumbuhan ini disebabkan karena adanya Hak Pengusahaan Jalan Tol baru, seiring upaya Perseroan untuk terus melakukan pengembangan usaha. Di sisi lain, kondisi tersebut menyebabkan liabilitas Perseroan meningkat sebesar 16,88% dibandingkan tahun sebelumnya karena terdapat penambahan pinjaman untuk mendukung aktivitas konstruksi jalan tol baru. Sedangkan ekuitas Perseroan meningkat 12,23% dari tahun lalu sebagai cerminan bahwa Perseroan tetap berkomitmen menjaga perolehan laba ditengah upaya ekspansi yang dilakukan.

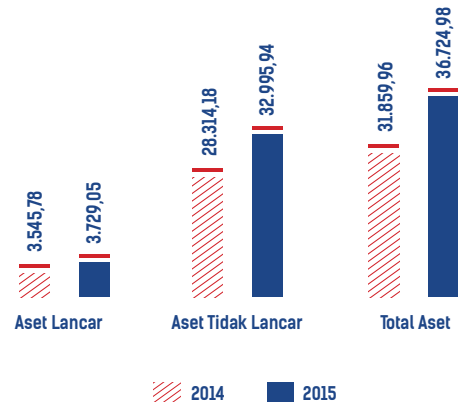
ASET

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Aset Lancar	3.545,78	3.729,05	183,26	5,17
Aset Tidak Lancar	28.314,18	32.995,94	4.681,76	16,54
Total Aset	31.859,96	36.724,98	4.865,02	15,27

Standar yang Digunakan

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 2: Laporan Arus Kas
- PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
- PSAK 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 16: Aset Tetap
- PSAK 19: Aset Tak Berwujud
- ISAK 16: Perjanjian Konsesi Jasa
- PSAK 22: Kombinasi Bisnis
- PSAK 14: Persediaan
- PSAK 30: Sewa
- PSAK 46: Pajak Penghasilan
- PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK dan ISAK lain yang relevan



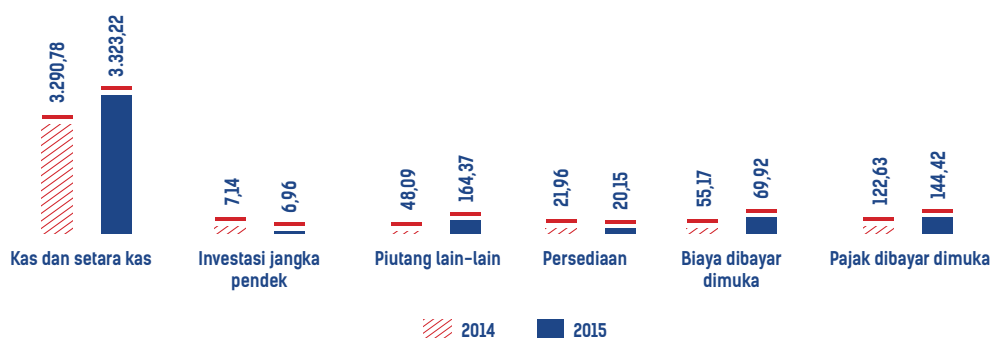
Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diperkirakan akan diperoleh perusahaan.

Total Aset Perseroan adalah Rp36,72 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp4,865 triliun atau 15,27% dibandingkan dengan tahun 2014. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan ruas jalan yang masih dalam konstruksi melalui beberapa entitas anak, seperti Jalan Tol Solo-Ngawi, Jalan Tol Ngawi-Kertosono, Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi IIB Kedung Badak-Yasmin, Jalan Tol Semarang Solo Seksi III Bawen-Salatiga, Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I Gempol-Rembang.

ASET LANCAR

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Kas dan Setara kas	3.290,78	3.323,22	32,44	0,99
Investasi jangka pendek	7,14	6,96	-0,19	-2,64
Piutang lain-lain	48,09	164,37	116,28	241,81
Persediaan	21,96	20,15	-1,81	-8,22
Biaya dibayar dimuka	55,17	69,92	14,75	26,73
Pajak dibayar dimuka	122,63	144,42	21,79	17,76
Total Aset Lancar	3.545,78	3.729,05	183,26	5,17



Aset Lancar adalah aset yang memenuhi klasifikasi, diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan; atau, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan; atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Secara keseluruhan perolehan aset lancar perseroan naik 5,17%, dari sebesar Rp3,545 triliun di tahun 2014 menjadi sebesar Rp3,729 triliun di tahun 2015.

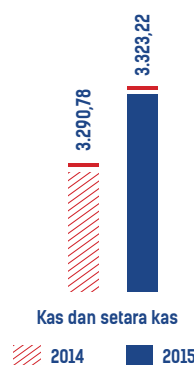
KAS DAN SETARA KAS

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Kas dan Setara kas	3.290,78	3.323,22	32,44	0,99

Kas dan Setara kas pengertiannya adalah, kas merupakan uang tunai rupiah, valas, dan rekening giro. Sedangkan Setara kas meliputi deposito jangka pendek yang jangka waktunya sama dengan atau kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penempatannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan Setara Kas perseroan naik 0,99% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3,290 triliun menjadi Rp 3,323 triliun di tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan karena kas yang ada di bank naik 58,11% dari sebelumnya Rp 295 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp467 miliar pada tahun 2015.



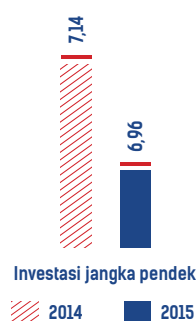
INVESTASI JANGKA PENDEK

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Investasi jangka pendek	7,14	6,96	-0,19	-2,64

Investasi jangka pendek adalah investasi pada deposito dan surat berharga yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

Pada tahun 2015, investasi jangka pendek sebesar Rp6,96 miliar, turun sebesar 2,64% dari tahun 2014 yang mencapai Rp7,14 miliar. Penurunan ini disebabkan pengalihan dana deposito yang kemudian akan digunakan sebagai salah satu sarana pendanaan investasi kepada entitas anak yang sedang melakukan konstruksi dan juga yang baru saja beroperasi.



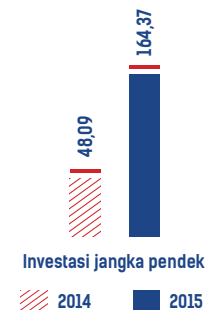
PIUTANG LAIN-LAIN LANCAR

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Piutang lain-lain lancar	48,09	164,37	116,28	241,81

Piutang lain-lain – Lancar merupakan pendapatan yang akan diterima dari sewa lahan, sewa tempat istirahat, sewa ruang iklan dan bunga yang akan diterima dari deposito berjangka yang akan diterima oleh Perusahaan dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun.

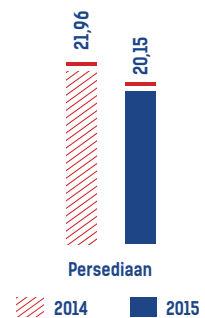
Tahun 2015 Piutang Lain-lain mencapai Rp164 miliar atau meningkat 241,81%. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya Piutang Pegawai dari sebelumnya Rp108 juta menjadi Rp18,66 miliar. Selain itu, kenaikan piutang lain disebabkan Perseroan membiayai terlebih dahulu kenaikan harga tanah (*land capping*) yang menjadi tanggungan Pemerintah c.q Kementerian Pekerjaan Umum, seperti pada PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) sebesar Rp9,78 miliar dalam rangka pengusahaan jalan tol Surabaya-Mojokerto.

**PERSEDIAAN**

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Persediaan	21,96	20,15	-1,81	-8,22

Persediaan merupakan properti yang diperoleh atau dalam penyelesaian untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang tidak untuk disewakan atau untuk mendapatkan kenaikan nilai. Persediaan merupakan akun yang dimiliki oleh entitas anak, PT Jasmarga Properti (JMP), yang berupa tanah pengembangan dan rumah tinggal. Pada tahun 2015, Persediaan turun 8,22% menjadi Rp 20,15 miliar.



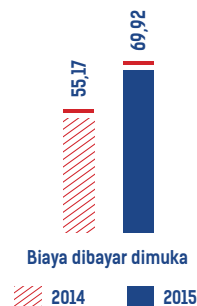
BIAYA DIBAYAR DI MUKA

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Biaya dibayar dimuka	55,17	69,92	14,75	26,73

Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka yang barangnya akan diterima, atau manfaatnya akan digunakan, dalam dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Biaya dibayar di muka naik 26,73% dari sebelumnya sebesar Rp55 miliar di tahun 2014 menjadi Rp69 miliar pada tahun 2015. Hal ini disebabkan naiknya uang muka internal, dimana nantinya digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, pembelian bahan bakar dan spare part, dan lain sebagainya.



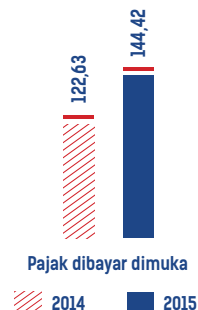
PAJAK DIBAYAR DI MUKA

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Pajak dibayar dimuka	122,63	144,42	21,79	17,76

Pajak dibayar dimuka adalah pembayaran pajak yang akan diperhitungkan dengan kewajiban pajak.

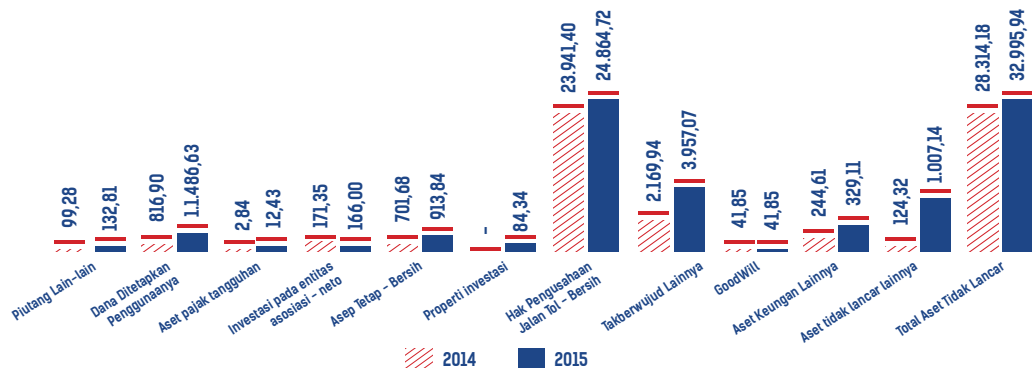
Pajak Dibayar di naik 17,76% dari sebelumnya sebesar Rp122,63 miliar di tahun 2014 menjadi Rp144,42 miliar pada tahun 2015, dimana PPN pada Entitas Anak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 22,99 miliar.



ASET TIDAK LANCAR

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Piutang Lain-lain	99,28	132,81	33,53	33,77
Dana Ditetapkan Penggunaannya	816,90	1.486,63	669,73	81,98
Aset pajak tangguhan	2,84	12,43	9,59	337,74
Investasi pada entitas asosiasi neto	171,35	166,00	-5,34	-3,12
Aset Tetap Bersih	701,68	913,84	212,16	30,24
Properti investasi	-	84,34	84,34	n.a
Hak Pengusahaan Jalan Tol Bersih	23.941,40	24.864,72	923,32	3,86
Tak berwujud Lainnya	2.169,94	3.957,07	1.787,13	82,36
Goodwill	41,85	41,85	-	-
Aset keuangan lainnya	244,61	329,11	84,50	34,55
Aset tidak lancar lainnya	124,32	1.007,14	882,82	710,12
Total Aset Tidak Lancar	28.314,18	32.995,94	4.681,76	16,54



Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar, misalnya aset tetap atau aset takberwujud.

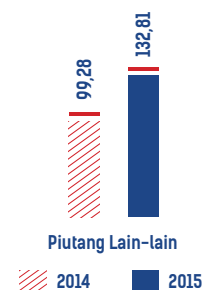
Pada tahun 2015, aset tidak lancar mencapai Rp32,99 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 16,54% dari tahun 2014. Peningkatan ini, terutama disebabkan kenaikan aset takberwujud lain berupa tanah pra konstruksi yang nantinya diperuntukkan untuk pembangunan jalan tol. Selain itu, terdapat kenaikan aset takberwujud hak pengusahaan jalan tol, dimana pada Juni 2015, entitas anak, PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) telah mengoperasikan ruas Gempol-Pandaan sepanjang 13,61 km.

PIUTANG LAIN-LAIN - TIDAK LANCAR

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Piutang Lain-lain Tidak Lancar	99,28	132,81	33,53	33,77

Piutang lain-lain – tidak lancar merupakan piutang yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol jembatan suramadu, sesuai surat Menteri Pekerjaan Umum No. KU.03.01-Mn/339 tanggal 18 Juni 2012, Perseroan mendapatkan kontrak pengoperasian dan pemeliharaan selama 6 tahun, berlaku mulai tahun 2012-2017. Piutang Lain-lain - tidak lancar naik 34% dari sebelumnya sebesar Rp99 miliar di tahun 2014 menjadi Rp133 miliar pada tahun 2015.



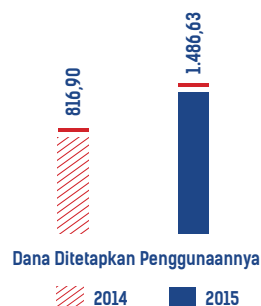
DANA DITETAPKAN PENGGUNAANNYA

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Dana Ditetapkan Penggunaannya	816,90	1.486,63	669,73	81,98

Dana Ditetapkan Penggunaannya adalah penyisihan dana untuk jaminan pelunasan Obligasi dan bunga pinjaman bank.

Pada tahun 2015, Dana Ditetapkan Penggunaannya mencapai Rp1,487 triliun atau naik 81,98% dari tahun lalu. Kenaikan tersebut disebabkan adanya pembentukan rekening khusus atas pendapatan dari pengoperasian JORR Seksi S sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 80.1/KPTS/M/ 2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkarluar Jakarta Seksi Pondok Pinang –Jagorawi (JORR "S").



ASET PAJAK TANGGUHAN

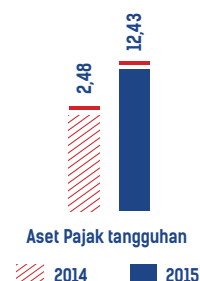
(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Aset pajak tangguhan	2,84	12,43	9,59	337,74

Aset pajak tangguhan adalah pengakuan atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga semua bagian dari aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan.

Istilah aset pajak tangguhan muncul akibat adanya beda tetap dan beda permanen dalam aturan perpajakan. Perkembangan yang terjadi dalam perlakuan laporan keuangan komersial dan fiskal, dan juga, berbagai hal yang timbul akibat perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri, sehingga PSAK 46 tentang pajak penghasilan memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuannya (beda tetap dan beda permanen).

Aset pajak tangguhan Perseroan untuk tahun 2015 mencapai Rp 12,43 miliar, lebih tinggi 337,74% daripada tahun 2014 yang mencapai Rp 2,84 miliar.



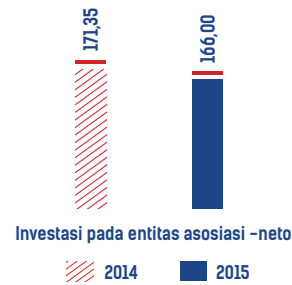
INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Investasi pada entitas asosiasi - neto	171,35	166,00	-5,34	-3,12

Investasi pada entitas asosiasi adalah investasi pada saham entitas lain (investee) dimana investor memiliki pengaruh signifikan atas investee.

Pada tahun 2015, investasi pada Entitas Asosiasi turun 3,12% menjadi Rp 166 miliar dibandingkan tahun 2014. Hal ini terjadi karena turunnya bagian laba (rugi) Entitas Asosiasi bagian Perseroan.

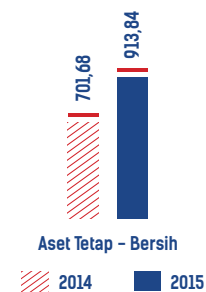
**ASET TETAP**

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Aset Tetap - Bersih	701,68	913,84	212,16	30,24

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain, atau tujuan administratif, serta digunakan lebih dari satu periode. Aset keuangannya lainnya merupakan penyertaan saham yang dikategorikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual yang dicatat sebagai harga perolehan

Pada tahun 2015 Aset Tetap mencapai Rp 913,84 miliar naik 30,24% dari sebelumnya Rp 701,68 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya penambahan aset tetap pemilikan langsung berupa tanah, gedung kantor dan bangunan lain, peralatan operasi dan kantor, serta kendaraan bermotor.



PROPERTI INVESTASI

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Properti investasi	-	84,34	84,34	n.a

Properti investasi Perseroan terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana, dan peralatan yang dikuasai Perseroan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi merupakan akun yang dimiliki oleh entitas anak, PT Jasamarga Properti (JMP). Pada tahun 2014, properti investasi dalam laporan posisi keuangan masuk dalam aset tetap, dan pada tahun 2015, direklasifikasi ke akun properti investasi sebesar Rp 84,34 miliar.



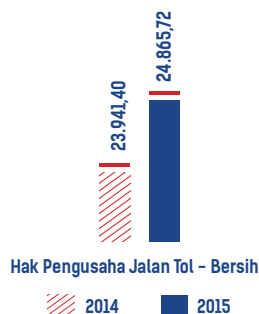
ASET TAKBERWUJUD HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL - BERSIH

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Hak Pengusahaan Jalan Tol - Bersih	23.941,40	24.865,72	923,32	3,86

Hak pengusahaan jalan tol (HPJT) adalah aset takberwujud yang berasal dari konsesi pembangunan jalan tol, yang merupakan kompensasi atas pembangunan jalan tol.

Aset Takberwujud mencapai Rp 24,86 triliun, naik sebesar 3,86% atau naik Rp923,32 miliar dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini salah satunya disebabkan karena adanya pengakuan Hak Pengusahaan Jalan Tol untuk jalan tol yang baru beroperasi yaitu PT Jasamarga Pandaan Tol, pemegang konsesi Jalan Tol Gempol-Pandaan sepanjang 13,61 km. Jalan tol ini baru mulai beroperasi per Juni 2015.



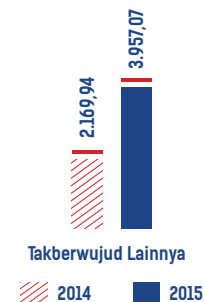
ASET TAKBERWUJUD LAINNYA

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Takberwujud Lainnya	2.169,94	3.957,07	1.787,13	82,36

Aset takberwujud lain adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai bentuk wujud fisik selain Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT). Aset takberwujud lain terdiri dari tanah prakonstruksi dan perangkat lunak.

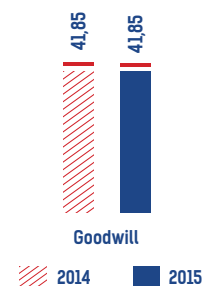
Pada tahun 2015 mencapai Rp 3,95 triliun naik 82,36% dari pencapaian sebelumnya Rp 2,170 triliun. Hal ini terjadi karena adanya penambahan ruas jalan yang masih dalam konstruksi melalui beberapa entitas anak, seperti PT Solo Ngawi Jaya (SNJ), pemegang konsesi Jalan Tol Solo-Ngawi, PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ), pemegang konsesi Jalan Tol Ngawi-Kertosono, PT Marga Sarana Jabar (MSJ), pemegang konsesi Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi IIB Kedung Badak-Yasmin, PT Trans Marga Jateng (TMJ), pemegang konsesi Jalan Tol Semarang Solo Seksi III Bawen-Salatiga, serta PT Trans Jatim Pasuruan (TJP), pemegang konsesi Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I Gempol-Rembang.

**GOODWILL**

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Goodwill	41,85	41,85	-	-

Goodwill merupakan selisih antara nilai wajar aset neto perusahaan yang diakuisisi dari pihak ketiga dengan nilai akuisisi secara keseluruhan. Goodwill ini merupakan nilai tercatat pada PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) sebesar Rp 36,87 miliar, PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC) sebesar Rp 2,21 miliar, dan PT Jasa Layanan Pemeliharaan (JLP) sebesar Rp 2,84 miliar. Pada tahun 2015, total goodwill mencapai Rp 41,85 miliar sama dengan pencapaian tahun lalu.



ASET KEUANGAN LAINNYA

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Aset keuangan lainnya	244,61	329,11	84,50	34,55

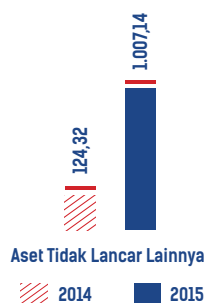


Aset keuangan lain merupakan penyertaan saham ke beberapa entitas yang dikategorikan sebagai aset keuangan tersedia untuk di jual. Pada tahun 2015 mencapai Rp 329,11 miliar, naik Rp 84,50 miliar dari pencapaian sebelumnya Rp 244,61 miliar. Kenaikan ini merupakan hasil dari penyertaan Perseroan dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sebuah konsorsium dalam rangka pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung.

ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Aset tidak lancar lainnya	124,32	1.007,14	882,82	710,12



Aset tidak lancar lainnya terdiri dari uang muka kontraktor dan konsultan, jaminan (garansi bank), aset diambil alih serta Jalan Tol Ruas Surabaya - Gempol Seksi Porong - Gempol.

Uang muka kontraktor merupakan uang muka dalam rangka pembangunan jalan tol, pelapisan ulang, pengadaan peralatan jalan tol dan pengadaan jalan lain yang akan diperhitungkan dengan tagihan atas kemajuan pekerjaan kontraktor dan konsultan. Jaminan (garansi bank) adalah garansi bank yang ditempatkan Perseroan selaku pemegang hak perusahaan jalan tol sebagai jaminan pelaksanaan dan penyelesaian konstruksi jalan tol. Jalan tol Seksi Porong - Gempol merupakan bagian

dari jalan tol Surabaya - Gempol yang mengalami dampak dari musibah genangan lumpur PT Lapindo Brantas sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya jalan tol tersebut.

Pada tahun 2015, aset tidak lancar lainnya mencapai Rp1,01 triliun, naik Rp 882,82 miliar dari pencapaian sebelumnya Rp124,32 miliar. Kenaikan terbesar didapat dari uang muka kontraktor, dimana naik Rp 885,25 miliar dibandingkan tahun 2014, hal ini sesuai dengan telah mulai konstruksinya pembangunan jalan tol oleh entitas anak, seperti PT Solo Ngawi Jaya (SNJ), PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ), PT Marga Sarana Jabar (MSJ), PT Trans Marga Jateng (TMJ) dan PT Trans Jatim Pasuruan (TJP).

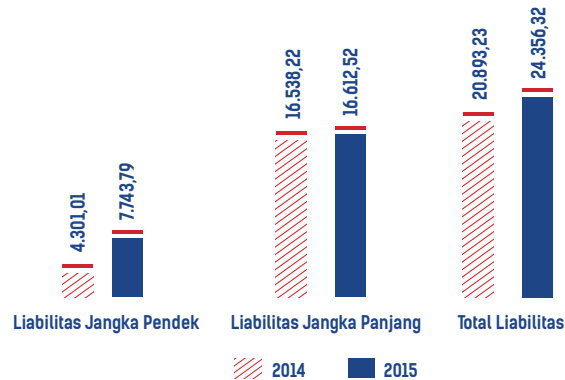
LIABILITAS

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Liabilitas Jangka Pendek	4.301,01	7.743,79	3.442,78	80,05
Liabilitas Jangka Panjang	16.538,22	16.612,53	74,31	0,45
Total Liabilitas	20.839,23	24.356,32	3.517,08	16,88

Standar yang Digunakan:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 30: Sewa
- PSAK 46: Pajak Penghasilan
- PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 57: Provisi, Liabilitas dan Aset Kontinjensi
- PSAK 24: Imbalan Kerja



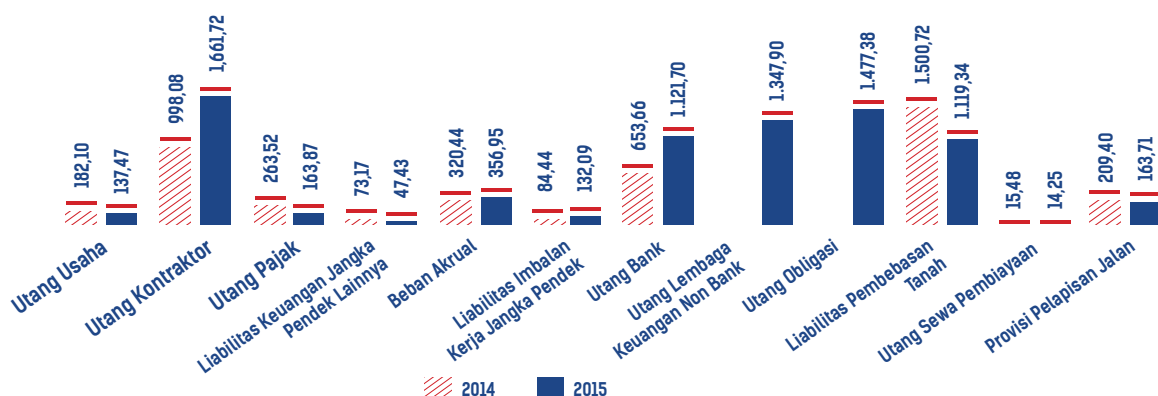
Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

Liabilitas Perseroan pada akhir 2015 adalah sebesar Rp24,35 triliun, naik sebesar Rp3,52 triliun atau 16,88% dibandingkan tahun 2014. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya penambahan pinjaman, baik kepada bank maupun lembaga keuangan bukan bank untuk mendukung aktivitas konstruksi jalan tol baru.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Utang usaha	182,10	137,47	(44,63)	(24,51)
Utang kontraktor	998,08	1.661,72	663,64	66,49
Utang pajak	263,52	163,87	(99,66)	(37,82)
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	73,17	47,43	(25,74)	(35,17)
Beban Akrua	320,44	356,95	36,51	11,39
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	84,44	132,09	47,65	56,43
Utang bank	653,66	1.121,70	468,04	71,60
Utang lembaga keuangan non bank	-	1.347,90	1.347,90	n/a
Utang obligasi	-	1.477,38	1.477,38	n/a
Liabilitas pembebasan tanah	1.500,72	1.119,34	(381,38)	(25,41)
Utang sewa pembiayaan	15,48	14,25	(1,24)	(8,00)
Provisi pelapisan jalan	209,40	163,71	(45,69)	(21,82)
Total Liabilitas Jangka Pendek	4.301,01	7.743,79	3.442,78	80,05



Liabilitas Jangka Pendek merupakan liabilitas dimana diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan atau satu siklus normal operasi perseroan.

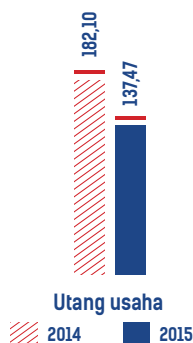
Pada akhir 2015, Perseroan mencatat liabilitas jangka pendek sebesar Rp7,74 triliun. Posisi tersebut naik 80,05% atau sebesar Rp 3,44 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 4,30 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan

utang bank sebesar Rp 468,04 miliar, dan lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp 1,34 triliun. Selain itu, terdapat Obligasi yang akan jatuh tempo pada tahun 2016, sehingga mengalami mutasi dari akun Utang Obligasi Jangka Panjang ke Utang Obligasi Jangka Pendek sebesar Rp1,47 triliun. Utang kontraktor juga mengalami kenaikan cukup signifikan, Rp 663,64 miliar, sesuai dengan kinerja Perseroan yang melalui entitas anaknya melakukan aktivitas konstruksi jalan tol baru.

UTANG USAHA

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Utang usaha	182,10	137,47	-44,63	-24,51

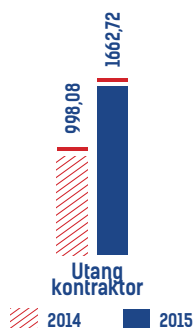


Utang usaha adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan setara kas yang timbul dari kegiatan usaha yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Utang Usaha pada tahun 2015 mencapai Rp137,47 miliar, atau turun 24,51% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp182,10 miliar.

UTANG KONTRAKTOR

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Utang kontraktor	998,08	1.662,72	663,64	66,49



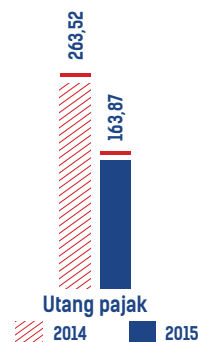
Utang Kontraktor Merupakan utang kepada kontraktor, konsultan dan rekanan sehubungan dengan pembangunan jalan, pelapisan ulang, pengadaan fasilitas tol dan bangunan lain.

Utang Kontraktor mencapai Rp1,66 triliun atau naik 66,49% dari sebelumnya Rp 998,08 miliar. Hal ini terjadi karena beberapa proyek Perseroan melalui entitas anaknya sedang aktif melakukan konstruksi pembangunan jalan tol baru.

UTANG PAJAK

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Utang pajak	263,52	163,87	-99,66	-37,82

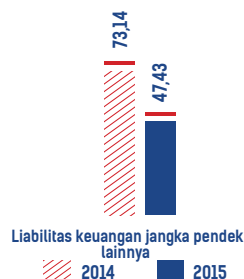


Utang pajak adalah pajak yang belum disetor ke kas negara. Pada tahun 2015, Utang Pajak mencapai Rp163,87 miliar, atau turun 37,82% dari tahun 2014 yang mencapai Rp 263,52 miliar.

LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	73,14	47,43	-25,74	-35,17



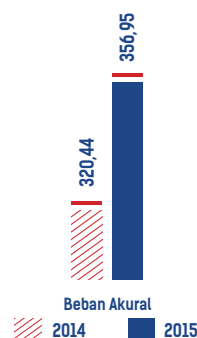
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya terdiri dari liabilitas pada pihak ketiga, yaitu sumbangan area pramuka Cibubur dan TMII serta lainnya. Sumbangan area pramuka Cibubur dan Taman Mini Indonesia Indah merupakan sumbangan Perseroan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Taman Mini Indonesia Indah yang didasarkan pada Keputusan Presiden No.14 Tahun

1981 tentang penggunaan sebagian dari pendapatan tol pada pintu gerbang menuju/dari Taman Mini Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur. Namun, sejak tanggal 26 Januari 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No.3 Tahun 2008 mengenai pencabutan Keputusan Presiden No.14 Tahun 1981.

BEBAN AKRUAL

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Beban Akrua	320,44	356,95	36,51	11,39

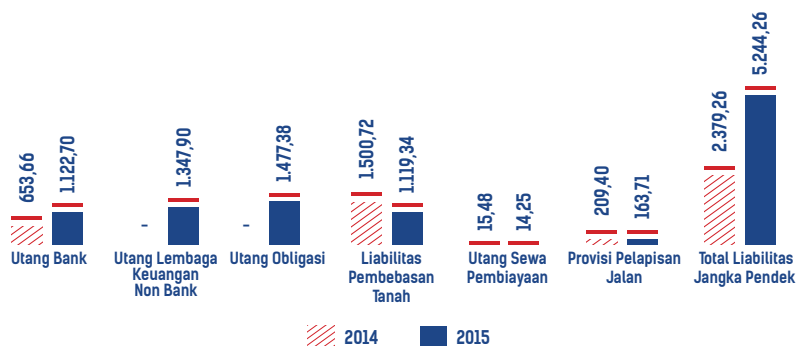


Beban akrual adalah beban yang sudah terjadi tetapi belum dicatat dalam akun. Beban akrual terdiri dari beban bunga utang bank, beban bunga utang obligasi serta beban bunga utang lembaga keuangan bukan bank. Beban Akrua pada tahun 2015 mencapai Rp 356,95 miliar atau naik 11,39% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014 yang mencapai Rp 320,44 miliar.

LIABILITAS JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Utang bank	653,66	1.122,70	468,04	71,60
Utang lembaga keuangan non bank	-	1.347,90	1.347,90	n.a
Utang obligasi	-	1.477,38	1.477,38	n.a
Liabilitas pembebasan tanah	1.500,72	1.119,34	-381,38	-25,41
Utang sewa pembiayaan	15,48	14,25	-1,24	-8,00
Provisi pelapisan jalan	209,40	163,71	-45,69	-21,82
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.379,26	5.244,26	2.865,00	120,42



Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan dengan cara merinci jenis kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun secara total mencapai Rp 5,24 triliun, naik 120,42% dari sebelumnya Rp 2,37 triliun. Hal ini terjadi karena adanya penambahan utang bank Rp 468 miliar dan utang lembaga

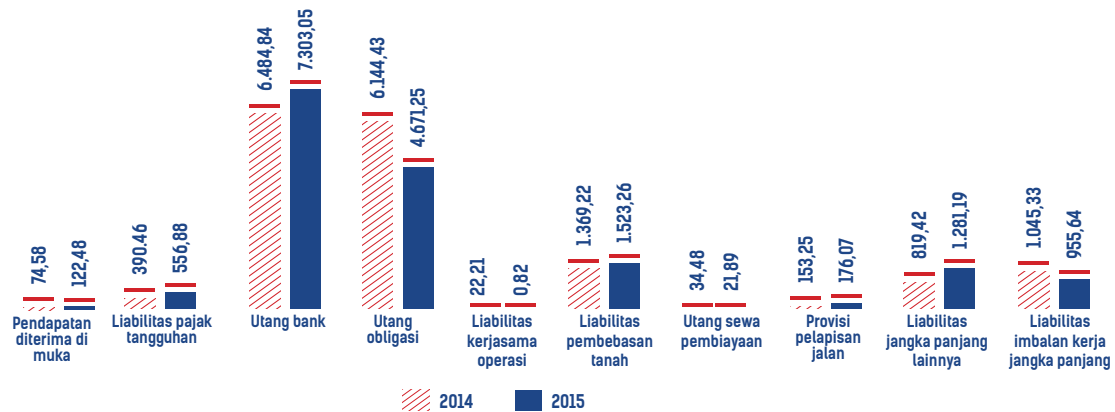
keuangan bukan bank sebesar Rp 1,34 triliun. Utang ke lembaga keuangan bukan bank adalah ke PT Sarana Multi Infrastruktur. Pada tahun 2016, ada Obligasi yang akan jatuh tempo, sehingga terdapat mutasi dari akun utang obligasi jangka panjang ke utang obligasi jangka pendek sebesar Rp 1,47 triliun.

Obligasi JORR II Tahun 2005 Tranche A sebesar Rp 77,37 miliar yang akan jatuh tempo pada 02 Januari 2016. Obligasi ini adalah Obligasi Jasa Marga XII Seri Q sebesar Rp1 triliun yang akan jatuh tempo pada 06 Juli 2016, serta Obligasi Berkelanjutan I Seri S (B) sebesar Rp 400 miliar yang akan jatuh tempo pada 27 September 2016.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Pendapatan diterima di muka	74,58	122,48	47,90	64,24
Liabilitas pajak tangguhan	390,46	556,88	166,42	42,62
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	6.484,84	7.303,05	818,21	12,62
Utang obligasi	6.144,43	4.671,25	-1.473,18	-23,98
Liabilitas kerjasama operasi	22,21	0,82	-21,39	-96,31
Liabilitas pembebasan tanah	1.369,22	1.523,26	154,03	11,25
Utang sewa pembiayaan	34,48	21,89	-12,59	-36,51
Provisi pelapisan jalan	153,25	176,07	22,81	14,89
Liabilitas jangka panjang lainnya	819,42	1.281,19	461,77	56,35
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.045,33	955,64	-89,69	-8,58
Total Liabilitas Jangka Panjang	16.538,22	16.612,53	74,31	0,45



Liabilitas Jangka Panjang adalah kewajiban kepada kreditur yang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.

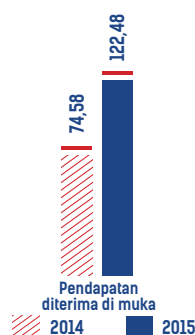
Pada akhir 2015, liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan 0,45% dari sebelumnya Rp16,53 triliun di tahun 2014 menjadi

Rp16,61 triliun di tahun 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan karena peningkatan pinjaman kepada pihak ketiga guna mendukung kegiatan konstruksi jalan tol baru yang sedang dilaksanakan Perseroan melalui entitas anak. Selain itu, terdapat liabilitas yang merupakan Dana talangan pembelian tanah untuk pembangunan ruas Jalan tol baru.

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Pendapatan diterima di muka	74,58	122,48	47,90	64,24

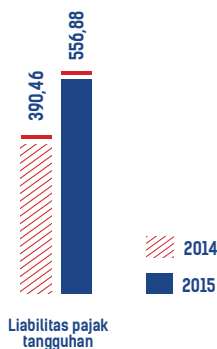


Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan kas dan setara kas dari pihak lain sebagai pembayaran jasa lebih dari satu tahun setelah periode pelaporan. Pendapatan Diterima Dimuka mengalami peningkatan sebesar 64,24% dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan sewa iklan, lahan, tempat istirahat dan pendapatan lain yang diterima di ruang milik jalan tol.

LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Liabilitas pajak tangguhan	390,46	556,88	166,42	42,62



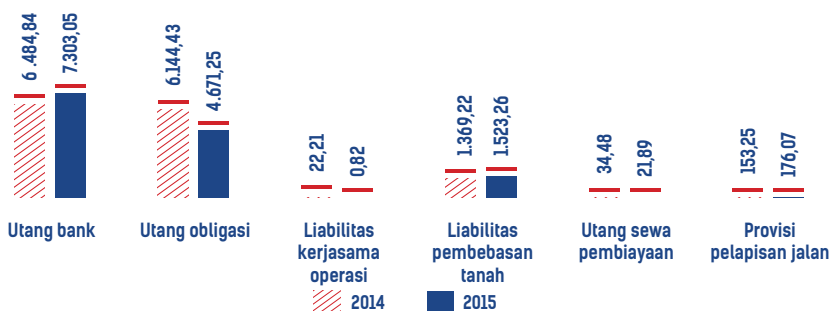
Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya.

Liabilitas Pajak Tangguhan naik 42,62% dari Rp390,46 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp556,88 miliar pada tahun 2015.

LIABILITAS JANGKA PANJANG - SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Utang bank	6.484,84	7.303,05	818,21	12,62
Utang obligasi	6.144,43	4.671,25	-1.473,18	-23,98
Liabilitas kerjasama operasi	22,21	0,82	-21,39	-96,31
Liabilitas pembebasan tanah	1.369,22	1.523,26	154,03	11,25
Utang sewa pembiayaan	34,48	21,89	-12,59	-36,51
Provisi pelapisan jalan	153,25	176,07	22,81	14,89
Total	14.208,43	13.696,34	-512,09	-3,60



Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun adalah liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan yang disajikan.

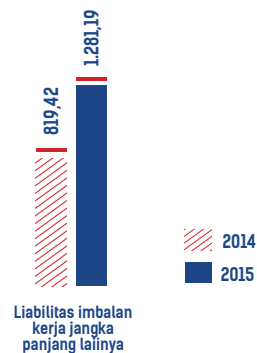
Pada tahun 2015 Utang Bank mencapai Rp7,30 triliun, meningkat sebesar 12,62% atau Rp818,21 miliar dari tahun sebelumnya

sebesar Rp6,48 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kenaikan utang bank pada entitas anak sejalan dengan aktivitas konstruksi jalan tol baru. Sedangkan utang obligasi sebesar Rp4,67 triliun mengalami penurunan sebesar Rp1,47 triliun dari sebelumnya sebesar Rp6,14 triliun. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya mutasi Obligasi yang akan jatuh tempo pada 2016 ke utang obligasi jangka pendek.

LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Liabilitas jangka panjang lainnya	819,42	1.281,19	461,77	56,35

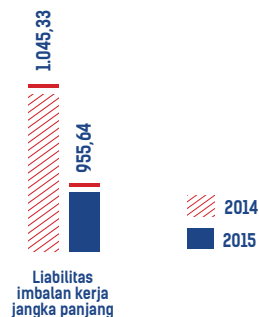


Liabilitas jangka panjang lain adalah liabilitas jangka panjang yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu pos liabilitas jangka panjang yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Liabilitas jangka panjang lainnya naik 56,35% dari Rp819,42 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp1,28 triliun pada tahun 2015.

LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.045,33	955,64	-89,69	-8,58



Liabilitas imbalan pascakerja adalah liabilitas yang timbul dari imbalan kerja (selain pesangon pemutusan hubungan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Liabilitas Imbalan kerja turun 8,58% dari Rp1,04 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp955,64 miliar pada tahun 2015.

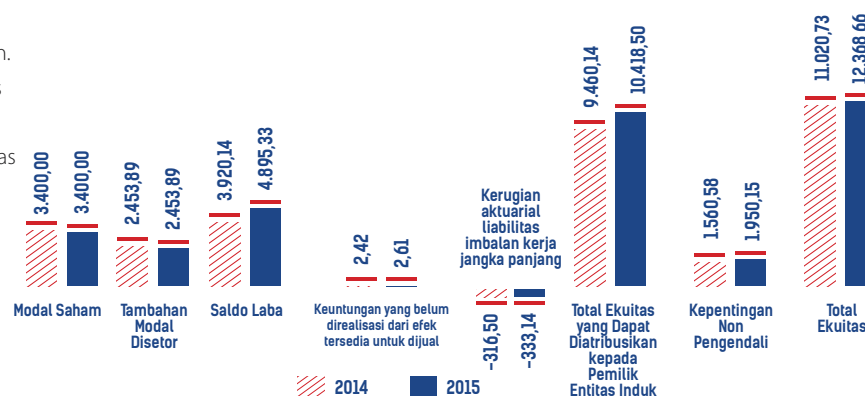
EKUITAS

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015	Δ	%
Modal Saham	3.400,00	3.400,00	-	-
Tambahan Modal Disetor	2.453,87	2.43,89	-	-
Saldo laba	3.920,14	4.895,33	975,18	24,88
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	2,42	2,61	-0,19	-7,21
Kerugian aktuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-316,50	-333,14	-16,63	5,26
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	9.460,14	10.418,50	958,36	10,13
Kepentingan Non Pengendali	1.560,58	1.950,15	389,58	24,96
Total Ekuitas	11.020,73	12.368,66	1.347,94	12,23

Standar yang Digunakan:

- PSAK dan ISAK lain yang relevan.
- ISAK 11: Distribusi Aset Non Kas kepada Pemilik
- PSAK 38: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
- PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian



Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Ekuitas terdiri Modal Saham, Tambahan Modal Disetor, Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi Efek Tersedia untuk Dijual, dan Saldo Laba.

mencetak laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp1,31 triliun. Terdapat tambahan akun Ekuitas, yaitu kerugian aktuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Hal ini sesuai dengan PSAK 24 revisi 2013 tentang imbalan kerja, dimana rugi aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang juga disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. PSAK 24 revisi 2013 mensyaratkan beban biaya jasa lalu karyawan aktif tidak dapat lagi diamortisasi sepanjang masa kerja karyawan, tapi harus langsung dibebankan pada tahun berjalan.

Perseroan mencatat jumlah ekuitas tahun 2015 sebesar Rp12,36 triliun. Kondisi tersebut meningkat 12,23% atau sebesar Rp1,34 triliun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp11,02 triliun. Peningkatan ini disebabkan karena kemampuan Perseroan untuk

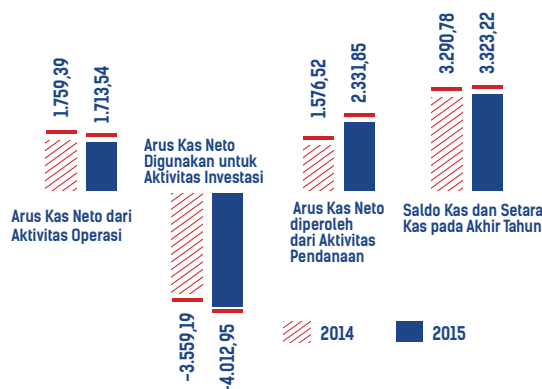
Laporan Arus Kas Konsolidasian

(Rp Miliar)

Uraian	2014		2015		Δ	%
	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi		
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi	1.759,39	53,46	1.713,54	51,56	-45,84	-2,61
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	-3.559,19	-108,16	-4.012,95	-120,75	-453,77	12,75
Arus Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1.576,52	47,91	2.331,85	70,17	755,33	47,91
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	3.290,78	100,00	3.323,22	100,00	32,44	0,99

Standar yang Digunakan:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK dan ISAK lain yang relevan.



Laporan arus kas adalah komponen laporan keuangan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 2015 mencapai Rp1,71 triliun atau turun 2,61% dibanding tahun 2014. Penurunan ini antara lain disebabkan adanya penurunan pembayaran kepada pemasok. Selain itu, karena telah selesainya kerjasama operasi antara Perseroan dengan PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) untuk ruas Cibitung-Cikampek, menyebabkan pembayaran beban kerjasama operasi juga mengalami penurunan.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi 2015 mencapai Rp4,01 triliun atau meningkat sebesar 12,75% dari aktivitas investasi tahun 2014. Peningkatan ini antara lain disebabkan karena adanya perolehan Aset Hak Pengusahaan Jalan Tol dari ruas tol baru yang telah beroperasi, seperti PT Jasamarga Pandaan Tol, pemegang konsesi Jalan Tol Gempol-Pandaan yang telah beroperasi mulai Juni 2015.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

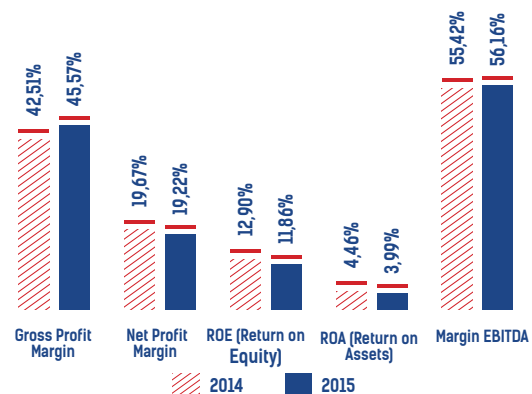
Arus Kas yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 2015 mencapai Rp2,33 triliun, naik dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 47,91%. Kenaikan ini disebabkan adanya penerbitan utang bank baru. Selain itu, Perseroan juga menerbitkan utang kepada lembaga keuangan bukan bank, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp750 miliar. Penerbitan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk refinancing dan setoran modal, serta utang bank pada entitas anak sejalan dengan aktivitas kegiatan konstruksinya.

Rasio Profitabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. (Rp Miliar)

Uraian	2014	2015
Total Aset	31.860,96	36.724,98
Ekuitas	11.021,72	12.368,66
Pendapatan Usaha	7.227,78	7.630,67
Laba Usaha	3.072,72	3.477,66
Laba Bersih Periode Berjalan	1.421,72	1.466,38
Beban Bunga	1.215,32	1.405,04
EBITDA	4.006,82	4.285,03

Uraian	2014	2015
Gross Profit Margin	42,51%	45,57%
Net Profit Margin	19,67%	19,22%
ROE (Return on Equity)	12,90%	11,86%
ROA (Return on Assets)	4,46%	3,99%
Margin EBITDA	55,42%	56,16%



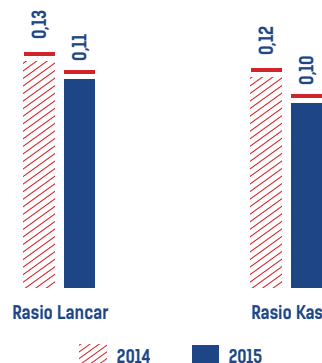
Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan Perseroan untuk membayar kewajiban jangka pendek dipengaruhi oleh tingkat likuiditas Perseroan.

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015
Kas dan setara kas	3.290,78	3.323,22
Aset Lancar	3.545,78	3.729,05
Liabilitas Jg. Pendek	28.314,18	32.995,94
Rasio:		
Rasio Lancar (kali)	0,13	0,11
Rasio Kas (kali)	0,12	0,10



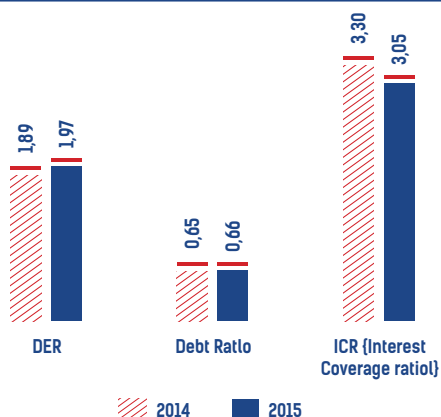
Dari rasio-rasio tingkat likuiditas, terlihat bahwa terjadi penurunan rasio lancar dan rasio kas, namun hal ini merupakan konsekuensi atas investasi yang sedang dilakukan Perseroan.

Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Pada posisi per akhir 2015, rasio Utang terhadap Modal atau *Debt to Equity Ratio* Perseroan mencapai 0,66 kali. Rasio tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2014 yang mencapai 0,65 kali. Sementara EBITDA dibandingkan dengan Beban Bunga atau *Interest Coverage Ratio* Perseroan pada tahun 2015 mencapai 3,05 kali. Hal tersebut menurun dibandingkan dengan 2014 yang mencapai 3,30 kali. Dengan kondisi tersebut, Perseroan masih berada dalam koridor Pembatasan Keuangan yang dipersyaratkan oleh kreditor dan berada dalam kondisi keuangan yang kuat.

Rasio Solvabilitas

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015
Total Aset	31.859,96	36.724,98
Total Liabilitas	20.839,23	24.356,32
Ekuitas	11.020,73	12.368,66
EBTIDA	4.005,58	4.285,03
Beban Bunga	1.215,32	1.405,04
Rasio:		
DER (kali)	1,89	1,97
Debt Ratio (kali)	0,65	0,66
ICR (Interest Coverage Ratio) (kali)	3,30	3,05



Kolektibilitas Piutang

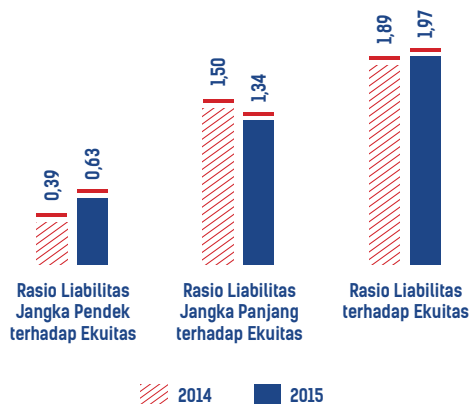
Perseroan tidak memiliki Piutang Usaha mengingat transaksi yang dilakukan bersifat tunai atau kas. Sehingga tidak memungkinkan untuk mengukur tingkat Kolektibilitas Piutang. Sedangkan Piutang yang dimiliki adalah piutang karyawan dimana kolektibilitas piutang dilaksanakan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji.

Struktur Modal

Struktur Modal Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

(Rp Miliar)

Uraian	2014	2015
Liabilitas Jangka Pendek	4.301,01	7.743,79
Liabilitas Jangka Panjang	16.538,22	16.612,53
Total Liabilitas	20.839,23	24.356,32
Total Ekuitas	11.020,73	12.368,66
Rasio Liabilitas Jg. Pendek terhadap Ekuitas	0,39	0,63
Rasio Liabilitas Jg. Panjang terhadap Ekuitas	1,50	1,34
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	1,89	1,97



Kebijakan Struktur Modal

Perseroan menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perseroan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Konsisten dengan perusahaan lain dalam industri, Perseroan memonitor modal dengan dasar rasio Liabilitas terhadap Ekuitas. Rasio ini dihitung sebagai berikut: Total Liabilitas dibagi Ekuitas.

Selama tahun 2015, Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas mencapai 1,97 kali, dengan demikian Perseroan dapat mempertahankan rasio utang terhadap modal sebesar maksimum 5:1 sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh kreditur. Belanja Modal Realisasi belanja modal pada tahun 2015 mencapai Rp 4,16 triliun, dimana Rp 2,38 triliun digunakan untuk pengembangan Anak Perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

Entitas Anak Jalan Tol

- PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ), Rp7,27miliar.
- PT Marga Sarana Jabar (MSJ), Rp9,27miliar.
- PT Marga Trans Nusantara (MTN), Rp60,60miliar.
- PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC), Rp72,71miliar.
- PT Trans Marga Jateng (TMJ), Rp302,59 miliar.
- PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP), Rp204,61 miliar.
- PT Marga Nujyasumo Agung (MNA), Rp718,90miliar.
- PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT), Rp88,24miliar.
- PT Jasamarga Bali Tol (JBT), Rp8,63 miliar.
- PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT), Rp100,07 miliar.
- PT Solo Ngawi Jaya (SNJ), Rp683,16 miliar.
- PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ), Rp126,90 miliar.
- PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), Rp0,80 miliar.

Entitas Anak Non Jalan Tol

- PT Jasa Layanan Pemeliharaan, Rp1,68 miliar.
- PT Jasamarga Properti, Rp269,13 miliar.

Perbandingan Target 2015 dan Realisasi 2015

Pada tahun 2015, Perseroan menargetkan Pendapatan Usaha (di luar Pendapatan Konstruksi) sebesar Rp 7,95 triliun dan Aset sebesar Rp 34,7 triliun. Realisasi yang dicapai oleh Perseroan yaitu Pendapatan Usaha (diluar Pendapatan Konstruksi mencapai Rp 7,58 triliun dan Aset sebesar Rp 36,11 triliun.

(Rp triliun)

Keterangan	Target 2015	Realisasi 2015
Pendapatan Usaha (diluar Pendapatan Konstruksi)	7,95	7,63
Total Aset	34,72	36,72

Target/Proyeksi yang Ingin Dicapai Tahun 2016

(Rp triliun)

Keterangan	Target 2016
Pendapatan Usaha (diluar Pendapatan Konstruksi)	8,66
Total Aset	48,94

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Di tahun 2015 Perseroan tidak melakukan ikatan yang material atas investasi barang modal.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca yang memerlukan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Prospek Usaha, Kondisi Industri dan Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian Indonesia pada tahun 2015 mencapai 5,04% atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,79% dari tahun 2014 dengan tingkat inflasi 3,35%(YoY). Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih relatif stabil. Dari data BPS, inflasi secara year on year 3,35%, jika dibandingkan lima tahun terakhir ini terendah. Pada tahun 2010, inflasi mencapai 6,96%, 2013 mencapai 8,38%, dan 2014 mencapai 8,36%. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan hasil dari Indeks Tendensi Bisnis (ITB) yang dikeluarkan BPS.

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) adalah indikator perkembangan ekonomi usaha terkini yang datanya diperoleh dari Survei Tendensi Bisnis (STB) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Bank Indonesia. ITB merupakan indeks yang menggambarkan kondisi bisnis dan perekonomian pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang. STB dilakukan setiap triwulan di beberapa kota besar terpilih di seluruh provinsi di Indonesia. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan IV-2015 sebesar 105,22, yang berarti kondisi bisnis meningkat dari triwulan sebelumnya. Namun demikian, tingkat optimisme pelaku bisnis menurun jika dibandingkan dengan triwulan III-2015 (nilai ITB sebesar 106,04).

Pertumbuhan ekonomi yang masih tumbuh tersebut ternyata tidak tercermin dari peningkatan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya mobil. Pada tahun 2015, angka penjualan mobil mencapai 1.013.291 kendaraan (data Gaikindo), turun 16% dibandingkan penjualan tahun 2014 sebesar 1.208.019 kendaraan. Penurunan penjualan kendaraan bermotor khususnya mobil, ternyata tidak berdampak terhadap volume lalu lintas transaksi pada jalan-jalan tol yang dimiliki Perseroan. Hal ini terlihat dari peningkatan volume lalu lintas tahun 2015 yang mencapai 1.379,57 juta kendaraan, atau meningkat 4,54% dibandingkan volume lalu lintas tahun 2014 yang mencapai 1.319,60 juta kendaraan. Pada tahun 2015 total panjang jalan tol operasi yang dikelola Perseroan sebesar 590 km dan ditargetkan penambahan panjang jalan tol menjadi 987 km pada tahun 2018.

Pemasaran dan Pangsa Pasar

Untuk tetap menempati posisi sebagai market leader dalam pengoperasian jalan tol di Indonesia, Perseroan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan panjang jalan tol yang dioperasikan dengan membangun ruas-ruas tol baru yang memiliki kelayakan dari segi finansial. Pengoperasian jalan tol baru yang diusahakan oleh Perseroan harus terkoneksi dengan jalan tol yang telah beroperasi untuk memberikan jaminan adanya volume lalu lintas pada jalan-jalan tol baru. Semua jalan tol baru yang diusahakan oleh Perseroan saat ini terkoneksi dengan jalan tol eksisting yang telah beroperasi. Jalan Tol Bogor Ring Road terkoneksi dengan Jalan Tol Jagorawi; Jalan Tol Semarang-Solo terkoneksi dengan Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C; Jalan Tol Serpong-Kunciran dan Kunciran-Cengkareng terkoneksi dengan Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Sedyatmo (Bandara); Jalan Tol Gempol-Pasuruan dan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto terkoneksi dengan Jalan Tol Surabaya-Gempol; Jalan Tol JORR W2 Utara terkoneksi dengan Jalan Tol JORR. Dan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi terkoneksi dengan Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa. Sampai dengan saat ini Perseroan mengoperasikan 63% jalan tol dari seluruh jalan tol yang beroperasi di Indonesia dengan total panjang jalan tol 590 km.

Kebijakan Dividen dan Pembayaran Dividen Tunai

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Laba Bersih (Rp miliar)	1.193,49	1.339,46	1.602,09	1.336,32	1.403,43	1.466,38
Jumlah Dividen (Rp miliar)	716,09	535,78	640,83	534,526	561,37	***
Rasio Dividen	60%	40%	40%	40%	40%	***
Waktu Pembayaran	2011	2012	2013	2014	2015	***
Jumlah Dibayar (Rp miliar)	716,09	535,78	640,83	534,526	561,37	***
Dividen per Saham (Rp Penuh)	105,68	78,88	94,24	78,61	82,55	***
Tanggal Pengumuman Dividen	16 Juni 2011	11 Mei 2012	01 Mei 2013	13 Maret 2014	20 Maret 2015	***
Tanggal Pembayaran Dividen	25 Juli 2011	21 Juni 2012	18 Juni 2013	23 April 2014	17 April 2015	***

Kebijakan Perseroan adalah memberikan payout dividen minimal 20%, namun untuk hasil pencapaian tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 payout dividen Perseroan sebesar 60%, 60%, 40%, dan 40%. Perseroan merencanakan tingkat pembayaran dividen yang dapat memberikan hasil atau return yang reguler kepada para Pemegang Saham, namun tetap memungkinkan Perseroan untuk memanfaatkan sebagian besar saldo laba untuk diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan. Besaran payout ratio untuk Dividen diputuskan dalam mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan usulan dari pengurus Perseroan.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

REALISASI PENGGUNAAN DANA IPO

Uraian	2014	2015
Jumlah Hasil Penawaran Umum	3.468,00	3.468,00
Biaya Penawaran Umum	101,45	101,45
Hasil Bersih	3.366,55	3.366,55
Ekspansi	2.347,79	2.564,06
KONTRIBUSI MODAL ENTITAS ANAK		
PT Marga Sarana Jabar, konstruksi Jalan Tol Bogor Ring Road	179,02	195,52
PT Trans Marga Jateng, konstruksi Jalan Tol Semarang-Solo	1.299,40	1.299,40
PT Trans Marga Jatim, konstruksi Jalan Tol Gempol-Pasuruan	260,10	385,10
PT Marga Kunciran Cengkareng, konstruksi Jalan Tol Cengkareng-Kunciran	135,00	172,92
PT Marga Trans Nusantara, konstruksi Jalan Tol Kunciran-Serpong	80,28	117,12
PT Marga Nujasumo Agung, konstruksi Jalan Tol Surabaya-Mojokerto	394,00	394,00
Refinancing	150,00	150,00
Pembayaran Pelunasan Pokok Obligasi Seri M	150,00	150,00
Modal Kerja	52,65	52,65
Total	2.550,45	2.766,71
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum	816,11	599,84

Proceed Dana IPO bersih yang diterima Perseroan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 3,36 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2015, Realisasi Penggunaan Dana IPO telah mencapai Rp 2,76 triliun. Seiring dengan ketersediaan lahan untuk konstruksi maka Dana IPO yang telah dimanfaatkan adalah 82,18% dari total proceed bersih IPO. Penggunaan Dana IPO tersebut terdiri dari Ekspansi, Refinancing dan Modal Kerja.

Sampai dengan tahun 2015, Ekspansi Perseroan dalam bentuk kontribusi modal Entitas Anak mencapai Rp 2,56 triliun yaitu kontribusi modal ke PT Marga Sarana Jabar untuk ruas Jalan

Tol Bogor Outer Ring Road sebesar Rp195miliar, PT Trans Marga Jateng untuk ruas Jalan Tol Semarang-Solo sebesar Rp 1,29 triliun, PT Trans Marga Jatim Rp 385 miliar, PT Marga Kunciran Cengkareng untuk ruas Jalan Tol Cengkareng-Kunciran sebesar Rp 172 miliar, PT Marga Trans Nusantara untuk ruas Jalan Tol Kunciran-Serpong sebesar Rp117 miliar, dan PT Marga Nujasumo Agung untuk ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto sebesar Rp 394 miliar. Penggunaan Refinancing digunakan untuk melunasi Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000 sebesar Rp 150miliar. Sementara Penggunaan Dana untuk Modal Kerja, yaitu belanja modal proyek jalan tol relokasi Porong-Gempol sebesar Rp52 miliar.

Uraian	2014	2015
Jumlah Hasil Penawaran Umum	1.385,03	1.385,03
Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap	1.000,00	1.000,00
Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 Tanpa Bunga	385,03	385,03
Biaya Penawaran Umum	5,62	5,62
Hasil Bersih	1.379,41	1.379,41
Ekspansi	127,86	270,50
Bidang Properti - Pengembangan Kawasan Koridor Jalan Tol	112,86	255,50
Bidang Teknologi Informasi & Komunikasi	-	-
Bidang Engineering - Pemeliharaan Jalan Tol & Konstruksi Lainnya	15,00	15,00
Refinancing	1.050,00	1.050,00
Pelunasan Obligasi Jasa Marga Seri O Tahun 2002	650,00	650,00
Percepatan Pelunasan Kredit Investasi PT BCA	400,00	400,00
Modal Kerja	29,41	29,41
Total	1.207,27	1.349,91
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum	172,14	29,50

Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Obligasi Jasa Marga I Seri JM – 10 Tanpa Bunga

Perseroan menerbitkan Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp1,00 triliun dan Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 Tanpa Bunga sebesar Rp 385 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2015 dana Obligasi tersebut telah dimanfaatkan sebesar 97,86% dari Hasil Bersih Obligasi sebesar Rp1,37 triliun. Penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum Obligasi digunakan untuk Ekspansi, Refinancing dan Modal Kerja.

Di akhir tahun 2015 Ekspansi yang dilakukan adalah di bidang Properti untuk pengembangan Kawasan Koridor Jalan sebesar Rp 255,5 miliar dan Bidang Engineering sebesar Rp15 miliar untuk Pemeliharaan Jalan Tol dan Konstruksi lainnya.

Penggunaan Refinancing untuk pelunasan Obligasi Jasa Marga Seri O tahun 2002 sebesar Rp650 miliar dan pelunasan Kredit Investasi PT BCA, Tbk sebesar Rp400 miliar. Sedangkan penggunaan Modal Kerja untuk Pelebaran Ruas Jalan Tol Tomang-Tangerang sebesar Rp5 miliar dan Perbaikan Stabilitas Konstruksi Jalan Tol Cipularang sebesar Rp24,4miliar.

Peningkatan/Penurunan Material dari Pendapatan Bersih Terkait dengan Volume Penjualan atau Jasa Baru

Peningkatan Pendapatan Bersih Perseroan disebabkan oleh beroperasinya beberapa ruas tol baru di Entitas Anak yang telah mulai menyumbangkan Pendapatan secara penuh pada tahun 2015. Ruas-ruas ini beroperasi pada pertengahan tahun 2014, seperti Jalan Tol Bogor Ring Road seksi 2A Kedung Halang-Kedung Badak yang beroperasi 4 Juni 2014, Jalan Tol Semarang-Solo seksi Ungaran-Bawen yang telah beroperasi pada 4 April 2014, Jalan Tol JORR W2 Utara seksi 2 Cileduk-Ulujami yang beroperasi sejak 22 Juli 2014. Sementara itu, terdapat ruas baru yang beroperasi pada tahun 2015, yaitu Jalan Tol Gempol-Pandaan sepanjang 13,61 km yang telah beroperasi mulai 12 Juni 2015. Selain itu, penyesuaian tarif tol dan kenaikan volume lalu lintas transaksi yang melalui jalan tol Perseroan turut meningkatkan Pendapatan Perseroan.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan restrukturisasi utang/modal

Di tahun 2015 Perseroan memiliki Informasi Material Mengenai Pengambilalihan Saham (Akuisisi). Pada 10 Juni 2015, Perseroan melakukan pengambilalihan saham terhadap PT Solo Ngawi Jaya (SNJ) dan PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ).

SNJ adalah pemegang konsesi untuk Jalan Tol Solo-Mantingan-Ngawi sepanjang 90,10 km. Perseroan membeli 10.798.650 saham SNJ yang dimiliki Thiess dengan total harga Rp237 miliar. Selain itu, Perseroan juga membeli 568.349 saham SNJ yang dimiliki PT Ferino Putra dengan total harga Rp12 miliar. Dengan pembelian saham SNJ tersebut, jumlah saham Perseroan pada SNJ menjadi 11.366.999 saham atau sekitar 59,99% dari seluruh saham SNJ.

NKJ adalah pemegang konsesi untuk Jalan Tol Ngawi-Kertosono sepanjang 87,02 km. Perseroan membeli 2.064.955 saham NKJ yang dimiliki Thiess dengan total harga Rp12 miliar. Perseroan juga membeli 108.681 saham NKJ yang dimiliki PT Ferino Putra dengan total harga Rp658 juta. Dengan pembelian saham NKJ tersebut, jumlah saham Perseroan pada NKJ menjadi 2.173.636 saham atau sekitar 59,99% dari seluruh saham NKJ.

Informasi material pengambilalihan saham SNJ dan NKJ telah disampaikan ke Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juni 2015 dengan surat nomor BF.HM01.3466.

Selain itu, pada 29 Juni 2015, Perseroan juga telah melakukan pengambilalihan saham terhadap PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), dimana CSJ adalah pemegang konsesi untuk Jalan Tol Cinere-Serpong sepanjang 10,14 km. Perseroan membeli 1.376.602 saham milik Thiess yang mewakili sekitar 55% dari total saham yang dimiliki CSJ dengan total harga Rp110 miliar. Informasi material ini telah disampaikan ke Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juni 2015 dengan surat nomor BF.HM01.3892.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Di Tahun 2015 Perseroan tidak memiliki Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi.

Perubahan Peraturan Perundang Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan

Di tahun 2015 tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi, Alasan dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Perseroan

1. Penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".

Latar Belakang

PSAK 24 revisi 2013 berlaku efektif mulai tahun 2015. Terdapat tiga perubahan pokok dalam PSAK 24 revisi 2013 yaitu cara perhitungan beban pensiun, pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial serta pengungkapan.

Alasan Perubahan

- Untuk melaporkan perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset program didefinisikan dengan cara yang lebih dimengerti.
- Beberapa opsi penyajian diizinkan dalam standar yang ada, membatasi komparabilitas.
- Penyempurnaan pengungkapan tentang risiko yang timbul dari program imbalan pasti yang diperlukan.

Dampak Terhadap Laporan Keuangan Perseroan

PSAK 24 revisi 2013, mensyaratkan beban biaya jasa lalu karyawan aktif tidak dapat lagi diamortisasi sepanjang masa kerja karyawan, tapi harus langsung dibebankan pada tahun berjalan. Penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian. Perseroan menggunakan kebijakan yang baru untuk mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial, yaitu langsung seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 disajikan kembali.

2. Penerapan PSAK 46(Revisi 2013), "Pajak Penghasilan".

Latar belakang

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perseroan telah menerapkan PSAK 46 (Revisi 2013), "Pajak Penghasilan". Poin penting yang ada adalah pengaturan pajak final dan hal khusus dihilangkan,sertaditambahkan pajak tanggungan aset tidak disusutkan dan properti investasi.

Alasan Perubahan

Selama ini, untuk menentukan laba atau pajak kena penghasilan dalam laporan keuangan, wajib pajak sering mengalami permasalahan akibat perbedaan peraturan perpajakan dengan pernyataan standar keuangan akuntansi. Perbedaan tersebut terdiri dari perbedaan sementara (temporary different) dan perbedaan tetap (permanent different). Perbedaan tetap tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan laba rugi karena berdasar aturan perpajakan bukan merupakan penghasilan. Sedangkan perbedaan sementara boleh diakui, sehingga harus dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui laba fiskal perusahaan.

Dampak Terhadap Laporan Keuangan Perseroan

PSAK 46 (Revisi 2013) menggunakan konsep akrual dalam mengakui beban, aset dan kewajiban perpajakan. Sehingga setiap penghasilan harus tetap diperhitungkan dampak pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang atau telah dibayarkan pada masa sekarang.

3. Perubahan Format Laporan Laba Rugi Komprehensif

Latar Belakang dan Alasan Perubahan

Adanya revisi PSAK I tentang penyajian laporan keuangan yang berlaku efektif tahun 2015, untuk memenuhi secara penuh standar akuntansi PSAK 1 tersebut, Perseroan perlu merekonstruksi ulang format laporan laba rugi dengan menyesuaikan format di PSAK I Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan VIII.G7 No. KEP-347/BL/2012 terkait pos utama dalam laporan laba rugi yang harus disajikan secara terpisah dan pos utama untuk beban operasi perusahaan harus digabung dan disajikan tersendiri.

Dampak Terhadap Laporan Keuangan

Perubahan format Laporan Laba Rugi Komprehensif berpengaruh terhadap format pelaporan keuangan, tidak berpengaruh terhadap angka yang ada dalam Laporan Keuangan.

4. Perubahan Metode Amortisasi Perseroan

Latar Belakang

Menurut PSAK 19 tentang Aset Takberwujud, metode amortisasi yang digunakan harus mencerminkan pola pemakaian Perseroan atas manfaat ekonomik masa depan atas aset yang diharapkan oleh entitas. Maka atas hal tersebut, mulai tanggal 1 Januari 2015, Perseroan merubah metode amortisasi dari straight line ke unit of usage berdasarkan volume lalu lintas.

Alasan Perubahan

Dengan menggunakan metode unit of usage berdasarkan volume lalu lintas, lebih mencerminkan tingkat penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset jalan tol jika dibandingkan dengan metode straight line, karena metode unit of usage memperhitungkan tingkat volume lalu lintas actual dan estimasi volume lalu lintas masa datang.

Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Perseroan

Dengan berubahnya metode Amortisasi Aset Jalan Tol Perseroan, maka akan berdampak pada pencatatan Biaya Amortisasi Perseroan, yang tersaji dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2015.

GERBANG MERUYA U

42m



25m



25m



25



B 64 CR

TIDAK
TIL

GERBANG
TOL

SARAK TOL

05

Pengembangan Proyek Baru

- PENGEMBANGAN USAHA JALAN TOL
- PENGEMBANGAN USAHA LAIN

Pengembangan Proyek Baru





1000 km

Dalam masa hingga tahun 2019 kedepan, pembangunan jalan tol merupakan salah satu prioritas pembangunan infrastruktur, pemerintah telah menargetkan pembangunan infrastruktur melalui penambahan panjang jalan tol sepanjang 1000 km. Jasa Marga berkomitmen untuk turut serta mewujudkan pencapaian target tersebut melalui pembangunan ruas-ruas jalan tol potensial untuk dibangun.



590 km

Sampai dengan akhir tahun 2015 Jasa Marga berhasil mengoperasikan jalan tol sepanjang 590 km.



987 km

Sampai dengan akhir tahun 2015 Jasa Marga berhasil mempunyai total konsesi pengelolaan jalan tol sepanjang 987 km

Pengembangan Usaha Jalan Tol

Prospek Industri Jalan Tol

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mencapai target Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 7,1%. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memiliki fungsi dan peran strategis untuk mengendalikan inflasi melalui penurunan biaya logistik (*logistic cost*).

Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, menargetkan peningkatan kapasitas jalan melalui pembangunan jalan tol sepanjang 1000 Kilometer. Kebijakan dan strategi pemerintah terkait dengan target tersebut adalah

dengan melaksanakan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera, Jalan Tol Trans-Jawa, Jalan Tol Samarinda-Balikpapan dan Jalan Tol Manado-Bitung.

Pengembangan Usaha Jalan Tol Perseroan

Dalam rangka mendukung rencana pemerintah, Jasa Marga berupaya melakukan percepatan pembangunan jalan tol di Indonesia dengan melakukan investasi pada proyek jalan tol baru sepanjang 459,8 Kilometer dengan nilai total investasi sebesar Rp. 42,4 Triliun.

Hingga akhir tahun 2015 jalan tol baru yang sudah beroperasi sepanjang 62,5 Kilometer dengan total nilai investasi sebesar Rp. 18,1 Triliun. Daftar proyek jalan tol tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

STATUS PROYEK JALAN TOL BARU

per 31 Desember 2015

Ruas	Panjang (km)		Biaya Investasi (Rp triliun)
	Total	Beroperasi	
I. BEROPERASI PENUH			
1. Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	10,0	10,0	2,5
2. JORR W2 Utara	7,7	7,7	2,2
3. Gempol-Pandaan	13,6	13,6	1,5
Sub Total	31,3	31,3	6,2
II. BEROPERASI SEBAGIAN			
1. Bogor Outer Ring Road	11,0	5,8	1,0
2. Semarang-Solo	72,6	23,1	7,3
3. Surabaya-Mojokerto	36,3	2,3	3,8
Sub Total	119,9	31,2	12,1
III. PEMEBBASAN LAHAN DAN KONTRUKSI			
1. Gempol-Pasuruan	34,2	0,0	2,8
2. JORR2 (Cengkareng-Kunciran)	14,2	0,0	3,5
3. JORR1 (Kunciran-Serpong)	11,2	0,0	2,6
4. Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	61,7	0,0	4,1
5. Solo-Ngawi	90,1	0,0	5,1
6. Ngawi-Kertosono	87,0	0,0	3,8
7. Cinere-Serpong	10,2	0,0	2,2
Sub Total	308,6	0,0	24,1
TOTAL	459,8	62,5	42,4

Jasa Marga terus berupaya untuk meningkatkan hak konsesi untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang. Untuk itu, Jasa Marga menargetkan berpartisipasi dalam proyek - proyek jalan tol potensial baik melalui tender, akuisisi, maupun *unsolicited*. Proyek - proyek potensial yang sedang diupayakan adalah proyek jalan tol sepanjang 351,81 Km dengan nilai investasi sebesar 54,84 Triliun. Proyek - proyek potensial tersebut adalah sebagai berikut:

No	Jalan Tol	Panjang (km)	Perkiraan Nilai Investasi (Rp triliun)	Keterangan
1	Jakarta - Cikampek Elevated	36,84	14,13	Unsolicited
2	Jakarta - Cikampek II (Sisi Selatan)	64,00	17,77	Unsolicited
3	Manado - Bitung	39,00	8,7	Tender
4	Balikpapan - Samarinda	99,35	13,1	Tender
5	Pandaan - Malang	37,62	4,33	Tender
6	Semarang - Batang	75,00	9,8	Tender

Kinerja Pengembangan Jalan Tol di Tahun 2015

Saat ini, Perseroan melalui Anak Perusahaan, telah memiliki tambahan total 13 (tiga belas) ruas konsesi jalan tol baru. Perseroan merupakan pemegang saham mayoritas pada seluruh Anak Perusahaan pemegang konsesi 13 (tiga belas) ruas jalan tol tersebut. Persentase kepemilikan Perseroan pada Anak Perusahaan pemegang konsesi ruas-ruas jalan tol baru tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Ruas	Panjang (km)	Anak Perseroan	Kepemilikan Jasa Marga (%)
1	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	10,00	PT Jasamarga Bali Tol	55,00
2	JORR W2 Utara	7,70	PT Marga Lingkar Jakarta	65,00
3	Gempol-Pandaan	13,60	PT Jasamarga Pandaan Tol	90,71
4	Bogor Outer Ring Road	11,00	PT Marga Sarana Jabar	55,00
5	Semarang-Solo	72,64	PT Trans Marga Jateng	73,91
6	Surabaya-Mojokerto	36,30	PT Marga Nujyasumo Agung	55,00
7	Gempol-Pasuruan	34,20	PT Transmarga Jatim Pasuruan	98,09
8	Cengkareng-Kunciran	14,20	PT Marga Kunciran Cengkareng	76,20
9	Kunciran-Serpong	11,20	PT Marga Trans Nusanantara	60,00
10	Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	61,70	PT Jasamarga Kualanamu Tol	55,00
11	Solo – Ngawi	90,10	PT Solo Ngawi Jaya	59,99
12	Ngawi - Kertosono	87,02	PT Ngawi Kertosono Jaya	59,99
13	Cinere-Serpong	10,14	PT Cinere Serpong Jaya	55,00
TOTAL		459,8		

Pada tahun 2015 Jasa Marga menambah hak pengusahaan jalan tol sepanjang 187,26 KM dengan mengakuisisi Ruas Jalan Tol Solo – Ngawi (90,10 km), Jalan Tol Ngawi – Kertosono (87,02 Kilometer) dan Jalan Tol Cinere - Serpong (10,14 Kilometer). Akuisisi Ruas Jalan Tol Solo – Ngawi – Kertosono merupakan langkah nyata Jasa Marga mendukung pemerintah melakukan *debottlenecking* dalam pembangunan Tol Trans Jawa sedangkan akuisisi Ruas Jalan Tol Cinere – Serpong merupakan langkah strategis perseroan yang menjadi kunci tersembungnya JORR 2.

Selain itu, sesuai dengan rencana kerja tahun 2015 Perseroan berhasil mengoperasikan Ruas Jalan Tol Gempol – Pandaan sepanjang 13,6 Kilometer. Jalan Tol Gempol-Pandaan terkoneksi dengan Jalan Tol Gempol – Pasuruan (Sisi timur) dan Jalan Tol Surabaya – Gempol (Sisi Utara) sehingga diharapkan jalan tol ini dapat mengurai kemacetan serta mempersingkat waktu tempuh dari Surabaya menuju Malang atau sebaliknya.

Sampai dengan 31 Desember 2015 besaran penyerapan investasi Anak Perseroan dalam rangka investasi pengembangan jalan tol baru sebesar Rp 16,83 Triliun. Penyerapan investasi ini digunakan untuk pembangunan jalan tol baru dan investasi aset operasional. Rincian serapan capex tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Anak Perusahaan	Serapan Capex (Rp triliun)
1.	PT Jasamarga Bali Tol	1,82
2.	PT Marga Lingkar Jakarta	2,00
3.	PT Jasamarga Pandaan Tol	1,18
4.	PT Marga Sarana Jabar	0,89
5.	PT Trans Marga Jateng	3,92
6.	PT Marga Nujyasumo Agung	2,80
7.	PT Transmarga Jatim Pasuruan	1,09
8.	PT Marga Kunciran Cengkareng	0,92
9.	PT Marga Trans Nusanantara	0,80
10.	PT Jasamarga Kualanamu Tol	0,09
11.	PT Solo Ngawi Jaya	1,06
12.	PT Ngawi Kertosono Jaya	0,18
13.	PT Cinere Serpong Jaya	0,01
TOTAL		16,83

Sampai dengan akhir tahun 2015 jika dibandingkan pada 2014, progres masing-masing proyek jalan tol baru adalah sebagai berikut:

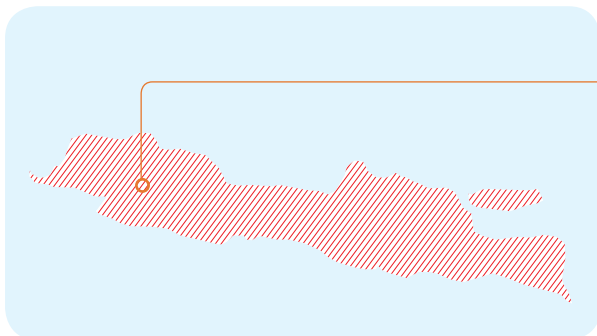
JALAN TOL BOGOR OUTER RING ROAD (PT MARGA SARANA JABAR)

Bogor Outer Ring Road		Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
			2014	2015	2014	2015
Seksi 1	Sentul-Kedung Halang	3,85	100,0	100,0	100,0	100,0
Seksi 2A	Kedung Halang-Kedung Badak	1,95	100,0	100,0	100,0	100,0
Seksi 2B	Kedung Badak-Yasmin	2,20	-	-	-	-
Seksi 3	Yasmin-Darmaga	3,00	-	-	-	-
Total		11,00				

Jalan Tol Bogor Outer Ring Road dengan panjang 11 km merupakan jalan tol yang dioperasikan oleh PT Marga Sarana Jabar.

BORR menghubungkan Jalan Tol Jagorawi dengan Kota Bogor. Perekonomian Kota Bogor yang tumbuh cukup signifikan membutuhkan infrastruktur jalan untuk memudahkan pergerakan barang dan jasa di kota tersebut. Melihat potensi tersebut Perseroan optimis BORR akan mempunyai prospek yang bagus dimasa yang akan datang.

Rencana pengoperasian BORR dibagi menjadi empat seksi dimana Seksi 1 Sentul-Kedung Halang sepanjang 3,85 km telah dioperasikan sejak akhir tahun 2009 dan Seksi 2A Kedung Halang-Kedung Badak sepanjang 1,95 km telah beroperasi pada pertengahan tahun 2014. Sementara itu, Seksi 2B sampai dengan 31 Desember 2015 masih dalam proses pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi direncanakan dimulai pada tahun 2016 dan beroperasi pada tahun 2017 sedangkan Seksi 3 dilakukan studi kelayakan terkait usulan Walikota Bogor untuk *re-alignment* ke arah Salabenda (Parung).



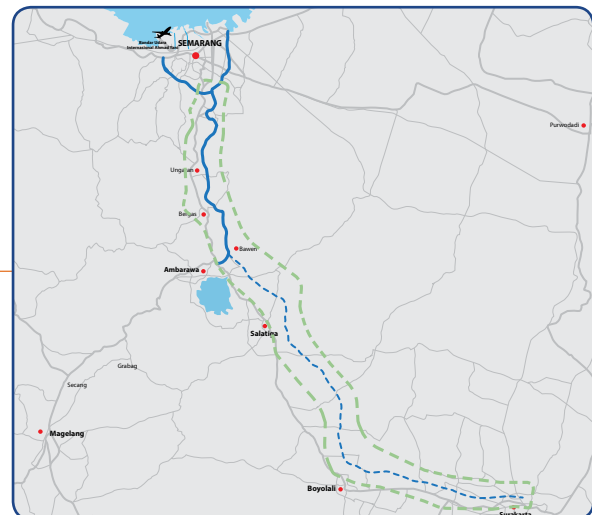
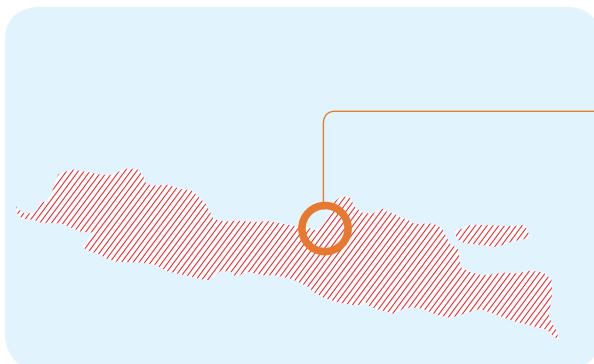
JALAN TOL SEMARANG-SOLO (PT TRANS MARGA JATENG)

Semarang-Solo		Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
			2014	2015	2014	2015
Seksi 1	Semarang-Ungaran	10,80	100,0	100,0	100,0	100,0
Seksi 2	Ungaran-Bawen	12,30	100,0	100,0	100,0	100,0
Seksi 3	Bawen – Salatiga	17,50	89,51	98,21	-	16,88
Seksi 4	Salatiga Boyolali	24,40	45,73	46,93	-	-
Seksi 5	Boyolali - Solo	7,64	27,68	40,48	-	-
Total		72,64				

Jalan Tol Semarang-Solo dengan panjang 72,64 km merupakan jalan tol yang dioperasikan oleh PT Trans Marga Jateng.

Jalan tol ini menghubungkan Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah dengan Kota Solo. Jalan Tol Semarang-Solo merupakan bagian jaringan dari Jalan Tol Trans Jawa yang merupakan jalur bisnis dimana nantinya menghubungkan dua kota besar Jakarta dan Surabaya. Ruas ini juga terkoneksi dengan Jalan Tol Semarang yang sudah dioperasikan oleh Perseroan sejak tahun 1983, sehingga beroperasinya Jalan Tol Semarang-Solo akan meningkatkan volume kendaraan pada Jalan Tol Semarang. Melihat posisi Jalan Tol Semarang Solo yang cukup strategis dalam mendukung perekonomian di Indonesia dan berdampak positif pada Ruas Tol Semarang maka Perseroan berupaya untuk dapat menyelesaikan dan mengoperasikan ruas tersebut sesuai jadwal.

Rencana pengoperasian Jalan Tol Semarang-Solo dibagi menjadi lima seksi dimana Seksi 1 Semarang-Ungaran sepanjang 10,80 km telah dioperasikan sejak tahun 2011 dan Seksi 2 Ungaran-Bawen sepanjang 12,30 km telah beroperasi pada awal tahun 2014. Sementara itu, Seksi 3 Bawen-Salatiga direncanakan beroperasi pada tahun 2016 dan Seksi 4 Salatiga – Boyolali sepanjang 24,40 km serta Seksi 5 Boyolali – Solo sepanjang 7,64 km masih dalam proses pembebasan lahan.



JALAN TOL SURABAYA-MOJOKERTO (PT MARGA NUJYASUMO AGUNG)

Surabaya-Mojokerto		Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
			2014	2015	2014	2015
Seksi 1A	Waru-Sepanjang	2,30	100,0	100,0	97,57	100,0
Seksi 1B	Sepanjang-Western Ring Road	4,30	85,27	89,67	29,16	57,08
Seksi 2	Western Ring Road-Driyorejo	5,10	41,84	64,29	-	-
Seksi 3	Driyorejo-Krian	6,10	63,27	69,85	-	-
Seksi 4	Krian-Mojokerto	18,47	100,0	100	60,64	98,30
Total		36,27				

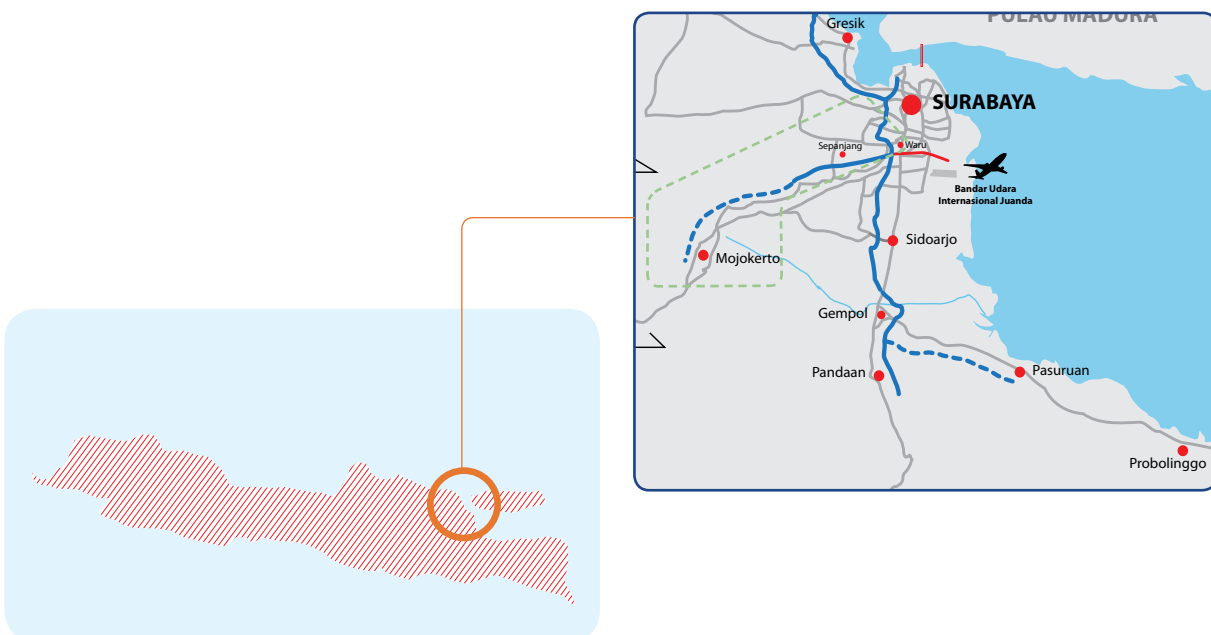
Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dengan panjang 36,27 km merupakan jalan tol yang dioperasikan oleh PT Marga Nujyasumo Agung.

Sama halnya dengan Jalan Tol Semarang-Solo, Jalan Tol Surabaya-Mojokerto juga merupakan jaringan dari Jalan Tol Trans Jawa yang merupakan jalur bisnis dimana nantinya menghubungkan dua kota besar Jakarta dan Surabaya. Ruas ini juga terkoneksi dengan Jalan Tol Surabaya-Gempol yang sudah dioperasikan oleh Perseroan sejak tahun 1986, sehingga beroperasinya Jalan Tol Surabaya-Mojokerto akan meningkatkan volume kendaraan pada Jalan Tol Surabaya-Gempol. Melihat posisi Jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang cukup strategis dalam mendukung perekonomian di Indonesia dan berdampak positif

pada Jalan Tol Surabaya-Gempol maka Perseroan berupaya untuk dapat menyelesaikan dan mengoperasikan ruas tersebut.

Rencana pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dibagi menjadi lima seksi dimana Seksi 1A Waru-Sepanjang sepanjang 2,30 km telah dioperasikan sejak tahun 2011, Seksi Sepanjang-WRR dan Seksi Krian-Mojokerto dalam tahap pembebasan lahan dan konstruksi, serta Seksi WRR-Krian dalam tahap pembebasan lahan.

Pada awal tahun 2016 Perseroan akan mengoperasikan Seksi 4 Krian-Mojokerto sepanjang 18,50 km, sedangkan Seksi 1B, 2, dan 3 akan dioperasikan tahun 2017.



JALAN TOL JORR W2 UTARA (PT MARGA LINGKAR JAKARTA)

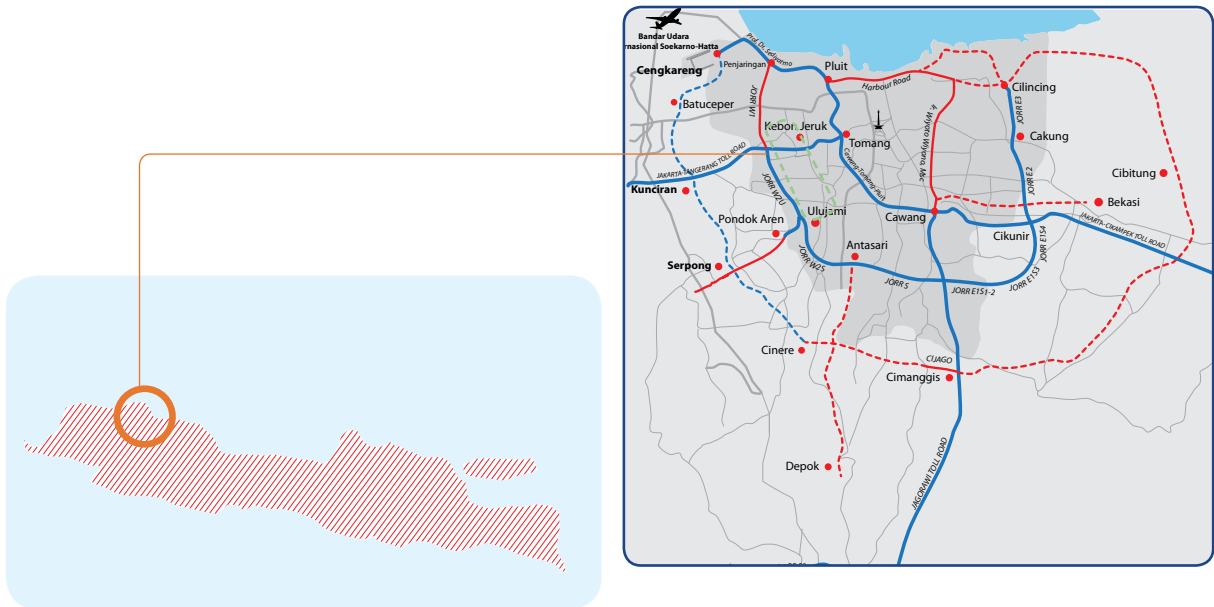
JORR W2 Utara		Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
			2014	2015	2014	2015
Seksi 1	Kebon Jeruk-Ciledug	5,70	100,0	100,0	100,0	100,0
Seksi 2	Ciledug-Ulujami	2,00	100,0	100,0	100,0	100,0
Total		7,70				

JORR W2 Utara dengan panjang 7,70 km merupakan jalan tol yang dioperasikan oleh PT Marga Lingkar Jakarta.

JORR W2 Utara merupakan missing link pada Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road yang sebelumnya sudah lebih dahulu dioperasikan oleh Perseroan. Keberadaan JORR W2 Utara sangat strategis dalam mengurangi kemacetan di Jalan Tol Dalam Kota

Jakarta, karena JORR W2 Utara merupakan penghubung Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Tangerang sehingga beban kemacetan di Jalan Tol Dalam Kota Jakarta dapat berkurang dengan beroperasinya ruas ini.

Jalan Tol JORR W2 Utara sudah sepenuhnya beroperasi sejak pertengahan tahun 2014.



JALAN TOL GEMPOL-PASURUAN (PT TRANSMARGA JATIM PASURUAN)

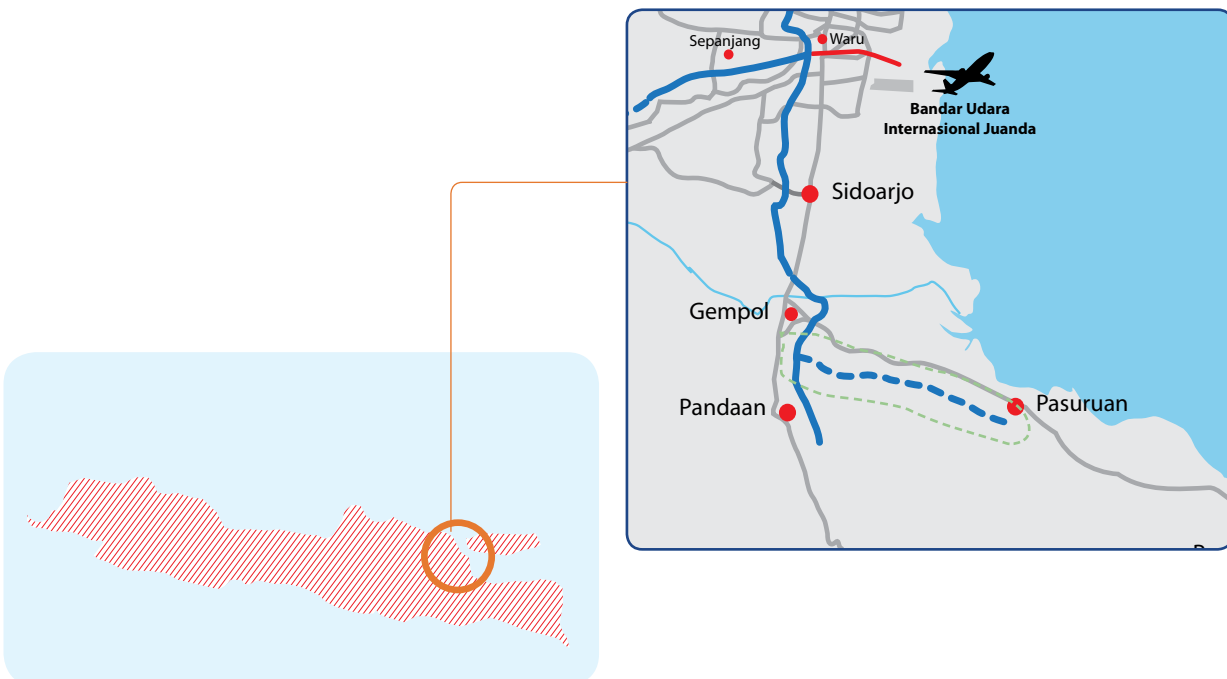
Gempol-Pasuruan		Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
			2014	2015	2014	2015
Seksi 1	Gempol-Rembang	13,90	95,69	97,60	81,33	85,80
Seksi 2	Rembang-Pasuruan	8,10	69,19	71,91	-	-
Seksi 3	Pasuruan-Grati	12,15	-	-	-	-
Total		34,15				

Jalan Tol Gempol-Pasuruan dengan panjang 34,15 km merupakan jalan tol yang dioperasikan oleh Transmarga Jatim Pasuruan.

Jalan Tol Gempol-Pasuruan merupakan bagian jaringan dari Jalan Tol Trans Jawa yang merupakan jalur bisnis dimana nantinya menghubungkan Kota Surabaya ke jalur penyeberangan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Ruas ini juga terkoneksi dengan Jalan Tol Surabaya-Gempol yang sudah dioperasikan oleh Perseroan sejak tahun 1986, sehingga beroperasinya Jalan Tol Gempol-Pasuruan akan meningkatkan volume kendaraan pada Jalan Tol Surabaya-Gempol.

Melihat posisi Jalan Tol Gempol-Pasuruan yang cukup strategis dalam mendukung perekonomian di Indonesia dan berdampak positif pada Jalan Tol Surabaya-Gempol maka Perseroan berupaya untuk dapat menyelesaikan dan mengoperasikan ruas tersebut.

Pada tahun 2017, Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi 1 Gempol-Rembang sepanjang 13,90 km dan Seksi 2 Rembang-Pasuruan sepanjang 8,10 km akan akan dioperasikan secara bersamaan sedangkan Seksi 3 Pasuruan-Grati masih dalam tahap pembebasan lahan.



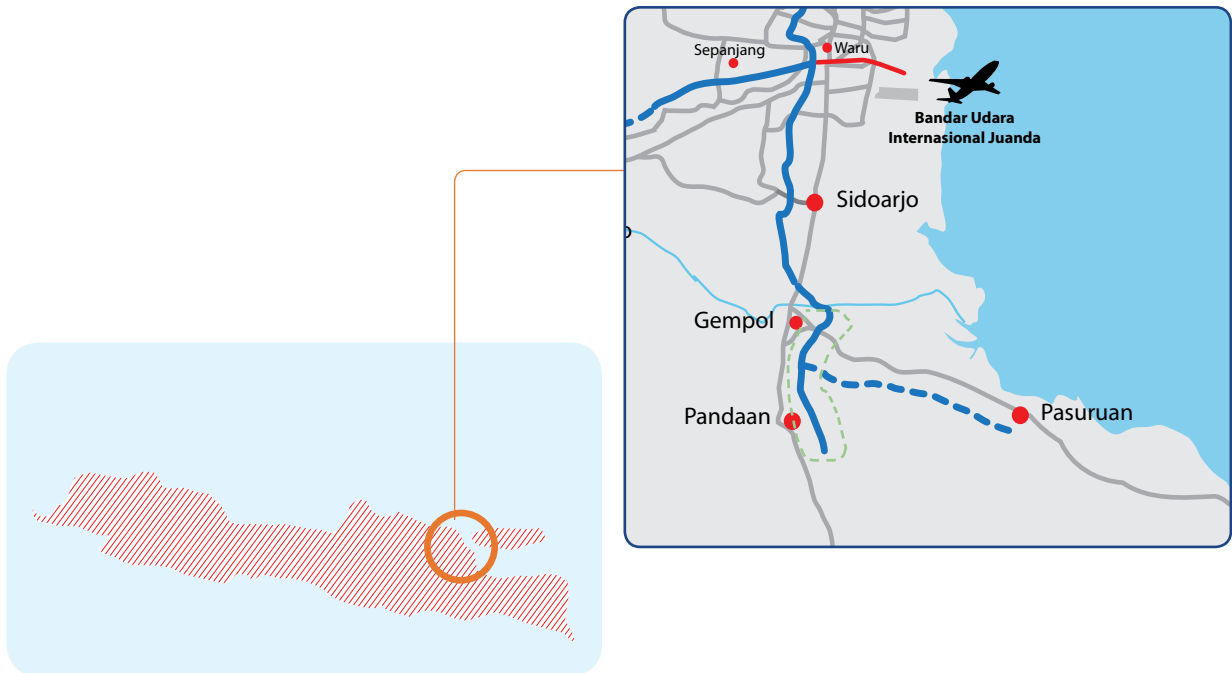
JALAN TOL GEMPOL-PANDAAN (PT JASAMARGA PANDAAN TOL)

Gempol-Pandaan	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2014	2015	2014	2015
Gempol-Pandaan	13,60	99,03	100	-	-

Jalan Tol Gempol Pandaan dengan panjang 13,61 km merupakan jalan tol yang dioperasikan oleh PT Jasamarga Pandaan Tol.

Gempol-Pandaan merupakan ruas jalan tol yang menghubungkan kota Surabaya dengan kota Malang. Karakter Jalan Tol Gempol-Pandaan seperti Jalan Tol Jagorawi, hal ini disebabkan karena Kota Malang merupakan kota wisata bagi

para warga Surabaya seperti halnya puncak pada kota Bogor. Beroperasinya Jalan Tol Gempol-Pandaan akan mengurangi beban kemacetan di Jalan Arteri terutama pada akhir pekan. Perseroan berhasil mengoperasikan Jalan Tol Gempol Pandaan pada tahun 2015.



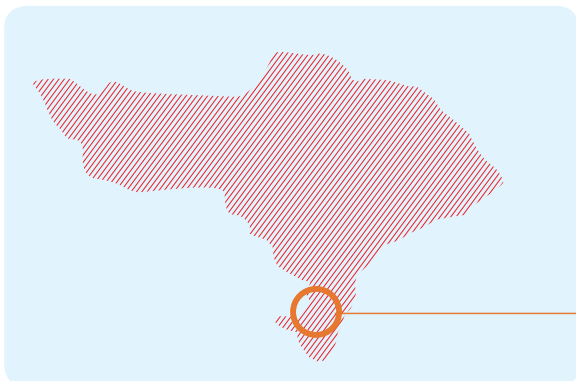
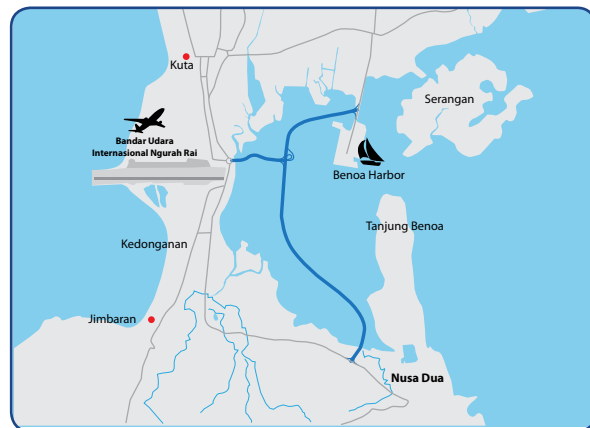
JALAN TOL NUSA DUA-NGURAH RAI BENOA (BALI MANDARA) (PT JASAMARGA BALI TOL)

Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2014	2015	2014	2015
Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Bali Mandara)	10,00	100,0	100,0	100,0	100,0

Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Bali Mandara) dengan panjang 10,00 km merupakan jalan tol yang dioperasikan oleh PT Jasamarga Bali Tol.

Bali Mandara merupakan jalan tol pertama yang ada di Pulau Bali. Dengan tingkat kemacetan yang sangat tinggi di Bali, Perseroan berharap beroperasinya Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa

dapat mengurangi kepadatan lalu lintas yang ada. Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa telah beroperasi pada tahun 2013 dimana pembangunannya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 tahun. Hal ini membuktikan bahwa Perseroan mampu membangun jalan tol secara cepat jika tidak ada kendala pembebasan lahan seperti yang telah ditunjukkan pada pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa.



JALAN TOL KUNCIRAN - CENGKARENG (PT MARGA KUNCIRAN CENGKARENG)

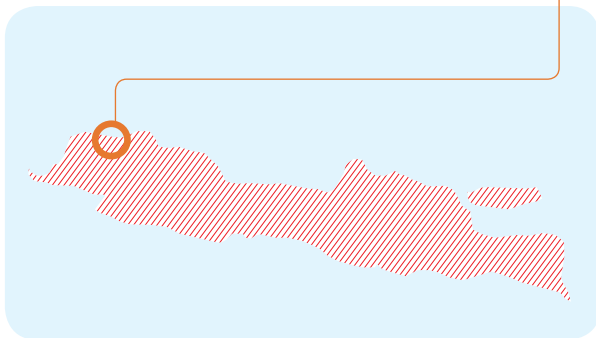
Kunciran-Cengkareng	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2014	2015	2014	2015
Kunciran-Cengkareng	14,20	18,86	18,86	-	-

Jalan Tol Kunciran-Cengkareng dengan panjang 14,20 km merupakan Jalan Tol yang dioperasikan oleh PT Marga Kunciran Cengkareng.

Jalan Tol Kunciran-Cengkareng merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 yang berlokasi di wilayah barat kota Jakarta.

Jalan Tol Kunciran-Cengkareng berfungsi mendistribusikan lalu lintas kota Jakarta yang sudah sangat padat.

Sampai saat ini Jalan Tol Kunciran-Cengkareng masih dalam proses pembebasan lahan



JALAN TOL KUNCIRAN -SERPONG (PT MARGA TRANS NUSANTARA)

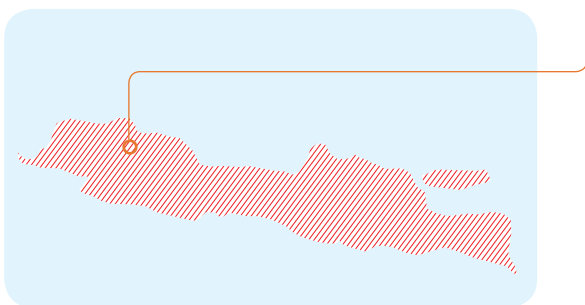
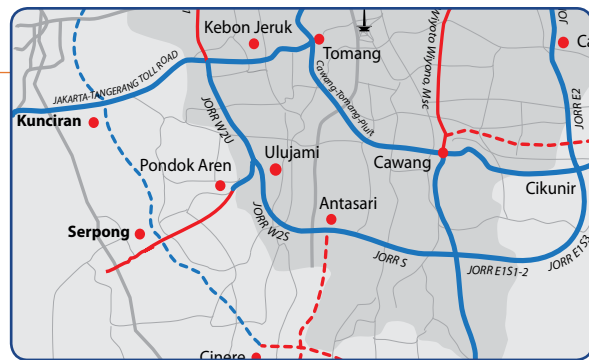
Kunciran-Serpong	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2014	2015	2014	2015
Kunciran-Serpong	11,20	26,3	54,54	-	-

Jalan Tol Kunciran-Serpong dengan panjang 11,20 km merupakan jalan tol yang dioperasikan oleh PT Marga Trans Nusantara.

berfungsi mendistribusikan lalu lintas kota Jakarta yang sudah sangat padat.

Jalan Tol Kunciran-Serpong merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 yang berlokasi di wilayah barat kota Jakarta. Bersama Jalan Tol Kunciran-Cengkareng, Jalan Tol Kunciran-Serpong

Sampai saat ini Jalan Tol Kunciran-Serpong masih dalam proses pembebasan lahan.

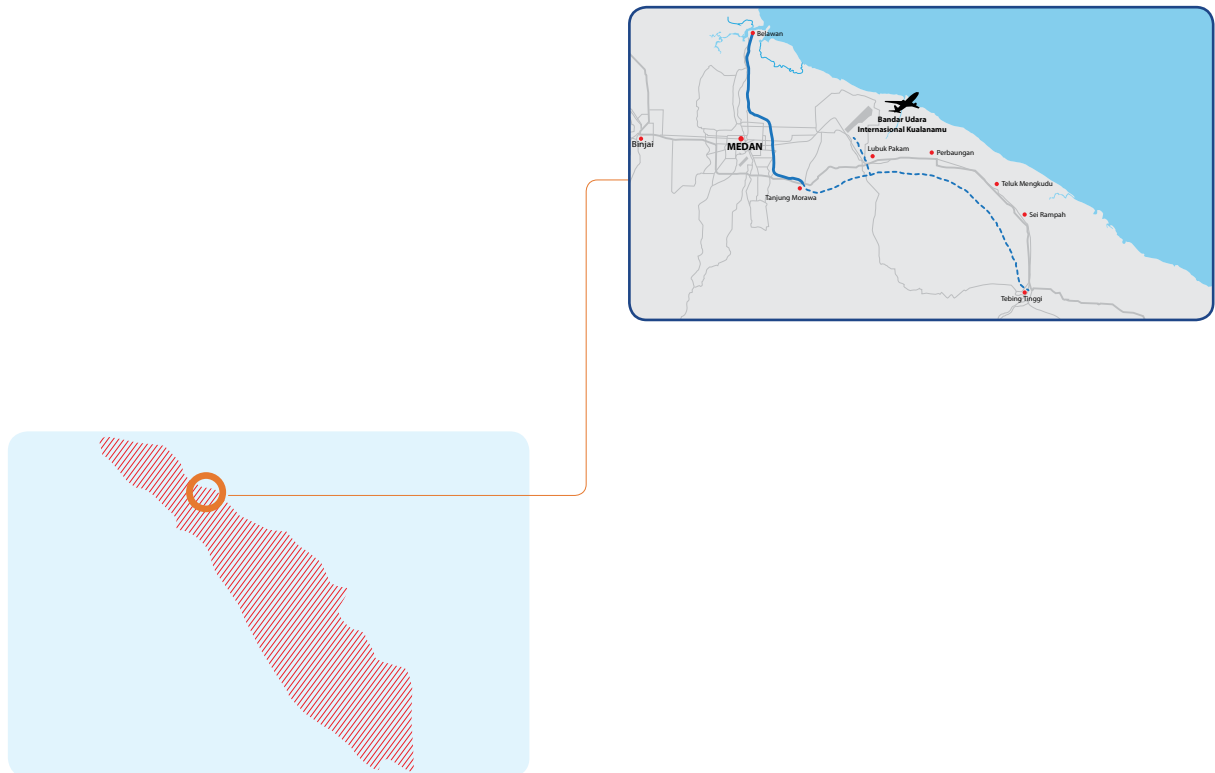


JALAN TOL MEDAN-KUALANAMU-TEBING TINGGI (PT JASAMARGA KUALANAMU TOL)

Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi		Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
			2014	2015	2014	2015
Seksi 1 dan 2	Tj. Morawa –Perbarakan -Kualanamu	17,8	-	83,00	-	28,70
Seksi 3	Perbarakan-Lubuk Pakam	5,0	-	86,00	-	15,66
Seksi 4	Lubuk Pakam-Perbaungan	12,8	-	97,17	-	1,30
Seksi 5	Perbaungan-Teluk mengkudu	9,6	-	100,00	-	0,85
Seksi 6	Teluk Mengkudu-Sei Rampah	7,8	-	92,22	-	0,51
Seksi 7	Sei Rampah-Tebing Tinggi	9,2	-	39,55	-	-
TOTAL		61,7				

Pada tahun 2014, Perseroan telah memperoleh konsesi Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT). MKTT menghubungkan kota Medan dan Bandara Kualanamu serta Tebing Tinggi. Perseroan optimis ke depan MKTT mampu mempercepat distribusi barang, jasa dan memudahkan pergerakan manusia yang ingin menuju Bandara maupun Kota Tebing Tinggi.

Pada saat ini MKTT masih dalam proses pembebasan Lahan dan Perseroan menargetkan pada tahun 2017 seluruh ruas dapat sepenuhnya beroperasi.



JALAN TOL SOLO - NGAWI (PT SOLO NGAWI JAYA)

Solo - Ngawi	Panjang (km)	Pengadaan Tanah		Konstruksi	
		2014	2015	2014	2015
Solo - Mantingan	56,05	-	91,71	-	13,86
Mantingan - Ngawi	34,2	-	92,80	-	14,02
TOTAL	90,10				

Jalan Tol Solo - Ngawi dengan panjang 90,10 km merupakan jalan tol yang dioperasikan oleh PT Solo Ngawi Jaya.

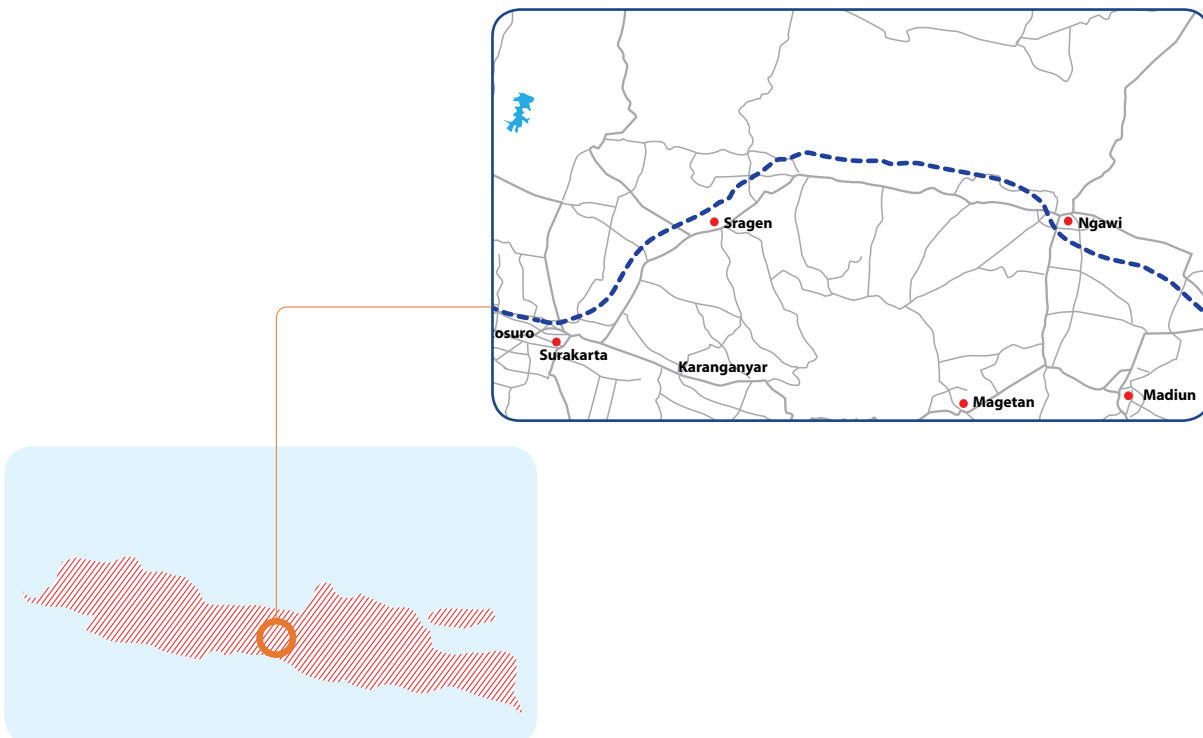
Jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Jawa Timur yang melewati wilayah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Ngawi. Jalan tol tersebut menghubungkan ruas Jalan Tol Semarang-Solo yang sudah beroperasi sebagian dengan Jalan Tol Ngawi-Kertosono.

Tahun 2015 Perseroan mengakuisisi ruas jalan tol ini yang merupakan langkah nyata Jasa Marga mendukung pemerintah

melakukan *debottlenecking* dalam pembangunan Tol Trans Jawa.

Dengan dibangunnya jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan dalam melayani lalu lintas di koridor Trans Jawa, meningkatkan produktifitas melalui pengurangan biaya distribusi.

Sampai dengan tahun 2015 Jalan Tol Solo – Ngawi sudah memasuki tahap konstruksi dan ditargetkan untuk beroperasi secara keseluruhan pada tahun 2017, khusus Seksi Solo – IC Seragen sepanjang 24 km direncanakan akan beroperasi pada akhir tahun 2016.



JALAN TOL NGAWI - KERTOSONO (PT NGAWI KERTOSONO JAYA)

Solo - Ngawi	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2014	2015	2014	2015
Ngawi – Magetan	20,00	-	94,16	-	3,43
Magetan – Madiun	8,45	-	95,22	-	3,67
Madiun – Kertosono	58,57	-	81,66	-	2,85
TOTAL	87,02				

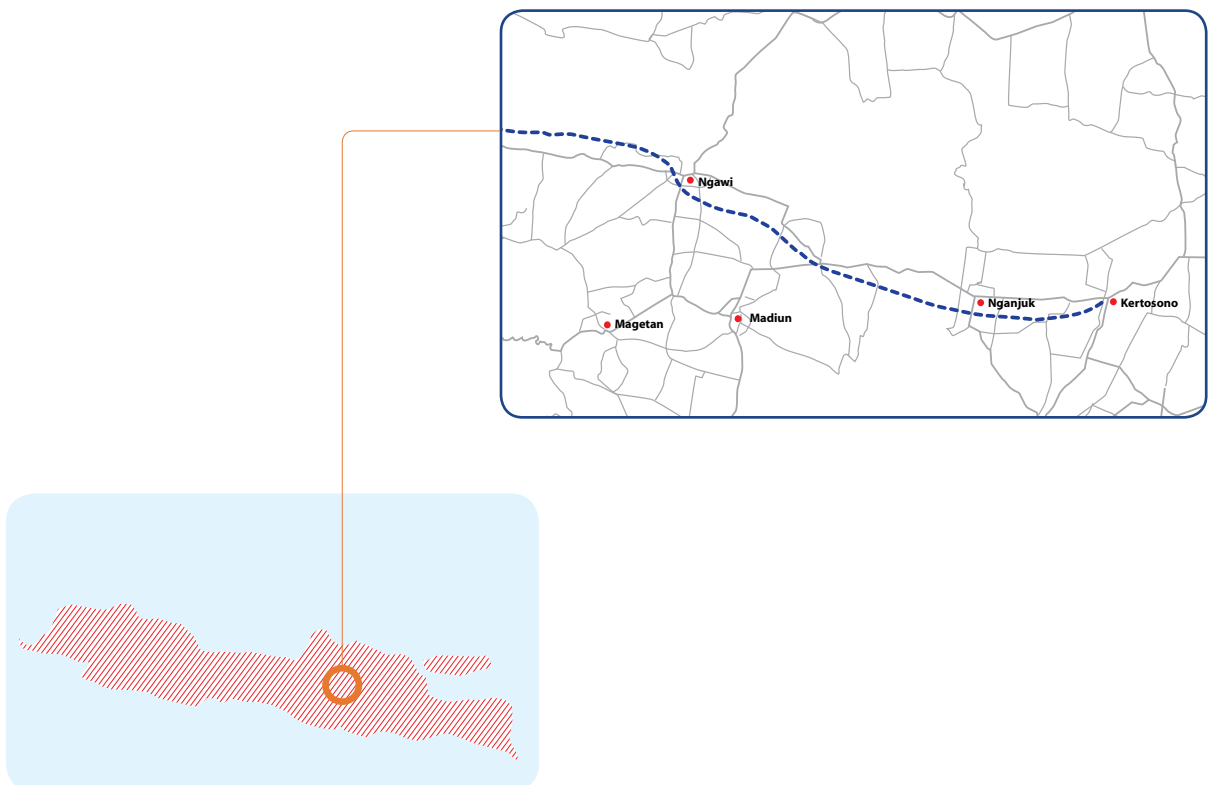
Jalan Tol Solo - Ngawi dengan panjang 87,02 km merupakan jalan tol yang dioperasikan oleh PT Ngawi Kertosono Jaya.

Jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang melewati wilayah Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Jalan tol ini merupakan lanjutan dari ruas Jalan Tol Solo - Ngawi.

Sama halnya dengan Jalan Tol Solo – Ngawi, jalan tol ini diakuisisi pada Tahun 2015 sebagai langkah nyata Perseroan mendukung

Pemerintah melakukan *debottlenecking* dalam pembangunan Tol Trans Jawa dan dengan dibangunnya jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan dalam melayani lalu lintas di koridor Trans Jawa, meningkatkan produktivitas melalui pengurangan biaya distribusi serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Sampai dengan tahun 2015 Jalan Tol Ngawi - Kertosono sudah memasuki tahap konstruksi dan ditargetkan untuk beroperasi secara keseluruhan pada tahun 2017.



JALAN TOL CINERE - SERPONG (PT CINERE SERPONG JAYA)

Cinere-Serpong	Panjang (km)	Pengadaan Tanah (%)		Konstruksi (%)	
		2014	2015	2014	2015
Serpong-Pamulang	6,73	-	-	-	-
Pamulang-Cinere	3,41	-	-	-	-
TOTAL	10,14				

Jalan Tol Cinere - Serpong dengan panjang 10.14 km merupakan jalan tol yang dioperasikan oleh PT Cinere Serpong Jaya.

Perseroan mengakuisisi jalan tol ini sebagai langkah strategis perseroan yang menjadi kunci tersembungnya JORR 2 mengingat sebagian besar Ruas JORR 2 sudah dimiliki oleh perseoan. Jalan Tol ini berfungsi mendistribusikan lalu lintas kota Jakarta yang sudah sangat padat.

Sampai dengan tahun 2015 Jalan Tol Cinere - Serpong masih dalam tahap pembebasan lahan dan ditargetkan untuk beroperasi secara keseluruhan pada tahun 2018.



Target Kinerja Tahun 2016

Pada tahun 2016 Perseroan tetap berkomitmen untuk mendukung rencana pembangunan pemerintah dengan melaksanakan pembangunan jalan tol. Target investasi tahun 2016 untuk pengembangan jalan tol sebesar Rp 11,34 Triliun dengan rincian sebagai berikut:

Anak Perseroan	Biaya Investasi 2016 (Rp miliar)
PT Jasamarga Bali Tol	37,35
PT Marga Lingkar Jakarta	20,97
PT Jasamarga Pandaan Tol	0,93
PT Marga Sarana Jabar	106,45
PT Trans Marga Jateng	1.547,73
PT Marga Nujuyasumo Agung	810
PT Trans Marga Jatim Pasuruan	1.040,78
PT Marga Kunciran Cengkareng	299,00
PT Marga Trans Nusantara	1.404,41
PT Jasamarga Kualanamu Tol	1.441,11
PT Solo – Ngawi	2.863,37
PT Ngawi - Kertosono	1.608,99
PT Cinere Serpong	164,67
	11.345,83

Pada tahun 2016 Perseroan menargetkan pengoperasian 3 Ruas jalan tol dengan rincian sebagai berikut:

Ruas Jalan Tol	Panjang (km)
1. Semarang - Solo	
Seksi 3: Bawen - Salatiga	17,50
2. Solo-Sragen	
Kartasuro - Sragen	35,5
3. Surabaya-Mojokerto	
Seksi 4: Krian-Mojokerto	18,5
Total	71,5

Pengembangan Usaha Lain

Pengembangan Usaha Lain dilaksanakan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat strategi pengembangan dan pengoperasian Jalan Tol dan untuk meningkatkan Pendapatan Usaha dengan memanfaatkan Sumber Daya Perusahaan. Adapun kebijakan Perseroan dalam pengembangan usaha lain adalah sebagai berikut :

- Pengembangan usaha lain merupakan maksimalisasi aset *tangible* maupun *intangible* Perusahaan;
- Pemilihan bidang usaha harus secara strategis mendukung strategi pengembangan usaha dan strategi pengoperasian jalan tol;
- Usaha lain tersebut harus memiliki kelayakan finansial lebih tinggi dari pengembangan usaha jalan tol, kecuali dengan pertimbangan strategis Perseroan.

Pengembangan Proyek Properti Oleh PT Jasamarga Properti

PT Jasamarga Properti didirikan berdasarkan akta notaris No. 2 tanggal 15 Januari 2013 dari Notaris Windalina, S.H., merupakan entitas Anak Perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang Pembangunan, Perdagangan dan Jasa Terkait Properti. Tujuan pendirian PT Jasamarga Properti adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan melalui optimalisasi aset Perseroan dan pengembangan properti di koridor jalan tol.

Sesuai dengan arahan Perseroan, kebijakan strategis PT Jasamarga Properti dalam pengembangan properti adalah :

- Portofolio investasi adalah sebesar 70% pada bisnis yang mendukung bisnis utama Jasa Marga (pengembangan properti pada koridor jalan tol) dan 30% pada bisnis yang mendukung program Pemerintah (program hunian murah bagi masyarakat).
- Tingkat kelayakan setiap proyek properti yang dikembangkan IRR adalah minimal sebesar 20%.
- Pengembangan properti dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Selain itu PT Jasamarga Properti telah mulai melaksanakan pembelian tanah untuk pengembangan proyek properti selanjutnya di daerah Bogor, Depok dan Ciledug, Jakarta, pembelian gedung dan unit perkantoran di Jakarta, serta pembelian unit condotel di Bali dan Manado.

Proyek-proyek yang dikembangkan oleh PT Jasamarga Properti sepanjang tahun 2015 adaah sebagai berikut :

No.	Nama Proyek	Progres 2015	Keterangan
1	Cilangkap Residence	Terdiri dari 11 unit rumah dengan luas keseluruhan lahan yang dikembangkan seluas 1.820 m2. Sampai dengan akhir 2015 sebanyak 6 unit rumah sudah terjual.	Pengembangan proyek properti pada koridor jalan tol
2	Office Graha Simatupang Wing 2B	Terdiri dari 11 lantai perkantoran dengan luas bangunan 2.985 m2. Tingkat okupansi untuk office rent 100%. Virtual Office telah dioperasikan penuh sejak 2 Februari 2015.	Pengembangan proyek properti pada koridor jalan tol
3	Green Residence Sidoarjo	Terdiri dari 383 unit rumah diatas lahan seluas 60.981 m2. Sampai dengan akhir tahun 2015 telah terjual 190 unit rumah dan 3 rumah usaha.	Pengembangan proyek hunian rumah murah
4	Perumahan LIPI Residence Sawangan	Terdiri dari 800 unit rumah diatas lahan seluas 180.000 m2. Pelaksanaan pengembangan dilakukan bekerjasama dengan PT Alka, saat ini dalam proses pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan rumah contoh	Pengembangan proyek hunian rumah murah
5	Pengembangan Gedung Perkantoran Ciledug	Lahan yang akan dikembangkan seluas 1.433 m2 untuk gedung perkantoran	Pengembangan proyek properti pada koridor jalan tol
6	Pengembangan Lahan Pandaan	Akan dikembangkan untuk perumahan sebanyak 295 unit rumah diatas lahan seluas lahan 65.000 m2	Pengembangan proyek properti pada koridor jalan tol
7	Pengembangan Lahan Apartemen Pandu Raya, Bogor	Direncanakan akan dikembangkan untuk Apartemen bekerjasama dengan PT HK Realtindo	Pengembangan proyek properti pada koridor jalan tol
8	Pengembangan Lahan JORR W2 Utara	Rencana pengembangan gedung perkantoran di atas lahan seluas 14.000 m2. Saat ini pembebasan lahan telah mencapai 7.125 m2	Pengembangan proyek properti pada koridor jalan tol
9	Pembelian Properti di Jakarta, Bali, dan Manado	34 Unit Condotel di Tamansari Jivva (Bali) 22 Unit Condotel di Tamansari Lagoon (Manado) 2 Unit Office Space di Tamansari Parama (Jakarta)	Mendukung strategi pengembangan bisnis quick win (pengembalian investasi cepat)

Pengembangan Jasa Pemeliharaan Jalan Tol Oleh PT Jasa Layanan Pemeliharaan

PT Jasa Layanan Pemeliharaan, semula bernama PT Sarana Marga Utama didirikan berdasarkan akta notaris No. 41 tanggal 26 Agustus 1988 dari notaris Abdul Latif S.H., diakuisi Perseroan pada tahun 2010, merupakan entitas Anak Perusahaan Perseroan yang didirikan dalam rangka pengusahaan jasa konstruksi dan pemeliharaan jalan tol, jasa sewa peralatan tol, serta jasa sewa kendaraan. Tujuan akuisisi PT Jasa Layanan Pemeliharaan adalah untuk bersinergi dengan bisnis jalan tol untuk mencapai sasaran strategis perusahaan dalam pemenuhan standar pelayanan minimum.

Sesuai dengan arahan Perseroan, kebijakan strategis PT Jasa Layanan Pemeliharaan dalam pengembangan properti adalah :

- Portofolio usaha adalah sebesar 90% pekerjaan sipil (konstruksi dan pemeliharaan) dan 10% usaha pendukung lainnya (peralatan tol, *asphalt miing plant* dan sewa kendaraan).
- Aktif mencari peluang usaha pada Perseroan dan entitas anak perusahaan jalan tol.
- Mendukung pencapaian standar pelayanan minimum jalan tol
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pengembangan Jasa Layanan Operasional Jalan Tol Oleh PT Jasa Layanan Operasi

PT Jasa Layanan Operasi didirikan berdasarkan akta notaris No. 7 tanggal 21 Agustus 2015 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., merupakan entitas anak Perseroan yang bergerak dalam bidang jasa layanan operasi jalan tol baik layanan transaksi maupun layanan lalu lintas Jalan Tol. Tujuan pendirian PT Jasa Layanan Operasi adalah untuk bersinergi dengan bisnis jalan tol untuk penyediaan dan pengembangan jasa layanan operasional untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.

Sesuai dengan arahan Perseroan, kebijakan strategis PT Jasa Layanan Operasi dalam pengembangan properti adalah :

- Mengintegrasikan biaya investasi jalan tol dan biaya operasi jalan tol baru.
- Menciptakan nilai tambah secara holistik bagi kepentingan Jasa Marga, industri Jalan Tol dan Pemerintah.

Pada tahap awal, PT Jasa Layanan Operasi memberikan pelayanan operasional pada Cabang Perseroan dan Anak Perusahaan Jalan Tol Perseroan. Dengan dibentuknya PT Jasa Layanan Operasi diharapkan Perseroan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jalan tol dan meningkatkan efisiensi terhadap beban operasional perseroan.

Pengembangan Tempat Istirahat Dan Pelayanan (TIP)

TIP merupakan bagian dari Usaha Lain yang dapat diusahakan Perseroan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dan merupakan salah satu standar pelayanan minimum yang harus disediakan Perseroan. Dalam pengusahaan TIP, Perseroan dapat mengoperasikan sendiri atau bekerjasama dengan Investor.

Pengoperasian TIP secara mandiri dilaksanakan oleh Unit Bisnis Rest Area yang didirikan pada 31 Agustus 2012. Unit Bisnis Rest Area saat ini mengelola TIP Km 88 A dan B Jalan Tol Purbaleunyi serta TIP Km 226 A Palikanci. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna Jalan Tol dan meningkatkan pendapatan usaha lain, Perseroan telah memulai proyek pengembangan masjid ikonik dan area komersial pada TIP Km 88 B Jalan Tol Purbaleunyi.

Pengembangan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Oleh PT Pilar Sinergi Bumn Indonesia

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia didirikan berdasarkan akta notaris No. 21 tanggal 2 Oktober 2015 dibuat oleh Mala Mukti, S.H. LL.M., dalam rangka pengusahaan bisnis transportasi, perdagangan dan pengembangan wilayah.

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia bersama dengan konsorsium perusahaan China mendirikan PT Kereta Cepat Indonesia China berdasarkan akta notaris No. 86 tanggal 16 Oktober 2015 dibuat oleh Mala Mukti, S.H. LL.M., dalam rangka pembangunan dan pengoperasian kereta cepat dari Jakarta ke Bandung.

Selain pengembangan bisnis transportasi, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia juga akan mengembangkan kawasan properti di daerah Walini, Halim, Manggarai, Karawang, dan Gede Bage/ Tegal Luar. Besarnya penyertaan Perseroan pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia adalah sebesar 12% dari modal disetor.



06

Pengelolaan Human Capital



- TRANSFORMASI HUMAN CAPITAL : MEMBANGUN KINERJA
- EFEKTIVITAS ORGANISASI
- PERENCANAAN DAN REKRUTMEN SDM
- PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KINERJA KARYAWAN
- SISTEM MANAJEMEN KINERJA DAN KOMPETENSI KARYAWAN
- PENGEMBANGAN KARIR KARYAWAN BERBASIS KOMPETENSI
- KESEJAHTERAAN KARYAWAN
- HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KEBEBASAN BERSERIKAT
- MANFAAT PASCA KERJA KARYAWAN
- PENGELOLAAN TENAGA ALIH DAYA
- PRODUKTIVITAS KARYAWAN
- PENGHARGAAN TERKAIT PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL
- PENGELOLAAN TRANSFORMASI HUMAN CAPITAL
- BIAYA SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan Human Capital



Untuk mewujudkan Visi dan Misi Perseroan menjadi Perusahaan Terkemuka, telah dilakukan “TRANSFORMASI HUMAN CAPITAL” secara terintegrasi dan menyeluruh sebagai bagian dari “TRANSFORMASI ORGANISASI PERSEROAN”

Tahun 2015 sebagai bagian dari Tahap II Transformasi Organisasi dan Sistem Human Capital Jasa Marga dengan tema Produktivitas, menjadi periode diterapkannya Sistem Human Capital yang terintegrasi dan menyeluruh, diantaranya Sistem Manajemen Kinerja dan Kompetensi, Sistem Remunerasi dan Sistem Manajemen Karir.

Transformasi *Human Capital*

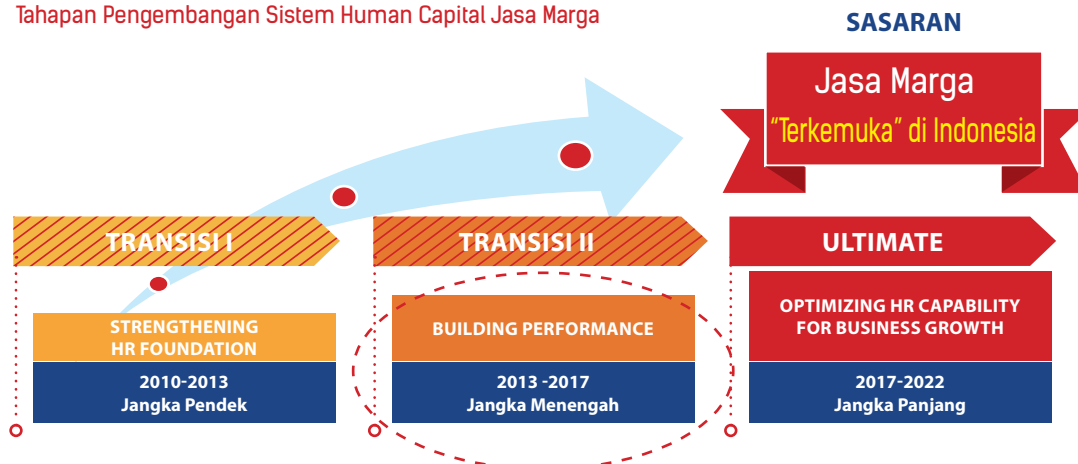
Di tahun 2015 beberapa capaian di bidang pengelolaan human capital diantaranya implementasi pengembangan kompetensi

karyawan berdasarkan Human Capital Development Plan, pengembangan sistem seleksi manajemen karir, review sistem pelayanan kesehatan karyawan, dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan kompetensi.

Dengan paradigma baru, yaitu memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal insani (*human capital*) maka Perseroan menempatkan SDM sebagai subyek yang harus dikelola dengan baik agar mampu menjadi modal untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam jangka panjang secara berkelanjutan.

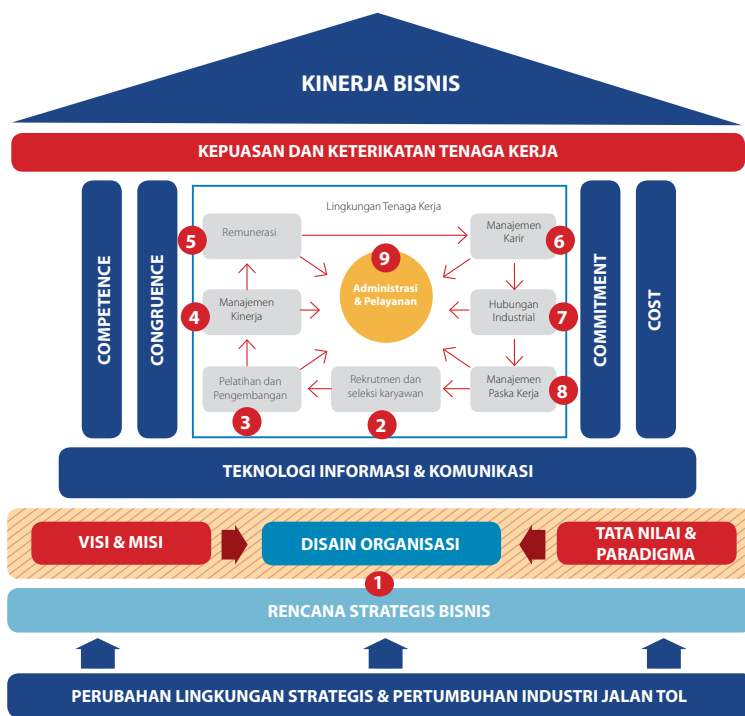
Dalam pengelolaan human capital, Perseroan berpedoman pada Rencana Strategis Sistem SDM 2010-2022 dengan tahapan pengembangan sebagaimana bagan berikut:

Tahapan Pengembangan Sistem Human Capital Jasa Marga



Perseroan membangun sistem human capital berbasis kompetensi (*competency based human resources management*) dengan model 9 (Sembilan) Proses Strategis Sistem Human Capital sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Direksi No. 39/KPTS/2014 tanggal 3 Maret 2014, yang terdiri dari Desain Organisasi, Rekrutmen dan Seleksi Karyawan, Pelatihan dan Pengembangan, Manajemen Kinerja, Sistem Remunerasi, Manajemen Karir dan Talent, Hubungan Industrial dan Manajemen Paska Kerja, yang Terintegrasi dan didukung dengan Sistem Teknologi Informasi sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut:

Sembilan Proses Strategis Sistem Human Capital Jasa Marga



- 4 Pilar Sistem HC:**
1. Kompetensi (*Competence*)
 2. Kesesuaian (*Congruence*)
 3. Komitmen (*Commitment*)
 4. Biaya (*Cost*)

- 9 Proses Strategis Sistem HC:**
1. Desain Organisasi
 2. Rekrutmen & Seleksi Karyawan
 3. Pelatihan & Pengembangan
 4. Manajemen Kinerja
 5. Remunerasi
 6. Manajemen Karir
 7. Hubungan Industrial
 8. Manajemen Paska Kerja
 9. Administrasi dan Pelayanan

Efektivitas Organisasi

Sebagai Perseroan yang terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan rangkaian dari Transformasi Organisasi dan Sistem Human Capital, pengembangan organisasi dibutuhkan untuk dapat terus beradaptasi dengan kondisi eksternal maupun internal Perusahaan dan terus bertahan, terutama dalam pencapaian rencana strategis jangka panjang. Untuk itu di tahun 2015, sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2014 yang mengangkat 1 (satu) orang Direktur baru, Perseroan melakukan penyesuaian struktur organisasi makro dengan penambahan Direktorat baru yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang membawahi Divisi Legal and Compliance, Divisi Risk and Quality Management dan Unit

Community Development Program sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor 70/KPTS/2014 tanggal 1 April 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi.

Efektivitas pengelolaan Perseroan juga ditunjang dengan pembagian tugas dan tanggung jawab seluruh karyawan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kompetensi dari masing-masing fungsi yang ada. Pengelompokan jabatan di Perseroan terbagi atas Kelompok Jabatan Struktural, Fungsional Keahlian, Fungsional Staf dan Operasional. Pada masing-masing jabatan yang ada di Perseroan telah dilakukan job evaluation untuk mengetahui nilai jabatan berdasarkan faktor *ability, process* dan *outcome*.

KELOMPOK JABATAN

STRUKTURAL

Jabatan	SK 41/2014	
	Grade	Sub Grade
Corporate Secretary/ Head/Vice President/ General Manager/ Kepala Unit Bisnis	E	1,2,3
Assistant Vice President/ Senior Manager/ Deputy General Manager	1	A,B,C
Manager	2	A,B,C

FUNGSIONAL KEAHLIAN

Jabatan	SK 41/2014	
	Grade	Sub Grade
Senior Advisor		2
Advisor/ Senior Auditor	F	3
Senior Specialist/ Auditor/ Pengajar Profesional	1	C
Specialist/ Junior Auditor/ Pengajar Profesional Junior	2	C

FUNGSIONAL STAF

Jabatan	SK 41/2014	
	Grade	Sub Grade
President Dir. Secretary/ Senior Treasurer	2	C
Assistant Manager/ Assistant Auditor/ Director Secretary/ Treasurer	3	C
Senior Officer/ Assistant Treasurer/ VP/GM/ Head Secretary	4	C
Officer/ Inspector/ Toll Gate Officer/ Security/ Facility Officer	5	
Driver/Messenger	M	

OPERASIONAL

Jabatan	SK 41/2014	
	Grade	Sub Grade
Kepala Gerbang Tol	O1	A, B, C
Kepala Shift Pengumpulan Tol/Kepala Shift Layanan Jalan Tol/Kepala Shift Jasa Marga Traffic Information Center/Petugas Informasi dan Komunikasi	O2	A, B, C
"Pengumpul Tol/ Petugas Layanan Jalan Tol/ Petugas Rescue Truck Multiguna/ Petugas Ambulans"	O3	A/B/ C/D
Pengemudi Kendaraan Layanan Jalan Tol/Rescue/ Ambulans	P	

Survei Keterikatan Karyawan (*Employee Engagement Survey*)

Untuk mengetahui efektivitas kebijakan pengelolaan karyawan terhadap sistem dan kebijakan Perseroan, maka dilakukan survey engagement untuk mengetahui tingkat komitmen dan kepuasan karyawan. Dari hasil survey, pada tahun 2015 ini diperoleh Engagement Ratio Index (ERI) sebesar 1.97 atau turun dari tahun 2014 sebesar 2.17. Penurunan disebabkan karena pada tahun 2015 terjadi penurunan index ERI secara global (hasil riset Gallub) sementara di perseroan penurunan index ditandai dengan naiknya elemen disengaged (low satisfaction dan low commitment) yaitu kurangnya komitmen dalam mengeluarkan ide karena masalah sarana dan kurangnya komitmen dalam menjalankan tata nilai. Kedepannya manajemen perlu mendorong produktivitas terlaksana untuk seluruh tingkat jabatan di Perseroan.

Perencanaan dan Rekrutmen SDM

PERENCANAAN SDM (MANPOWER PLANNING)

Dalam rangka perwujudan Visi dan Misi serta sasaran strategis jangka panjang, terkait dengan penggunaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien serta dalam koridor rasio efisiensi dan produktivitas yang diharapkan, maka ditetapkan perkiraan jumlah karyawan maupun pekerja maksimum dalam jangka panjang dalam suatu dokumen yang disebut *Manpower Planning*. Untuk itu telah dilakukan kajian *Manpower Planning* sebagai acuan dalam penyusunan *Staffing Plan* dan Rencana Rekrutmen sampai dengan 10 (sepuluh) tahun ke depan.

REKRUTMEN SDM

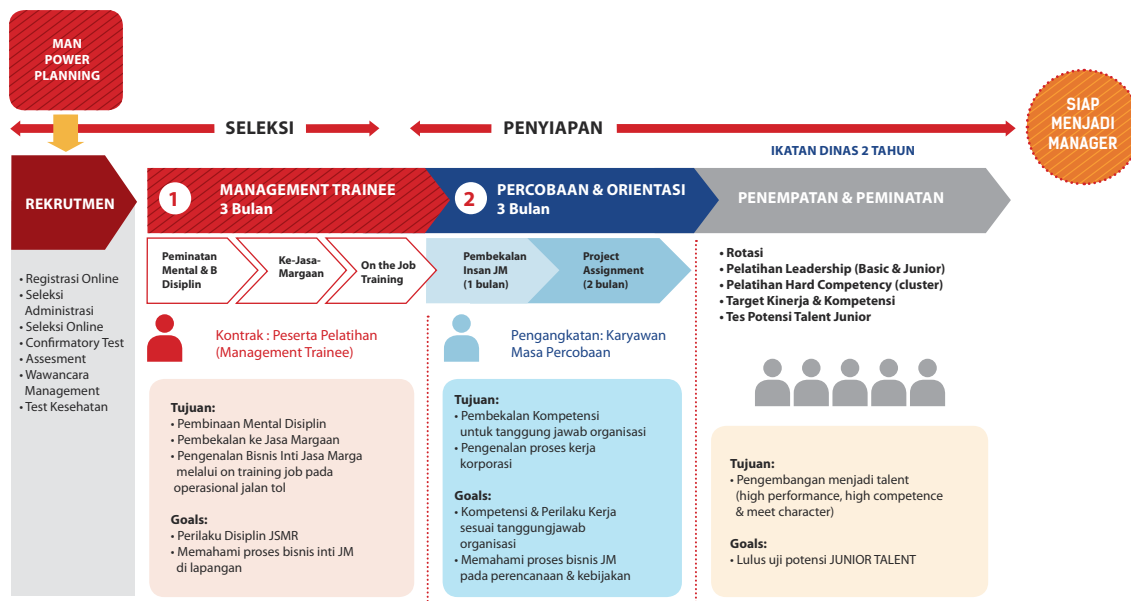
Manajemen telah menetapkan sistem rekrutmen karyawan baru yang menegaskan azas keterbukaan, obyektif, dan selektif. Program rekrutmen yang dilakukan Perseroan memiliki tujuan strategis untuk mendapatkan talenta terbaik yang ada di bursa tenaga kerja, dimana bukan hanya untuk regenerasi *leader* Jasa Marga masa depan, namun juga untuk menunjang pencapaian sasaran bisnis Perseroan dalam pengembangan ruas jalan tol baru.

Rekrutmen Sarjana dari eksternal maupun internal Perseroan dengan berbagai latar belakang pendidikan dilakukan dengan dasar kebutuhan *manpower planning* dan untuk memenuhi kebutuhan jabatan Assistant Manager ke atas dengan pertimbangan:

- Pengembangan ruas jalan tol baru melalui Anak Perusahaan Jalan Tol
- Pengembangan usaha lain terkait jalan tol melalui Anak Perusahaan Usaha Lain
- Pengembangan ruas potensial
- Pengganti karyawan pensiun

Dimana pada tahun 2015, Perseroan telah merekrut 94 (sembilan puluh empat) orang Sarjana yang telah menjalani program *management trainee* dan masa orientasi serta saat ini dalam proses ikatan dinas selama 2 (dua) tahun sebagai bagian dari Human Capital Development Plan. Selama masa ikatan dinas, telah dilakukan rotasi bagi karyawan baru ke unit-unit kerja Kantor Pusat, Cabang, Anak Perusahaan Jalan Tol dan Anak Perusahaan Usaha Lain untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan kesesuaian karakter dengan kebutuhan bisnis Perseroan.

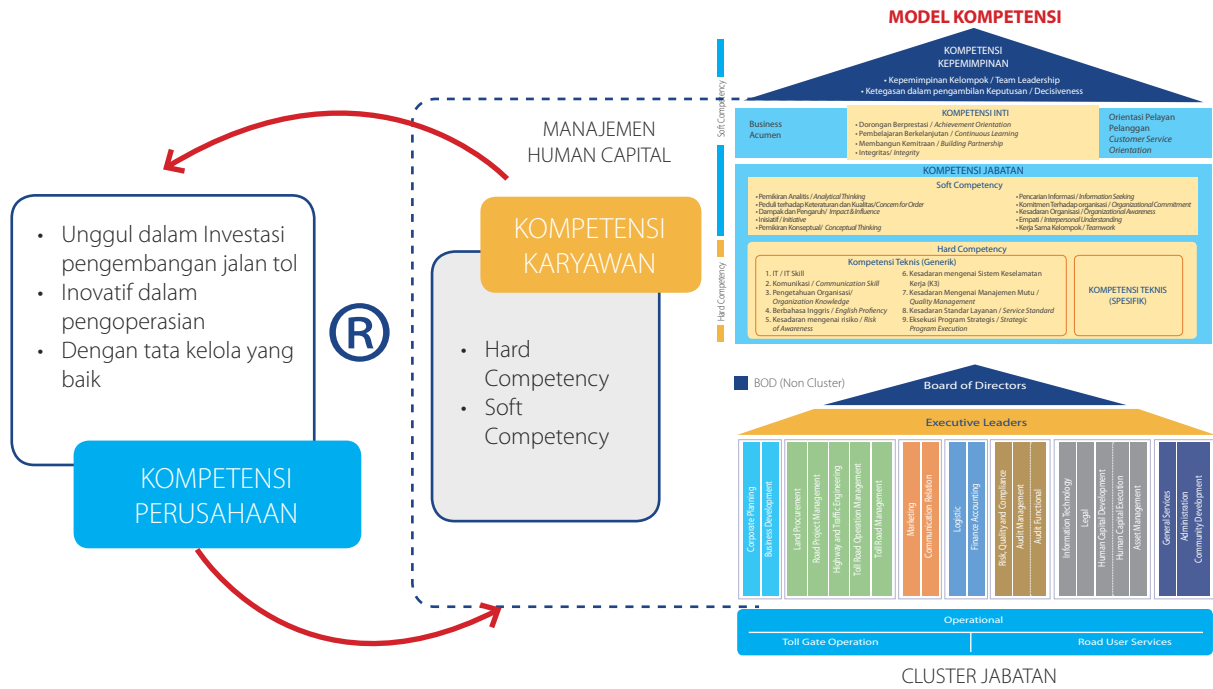
PROSES PENYIAPAN KARYAWAN BARU



Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Karyawan

Kompetensi Perseroan dan kompetensi karyawan memiliki keterkaitan, dimana kompetensi karyawan merupakan *cascading* dari kompetensi Perseroan

KETERKAITAN KOMPETENSI PERSEROAN DAN KARYAWAN



MODEL KOMPETENSI PENGEMBANGAN SDM

Sebagai wujud implementasi konsep *Competency Based Human Resources Management (CBHRM)* maka pengembangan SDM berdasarkan pada peningkatan kompetensi karyawan. Untuk itu, Perseroan telah merumuskan model kompetensi yang dilengkapi dengan Kamus Kompetensi yang merupakan kombinasi *hard skill* dan *soft skill* yang harus dimiliki setiap individu berdasarkan kebutuhan kompetensi setiap unit. Kamus Kompetensi dituangkan dalam Keputusan Direksi No. 183/KPTS/2013 tanggal 24 Desember 2013.

MODEL KOMPETENSI HUMAN CAPITAL JASA MARGA



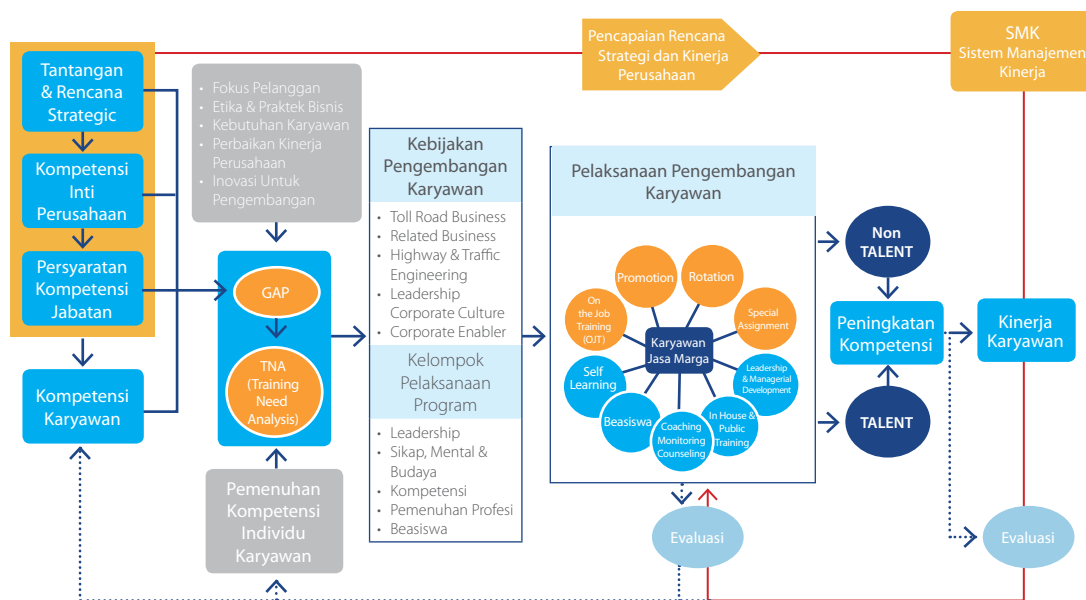
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KARYAWAN

Sejalan dengan upaya pencapaian target bisnis Perseroan di tahun 2015 dalam memperoleh konsesi 1.000 km dan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas Karyawan, Perseroan fokus dalam pencapaian *Key Performance Indicator* untuk pemenuhan kompetensi teknis dan non teknis. Melalui Unit Jasa Marga Development Center (JMDC) program-program pengembangan kompetensi karyawan melalui pendidikan dan

pelatihan terus dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan 3 (tiga) fokus utama yaitu:

- Pengembangan kompetensi teknis dan non teknis karyawan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- Program mandiri setara pelatihan, diantaranya kegiatan *knowledge sharing*, studi banding (*benchmarking*), penulisan jurnal, dan lainnya.
- Beasiswa kader.

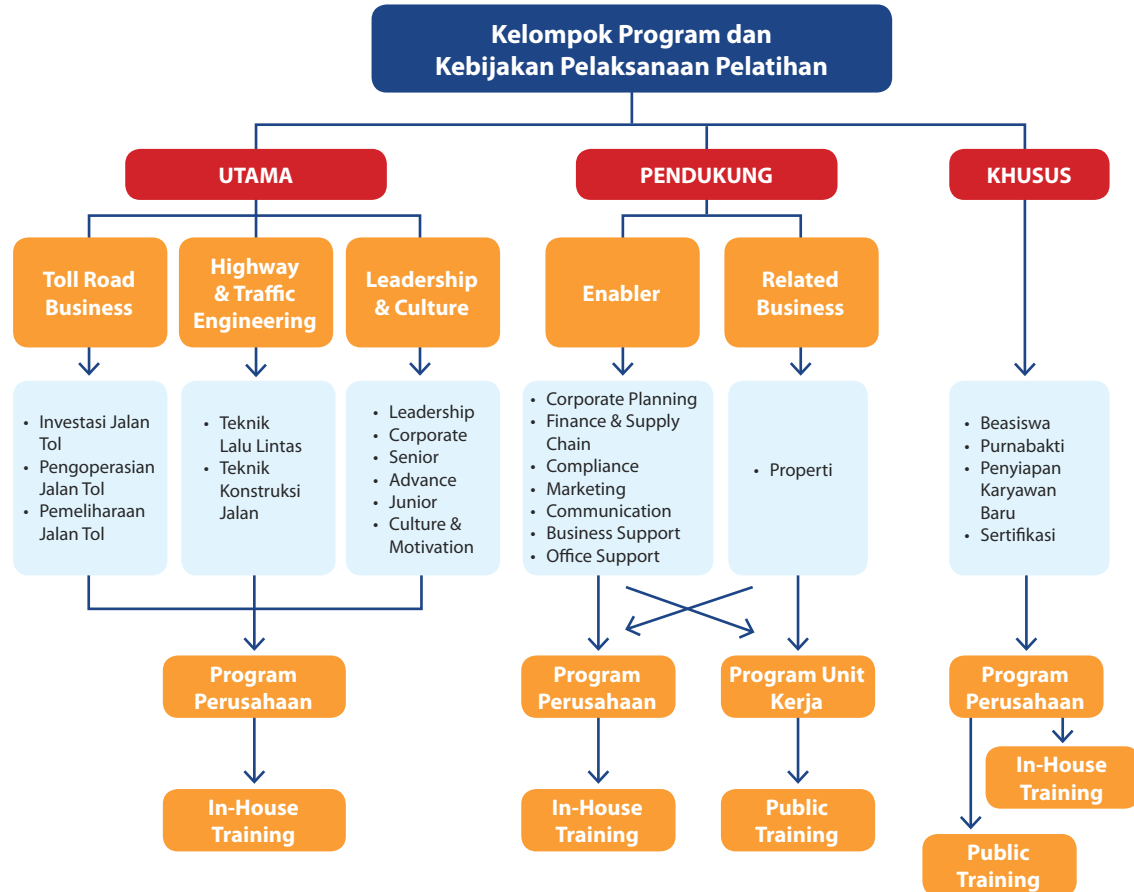
SISTEM PENGEMBANGAN DAN PEMBELAJARAN KARYAWAN



Sistem pengembangan kompetensi dan pembelajaran karyawan dilakukan dengan memprioritaskan kompetensi inti Perusahaan, yaitu menjadi Perusahaan yang Unggul dalam Investasi Pengembangan Jalan Tol dan Inovatif dalam Pengoperasian Jalan Tol dengan Tata Kelola yang Baik. Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan program

pendidikan dan pelatihan yaitu dengan 5 (lima) akademi: Toll Road Business, Related Business, Highway and Traffic Engineering, Leadership and Culture dan Corporate Enabler. Susunan dan prioritas program pelatihan dikelompokkan dalam program *Core Business* dan *Non Core (Support)* dan Program Khusus.

KELOMPOK PROGRAM DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



Program Pelatihan pada tahun 2015 difokuskan pada Kelompok Program *Core Business* yaitu *Toll Road Business* dan *Highway - Traffic Engineering* yang telah diimplementasikan dalam *Program Project Management Workshop* serta *Leadership and Culture* melalui program *Directorship*.

Beberapa program pengembangan kompetensi karyawan, yaitu:

1. Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi Keahlian Petugas Operasional
Merupakan proses standardisasi Kompetensi Karyawan Operasional untuk menjadi Profesi Petugas Operasional Jalan Tol Indonesia sesuai standar kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan kajian transformasi Unit JMDC untuk menjadi LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) berskala nasional.
2. Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi Keahlian Pembangunan Tol
Standardisasi diimplementasikan melalui program *Project Management Workshop* dengan tema "Peningkatan Quality &

Cost Control Untuk Efisiensi Investasi" yang telah dilaksanakan untuk mempersiapkan kader Pemimpin Proyek Jalan Tol maupun pemangku jabatan inti Proyek Jalan Tol yang profesional. Sertifikasi dilaksanakan melalui kerjasama dengan para ahli dan lembaga profesional yang berpengalaman seperti Persatuan Insinyur Indonesia, Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia dan lembaga profesional lainnya.

3. Program *Directorship* Tahun 2015

Merupakan program untuk mempersiapkan kader yang siap menduduki jabatan Direktur dan Komisaris Anak perusahaan dan peningkatan kapabilitas Direktur Anak Perusahaan dan Komisaris yang menjadi bagian dari Program *Executive Leader Development*. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Prasetiya Mulya Business School.

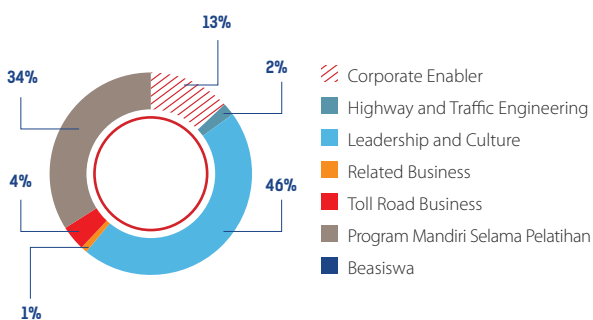
Selain pelatihan, Perseroan juga memberikan perhatian khusus pada bidang pendidikan karyawan yaitu dengan memberikan Beasiswa Magister di Luar Negeri untuk meningkatkan *intellectual & practical skill* karyawan yang diberikan kepada 4 (empat) orang Karyawan melalui Beasiswa Kader sebagai salah satu program pengembangan Future Leader Jasa Marga. Beasiswa yang diberikan ke University of Melbourne, University of Manchester, University of Queensland, dan University of New South Wales dimana proses pembelajaran ditargetkan akan selesai pada tahun 2016.

Selaras dengan program pengembangan kader dan untuk mewujudkan Rencana Strategis Perseroan, maka sejak tahun 2009 telah dilaksanakan program "Future Leader Jasa Marga" dengan Program Pengembangan *Leadership* yang terdiri dari 5 (lima) tingkatan program, yaitu *Basic Leadership, Junior Leadership, Advance Leadership, Senior Leadership* dan *Corporate Leadership*. Pada tahun 2015 Perseroan sudah menetapkan target hari pelatihan per karyawan, dengan realisasi sejumlah 6,5 hari pelatihan per karyawan. Jumlah hari pelatihan dan peserta pelatihan selama tahun 2015 sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

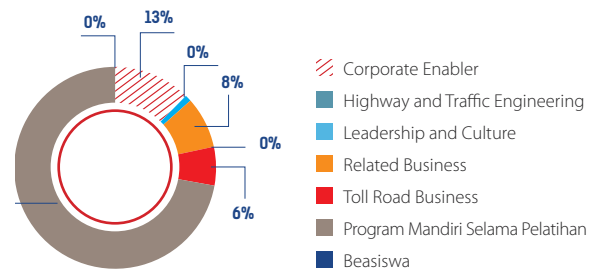
REALISASI PROGRAM DIKLAT 2014 – 2015

No	Uraian	2014			2015		
		Jumlah Hari Orang	Jumlah Peserta	Jumlah Program	Jumlah Hari Orang	Jumlah Peserta	Jumlah Program
1	Corporate Enabler	5.006	2026	243	4.321	1.651	209
2	Highway and Traffic Engineering	336	75	24	443	55	7
3	Leadership and Culture	4.519	1908	60	15.287	1088	30
4	Related Business	270	79	18	162	19	11
5	Toll Road Business	886	490	21	1.249	745	53
6	Program Mandiri Setara Pelatihan	7.890	6546	295	11.501	9.963	325
7	Beasiswa	-	0	4	-	4	4
		18.907	11.124	665	32.963	13.525	639

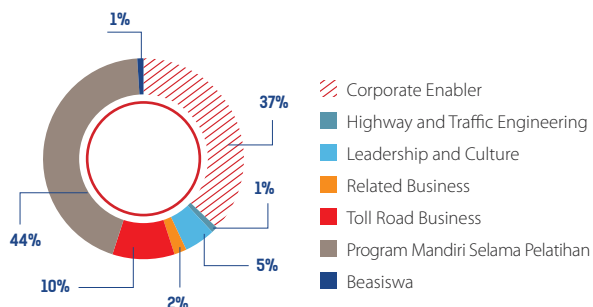
PELATIHAN BERDASARKAN JUMLAH HARI ORANG



PELATIHAN BERDASARKAN JUMLAH PESERTA



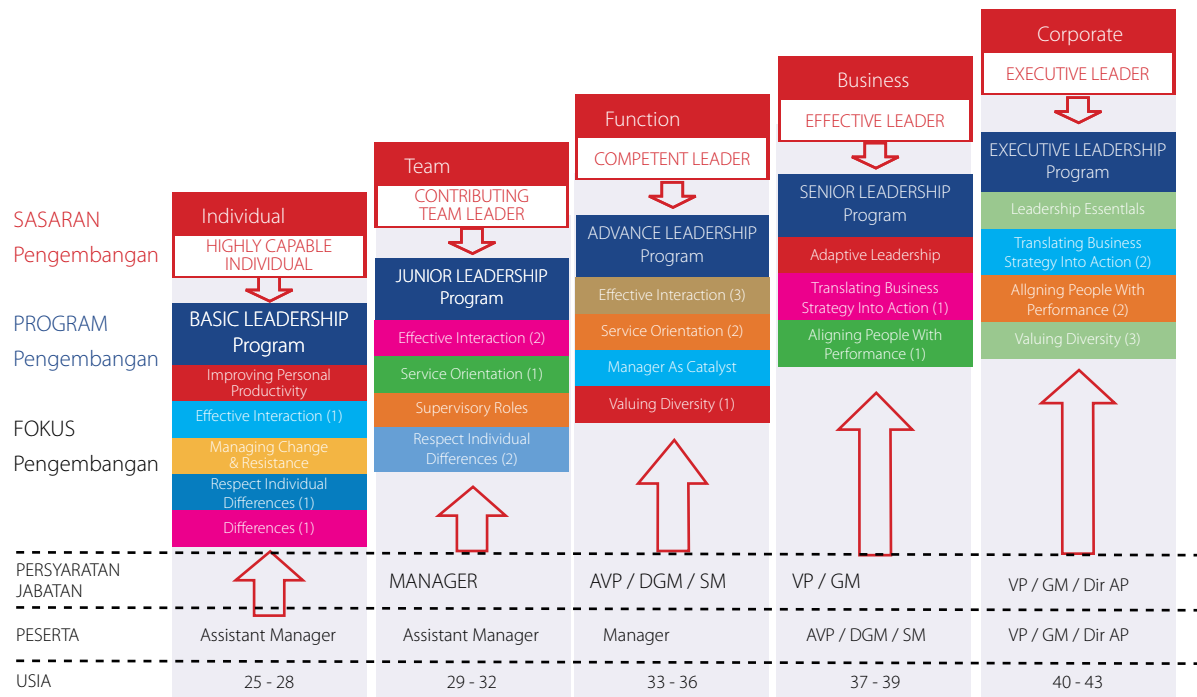
PELATIHAN BERDASARKAN JUMLAH PROGRAM



PENYIAPAN KADER PIMPINAN PERUSAHAAN

Jasa Marga mempersiapkan kader-kader pimpinan perusahaan melalui mekanisme *Talent Management System* dan *Leadership Development System* yang dilaksanakan secara berjenjang.

JASA MARGA LEADERSHIP DEVELOPMENT SYSTEM



Selama tahun 2015 telah dilaksanakan Pelatihan Junior Leadership 1 batch, Advance Leadership 1 batch dan pelatihan Directorship 2 batch.

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Perseroan telah mengikuti persyaratan dan tata cara yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

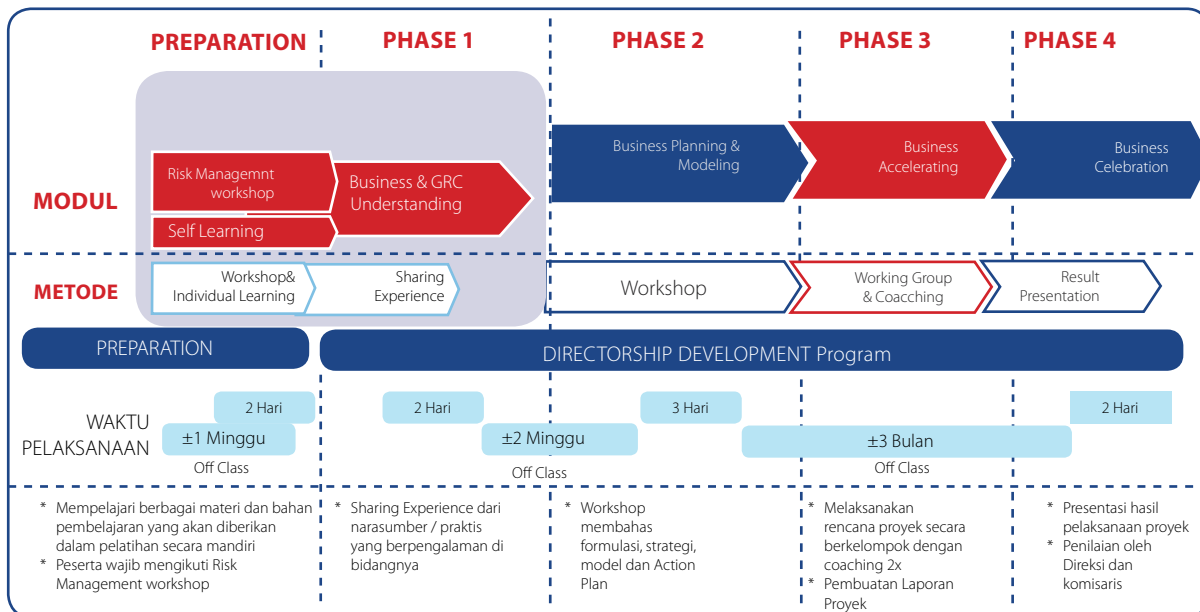
Anggota Direksi perseroan yang menjabat pada periode saat ini, 4 (empat) merupakan anggota Direksi yang sedang menjabat pada periode sebelumnya, 1 (satu) orang berasal dari pejabat

internal Perseroan yang berada satu tingkat dibawah Direksi serta 1 (satu) orang berasal dari eksternal.

Melalui proses seleksi yang dilaksanakan Direksi bersama dengan Dewan Komisaris. Perseroan memilih calon pemimpin yang dinilai mempunyai Personal Quality yang baik serta Pengalaman dan keahlian yang memadai untuk menduduki jabatan pimpinan setingkat di bawah Direksi dan Direktur Anak Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi anggota Direksi perusahaan di masa yang akan datang yang bersumber dari kalangan pejabat internal Perseroan.

Dengan mengidentifikasi 14 posisi kunci untuk Executive Leader dan 41 jabatan Direktur Anak Perusahaan, Perseroan mengembangkan kompetensi calon Direksi Perusahaan melalui program *Directorship*.

DIRECTORSHIP PROGRAM



Sistem Manajemen Kinerja dan Kompetensi Karyawan

Sistem manajemen kinerja berfungsi untuk memastikan bahwa karyawan melakukan pekerjaan yang sekaligus memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran perusahaan secara maksimal sesuai tujuan jabatan dan sasaran kinerja kunci (*key performance indicator*).

Perseroan menerapkan sistem manajemen kinerja dari 2 sisi, yaitu evaluasi pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan pencapaian kompetensi, supaya penilaian lebih adil dimana Karyawan tidak hanya diukur dari target kinerjanya (KPI) namun juga dihargai usahanya dalam mencapai kinerja tersebut (kompetensi). Sistem Manajemen Kinerja dibedakan untuk karyawan operasional dan non operasional yang didasarkan atas karakteristik pekerjaannya, dimana untuk karyawan operasional dilaksanakan secara harian (sesuai jadwal tugas) dan untuk karyawan non operasional dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun.

SISTEM MANAJEMEN KINERJA DAN KOMPETENSI KARYAWAN

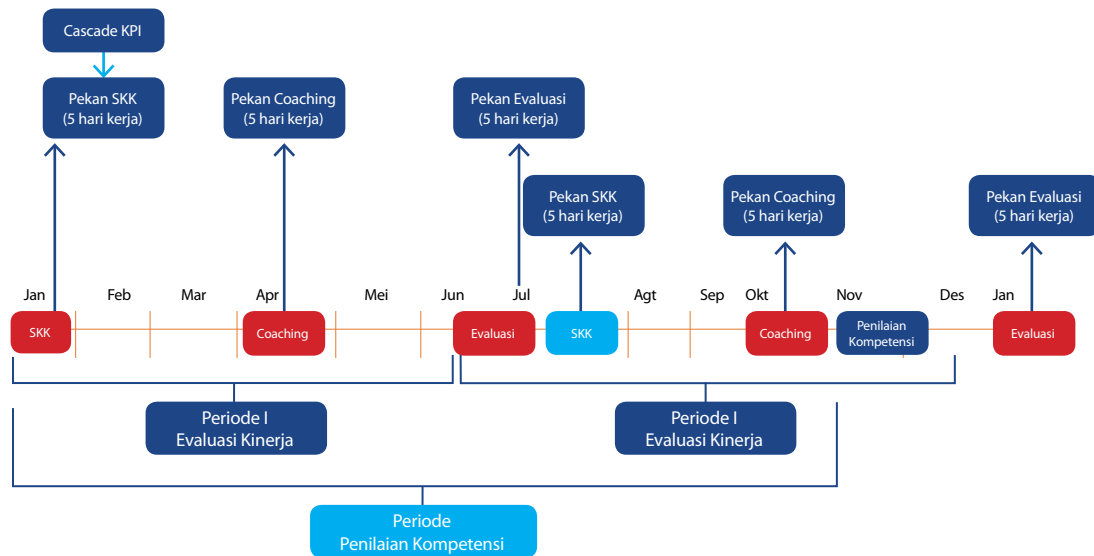


Rangkaian proses sistem manajemen kinerja merupakan siklus yang sistematis yang terdiri dari perencanaan Sasaran Kerja Karyawan (SKK), review SKK dan bimbingan (*coaching*) serta evaluasi kinerja. Pada tahap perencanaan, karyawan dan atasan menyepakati target-target yang harus dicapai, kemudian pada pertengahan periode dilakukan proses coaching untuk membantu pencapaian dan peningkatan kinerja serta kompetensi karyawan. Review/perubahan SKK dimungkinkan apabila adanya revisi KPI Perusahaan / KPI Unit kerja, penugasan khusus, mutasi jabatan atau kepentingan perusahaan lainnya. Pada tahap akhir yaitu evaluasi pencapaian kinerja, atasan menilai pencapaian atas target-target yang telah disepakati sebelumnya. Seluruh tahapan ini dikelola melalui Sistem Manajemen Kinerja dan Kompetensi yang terintegrasi secara *online*.

Hasil evaluasi kinerja dan penilaian kompetensi merupakan hal yang sangat penting karena terintegrasi dengan remunerasi, kesempatan karir dan program pengembangan pelatihan karyawan. Terhadap remunerasi karyawan, Perseroan menetapkan kebijakan kenaikan gaji (*merit increase*) berdasarkan hasil akhir evaluasi kinerja dan penilaian kompetensi, selain itu hasil evaluasi kinerja juga mempengaruhi insentif kinerja yang diperoleh karyawan. Dengan kebijakan ini maka karyawan didorong untuk berkinerja tinggi supaya dapat memperoleh remunerasi yang lebih tinggi pula.

Sedangkan dalam hal kesempatan karir diatur persyaratan kompetensi untuk setiap jabatan dimana pemenuhan kompetensi tersebut salah satunya diketahui dari hasil penilaian kompetensi. Hasil nilai kompetensi juga digunakan dalam perencanaan kebutuhan pengembangan dan pelatihan karyawan.

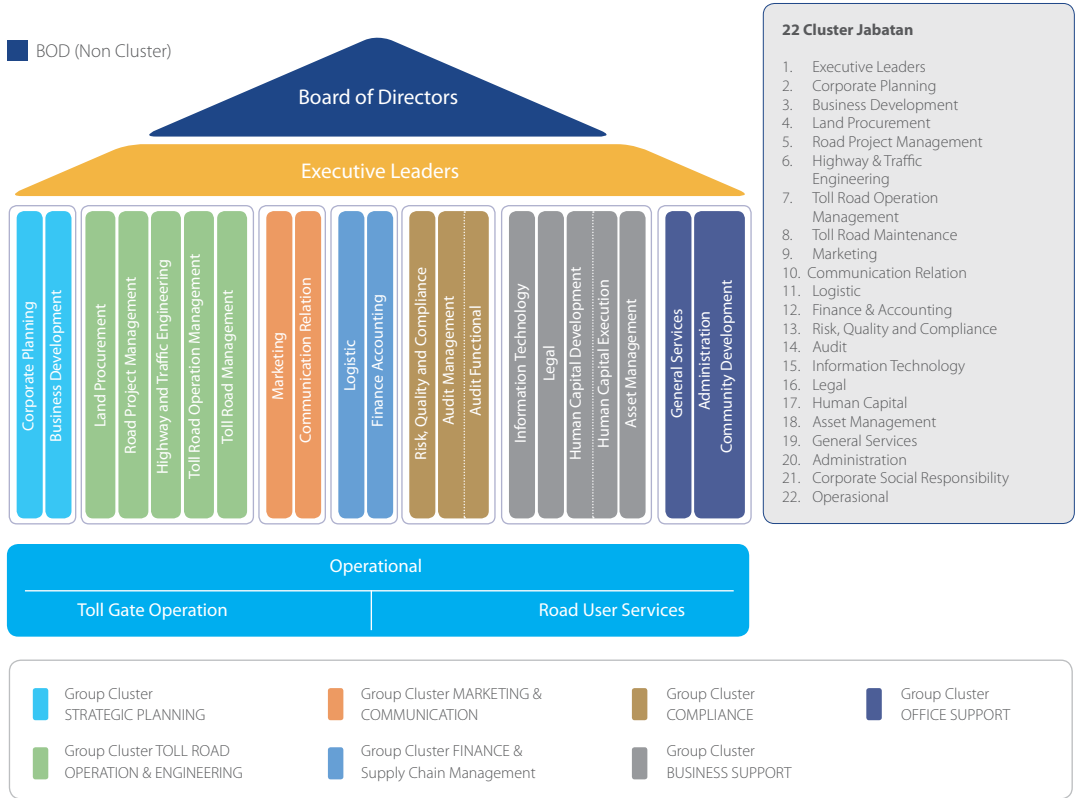
RANGKAIAN PROSES SISTEM MANAJEMEN KINERJA DAN KOMPETENSI KARYAWAN NON OPERASIONAL



Pengembangan Karir Karyawan Berbasis Kompetensi

Sejalan dengan pengembangan bisnis Perseroan yang terus tumbuh melalui pembentukan Anak Perusahaan baik yang bergerak di usaha jalan tol maupun usaha lainnya telah memberikan peluang bagi karyawan Jasa Marga untuk mengembangkan karirnya. Mulai meningkatnya jumlah pemangku jabatan yang berada pada posisi strategis di Perseroan yang memasuki masa pensiun selain menjadi tantangan bagi Manajemen untuk menciptakan sistem kaderisasi yang handal, disisi lain juga menciptakan peluang karir bagi karyawan yang kompeten dalam sistem manajemen karir berbasis kompetensi. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan sistem manajemen karir yaitu untuk melakukan penempatan karyawan sesuai formasi jabatan secara optimal dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi jabatan dan kompetensi individu, sehingga karyawan dapat memberikan unjuk kerja terbaik dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

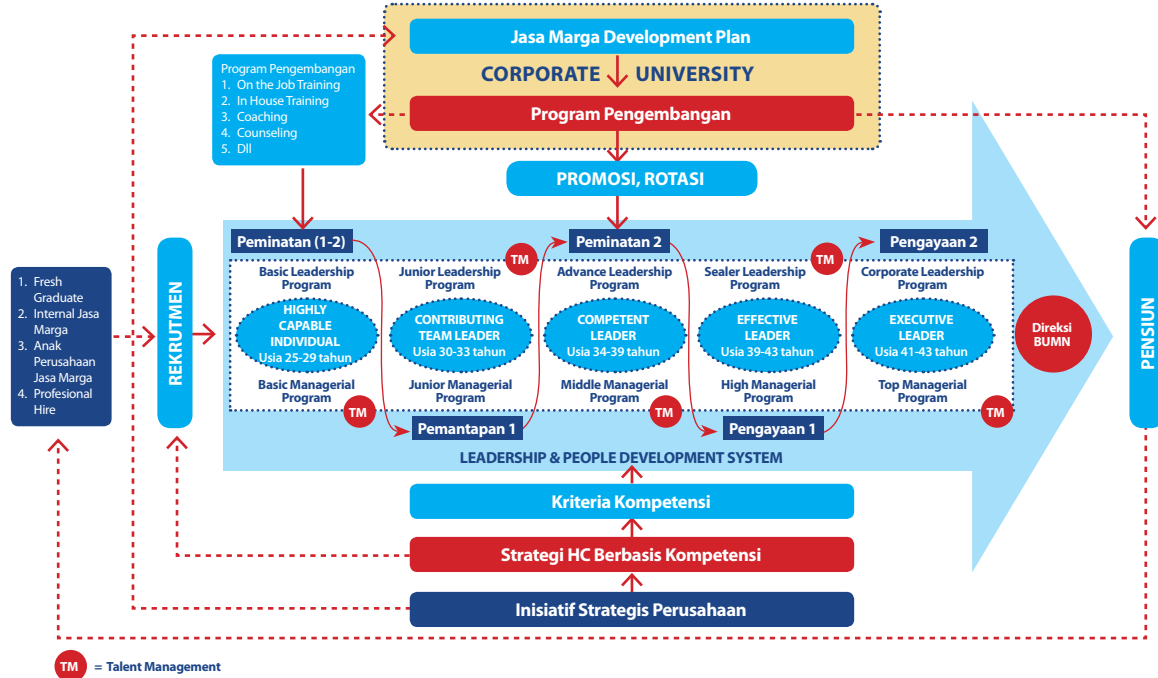
CLUSTER JABATAN SEBAGAI DASAR SISTEM MANAJEMEN KARIR



Sistem Manajemen Karir berbasis kompetensi mengacu pada konsep *cluster* dimana jabatan dikelompokkan berdasarkan kompetensi, sehingga perpindahan karir bagi karyawan menjadi lebih fleksibel dan kesempatan karir bagi karyawan menjadi lebih luas. Siklus manajemen karir berbasis kompetensi terbagi atas:

1. Periode Peminatan: dilaksanakan untuk mengidentifikasi minat karyawan sebagai acuan dalam penyusunan rencana karir karyawan.
2. Periode Pemantapan: dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan mengembangkan kompetensi individu secara optimal.
3. Periode Pengayaan: dilaksanakan untuk membuka wawasan karyawan dan untuk memberikan pengalaman yang dapat memperkaya kompetensi individu karyawan.

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN



Perseroan telah mengatur sistem pemilihan kandidat yang akan menduduki suatu jabatan melalui proses rekrutmen dan seleksi yang selektif dan kompetitif dengan tetap berlandaskan azas keadilan. Masa kerja tidak lagi menjadi faktor dominan, namun kompetensilah yang memainkan peranan penting.

Pergerakan karir karyawan baik berupa promosi dan maupun rotasi tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

PENGEMBANGAN KARIR KARYAWAN 2014 DAN 2015

No	Pengembangan Karir	Wilayah Kerja						Jumlah	
		Kantor Pusat		Kantor Cabang & Proyek		Anak Perusahaan		2014	2015
		2014	2015	2014	2015	2014	2015		
1	Promosi	54	30	110	124	16	31	180	185
2	Rotasi	85	143	287	267	20	47	392	457
TOTAL		139	173	397	391	36	78	572	642

KEBIJAKAN DALAM KESEMPATAN KERJA

Kebijakan dalam hal kesempatan kerja di Perseroan, dilakukan secara selektif dan terbuka, tanpa diskriminasi (gender, ras, suku, agama). Untuk pengelolaan karir karyawan termasuk penempatan dan promosi/rotasi karyawan dengan memperhatikan prestasi kerja, kemampuan dan kompetensi Karyawan. Sistem manajemen karir dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) oleh manajemen dan Serikat Karyawan.

Selain itu, Perseroan memberikan kesempatan bagi karyawan yang memiliki keterbatasan secara fisik berupa ketidakmampuan fungsi gerak motorik tangan atau kaki dengan tetap memenuhi persyaratan jabatan pada kelompok jabatan fungsional keahlian dan fungsional staf.

Kesejahteraan Karyawan

REMUNERASI KARYAWAN

Dalam rangka memberikan kepastian remunerasi yang menarik (*attractive*), kompetitif sehingga dapat memelihara keterikatan serta dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk menghasilkan kinerja tinggi, maka pada tahun 2014 Perseroan melakukan restrukturisasi remunerasi karyawan. Pengaturan penghasilan karyawan dilakukan dengan menetapkan struktur gaji berbasis pasar, selain itu kenaikan gaji dan pemberian insentif kinerja didasarkan pencapaian kinerja karyawan. Perubahan pengaturan penghasilan karyawan dilakukan dari yang berbasis pada masa kerja dengan sistem tabel menjadi berbasis kinerja dengan menetapkan struktur gaji berbasis pasar, serta memperhatikan pemenuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Kenaikan gaji tahunan dan pemberian insentif didasarkan oleh pencapaian kinerja karyawan. Remunerasi karyawan diatur dalam Keputusan Direksi No. 99/KPTS/2014 tentang Kelompok dan Komponen Remunerasi serta No. 122.1/KPTS/2014 tentang Kompensasi Bulanan Karyawan Tetap.

Perseroan menetapkan dan menjamin hak-hak karyawan sebagai berikut:

HAK-HAK KARYAWAN

Kebijakan Remunerasi Perseroan	Karyawan Tetap	Karyawan Tidak Tetap
I. Kompensasi		
1. Remunerasi: Gaji, Tunjangan, Bonus, Lembur dan THR	✓	✓
II. Benefit – Fasilitas Kerja		
1. Pakaian Dinas	✓	✓
2. Fasilitas Perjalanan Dinas	✓	✓
3. Transportasi & Komunikasi*	✓	-
4. Rumah Dinas*	✓	-
III. Benefit – Perlindungan Kerja		
1. Lingkungan Kerja: Penerapan K3 dan Kesempatan Berserikat	✓	✓
2. Perlindungan Hukum	✓	-
3. Jamsostek	✓	✓
4. Fasilitas Kesehatan	✓	✓
5. Program Pensiun dan Purnakarya	✓	-
IV. Benefit – Pengharkatan		
1. Peluang Karir: Formasi, Promosi, Mutasi, Pengembangan & Pelatihan dan Beasiswa Pihak Ketiga	✓	✓* *hanya pelatihan
2. Penghargaan: Karyawan Terbaik, Berjasa, Inovasi (KPM, PP), Kesetiaan, Pensiunan	✓	-
3. Rekreasi, Olahraga & Kesenian	✓	-
4. Cuti Karyawan, Cuti Hamil, Cuti Sakit, Cuti Alasan Penting, Keagamaan, dan Istirahat Panjang	✓	✓ (kecuali istirahat panjang)

* untuk jabatan tertentu

PENGHARGAAN KEPADA KARYAWAN

Perseroan memberikan penghargaan atas kinerja, pelaksanaan tugas, inovasi atau perbaikan serta penghargaan atas kesetiaan karyawan.

Untuk memberikan apresiasi terhadap karyawan yang telah bekerja selama masa kerja tertentu, Perseroan memberikan penghargaan atas masa kerja kepada karyawan. Sepanjang tahun 2015, penghargaan masa kerja diberikan kepada 762 karyawan yang telah melampaui masa kerja 10, 15, 20, 25 dan 30 tahun.

PENGHARGAAN KESETIAAN KARYAWAN JASA MARGA TAHUN 2015

Masa Kerja	Jumlah Penerima Penghargaan
10 Tahun	0
15 Tahun	52
20 Tahun	266
25 Tahun	267
30 Tahun	177
Total	762

Jasa Layanan Operasi.

Sementara untuk karyawan yang bekerja sampai mencapai usia pensiun normal, pensiun meninggal dunia dan pensiun cacat, serta pensiun dipercepat, Perseroan memberikan penghargaan pensiunan berupa logam mulia seberat 25 gram, 23 gram dan 22 gram, dimana untuk tahun 2015 telah diberikan kepada 146 orang yang telah memasuki usia pensiun.

JUMLAH KARYAWAN

Jumlah karyawan tetap di Induk Perseroan pada tahun 2015 mencapai 4.561 orang, turun 2,72 % dibandingkan dengan jumlah karyawan tetap pada tahun 2014. Total karyawan secara konsolidasi di Induk dan Anak Perusahaan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 9,1% dari tahun 2014 mengingat karena adanya ruas tol baru yang beroperasi dan dibentuknya anak perusahaan PT

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pendidikan	2014				2015			
	Induk	Anak Perusahaan	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Induk	Anak Perusahaan	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
S3	1		1	0.0	1		1	0.0
S2	86	10	96	1.1	106	3	109	1.2
S1	464	318	782	9.3	1.307	316	1.623	17.7
Diploma	13	111	124	1.5	92	331	423	4.6
SLTA	4.067	3.224	7.291	86.7	3.004	3.948	6.954	75.8
SLTP	23	43	66	0.8	21		21	0.2
SD	38	10	48	0.6	30	10	40	0.4
TOTAL	4.692	3.716	8.408	100	4.561	4.608	9.171	100

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN FUNGSI

Fungsi	2014				2015			
	Induk	Anak Perusahaan	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Induk	Anak Perusahaan	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
Operasional	3.222	3.298	6.520	77,5	2.842	4.074	6.916	75,4
Non Operasional	1.470	418	1.888	22,5	1.719	534	2.253	24,6
	4.692	3.716	8.408	100,0	4.561	4.608	9.169	100

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Jenis Kelamin	2014				2015			
	Induk	Anak Perusahaan	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Induk	Anak Perusahaan	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
Laki-Laki	3.661	3.039	6.700	79,7	3.515	3.558	7.073	77,1
Perempuan	1.031	677	1.708	20,3	1.046	1.050	2.096	22,9
	4.692	3.716	8.408	100	4.561	4.608	9.169	100

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA

Usia	2014				2015			
	Induk	Anak Perusahaan	Jumlah (orang)	Proporsi (%)	Induk	Anak Perusahaan	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
≤25	16	1.272	1.288	15,3	58	2.542	2.600	28,4
26-30	91	1.156	1.247	14,8	118	903	1.021	11,1
31-35	185	379	564	6,7	105	300	405	4,4
36-40	915	166	1.081	12,8	688	227	915	10,0
41-45	1.077	318	1.395	16,6	1.049	314	1.365	14,9
46-50	1.383	245	1.628	19,4	1.304	198	1.502	16,4
≥51	1.025	180	1.205	14,3	1.239	124	1.363	14,9
	4.692	3.716	8.408	100	4.561	4.608	9.169	100

Hubungan Industrial dan Kebebasan Berserikat

Keseimbangan hubungan industrial antara manajemen dan serikat karyawan merupakan tujuan ideal yang ingin dicapai untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara manajemen dan serikat karyawan. Manajemen memahami bahwa hubungan industrial merupakan kemitrasejajaran antara manajemen dengan serikat karyawan yang memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan Perseroan. Dalam upaya menciptakan dan menjaga keharmonisan antara manajemen dan karyawan yang dibingkai dalam hubungan kemitrasejajaran, manajemen memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat dalam organisasi Serikat Karyawan Jasa Marga (SKJM) yang merupakan bentuk komitmen manajemen terhadap peraturan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Secara periodik manajemen dan SKJM melakukan komunikasi dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang dibentuk melalui keputusan bersama antara Direktur Utama Perseroan dan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat SKJM untuk bersama-sama membahas dan mengevaluasi kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan pedoman dan arah kerjasama dalam melakukan hubungan industrial. Selain itu manajemen dan SKJM bersama-sama menempatkan diri sebagai komponen Perseroan untuk mensosialisasikan segala bentuk kebijakan yang diambil Perseroan kepada karyawan yang terkait dengan kebijakan Perseroan. Hingga akhir tahun 2015 telah dilakukan 15 kali pertemuan antara manajemen dan SKJM untuk membahas berbagai kebijakan perseroan yang terkait dengan sistem manajemen human capital dan kebijakan lainnya.

Manfaat Pasca Kerja Karyawan

Guna memberikan rasa nyaman dan aman kepada karyawan selama bekerja, maka Perseroan telah mengikutsertakan karyawan dalam program pasca kerja yang manfaatnya diterima setelah karyawan memasuki masa pensiun. Program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Pensiun

Dalam rangka memberikan kesinambungan penghasilan kepada karyawan yang memasuki pensiun, Perseroan mengikutsertakan karyawan dalam Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi karyawan yang bekerja sebelum tanggal 21 Juli 2014 yang dikelola oleh Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM). Sementara bagi karyawan yang bekerja setelah tanggal 1 Juli 2014 dan setelahnya diikutsertakan pada Program Pensiun Luran Pasti (PPIP) yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

b. Program Purna Karya

Program ini diberikan kepada karyawan dengan manfaat ketika berhenti pada usia pensiun normal akan mendapat 24 x PhDA, sedangkan karyawan yang berhenti pada usia pensiun dipercepat dan sebelum memasuki usia pensiun dipercepat akan mendapatkan manfaat proposional sesuai peraturan Perseroan.

c. Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan

Perseroan mengikutsertakan seluruh karyawan kedalam program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan. Dasar perhitungan iuran JHT dihitung dari penghasilan yang proporsinya dibayar sebesar 2% oleh karyawan dan 3,7% oleh Perseroan.

d. Jaminan Kesehatan

Sebagai bentuk dukungan Perseroan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional yang diterapkan Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 dan Perubahannya Nomor 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Perseroan sejak April 2015 telah melakukan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi karyawan dan keluarganya serta untuk pensiunan dan keluarganya. Disamping manfaat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, Perseroan juga masih memberikan manfaat dalam bentuk fasilitas kesehatan yang diterima bagi karyawan dan pensiunan beserta keluarganya sebagaimana tertuang dalam peraturan Perseroan.

Pengelolaan Tenaga Alih Daya

Dalam rangka transformasi Perseroan dan memastikan pencapaian Visi, Misi dan bisnis strategi jangka panjang, sejak tahun 2013 Perseroan telah menjadi Operating Holding Company dan memperkuat rencana otomatisasi sistem transaksi dan sistem informasi layanan lalu lintas dari *human based* menjadi *technology based*, sehingga memerlukan strategi dalam pengelolaan operasional untuk mendukung pencapaian target bisnis Perseroan.

Disamping itu, sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 13 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans Nomor 19 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemborongan Pekerjaan dan untuk melaksanakan layanan transaksi di Gerbang Tol, maka pada tahun 2015 ini Perseroan mendirikan PT Jasa Layanan Operasi (PT JLO) dengan komposisi 99% saham dimiliki Jasa Marga sebagai Anak Perusahaan yang fokus pada layanan transaksi pengumpulan tol di ruas-ruas jalan tol Cabang dan Anak Perusahaan lain sebagai bentuk pelaksanaan fungsi operasional. Dalam menjalankan fungsi intinya, maka pengelolaan tenaga kerja operasional yang dulunya merupakan karyawan PKWT di PT Jalantol Lingkarluar Jakarta saat ini telah berstatus karyawan tetap di PT JLO.

Produktivitas Karyawan

Manajemen berkomitmen penuh untuk senantiasa menyediakan karyawan yang handal dan berkontribusi secara maksimal dalam mendukung pencapaian visi misi Perseroan. Perhitungan kebutuhan karyawan baik secara jumlah maupun kualitas dikaji secara komprehensif melalui perencanaan tenaga kerja dengan mempertimbangkan rencana kerja dan pengembangan bisnis Perseroan.

Sistem-sistem pengelolaan human capital Perseroan yang terangkum dalam Sembilan Proses Strategis Sistem Human Capital dilakukan berbagai penyempurnaan agar terjadi akselerasi pengembangan kompetensi karyawan yang diharapkan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan Perseroan. Perkembangan bisnis Perseroan yang menuntut peningkatan jumlah tenaga pendukung tetap dikendalikan melalui peningkatan kompetensi, prioritas rekrutmen karyawan baru untuk kaderisasi pemimpin serta peningkatan peran teknologi informasi, khususnya dalam otomatisasi transaksi tol. Berbagai upaya pengelolaan human capital ini telah menunjukkan perbaikan produktivitas karyawan yang terlihat dalam rasio jumlah karyawan per pendapatan yang pada tahun 2014 sebesar 1 : Rp 859.835.180 menjadi sebesar 1 : Rp 1.053.414.804 pada tahun 2015.

Penghargaan Terkait Pengelolaan Human Capital

Transformasi Human Capital yang dilakukan Perseroan telah mendapat penghargaan dan pengakuan dari institusi terkait maupun dari perusahaan lain, diantaranya:

- Penghargaan Indonesia Human Capital Award 2015 kategori *Performance Management* yang diselenggarakan oleh Majalah Business Review
- Penghargaan Indonesia Human Capital Award 2015 – Top 10 Companies yang diselenggarakan oleh Majalah Business Review
- Penghargaan Best Human Capital Initiative – kategori Career Management dalam Indonesian Human Capital Study yang diselenggarakan oleh Dunamis

Pengelolaan Transformasi Human Capital

Agar proses transformasi dan implementasi sistem manajemen human capital berjalan sesuai arah yang telah direncanakan maka sosialisasi menjadi elemen penting agar seluruh karyawan dapat memahami pentingnya transformasi dan secara bersama-sama mengawal jalannya transformasi. Dengan demikian, diharapkan keberterimaan karyawan dapat lebih ditingkatkan.

Berbagai media komunikasi secara intensif dimanfaatkan dalam mengkomunikasikan transformasi di bidang human capital. Media cetak maupun online seperti portal internal Perseroan, majalah internal, info tol, spanduk menginformasikan konsep, proses maupun implementasi sistem-sistem baru. Media ini bahkan menginformasikan jumlah karyawan yang terlibat dalam proses sosialisasi transformasi.

Manajemen dengan penggerak utama unit yang membidangi Human Capital membentuk Tim Satuan Tugas yang juga melibatkan karyawan dari berbagai unit kerja. Tim ini menjadi agen perubahan (*change agent*) dalam mengawal implementasi transformasi dan melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan karyawan. Seluruh jajaran manajemen sampai ke tingkat Direksi dalam berbagai kesempatan formal maupun informal secara terus menerus menyampaikan pesan transformasi. Bahkan pihak Serikat Karyawan juga dilibatkan baik dalam penyusunan sistem maupun sosialisasi sehingga terjalin kerja sama dalam memastikan jalannya transformasi sesuai arah yang telah ditetapkan.

Elemen penting yang juga berperan dalam proses transformasi adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pengelolaan sistem data dan informasi berbasis ERP (*Enterprise Resource Planning*) terus ditingkatkan dalam mengintegrasikan sistem-sistem manajemen human capital.

Biaya Sumber Daya Manusia

Seiring dengan perkembangan bisnis Anak-anak Perusahaan Perseroan yang sebagian telah mulai beroperasi di tahun 2014 berdampak pada jumlah dan kualifikasi karyawan yang dibutuhkan walaupun sebagian besar gerbang telah dilayani dengan Gardu Tol Otomatis. Hal ini berpengaruh pada meningkatnya biaya Sumber Daya Manusia pada tahun 2014. Peningkatan biaya SDM juga merupakan dampak dari transformasi di bidang pengelolaan Human Capital, terutama akibat restrukturisasi/penataan ulang sistem remunerasi, khususnya pada kompensasi bulanan. Biaya Sumber Daya Manusia yang semula sebesar Rp Rp 1.490.061.327.000 pada tahun 2014 menjadi Rp 1.556.461.613.019 pada tahun 2015.

Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam meningkatkan kompetensi karyawan yang berkelanjutan serta dalam rangka menciptakan pemimpin Perseroan yang mumpuni maka realisasi biaya pendidikan dan pelatihan pada tahun 2015 sebesar Rp 15.746.611.916. Program-program pengembangan karyawan meningkat mengingat pada tahun 2015 ini kembali ditetapkan target peningkatan kompetensi secara merata untuk seluruh karyawan dengan ditetapkannya target jumlah hari pelatihan minimum/tahun per karyawan, di luar program beasiswa yang belum jatuh tempo pembayaran sampai dengan 31 Desember 2015.

BIAYA SUMBER DAYA MANUSIA 2014 DAN 2015

(Rp miliar)

Jenis	2014	2015
Biaya SDM	1.490,06	1.556,46
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	15,55	15,74



B 1872 URR

07

Tata Kelola Perusahaan

- 0 DASAR HUKUM PENERAPAN GCG JASA MARGA
- 0 KOMITMEN JASA MARGA DALAM PENERAPAN GCG
- 0 TUJUAN PENERAPAN GCG JASA MARGA
- 0 PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA
- 0 HASIL PENILAIAN IMPLEMENTASI GCG JASA MARGA
- 0 STRUKTUR, KEBIJAKAN DAN MEKANISME PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
- 0 MEKANISME TATA KELOLA
- 0 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
- 0 DEWAN KOMISARIS
- 0 DIREKSI
- 0 HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
- 0 HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
- 0 ASSESSMENT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
- 0 KOMITE-KOMITE
- 0 SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
- 0 SEKRETARIS PERUSAHAAN
- 0 UNIT INTERNAL AUDIT
- 0 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN
- 0 LAPORAN MANAJEMEN RISIKO
- 0 PERKARA PENTING YANG DIHADAPI
- 0 INFORMASI TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF
- 0 KODE ETIK
- 0 PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (MSOP/ESOP)
- 0 SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
- 0 KONSISTENSI PENERAPAN GCG
- 0 AUDITOR EKSTERNAL
- 0 AKSES TERHADAP INFORMASI DAN DATA PERSEROAN

Tata Kelola Perusahaan



Komitmen Jasa Marga dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dibuktikan dengan keberhasilannya dalam self-assessment GCG pada tahun 2015 dengan skor 96,77 atau "SANGAT BAIK"

Dasar Hukum Penerapan GCG Jasa Marga

Jasa Marga memiliki komitmen penuh dan secara konsisten menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi Perseroan dalam penerapan GCG, yaitu:

1. Undang Undang Republik Indonesia, di antaranya adalah:
 - a. Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - c. Undang Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d. Undang Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003.
 - e. Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.
 - f. Undang Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2004 tentang Jalan.
 - g. Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - h. Undang Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
 - i. Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah, di antaranya adalah:
 - a. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol.
 - b. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, di antaranya adalah:
 - a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Usaha Milik Negara, dengan perubahan terakhirnya yaitu No. PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012.
 - c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara.
 - d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 - e. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara.
 - f. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
 - g. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

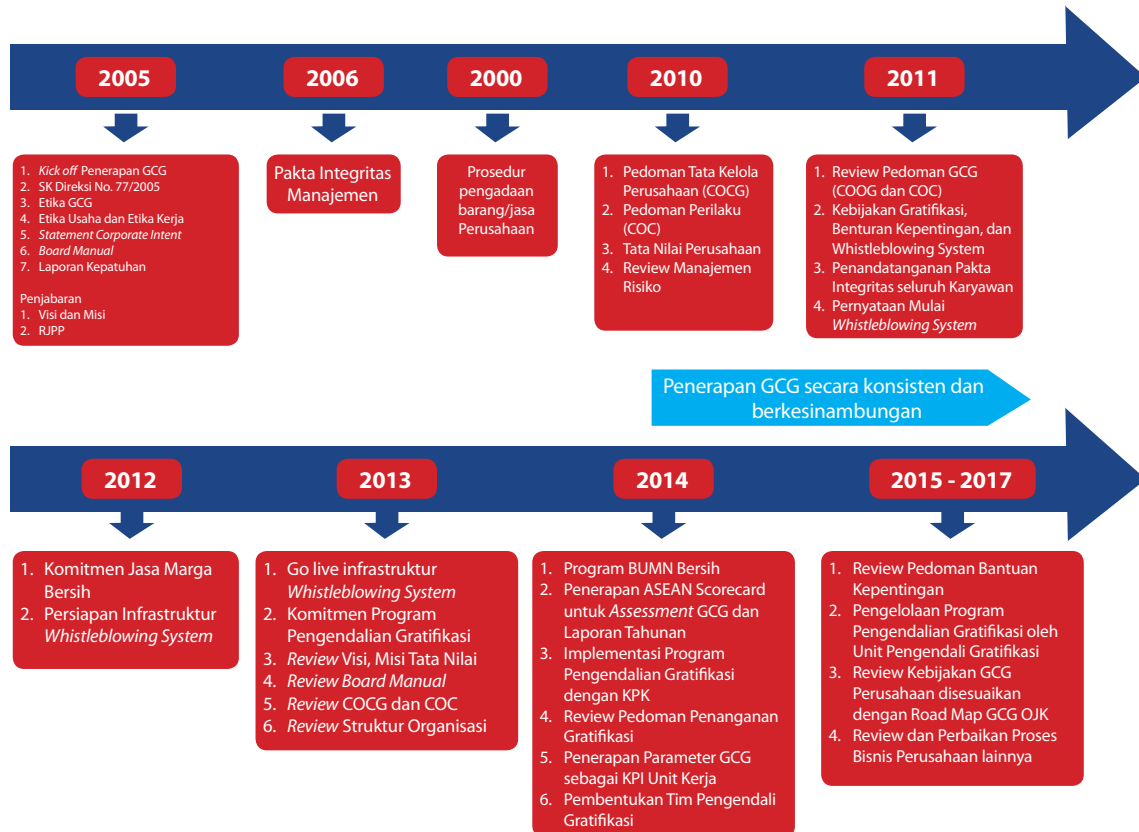
- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- h. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK – dahulu Bapepam-LK), di antaranya adalah:
- a. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003, Peraturan No. X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
- b. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-40/PM/2003, Peraturan Bapepam No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan.
- c. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-643/BL/2012, Peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- d. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-431/BL/2012, Peraturan No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
- e. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008, Peraturan Bapepam No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal Audit.
- f. Lampiran Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perubahan Publik.
- g. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- h. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- i. Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Perubahan Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. Anggaran Dasar PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta berikut surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Plt. Direktur Administrasi Hukum Umum Kementerian HAM No. AHU-AH.01.03-0019825 tanggal 27 Maret 2015 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036530. AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 27 Maret 2015.
6. Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, di antaranya adalah:
- a. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 186/KPTS/2011 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- b. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 197/KPTS/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

- c. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 09/KPTS/2013 tentang Pedoman *Whistleblowing System* PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- d. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 174/KPTS/2013 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- e. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 175/KPTS/2013 tentang Pedoman Tata Perilaku (*Code of Conduct*) PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- f. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 50/KPTS/2013 tentang Visi, Misi dan Tata Nilai PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- g. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 183/KPTS/2014 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- h. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 70/KPTS/2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- i. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 41/KPTS/2015 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- j. Keputusan Direksi Jasa Marga No. 08/KPTS/2016 tentang Penjabaran Tata Nilai PT Jasa Marga (Persero) Tbk.





Sosialisasi dan Internalisasi GCG

Selain penyempurnaan aturan, Perseroan juga melanjutkan sosialisasi dan internalisasi GCG kepada segenap Insan Jasa Marga untuk memastikan ketaatan terhadap praktik GCG. Perseroan percaya, bahwa penerapan GCG tidak cukup dilakukan hanya dengan mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku, namun harus ditunjukkan dalam praktik sehari-hari. Perseroan meyakini, bahwa dengan melaksanakan GCG, kepercayaan dari para *stakeholder* dapat terus dijaga dan Perseroan pun bertekad menuju *Good Corporate Citizen*.

ROADMAP GCG JASA MARGA



Komitmen Jasa Marga dalam Penerapan GCG

2006	2010	2011
<p>Pernyataan Penerapan GCG</p> 	<p>Pernyataan Kebijakan Manajemen Risiko</p> 	<p>Pernyataan Mulai Penerapan Whistleblowing System</p> 
2012	2013	2015
<p>Komitmen Jasa Marga Bersih antara Manajemen dan Serikat Karyawan Jasa Marga</p> 	<p>Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi Disaksikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan Pakta Integritas Setiap Awal Tahun oleh Seluruh Insan Jasa Marga dan pada Saat Pengadaan Barang/Jasa • Peningkatan Implementasi Pengendalian Gratifikasi 

Pada tahun 2015, Jasa Marga terus meningkatkan implementasi Pengendalian Gratifikasi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana komitmen Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), khususnya dengan melakukan sosialisasi Gratifikasi di seluruh unit kerja Kantor Pusat dan Cabang, serta penyediaan beberapa fasilitas pelaporan penerimaan Gratifikasi berupa portal internal dan *drop box* pelaporan gratifikasi.



Tujuan Penerapan GCG Jasa Marga

Untuk mewujudkan perusahaan yang berdaya saing tinggi dan terus tumbuh berkembang, Jasa Marga telah dan terus mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan dan peraturan serta *best practice*. Pelaksanaan GCG yang diimplementasikan Perseroan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 yang menyebutkan bahwa "BUMN wajib melaksanakan operasional perusahaan dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran".

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) sebagaimana Keputusan Direksi No. 174/KPTS/2013 tanggal 17 Desember 2013, tujuan penerapan GCG di Jasa Marga adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, Pengguna Jalan Tol/Pelanggan lainnya, Mitra Usaha, Kreditur/Investor, serta Masyarakat dan Lingkungan.
2. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan risiko Perseroan secara lebih hati-hati (*prudent*), akuntabel, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.
3. Memaksimalkan nilai Perusahaan agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
4. Memberdayakan fungsi dan kemandirian masing-masing Organ Perseroan.
5. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efektif dan efisien demi tercapainya Visi dan Misi Perseroan.
6. Mendorong agar pengelola Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan.
7. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada *Stakeholders*.
8. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.
9. Memperbaiki budaya kerja perusahaan.
10. Meningkatkan pencitraan Perseroan (*image*) yang semakin baik.
11. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Pedoman tata kelola perusahaan terbuka diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang dijabarkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Peraturan dan Surat Edaran OJK tersebut mengatur pedoman tata kelola perusahaan yang baik yang dibagi ke dalam 5 (lima) aspek tata kelola perusahaan terbuka, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

KEPATUHAN JASA MARGA TERHADAP PERATURAN DAN SURAT EDARAN OJK TERKAIT PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Kepatuhan Jasa Marga
1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.	1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	<ol style="list-style-type: none"> Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. 	<p>Voting terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh Pemimpin RUPS, sedangkan voting tertutup dilakukan dengan cara menggunakan Kartu Suara.</p> <p>Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perseroan paling sedikit selama 1 (satu) tahun untuk menyediakan kecukupan waktu bagi Pemegang Saham untuk memperoleh informasi.</p>
	2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	<ol style="list-style-type: none"> Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. 	<p>Perseroan memiliki peraturan tentang Pedoman Penyampaian Informasi Perseroan melalui <i>Non-deal Roadshow</i>, <i>Investor Conference</i>, <i>Analyst Meeting</i> dan <i>Public Expose</i> yang memuat waktu penyampaian informasi, lokasi penyelenggaraan, kriteria penyelenggaraan, materi presentasi, frekuensi pelaksanaan kegiatan, <i>feedback</i> dari penyelenggara, dan laporan penyelenggaraan.</p> <p>Materi presentasi Perseroan untuk Pemegang Saham atau Investor tersedia dalam situs web Perseroan untuk memberikan kesetaraan pada Pemegang Saham atau Investor atas pelaksanaan komunikasi.</p>
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris.	3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 	<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris berpedoman pada peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi Perseroan sebagai perusahaan terbuka.</p> <p>Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha Perseroan.</p>

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Kepatuhan Jasa Marga
	4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. 	<p>Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>), namun belum berdasarkan rekomendasi yang diberikan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko (KNRR) karena KNRR Perseroan baru dibentuk pada tahun 2015 menggantikan Komite Investasi dan Risiko Usaha. Perseroan akan menyusun dan menetapkan kebijakan <i>self assessment</i> Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi KNRR dengan target penyelesaian tahun 2016.</p> <p>Kebijakan <i>self assessment</i> Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.</p> <p>Kebijakan Dewan Komisaris terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dimuat dalam Pedoman Dewan Komisaris.</p> <p>Perseroan telah memiliki Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko yang menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi</p>
3. Fungsi dan Peran Direksi.	5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	<ol style="list-style-type: none"> Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 	<p>Penentuan jumlah anggota Direksi berpedoman pada peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi Perseroan sebagai perusahaan terbuka.</p> <p>Komposisi anggota Direksi telah memenuhi aspek keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha Perseroan.</p>

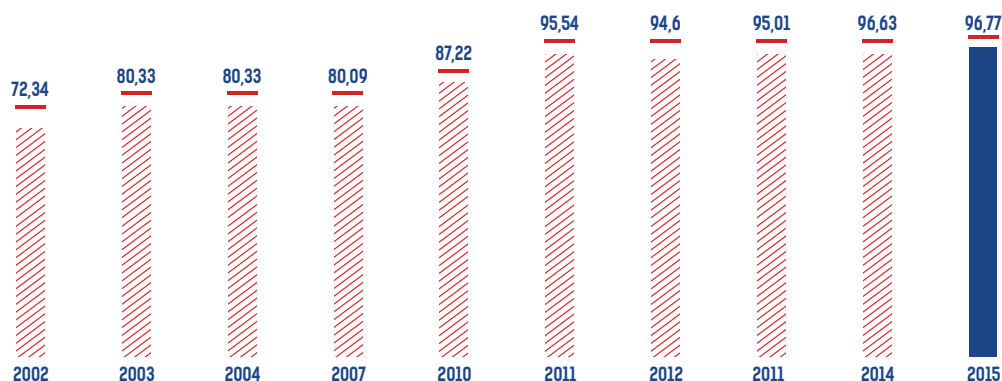
Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Kepatuhan Jasa Marga
	<p>6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.</p>	<p>3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>2. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p>	<p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/ atau pengalaman kerja terkait.</p> <p>Direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>), namun belum berdasarkan rekomendasi yang diberikan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko (KNRR) karena KNRR Perseroan baru dibentuk pada tahun 2015 menggantikan Komite Investasi dan Risiko Usaha. Perseroan akan menyusun dan menetapkan kebijakan <i>self assessment</i> Direksi berdasarkan rekomendasi KNRR dengan target penyelesaian tahun 2016.</p> <p>Kebijakan <i>self assessment</i> Direksi diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.</p> <p>Kebijakan Direksi terkait pengunduran diri anggota Dirkesi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dimuat dalam Pedoman Direksi.</p>
<p>4. Partisipasi Pemangku Kepentingan.</p>	<p>7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.</p>	<p>1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya</p> <p>2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.</p> <p>3. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>.</p> <p>4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p>	<p>Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> yang memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud yang merupakan bagian dari kode etik yang menggambarkan pencegahan terhadap segala praktik korupsi baik baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud yang merupakan bagian dari kode etik yang menggambarkan pencegahan terhadap segala praktik korupsi baik baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur, yang mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perseroan kepada kreditur.</p>

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Kepatuhan Jasa Marga
		<p>4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>5. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.</p> <p>6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p>	<p>Perseroan memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur, yang mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perseroan kepada kreditur.</p> <p>Perseroan telah memiliki whistleblowing system yang mencakup jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan dan hasil penanganan serta tindak lanjut pengaduan.</p> <p>Kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Karyawan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2014-2016 Pasal 39 tentang Insentif Kinerja. Namun, karena Sistem Manajemen Kinerja dan Kompetensi serta Sistem Remunerasi sebagai dasar penentuan besaran insentif jangka panjang baru diterapkan pada tahun 2014 maka implementasi pemberian insentif jangka panjang kepada Karyawan belum dapat direalisasikan. Perseroan akan menyusun kebijakan insentif jangka panjang dengan target penyelesaian tahun 2016 dan implementasi tahun 2017.</p>
5. Keterbukaan Informasi.	8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	<p>1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>2. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p>	<p>Selain situs web, Perseroan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Laporan Tahunan Jasa Marga tahun 2014 dan 2015 mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali.</p>

Hasil Penilaian Implementasi GCG Jasa Marga

Pada tahun 2015, dilakukan *self-assessment* GCG dengan menggunakan parameter penilaian Kementerian BUMN yaitu SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

HASIL ASSESSMENT GCG PERSEROAN



Catatan:

Sejak tahun 2012 diberlakukan parameter penilaian baru yaitu SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Ringkasan hasil *self-assessment* penerapan *good corporate governance* Jasa Marga tahun 2015 adalah sebagai berikut:

TABEL HASIL SELF-ASSESSMENT GCG JASA MARGA TAHUN 2015

No.	Aspek Pengujian/Indikator/Parameter	Nilai Maksimal	Capaian Tahun 2015	
			Skor	Tingkat Pemenuhan (%)
1.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan	7	6,679	95,42
2.	Pemegang Saham dan RUPS	9	8,611	95,68
3.	Dewan Komisaris	35	34,083	97,38
4.	Direksi	35	34,006	97,16
5.	Pengungkapan dan Transparansi	9	8,752	97,25
6.	Aspek Lainnya	5	4,643	92,86
TOTAL PERINGKAT KUALITAS PENERAPAN GCG		100	96,775	96,77
			SANGAT BAIK	

ASEAN Scorecard

Jasa Marga mengikuti *Assessment GCG* yang dilakukan oleh the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), yang menilai praktik *corporate governance* (CG) berdasarkan ASEAN CG *Scorecard*.

Penilaian didasarkan pada informasi publik, terutama pada laporan tahunan serta situs web Perseroan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa total skor Jasa Marga adalah 76,14% dengan predikat "FAIR". Skor rata-rata 100 perusahaan publik atau emiten adalah sebesar 57,27 sehingga total skor Perseroan berada di atas skor rata-rata.

Skor masing-masing komponen *Scorecard* sebagai berikut:

1. Prinsip A – Hak-hak Pemegang Saham: 4 poin.
2. Prinsip B – Perlakuan yang Setara Terhadap Pemegang Saham: 7,94 poin.
3. Prinsip C – Peran Pemangku Kepentingan: 10 poin.
4. Prinsip D – Pengungkapan dan Transparansi: 19,51 poin.
5. Prinsip E – Tanggung Jawab Dewan: 27,69 poin
6. Bonus: 7 poin.

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

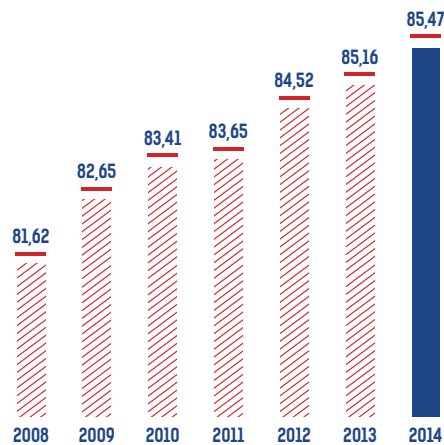
Jasa Marga secara aktif mengikuti Program Riset dan Peningkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) selama 7 (tujuh) kali berturut-turut yang secara rutin diselenggarakan setiap tahun dengan tema yang berbeda.

Pada tahun 2015, dilaksanakan CGPI untuk penilaian tahun 2014, yang mengangkat tema “GCG dalam Perspektif Penciptaan Nilai”.

Penilaian CGPI meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. *Self assessment*.
2. Kelengkapan dokumen.
3. Penyusunan makalah.
4. Observasi.

PENINGKATAN SCORE CGPI JASA MARGA



Berdasarkan tahapan penilaian CGPI Tahun Penilaian 2014 yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebagaimana tersebut di atas, Jasa Marga berhasil memperoleh peringkat **PERUSAHAAN SANGAT TERPERCAYA** dengan peningkatan skor menjadi **85,47**.

Perincian skor Jasa Marga untuk CGPI Tahun Penilaian 2014 yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Self Assessment	Sistem Dokumentasi	Makalah	Observasi	Skor
17,19	23,54	21,52	23,22	85,47
SANGAT TERPERCAYA				

Memperkuat Implementasi GCG Jasa Marga

Dalam memaknai tata kelola perusahaan yang baik, Jasa Marga memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu mendorong GCG sebagai bagian dari pengelolaan Perseroan melalui penerapan suatu sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, kesetaraan dan tanggung jawab.

Jasa Marga telah melakukan berbagai inisiatif implementasi GCG, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pihak independen dalam mencapai tata kelola perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable governance*).

Dalam rangka memperkuat implementasi GCG tahun 2015, Jasa Marga telah melakukan pencapaian program yang meliputi:

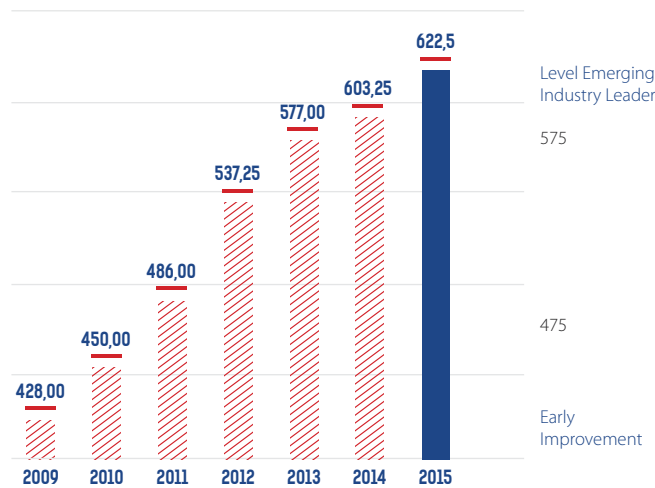
1. **Penguatan Komitmen Implementasi GCG.**
Kegiatan yang dilakukan adalah penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Insan Jasa Marga dan penandatanganan Komitmen Jasa Marga Bersih oleh Direktur Utama dan Serikat Karyawan Jasa Marga.
2. **Sosialisasi dan Internalisasi GCG.**
Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi GCG bagi karyawan baru, pemberian materi GCG dalam Pelatihan Manajemen Proyek Jalan Tol, dan sosialisasi GCG dalam berbagai media Perseroan, serta berpartisipasi dalam pameran terkait GCG (Hari Anti Korupsi) yang diselenggarakan oleh KPK.
3. **Implementasi Pengendalian Gratifikasi.**
Melanjutkan kerja sama dengan KPK sebagaimana komitmen Program Pengendalian Gratifikasi di tahun 2013, Jasa Marga melaksanakan implementasi pengendalian Gratifikasi sesuai dengan jadwal komitmen yang telah disampaikan kepada KPK pada tahun 2015 sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Gratifikasi yang diselenggarakan di Kantor Pusat dan Seluruh Kantor Cabang
 - b. Penyediaan *Drop Box* untuk pelaporan penerimaan Gratifikasi di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Cabang.
 - c. Penyediaan Portal Internal GCG termasuk di dalamnya untuk pelaporan penerimaan Gratifikasi dan sosialisasi Gratifikasi Insan Jasa Marga.
 - d. Surat Edaran Larangan Gratifikasi untuk internal Perusahaan dan Iklan Larangan Gratifikasi di Media Cetak serta website Perusahaan.
 - e. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam rangka hari raya.
4. **Pengelolaan *Whistleblowing System*.**
Pengelolaan *Whistleblowing System* bekerja sama dengan pihak eksternal yang independen dan berpengalaman. Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* melakukan evaluasi atas pengelolaan *Whistleblowing System* di Perseroan.
5. **Partisipasi Aktif dalam Berbagai Perlombaan/Award Terkait GCG.**
 - a. Keikutsertaan dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2015 dengan hasil pencapaian sebagai PERUSAHAAN SANGAT TERPERCAYA.
 - b. Good Governance Excellent Performance 2015 (FKSPI).
 - c. Indonesia GCG Award 2015 dengan Score: A, Excellent (Economic Review).
 - d. Implementing ASEAN Corporate Governance Scorecard: A Road to ASEAN Capital Market Integration, category the Best Non Finance (the Indonesian Institute for Corporate Directorship – IICD).
6. **Pengukuran Implementasi GCG.**
Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan *self-assessment* GCG tahun 2015, dengan pencapaian score pada tahun 2015 berdasarkan penilaian parameter Kementerian BUMN meningkat menjadi • atau SANGAT BAIK.
7. **Penerapan ISO dan SMK3**
Dalam rangka melindungi karyawannya, Jasa Marga menerapkan OHSAS 18001:2007, sedangkan untuk menjaga mutu kepada para pelanggan, Perseroan menerapkan ISO 9001:2008. Seluruh Kantor Cabang Jasa Marga telah mendapatkan sertifikat mutu pengoperasian jalan tol. ISO 9001:2008 merupakan sebuah standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau kualitas dan OHSAS 18001:2007 adalah suatu standar internasional untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bertujuan untuk mengelola aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada setiap proses kerja di tempat kerja.
8. **Pengukuran Kinerja**
Untuk menunjang strategi perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan, sejak tahun 2008 Perseroan
 - f. Pengelolaan pelaporan gratifikasi yang diterima oleh Insan Jasa Marga (di luar event Hari Raya).

menerapkan Malcolm Baldrige sebelum akhirnya pada tahun 2012 beralih ke KPKU yang merupakan mandatory dari Kementerian Negara BUMN. KPKU merupakan alat ukur kinerja perusahaan sebagaimana Surat Kementerian Negara BUMN No. S-153/S.MBU/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Pelaporan Kinerja Berdasarkan Pendekatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN.

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) adalah suatu kriteria yang komprehensif untuk mengukur kinerja BUMN sekaligus sebagai pedoman guna meningkatkan kinerja BUMN sehingga dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam mewujudkan kemakmuran bangsa.

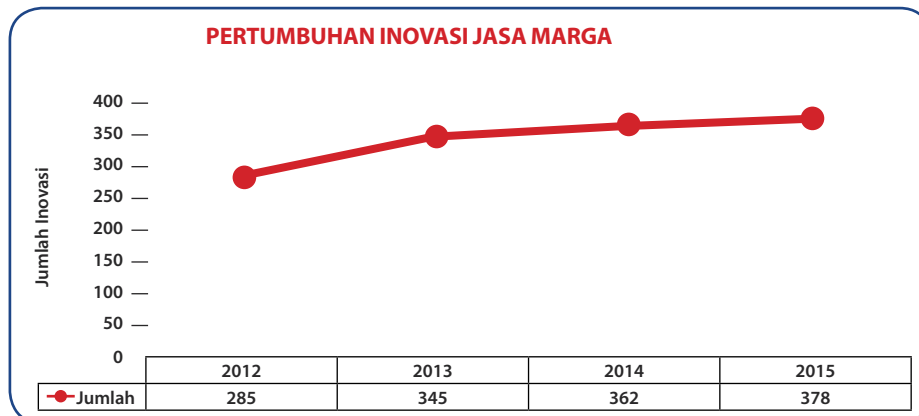
Hasil asesmen KPKU BUMN tahun 2015, Perseroan meraih total skor 622,5 atau di level *Emerging Industry Leader*.

HASIL ASESMEN KPKU BUMN 2009-2015



9. Budaya Inovasi

Untuk membangun budaya inovasi, Perseroan menerapkan perbaikan mutu berkelanjutan (Kelompok Perbaikan Mutu/ KPM dan Perbaikan Praktis/PP) sehingga budaya mutu secara intensif dan terintegrasi dapat tercipta dimana setiap tahun dilakukan penilaian dalam *event* Temu Karya mutu Jasa Marga.



Struktur, Kebijakan dan Mekanisme Penerapan Tata Kelola Perusahaan

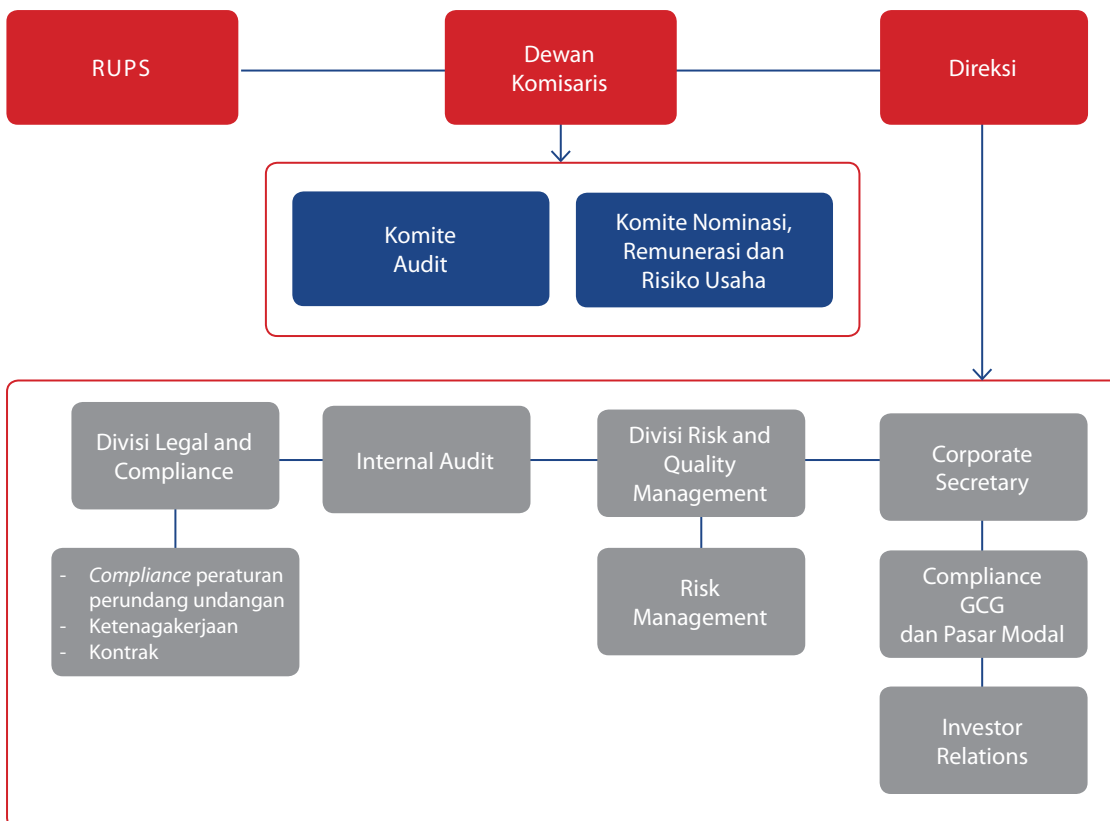
Struktur Tata Kelola

Sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang dan/atau Anggaran Dasar.
- Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Jasa Marga telah memiliki Struktur Tata Kelola yang lengkap khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, sebagai berikut:

STRUKTUR TATA KELOLA



Organ Perseroan memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Organ Perseroan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan.

RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas pengurusan perusahaan, Direksi dibantu oleh Corporate Secretary dan Internal Audit, serta satuan kerja lain yang menjalankan fungsi kepengurusan Perseroan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah:

- **Komite Audit.**

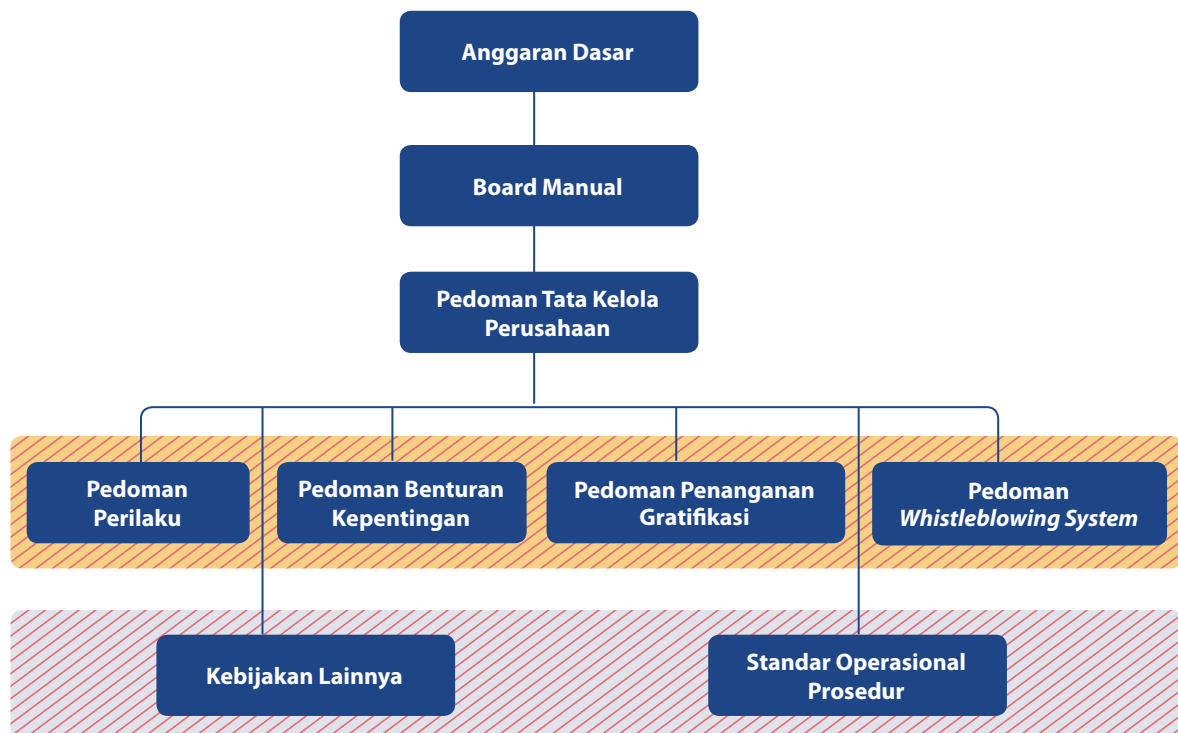
Komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan kewajibannya dalam mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal, serta dalam mengkaji dan memberikan persetujuan semua informasi dan usulan yang disiapkan dan diajukan pihak lainnya seperti Laporan Keuangan dan Non Keuangan, serta Laporan Tahunan Perusahaan.

- **Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.**

Komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam aspek nominasi (di antaranya terkait komposisi, kriteria, monitoring, evaluasi kinerja jabatan-jabatan strategis Perseroan), remunerasi (di antaranya terkait penetapan struktur, kebijakan, besaran, monitoring dan evaluasi remunerasi atas jabatan-jabatan strategis Perseroan) dan risiko (di antaranya terkait kajian dan evaluasi atas manajemen risiko investasi Perseroan).

Hierarki Kebijakan GCG Perseroan

HIERARKI KEBIJAKAN GCG PERSEROAN



Mekanisme Tata Kelola

Mekanisme Tata Kelola merupakan mekanisme implementasi GCG yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar *governance structure*, melainkan dibutuhkan adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. *Governance mechanism* dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut.

Perseroan menyebut *governance mechanism* dengan sebutan *soft-structure* GCG. *Soft-structure* merupakan aspek penting dalam implementasi GCG, karena *soft-structure* GCG akan menjadi *living document* bagi segenap jajaran dan tingkatan organisasi di suatu perusahaan.

MEKANISME TATA KELOLA YANG DIMILIKI PERSEROAN ANTARA LAIN:

<p>BOARD MANUAL</p> <p><i>Board Manual</i> merupakan kompilasi dari praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang bersumber dari regulasi (Undang Undang/Peraturan), Anggaran Dasar dan best practices yang disepakati bersama dalam rangka implementasi GCG. Board Manual digunakan oleh Organ-organ Perseroan yang berfungsi melakukan pengawasan dan pengelolaan Perseroan, yakni Dewan Komisaris dan Direksi.</p>	<p>CODE OF CONDUCT (COC)</p> <p>COC merupakan sistem nilai atau norma yang dianut oleh seluruh Insan Jasa Marga dalam melaksanakan tugasnya yang di dalamnya memuat etika bisnis dan perilaku seluruh Insan Jasa Marga dalam mencapai tujuan, Visi dan Misi Perseroan antara lain etika hubungan antara Perseroan dengan Karyawan, Pengguna Jalan Tol, Pemegang Saham, Pemasok, Kreditur/Investor, Pemerintah, Mitra Usaha, Pesaing, Media Massa, Masyarakat dan Lingkungannya.</p>	<p>CODE OF CORPORATE GOVERNANCE (COCG)</p> <p>COCG merupakan sekumpulan nilai dan praktik Perseroan yang menjadi suatu pedoman bagi Organ Perusahaan dan Manajemen dalam mengelola Perseroan yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip GCG yang selaras dengan peraturan perundang-undangan, tujuan, isi dan Misi serta nilai-nilai Perseroan.</p>
<p>PAKTA INTEGRITAS</p> <p>Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan, yang berisi ikrar untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.</p>	<p>PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI</p> <p>Pedoman Penanganan Gratifikasi merupakan pedoman bagi Insan Jasa Marga untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di Perseroan.</p>	<p>PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</p> <p>Pedoman Benturan Kepentingan merupakan pedoman bagi Insan Jasa Marga untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perseroan.</p>
<p>PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM</p> <p>Pedoman <i>Whistleblowing System</i> merupakan pedoman bagi Insan Jasa Marga dalam mencegah dan mendeteksi potensi pelanggaran di Perseroan.</p>	<p>PIAGAM INTERNAL AUDIT (INTERNAL AUDIT CHARTER)</p> <p>Piagam Internal Audit memiliki peran untuk meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi di lingkup Perseroan dan memastikan kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan main yang berlaku.</p>	<p>PIAGAM KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS</p> <p>Memiliki peran sebagai panduan bagi Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko dalam pelaksanaan tugas sebagai organ pendukung Dewan Komisaris. Karakteristik Piagam Komite ini bersifat fleksibel dan dilakukan sesuai kebutuhan.</p>
<p>KEBIJAKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI</p> <p>Panduan pengelolaan Teknologi Informasi yang standar secara menyeluruh, sesuai lingkup kebutuhan bisnis Perseroan dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.</p>	<p>KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO</p> <p>Komitmen untuk penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi, dalam rangka menunjang kepastian pencapaian Sasaran Jangka Panjang Perusahaan dan sebagai kerangka penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terukur sesuai persyaratan internasional.</p>	

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa merupakan instansi tertinggi dalam tata kelola perusahaan, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut mencakup permintaan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perseroan, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direktur dan anggota Dewan Komisaris, dan lain-lain. RUPS juga merupakan forum bagi pemegang saham dalam menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen Perseroan.

Dalam melaksanakan wewenangnya, RUPS memperhatikan kepentingan pengembangan dan kesehatan Perseroan, kepentingan para stakeholders serta hak-hak Perseroan.

Penyelenggaraan RUPS adalah sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan setiap tahun buku selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Pemegang Saham Jasa Marga

Pemegang Saham Jasa Marga terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu satu lembar saham Seri A Dwiwarna (sebagai Pemegang Saham pengendali) dan 6.799.999.999 Saham Seri B. Pemegang Saham pengendali Jasa Marga adalah Pemerintah Republik Indonesia dan Publik dengan persentase masing-masing sebesar 70% dan 30%.

Informasi lebih detail tentang komposisi Pemegang Saham Jasa Marga dapat dilihat di bagian Ikhtisar 2015.

Hak & Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam RUPS

Dalam RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam menyuarakan pendapatnya dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan penting dan strategis Perseroan, di antaranya terkait hal-hal sebagai berikut:

- Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Jasa Marga.
- Penetapan jumlah remunerasi dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Jasa Marga.
- Penilaian kinerja Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan.
- Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan, termasuk di antaranya terkait dividen.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Seluruh aksi korporasi yang membutuhkan keputusan RUPS sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS Tahunan berwenang untuk mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan. Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham pengendali dengan kepemilikan saham Seri A Dwiwarna wajib memperhatikan tanggung jawabnya dalam menggunakan haknya, baik saat menggunakan hak suara maupun dalam hal lain. Pemerintah memiliki hak khusus yang dapat digunakan ketika memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan usaha (merger), akuisisi, divestasi atau likuidasi melalui forum RUPS.

Proses Penyelenggaraan RUPS

Secara umum, proses penyelenggaraan RUPS berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

TAHAPAN PENYELENGGARAAN RUPS

Kegiatan	Waktu (Selambat-lambatnya)
Surat pemberitahuan rencana RUPS ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	H-44
Iklan pemberitahuan RUPS	H-37
Recording date pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS	H-23
Iklan Panggilan/Undangan RUPS	H-22
RUPS	H
Iklan Ringkasan Risalah Hasil RUPS	H+2

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan harus mengiklankan Pemberitahuan akan diadakannya RUPS paling lambat 14 hari sebelum Iklan Panggilan/Undangan, di luar tanggal Iklan Pemberitahuan dan Iklan Panggilan/Undangan. Perseroan harus mengiklankan Panggilan/Undangan kepada Pemegang Saham paling lambat 21 hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, di luar tanggal Iklan Panggilan/Undangan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. Perseroan harus memberitahukan rencana penyelenggaraan RUPS tersebut ke OJK sedikitnya 7 hari sebelum Iklan Panggilan/Undangan. Sesudah penyelenggaraan RUPS, Perseroan harus melaporkan hasil RUPS ke OJK selambat-lambatnya 2 hari kerja serta mengiklankan Ringkasan Risalah Hasil RUPS melalui sedikitnya satu surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional. Seluruh saham yang diterbitkan memiliki satu hak suara jika tidak dinyatakan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam RUPS Tahunan, Dewan Komisaris dan Direksi mempresentasikan Laporan Tahunan, rekomendasi penggunaan laba bersih Perseroan, rekomendasi tentang Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku berjalan berdasarkan saran Dewan Komisaris atau mentransfer wewenang penunjukan KAP ke Dewan Komisaris, laporan penggunaan dana hasil penawaran umum, serta hal-hal lain yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Sebagai BUMN, Jasa Marga tunduk pada Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang

mewajibkan Perseroan untuk melaporkan kinerjanya kepada Pemegang Saham yang dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk mendapatkan pengesahan RUPS, paling lambat lima bulan setelah akhir tahun buku.

Penyelenggaraan RUPS Jasa Marga di Tahun 2015

Sepanjang tahun 2015, Jasa Marga menyelenggarakan RUPS sebagai berikut:

PENYELENGGARAAN RUPS JASA MARGA

RUPS	Tanggal	Tempat
Tahunan	18 Maret 2015	Ruang Rimbawan 1 Gedung Manggala Wanabakti Jln. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat 10270

Penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut telah melalui proses persiapan dan penyelenggaraan sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 81, 82, dan 83 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.

Proses rencana dan pelaksanaan RUPS Tahunan tersebut telah tertuang dalam surat Perseroan yang telah disampaikan ke Bapepam-LK, serta pemasangan iklan Pemberitahuan, Panggilan dan Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPS Tahunan masing-masing pada 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional serta situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dengan detail sebagai berikut:

PROSES PERSIAPAN PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN 2015

Penyampaian Rencana dan Mata Acara RUPS Tahunan	Pemberitahuan dan Ralat Pemberitahuan RUPS Tahunan	Panggilan/Undangan RUPS Tahunan	Penyampaian dan Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil RUPS Tahunan
Surat ke Otoritas Jasa Keuangan No. AA.AK06.111	Iklan di Harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, serta situs web Perseroan	Iklan di Harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, serta situs web Perseroan	Iklan di Harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily, serta situs web Perseroan
30 Januari 2015	09 Februari 2015	24 Februari 2015	20 Maret 2015



Mata Acara RUPS Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 Mengenai Kegiatan Perseroan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
3. Penetapan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.
4. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015.
5. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga.
6. Perubahan dan Penyusunan Kembali Seluruh Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

Mata Acara RUPS Tahunan (Rapat) dipublikasikan dalam Iklan Panggilan. Dalam Iklan Panggilan RUPS, selain dipublikasikan Mata Acara Rapat, juga disebutkan beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan karena Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- 2) Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 pukul 16:00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015.
- 3) Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 4) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:
 - Kantor Perseroan
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550
Telp. (021) 841 3526, 841 3630 ext. 227 dan 223
 - Kantor Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jln. Jend Sudirman Kav. 34-35
Telp. (021) 5709009, Fax (021) 5709026, 5708914
- 5) Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.
- 6) Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.jasamarga.com atau pada setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, sejak tanggal Panggilan ini kecuali untuk bahan terkait Agenda Perubahan Pengurus Perseroan yang mana akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan tertulis kepada Corporate Secretary.
- 7) Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahannya dan susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
- 8) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Ketentuan Korum dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan korum kehadiran dalam Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/ atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat Keenam, mengenai Perubahan Anggaran Dasar, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh, mengenai Perubahan Pengurus Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 5 dan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/ wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.766.493.784 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 84,80% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 6.800.000.000 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan
- 6.799.999.999 (enam miliar, tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta, sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu, sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi, dan Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat.

Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau mewakili di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris dan hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat.

Seluruh anggota Dewan Komisaris (yang salah satu anggotanya adalah Ketua Komite Audit) dan seluruh anggota Direksi yang menjabat pada saat penyelenggaraan RUPS Tahunan hadir dalam RUPS Tahunan yang penyelenggaraannya didukung oleh Konsultan Hukum, Notaris dan Biro Administrasi Efek (BAE). Selain itu, Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan baik tahun buku 2014 maupun tahun buku 2015 juga hadir dalam RUPS Tahunan tersebut.

JUMLAH SAHAM YANG HADIR PADA RUPS TAHUNAN 2015 JASA MARGA

Jumlah Saham	Persentase (%)
5.766.493.784	84,80

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 19 Ayat 9 Huruf c Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat disampaikan Kondisi Umum Perseroan yang terangkum dalam Video Profil Jasa Marga.

Tanya Jawab

Untuk setiap Mata Acara Rapat, kecuali Mata Acara Kelima, para Pemegang Saham dan Wakil Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan dan/atau usulan/pendapatnya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Setiap penanya diminta untuk mengangkat tangan, dan kepada yang bersangkutan akan diberikan formulir untuk diisi dengan pertanyaan atau pendapatnya. Selanjutnya Petugas menyampaikan formulir pertanyaan tersebut kepada Pemimpin Rapat.

Pemimpin Rapat mempersilakan masing-masing penanya untuk membacakan pertanyaan atau pendapatnya dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya, dan dijawab atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat.

Jumlah Penanya pada Mata Acara Rapat Pertama adalah 2 (dua) orang dan pada Mata Acara Rapat Ketujuh adalah 1 (satu) orang. Sedangkan pada Mata Acara Rapat Kedua, Ketiga, dan Keempat tidak terdapat pertanyaan.

Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara

Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi, dilakukan pengambilan keputusan. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Untuk Mata Acara Rapat Keenam, mengenai Perubahan Anggaran Dasar, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Untuk Mata Acara Rapat Ketujuh, mengenai Perubahan Pengurus Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 5 dan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang Saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain diminta memberi tanda pada salah satu kotak pilihan di Kartu Suara dan menyerahkan Kartu Suaranya yang sudah terisi kepada petugas. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui.
- Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, dan Pasal 30 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014, serta Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Setelah pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

Mata Acara, Keputusan, Hasil Voting dan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan

Perseroan telah menunjuk Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. sebagai pihak independen untuk melakukan validasi suara dan menyusun minuta akta Rapat. Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 18 Maret 2015 No. 38, yang dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.

Mata Acara, Keputusan, Hasil Voting dan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 Mengenai Kegiatan Perseroan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2014.

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah ketentuan (i) Pasal 13 ayat 2 huruf (e) dan Pasal 20 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), (iii) Pasal 23 ayat 1 Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan (iv) Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013.

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1.
 - a. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014.
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates) sebagaimana dimuat dalam laporannya No. R/018.AGA/sat.3/2015 tanggal 28 Januari 2015 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
 - c. Menyetujui penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan tahun buku 2013 sebagaimana diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates) sebagaimana dimuat dalam laporannya No. R/018.AGA/sat.3/2015 tanggal 28 Januari 2015.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates) sebagaimana dimuat dalam laporannya No. R/066.AGA/sat.3/2015 tanggal 27 Januari 2015 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam Laporan tersebut.

Hasil Voting

Suara Hadir:	5.766.493.784	saham
Suara Tidak Setuju:	6.659.400	saham
Suara Abstain:	6.204.500	saham
Total Suara Setuju:	5.759.834.384	saham = 99,88%

Tindak Lanjut

-

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2014.

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUP.

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih (Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk) Perseroan tahun buku 2014 sebesar Rp 1.403.428.453.855 (satu triliun, empat ratus tiga miliar, empat ratus dua puluh delapan juta, empat ratus lima puluh tiga ribu, delapan ratus lima puluh lima Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Sebesar 35% dari Laba Bersih Perseroan atau sejumlah Rp 491.199.958.849 (empat ratus sembilan puluh satu miliar, seratus sembilan puluh sembilan juta, sembilan ratus lima puluh delapan ribu, delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham.
 - b. Sebesar 1,78% dari Laba Bersih Perseroan atau Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan wajib.
 - c. Sebesar 63,22% dari Laba Bersih Perseroan atau Rp 887.228.495.006 (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar, dua ratus dua puluh delapan juta, empat ratus sembilan puluh lima ribu, enam Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan umum.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Hasil Voting

Suara Hadir:	5.766.493.784	saham
Suara Tidak Setuju:	13.413.400	saham
Suara Abstain:	4.550.000	saham
Total Suara Setuju:	5.753.080.384	saham = 99,767%

Tindak Lanjut

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014 dipublikasikan pada Ringkasan Risalah Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015 melalui iklan di surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 20 Maret 2015 dalam Bahasa Indonesia dan di website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pembayaran dividen tahun buku 2014 dibagikan pada tanggal 17 April 2015.

MATA ACARA RAPAT KETIGA**Penetapan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.**

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja (bekerja sama dengan Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Hasil Voting

Suara Hadir:	5.766.493.784	saham
Suara Tidak Setuju:	57.205.954	saham
Suara Abstain:	47.547.602	saham
Total Suara Setuju:	5.709.287.830	saham = 99,007%

Tindak Lanjut

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited)-sebelumnya bernama Purwantono, Suherman & Surja melakukan pekerjaan dalam lingkup audit yang telah ditetapkan.

Penjelasan lebih rinci dapat dilihat di bagian Auditor Eksternal.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015.

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah ketentuan Pasal 11 ayat 7 dan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 dan 113 UUP.

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014, serta menetapkan besaran gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas serta benefit lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015.

Hasil Voting

Suara Hadir:	5.766.493.784	saham
Suara Tidak Setuju:	76.951.043	saham
Suara Abstain:	39.069.300	saham
Total Suara Setuju:	5.689.542.741	saham = 98,665%

Tindak Lanjut

Memperhatikan Keputusan RUPS Tahunan Jasa Marga tahun buku 2014 yang dilaksanakan tanggal 18 Maret 2015 serta berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-328/MBU/D4/06/2015 tanggal 24 Juni 2015 perihal Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2015 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2014, dan Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKU-232/MBU/06/2015 tanggal 23 Juni 2015, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyetujui penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2015 serta tantiem tahun buku 2014.

Penjelasan lebih rinci dapat dilihat di bagian Dewan Komisaris dan Direksi.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga.

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah ketentuan (i) Pasal 13 ayat 2 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima

Direksi telah menyampaikan laporannya berkenaan dengan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Tahun 2007 dan Obligasi Jasa Marga dan dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat ini.

Hasil Voting

Agenda Kelima merupakan laporan, maka tidak dilakukan pemungutan suara

Tindak Lanjut

-

MATA ACARA RAPAT KEENAM

Perubahan dan Penyusunan Kembali Seluruh Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah ketentuan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 dan Pasal 41 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Keputusan Mata Acara Rapat Keenam

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui Perubahan dan Penyusunan Kembali Seluruh Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat akta pernyataan keputusan Rapat tersendiri dalam rangka perubahan Anggaran Dasar ini serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar ini, termasuk melakukan perubahan berkaitan dengan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hasil Voting

Suara Hadir:	5.766.493.784	saham
Suara Tidak Setuju:	673.810.886	saham
Suara Abstain:	147.243.277	saham
Total Suara Setuju:	5.092.682.898	saham = 88,315%

Tindak Lanjut

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta berikut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Plt. Direktur Administrasi Hukum Umum Kementerian HAM No. AHU-AH.01.03-0019825 tanggal 27 Maret 2015 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036530. AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

Perubahan Pengurus Perseroan.

Dasar Mata Acara Rapat ini adalah Pasal 11 ayat 4 dan 5 serta Pasal 15 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan, antara lain bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh

Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri Sdr. Abdul Hadi Hs. sebagai Direktur PT Jasa Marga (Persero) Tbk. terhitung sejak tanggal 21 Januari 2015 sebagaimana surat Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. No. AA.KP05.04 tanggal 22 Januari 2015, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
2. a. Mengangkat:
 - 1) Sdr. Christantio Prihambodo sebagai Direktur.
 - 2) Sdr. Achiran Pandu Djajanto sebagai Direktur.
 dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal penutupan RUPS ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
 - b. Menetapkan Sdr. Reynaldi Hermansjah sebagai Direktur Independen.
 Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - 1) Sdr. Adityawarman sebagai Direktur Utama
 - 2) Sdr. Hasanudin sebagai Direktur
 - 3) Sdr. Reynaldi Hermansjah sebagai Direktur Independen
 - 4) Sdr. Muh Najib Fauzan sebagai Direktur
 - 5) Sdr. Christantio Prihambodo sebagai Direktur
 - 6) Sdr. Achiran Pandu Djajanto sebagai Direktur
3. Pembagian tugas dan wewenang selanjutnya bagi setiap anggota Direksi beserta penetapan nomenklatur bagi setiap anggota Direksi di luar Direktur Utama ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
4. Memberhentikan dengan hormat:
 - 1) Sdr. Agoes Widjanarko sebagai Komisaris Utama
 - 2) Sdr. Ibnu Purna Muchtar sebagai Komisaris
 - 3) Sdr. Samsaedine sebagai Komisaris Independen
 - 4) Sdr. Michael Dendron Primanto sebagai Komisaris Independen
 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
5. Mengangkat:
 - 1) Sdr. Refly Harun sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - 2) Sdr. Sigit Widyanan sebagai Komisaris Independen
 - 3) Sdr. Taufik Widjoyono sebagai Komisaris
 - 4) Sdr. Hambra sebagai Komisaris
 dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal penutupan RUPS ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
 Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - 1) Sdr. Refly Harun sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - 2) Sdr. Akhmad Syakhroza sebagai Komisaris
 - 3) Sdr. Boediarso Teguh Widodo sebagai Komisaris
 - 4) Sdr. Sigit Widyanan sebagai Komisaris Independen
 - 5) Sdr. Taufik Widjoyono sebagai Komisaris
 - 6) Sdr. Hambra sebagai Komisaris
6. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Hasil Voting

Suara Hadir:	5.766.493.784 saham
Suara Tidak Setuju:	715.780.255 saham
Suara Abstain:	111.338.808 saham
Total Suara Setuju:	5.050.713.529 saham = 87,587%

Tindak Lanjut

Pembagian tugas dan wewenang serta penetapan nomenklatur bagi setiap anggota Direksi di luar Direktur Utama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Jasa Marga No. 070/KPTS/2015 tanggal 01 April 2015 adalah sebagai berikut:

1. Adityawarman: Direktur Utama
2. Christantio Prihambodo: Direktur Operasi
4. Hasanudin: Direktur Pengembangan Usaha
3. Reynaldi Hermansjah: Direktur Keuangan
5. Muh Najib Fauzan: Direktur Sumber Daya Manusia & Umum
6. Achiran Pandu Djajanto: Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Pengumuman Hasil RUPS Tahunan juga memuat Tata Cara Pembayaran Dividen sebagai berikut:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 30 Maret 2015.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 17 April 2015. Bukti Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom – Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jln. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 10220, Telp. (021) 5709009, Fax. (021) 5709026, 5708914 paling lambat pada tanggal 30 Maret 2015 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen
5. tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 02 April 2015. Tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom mulai tanggal 11 Mei 2015.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Jasa Marga melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit serta Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.

Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perseroan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah efektif sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2015, anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 6 (enam) orang dengan komposisi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS JASA MARGA SAMPAI DENGAN 18 MARET 2015

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Representasi Pemegang Saham
Agoes Widjanarko	Komisaris Utama	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012	Negara Republik Indonesia
Mayjen. (Purn.) Samsuedin	Komisaris Independen	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012	Independen
Irjen. Polisi (Purn.) Michael Dendron Primanto	Komisaris Independen	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012	Independen
Ibnu Purna	Komisaris	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012	Negara Republik Indonesia
Akhmad Syakhroza	Komisaris	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012	Negara Republik Indonesia
Boediarso Teguh Widodo	Komisaris	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 11 Maret 2013	Negara Republik Indonesia

Di tahun 2015 terdapat perubahan susunan komposisi Dewan Komisaris Perseroan. Penguatan pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS melalui mekanisme pengambilan suara.

Berdasarkan Risalah RUPS Tahunan No. 38 tanggal 18 Maret 2015, terdapat penguatan pemberhentian Agoes Widjanarko, Ibnu Purna Muchtar, Samsuedin, dan Michael Dendron Primanto serta pengangkatan 4 (empat) anggota Dewan Komisaris yaitu Refly Harun, Sigit Widyanan, Taufik Widjoyono, dan Hambra yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. SR-125/MBU/2015 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. setelah dilakukan penilaian atas profesionalisme dan integritas calon anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Minoritas secara wajar, untuk menjamin kompetensi pengawasan di bidang bisnis Perseroan.

Keempat anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut melengkapi keberagaman pengalaman dan pemahaman atas kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang jalan tol.

Sehingga berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang dilaksanakan tanggal 18 Maret 2015, komposisi Dewan Komisaris Jasa Marga adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS JASA MARGA BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TANGGAL 18 MARET 2015

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Representasi Pemegang Saham
Refly Harun	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015	Independen
Akhmad Syakhroza	Komisaris	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012	Negara Republik Indonesia
Boediarso Teguh Widodo	Komisaris	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 11 Maret 2013	Negara Republik Indonesia
Taufik Widjoyono	Komisaris	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015	Negara Republik Indonesia
Hambra	Komisaris	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015	Negara Republik Indonesia
Sigit Widyawan	Komisaris Independen	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015	Independen

Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut dilakukan melalui pemungutan suara dari peserta RUPS Tahunan yang hadir dengan Total Suara Setuju sebesar 87,587% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS Tahunan (termasuk suara abstain; sesuai Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham).

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*)

Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*). *Board Manual* berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Penyusunan *Board Manual* merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance (GCG)* secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Pengaturan dari *Board Manual* terkait Dewan Komisaris terdapat dalam Bab II tentang Dewan Komisaris yang mengatur sebagai berikut:

1. Tugas Dewan Komisaris
2. Kewajiban Dewan Komisaris
3. Wewenang Dewan Komisaris
4. Hak Dewan Komisaris
5. Persyaratan Dewan Komisaris
6. Keanggotaan Dewan Komisaris
7. Komisaris Independen
8. Komite-Komite Dewan Komisaris
9. Sekretaris Dewan Komisaris
10. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
11. Etika Jabatan Dewan Komisaris
12. Rapat Dewan Komisaris
13. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris
14. Kinerja dan Pelaporan Dewan Komisaris

Persyaratan dan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Penetapan komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan Visi & Misi serta rencana strategis Perseroan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta menjunjung tinggi independensi dan semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Anggota Dewan Komisaris menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak penutupan RUPS pada saat pengangkatan

dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.

Khusus untuk Komisaris Independen jumlahnya minimal 30% dari seluruh Anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan formal, materil dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 dan tertuang dalam Board Manual, yang mencakup antara lain:

1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik, serta berdedikasi dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
2. Memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan.
3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - 2) Pertanggungjawabannya sebagai Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - 3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.
4. Tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
5. Tidak memiliki rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan dan bersedia mengundurkan diri jika terpilih sebagai Anggota Dewan Komisaris.

6. Bukan pengurus partai politik dan/atau calon/Anggota legislatif.
7. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah.
8. Antar para Anggota Dewan Komisaris dan antar Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Uji kelayakan dan kepatutan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Kebijakan menyangkut persyaratan komposisi anggota Dewan Komisaris, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Komposisi anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan latar belakang pengalaman dan kompetensi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris merupakan hak dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Jasa Marga tidak memiliki ketentuan spesifik terkait keberagaman gender di dalam struktur keanggotaan Direksi Perseroan. Perseroan meyakini bahwa dengan adanya keberagaman dalam aspek keahlian, pengalaman dan latar belakang pendidikan akan sangat berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga Perseroan tidak mengenal perbedaan gender dan mengimplementasikan kebijakan yang bersifat non-diskriminatif. Anggota Dewan Komisaris Jasa Marga memiliki keahlian di bidang teknik, keuangan, sumber daya manusia, hukum, ekonomi, dan tata kelola.

Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Perseroan telah mengikuti persyaratan dan tata cara yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris	Tingkat Pendidikan Terakhir			Pengalaman Kerja (tahun)		Usia		Jenis Kelamin	
	S1	S2	S3	<20	≥20	<50	≥50	L	P
Refly Harun			✓		✓	✓		✓	
Akhmad Syakhroza			✓		✓		✓	✓	
Boediarso Teguh Widodo			✓		✓		✓	✓	
Taufik Widjoyono		✓			✓		✓	✓	
Hambra		✓			✓	✓		✓	
Sigit Widyanan		✓			✓		✓	✓	

Keterangan:

L = Laki-laki P = Perempuan

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

TUGAS DEWAN KOMISARIS

Pembagian tugas Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan atas peran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua dan Wakil Ketua dari komite penunjang Dewan Komisaris, sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.

Tugas Pokok Dewan Komisaris adalah:

- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Jangka Panjang Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan untuk menerapkan GCG secara konsisten dan memiliki moral tinggi dalam berusaha serta bertindak

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dewan Komisaris:

- Tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak dan golongan tertentu.
- Beritikad baik, berintegritas, profesional, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
- Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Perseroan.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan pengawasan, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- Tugas terkait Rapat Umum Pemegang Saham
 - Menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perseroan, Laporan Tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi.
 - Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran.
 - Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - Mengusulkan kepada RUPS melalui Direksi, penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan.

- e. Mengajukan usulan indikator pencapaian kinerja (*Key Performance Indicator*) untuk ditetapkan oleh RUPS.
 - f. Menyampaikan laporan triwulan/semester/tahunan mengenai perkembangan realisasi indikator pencapaian kinerja kepada Pemegang Saham.
 - g. Menunjuk salah seorang Anggota Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS. Penunjukan tersebut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
 - h. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
2. Tugas terkait Strategi dan Rencana Kerja
 - a. Mengkaji dan memberikan pendapat mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan yang disiapkan dan disampaikan oleh Direksi, sebelum ditandatangani bersama Direksi.
 - b. Mengkaji, menelaah dan memberikan saran atas usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disampaikan oleh Direksi 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku dimulai.
 - c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun yang lampau diberlakukan.
 - d. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP.
 - e. Menelaah dan memberikan persetujuan serta menandatangani Kontrak Manajemen Korporat antara Dewan Komisaris dengan Direksi Perseroan tentang target ukuran kinerja utama dan pencapaian target RKAP.
 - f. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi antara lain laporan triwulanan pelaksanaan RKAP dan laporan yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
 3. Tugas terkait Fungsi Pengawasan
 - a. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi dan memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perseroan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain (bila ada), termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan, serta menandatangani Laporan Tahunan.
 - b. Menanggapi saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders* yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris dengan menyampaikan hal tersebut kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.
 - c. Memberikan arahan antara lain tentang:
 - 1) Hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perseroan, secara tepat waktu dan relevan.
 - 2) Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.
 - 3) Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi berlaku umum di Indonesia.
 - 4) Kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.
 - 5) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/perusahaan patungan.
 - 6) Kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - 7) Pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.
 4. Tugas terkait Pencalonan Anggota Direksi Perseroan (Nominasi) dan Remunerasi
 - a. Mengusulkan calon Anggota Direksi Perseroan kepada Pemegang Saham.
 - b. Melakukan penelaahan dan pengawasan untuk memastikan bahwa Perseroan telah memiliki strategi dan kebijakan nominasi yang meliputi proses analisis organisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen, seleksi dan promosi.
 - c. Melakukan kajian atas sistem remunerasi yang sesuai bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengajukan kepada RUPS.
 - d. Memastikan bahwa Perseroan memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel.

- e. Mengusulkan remunerasi Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.
 - f. Menelaah usulan honorarium dan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas) Dewan Komisaris dan Direksi bersama dengan Komite terkait dan mengusulkan hal tersebut kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
 - g. Mengusulkan insentif kinerja/tantiem Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan penilaian kinerja Direksi dan pencapaian tingkat kesehatan Perseroan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
5. Tugas terkait Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan
- a. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proses penjurangan calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Anak Perusahaan yang dilakukan Direksi Perseroan, untuk kemudian memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju), serta memberikan alasan apabila tidak menyetujui usulan Direksi Perseroan.
 - b. Memberikan penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya usulan calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Anak Perusahaan dari Direksi Perseroan.
 - c. Dalam hal Dewan Komisaris tidak memberikan penetapan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (b), maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi Perseroan.
 - d. Calon Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan yang telah disetujui tertulis oleh Dewan Komisaris kemudian menandatangani Kontrak Manajemen dengan Direksi Perseroan sebelum diajukan dan ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan.
6. Tugas terkait Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
- a. Melakukan evaluasi kinerja melalui penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris dengan sistem *self assessment* atau sistem lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan tanggapan dan rekomendasi mengenai penetapan KPI Direksi pada setiap awal tahun kerja.
 - c. Melakukan evaluasi masing-masing kinerja Anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.
 - d. Laporan kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan tugas pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - e. Menyusun sistem pengukuran dan penilaian (evaluasi) kinerja Dewan dan individu/Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengajukan kepada RUPS.
 - f. Mengusulkan KPI beserta target-targetnya yang disampaikan setiap tahunnya kepada RUPS untuk disahkan.
 - g. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dan dilaporkan kepada Pemegang Saham.
 - h. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris:
 - 1) Menyusun kebijakan mengenai penilaian kinerja Direksi dan pelaporannya kepada Pemegang Saham.
 - 2) Menelaah kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam kontrak manajemen Direksi/rencana kerja dan anggaran Perseroan baik secara individu maupun kolegal dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham dalam laporan tugas pengawasan secara semesteran atau tahunan.
7. Tugas terkait Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
- a. Menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Perseroan.
 - b. Memantau dan memastikan efektivitas praktik GCG di Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penilaian, yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di Perseroan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilaksanakan secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun.
 - 2) Evaluasi, yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di Perseroan yang dilaksanakan pada tahun berikutnya setelah

- penilaian, meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- 3) Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di Perseroan, yang jika perlu dapat minta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan penilai Independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten dibidang GCG.
 - 5) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS dalam Laporan Tahunan.
8. Tugas terkait Penerapan Manajemen Risiko
 - a. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi yang ditutup oleh Perseroan dalam hubungannya dengan risiko usaha dengan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di Perseroan.
 - b. Melakukan penelaahan atas Manajemen Risiko Perseroan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perseroan, sistem, strategi dan Kebijakan Manajemen Perseroan, pengendalian internal Perseroan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur, hasil penelaahan atas berbagai model pengukuran risiko yang digunakan Perseroan dan atas pelaksanaan manajemen.
 - c. Menyusun kebijakan dan strategi investasi dalam bisnis jalan tol dan nol tol dalam rangka penyusunan RJPP, menyampaikan kepada Direksi sebagai saran, masukan dan pendapat termasuk unsur risiko investasi dan usaha.
 - d. Melakukan evaluasi atas kebijakan investasi dan mengidentifikasi serta menilai potensi risikonya.
 - e. Melakukan evaluasi tahapan proses manajemen investasi dan risiko Perseroan, mulai dari identifikasi sampai dengan pengungkapan serta mitigasi risiko.
 - f. Menyampaikan hasil evaluasi sebagai bahan Direksi untuk mereview dan memperbaiki berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan mitigasi risiko termasuk untuk menghindari terjadinya "*cost overrun*" dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas di bidang investasi jalan tol dan usaha lainnya.
 - g. Menilai risiko atas rencana proyek-proyek dan investasi Perseroan, untuk selanjutnya memberikan pendapat dan atau saran terkait kelanjutan proyek-proyek tersebut.
 9. Tugas terkait Sistem Pengendalian Internal
 - a. Memastikan efektifitas sistem pengendalian internal.
 - b. Memastikan pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal, dengan menilai kompetensi, independensi serta ruang lingkup tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan Komisaris.
 - c. Memastikan Auditor Internal, Auditor Eksternal dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perseroan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
 - d. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam laporan keuangan dan laporan tahunan.
 - e. Membentuk Komite Audit, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS dan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan pemberhentiannya, serta informasi tersebut wajib dimuat dalam laman atau website Perseroan.
 - f. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada dibawah Dewan Komisaris.
 10. Tugas terkait Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
 - a. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam Perseroan.
 - b. Memastikan adanya akurasi data, transparansi dan keterbukaan laporan keuangan Perseroan dan menjamin perlakuan yang adil terhadap Pemegang Saham Minoritas dan *Stakeholders* yang lain, serta akuntabilitas Organ Perseroan dan kepatuhan Perseroan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - c. Memastikan informasi termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan, laporan tahunan

- yang disampaikan Perseroan kepada *shareholder* maupun *stakeholder* Perseroan dilakukan secara tepat waktu, lengkap dan akurat.
- d. Memastikan data/informasi yang disampaikan ke publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Tugas Terkait Teknologi Informasi
- a. Mendapatkan informasi atas sistem IT yang digunakan oleh Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan dan penerapannya, serta aplikasi yang digunakan.
 - b. Memberikan arahan atas implementasi dan rencana sistem IT yang diterapkan Perseroan.
12. Tugas Terkait Pelaporan
- a. Melaporkan kepada Perseroan (*Corporate Secretary*) mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya di Perseroan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya untuk dicatat dalam Daftar Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Tugas Lainnya
- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Pedoman GCG serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.
 - b. Membuat pembagian tugas yang diatur sendiri oleh Dewan Komisaris, pembagian tugas tersebut mencakup seluruh bidang tugas Direksi.
 - c. Melakukan pembagian tugas Anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komite Dewan Komisaris.
 - d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perseroan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
 - e. Bersama dengan Direksi menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Bersama dengan Direksi menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh Anggota Direksi dan Dewan

Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Refly Harun

Komisaris Utama/Komisaris Independen

Bidang Tugas: Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perseroan Merangkap sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.

Uraian Tugas: Memberikan masukan, arahan, rekomendasi dan mengkoordinasikan serta mengintegrasikan masukan dari kelima bidang tugas lainnya, dalam rangka:

- Saran dan nasihat terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan Perseroan serta mengkoordinasikan dan mengintegrasikan masukan dari kelima bidang tugas lainnya
- Penyiapan, penyusunan visi dan misi Perseroan, penyusunan kebijakan dan strategi Rencana Jangka Menengah dan/atau Jangka Panjang Perusahaan, termasuk dalam penyiapan dan penyusunan RKAP Tahunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan RUPS, persetujuan atas penghapusbukuan aktiva tetap, penyertaan modal dan mendirikan anak perusahaan/ perusahaan patungan, membeli atau menjual surat berharga, kerja sama operasi dan investasi yang bersifat strategis yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 tahun atau lebih dari 5-10 tahun dalam bentuk KSO, BOT, BOO dan BRT.
- Memberikan arahan dan rekomendasi atas penetapan, evaluasi dan revisi visi dan misi Perseroan, Rencana Jangka Menengah dan/atau Jangka Panjang Perusahaan, serta RKAP, termasuk persetujuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP, serta persetujuan

pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang bernilai strategis.

- Memimpin dan menjamin tercapainya efektivitas pengambilan keputusan, atas rapat-rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Komisaris-Direksi, serta RUPS dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di lingkungan Dewan Komisaris
- Memberikan arahan kebijakan dan strategi tentang nominasi, remunerasi dan risiko Perseroan.

Akhmad Syakhroza

Komisaris

Bidang Tugas: Organisasi, Sumber Daya Manusia & Umum Merangkap sebagai Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.

Uraian Tugas: Memberikan masukan, arahan, rekomendasi dalam rangka:

- Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam pengembangan dan pengelolaan organisasi, SDM dan Umum.
- Pemberian persetujuan Dewan Komisaris atas usulan penyesuaian dan/atau perubahan struktur organisasi perusahaan di tingkat Pusat, Cabang dan Anak Perusahaan, termasuk sistem dan prosedur tata laksana pengorganisasiannya.
- Pemenuhan kebutuhan penyediaan, pengelolaan dan pengembangan SDM (*human capital*) yang profesional, produktif dan berkompetensi, termasuk sistem dan prosedur tata laksana pengelolaannya.
- Bersama Anggota Komisaris lainnya, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka: (i) penetapan keputusan Dewan Komisaris atas usulan Direksi tentang usulan calon Direksi dan/atau Anggota Komisaris Anak Perusahaan, untuk kemudian ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini termasuk untuk usulan pengangkatan pejabat struktural inti (strategic) 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, yaitu Corporate Secretary dan Head of Internal Audit; (ii) melepas atau menjaminkan

aktiva tetap Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris.

- Mendorong tercapainya peningkatan efisiensi, efektivitas dan transparansi pengelolaan dan pemberdayaan SDM dan Umum Perseroan.
- Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan logistik, pengamanan aset dan aktivitas umum lainnya.
- Melaksanakan dan Mengawasi arahan kebijakan dan strategi tentang nominasi, remunerasi dan risiko Perseroan dan mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.

Boediarso Teguh Widodo

Komisaris

Bidang Tugas: Operasi

Uraian Tugas: Memberikan masukan, arahan, rekomendasi dalam rangka:

- Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan ruas jalan tol untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Menteri Pekerjaan Umum dan/atau mencapai tingkat keandalan jalan tol yang tinggi, sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pengguna jalan tol.
- Pemberian masukan dan rekomendasi dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pengelolaan manajemen lalu lintas jalan tol dan peningkatan efisiensi dan efektivitas perbaikan dan pemeliharaan jalan tol beserta fasilitas/rambu-rambunya, termasuk pengembangan sistem *Performance-Based Maintenance Contract*, penerapan manajemen risiko, serta modernisasi pengoperasionalisasian jalan tol.
- Memastikan tercapainya kelancaran dan peningkatan pelayanan transaksi yang memenuhi SPM dan pengamanan pendapatan tol, pengelolaan dan pemberian pelayanan lalu lintas jalan tol yang memenuhi standar keamanan, kecepatan tempuh serta peningkatan *response time* penanganan gangguan perjalanan.

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya untuk operasionalisasi pelayanan transaksi dan lalu lintas jalan tol, serta dalam pemeliharaan jalan tol.

Sigit Widyawan

Komisaris Independen

Bidang Tugas: Keuangan

Merangkap sebagai Ketua Komite Audit

Uraian Tugas: Memberikan masukan, arahan, rekomendasi dalam rangka:

- Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam pengelolaan keuangan dan perkuatan struktur keuangan Perseroan, sesuai dengan standar yang berlaku.
- Bersama Anggota Komisaris lainnya, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka: (i) penyusunan dan penetapan persetujuan atas usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan (RKAP); (ii) menerima dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (termasuk memberi pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan rapat Dewan Komisaris); (iii) melepas atau menjaminkan aktiva tetap Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris; (iv) melepas sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perseroan/badan usaha lain; (v) mengikat Perseroan sebagai penjamin dan/atau keputusan untuk tidak menagih lagi/menghapuskan dari pembukuan piutang macet, yang menyangkut/mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris; (vi) mengalihkan, melepas hak atau menjamin harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya sama atau kurang dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain (untuk yang lebih dari 50% harus mendapat persetujuan

RUPS); (vii) membeli dan/atau menjual surat berharga pada pasar modal, kecuali terhadap surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia.

- Penyusunan dan pengendalian portofolio investasi keuangan dan pengelolaan manajemen risiko terkait di bidang keuangan, serta manajemen investasi dan akuntansi, dalam rangka pembangunan jalan tol baru, mendapatkan hak konsesi perusahaan jalan tol dan/atau divestasi/*spin off* Anak Perusahaan, termasuk dalam rangka pengembangan usaha lainnya.
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi keuangan, pengamanan pendapatan tol serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan dan transaksi keuangan.

Taufik Widjono

Komisaris

Bidang Tugas: Pengembangan Usaha

Uraian Tugas: Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi dalam rangka:

- Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam pengembangan usaha tol dan usaha lainnya.
- Penyusunan dan penetapan rencana investasi dengan risiko-risikonya di bidang pengembangan usaha bisnis tol terkait dengan pembangunan jalan tol baru dan akuisisi ruas-ruas jalan tol.
- Penyusunan dan penetapan rencana investasi dengan risiko-risikonya di bidang pengembangan usaha lainnya dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya Perseroan.
- Pelaksanaan pembangunan jalan tol baru dan perolehan hak konsesi jalan tol baru ataupun akuisisi jalan tol, dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan.
- Pengelolaan manajemen risiko berserta mitigasinya terkait dengan pembangunan jalan tol baru dan usaha lainnya.
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan teknis dan rekayasa teknik pelaksanaan pembangunan jalan tol baru maupun dalam peningkatan kapasitas jalan tol, serta pengelolaan usaha lainnya.

- Bersama Anggota Komisaris lainnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka penetapan keputusan Dewan Komisaris atas usulan Direksi dalam rangka: (i) mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perusahaan/badan usaha lain atau menyelenggarakan perusahaan baru; (ii) melepas sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perusahaan/badan usaha lain; (iii) mengadakan kerja sama dengan badan usaha/pihak lain berupa kerja sama operasi dan investasi yang bersifat strategis dan mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan serta berlaku untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun/jangka panjang; (iv) mengadakan kerja sama dalam bentuk bangun guna serah (BOT), bangun guna milik (BOO) atau bangun sewa serah (BRT) sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh rapat Komisaris.
- Kepatuhan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Dewan Komisaris terus-menerus dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Wewenang Dewan Komisaris

1. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi untuk tindakan Direksi dalam hal:
 - a. Menerima dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang.
 - b. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris.
 - c. Melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (*fixed asset*) Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris.
 - d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan atau badan usaha lain atau menyelenggarakan perusahaan baru.
 - e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perseroan atau badan usaha lain.
 - f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris.
 - g. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris.
 - h. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya kurang dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
 - i. Membeli dan/atau menjual surat berharga pada pasar modal/lembaga keuangan lainnya, kecuali terhadap surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - j. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, berupa kerja sama operasi dan investasi yang bersifat strategis dan mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan serta berlaku untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun (jangka panjang), kecuali kerja sama penggunaan jasa teknis dan/atau operasional dari pihak lain.

Hambra

Komisaris

Bidang Tugas: Teknologi Informasi, Risiko dan Hukum

Uraian Tugas: Memberikan masukan, arahan, rekomendasi dalam rangka:

- Penetapan arah kebijakan dan strategi Perseroan dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, manajemen risiko dan pembinaan hukum.
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Perseroan, manajemen risiko serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, secara efektif, handal dan realible serta transparan.
- Pengelolaan dan penyelesaian permasalahan di bidang hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Tindak lanjut dan/atau penyelesaian saran dan rekomendasi atas temuan-temuan auditor internal dan auditor eksternal.
- Mendorong tercapainya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Perseroan dan tercapainya kepatuhan terhadap ketentuan perundang undangan yang berlaku serta tata kelola perusahaan yang baik.

- k. Mengadakan kerja sama bangun guna serah (BOT), bangun guna milik (BOO) atau bangun sewa serah (BRT) sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris.
 - l. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi.
 - m. Mencalonkan anggota Direksi dan Komisaris pada anak perusahaan dari Perseroan.
3. Mengusulkan kepada RUPS, melalui Direksi, penunjukkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan.
 4. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
 5. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 6. Dalam rangka melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban Perseroan.
 7. Dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dan selanjutnya pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi.
 8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, atau RUPS membatalkan pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
 10. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar.

Independensi Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan telah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku serta berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas termasuk pemegang saham publik dan pemangku kepentingan lainnya.

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Sebagai perusahaan publik dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, Jasa Marga telah memenuhi ketentuan yang diatur regulator pasar modal terkait kriteria Komisaris Independen. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Berasal dari luar perusahaan publik.
- 2) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi atau pemegang saham Utama perusahaan.
- 3) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan usaha perusahaan.
- 4) Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.
- 5) Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
- 6) Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Jumlah Komisaris Independen Jasa Marga telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, dimana setiap perusahaan publik harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 18 Maret 2015, Perseroan memiliki 2 (dua) Komisaris Independen yaitu Refly Harus dan Sigit Widyawan, dari total keseluruhan 6 (enam) anggota Dewan Komisaris atau berjumlah 33,33% yang berarti Perseroan telah memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku.

PERNYATAAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen Perseroan tidak memiliki saham Perseroan, serta tidak ada hubungan dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya.

Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Perusahaan Lain

Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda.

Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham dapat dilihat di bagian Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Kepengurusan perusahaan lain anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada table sebagai berikut:

KEPENGURUSAN DEWAN KOMISARIS JASA MARGA DI PERUSAHAAN LAIN

Nama	Kepengurusan di Perusahaan Lain		
	Sebagai Dewan Komisaris	Sebagai Direksi	Sebagai Pemegang Saham
Refly Harun	x	x	x
Akhmad Syakhroza	x	x	x
Boediarso Teguh Widodo	x	x	x
Taufik Widjoyono	x	x	x
Hambra	x	x	x
Sigit Widyawan	x	x	x

Keterangan:

- ✓ ada
- x tidak ada

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan badan usaha milik swasta.
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengurus partai politik dan atau calon/anggota legislatif.
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Selama tahun 2015, tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, setiap Anggota Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk membuat Daftar Khusus, yang berisikan keterangan kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan maupun perusahaan lain. Daftar Khusus disimpan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

Untuk menjaga independensi dan profesionalisme, setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki etika sebagai berikut:

1. Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas unsur obyektivitas, profesional dan independen demi kepentingan Perseroan yang seimbang dengan kepentingan *Stakeholders*.

2. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan menempatkan kepentingan Dewan Komisaris secara keseluruhan, diatas kepentingan pribadi.
3. Selama menjabat, Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk:
 - a. Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain.
 - b. Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.
 - c. Berkompetisi dengan Perseroan yaitu menggunakan pengetahuan/ informasi dari dalam (*inside information*) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan Perseroan.
 - d. Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota Dewan Komisaris, yang ditentukan oleh RUPS.
4. Menjaga kerahasiaan informasi-informasi Perseroan yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
6. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.
7. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.
8. Tidak merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung dengan Perseroan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan (Pakta Integritas) dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS dan/atau OJK.
10. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (*insider trading*) untuk memperoleh keuntungan pribadi.
11. Dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung imbalan dan/atau hadiah, dan/atau hibah dan/atau sumbangan dan/atau *entertainment* dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perseroan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhinya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/ jabatannya.
12. Tidak diperkenankan memberikan dan menerima hadiah, bingkisan, parcel, karangan bunga dan bentuk pemberian lainnya pada hari raya keagamaan maupun hari-hari besar/ tertentu lainnya kepada pejabat/karyawan di lingkungan instansi Pemerintah dan/atau pihak yang memiliki hubungan bisnis.

Program Pelatihan/ Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Selama tahun 2015 anggota Dewan Komisaris telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar sebagai berikut:

PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DIKUTI OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2015

No.	Anggota Dewan Komisaris	Pelatihan
1	Refly Harun	Enterprise Risk Management Benchmarking in Spain
2	Sigit Widyawan	Enterprise Risk Management Benchmarking in Spain

Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2015, Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat, baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Dewan Komisaris telah memiliki Tata Tertib rapat Dewan Komisaris berdasarkan Board Manual. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak.

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal dan rapat dengan mengundang Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional, investasi, pengelolaan finansial dan SDM Jasa Marga.

Selama tahun 2015, Dewan Komisaris melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 16 kali.

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS TAHUN 2015

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Persentase Kehadiran (%)
Refly Harun *	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	14	13	93
Akhmad Syakhroza	Komisaris	16	15	94
Boediarso Teguh Widodo	Komisaris	16	10	63
Taufik Widjoyono *	Komisaris	14	11	79
Hambra *	Komisaris	14	9	64
Sigit Widyawan *	Komisaris Independen	14	13	93
Agoes Widjanarko **	Komisaris Utama	2	2	100
Ibnu Purna **	Komisaris	2	2	100
Mayjen. (Purn.) Samsuedin **	Komisaris Independen	2	2	100
Irjen. Polisi (Purn.) Michael Dendron Primanto **	Komisaris Independen	2	2	100
			Rata-rata	88

* Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 18 Maret 2015

** Berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 18 Maret 2015

Catatan:

- Ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat disebabkan yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota atau menghadiri acara/rapat penting yang tidak dapat diwakilkan.
- Perbedaan Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri adalah karena perbedaan periode jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.

Selain rapat internal, Dewan Komisaris juga mengadakan rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Rekapitulasi rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi secara detail dapat dilihat pada Bagian hubungan Dewan Komisaris bersama Direksi.

Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris Jasa Marga telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Dewan Komisaris. risalah rapat di tandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh peserta yang hadir serta didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu organ pendukung meliputi Sekretaris Dewan Komisaris, Komite audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.

Pembahasan Mengenai Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko akan dibahas dalam bagian tersendiri.

Agenda Rapat Dewan Komisaris tahun 2015 di antaranya membahas hal-hal sebagai berikut:

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2015

No.	Tanggal Rapat (tgl-bl-thn)	Agenda Rapat	Anggota Dewan Komisaris yang Hadir
1.	20-01-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengadaan KAP Untuk Audit Tahun Buku 2015. • Evaluasi Penugasan Komite Investasi dan Risiko Usaha Tahun 2014. • Paparan dan Pengesahan Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2015. 	1. Agoes Widjanarko 2. Ibnu Purna Muchtar 3. Boediarso Teguh Widodo 4. Akhmad Syakhroza 5. Mayjen. (Purn.) Samsuedin 6. Irjen. Polisi (Purn.) Michael Dendron Primanto
2.	18-02-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Awal atas Audit Tahun Buku 2014 • Laporan Awal Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2014 Dewan Komisaris. 	1. Agoes Widjanarko 2. Ibnu Purna Muchtar 3. Boediarso Teguh Widodo 4. Akhmad Syakhroza 5. Mayjen. (Purn.) Samsuedin 6. Irjen. Polisi (Purn.) Michael Dendron Primanto

No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda Rapat	Anggota Dewan Komisaris yang Hadir	No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda Rapat	Anggota Dewan Komisaris yang Hadir
3.	24-03-2015	Review dan Konsolidasi Tugas-tugas Mendesak Dewan Komisaris.	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Boediarso Teguh Widodo 4. Sigit Widyawan 5. Taufik Widjoyono 6. Hambra	11.	28-07-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Semester 1 2015. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Teknologi Informasi. Monitoring dan Evaluasi serta Arahan Rencana dan Pelaksanaan Pengembangan Usaha Lain Triwulan 2 2015. Permohonan Persetujuan Ijin Prinsip Persetujuan Kerja Sama Konsorsium High Speed Railway Jakarta-Bandung. 	1. Akhmad Syakhroza 2. Boediarso Teguh Widodo 3. Sigit Widyawan 4. Taufik Widjoyono 5. Hambra
4.	07-04-2015	Review Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2015.	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Boediarso Teguh Widodo 4. Sigit Widyawan 5. Taufik Widjoyono 6. Hambra	12.	24-08-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Monitoring dan Evaluasi Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan 2 2015. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan SPM. 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Sigit Widyawan 4. Taufik Widjoyono 5. Hambra
5.	22-04-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris Triwulan 1 2015. Monitoring dan Evaluasi serta Arahan Rencana dan Pelaksanaan Pengembangan Usaha Lain Triwulan 1 2015. Laporan Self Assessment Kinerja Komite-komite Tahun 2014. Penetapan Program Kerja Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko. 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Sigit Widyawan 4. Taufik Widjoyono 5. Hambra	13.	25-09-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Pembahasan Laporan Kegiatan dan Hasil Penugasan kepada Komite Audit Semester 1 2015. Pembahasan Laporan Kegiatan dan Hasil Penugasan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Semester 1 2015. Pembahasan Rencana Pengadaan KAP Tahun 2016. 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Boediarso Teguh Widodo 4. Sigit Widyawan 5. Taufik Widjoyono 6. Hambra
6.	21-05-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Monitoring dan Evaluasi Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan 1 2015. Arahan Dewan Komisaris tentang Kebijakan Mutu, Pelayanan dan Pelaksanaannya terkait Evaluasi Realisasi Program Pemeliharaan Jalan Tol dan Manajemen Lalu Lintas Jalan Tol dalam Program RKAP Capex Tahun 2015. KPI Komite Audit, Piagam Komite Nominasi, remunerasi dan Risiko. 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Sigit Widyawan 4. Hambra	14.	22-10-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Paparan dan Pembahasan Hasil Evaluasi Anggota Dewan Komisaris Bidang Keuangan dan Komite atas Rancangan RKAP 2016 yang disusun Direksi. Monitoring dan Evaluasi Komite Audit atas Pelaksanaan Sistem Administrasi Keuangan IFRS di Jasa Marga. Monitoring dan Evaluasi dan Arahan Rencana dan Pelaksanaan Pengembangan Usaha Lain Triwulan 3 2015. 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Sigit Widyawan 4. Taufik Widjoyono
7.	01-06-2015	Calon Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan Jasa Marga.	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Sigit Widyawan 4. Taufik Widjoyono	15.	17-11-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Audit oleh Auditor Eksternal dan Auditor Internal. Monitoring dan Evaluasi Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan 3 2015. Monitoring dan Evaluasi Usulan dan Pelaksanaan Penetapan Calon Direksi dan atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan. 	1. Refly Harun 2. Boediarso Teguh Widodo 3. Sigit Widyawan 4. Taufik Widjoyono
8.	08-06-2015	Calon Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan Jasa Marga.	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Sigit Widyawan 4. Taufik Widjoyono	16.	17-12-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris-Direksi Triwulan 3 2015. Pembahasan Laporan Kegiatan dan Hasil Penugasan Komite-komite Triwulan 3 2015. Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Prognosa Desember 2015. 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Boediarso Teguh Widodo 4. Sigit Widyawan 4. Hambra
9.	09-06-2015	Calon Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan Jasa Marga.	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Boediarso Teguh Widodo 4. Taufik Widjoyono				
10.	16-06-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan SPM. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit Auditor Eksternal. Pembahasan Arahan Dewan Komisaris atas Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir. 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Boediarso Teguh Widodo 4. Sigit Widyawan 5. Hambra				

Keputusan-keputusan Dewan Komisaris tahun 2015

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Jasa Marga terus mendorong pelaksanaan keputusan pengawasan dan penasehatan yang semakin efektif. Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah mengeluarkan berbagai keputusan yang bersifat pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Pengangkatan Kembali Ketua dan Anggota Komite Investasi & Risiko Usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Penunjukan Anggota Dewan Komisaris untuk memimpin RUPST PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tanggal 18 Maret 2015.
3. Perubahan Komite Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
4. Penggantian Ketua dan Pengangkatan Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
5. Penggantian dan Pengangkatan Sebagai Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
6. Revisi Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
7. Persetujuan Dan Pengesahan Revisi Capex Pada Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2015.
8. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2016.
9. Perubahan atas Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-046/II/2014 Jo No. KEP-063/IV/2015 Tentang Komite Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
10. Perubahan atas Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-065/IV/2015 Tentang Penggantian Ketua dan Pengangkatan Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
11. Perubahan atas Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-070/IV/2015 Tentang Revisi Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk
12. Pembentukan Panitia Negosiasi Harga Jasa Akuntan Publik PT Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk Tahun Buku 2016.
13. Persetujuan dan Pengesahan Review RJPP 2013-2017 PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris-Direksi Selama Tahun 2015

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi Perseroan dan mencari solusi terbaik yang disepakati bersama yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi. Keputusan-keputusan rapat meliputi aspek-aspek bidang investasi jalan tol dan non tol, bidang operasional dan bidang keuangan & SDM. Di dalam keputusan tersebut dapat mengandung unsur perencanaan, kebijakan dan strategi, serta pelaksanaan.

Dewan Komisaris menaruh perhatian yang besar bahwa atas keputusan-keputusan rapat yang telah dibahas dan disepakati dalam Rapat Dewan Komisaris-Direksi ditindaklanjuti oleh Direksi. Dari hasil pemantauan dan evaluasi Dewan Komisaris selama tahun 2015 pada prinsipnya sebagian besar telah selesai ditindaklanjuti dan beberapa keputusan masih dalam proses penyelesaian, sehingga salah satu fokus Dewan Komisaris selanjutnya adalah memastikan bahwa keputusan-keputusan yang masih dalam proses tersebut tetap berjalan dan dapat dipercepat penyelesaiannya. Jika ada perkembangan baru yang menghambat ataupun menyebabkan suatu keputusan tidak dapat diteruskan penyelesaiannya, maka ditinjau dan dibahas kembali dengan Direksi.

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2015

Dalam tahun 2015, kinerja Dewan Komisaris dalam perspektif Proses Internal Dewan Komisaris yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja memperoleh pencapaian penilaian kinerja yaitu sebesar 1,94. Namun kinerja dalam memberikan pengawasan atas upaya Direksi untuk pencapaian target perolehan hak pengusahaan jalan tol dan penambahan pengoperasian jalan tol baru belum memperlihatkan hasil yang signifikan, karena pencapaian target dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali Direksi, di antaranya terkait proses pembebasan lahan.

Secara keseluruhan, realisasi pencapaian indikator kinerja kunci Dewan Komisaris tahun 2015 sangat baik, yaitu mencapai nilai 4,94 dan meningkat dari capaian tahun 2014 sebesar 4,80. Rincian realisasi pencapaian indikator kinerja kunci Dewan Komisaris tahun 2015 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

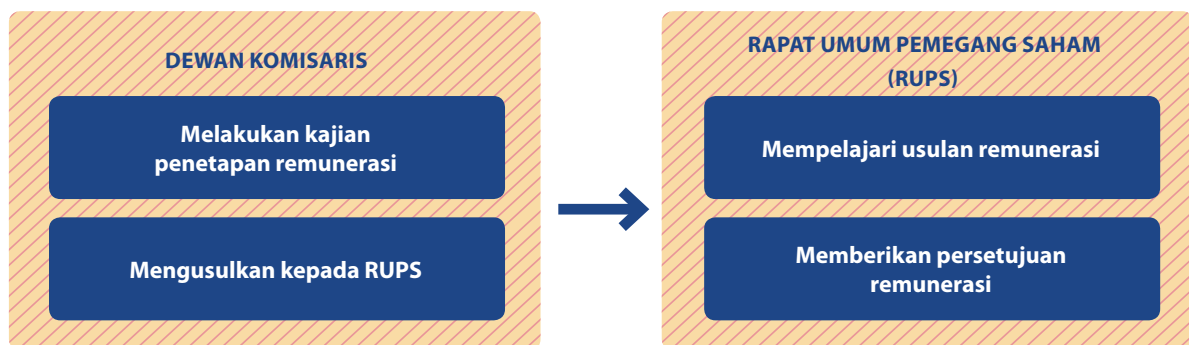
REALISASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2015

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot (%)	Nilai KPI	
			Target	Realisasi
1	RUPS	15	0,75	0,75
2	Pengawasan Keuangan	11	0,55	0,55
3	Pengawasan Operasional	10	0,50	0,50
4	Pengawasan Pengembangan	10	0,50	0,50
5	Pengawasan Sumber Daya Manusia	4	0,20	0,20
6	Pengawasan Kepatuhan	10	0,50	0,50
7	Proses Internal Dewan Komisaris	40	2,00	1,94
TOTAL		100	5,00	4,94

Prosedur, Dasar Penetapan dan Besarnya Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Merujuk pada Pasal 96 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sedangkan berdasarkan Pasal 113 UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, diatur bahwa ketentuan mengenai besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Bentuk Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan (selain gaji) mengacu pada peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan saat ini telah mengikuti peraturan tersebut dimana Remunerasi Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Honorarium.
2. Tunjangan.
3. Fasilitas.
4. Tantiem/Insentif Kinerja.
5. Asuransi Purna Jabatan.

Dengan proporsi besaran Honorarium sebagai berikut:

- Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama.
- Honorarium Anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama.

Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, serta kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, serta tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Sedangkan tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*).

Penghasilan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS yang berlaku selama satu tahun.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada BUMN, struktur remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Honorarium.
2. Tunjangan.

- a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
 - b. Tunjangan Transportasi.
 - c. Asuransi Purna Jabatan.
 - d. Tunjangan Pakaian Dinas.
3. Fasilitas.
 - a. Fasilitas Kesehatan.
 - b. Fasilitas Bantuan Hukum.
 - c. Fasilitas Perkumpulan Profesi.
 4. Tantiem.

REALISASI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2015

Memperhatikan Keputusan RUPS Tahunan Jasa Marga tahun buku 2014 yang dilaksanakan tanggal 18 Maret 2015 serta berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-328/MBU/D4/06/2015 tanggal 24 Juni 2015 perihal Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2015 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2014, dan Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKU-232/MBU/06/2015 tanggal 23 Juni 2015, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyetujui penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2015 serta tantiem tahun buku 2014.

REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2015 (RUPIAH PENUH)

Nama	Honorarium	Transport	Tantiem	THR	Total
Refly Harun * Komisaris Utama/Komisaris Independen	501.880.645	97.824.194	-	53.100.000	652.804.839
Akhmad Syakhroza Komisaris	573.480.000	111.780.000	1.214.809.479	47.790.000	1.947.859.479
Boediarso Teguh Widodo Komisaris	573.480.000	111.780.000	985.160.563	47.790.000	1.718.210.563
Taufik Widjoyono * Komisaris	451.692.581	88.041.774	-	47.790.000	587.524.355
Hambra * Komisaris	451.692.581	88.041.774	-	47.790.000	587.524.355
Sigit Widyanan * Komisaris Independen	451.692.581	88.041.774	-	47.790.000	587.524.355
Agoes Widjanarko ** Komisaris Utama	133.548.387	26.709.677	1.349.788.309	-	1.510.046.373
Ibnu Purna ** Komisaris	120.193.548	24.038.710	1.214.809.479	-	1.359.041.737
Mayjen. (Purn.) Samsuudin ** Komisaris Independen	120.193.548	24.038.710	1.214.809.479	-	1.359.041.737
Irjen. Polisi (Purn.) Michael Dendron Primanto ** Komisaris Independen	120.193.548	24.038.710	1.214.809.479	-	1.359.041.737
Joyo Winoto *** Komisaris	-	-	232.977.160	-	232.977.160

* Menjadi anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 18 Maret 2015

** Berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 18 Maret 2015

*** Berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris Jasa Marga sejak 11 Maret 2014

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Komite pendukung Dewan Komisaris Jasa Marga meliputi Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.

Penjelasan mengenai Komite Dewan Komisaris akan dibahas tersendiri.

Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan Perseroan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Komposisi Direksi

Direksi diangkat oleh RUPS, dan periode jabatan masing-masing anggota Direksi adalah untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, diberhentikan oleh Dewan Komisaris atau berdasarkan keputusan RUPS.

Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2015, anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

KOMPOSISI DIREKSI JASA MARGA SAMPAI DENGAN 18 MARET 2015

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Adityawarman	Direktur Utama	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012
Hasanudin	Direktur Operasi	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012
Abdul Hadi Hs.	Direktur Pengembangan Usaha	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012
Reynaldi Hermansjah	Direktur Keuangan	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012
Muh Najib Fauzan	Direktur SDM dan Umum	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012

Di tahun 2015 terdapat perubahan susunan komposisi Direksi Perseroan. Penguatan pemberhentian dan pengangkatan Direksi dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS melalui mekanisme pengambilan suara. Komposisi dan jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perseroan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Berdasarkan Risalah RUPS Tahunan No. 38 tanggal 18 Maret 2015, terdapat penerimaan pengunduran diri Direksi sebelumnya, yaitu Abdul Hadi Hs., serta pengangkatan Direksi baru yaitu Christantio Prihambodo dan Achiran Pandu Djajanto sebagai Direktur berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna No. SR-124/MBU/2015 tentang Perubahan Susunan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal penutupan RUPS Tahunan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah tanggal pengangkatannya.

Sehingga berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 yang dilaksanakan tanggal 18 Maret 2015, komposisi Direksi Jasa Marga adalah sebagai berikut:

KOMPOSISI DIREKSI JASA MARGA BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2015

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Adityawarman	Direktur Utama	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012
Christantio Prihambodo	Direktur	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015
Hasanudin	Direktur	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012
Reynaldi Hermansjah	Direktur/Direktur Independen	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012
Muh Najib Fauzan	Direktur	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Januari 2012
Achiran Pandu Djajanto	Direktur	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 18 Maret 2015

Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui pemungutan suara dari peserta RUPS Tahunan yang hadir dengan Total Suara Setuju sebesar 87,587% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS Tahunan (termasuk suara abstain; sesuai Peraturan Bapem-LK No. IX.J.1, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham).

Dalam Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut juga dinyatakan bahwa penetapan pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksi beserta penetapan nomenklatur bagi setiap anggota Direksi di luar Direktur Utama agar ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Direksi.

Pembidangan tugas Direksi telah dilakukan pada tahun 2015. Direktur Utama telah mengusulkan pembidangan Direksi Perseroan yang ditunjuk berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 dalam Rapat Direksi tanggal 24 Maret 2015.

Hasil pembidangan tugas Direksi tersebut ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 70/KPTS/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk juncto No. 71/KPTS/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penetapan Jabatan Anggota Direksi selain Direktur Utama sesuai dengan Pembidangan Tugas dan Wewenang Direksi. Pembidangan tugas Direksi pada tahun 2015 merujuk pada pembidangan tugas Direksi yang dilakukan pada tahun 2014.

Dengan demikian, komposisi Direksi Perseroan beserta penetapan nomenklatur dan pembidangan tugas bagi setiap anggota Direksi (di luar Direktur Utama) adalah sebagai berikut:

1. Adityawarman sebagai Direktur Utama
2. Christantio Prihambodo sebagai Direktur Operasi
3. Hasanudin sebagai Direktur Pengembangan Usaha
4. Reynaldi Hermansjah sebagai Direktur Keuangan/Direktur Independen
5. Muh Najib Fauzan sebagai Direktur SDM dan Umum
6. Achiran Pandu Djajanto sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Persyaratan dan tata cara pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi Perusahaan dan pengaturan terkait penyaringan atau nominasi calon Anggota Direksi dan penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) bagi anggota Direksi harus mengikuti Peraturan Menteri Negara BUMN No.

PER-20/MBU/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2012 tanggal 01 Oktober 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Peraturan tersebut dapat diunduh di situs web Kementerian BUMN.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board Manual*)

Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*). *Board Manual* berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Pengaturan dari *Board Manual* terkait Direksi terdapat dalam Bab III tentang Direksi yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas Direksi
2. Kewajiban Direksi
3. Wewenang Direksi
4. Hak Direksi
5. Persyaratan Direksi
6. Keanggotaan Direksi
7. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
8. Etika Jabatan Direksi
9. Rapat Direksi
10. Evaluasi Kinerja Direksi
11. Corporate Secretary
12. Internal Audit

Persyaratan dan Keberagaman Komposisi Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Penetapan komposisi dan jumlah anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan Visi & Misi serta rencana strategis Perseroan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta menjunjung tinggi independensi dan semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Anggota Direksi menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak penutupan RUPS pada saat pengangkatan dan berakhir pada penutupan RUPS yang ke-5 setelah pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu.

Direksi harus memenuhi persyaratan formal, materil dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 dan tertuang dalam Board Manual, yang mencakup antara lain:

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas, kepemimpinan, jujur dan perilaku yang baik serta kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.
2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan.
3. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan, pengalaman dengan rekam jejak yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga sebelum pencalonan.
4. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, perusahaan dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - 2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - 3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak

memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. Tidak menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
6. Bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
7. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.
8. Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk yang timbul karena perkawinan.

Direksi Jasa Marga terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu 1 (satu) Direktur Utama dan 5 (lima) Direktur, seluruhnya berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan.

Semua anggota Direksi Jasa Marga memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian memadai yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Pembagian tugas masing-masing anggota Direksi Perseroan ditetapkan untuk dapat menjalankan aktivitas manajemen sesuai dengan Visi dan Misi serta rencana Perseroan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengangkatan Direksi telah melalui proses *fit & proper test* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan GCG. Mekanisme penjurangan atau nominasi calon anggota Direksi diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015. Pemegang Saham Dwiwarna melaksanakan *fit and proper test* dengan menggunakan jasa pihak independen. Hasil dari pihak independen ini kemudian diajukan kepada RUPS untuk dilakukan proses selanjutnya.

Berdasarkan peraturan tersebut, status uji kemampuan dan kepatutan Direksi Jasa Marga yang menjabat sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut:

STATUS UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DIREKSI JASA MARGA

Nama	Domisili	Fit and Proper Test
Adityawarman	Jakarta	Lulus
Christantio Prihambodo	Jakarta	Lulus
Hasanudin	Jakarta	Lulus
Reynaldi Hermansjah	Jakarta	Lulus
Muh Najib Fauzan	Jakarta	Lulus
Achiran Pandu Djajanto	Jakarta	Lulus

Penentuan komposisi anggota Direksi merupakan hak dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Jasa Marga meyakini bahwa dengan adanya keragaman dalam aspek keahlian, pengalaman dan latar belakang pendidikan akan sangat berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Direksi sehingga Jasa Marga tidak mengenal perbedaan gender dan mengimplementasikan kebijakan yang bersifat non-diskriminatif. Anggota Direksi Jasa Marga memiliki keahlian di bidang teknik, keuangan, hukum, tata kelola, sumber daya manusia, dan ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Perseroan telah mengikuti persyaratan dan tata cara yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Direksi	Tingkat Pendidikan Terakhir			Pengalaman Kerja (tahun)		Usia		Jenis Kelamin	
	S1	S2	S3	≤ 20	≥ 20	≤ 50	≥ 50	L	P
Adityawarman		✓			✓		✓	✓	
Christantio Prihambodo	✓				✓		✓	✓	
Hasanudin		✓			✓		✓	✓	
Reynaldi Hermansjah	✓				✓	✓		✓	
Muh Najib Fauzan		✓			✓		✓	✓	
Achiran Pandu Djajanto			✓		✓		✓	✓	

Keterangan:
L = Laki-laki
P = Perempuan

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi menjalankan tugas pelaksanaan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai amanat dari Pemegang Saham yang ditetapkan dalam RUPS. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi hasil pemeriksaan auditor internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar maupun ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DIREKSI

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan jabatan masing-masing anggota Direksi.

Tugas pokok Direksi adalah:

1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan.
2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direksi:

1. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
2. Memperhatikan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak dan golongan tertentu.
3. Beritikad baik, berintegritas, profesional, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab serta menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten.
4. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Perseroan.

Prinsip dasar dalam melaksanakan tugas Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
4. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.

KEWAJIBAN DIREKSI

Dalam mengurus Perseroan Direksi wajib melaksanakan:

1. Tugas terkait Pemegang Saham/RUPS
 - a. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan.
 - b. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta laporan lainnya.
 - c. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK selambat-lambatnya bulan ke-4 (empat) sejak tahun buku berakhir.
 - d. Menyediakan Laporan Tahunan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan.
 - e. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - f. Menyelenggarakan RUPS Tahunan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
 - g. Menyampaikan Laporan Keuangan, laporan berkala lainnya kepada Pemegang Saham menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - h. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) kepada Pemegang Saham.
 - i. Wajib memberitahukan perubahan dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Menteri BUMN.
2. Tugas terkait Strategi dan Rencana Kerja
 - a. Merumuskan, menetapkan dan mengkaji visi, misi, strategi dan nilai-nilai Perusahaan untuk dikomunikasikan dan disetujui Dewan Komisaris; sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir.
 - b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
 - c. Menyiapkan pada waktunya RJPP/rencana pengembangan Perseroan yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perseroan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun termasuk rencana-rencana lainnya

- yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan pengesahaan.
- d. Menyiapkan pada waktunya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) selambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku dimulai dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan pengesahannya kepada rapat Dewan Komisaris.
 - e. Mengupayakan pencapaian sasaran jangka panjang dan target jangka pendek sebagaimana yang tertuang dalam RJPP dan RKAP dengan menetapkan target kinerja yang diturunkan per direktorat dan jabatan struktural sesuai struktur organisasi Perseroan.
3. Tugas terkait Manajemen Risiko
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko.
 - b. Membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
 - c. Melakukan evaluasi dan arahan strategi manajemen risiko yang diterapkan di Perseroan.
 4. Tugas terkait Pengendalian Internal
 - a. Menetapkan dan menerapkan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi, kegiatan usaha dan aset Perseroan.
 - b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal.
 5. Tugas terkait Sistem Akuntansi dan Pembukuan
 - a. Menyusun sistem akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
 - b. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya modal yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisa keuangan tepat waktu dan akurat serta prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.
 6. Tugas terkait Sumber Daya Manusia
 - a. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya.
 - b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan (perencanaan, rekrutmen, promosi, mutasi, rotasi, evaluasi kepegawaian) termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Memastikan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kriteria jabatan yang telah ditetapkan Perseroan.
 - e. Memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan.
 - f. Melaksanakan evaluasi atas ketentuan-ketentuan kepegawaian dan kinerja unit kerja, jabatan berdasarkan kriteria yang ditetapkan secara obyektif dan transparan.
 7. Tugas terkait Teknologi Informasi
 - a. Menetapkan dan menerapkan master plan tata kelola Teknologi Informasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan detail/penjabaran lebih lanjut dari master plan sesuai kebutuhan Perseroan.
 - b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan master plan secara berkala untuk mengetahui pencapaiannya termasuk jika diperlukan melakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi informasi yang sedang berkembang.
 8. Tugas Terkait pengadaan barang dan jasa serta peningkatan mutu dan pelayanan
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengadaan barang dan jasa serta peningkatan mutu dan pelayanan.
 - b. Memastikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta mutu produk dan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Tugas terkait Penerapan *Good Corporate Governance*
 - a. Memastikan dan mengembangkan penerapan Pedoman *Good Corporate Governance* beserta kebijakan pendukung lainnya.

- b. Menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk bertanggung jawab terhadap implementasi GCG di Perseroan.
10. Tugas Terkait Penyampaian Informasi, Dokumen Perseroan dan Pelaporan
- a. Memastikan informasi mengenai Perseroan dapat diperoleh Dewan Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap.
- b. Melaporkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada OJK dan mengungkapkan Laporan Tahunan dan Keuangan pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
- c. Membuat, menyimpan dan memelihara di tempat kedudukan Perseroan, antara lain Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perusahaan lainnya.
- d. Melaporkan kepada Perseroan (Corporate Secretary) mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya untuk dicatat dalam Daftar Khusus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap calon-calon yang masuk dalam daftar bakal calon yang telah disetujui Direksi Perseroan.
- d. Hasil penilaian Tim Evaluasi ditetapkan dalam daftar calon (*short list*) yang terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi dengan peringkat nilai terbaik dan terdiri dari 2 (dua) kali lipat jabatan Dewan Komisaris yang lowong dengan peringkat nilai terbaik.
- e. Dalam hal penilaian dilakukan oleh ahli atau lembaga profesional yang ditunjuk, Tim Evaluasi mengevaluasi berdasarkan hasil penilaian oleh ahli atau lembaga profesional.
- f. Tim Evaluasi menyampaikan daftar calon (*short list*) tersebut kepada Direksi Perseroan untuk penetapan calon Anggota Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan terpilih.
- g. Direksi melakukan evaluasi akhir atas hasil penilaian untuk menetapkan masing-masing 1 (satu) Calon Anggota Direksi dan Calon Dewan Komisaris terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
- h. Direksi menyampaikan calon Anggota Direksi dan calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan terpilih kepada Dewan Komisaris Perseroan disertai penjelasan mengenai proses penjurangan, proses penilaian dan proses penetapan calon Anggota Direksi dan calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan terpilih, selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan.
11. Tugas Terkait Anak Perusahaan
Menetapkan Prosedur Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebagai berikut:
- a. Direksi membentuk Tim Evaluasi calon Anggota Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan yang diketuai oleh Direktur SDM dan Umum.
- b. Tim Evaluasi menunjuk tenaga ahli atau Lembaga Profesional untuk melakukan penilaian (jika diperlukan), melakukan penjurangan calon yang menghasilkan daftar bakal calon (*long list*) yang terdiri dari 5 (lima) bakal calon untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi dan 3 (tiga) kali lipat jumlah jabatan Komisaris yang lowong untuk jabatan Komisaris dan kemudian diserahkan kepada Direksi Perseroan untuk memperoleh persetujuannya.
12. Tugas terkait Hubungan Masyarakat dan *Stakeholders* Lainnya
- a. Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosialnya.
- b. Memastikan terjaminnya hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan Karyawan, Pengguna Jasa, Pemasok dan *stakeholders* lainnya.
13. Tugas Lainnya
Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau yang ditetapkan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tanggung Jawab Direktur Utama

1. Bertindak sebagai pemimpin Perseroan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas Perseroan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Menetapkan visi, misi dan tata nilai Perseroan.
3. Menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang terdiri dari rencana strategis serta sasaran kerja Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang terdiri dari misi, sasaran usaha, strategi usaha dan kebijakan Perseroan atas setiap program kerja dan anggaran.
5. Menetapkan Laporan Manajemen Perseroan secara berkala mengenai pelaksanaan RKAP serta Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Memastikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris serta Rapat Direksi.
7. Memastikan penyelenggaraan aktivitas Perseroan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan peraturan Perseroan yang berlaku.

Tanggung Jawab Direktur Pengembangan Usaha

1. Memimpin dan memastikan kegiatan pengembangan bisnis jalan tol terkait rencana bisnis dalam penyusunan dan pengajuan proposal tender investasi ruas-ruas jalan tol baru serta persiapan dan pelaksanaan akuisisi jalan tol.
2. Memimpin dan memastikan kegiatan pengelolaan pengembangan usaha lain dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya Perseroan.
3. Memimpin dan memastikan kegiatan pengendalian eksekusi investasi jalan tol dan usaha lain terlaksana sesuai target.
4. Memimpin dan memastikan kegiatan rekayasa teknik jalan dan lalu lintas dapat terlaksana guna mendukung ketersediaan rekomendasi strategis Perseroan.
5. Memastikan terlaksananya kegiatan pengelolaan manajemen risiko terkait dengan kebijakan di bidang pengembangan usaha jalan tol, pengembangan usaha lain dan rekayasa teknik jalan dan lalu lintas.
6. Berkoordinasi dengan Direktorat lain dalam rangka memastikan terlaksananya kegiatan dan kinerja bisnis Anak Perusahaan Jalan Tol (APJT) dan Anak Perusahaan Usaha Lain (APUL).

Tanggung Jawab Direktur Operasi

1. Memastikan kegiatan pengoperasian jalan tol meliputi manajemen pengumpulan tol dan manajemen lalu lintas dapat terlaksana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sehingga dapat memberikan pelayanan terhadap pengguna jalan tol.
2. Memastikan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan tol beserta seluruh kelengkapannya dapat terlaksana sesuai dengan SPM sehingga dapat memberikan pelayanan terhadap pengguna jalan tol.
3. Memimpin dan memastikan kegiatan pengelolaan manajemen risiko terkait dengan pengoperasian jalan tol serta pemeliharaan dan peningkatan jalan tol.
4. Memastikan pengamanan pengumpulan tol yang dilaksanakan oleh Cabang dan Anak Perusahaan.
5. Memimpin dan memastikan penyusunan sistem pengamanan jalan tol dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pengoperasian jalan tol.
6. Berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan Usaha untuk memastikan terlaksananya operasional jalan tol, meliputi transaksi pengumpulan tol, layanan lalu lintas dan pemeliharaan pada APJT sesuai target yang telah ditetapkan.

Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

1. Memimpin dan memastikan aktivitas Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan Perseroan yang berlaku.
2. Memimpin dan memastikan terlaksananya kegiatan pengelolaan pelayanan dan penyelesaian permasalahan di bidang hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
3. Memimpin dan memastikan terlaksananya pengembangan sistem manajemen risiko, mutu, K3 dan lingkungan serta kinerja ekselen di lingkungan Perseroan.
4. Memimpin dan memastikan terlaksananya kegiatan pengelolaan program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan inisiatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
5. Memastikan terlaksananya kegiatan pengelolaan manajemen risiko terkait kebijakan di bidang kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik dan benar, pengembangan risiko, mutu, K3 dan lingkungan serta kinerja ekselen dan program kemitraan dan bina lingkungan.
6. Berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan Usaha untuk memastikan terlaksananya aspek kepatuhan dan manajemen risiko pada APJT dan APUL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Direksi Jasa Marga

Tanggung Jawab Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

1. Mengarahkan dan memimpin pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan human capital Perseroan.
2. Mengendalikan implementasi sistem dan prosedur pengelolaan human capital Perseroan.
3. Mengarahkan dan memimpin pengembangan sistem dan prosedur kegiatan pengelolaan logistic, pengamanan aset milik Negara dan aset Perseroan dan aktivitas umum lainnya berdasarkan prinsip, peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Memastikan terlaksananya kegiatan pengelolaan manajemen risiko terkait kebijakan di bidang pengelolaan human capital dan bidang umum.
5. Memastikan pengembangan dan implementasi budaya Perseroan.
6. Berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan Usaha untuk memastikan pengembangan sistem human capital dan umum di APJT dan APUL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Direktur Keuangan

1. Memimpin dan memastikan penyusunan RJPP sesuai dengan rencana strategis Perseroan.
2. Memimpin dan memastikan kegiatan pengelolaan keuangan Perseroan terlaksana sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Memimpin dan memastikan kegiatan penyusunan dan pengendalian portofolio investasi keuangan Perseroan.
4. Memimpin dan memastikan kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Perseroan.
5. Memastikan terlaksananya kegiatan pengelolaan manajemen risiko terkait kebijakan di bidang keuangan, manajemen investasi dan akuntansi serta teknologi informasi dan komunikasi.
6. Memimpin pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Perseroan dan Anak Perusahaan untuk memastikan integrasi dan keselarasan terhadap arah dan sasaran Perseroan dan Anak Perusahaan dengan rencana strategis Perseroan.
7. Memimpin dan memastikan pengamanan pendapatan tol yang dilaksanakan oleh Cabang dan Anak Perusahaan.

8. Berkoordinasi dengan Direktorat Pengembangan Usaha untuk memastikan pengendalian pengelolaan keuangan APJT dan APUL.

Wewenang Direksi

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 2. Untuk melakukan tindakan tertentu, Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
 3. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, beberapa hal yang membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris adalah:
 - a. Menerima dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang.
 - b. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris.
 - c. Melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (*fixed asset*) Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris.
 - d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perusahaan atau badan usaha lain atau menyelenggarakan perusahaan baru.
 - e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perusahaan atau badan usaha lain.
 - f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris.
 - g. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris.
 - h. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang jumlahnya kurang dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
 - i. Membeli dan/atau menjual surat berharga pada pasar modal/lembaga keuangan lainnya, kecuali terhadap surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - j. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, berupa kerja sama operasi dan investasi yang bersifat strategis dan mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan serta berlaku untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun (jangka panjang), kecuali kerja sama penggunaan jasa teknis dan/atau operasional dari pihak lain.
 - k. Mengadakan kerja sama bangun guna serah (BOT), bangun guna milik (BOO) atau bangun sewa serah (BRT) sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris.
 - l. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi.
 - m. Mencalonkan anggota Direksi dan Komisaris pada Anak Perusahaan dari Perseroan.
4. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal:
- a. Melakukan transaksi material sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau
 - b. Melakukan transaksi lain, guna memenuhi perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.

Independensi Direksi dan Direktur Independen

Direksi ditetapkan untuk menjalankan segala tindakan pengurusan Perseroan atau hubungan dengan pihak lain secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang secara material dapat mengganggu keobjektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Direktur Independen merupakan anggota Direksi yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau

pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Keberadaan Direktur Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas termasuk pemegang saham publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Kriteria Direktur Independen

Sebagai perusahaan publik dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, Jasa Marga telah memenuhi ketentuan yang diatur regulator pasar modal terkait kriteria Direktur Independen. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Calon Perusahaan Tercatat.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain.
4. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Calon Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.

Jumlah Direktur Independen Jasa Marga telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, dimana setiap perusahaan publik harus memiliki Direktur Independen berjumlah paling kurang 1 (satu) orang dari jajaran anggota Direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Direktur Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Hubungan Afiliasi dan Kepengurusan di Perusahaan Lain

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, antar anggota Direksi serta antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham dapat dilihat di bagian Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Kepengurusan perusahaan lain anggota Direksi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

KEPENGURUSAN DIREKSI JASA MARGA DI PERUSAHAAN LAIN

Nama	Kepengurusan di Perusahaan Lain		
	Sebagai Dewan Komisaris	Sebagai Direksi	Sebagai Pemegang Saham
Adityawarman	✓ *	✗	✗
Christantio Prihambodo	✓ *	✗	✗
Hasanudin	✓ *	✗	✗
Reynaldi Hermansjah	✓ *	✗	✗
Muh Najib Fauzan	✓ *	✗	✗
Achiran Pandu Djajanto	✓ *	✗	✗

Keterangan:
✓ ada
✗ tidak ada

Catatan:
* Kepengurusan Direksi Perseroan sebagai anggota Dewan Komisaris adalah pada Anak Perusahaan Perseroan, terkait porsi kepemilikan Perseroan atas Anak Perusahaan Perseroan tersebut sebagai Pemegang Saham mayoritas.

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan

Berdasarkan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD dan badan usaha swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2015, Direksi Jasa Marga tidak ada yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk menjaga independensi dan profesionalisme, setiap anggota Direksi harus menganut etika sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Pedoman GCG serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.
2. Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas unsur obyektivitas, profesional dan independen demi kepentingan Perseroan yang seimbang dengan kepentingan *Stakeholders*.
3. Menjalankan tugas dan kewajibannya dengan menempatkan kepentingan Direksi secara keseluruhan, diatas kepentingan pribadi.
4. Selama menjabat, Anggota Direksi tidak diperkenankan untuk:
 - a. Mengambil peluang bisnis Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota Direksi yang ditentukan oleh RUPS, untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usahanya dan/ atau pihak lain.
 - b. Memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 - c. Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku Anggota Direksi untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.
- d. Berkompetisi dengan Perseroan yaitu menggunakan pengetahuan/informasi dari dalam (*inside information*) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan Perseroan.
- e. Merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung dengan Perseroan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung imbalan dan/ atau hadiah, dan/atau hibah dan/atau sumbangan dan/atau *entertainment* dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perseroan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhinya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
- g. Memberikan dan menerima hadiah, bingkisan, parcel, karangan bunga dan bentuk pemberian lainnya pada hari raya keagamaan maupun hari-hari besar/tertentu lainnya kepada pejabat/pegawai di lingkungan instansi Pemerintah dan/atau pihak yang memiliki hubungan bisnis.
5. Menjaga kerahasiaan informasi-informasi Perseroan yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.
7. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.
8. Mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (*insider trading*) untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Selama tahun 2015 anggota Direksi telah mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar sebagai berikut:

PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DIKUTI OLEH ANGGOTA DIREKSI TAHUN 2015

No.	Anggota Direksi	Materi
1	Christantio Prihambodo	Sharing Knowledge Teknologi Pagar Pengaman Jalan dari Swedia
2	Hasanudin	Seminar Economic Briefing 2015
3	Reynaldi Hermansjah	<ul style="list-style-type: none"> · Workshop Penerapan PSAK Konvergensi IFRS pada Entitas BUMN dalam Menghadapi Sinergi BUMN Kini dan ke Depan · Seminar Economic Briefing 2015 · Sosialisasi Penilaian Asean CG Scorecard 2015
4	Muh Najib Fauzan	Workshop Kebijakan Ketenagakerjaan BUMN Terkait Kontrak Kerja, Penetapan Imbalan Pasca Kerja dan Outsourcing
5	Achiran Pandu Djajanto	<ul style="list-style-type: none"> · Enterprise Risk Management Benchmarking in Spain · Seminar Internasional Bali ERM 2015 · Seminar Economic Briefing 2015

Rapat Direksi

Selama tahun 2015, Direksi melaksanakan rapat internal Direksi sebanyak 47 kali.

REKAPITULASI KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT DIREKSI TAHUN 2015

No.	Jabatan	Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri	Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Persentase Kehadiran (%)
1.	Adityawarman	Direktur Utama	47	47	100
2.	Christantio Prihambodo *	Direktur Operasi	36	36	100
3.	Hasanudin	Direktur Pengembangan Usaha	47	45	96
4.	Reynaldi Hermansjah	Direktur Keuangan	47	44	94
5.	Muh Najib Fauzan	Direktur SDM dan Umum	47	44	94
6.	Achiran Pandu Djajanto *	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	36	32	32
7.	Abdul Hadi Hs. **	Direktur Pengembangan Usaha	3	3	100
				Rata-rata	96

* Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 18 Maret 2015

** Berhenti sebagai anggota Direksi Jasa Marga sejak 22 Januari 2015

Catatan:

- Ketidakhadiran anggota Direksi dalam rapat disebabkan yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota atau menghadiri acara/rapat penting yang tidak dapat diwakilkan.
- Perbedaan Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri adalah karena perbedaan periode jabatan sebagai anggota Direksi.

Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi Jasa Marga telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat telah dicantumkan dalam Risalah Rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Agenda Rapat Dewan Direksi selama tahun 2015 di antaranya adalah sebagai berikut:

AGENDA RAPAT DIREKSI SELAMA TAHUN 2015

No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda Rapat	Anggota Direksi yang Hadir
1.	06-01-2015	<ul style="list-style-type: none"> Keikutsertaan Tender Investasi Jalan Tol. Rencana RUPS Luar Biasa Anak Perusahaan. Tindak Lanjut Pengisian Formasi Head of Internal Audit dan GM Cabang. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Abdul Hadi Hs. Hasanudin
2.	13-01-2015	<ul style="list-style-type: none"> Review Organisasi Unit Bisnis Rest Area. Pembentukan Anak Perusahaan di Bidang Pengumpulan Tol. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Abdul Hadi Hs. Hasanudin
3	20-01-2015	<ul style="list-style-type: none"> Setoran Modal ke ke Anak Perusahaan. RUPS Tahunan 2015. Pengisian Formasi Jabatan VP dan GM Cabang. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Abdul Hadi Hs. Hasanudin
4	29-01-2015	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Pembangunan Ruas Bowen-Solo Penggantian Komisaris Anak Perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin
5	03-02-2015	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Akuisisi Jalan Tol. Setoran Modal ke ke Anak Perusahaan. Kontrak Pengoperasian Suramadu Evaluasi Kontrak Kerja Sama TIP. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin
6	10-02-2015	<ul style="list-style-type: none"> Setoran Modal ke ke Anak Perusahaan. Penambahan Lajur. Tindak Lanjut Tender Investasi Jalan Tol 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin
7	18-02-2015	<ul style="list-style-type: none"> Setoran Modal ke ke Anak Perusahaan. Peningkatan Kualitas Permukaan Jalan. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin
8	27-02-2015	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Rencana Akuisisi Jalan Tol. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Hasanudin
9	05-03-2015	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Rencana Akuisisi Jalan Tol. Anggaran untuk Program Bina Lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin
10.	10-03-2015	<ul style="list-style-type: none"> Progres Proyek Jalan Tol Penerapan PPN atas Tarif Tol. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin
11.	17-03-2015	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi Saham-Saham Minoritas Tindak Lanjut Akuisisi Jalan Tol. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin
12.	24-03-2015	<ul style="list-style-type: none"> Setoran Modal ke ke Anak Perusahaan. Pembagian Tugas Direksi. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin
13.	31-03-2015	<ul style="list-style-type: none"> Kaji Ulang Program Investasi Usaha Lain. Komposisi Kepemilikan Saham Anak Perusahaan. Review Business Plan. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
14.	07-04-2015	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Akuisisi Jalan Tol. Rencana RUPS Luar Biasa Anak Perusahaan. Remunerasi Pengurus Anak Perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
15.	14-04-2015	<ul style="list-style-type: none"> Susunan Pengurus Anak Perusahaan. Tender Investasi Jalan Tol. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
16.	21-04-2015	<ul style="list-style-type: none"> Alternatif Pembiayaan Proyek Jalan Tol. Tindak Lanjut Kontrak Pengoperasian Suramadu Manajemen Risiko. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
17.	28-04-2015	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Investasi Jalan Tol. Review Proyeksi Kinerja Keuangan 2015-2024. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
18.	05-05-2015	<ul style="list-style-type: none"> Pengisian Formasi Jabatan Pengurus AP dan VP/GM. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
19.	12-05-2015	<ul style="list-style-type: none"> Organisasi Unit Bisnis Rest Area. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
20.	19-05-2015	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Pertemuan Presiden dengan Para Direktur Utama BUMN 18 Mei 2015. Program Mudik Gratis 2015. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo

No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda Rapat	Anggota Direksi yang Hadir	No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda Rapat	Anggota Direksi yang Hadir
21.	01-06-2015	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan PPN atas Jasa Jalan Tol Revaluasi Aset Perseroan. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo 	31.	24-08-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Progres Investasi Jalan Tol. Sosialisasi Kenaikan Tarif Tol. Finalisasi Prognosa RKAP 2015 dan Rencana Revisi RKAP 2015. Financial Engineering Biaya Operasional. Rencana Kerja Community Development. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
22.	15-06-2015	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan CSR Jasa Marga Terkait Lebaran dan 17 Agustus. Status dan Progres PMN. Review Strategi dan Kebijakan pada RJPP 2013-2017. Rencana Investasi Jalan Tol. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Christantio Prihambodo 	32.	31-08-2015	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan Skema Pengelolaan TIP dan Kajian Pengelolaan TIP. Perkembangan Rencana Investasi Jalan Tol. Laporan Progres Kegiatan Sosialisasi Kenaikan Tarif Tol. Prognosa RKAP 2015 dan Rencana Revisi RKAP Penghentian PUB Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga dengan Tingkat Suku Bunga Tetap Laporan RDP dengan Komisi VI mengenai PMN Rp 1,25 Triliun. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
23.	22-06-2015	<ul style="list-style-type: none"> RJPP 2013-2017. Harga Saham JSMR 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo 	33.	07-09-2015	<ul style="list-style-type: none"> Kereta Cepat Jakarta Bandung Laporan Progres Investasi Jalan Tol. Laporan Progres Sosialisasi Kenaikan Tarif Tol Usulan Revisi RKAP 2015. Usulan Arah Strategis RKAP 2016. Laporan Pengelolaan Risiko Korporat Semester 1 2015. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
24.	29-06-2015	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris-Direksi 25 Juni 2015. Pembentukan PT JLO. Mudik Bareng BUMN. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo 	34.	14-09-2015	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan Skema Pengelolaan TIP dan Kebijakan Pengelolaan TIP. Revisi RKAP 2015. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
25.	07-07-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Progress Investasi Jalan Tol Solo. Isu-isu Signifikan Laporan Keuangan Semester 1 2015 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo 	35.	21-09-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Status Investasi Ruas-ruas Baru Review KPI 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
26.	13-07-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Progress Investasi Jalan Tol. Rencana Investasi Jalan Tol. Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan TIP. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo 	36.	28-09-2015	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan Penyesuaian Tarif Perubahan Kebijakan Akuntansi 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
27.	27-07-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Tender Investasi. Laporan Operasional Pelayanan Masa Lebaran. Laporan Kinerja Semester 1 Tahun 2015. Laporan Pendahuluan BPJS Kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo 	37.	08-10-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kereta Api Cepat Masuknya SMI ke Konsorsium Jasa Marga untuk Pandaan-Malang 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
28.	03-08-2015	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi Jasa Marga dalam HUT ke 70 RI. Laporan Progres Proyek Baru. Laporan Pendirian PT JLO. Laporan Kegiatan Operasional dan Persiapan Kenaikan tarif. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo 	38.	13-10-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Status Proyek Kereta Cepat Laporan Progres Persiapan Rights Issue. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
29.	10-08-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemenuhan SPM. Laporan Penanganan Perkara 2015. Penunjukan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Sebagai Penanggung Jawab GCG Jasa Marga. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo 	39.	19-10-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kereta Cepat. Peningkatan Modal Dasar Perseroan untuk Anak Perusahaan. Laporan Awal Kinerja Triwulan 3 2015. Draft Usulan RKAP 2016. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
30.	19-08-2015	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Rencana Investasi Jalan Tol. Program Peningkatan Estetika Jalan Tol. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo 				

No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda Rapat	Anggota Direksi yang Hadir
40	27-10-2015	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Penggunaan BLU. Rencana perubahan KPI. Laporan Manajemen Triwulan 3 2015. Usulan RKAP 2016. Penetapan Konsultan Hukum dan persetujuan Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Jasa Hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
41.	02-11-2015	<ul style="list-style-type: none"> Investasi Ruas Jalan Tol Baru. Laporan Progres Sekar JLJ Penetapan Konsultan Hukum dan Kerangka Acuan Kerja untuk menangani Banding Perkara Thamrin Tanjung 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
42.	10-11-2015	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Layanan GTO setelah Kenaikan Tarif. Review Board Manual. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
43.	16-11-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Progres Kereta Cepat. Review Proyeksi Keuangan. BPJS Kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
44.	23-11-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Progres Kereta Api Cepat. Review Proyeksi Keuangan 2015-2024. Kebutuhan Karyawan di Anak Perusahaan. Laporan Skor KPKU. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
45.	30-11-2015	<ul style="list-style-type: none"> Roadmap Pengembangan Usaha. Roadmap Implementasi GTO. Review Proyeksi Keuangan 2015-2024. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo
46.	07-12-2015	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan 1000 km Jalan Tol serta Permasalahan yang Perlu Menjadi Perhatian Pemerintah. Roadmap Implementasi GTO. KPI Korporat. Rumusan Perusahaan Terkemuka Tahun 2022. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Christantio Prihambodo
47.	14-12-2015	<ul style="list-style-type: none"> Konsep Pengembangan Usaha Lain. Roadmap GTO Konsolidasi. Prognosa Kinerja Keuangan 2015. Tema dan Kegiatan HUT Jasa Marga ke-38. 	<ol style="list-style-type: none"> Adityawarman Reynaldi Hermansjah Muh Najib Fauzan Hasanudin Achiran Pandu Djajanto Christantio Prihambodo

Keputusan-keputusan Direksi Tahun 2015

Selama tahun 2015 anggota Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, operasional bisnis, maupun aspek strategis.

Keputusan Direksi yang dihasilkan sepanjang tahun 2015, antara lain sebagai berikut:

- Pemberian penghargaan kepada pensiunan Jasa Marga periode Maret 2014-Februari 2015.
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Perseroan.
- Pembagian dividen tunai tahun buku 2014 Jasa Marga.
- Grade jabatan pada organisasi Kantor Proyek.
- Pembagian tugas dan wewenang Direksi Jasa Marga.
- Tata Kelola pelaporan di Lingkungan Jasa Marga.
- Struktur Organisasi Unit Bisnis Rest Area Jasa Marga.
- Pedoman dan prosedur pemasangan iklan di wilayah jalan tol.
- Standar prosedur pekerjaan konstruksi/rehabilitasi jalan tol akibat kondisi darurat pengoperasian jalan tol.
- Pedoman inspeksi periodik bidang pemeliharaan.
- Program pensiun karyawan.
- Pedoman standar sarana perlengkapan jalan tol.
- Pedoman penempatan dan pemasangan kamera pemantau kondisi lalu lintas pada jalan tol.
- Kebijakan implementasi kriteria penilaian kinerja unggul.
- Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3) Korporat.
- Komite Manajemen Risiko Jasa Marga.
- Standar prosedur operasional penanganan darurat lalu lintas di ruas jalan tol jasa marga.

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (KPI) Direksi Tahun 2015

Dalam tahun 2015, kinerja Direksi yang tercermin dalam indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicator/KPI*) terdiri dari 5 (lima) perspektif. Secara keseluruhan, realisasi pencapaian indikator kinerja kunci Dewan Komisaris tahun 2015 mencapai nilai 116,4. Rincian realisasi pencapaian indikator kinerja kunci Direksi tahun 2015 disajikan dalam table sebagai berikut:

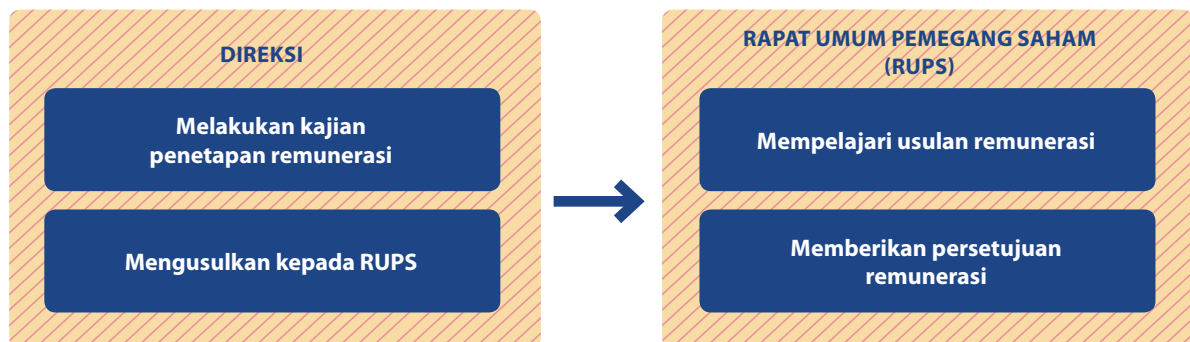
REALISASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI DIREKSI TAHUN 2015

No.	Key Performance Indicator (KPI)	Bobot (%)	Nilai KPI	
			Target	Realisasi
1	Keuangan dan Pasar	24	24	32,4
2	Fokus Pelanggan	22	22	26,4
3	Efektivitas Produk dan Proses	20	20	23,6
4	Fokus Tenaga Kerja	17	17	16,9
5	Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat	17	17	17,2
TOTAL		100	100	116,4

Prosedur, Dasar Penetapan dan Besarnya Remunerasi Anggota Direksi

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sedangkan berdasarkan Pasal 113 UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, diatur bahwa ketentuan mengenai besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI

Bentuk Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan (selain gaji) mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada BUMN.

Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, serta kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, serta tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Sedangkan tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*).

Remunerasi Direksi Perseroan saat ini telah mengikuti peraturan tersebut dimana Remunerasi Direksi terdiri dari:

1. Gaji/Honorarium.
2. Tunjangan.
3. Fasilitas.
4. Tantiem/Insentif Kinerja.

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada BUMN, struktur remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Gaji.
2. Tunjangan.
 - a. Tunjangan Hari Raya.
 - b. Asuransi Purna Jabatan.
 - c. Tunjangan Perumahan.
 - d. Tunjangan Pakaian Dinas.
3. Fasilitas.
 - a. Fasilitas Kendaraan.
 - b. Fasilitas Kesehatan.
 - c. Fasilitas Bantuan Hukum.
 - d. Fasilitas Perkumpulan Profesi.
4. Fasilitas Khusus Direksi.
 - a. Fasilitas Club Membership/Corporate Member.
 - b. Fasilitas Biaya Representasi.
5. Tantiem.

Penetapan Penghasilan Tahun 2015 dan Tantiem Tahun Buku 2014 bagi anggota Direksi berdasarkan berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-328/MBU/D4/06/2015 tanggal 24 Juni 2015 perihal Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2015 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2014. Berdasarkan penetapan tersebut, maka penghasilan

Direksi tahun buku 2015 adalah Gaji Direktur Utama sebesar Rp 118.000.000 per bulan, sedangkan gaji anggota Direksi lainnya masing-masing sebesar 90% dari gaji Direktur Utama. Adapun tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014.

Total Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2014 ditetapkan sebesar Rp 21.225.000.000 dengan ketentuan:

- Tantiem Direktur sebesar 90% dari Tantiem Direktur Utama, Tantiem Komisaris Utama sebesar 45% dari Tantiem Direktur Utama dan Tantiem anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari Tantiem Komisaris Utama.
- Pembayaran dihitung proporsional dengan memperhitungkan masa kerja efektif tahun buku 2014.

REALISASI REMUNERASI DIREKSI TAHUN 2015

Memperhatikan Keputusan RUPS Tahunan Jasa Marga tahun buku 2014 yang dilaksanakan tanggal 18 Maret 2015 serta berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-328/MBU/D4/06/2015 tanggal 24 Juni 2015 perihal Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2015 serta Tantiem Atas Kinerja Tahun Buku 2014, dan Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKU-232/MBU/06/2015 tanggal 23 Juni 2015, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyetujui penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2015 serta tantiem tahun buku 2014.

REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI TAHUN 2015 (RUPIAH PENUH)

Nama	Gaji	Tunjangan Perumahan	Tantiem	THR	Total
Adityawarman Direktur Utama	1.416.000.000	330.000.000	2.999.529.577	118.000.000	4.863.529.577
Christantio Prihambodo * Direktur Operasi	1.003.761.290	259.919.355	-	106.200.000	1.369.880.645
Hasanudin Direktur Pengembangan Usaha	1.274.400.000	330.000.000	2.699.576.619	106.200.000	4.410.176.619
Reynaldi Hermansjah Direktur Keuangan	1.274.400.000	330.000.000	2.699.576.619	106.200.000	4.410.176.619
Muh Najib Fauzan Direktur SDM & Umum	1.274.400.000	330.000.000	2.699.576.619	106.200.000	4.410.176.619
Achiran Pandu Djajanto * Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	1.003.761.290	259.919.355	-	106.200.000	1.369.880.645
Abdul Hadi Hs.** Direktur Pengembangan Usaha	106.200.000	27.500.000	2.699.576.619	-	2.833.276.619

* Menjadi anggota Direksi Jasa Marga sejak 18 Maret 2015

** Berhenti sebagai anggota Direksi Jasa Marga sejak 22 Januari 2015

Perbandingan klasifikasi remunerasi Direksi tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

PERBANDINGAN KLASIFIKASI REMUNERASI DIREKSI TAHUN 2014 DAN 2015

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	2014 (orang)	2015 (orang)
Di atas Rp 1 miliar	5 dari 5	6 dari 6
Di antara Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	-
Di bawah Rp 500 juta	-	-

Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sebagai dua organ perusahaan yang menjalankan operasional secara harian berbeda. Tugas utama Dewan Komisaris adalah sebagai pengawas dan pemberian nasihat, sedangkan tugas utama Direksi adalah menjalankan pengelolaan operasional Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati dan memahami tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi harus berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan menjadi *role model* bagi jajaran di bawahnya.

Hubungan yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum diputuskan melalui mekanisme yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam beberapa hal tertentu yang strategis menyangkut aktiva, pinjaman, ekuitas, struktur organisasi serta penetapan direksi dan komisaris Anak Perusahaan, Direksi memerlukan persetujuan Dewan Komisaris secara formal.

Seluruh tata cara, pedoman kerja dan hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan dalam *Board Manual*. Pedoman ini mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mencantumkan antara lain tanggung jawab,

kewajiban, wewenang, hak, dan etika Dewan Komisaris dan Direksi, serta pengaturan rapat dan tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala dalam forum Rapat Dewan Komisaris-Direksi. Penyelenggara rapat berkala ini adalah Dewan Komisaris guna membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini adalah sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat.

Keputusan rapat dibuat berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak serta mengikat untuk dilaksanakan tindak lanjutnya. Pada proses pengambilan suara, jika ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan, tidak boleh ikut memberikan suara dan keterangan mengenai hal ini dicatat pada Risalah Rapat.

Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris-Direksi sebanyak 13 kali.

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS-DIREKSI TAHUN 2015

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri	Jumlah Rapat yang Dihadiri	Persentase Kehadiran (%)
Refly Harun *	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	11	11	100
Akhmad Syakhroza	Komisaris	13	12	92
Boediarso Teguh Widodo	Komisaris	13	7	54
Taufik Widjoyono *	Komisaris	11	10	91
Hambra *	Komisaris	11	9	82
Sigit Widyawan *	Komisaris Independen	11	11	100
Agoes Widjanarko **	Komisaris Utama	2	2	100
Ibnu Purna **	Komisaris	2	2	100
Mayjen. (Purn.) Samsuedin **	Komisaris Independen	2	2	100
Irjen. Polisi (Purn.) Michael Dendron Primanto **	Komisaris Independen	2	2	100
Adityawarman	Direktur Utama	13	13	100
Christantio Prihambodo *	Direktur Operasi	11	11	100
Hasanudin	Direktur Pengembangan Usaha	13	13	100
Reynaldi Hermansjah	Direktur Keuangan	13	10	77
Muh Najib Fauzan	Direktur SDM dan Umum	13	11	85
Achiran Pandu Djajanto *	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	11	11	100
Abdul Hadi Hs. ***	Direktur Pengembangan Usaha	1	0	0
Rata-rata				87

* Menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Jasa Marga sejak 18 Maret 2015

** Berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Jasa Marga sejak 18 Maret 2015

*** Berhenti sebagai anggota Direksi Jasa Marga sejak 22 Januari 2015

Catatan:

- Ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat disebabkan yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota atau menghadiri acara/rapat penting yang tidak dapat diwakilkan.
- Perbedaan Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri adalah karena perbedaan periode jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Agenda Rapat Dewan Komisaris-Direksi selama tahun 2015 di antaranya adalah sebagai berikut:

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS-DIREKSI SELAMA TAHUN 2015

No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda Rapat	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir	
1.	29-01-2015	<ul style="list-style-type: none"> Paparan Direksi tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir Jadwal dan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 Laporan dan Evaluasi Progres Pembangunan Jalan 	1. Agoes Widjanarko 2. Ibnu Purna Muchtar 3. Boediarso Teguh Widodo 4. Akhmad Syakhroza	5. Mayjen. (Purn.)Samsoedin 6. Irjen. Polisi (Purn.) Michael Dendron Primanto 7. Adityawarman 8. Reynaldi Hermansjah 9. Hasanudin
2.	26-02-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Progres Pembangunan Jalan Tol Baru Pembahasan Laporan KAP atas Audit Tahun Buku 2014. Pendalaman Subtansi Agenda RUPS dan Laporan Persiapan Akhir Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014. Penjelasan Direksi mengenai Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Rencana untuk Mengambil PPJT Solo- Kertosono. 	1. Agoes Widjanarko 2. Ibnu Purna Muchtar 3. Boediarso Teguh Widodo 4. Akhmad Syakhroza 5. Mayjen. (Purn.) Samsoedin	6. Irjen. Polisi (Purn.) Michael Dendron Primanto 7. Adityawarman 8. Reynaldi Hermansjah 9. Hasanudin
3.	30-03-2016	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Progres Pembangunan Jalan Tol Baru Tindak Lanjut Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2014. Penjelasan Mengenai Rencana Akuisisi PT Solo Ngawi Jaya (Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi), PT Ngawi Kertosono Jaya (Ruas Jalan Tol Ngawi-Kertosono) dan PT Cinere Serpong Jaya (Ruas Jalan Tol Cinere-Serpong). 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Boediarso Teguh Widodo 4. Sigit Widyawan 5. Taufik Widjoyono 6. Hambra	7. Adityawarman 8. Christantio Prihambodo 9. Hasanudin 10. Reynaldi Hermansjah 11. Muh Najib Fauzan 12. Achiran Pandu Djajanto
4.	04-05-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Pemenuhan SPM. Laporan Akhir Temuan KAP Atas Audit Tahun Buku 2014. Program Aksi Pengembangan Usaha Lainnya. 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Sigit Widyawan 4. Taufik Widjoyono 5. Adityawarman	6. Christantio Prihambodo 7. Hasanudin 8. Reynaldi Hermansjah 9. Muh Najib Fauzan 10. Achiran Pandu Djajanto
5.	28-05-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Manajemen Triwulan 1 Tahun 2015. 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Boediarso Teguh Widodo 4. Sigit Widyawan 5. Taufik Widjoyono 6. Hambra	7. Adityawarman 8. Christantio Prihambodo 9. Hasanudin 10. Muh Najib Fauzan 11. Achiran Pandu Djajanto
6.	25-06-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris-Direksi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan SPM. Laporan Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Monitoring dan Evaluasi Progres Akuisisi Jalan Tol Baru. 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Boediarso Teguh Widodo 4. Sigit Widyawan 5. Taufik Widjoyono 6. Adityawarman	7. Christantio Prihambodo 8. Hasanudin 9. Reynaldi Hermansjah 10. Muh Najib Fauzan 11. Achiran Pandu Djajanto

No.	Tanggal Rapat (tgl-bln-thn)	Agenda Rapat	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir	
7.	11-08-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris-Direksi. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Perusahaan dan Pengendalian Anak Perusahaan. Evaluasi Progres Pembangunan Jalan Tol Baru Tahun 2015. 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Sigit Widyawan 4. Taufik Widjoyono 5. Hambra 6. Adityawarman	7. Christantio Prihambodo 8. Hasanudin 9. Reynaldi Hermansjah 10. Muh Najib Fauzan 11. Achiran Pandu Djajanto
8.	31-08-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris-Direksi. Penemuan SPM. Perencanaan dan Manajemen Pemeliharaan Jalan Tol Berbasis Sistem Informasi yang Terintegrasi. 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Sigit Widyawan 4. Taufik Widjoyono 5. Hambra 6. Adityawarman	7. Christantio Prihambodo 8. Hasanudin 9. Reynaldi Hermansjah 10. Muh Najib Fauzan 11. Achiran Pandu Djajanto
9.	30-09-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris-Direksi. Review Direksi atas Pelaksanaan RJPP 2013-2017 Tahun ke-3 (Tahun 2015). Usulan Kebijakan dan Strategi Penyusunan RKAP 2016. Evaluasi Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Usulan Direksi untuk Penetapan Calon Direksi dan atau Komisaris Anak Perusahaan. Hasil Audit SPL. 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Boediarso Teguh Widodo 4. Sigit Widyawan 5. Hambra 6. Adityawarman	7. Christantio Prihambodo 8. Hasanudin 9. Reynaldi Hermansjah 10. Muh Najib Fauzan 11. Achiran Pandu Djajanto
10.	29-10-2015	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris-Direksi. Penyampaian dan Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2016. 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Sigit Widyawan 4. Taufik Widjoyono 5. Hambra 6. Adityawarman	7. Christantio Prihambodo 8. Hasanudin 9. Reynaldi Hermansjah 10. Muh Najib Fauzan 11. Achiran Pandu Djajanto
11.	24-11-2015	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris-Direksi. Laporan dan Evaluasi Progres Pembangunan Jalan Tol Baru. Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan Manajemen Triwulan 3 2015 yang Perlu Ditindaklanjuti. 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Sigit Widyawan 4. Taufik Widjoyono 5. Hambra 6. Adityawarman	7. Christantio Prihambodo 8. Hasanudin 9. Muh Najib Fauzan 10. Achiran Pandu Djajanto
12.	18-12-2015	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris-Direksi. Laporan dan Evaluasi Progres Pembangunan Jalan Tol Baru Tahun 2015. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Akuisisi Jalan Tol Baru Selama Tahun 2015. Review RJPP Tahun 2013-1017. 	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Boediarso Teguh Widodo 4. Sigit Widyawan 5. Taufik Widjoyono 6. Hambra	7. Adityawarman 8. Christantio Prihambodo 9. Hasanudin 10. Reynaldi Hermansjah 11. Muh Najib Fauzan 12. Achiran Pandu Djajanto
13.	28-12-2015	Penjelasan dan Langkah Direksi untuk Penanganan Kemacetan Jalan Tol Selama Liburan Hari Raya Natal dan Tahun Baru.	1. Refly Harun 2. Akhmad Syakhroza 3. Sigit Widyawan 4. Taufik Widjoyono 5. Hambra	6. Adityawarman 7. Christantio Prihambodo 8. Hasanudin 9. Muh Najib Fauzan 10. Achiran Pandu Djajanto

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda.

Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

HUBUNGAN KELUARGA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI JASA MARGA

Nama	Hubungan Afiliasi dengan												
	Dewan Komisaris						Direksi					Pemegang Saham Utama/ Pengendali	
	Relly Harun	Akhmad Syakhroza	Ir Boediarso Teguh Widodo	Taufik Widjoyono	Hambra	Sigit Widyanawan	Adityawarman	Christantio Prihambodo	Hasanudin	Reynaldi Hermansjah	Muh Najib Fauzan	Achiran Pandu Djajanto	Kementerian BUMN
Relly Harun		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Akhmad Syakhroza	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Boediarso Teguh Widodo	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Taufik Widjoyono	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hambra	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Sigit Widyanawan	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Adityawarman	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x
Christantio Prihambodo	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Hasanudin	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
Reynaldi Hermansjah	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Muh Najib Fauzan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Achiran Pandu Djajanto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Kementerian BUMN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Keterangan:
✓ ada ✗ tidak ada

Assessment Dewan Komisaris dan Direksi

Proses Pelaksanaan Assesmen

Pemegang saham melalui mekanisme RUPS melakukan *assessment* terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga menyusun pedoman *self-assessment* kinerja Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-00177/XI/2012 tentang Penetapan Revisi Sistem Penilaian Kinerja Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun 2012.

Kriteria Penilaian Kinerja

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat dirinci sebagai berikut:

1. RUPS.
2. Pengawasan Keuangan.
3. Pengawasan Operasional.
4. Pengawasan Pengembangan.
5. SDM.
6. Pengawasan Kepatuhan.
7. Proses Internal Dewan Komisaris.

Kriteria penilaian kinerja Direksi mencakup:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar.
2. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS Tahunan 2011.
3. Pencapaian realisasi dari RKAP.

Hasil Assessment GCG Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tahun 2015, dilakukan *self assessment* implementasi GCG untuk Direksi dan Dewan Komisaris dengan proses yang dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang dikembangkan oleh Kementerian Negara BUMN berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012. Dari hasil *self assessment* tersebut, Dewan Komisaris memperoleh nilai **97,38%** dan Direksi memperoleh nilai **97,16%**.

Adapun *assessment* GCG Dewan Komisaris secara garis besar meliputi aspek-aspek penilaian sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan.
2. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
4. Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perseroan sesuai RKAP dan/atau RJPP.
5. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/ perusahaan patungan.
6. Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolejal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.
7. Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.
8. Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
9. Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
10. Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

Assessment GCG Direksi secara garis besar meliputi aspek-aspek penilaian sebagai berikut:

1. Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.
2. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.
3. Direksi menyusun perencanaan Perseroan.
4. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perseroan.
5. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perseroan.
6. Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
7. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perseroan dan *Stakeholders*.
8. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi
9. Direksi memastikan Perseroan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.
10. Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan Perundang undangan.
11. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.
12. Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.
13. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai Peraturan Perundang undangan.

Indikator Penilaian Kinerja Direksi

Kinerja Manajemen diukur berdasarkan *Key Performance Indicator* berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada Surat Kementerian Negara BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada BUMN. Kinerja Direksi diukur terhadap 5 (lima) perspektif dengan total indikator sejumlah 18 (delapan belas) kinerja kunci sebagai berikut:

KEY PERFORMANCE INDICATOR DIREKSI

Perspektif	Key Performance Indicator
Keuangan dan Pasar	1. Pertumbuhan Aset 2. Return on Average Equity (ROE) 3. Pertumbuhan EBITDA
Fokus Pelanggan	4. Indeks Kepuasan Pelanggan Jalan Tol 5. Pemenuhan SPM
Efektivitas Produk dan Proses	6. Progres Pelaksanaan Proyek Jalan Tol 7. Kecepatan Tempuh Rata-rata di Jalan Tol Dibandingkan Jalan Non-Tol
Fokus Tenaga Kerja	8. Human Capital Readiness – Pemenuhan Formasi Jabatan 9. Human Capital Readiness – Pemenuhan Kompetensi
Kepemimpinan Tata Kelola dan Kemasyarakatan	10. KPKU Score 11. GCG Score 12. Program Corporate Social Responsibility

Ukuran kinerja Direksi tersebut disepakati dan ditandatangani bersama oleh Direksi yang menjadi bagian dari Kontrak Manajemen antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Pada tahun 2015, kegiatan penilaian Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris sedangkan penilaian Dewan Komisaris dilaksanakan secara *self assessment*, dimana anggota Dewan Komisaris dinilai oleh anggota Dewan Komisaris yang lain. Sementara itu, dalam penyusunan KPI (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris, Perseroan dibantu oleh Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi universitas Indonesia (LMFE UI).

Kegiatan *assessment* GCG pada tahun 2015, dilakukan *assessment* dengan menggunakan parameter Kementerian BUMN, serta pelaksanaan *assessment ASEAN Scorecard* oleh the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

Komite-komite

Komite Audit

Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap sebagai anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite.

Komite Audit Perseroan tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-022/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kembali Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

KOMPOSISI KOMITE AUDIT JASA MARGA SEBELUM RUPS TAHUNAN TAHUN 2015

Irjen. Polisi (Purn.) Drs. Michael Dendron Primanto, SH., MH.	Ketua merangkap anggota – Komisaris Independen
Agita Widjajanto	Anggota – Tenaga Ahli Aspek Teknis
Rustam Wahjudi	Anggota – Tenaga Ahli Aspek Administrasi dan Keuangan

Sehubungan dengan adanya penggantian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Independen baru berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2015, maka susunan keanggotaan Komite Audit Tahun 2015 diubah dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-066/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Penggantian Ketua dan Pengangkatan sebagai Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Berdasarkan keputusan tersebut, keanggotaan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:

Sigit Widyanan	Ketua merangkap anggota – Komisaris Independen
Agita Widjajanto	Anggota – Tenaga Ahli Aspek Teknis
Rustam Wahjudi	Anggota – Tenaga Ahli Aspek Administrasi dan Keuangan

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan peraturan peraturan/perundangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
4. Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/PM/2012 tanggal 07 Desember 2012 Lampiran: Peraturan IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit.
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA

Komite Audit Perseroan memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komite Audit.

Proses rekrutmen Anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan integritas dan kemampuan bekerja sama. Dewan Komisaris melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam calon anggota Komite Audit. Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan rapat untuk menentukan calon anggota Komite Audit terpilih. Penetapan dan pengangkatan calon anggota Komite Audit dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Seluruh Anggota Komite Audit Jasa Marga memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasan dan pengendaliannya, yaitu agar pengelolaan Perseroan dapat berjalan efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugas dan pelaporannya, Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Pertanggung-jawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit tertuang dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang disahkan dengan keputusan Dewan Komisaris No. KEP-00.06/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang Penetapan Piagam Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk., sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. No. Kep-0038/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan Piagam Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tersebut, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang akan dilakukan oleh Internal Audit maupun auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan bahwa telah dipatuhi review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk laporan keuangan berkala, proyeksi/prognosa keuangan dan lain lain informasi keuangan yang disampaikan ke pemegang saham.
5. Memastikan bahwa telah dipatuhi prosedur review yang memuaskan terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan perusahaan sesuai dengan Standar Operating Procedures yang berlaku.
6. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.
7. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti Laporan Keuangan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Manajemen, dan informasi keuangan lainnya.
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
 - c. Melakukan penelaahan atas pemeriksaan oleh auditor internal dan mengkaji kecukupan fungsi audit internal termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan.
 - d. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
 - e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
 - f. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan dua anggota profesional lainnya yang berasal dari luar Perseroan serta mempunyai latar belakang Keuangan dan Teknik sesuai dengan bidang industri Perseroan. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam Pelaksanaan tugasnya, Komite Audit bekerja secara profesional dan independen.

Anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan jumlah, komposisi, kriteria, kompetensi, dan independensi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, Lampiran: Peraturan IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit, serta Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006

tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara dan No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, yaitu:

- Komite Audit terdiri dari seorang anggota Komisaris Independen selaku Ketua Komite Audit dan dua orang anggota yang berasal dari luar BUMN.
- Setiap anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- Salah seorang anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dan memahami manajemen risiko, dan seorang anggota lainnya memahami industri/ bisnis/teknis BUMN yang bersangkutan.
- Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit bersifat mandiri serta bekerja secara profesional dan independen.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Aspek Independensi	Sigit Widyawan	Agita Widjanto	Rustam Wahjudi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Jasa Marga, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Jasa Marga	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah	✓	✓	✓

Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Komite Audit atas terlaksananya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), serta sebagai upaya merealisasikan ketentuan tentang independensi yang ada dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit Perseroan telah membuat Surat Pernyataan Independensi Komite Audit tanggal 05 Januari 2012, yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota Komite Audit (Surat Pernyataan Independensi Komite Audit dimaksud diperbaharui sehubungan dengan adanya penggantian Ketua Komite Audit). Beberapa pernyataan penting dalam Surat Pernyataan Independensi Komite Audit antara lain bahwa Komite Audit Jasa Marga:

- Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- Tidak memiliki saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk., baik langsung maupun tidak langsung.
- Akan menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite Audit.

RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sebagaimana yang ditetapkan pada Piagam Komite Audit. Sedangkan pertemuan dengan auditor eksternal dilakukan minimal sebulan sekali pada saat pelaksanaan audit.

Dalam pelaksanaan rapat, Komite Audit dapat mengundang Manajemen Perseroan, baik secara langsung maupun melalui Satuan Audit Internal, untuk memberikan informasi yang diperlukan. Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Audit. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit, baik yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Komite Audit selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE AUDIT DALAM RAPAT KOMITE AUDIT DAN KEGIATAN-KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2015

Rapat/Kegiatan	Jml (kali)	Sigit Widyawan * Ketua Komite Kehadiran		Agita W. Anggota Kehadiran		Rustam W. Anggota Kehadiran	
		Kali	%	Kali	%	Kali	%
Rapat Internal Komite Audit	12	5	42	12	100	12	100
Rapat dengan Internal Audit	3	2	67	2	67	3	100
Rapat Tim Negosiasi/Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP)	1	1	100	0	0	1	100
Monitoring Pelaksanaan Audit/KAP	4	2	50	1	25	4	100
Rapat dengan Direksi/Manajemen	5	2	40	3	60	3	60
Rapat Internal Dewan Komisaris	13	13	100	13	100	13	100
Rapat dengan Unit Community Development Program	2	0	0	0	0	2	100
Kunjungan dan Rapat Dewan Komisaris di Cabang	11	10	91	11	100	11	100
Peninjauan Lapangan	7	7	100	7	100	6	86

* Menjadi Ketua Komite Audit Jasa Marga sejak April 2015.

Catatan:

- Ketidakhadiran anggota Komite Audit dalam rapat disebabkan yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota atau menghadiri acara/rapat penting yang tidak dapat diwakilkan.

Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit Jasa Marga telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Audit. Risalah Rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

REMUNERASI KOMITE AUDIT

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara, Anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris memperoleh remunerasi berupa honorarium sebesar Rp 18.880.000,- per bulan.

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (KPI) KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit selalu berpedoman pada Program Kerja Komite Audit (PKKA). Secara umum, PKKA

2015 telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Apabila dilihat dari sudut capaian Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicators/KPI*), maka kinerja Komite Audit selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

KEY PERFORMANCE INDICATORS KOMITE AUDIT 2015

No.	Perspektif KPI	Bobot (%)	Nilai	
			Target	Realisasi
1	Pengawasan Kegiatan Internal Audit	15	0,75	0,58
2	Pengawasan Kegiatan Eksternal Audit	15	0,75	0,84
3	Pengawasan atas Informasi Keuangan/Manajemen	30	1,50	1,63
4	Proses Internal Komite Audit	20	1,00	1,06
5	Dukungan terhadap Program Kerja Dewan Komisaris	20	1,00	0,96
TOTAL		100	5,00	5,07

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

Menilai Pelaksanaan Kegiatan Serta Hasil Audit yang Dilakukan Oleh Auditor Eksternal dan Independensi Auditor

1. Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2015 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited). Audit yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ini merupakan penugasan audit yang pertama kali. Penetapan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja telah dilakukan melalui Proses Pelelangan Terbatas dengan Kualifikasi secara e-procurement, serta telah disetujui dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2014 pada tanggal 18 Maret 2015.

Komite Audit telah melakukan penelaahan atas kecukupan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya. Selain itu, Komite Audit juga telah melakukan pembahasan secara intensif dengan Sdr. E. Batara Manurung, Signing Partner KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang bertanggung jawab untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2015 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, serta pendapat mereka mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan, kualitas dan akseptabilitas standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh Perseroan. Penelaahan dan pembahasan yang dilakukan oleh Komite Audit juga telah mencakup semua hal yang menurut Standar Auditing, Peraturan OJK dan peraturan lainnya mengenai komunikasi dengan Komite Audit, harus didiskusikan dengan Komite Audit.

Komite Audit juga telah mendiskusikan mengenai Independensi KAP terhadap Manajemen Perseroan dan terhadap Perseroan sendiri. Selama tahun buku 2015 tidak terdapat penugasan non audit kepada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dan Komite Audit telah menerima surat dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang memberikan penjelasan mengenai independensi mereka.

2. Penugasan Audit Lainnya kepada KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
 - Komite Audit telah menelaah Laporan Manajemen dan Laporan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan

dan Evaluasi Kinerja Perseroan. Komite Audit juga telah membahas dengan Manajemen dan KAP, kelemahan-kelemahan penting yang ditemukan dalam proses evaluasi dan proses audit, serta rencana Manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dimaksud.

- Komite Audit telah membahas dengan Internal Audit Perseroan dan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja mengenai seluruh lingkup dan rencana audit mereka. Komite Audit juga telah mengadakan rapat-rapat dengan Internal Audit dan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tanpa kehadiran Manajemen untuk membahas hasil audit dan hasil evaluasi KAP terhadap pengendalian internal serta kualitas pelaporan keuangan secara keseluruhan.

Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian dengan Manajemen Perseroan Komite Audit juga telah menelaah dan membahas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian dengan Manajemen Perseroan. Pembahasan dimaksud mencakup kualitas dan akseptabilitas Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan Perseroan, kelayakan accounting judgement dan kecukupannya dalam laporan keuangan konsolidasian.

Manajemen telah menginformasikan kepada Komite Audit bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2015:

1. Merupakan tanggung jawab Manajemen dan telah disajikan secara objektif dengan penuh integritas.
2. Telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Komite Audit



Sigit Widyawan
Ketua

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit dapat dilihat di bagian Profil Jasa Marga halaman 38.

Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko

Pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko (KNRR) Perseroan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-063/IV/2015 tanggal 20 April 2015. Sedangkan pengangkatan anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-065/IV/2015 tanggal 24 April 2015. Pemberhentian anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

KNRR terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap sebagai anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite.

Susunan keanggotaan KNRR Perseroan adalah sebagai berikut:

KOMPOSISI KNRR JASA MARGA SAMPAI DENGAN 07 DESEMBER 2015

Akhmad Syakhroza	Ketua
Nasikhin Ahsanto	Anggota
Eduard T. Pauner	Anggota

Sehubungan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 yang mengharuskan Ketua KNRR dari Komisaris Independen, maka sebagai bentuk kepatuhan atas peraturan tersebut, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Jasa Marga No. KEP-160a/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 dilakukan perubahan terhadap Komposisi KNRR sehingga KNRR terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap sebagai anggota, dari 1 (satu) orang Wakil Ketua Komite merangkap sebagai anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, susunan keanggotaan KNRR Perseroan menjadi sebagai berikut:

KOMPOSISI KNRR JASA MARGA SEJAK 07 DESEMBER 2015

Refly Harun	Ketua
Akhmad Syakhroza	Wakil Ketua
Nasikhin Ahsanto	Anggota
Eduard T. Pauner	Anggota

Seluruh Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko Jasa Marga memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN RISIKO

KNRR Perseroan dibentuk berdasarkan peraturan-peraturan/perundangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-063/IV/2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Komite Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
5. Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-065/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Penggantian Ketua dan Pengangkatan Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
6. Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. KEP-160a/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-065/IV/2015 tentang Penggantian Ketua dan Penagngkatan Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN RISIKO

KNRR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya agar pengelolaan Perseroan dapat berlangsung dengan efisien dan efektif melalui sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen.

Tugas dan tanggung jawab KNRR tertuang dalam Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko, tugas dan tanggung jawab KNRR di antaranya adalah sebagai berikut:

Fungsi Nominasi

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka penetapan keanggotaan/komposisi jabatan Direksi.
2. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka menyusun kebijakan, kriteria dan/atau persyaratan yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon Direksi.
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam monitoring dan evaluasi penetapan kriteria yang dipakai Direksi untuk mengevaluasi kinerja anggota Direksi.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil penilaian kinerja masing-masing Direktur berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan Direksi, serta melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas program.
6. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi tersebut di atas, Komite wajib:
 - a. Menyusun Manual Kerja Komite Bidang Nominasi.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan dan kriteria proses nominasi calon Direksi.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil penilaian kinerja masing-masing Direktur membantupelaksanaan evaluasi atas kinerja Direksi.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program pengembangan kemampuan masing-masing Direktur.

Fungsi Remunerasi

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka penetapan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Direksi.
2. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka menetapkan besaran remunerasi bagi Direksi.
3. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas kesesuaian remunerasi yang diterima dengan beban kerja dan tanggung jawab kerja masing-masing Direksi.
4. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi tersebut di atas, Komite wajib:
 - a. Menyusun Manual Kerja Komite Bidang Remunerasi.
 - b. Mereview struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi bagi Direksi.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kesesuaian Remunerasi yang diterima dengan beban kerja dan tanggung jawab masing-masing Direksi.
5. Struktur Remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/variable
6. Menalaah susunan, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang diberlakukan sesuai kegiatan usaha dan skala usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dalam industrinya.
 - b. Tugas, tanggung jawab, wewenang Direksi.
 - c. Penetapan target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi.
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.
7. Struktur, kebijakan, dan besaran Remuenrasi harus dievaluasi oleh Komite paling kurang 1 (satu) tahun.

Fungsi Risiko

- Memberikan saran dan masukan bagi Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan strategi investasi dalam bisnis jalan tol dan non tol, serta dalam rangka penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
- Menyampaikan hasil penelaahan atas rencana-realisasi investasi Perseroan yang tercantum di dalam RJPP dan RKAP Perseroan bagi Dewan Komisaris sebagai saran, masukan dan pendapat Dewan Komisaris kepada Direksi dalam mereview RKAP dan RJPP.
- Menyampaikan hasil penelaahan atas rencana investasi yang diajukan Direksi kepada Dewan Komisaris, sebagai bahan masukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan saran, masukan, pendapat dan persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi dalam bidang investasi baru.
- Menyampaikan hasil penelaahan atas manajemen risiko Perseroan, yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perseroan, sistem dan strategi, serta kebijakan manajemen risiko Perseroan, pengendalian intern Perseroan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur, bekerja sama dengan Divisi Risk & Quality Management.
- Menyampaikan hasil penelaahan atas berbagai model pengukuran risiko yang digunakan Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko, sebagai bahan masukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan saran dan pendapat kepada Direksi untuk penyempurnaan lebih lanjut.
- Memantau dan menyampaikan hasil evaluasi kesesuaian atas berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perseroan, serta berbagai potensi risiko yang dihadapi Perseroan, sebagai bahan masukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan saran dan pendapat kepada Direksi untuk mereview dan memperbaiki berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perseroan dan kebijakan mitigasi risiko.
- Menyiapkan bahan, informasi, materi, analisis dan kajian terkait dengan pelaksanaan investasi dan manajemen risiko, sebagai bahan Dewan Komisaris dalam memberikan masukan, saran dan pendapat kepada Direksi dalam rangka menekan dan/atau menghindarkan Perseroan dari terjadinya *cost overrun* dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas di bidang investasi jalan tol dan non tol.
- Melakukan telaahan atas kelayakan investasi jalan tol dan non tol serta risikonya, terkait dengan ketepatan proyeksi volume lalu lintas, pembebasan lahan, rekayasa pembiayaan dan ketepatan penggunaan teknologi dan inovasinya serta *value engineering* sebagai bahan masukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan saran dan pendapat kepada Direksi sebelum melakukan investasi jalan tol dan non tol.

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN RISIKO

KNRR menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang undangan. KNRR diketuai oleh salah seorang Komisaris dan anggotanya terdiri dari profesional dengan latar belakang sesuai dengan bidang industri Perseroan.

Independensi anggota KNRR tercermin dalam tabel dengan aspek berikut:

INDEPENDENSI ANGGOTA KNRR

Aspek Independensi	Refly Harun	Akhmad Syakhroza	Nasikhin Ahsanto	Eduard T. Pauner
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Jasa Marga, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Jasa Marga	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah	✓	✓	✓	✓

Sistem dan prosedur dalam penetapan remunerasi yang diberlakukan di Perseroan mengacu kepada peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Kajian mengenai remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan oleh KNRR dibahas dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian disepakati dan diusulkan dalam RUPS.

Dalam nominasi calon Direksi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pejabat satu level di bawah Direksi berdasarkan hasil *assessment*, kinerja dan integritas untuk mengikuti *fit and proper test* yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan mengusulkan calon-calon Direksi untuk mendapat persetujuan RUPS.

Sedangkan untuk pemilihan Pengurus Anak Perusahaan dalam hal prosedur pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 dengan prinsip dasar yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Perseroan telah mengikuti persyaratan dan tata cara yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Perseroan mempersiapkan kader-kader pimpinan perusahaan melalui mekanisme *Talent Management System*. Dengan mengidentifikasi posisi kunci untuk *executive leader* dan jabatan Direktur Anak Perusahaan, Perseroan mengembangkan kompetensi calon pimpinan melalui program *Corporate Leadership*.

Melalui proses seleksi yang dilaksanakan Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, Perseroan memilih calon pemimpin yang dinilai mempunyai *personal quality* yang baik, pengalaman dan keahlian yang memadai untuk menduduki jabatan pimpinan setingkat di bawah Direksi dan Direktur Anak Perusahaan yang diharapkan dapat menjadi anggota Direksi Perseroan di masa yang akan datang yang bersumber dari kalangan pejabat internal Perseroan.

Anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada periode saat ini, 2 (dua) orang merupakan anggota Direksi yang menjabat pada periode sebelumnya, 3 (tiga) orang berasal dari pejabat internal Perseroan yang berada satu tingkat di bawah Direksi dan 1 (satu) orang berasal dari pejabat eksternal.

RAPAT KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN RISIKO

KNRR melakukan rapat koordinasi secara berkala. Dalam pelaksanaan rapat, KNRR dapat mengundang Manajemen Perseroan untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Keputusan Rapat KNRR diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang maka usulan dianggap ditolak.

Selama tahun 2015, KNRR telah menyelenggarakan rapat, dengan tingkat kehadiran anggota KNRR sebagai berikut:

KEHADIRAN ANGGOTA KNRR DALAM RAPAT KNRR DAN KEGIATAN-KEGIATAN KNRR TAHUN 2015

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri	Kehadiran dalam Rapat	Persentase (%)
Refly Harun *	Ketua	4	2	50
Akhmad Syakhroza	Wakil Ketua	64	43	67
Eduard T. Pauner	Anggota	64	42	66
Nasikhin Ahsanto	Anggota	64	49	77

* Menjadi Ketua KNRR Jasa Marga sejak Desember 2015.

Catatan:

- Ketidakhadiran anggota KNRR dalam rapat disebabkan yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota atau menghadiri acara/rapat penting yang tidak dapat diwakilkan.
- Perbedaan Jumlah Rapat yang Dapat Dihadiri adalah karena perbedaan periode jabatan sebagai anggota KNRR.

Keputusan yang diambil dalam Rapat KNRR Jasa Marga telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota KNRR yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

REMUNERASI KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN RISIKO

Anggota KNRR yang bukan anggota Dewan Komisaris memperoleh remunerasi yang terdiri dari honorarium sebesar Rp 18.400.000 per bulan.

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI NOMINASI, REMUNERASI DAN RISIKO

Pada tahun 2015, indikator kinerja kunci atau *key performance indicator* (KPI) KNRR berhasil mencapai nilai total 83.

PENCAPAIAN KPI KNRR TAHUN 2015

No.	Perspektif	Bobot (%)	Target	Realisasi	Nilai
1	Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat Bidang Nominasi	25	1 laporan review sistem nominasi	1 laporan review	25
2	Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat Bidang Remunerasi	25	1 laporan review sistem remunerasi	1 laporan review	25
3	Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat Bidang Investasi dan Risiko Usaha serta Pelaksanaan Tugas-tugas Arah Dewan Komisaris	40	1 laporan review top risk 2 laporan pengelolaan risiko triwulan 1 laporan sistem pemeliharaan dan operasi 4 laporan pelaksanaan investasi Laporan hasil penugasan	- - 1 laporan sistem pemeliharaan dan operasi 4 laporan pelaksanaan investasi Laporan hasil penugasan	30
4	Ketertiban Administrasi Pelaporan	10	2 laporan KNRR Triwulan 3 dan 4 Tahun 2015 1 laporan KNRR 2015 Laporan Rapat Internal KNRR	2 laporan KNRR 1 laporan tahunan KNRR Laporan Rapat Internal KNRR	3
TOTAL					83

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN RISIKO

Berdasarkan tugas dan fungsinya, KNRR memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran/nasihat di bidang nominasi, remunerasi, dan risiko. Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, program dan kegiatan KNRR dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Nominasi; (2) Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Remunerasi; dan (3) Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Investasi dan Risiko Usaha.

Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Nominasi

Pengawasan dan pemberian saran/nasihat di bidang Nominasi dilakukan dengan cara melakukan review terhadap kebijakan dan sistem nominasi di Perseroan. Dalam hal ini KNRR telah melakukan rapat koordinasi sebagai sarana untuk mendapatkan data dan informasi mengenai sistem nominasi Perseroan dan pelaksanaannya, serta melakukan diskusi dengan Unit Kerja terkait yang menangani nominasi. Selain itu, KNRR juga melakukan *desk study* dan rapat internal untuk merumuskan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris. Saran dan masukan tersebut menjadi bahan masukan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian saran/nasihat di bidang nominasi.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2015, KNRR memberikan beberapa saran dan masukan kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Penjarangan calon pejabat harus berbasis pada kompetensi, dan dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penghormatan atas Hak Asasi Manusia.
2. Perlu adanya peningkatan kemampuan dan kompetensi dari para calon pejabat dan jabatan keahlian agar mampu memenuhi kompetensi dasar yang dipersyaratkan dalam suatu posisi jabatan.
3. Peningkatan kemampuan dan kompetensi hendaknya dilakukan dalam suatu program pengembangan SDM yang terstruktur dan didesain secara khusus sesuai dengan kebutuhan tingkat keahlian yang dibutuhkan dari jabatan tersebut. Dengan demikian, calon yang terpilih akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab posisi tersebut dengan baik dan memberikan kontribusi bagi pencapaian target-target perseroan sesuai bidang tugasnya.

Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Remunerasi

Pengawasan dan perumusan saran di bidang remunerasi yang telah dilakukan menemukan bahwa sistem remunerasi berbasis kinerja telah mulai ditransformasikan sejak Jasa Marga melakukan IPO tahun 2007. Direksi dalam pejalanannya juga telah melakukan perubahan SK Direksi untuk menguatkan pelaksanaan sistem remunerasi berbasis kinerja, yaitu mengubah SK Direksi No. 104/KPTS/2012 menjadi SK Direksi No. 122.1/KPTS/2014.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem remunerasi berbasis kinerja tersebut, termasuk dalam hal ini program pensiun dini, KNRR memberikan beberapa saran dan masukan kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Penerapan sistem remunerasi berbasis kinerja menimbulkan risiko keresahan dan penolakan dari beberapa kelompok karyawan. Risiko tersebut hendaknya diantisipasi dari awal agar tidak mengganggu pelaksanaan operasional Perseroan.
2. Risiko tersebut dapat dimitigasi dengan melakukan sosialisasi yang intensif mengenai sistem remunerasi yang baru. Khusus untuk program pensiun dini, maka langkah mitigasi berupa pemberlakuan masa kompromi antara masa kinerja dan kerja agar dilakukan secara konsisten.
3. Perlunya dilakukan penghitungan mengenai jumlah karyawan dan konsekuensi besaran biaya yang dibutuhkan untuk program pensiun dini. Target jumlah karyawan dan besaran biaya disesuaikan dengan kemampuan Perseroan, dan kemudian dilakukan pentahapan waktu pelaksanaan program pensiun dini yang terukur dan terikat dalam target waktu yang tegas.

4. Terkait dengan cakupan tunjangan kesehatan yang hanya mencakup karyawan (bukan keluarga), dinilai perlu dikeluarkannya SK Direksi yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian tunjangan kesehatan. SK Direksi tersebut hendaknya mempertimbangkan aspirasi karyawan dan kemampuan Perseroan.

Pengawasan dan Pemberian Saran/Nasihat di Bidang Risiko dan Investasi

Pada tahun 2015, pengawasan dan pemberian saran/nasihat di bidang risiko dan investasi dilakukan dengan cara melakukan kegiatan review atas usulan rencana investasi dan risiko-risiko yang melekat, serta pemantauan atas pelaksanaan investasi tol dan non tol dalam aspek risiko dan mitigasi yang dilakukan.

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi tersebut, KNRR telah memberikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya dengan penyelesaian proyek-proyek jalan tol, permasalahan yang dihadapi secara umum adalah keterlambatan pembebasan lahan yang mengakibatkan realisasi penyelesaian proyek mengalami kemunduran. Dalam hal ini, disarankan kepada Dewan Komisaris agar Direksi Jasa Marga memberikan dukungan kepada Anak Perusahaan dalam hal koordinasi dengan pihak P2T, dan juga instansi terkait di pusat, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2. Dalam kaitannya dengan pengelolaan TIP, KNRR memberikan masukan kepada Dewan Komisaris agar Direksi c.q. Divisi Related Business Development dan Divisi Legal and Compliance melakukan review atas kontrak perjanjian pengelolaan TIP antara Jasa Marga dan Mitra, termasuk dalam hal ini mengenai kewajiban dan tanggung jawab mitra dalam pemenuhan sarana dan prasarana dasar, serta besaran nilai bagi hasil. Khusus untuk TIP yang dikelola oleh Unit Bisnis Jasa Marga maka disarankan untuk dilakukan kajian pengelolaan TIP kepada PT Jasamarga Properti yang merupakan Anak Perusahaan Jasa Marga di bidang properti.
3. Dalam hal operasionalisasi anak perusahaan Jasa Marga di bidang pemeliharaan (PT Jasa Layanan Pemeliharaan – PT JLP), KNRR memberikan saran dan masukan untuk dilakukan perbaikan sistem pencatatan keuangan di PT JLP sesuai dengan standar akuntansi yang dianut oleh Perseroan, melakukan rekrutmen tenaga-tenaga yang andal di bidang konstruksi layanan pemeliharaan untuk menangkap peluang pasar dan mengerjakan pekerjaan dengan kualitas yang memadai, serta optimalisasi peralatan dengan menempatkan alat di lokasi strategis karena pekerjaan pemeliharaan relatif mobile.

4. Terkait dengan rencana pendirian PT Jasa Layanan Operasi (PT JLO), KNRR menyampaikan bahwa pendirian anak perusahaan tersebut dapat dilakukan karena telah memenuhi nilai kelayakan bisnis dan akan mendukung Jasa Marga dalam memberikan layanan pengumpulan tol untuk fungsi pelayanan dan pengendalian transaksi di gerbang tol, pekerjaan pengamanan jalan tol, pelayanan lalu lintas jalan tol dan pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan pengoperasian jalan tol. Jasa layanan operasionalisasi jalan tol ini juga mempunyai prospek bisnis yang menjanjikan karena pasar operasionalisasi jalan tol non Jasa Marga cukup terbuka lebar dan Jasa Marga mempunyai kompetensi di bidang pengoperasian jalan tol.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya KNRR menyampaikan perlunya dilakukan beberapa langkah berikut sebagai bagian dari mitigasi risiko yang meliputi:

- a. Penempatan manajemen Jasa Marga untuk mengisi formasi di PT JLO untuk memperlancar proses transisi sehingga tidak mengganggu pelayanan operasi tol.
 - b. Memastikan tidak adanya penurunan kesejahteraan bagi pegawai yang ditempatkan di PT JLO.
 - c. PT JLO agar segera membangun dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap sistem sumber daya manusia berupa pelatihan, pembinaan dan penjenjangan karyawan, yang disesuaikan dengan karakter bisnis layanan operasi.
 - d. Komunikasi yang intensif untuk menghindari keresahan dan protes dari karyawan yang mungkin timbul dari pemindahan karyawan ke PT JLO.
5. Terkait dengan pembentukan perusahaan patungan transportasi berbasis rel Jakarta-Bandung, KNRR memberikan masukan kepada Dewan Komisaris agar pembentukan perusahaan patungan transportasi berbasis rel Jakarta-Bandung merupakan bagian utuh dari pengembangan usaha lainnya yakni TIP 88. Dengan demikian, Jasa Marga akan mendapatkan tambahan manfaat berupa tambahan pendapatan lainnya yang berasal dari peningkatan bisnis pengelolaan rest area di TIP Km 88.

6. Terkait dengan usulan pembukaan akses di ruas jalan tol, KNRR memberikan masukan kepada Dewan Komisaris bahwa pada dasarnya pembukaan tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak menambah kemacetan dan mengganggu lalu lintas regional di Jalan Tol JORR, serta memberikan tambahan peningkatan pendapatan bagi Jasa Marga.
7. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan Perseroan serta mendukung kegiatan investasi Perseroan dan operasionalisasi jalan tol, Komite NRR memberikan masukan yang meliputi:
 - a. Biaya depresiasi dibebankan berdasarkan jumlah lalu lintas. Dengan demikian, anak perusahaan jalan tol (APJT) yang baru beroperasi tidak terbebani kerugian yang sangat besar pada masa awal operasi yang selama ini diakibatkan besarnya biaya depresiasi.
 - b. Pengoperasian dan pemeliharaan akan dikelola oleh anak perusahaan yaitu PT JLO dan PT JLP. Berdasarkan hasil perhitungan atas biaya pemeliharaan dan biaya operasional akan memberikan peningkatan atas total aset APJT, PT JLP, dan PT JLO.
8. Hasil risk assessment terhadap sistem teknologi informasi (TI) Jasa Marga menunjukkan bahwa sistem TI Perseroan belum sepenuhnya terintegrasi antar bagian, dan di dalam sistem dan prosedur pelayanannya masih ditemukan adanya tumpang tindih kewenangan. Oleh sebab itu direkomendasikan agar sistem TI di Jasa Marga mengakomodasi sistem pengawasan, dan perlu adanya audit terhadap sistem TI saat ini.

Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko



Refly Harun
Ketua

Profil Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko

Profil Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko dapat dilihat di bagian Profil Jasa Marga halaman 39.

Sekretaris Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-00020/I/2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Pengisian Personil Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk., telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan Komisaris untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
2. Staf Bidang Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.
3. Staf bidang Kerumahtangaan Sekretariat Dewan Komisaris, Juru Tata Usaha Dokumentasi dan Kearsipan.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Secara rinci fungsi Sekretaris Dewan Komisaris antara lain:

1. Menyusun program/agenda tahunan/triwulanan kegiatan Dewan Komisaris sesuai keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Menyusun mekanisme pelaksanaan kegiatan kesekretariatan agar kegiatan Dewan Komisaris berjalan lancar.
3. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
4. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
5. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-komite dalam Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan atau *Corporate Secretary* memiliki peranan penting untuk memastikan aspek keterbukaan perusahaan terbuka. Keberadaan *Corporate Secretary* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35-POJK.04-2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, yang pada dasarnya adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pemegang saham dan investor bagi perusahaan publik.

Tugas dan tanggung jawab pokok *Corporate Secretary* meliputi komunikasi internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Perseroan, serta pengelolaan hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan Perseroan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Dalam struktur organisasi Perseroan, *Corporate Secretary* bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

Struktur Organisasi Corporate Secretary

Unit *Corporate Secretary* Jasa Marga dikepalai oleh Mohammad Sofyan yang diangkat menjadi *Corporate Secretary* berdasarkan Keputusan Direksi No. 092/AA.P-6a/2015 tanggal 01 Juli 2015.

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 70/KPTS/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., Unit *Corporate Secretary* terdiri dari beberapa Departemen sebagai berikut:

1. Departemen Corporate Compliance.
2. Departemen Investor Relations.
3. Departemen Corporate Communications.
4. Departemen Corporate Relations.

STRUKTUR ORGANISASI CORPORATE SECRETARY



Tugas Corporate Secretary adalah:

- Mengelola informasi yang berkaitan dengan lingkungan bisnis dan menjalin hubungan baik antara Perseroan dengan para pihak lembaga penunjang industri pasar modal dan regulator pasar modal.
- Memastikan Perseroan menjalankan prinsip GCG serta mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menyelenggarakan kegiatan RUPS Perseroan.
- Menyelenggarakan kegiatan komunikasi antara Direksi/Manajemen dengan *stakeholders* dalam rangka membangun citra Perseroan.
- Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan pengurus Perseroan serta memfasilitasi hubungan Perseroan/pimpinan dengan para *stakeholders*.

Pelaksanaan Tugas Corporate Secretary

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Corporate Secretary sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan RUPS Tahunan.
2. Penyelenggaraan kegiatan terkait investor relations:
 - a. Public Expose (1 kali).
 - b. Site Visit (4 kali).
 - c. Non-Deal Roadshow (2 kali).
 - d. Investor Conference (6 kali).
3. Penyelenggaraan kegiatan terkait corporate communications meliputi:
 - a. Press Conference (7 kali).
 - b. Press Release (23 kali).
 - c. Advertorial (7 kali).
 - d. Talkshow televisi dan radio (10 kali).
 - e. Iklan display (17 kali).
 - f. Media Relation (2 kali).
 - g. Press Tour (1 kali)
4. Penyelenggaraan kegiatan terkait stakeholders meliputi:
 - a. Temu Pelanggan Jalan Tol.
 - b. Komunikasi dan koordinasi di antaranya dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kementerian BUMN,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DPR, DPRD, dan lain-lain.

5. Penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat Direksi serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Penyelenggaraan kegiatan GCG, di antaranya:
 - a. Penandatanganan Pakta Integritas.
 - b. Pengelolaan *Whistleblowing System*.
 - c. Pengelolaan dan sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 - d. Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Kategori I Tahun Penilaian 2014.
 - e. Pelaksanaan Penilaian *Assessment* GCG berdasarkan parameter ASEAN SCORECARD yang dilaksanakan oleh dengan the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).
 - f. *Self Assessment* GCG tahun 2015.
 - g. Sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan dan Evaluasi Tingkat Pemahaman Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan.
 - h. Pengelolaan Award Perusahaan Bidang GCG
7. Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi kebijakan Direksi dan kegiatan internal korporat.

Riwayat Jabatan dan Pengembangan Kompetensi

Riwayat jabatan singkat Corporate Secretary Perseroan Mohammad Sofyan dalam 10 tahun terakhir serta dan program pelatihan dan pengembangan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

RIWAYAT JABATAN SINGKAT CORPORATE SECRETARY

No.	Nama Jabatan	Satuan Kerja	Terhitung Mulai Tanggal (tgl-bln-thn)
1	Corporate Secretary	Divisi Corporate Secretary	01-07-2015
2	VP Corporate Planning	Divisi Corporate Planning	01-03-2012
3	Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Perusahaan	Divisi Corporate Planning	09-08-2010
4	Kepala Bagian Analisa Pengembangan Teknologi	Divisi Information Technology	25-08-2008
5	Kepala Seksi Program Administrasi Teknik, Studi dan Perencanaan	Divisi Highway & Traffic Engineering	01-02-2005
6	Kepala Sub Bagian Jalan dan Jembatan	Divisi Highway & Traffic Engineering	18-11-2002

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI CORPORATE SECRETARY TAHUN 2015

Materi	Waktu Pelaksanaan (tgl-bln-thn)
Sharing Session Transforming Training Center to Become Corporate University	26-11-2015

Profil Corporate Secretary

Mohammad Sofyan berdomisili di Jakarta dan diangkat menjadi Corporate Secretary berdasarkan Keputusan Direksi No. 092/AA.P-6a/2015 tanggal 01 Juli 2015.

Profil Corporate Secretary dapat dilihat di bagian Profil Jasa Marga.

Unit Internal Audit

Fungsi Audit Internal di Jasa Marga dijalankan oleh Unit Internal Audit (IA). Di dalam melaksanakan perannya, Unit Internal Audit selalu diposisikan sebagai mitra strategis yang dapat dipercaya oleh manajemen, bekerja secara profesional, obyektif, dan independen. Unit Internal Audit membantu Direktur Utama dalam melaksanakan audit internal Perseroan dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko, dan proses tata kelola perusahaan serta memberikan saran perbaikan.

Pengangkatan dan Pemberhentian Head of Internal Audit

Internal Audit dipimpin oleh seorang Head of Internal Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Head of Internal Audit dibantu

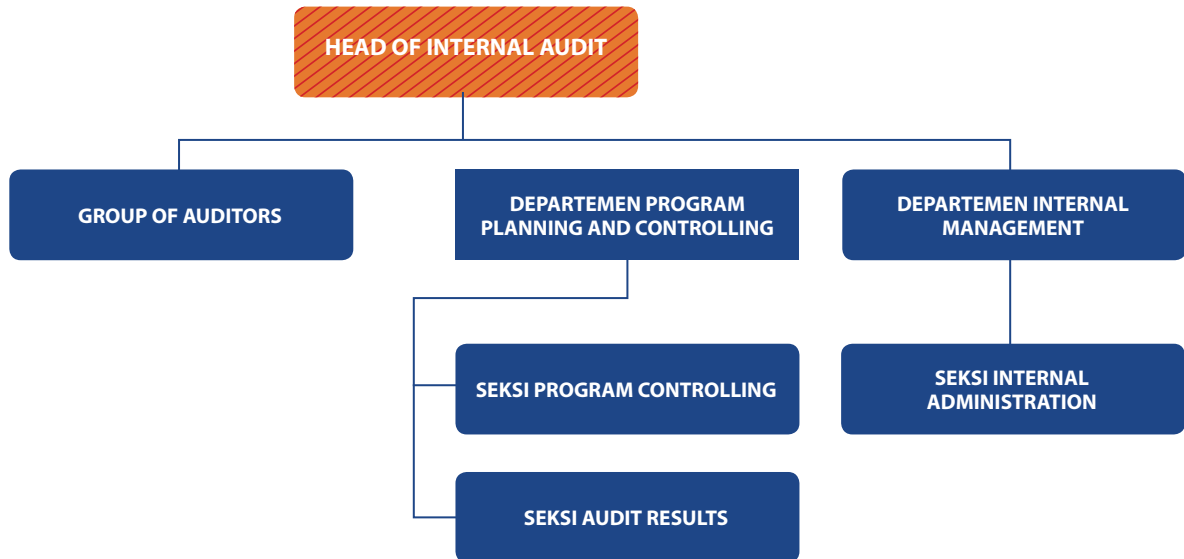
oleh AVP Program Planning & Controlling dan AVP Internal Management serta Group of Auditors.

Struktur dan Kedudukan Unit Internal Audit

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam, Internal Audit merupakan Unit yang independen terhadap unit-unit yang lain dan secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Organisasi Internal Audit ditetapkan dalam Struktur Organisasi Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi No. 70/KPTS/2015 tanggal 01 April 2015.

STRUKTUR ORGANISASI INTERNAL AUDIT



Unit Internal Audit Jasa Marga dipimpin oleh Haris Prayudi, yang menjabat sebagai Head of Internal Audit sejak 01 Juli 2015, berdasarkan Keputusan Direksi No. 092/AA.P-6a/2015 tanggal 29 Juni 2015. Jumlah personil Unit Internal Audit pada akhir tahun 2015 berjumlah 22 orang dengan 8 orang di antaranya memiliki kualifikasi Qualified Internal Auditor (QIA).

JUMLAH PERSONIL UNIT INTERNAL AUDIT

No.	Unit Internal Audit	Jumlah Personil
1	Head of Internal Audit	1
2	AVP Program Planning & Controlling	1
3	AVP Internal Management	1
4	Audit Result Manager	1
5	Program Controlling Manager	1
6	Internal Administration Manager	1
7	Senior Officer Administration Information & Reporting	1
8	Internal Administration Officer	1
9	Senior Auditor	5
10	Auditor	3
11	Junior Auditor	3
12	Senior Specialist	1
13	Seksi Office Administration	2
TOTAL		22

Pedoman Kerja Internal Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Internal Audit berpedoman pada Piagam Audit Internal dan Manual Audit Internal, Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan menggunakan pendekatan Risk-Based Audit Planning (Perencanaan Audit Berbasis Risiko).

Piagam Audit Internal dan Manual Audit Internal ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. 59/KPTS/2013 tanggal 28 Maret 2013. Selain sebagai pedoman kerja, Piagam Audit Internal dan Manual Audit Internal juga berperan dalam penguatan peran dan tanggung jawab serta dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan bagi Internal Audit. Oleh karena itu, Piagam Audit Internal dan Manual Audit Internal juga disebarluaskan agar diketahui oleh seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait sehingga terjalin saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Perseroan. Piagam Audit Internal dan Manual Audit Internal telah dimiliki sejak 01 Maret 2003 dan pada tanggal 28 Mei 2009 dan tanggal 28 Maret 2013 telah dilakukan revisi sesuai dengan peraturan Bapepam-LK yang berlaku. Secara berkala, Piagam Audit Internal dan Manual Audit Internal dikaji ulang dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Secara garis besar, *Internal Audit Charter* memuat:

1. Definisi Audit Internal.
2. Struktur dan Kedudukan Internal Audit.
3. Peran dan Fungsi Internal Audit.
4. Wewenang Internal Audit.
5. Kode Etik Auditor Internal Audit.
6. Persyaratan Auditor Internal Audit.
7. Pertanggungjawaban Internal Audit.
8. Larangan Perangkapan Tugas.

Kode Etik Auditor Internal

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, selain mematuhi Code of Conduct Perseroan yang berlaku secara umum, Internal Audit juga memiliki Kode Etik Auditor yang tercantum di dalam Internal Audit Charter, yang di antaranya adalah:

1. Auditor Internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Auditor Internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani.
3. Auditor Internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.

4. Auditor Internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara obyektif.
 5. Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok ataupun mitra bisnis organisasinya yang dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesinya.
 6. Auditor Internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
 7. Auditor Internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Internal Audit.
 8. Auditor Internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya.
 9. Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan Perseroan, Auditor Internal harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
 10. Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor Internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya.
 11. Auditor Internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektifitasnya dan kualitas pelaksanaan tugasnya.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
 5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
 6. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
 7. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
 8. Melakukan Manajemen Audit Internal di Anak Perusahaan sebagai penugasan khusus dari Direktur Utama, dalam rangka melakukan bimbingan (*guidance*), pengawasan (*supervision*), pembelajaran (*learning*) dan konsultasi (*consulting*) dalam mempersiapkan dan melaksanakan Audit Internal di Anak Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Internal Audit berperan memastikan dan memberikan konsultasi yang independen dan obyektif bagi manajemen sehingga dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan memperbaiki operasional bisnis Jasa Marga.

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit sesuai *Internal Audit Charter* meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) dan Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Internal Audit dan Sertifikasi Profesi Audit

Perseroan senantiasa melakukan program peningkatan kompetensi personil Internal Audit dengan melakukan program pengembangan kompetensi auditor secara sistematis dan berjenjang. Secara umum kebijakan pengembangan kompetensi pada tahun 2015 ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal
2. Pengembangan kompetensi secara internal.

Pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal dilakukan secara formal dalam bentuk kursus atau seminar/lokakarya yang berkaitan dengan masalah audit baik yang dilaksanakan oleh Perseroan maupun Lembaga pendidikan eksternal lainnya.

PELATIHAN AUDIT SELAMA TAHUN 2015

Nama Pelatihan	Penyelenggara	Jumlah Peserta
1. File and Documentation Management System	Jasa Marga Development Center (JMDC)	1
2. Pelatihan Building Good Corporate Governance, Risk Management & Control Environment	Jasa Marga Development Center (JMDC)	5
3. Pelatihan Directorship dengan Tema Business Strategy and Good Corporate Governance – Risk – Compliance (GRC)	Prasetya Mulya University	5
4. Sosialisasi Gratifikasi	Jasa Marga Development Center (JMDC)	5
5. Rountable Discussion Manajemen Risiko	Jasa Marga Development Center (JMDC)	2
6. Benchmarking Pengelolaan Internal Audit	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) Pusat	3
7. Pelatihan Menulis Laporan Internal Audit yang Efektif	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	14
8. Pelatihan Mendeteksi Indikasi Fraud dan Kesalahan Melalui Penelaahan Laporan Keuangan	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) Komisariat Jawa Timur	1
9. Pelatihan Fraud Auditing 1	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)	3
10. Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2015	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	2
11. Pelatihan Audit Intern Tingkat Dasar I	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	8
12. Seminar Apakah Business Judgement di Lingkungan BUMN Dapat Dipidanakan?	Intrinsic	2
13. Pelatihan Best Practices Internal Auditing and Risk Management Workshop & Visit	Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII)	1
14. Konferensi Nasional Internal Audit 2015	The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia)	3
15. Seminar & Musyawarah Kerja Nasional FKSPI 2015	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) Komisariat Jasa Konstruksi	6
16. Pelatihan dan Sertifikasi Fraud Auditing II	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA)	3
17. Pelatihan Audit Intern Dasar II	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	5
18. Workshop Pelaporan Keuangan Aset Tetap dan Pengaturan Bersama	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Cabang Jawa Barat	2
19. Pelatihan Audit Intern Lanjutan I	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	2
20. Workshop Penerapan PSAK Konvergensi IFRS pada Entitas BUMN dalam Menghadapi Sinergi BUMN Kini dan ke Depan	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Kementerian BUMN	1

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Internal Audit Tahun 2015

- Audit Rutin/Audit Operasional

Sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) tahun 2015 yang ditetapkan oleh Direktur Utama, selama tahun 2015 Internal Audit telah melaksanakan pemeriksaan 16 Obyek Audit.

Audit tersebut dilakukan pada Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Unit Bisnis. Monitoring tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit dilakukan melalui mekanisme rutin setiap Triwulan.

- Audit Khusus/Audit dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan Audit Khusus/Audit dengan Tujuan Tertentu dilakukan berdasarkan PKAT dan adanya permintaan dari Manajemen untuk melakukan pemeriksaan/review terhadap permasalahan tertentu yang dipandang perlu oleh Manajemen untuk dilakukan evaluasi.

Pada 2015 Internal Audit telah melaksanakan 2 Audit dengan Tujuan Tertentu yaitu Audit terhadap Pengadaan Barang/Jasa dan Audit Manajemen Lahan Kelola Perseroan.

- Audit pada Anak Perusahaan
Pelaksanaan Audit pada Anak Perusahaan dilakukan atas permintaan dari Anak Perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan. Pelaksanaan Audit untuk Anak Perusahaan dilakukan dengan membentuk Tim Audit Gabungan antara para pemegang saham

Hasil Audit Unit Internal Audit

Audit dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan, Manajemen Risiko, dan proses Tata Kelola Perusahaan serta melakukan penilaian efisiensi dan efektivitas atas seluruh aktivitas Perseroan (bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya). Laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Internal Audit disampaikan kepada Direktur Utama yang selanjutnya rekomendasi dari hasil audit tersebut diperhatikan dan menjadi referensi dalam pelaksanaan tindak lanjutnya. Laporan hasil audit pada saat yang bersamaan juga disampaikan kepada Komite Audit.

Laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Internal Audit disampaikan kepada Direktur Utama yang selanjutnya rekomendasi dari hasil audit tersebut diperhatikan dan menjadi referensi dalam pelaksanaan tindak lanjutnya. Laporan hasil audit pada saat yang bersamaan juga disampaikan kepada Komite Audit.

Kegiatan Pendukung Audit Lainnya

Selain kegiatan audit rutin, Internal Audit telah meningkatkan manajemen audit dengan menggunakan aplikasi komputer (*Audit Management System/AMS*). Semua kegiatan audit mulai dari Program Kerja Audit Tahunan (PKAT), Penjadwalan/ Penugasan Tim Audit, Pelaksanaan di lapangan (*field work*), Pelaporan Audit dan Monitoring Tindak Lanjut hasil audit di-manage dengan *Audit Management System/AMS*.

Evaluasi Kinerja Unit Internal Audit

Kinerja Internal Audit diukur dan dinilai dari pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI). Terdapat 12 Indikator yang dapat diukur serta dinilai secara tahunan dan merupakan bentuk kontrak manajemen antara Head of Internal Audit dengan Direksi. Indikator yang memiliki bobot yang besar di dalam KPI adalah:

- Efisiensi biaya pelaksanaan audit
- Pemenuhan permintaan audit dari manajemen
- Ketepatan waktu pembuatan laporan akhir
- Pelaksanaan rekomendasi yang ditindaklanjuti
- Pelaksanaan rencana audit
- Pencapaian program kerja unit

Untuk dapat memastikan bahwa pelaksanaan rekomendasi telah ditindak lanjuti, telah diatur dengan mekanisme kontrol melalui suatu Instruksi Direksi tentang Kewajiban Auditee untuk melaporkan tindak lanjut atas rekomendasi Internal Audit pada setiap akhir triwulan kepada Direktur Utama.

PROFIL HEAD OF INTERNAL AUDIT

Unit Internal Audit Jasa Marga dipimpin oleh Haris Prayudi, yang menjabat sebagai Head of Internal Audit sejak 01 Juli 2015, berdasarkan Keputusan Direksi No. 092/AA.P-6a/2015 tanggal 29 Juni 2015.

Profil Head of Internal Audit dapat dilihat di bagian Profil Jasa Marga halaman 40.

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan

Penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Jasa Marga mengacu pada Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Melalui Keputusan Direksi No. 174/KPTS/2013 tentang *Good Corporate Governance* (GCG), ditetapkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Perseroan dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Sistem Pengendalian Internal di Perusahaan mengadopsi konsep *Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission* yang terdiri dari 5 (lima) komponen Sistem Pengendalian Internal yang efektif:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*)
5. Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring*)

Posisi Internal Audit berada langsung di bawah Direktur Utama, sehingga Internal Audit dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian internal dan memberikan saran-saran perbaikan kepada Direktur Utama.

Sosialisasi Pemahaman Kerangka SPIP

Sejalan dengan kerangka Pengendalian Internal yang telah dimiliki oleh Perseroan, Internal Audit Unit juga terus melakukan sosialisasi tentang pemahaman prinsip-prinsip Pengendalian Internal berbasis COSO tersebut kepada Unit Kerja di lingkungan Perseroan di seluruh level Jabatan melalui program pelatihan dan workshop yang dilakukan bersama Jasa Marga Development Centre (JMDC).

Tujuan Sosialisasi SPIP dan rencana ke depannya antara lain adalah:

- Kesamaan pemahaman mengenai tujuan dan komponen dalam SPIP.
- Perseroan dapat memastikan bahwa SPIP telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Insan Jasa Marga.

KEGIATAN SOSIALISASI SPIP TAHUN 2015

No.	Waktu Pelaksanaan (tgl-bln-thn)	Unit Kerja	Peserta	
			Grade	Jumlah
1	01-04-2015	JMDC	3	95
2	12-10-2015	Cabang Jabodetabek	4 dan 5	38
3	15-10-2015	Cabang Jabodetabek	4 dan 5	38
4	09-11-2015	Cabang Jabodetabek	4 dan 5	34
5	18-11-2015	Cabang Jabodetabek	4 dan 5	33

Review atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan

Dari Laporan-laporan Hasil Audit yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori sasaran (*objectives*) dan komponen dalam SPIP (kerangka COSO), dilakukan analisis secara periodik tahunan sehingga dengan demikian dapat dilakukan peningkatan (*improvement*) untuk komponen-komponen yang memerlukannya. Analisis Hasil Audit tersebut juga dilakukan untuk mengukur keefektifan dari pencapaian sasaran SPIP (operasional Perseroan, keakurasian/keandalan laporan-laporan Perseroan, serta kepatuhan terhadap aturan perundangan yang berlaku).

Perseroan juga telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2015 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of The Treadway Commission*. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Perseroan menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 desember 2015 telah berjalan secara efektif.

Laporan Manajemen Risiko



Dengan Visi dan Misi untuk menjadi pemimpin dalam industri jalan tol, Jasa Marga mengadopsi teknologi dan sistem manajemen modern untuk senantiasa meningkatkan daya saing Perseroan. Salah satu unsur penting dalam manajemen modern adalah pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategis Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan. Mengingat bisnis jalan tol merupakan

investasi besar dengan pengembalian jangka panjang dan memiliki ketidakpastian tinggi selama masa pembangunan serta pengoperasiannya, maka penerapan manajemen risiko menjadi semakin penting bagi gerak langkah Jasa Marga dalam menjalankan usahanya.

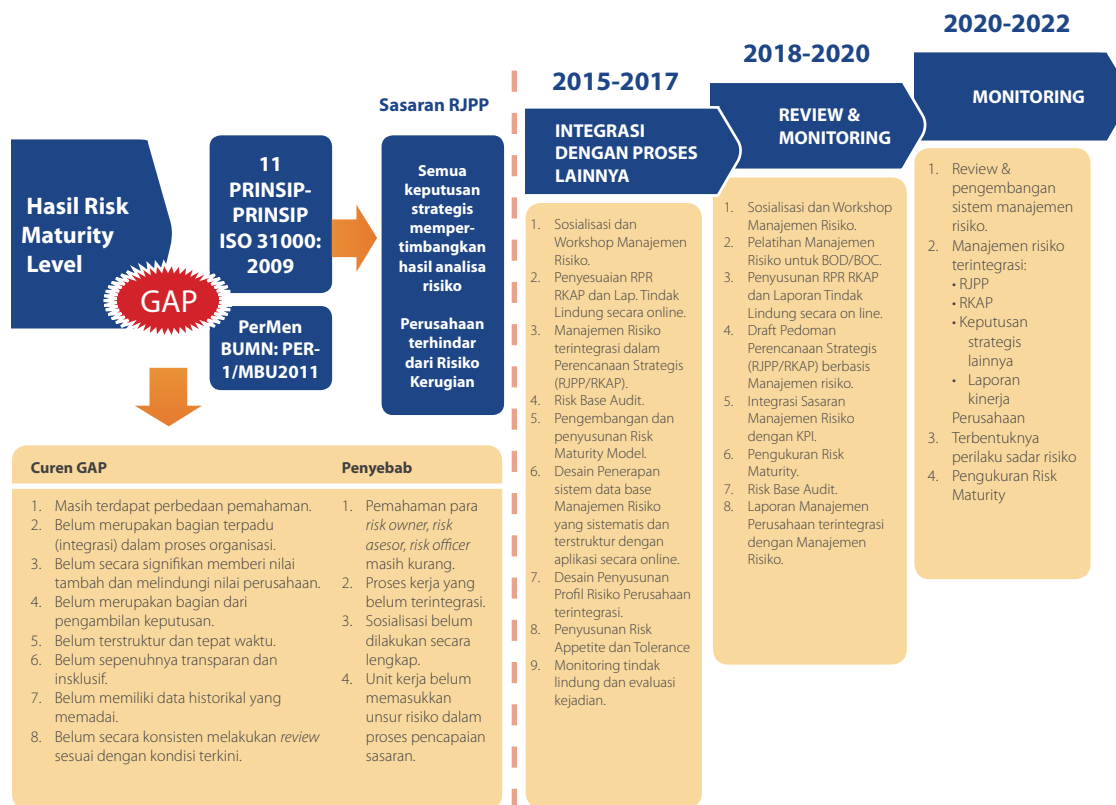
Pengelolaan manajemen risiko dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, terstruktur dan terintegrasi untuk mengantisipasi suatu ketidakpastian atau kerugian yang mungkin terjadi dalam pengelolaan Perseroan yang meliputi 3 (tiga) bidang utama yaitu bidang pengembangan bisnis jalan tol, pengoperasian jalan tol dan pengembangan usaha lain serta 5 (lima) bidang pendukung yaitu bidang keuangan, SDM, IT serta bidang lainnya.

Perjalanan Pengelolaan Risiko Jasa Marga

Sejak tahun 2007, Jasa Marga telah menerapkan Sistem Manajemen Risiko yang berbasis pada standar AS/NZS 4360:1999 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 139/KPTS/2007 tentang Manual Pengelolaan Risiko. Selanjutnya, dengan terbitnya ISO 31000:2009 pada tanggal 31 Oktober 2009, Jasa Marga melakukan tinjauan manajemen untuk mengubah pedoman penerapan manajemen risiko dengan standar baru yang berorientasi pada *Enterprise Risk Management (ERM)* dengan menerbitkan Keputusan Direksi Jasa Marga No. 129.2/KPTS/2010 tentang Kebijakan Manajemen Risiko dan Manual Manajemen Risiko di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Skema perjalanan Jasa Marga dalam menerapkan manajemen risiko dapat dilihat pada *Roadmap* Pengembangan Sistem Manajemen Risiko di bawah ini. *Roadmap* ini di-update setiap tahun mengikuti perkembangan lingkungan serta kebijakan internal dan eksternal Perseroan.

ROADMAP PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO JASA MARGA



Kebijakan Manajemen Risiko

Direksi menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai acuan dalam mencapai Sasaran Jangka Panjang Perusahaan dan Manual Manajemen Risiko sebagai wujud komitmen untuk penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi, dalam rangka menunjang kepastian pencapaian Sasaran Jangka Panjang Perusahaan, serta memberikan kerangka penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terukur sesuai persyaratan internasional.

Kebijakan Manajemen Risiko dan Manual Manajemen Risiko di lingkungan Perseroan menggunakan ISO 31000:2009 sebagai acuan dan tertuang dalam Keputusan Direksi Jasa Marga No. 129.2/KPTS/2010 tentang Kebijakan Manajemen Risiko dan Manual Manajemen Risiko di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Selain ISO 31000:2009, pengelolaan risiko di Perseroan juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang direvisi dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Ditandatangani Kebijakan Manajemen Risiko oleh semua Direksi menunjukkan komitmen, kesungguhan dan kepedulian Direksi terhadap pentingnya manajemen risiko dalam keberlangsungan hidup dan mengamankan sasaran Perseroan.

Kebijakan Manajemen Risiko Jasa Marga adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka menerapkan kebijakan Risiko, Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*.
2. Risiko harus dipahami sebagai semua peristiwa yang mungkin dapat terjadi dalam proses bisnis Perusahaan dalam pencapaian sasaran bisnisnya.
3. Semua risiko Perusahaan harus dikelola secara maksimal dengan memanfaatkan sumber daya Perusahaan sehingga tetap berada dalam batas Toleransi Risiko Perusahaan.
4. Direksi, seluruh Karyawan dan Mitra Usaha Perusahaan memiliki peran dalam pengelolaan risiko sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.
5. Menyempurnakan sistem pengelolaan risiko secara terus menerus sesuai kondisi terkini dan mendorong seluruh Karyawan untuk selalu mengembangkan dan memelihara budaya sadar risiko dalam rangka menjaga nilai Perusahaan dan kepercayaan *Stake Holder*.

Tujuan dari penerapan manajemen risiko di Jasa Marga adalah:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap adanya dampak dari aktifitas dan tindakan bisnis maupun pengaruh faktor eksternal yang mengandung risiko.
2. Menurunkan potensi frekuensi kejadian-kejadian berbahaya yang mungkin terjadi.
3. Meminimalkan potensi kerugian sebagai dampak yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian tersebut.

Pada tahun 2015, Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan komitmen penerapan manajemen risiko di lingkungan Perseroan dengan berdasarkan tujuh prinsip yang tertuang dalam Piagam Penerapan Sistem Manajemen Risiko yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2015.



Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

Pada 2015, Jasa Marga tumbuh secara signifikan dengan bertambahnya ruas tol baru dan bisnis lain. Berkembangnya bisnis Perseroan yang semakin menjadikan Jasa Marga lebih intensif dalam hal pengelolaan risiko-risiko bisnisnya. Kehadiran Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko merupakan salah satu bentuk kepedulian Perseroan dalam mengelola risiko bisnis secara intensif. Perseroan sadar bahwa manajemen risiko harus diterapkan di semua lini. Oleh karena itu, dibuat suatu Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko, dimana semua orang mempunyai peranan dalam membangun, mengelola dan memastikan penerapan manajemen risiko.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko di Jasa Marga pada tahun 2015 mengalami banyak perubahan antara lain pengelolaan manajemen risiko yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Direktur Keuangan, saat ini menjadi tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Dengan adanya direktorat baru, secara otomatis Ketua Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan manajemen risiko yang semula menjadi

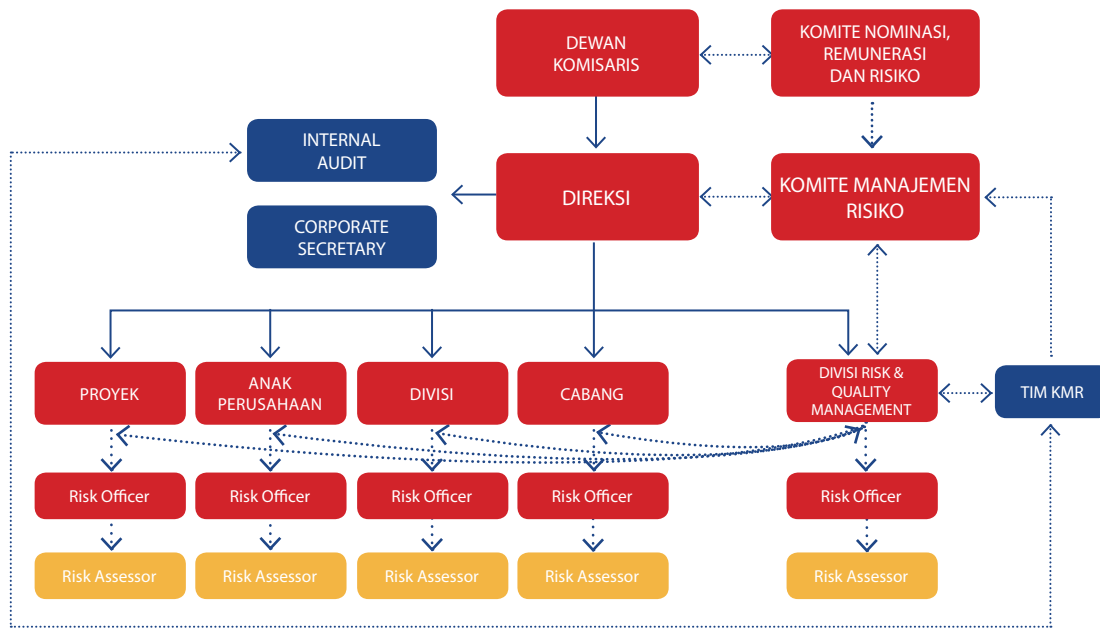
tugas dan tanggung jawab Komite Investasi dan Risiko Usaha (KIRU) saat ini berubah menjadi Komite Nominasi dan Remunerasi Risiko. Perubahan lainnya juga terdapat pada nama, tugas dan tanggung jawab Tim Evaluasi Pengelolaan Risiko Perusahaan kini menjadi Tim Sekretariat Komite Manajemen Risiko (TS KMR). TS KMR bertugas dan bertanggung jawab dalam mengevaluasi dokumen Rencana Pengelolaan Risiko Perseroan baik risiko strategis maupun risiko teknis.

Restrukturisasi organisasi pada struktur dan tata kelola manajemen risiko merupakan bentuk komitmen Perseroan dalam meningkatkan tingkat kematangan pada implementasi Manajemen Risiko guna mengawal pencapaian tujuan strategis dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko di Jasa Marga adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris.
2. Direksi.
3. Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko yang diketuai oleh salah seorang anggota Komisaris.
4. Komite Manajemen Risiko, yang diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
5. Divisi Risk and Quality Management sebagai fasilitator.
6. Tim Sekretariat Manajemen Risiko (TS KMR).
7. Risk Owner (Kepala Biro/Satuan/Divisi/Cabang/Unit).
8. Risk Officer (sebagai fasilitator dalam pelaksanaan assessment).
9. Risk Assessor (yang melakukan assessment di setiap unit kerja).

STRUKTUR TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO JASA MARGA



-----> alur komunikasi (Sistem Manajemen Risiko)
 —————> alur komando (sesuai struktur organisasi)

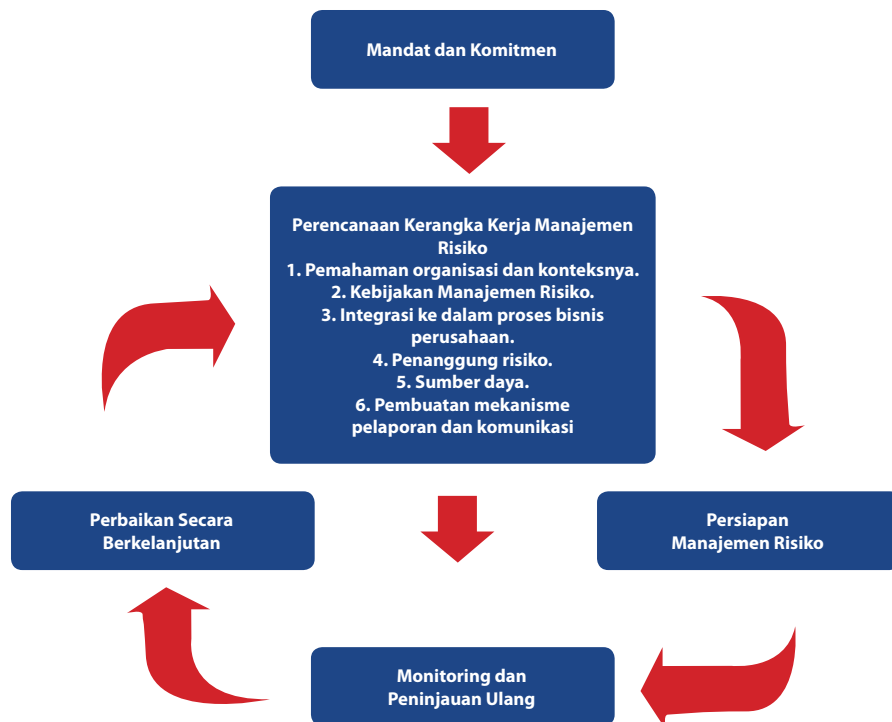
Komite Nominasi Remunerasi dan Risiko diketuai oleh Komisaris dengan anggota profesional.

Komite Manajemen Risiko (KMR) diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dengan Divisi Risk and Quality Management sebagai sekretaris komite.

* Profil ketua dan anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko serta ketua dan anggota KMR dapat dilihat pada bagian Profil Jasa Marga.

Kerangka kerja manajemen risiko di Jasa Marga merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip manajemen risiko yang memberikan dasar dan penataan organisasi yang mencakup seluruh kegiatan pada semua tingkatan Perseroan. Skema kerangka kerja manajemen risiko Jasa Marga adalah sebagai berikut:

SKEMA KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO JASA MARGA



Kerangka Kerja Manajemen Risiko mendorong terlaksananya Pengelolaan Risiko secara efektif dengan menggunakan penerapan proses Manajemen Risiko pada berbagai tingkatan organisasi dan dalam konteks spesifik Perusahaan. Kerangka Kerja Manajemen Risiko pada dasarnya merupakan suatu sistem manajemen dengan struktur sistem yang membentuk siklus *Plan, Do, Check, Action* (PDCA), sehingga memudahkan integrasi sistem Manajemen Risiko pada sistem manajemen Perseroan yang lainnya.

Untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko, Jasa Marga telah menyusun beberapa prosedur antara lain:

- a) Prosedur Pengelolaan Risiko (PK/PR/01-BMMR).
- b) Prosedur Penyusunan RPR dan (PPR PK/PR/02-BMMR).
- c) Prosedur Monitoring Pelaksanaan Tindak Lindung (PK/PR/03-BMMR).
- d) Prosedur Penyusunan Profil Risiko Perusahaan (PK/PR/04-BMMR).
- e) Prosedur Dokumentasi dan Pelaporan (PK/PR/05-BMMR).
- f) Prosedur Evaluasi Kejadian Risiko (PK/PR/06-BMMR).
- g) Prosedur Penyusunan Register Risiko (PK/PR/07-BMMR).

Risiko Perseroan dan Pengelolaannya

Sejalan dengan komitmen Direksi Jasa Marga, untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif dan efisien maka pada setiap jenjang organisasi Perseroan yaitu korporat dan unit bisnis harus menerapkan manajemen risiko dengan memperhatikan prioritas dan manfaat tiap program kerja/proyek bagi kelangsungan Perseroan. Pada tahun 2015 terdapat perubahan tata cara pengelolaan risiko salah satunya yaitu mengelompokkan risiko menjadi 8 bidang risiko yang berpengaruh langsung pada perusahaan, diharapkan perubahan ini akan membuat pengelolaan risiko Perseroan menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi sustainability Perseroan.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 Perseroan membagi bidang risiko menjadi 8 bidang yaitu bidang pengembangan usaha jalan tol, bidang pengoperasian jalan tol,

bidang pengembangan usaha non jalan tol, bidang keuangan, bidang sumber daya manusia, bidang hukum/regulasi/ lingkungan jalan tol, bidang teknologi informasi serta bidang komunikasi dan pencitraan perusahaan. Selain itu, perseroan telah menetapkan daftar minimal risiko kantor cabang guna menelaraskan risiko antar kantor cabang.

Top Risk RKAP 2015 per Bidang

Top Risk RKAP 2015 per bidang merupakan risiko tertinggi yang telah dikelompokkan menjadi 8 bidang yang merupakan hasil konsolidasi risiko dengan status risiko tingkat tinggi yang difilter berdasarkan kriteria keberterimaan korporat dari masing-masing unit kerja Kantor Pusat, Anak Perusahaan Jalan Tol, Anak Perusahaan Usaha Lain dan Kantor Cabang.

Top risk Perseroan yang teridentifikasi dan telah disusun berdasarkan bobot dari masing-masing risiko adalah sebagai berikut:

DESKRIPSI BIDANG RISIKO

No.	Bidang	Risiko Inherent		Risiko Residual TW IV 2015	
		Eksposur	Tingkat	Eksposur	Tingkat
1	Bidang Pengembangan Jalan Tol	19,13	E	4,25	M
2	Pengoperasian Jalan Tol	18,50	E	4,69	M
3	Bidang Pengembangan Usaha Lain	12,50	T	6,50	M
4	Bidang Keuangan Jalan Tol	10,67	T	1,67	R
5	Bidang Sumber Daya Manusia Jalan Tol	12,25	T	2,00	R
6	Bidang Regulasi Jalan Tol	14,00	T	6,25	M
7	Bidang Teknologi Informasi Jalan Tol	12,00	T	1,00	R
8	Bidang Komunikasi/Citra Perusahaan Jalan Tol	10,00	T	2,50	R

E = Ekstrem T = Tinggi M = Moderat R = Rendah

Selain *top risk* bidang yang paling mempengaruhi kinerja Perseroan ke depan, Perseroan juga mengidentifikasi masing-masing bidang risiko secara detail berdasarkan *top risk* di setiap bidang tersebut.

Berikut rincian identifikasi risiko per direktorat:

A. Risiko Bidang Pengembangan Jalan Tol

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2015 Bidang Pengembangan, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

PROFIL RISIKO PERSEROAN TAHUN 2015 BIDANG PENGEMBANGAN JALAN TOL

No.	Risiko	Tindak Lindung
1	Risiko terhambat proses pembebasan lahan	Melakukan kordinasi percepatan dan pemberian insentif dengan Tim Pengadaan Tanah (TPT) dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T), dan instansi lainnya yang terkait serta pemilik tanah.
2	<ul style="list-style-type: none"> Risiko instansi berwenang yang bekerja tidak sesuai dengan jadwal. Adanya dokumen tanah yang bermasalah. 	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan dana biaya operasional TPT. Menyiapkan biaya relokasi utilitas dan lainnya. Rapat koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait.
3	Risiko terlambatnya penyelesaian konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Value Engineering, Perubahan design yang optimal, Menginventarisir pekerjaan tambah agar dapat di klaim /masuk kedalam contingencies PPJT
4	Risiko proses pengadaan tanah terhambat	<ol style="list-style-type: none"> Memperkuat Tim Bantuan Teknis (Bantek) yang mempunyai kompetensi di bidang hukum dan administrasi pemberkasan. Memperkuat tim lapangan (Satgas kelurahan/RT/RW). Koordinasi TPT dan P2T. Pendampingan hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN).
5	Risiko pengopersian tidak tepat waktu (Kendala pengadaan tanah)	Koordinasi dan mendorong Instanasi terkait untuk mempercepat pelaksanaan jalan tol

B. Risiko Bidang Pengoperasian Jalan Tol

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2015 Bidang Pengoperasian Jalan Tol, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

PROFIL RISIKO PERSEROAN TAHUN 2015 BIDANG PENGOPERASIAN JALAN TOL

No.	Risiko	Tindak Lindung
1.	Risiko Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol tidak terpenuhi	Pemeliharaan Periodik Jalan Tol
2.	Risiko terjadi kerusakan pada pile slab	Perbaikan Pile Slab
3.	Risiko Stalmen badan jalan & Rusaknya Bangunan Pelengkap Jalan	Pekerjaan Penanganan dan Perbaikan Stabilitas Badan Jalan
4.	Risiko kerusakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	Penggantian JPO Baja menjadi JPO Beton
5.	Risiko kerusakan pada perkerasan dan sambungan ekspansi (expansion joint)	Rekonstruksi Perkerasan, Perbaikan Expansion Joint, dan Stitching
6.	Risiko Badan jalan terangkat, stalmen dan atau trace jalan bergerak/berubah	Pekerjaan Dengan Metoda Bore Pile
7.	Risiko Kondisi Aramco Rawan Amblas	Pekerjaan jacking Reinforced concrete pipe (RCP).

C. Risiko Bidang Pengembangan Usaha Lain

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2015 Bidang Pengembangan Usaha Lain, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

PROFIL RISIKO PERSEROAN TAHUN 2015 BIDANG PENGEMBANGAN USAHA LAIN

No.	Risiko	Tindak Lindung
1	Risiko Pencapaian Pendapatan Anak Perusahaan tidak tercapai karena kurangnya modal kerja untuk pelaksanaan pekerjaan	Setoran tambahan modal untuk Anak Perusahaan (apabila diperlukan)
2	Risiko okupansi tempat Usaha di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) masih rendah.	1. Perluasan area parkir 2. Pembangunan mesjid dan toilet yang lebih luas dan menarik 3. Meredesain <i>lay out</i> TIP 4.Membangun area komersial baru yang lebih menarik bagi branded restoran
3	Risiko Kegiatan operasional <i>Asphalt Mixing Plant</i> (AMP) berhenti karena lokasi AMP dilahan hijau dan warga merasa terganggu dengan kegiatan tersebut.	Mencari alternatif lokasi AMP
4	Risiko kalah tender di Jasa Marga	1. Menggandeng perusahaan lain (KSO). 2. Menambah sumber daya manusia yang ahli. 3. Memperbaiki internal control kondisi keuangan. 4. Memperbaiki bisnis perusahaan.
5	Risiko Tidak dapat menambah jumlah tenant pada TIP	1. Membangun area parkir tambahan (rigid dan paving blok) beserta penerangannya (PJU) 2. Menambah bangunan toilet

D. Risiko Bidang Keuangan Jalan Tol

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2015 Bidang Keuangan Jalan Tol, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Diantara risiko yang telah diidentifikasi, risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

PROFIL RISIKO PERSEROAN TAHUN 2015 BIDANG KEUANGAN JALAN TOL

No.	Risiko	Tindak Lindung
1	Risiko Kekurangan Kas untuk Operasi	1. Melakukan monitoring terhadap proses transfer Hasil Pengumpulan Tol (HPT) setiap hari dari rekening cabang ke rekening kantor pusat. 2. Memonitor kebijakan pelaksanaan Penggunaan Dana Operasi (PDO) cabang dan batas waktu maksimum transaksi pembayaran 14 hari kerja sejak dokumen pembayaran diterima dengan lengkap dan benar. 3. Mengendalikan pembayaran Dana Kerja Lain (DKL) Cabang dengan batas waktu maksimal 2 hari sebelum jatuh tempo.
2	Risiko Terlambatnya Penyediaan Dana Investasi.	1. Melakukan Perjanjian Kredit (Standby Loan) dengan Bank dengan jumlah plafond yang cukup dan dapat ditarik setiap saat 2. Melakukan koordinasi dengan Unit terkait mengenai jadwal pembayaran rencana kebutuhan dana investasi.
3	Risiko Hilangnya Pokok Penempatan Dana.	1. Melakukan analisa kesehatan baik dari segi legalitas maupun reputasi terhadap calon bank yang akan dipilih 2. Melakukan penempatan dana berdasarkan Analisa Batas Maksimum Penempatan Dana (BMPD) dan Batas Portofolio Penempatan (BPP) secara berkesinambungan.

E. Risiko Bidang Sumber Daya Manusia Jalan Tol

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2015 Bidang Sumber Daya Manusia Jalan Tol, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

PROFIL RISIKO PERSEROAN TAHUN 2015 BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA JALAN TOL

No.	Risiko	Tindak Lindung
	Risiko mogok kerja/unjuk rasa dan adanya gugatan eks Tenaga Alih Daya untuk menjadi karyawan tetap Perseroan	Melakukan monitoring program pengangkatan eks tenaga alih daya menjadi karyawan tetap PT Jalantol Lingkarluar Jakarta.
	<ul style="list-style-type: none"> · Tidak selaras dengan Undang Undang · Terjadinya komplain dari karyawan karena mutu pelayanan BPJS kurang optimal · Bertambahnya biaya <i>Exes Claim</i> yang dibayarkan Perseroan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama dengan BPJS dan Rumah Sakit. 2. Usulan perubahan peraturan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan

F. Risiko Bidang Regulasi/Hukum/Lingkungan Jalan Tol

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2015 Bidang Regulasi/Hukum/Lingkungan Jalan tol, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

PROFIL RISIKO PERSEROAN TAHUN 2015 BIDANG REGULASI/HUKUM/LINGKUNGAN JALAN TOL

No.	Risiko	Tindak Lindung
1	Risiko banyaknya perkara kalah di Pengadilan.	Penggunaan konsultan litigasi
2	Risiko potensi kehilangan pendapatan tol dan pemanfaatan tanah kelola secara liar oleh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeksi ke cabang-cabang 2. Pengamanan aset
3	Risiko kajian hukum yang diberikan kurang tepat, tidak mengatasi permasalahan, dan tidak mendukung pengembangan bisnis Perseroan	Penggunaan konsultan litigasi
4	Risiko demo di jalan tol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan masyarakat (pendemo) 2. Berkoordinasi dengan pihak berwajib kepolisian

G. Risiko Bidang Teknologi Informasi Jalan Tol

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2015 Bidang Teknologi Informasi Jalan tol, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

PROFIL RISIKO PERSEROAN TAHUN 2015 BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI JALAN TOL

No.	Risiko	Tindak Lindung
1	Risiko implementasi Teknologi Informasi (TI) tidak berjalan sesuai dengan <i>road map</i> yang ada dan tidak terstruktur.	Dibentuk tim Implementasi TI sesuai Master Plan

H. Risiko Bidang Komunikasi dan Pencitraan Perusahaan

Setelah dilakukan identifikasi risiko terhadap sasaran-sasaran RKAP 2015 Bidang Komunikasi dan Pencitraan Perusahaan, teridentifikasi beberapa risiko yang berpotensi dapat mengganggu pencapaian sasaran. Di antara risiko yang telah diidentifikasi, maka risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain:

PROFIL RISIKO PERSEROAN TAHUN 2015 BIDANG KOMUNIKASI DAN PENCITRAAN PERUSAHAAN

No.	Risiko	Tindak Lindung
1	Risiko penurunan citra Perseroan di mata stakeholders akibat tidak terlaksananya kegiatan Perseroan berdasarkan prinsip-prinsip GCG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i>. 2. Assessment ASEAN Scorecard (IICD). 3. Cetak Poster GCG. 4. IICG Tahun Penilaian 2014 (CGPI). 5. Self Assessment GCG. 6. Award Bidang GCG. 7. Implementasi Budaya Perusahaan (luncuran 2014).
2	Risiko adanya aksi protes dari masyarakat pengguna jalan tol (baik melalui tatap muka, demo, ataupun surat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penyelenggaraan Temu Pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelanggan terkini 2. Mengoptimalkan media eksternal perusahaan (<i>website, social media, dan media luar ruang</i>) 3. Menyelenggarakan kampanye edukasi atau bentuk CSR maupun bantuan lain yang tepat sasaran dan tepat guna kepada masyarakat

Implementasi Program Kerja Manajemen Risiko Tahun 2015

Sesuai dengan kerangka kerja manajemen risiko pada tahun 2015 program kerja manajemen risiko mengambil konsep *plan do check action* (PDCA).

1. Integrasi Manajemen Risiko ke dalam Keseluruhan Proses Bisnis Perseroan.

a. Penyusunan RKAP 2015 Berbasis Manajemen Risiko.

Program ini merupakan program rutin tahunan seiring penyusunan RKAP tahunan sesuai dengan prosedur penyusunan Rencana Pengelolaan Risiko (RPR) dan Perubahan Pengelolaan Risiko (PPR) No. PK/PR/02-BMMR. Dalam penyusunan RKAP 2015 berbasis manajemen risiko dilakukan tahapan sebagai berikut:

- Sosialisasi dan workshop penyusunan Risk Register RKAP 2015.
- Penyusunan Rencana Pengelolaan Risiko RKAP 2015.
- Penyusunan Rekomendasi dalam rangka penetapan RKAP 2015.
- Penyusunan Profil Risiko RKAP Tahun 2015.

Dalam penyusunan RKAP 2015 berbasis manajemen risiko, Anak Perusahaan diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan Rencana Pengelolaan Risiko. Hal

ini dalam rangka memastikan bahwa risiko kegiatan operasional bisnis di tahun 2015 telah teridentifikasi dan telah disusun rencana tindak lindungnya.

b. Penyusunan Rencana Pengelolaan Risiko Program.

Menindaklanjuti prosedur penyusunan Rencana Pengelolaan Risiko (RPR) dan Perubahan Pengelolaan Risiko (PPR) No. PK/PR/02-BMMR, maka setiap unit kerja/bisnis setelah program RKAP-nya disetujui oleh Direksi maka untuk program yang bernilai di atas Rp 5 miliar, unit kerja/bisnis harus membuat RPR program terlebih dahulu sebelum program dilaksanakan.

c. Penyusunan Profil Risiko Tahun 2015.

Penyusunan Profil Risiko tahun 2015 merupakan tindak lanjut dari program penyusunan RKAP tahun 2014 berbasis manajemen risiko. Program penyusunan Profil Risiko tahun 2015 adalah penyesuaian Rencana Pengelolaan Risiko setelah penetapan RKAP 2015, dimana sebelumnya telah disusun Rencana Pengelolaan Risiko sebelum ditetapkan RKAP 2015. Proses penyusunan profil risiko ini sesuai dengan Prosedur Penyusunan Profil Risiko Perusahaan No. PK/PR/04-BMMR.

d. Laporan Pengelolaan Risiko.

Laporan pengelolaan merupakan persyaratan dan kelengkapan dari laporan Perseroan, juga sebagai bahan untuk *Risk Base Audit Internal Audit*.

Rencana pengelolaan risiko yang telah ditetapkan dalam Profil Risiko Perseroan dan unit tahun 2015, selanjutnya sesuai dengan prosedur monitoring pelaksanaan tindak lindung No. PK/PR/03-BMMR maka setiap unit kerja/bisnis harus melaksanakan tindak lindung dan melakukan monitoring pelaksanaan tindak lindungnya serta kondisi status risikonya. Hal ini agar risiko yang telah teridentifikasi dalam Profil Risiko Perseroan dapat dimonitor dan diminimalisir.

- i. Pelaksanaan tindak lindung.
 - 1) Unit Kerja/Bisnis melaksanakan tindak lindung dari RPR dan PPR RJP, RKAP dan KPI yang telah disahkan oleh Direksi.
 - 2) Apabila terdapat perubahan program RJP/RKAP, maka setiap Unit Kerja/Bisnis melakukan asesmen ulang dan menyusun Perubahan Pengelolaan Risiko.
- ii. Monitoring Pengelolaan Risiko.
Pelaksanaan monitoring meliputi:
 - 1) Pemantauan berkelanjutan oleh para *risk owner* yang dilaksanakan sehari-hari.
 - 2) Pengawasan oleh atasan (pimpinan unit kerja/bisnis) yang dilaksanakan secara berkala.

- 3) Pengawasan melalui audit internal maupun eksternal yang dilaksanakan secara periodik.
- 4) Investigasi atas kejadian peristiwa yang berkaitan dengan Pengelolaan Risiko.

Program monitoring progress tindak lindung risiko dilaksanakan setiap akhir triwulanan dan merupakan program penyusunan laporan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja/ cabang/ Anak Perusahaan terhadap Rencana Pengelolaan Risiko (RPR), selanjutnya dikonsolidasikan terhadap risiko korporat sehingga menyusun profil risiko korporat (*update*) setelah perlakuan tindak lindung.

- iii. Divisi Risk and Quality Management melaksanakan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Pengelolaan Risiko dan mendokumentasikannya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pengelolaan risiko Perseroan dilakukan dengan memantau jumlah program tindak lindung yang direncanakan dan dilaksanakan. Tahun 2015, Perseroan melihat lebih dalam efektivitas pelaksanaan program tindak lindung dengan melihat penurunan tingkat risiko yang telah direncanakan.

PENURUNAN RISIKO DARI RISIKO INHERENT (HASIL ASESMEN) KE RISIKO RESIDUAL (HASIL MONITORING)

Periode	Probabilitas	Dampak	Eksposur	Tingkat Risiko
INHERENT (Asesmen Tahun 2014)	3,32	4,19	13,89	TINGGI
Triwulan 1 Tahun 2015	2,51	2,82	7,08	MODERAT
Triwulan 2 Tahun 2015	2,41	2,78	6,70	MODERAT
Triwulan 3 Tahun 2015	1,86	2,38	4,44	MODERAT
Triwulan 4 Tahun 2015	1,69	2,04	3,45	RENDAH

e. Penyusunan Kajian Risiko Bisnis 2015

Penyusunan kajian risiko bisnis merupakan hal penting yang selalu dilakukan Perseroan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan dapat memberi nilai tambah bagi Perseroan. Kajian risiko yang pernah dibuat salah satunya yaitu dalam proses pengusahaan jalan tol baru.

2. Sosialisasi, *Sharing*, Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko

Walaupun ada perubahan struktural, mutasi, dan pensiun, Perseroan tetap berusaha memenuhi kompetensi personil yang ada di Perseroan terutama yang termasuk dalam struktur tata kelola pengelolaan risiko. Untuk itu Perseroan melakukan sosialisasi ke setiap Unit kerja/Cabang/Anak Perusahaan, mengikuti seminar, sertifikasi, *sharing* manajemen risiko dan mengadakan Forum Manajemen Risiko.

a. Pelatihan, Sosialisasi dan Sertifikasi

Untuk memastikan kecukupan kompetensi mengenai manajemen risiko di Perseroan, Jasa Marga juga telah melaksanakan pelatihan dan seminar serta sertifikasi Manajemen Risiko bagi para karyawan tingkat manajemen dan staf terutama yang terlibat langsung dalam pengelolaan risiko, baik melalui pelatihan yang diselenggarakan melalui Internal Perusahaan maupun Eksternal Perusahaan bekerjasama dengan para profesional di bidang risiko misalnya *Center for Risk Management Studies* (CRMS).

PELAKSANAAN PELATIHAN, SEMINAR DAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2015

No.	Uraian	Vendor/Nara Sumber	Jumlah Peserta (orang)	Peserta
1	Sertifikasi In House & Pelatihan (Building GCG, Risk Management & Environment Control)	CRMS	53	Level setingkat VP, GM, AVP
2	Risk Assessment Teknik	CRMS	1	Assistant Manager
3	Governance Enterprise Management Bali Conference	CRMS	3	AVP
4	Risk Governance Summit	OJK	6	VP, AVP, Assistant Manager dan Senior Officer

Sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah personil yang memiliki sertifikasi di bidang Risiko adalah sebagai berikut:

JUMLAH PERSONIL DENGAN SERTIFIKASI RISIKO

No.	Jenis Sertifikasi Kompetensi	Jumlah		
		Total	Aktif	Pensiun
1	Certified in Enterprise Risk Governance (CERG)	5	2	3
2	Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)	5	5	-
3	Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	8	6	2
4	Certified Risk Management Program (CRMP)	2	1	1

Sosialisasi Manajemen Risiko dilakukan secara rutin ke karyawan di kantor Cabang dan Anak Perusahaan. Sosialisasi tersebut merupakan bentuk komitmen Perseroan untuk terus menumbuhkan budaya sadar risiko pada seluruh insan Jasa Marga melalui peningkatan kompetensi tentang Manajemen Risiko.

b. Pembelajaran Organisasi tentang Sistem Manajemen Risiko

Perseroan rutin melakukan pembelajaran organisasi tentang Sistem Manajemen Risiko untuk selalu *up to date* dalam pengetahuan manajemen risiko dan perkembangan sistem risiko dari eksternal Perseroan serta untuk bertukar pengalaman dan pikiran antara praktisi dan profesional di bidang Manajemen Risiko di Indonesia.

Pada tahun 2015, Perseroan mengikuti *Roundtable Discussion* "Legal and Regulation Risk" yang diselenggarakan di Jasa Marga atas kerja sama dengan CRMS Indonesia, ERMA Indonesia Chapter.

Perseroan telah melakukan *benchmarking* ke Spanyol guna menambah pengetahuan mengenai pengelolaan manajemen risiko perusahaan pada pertengahan Desember 2015.

Selain melakukan *benchmarking* ke perusahaan lainnya, kinerja pengelolaan risiko Perseroan ternyata sudah dianggap cukup baik oleh perusahaan lainnya sehingga dijadikan sebagai tempat *benchmarking*. Pada tahun 2015 perseroan menerima beberapa *benchmarking* dari perusahaan lain, antara lain:

1. Kunjungan Studi Banding Implementasi Manajemen Risiko ke PT Jasa Marga (Persero) Tbk dari PT Kimia Farma (Persero)
2. Kunjungan Studi Banding Implementasi Implementasi Internal Audit, Risk Management, dan GCG dari Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan.

3. Aplikasi Manajemen Risiko Berbasis Web

Mulai tahun 2014, pengisian rencana pengelolaan risiko oleh unit kerja, cabang dan Anak perusahaan serta laporan monitoring tindak lindung per triwulan harus melalui Aplikasi Manajemen Risiko yang berbasis web. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan administratif pengelolaan risiko sehingga mempermudah proses pengelolaan risiko menjadi lebih efisien serta mempunyai database dan pelaporan pengelolaan risiko yang lebih mudah dan cepat yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

Pada tahun 2015, Perseroan terus mengembangkan Aplikasi Manajemen Risiko dengan memperbarui beberapa fitur yang dapat mempermudah *risk assessor* dalam pengelolaan dokumen manajemen risiko.

4. Pengukuran Efektifitas Implementasi Manajemen Risiko

Untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko efektif dan menunjang kinerja organisasi, maka Jasa Marga telah melakukan Pengukuran Tingkat Kematangan (*Risk Maturity*) dalam Pengelolaan Risiko oleh konsultan independen.

Program ini merupakan pengukuran efektifitas implementasi manajemen risiko, dalam rangka memberikan arah perbaikan terhadap sistem manajemen risiko yang sedang dilaksanakan di Jasa Marga, dengan tujuan sebagai berikut:

- Mendapatkan data atas gap dan gambaran sejauhmana implementasi manajemen risiko di Jasa Marga.
- Mendapatkan rekomendasi (*Strength* dan OFI) dan sekaligus mendapatkan arah dan saran perbaikan dalam rangka implementasi manajemen risiko ke depan.

Awalnya Jasa Marga melakukan program pengukuran efektifitas implementasi manajemen risiko setiap 2 (dua) tahun sekali dengan harapan dalam selang pengukuran perbaikan atas pengukuran efektifitas implementasi manajemen risiko dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan, akan tetapi mengingat banyaknya dan cepatnya perubahan perkembangan sistem yang diterapkan di Perseroan maka dipandang perlu untuk melakukan pengukuran setiap tahun untuk melihat efektifitas implementasi perbaikan sistem yang ada.

Model yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat maturitas manajemen risiko setiap tahunnya, memiliki 5 (lima) tingkat yang menggambarkan kompetensi perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko dan 6 Atribut Pengukuran.

TINGKAT MATURITAS MANAJEMEN RISIKO

Tingkatan				
Awal (Initial) Level 1	Pemula (Beginner) Level 2	Kompeten (Capable) Level 3	Mahir (Proficient) Level 4	Pemimpin (Leader) Level 5
Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)				
Prinsip Manajemen Risiko (<i>Risk Management Principles</i>)				
Proses (<i>Process</i>)				
Aplikasi (<i>Application</i>)				
Pengalaman (<i>Experience</i>)				
Budaya (<i>Culture</i>)				

Berdasarkan tingkat maturitas yang telah dihasilkan, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- Pada atribut Prinsip, Perseroan memperoleh tingkat KOMPETEN, yang berarti bahwa di Perseroan terdapat pemahaman terhadap prinsip Manajemen Risiko dan beberapa prinsip manajemen risiko mulai diterapkan.
- Pada atribut Kepemimpinan, Perseroan memperoleh tingkat KOMPETEN, yang berarti bahwa di Perseroan gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin sudah dijadikan sebagai role model untuk mengaplikasikan manajemen risiko secara konsisten diseluruh organisasi.
- Pada atribut Aplikasi, Perseroan memperoleh tingkat KOMPETEN yang berarti bahwa sistem manajemen risiko telah mulai diterapkan namun belum konsisten. Pelaporan belum terperinci, dan sudah terdapat KPI yang terkait dengan manajemen risiko namun belum konsisten dilaksanakan.
- Pada atribut Proses, Perseroan memperoleh tingkat KOMPETEN yang berarti bahwa di Perseroan proses

manajemen risiko belum sepenuhnya konsisten, belum terdapat pembelajaran dari pengalaman, dan menggunakan pendekatan yang umum.

- Pada atribut Pengalaman, Perseroan memperoleh tingkat PEMULA, yang berarti bahwa Perseroan hanya memiliki kompetensi dasar manajemen risiko.
- Pada atribut Budaya, Perseroan memperoleh tingkat KOMPETEN, yang berarti bahwa di Perseroan mulai terdapat dukungan aktif dari manajemen senior terhadap manajemen risiko, mulai ada kesadaran dan mulai aktif mencari informasi mengenai manajemen risiko, telah ada komitmen terhadap manajemen risiko namun belum konsisten dan masih lemahnya koordinasi, mulai terdapat pemahaman elemen organisasi terhadap sasaran dan mulai terdapat kebutuhan atas Kajian Risiko dalam pengambilan keputusan.
- Secara umum, nilai maturitas Manajemen Risiko Perseroan tahun 2015 menempati tingkat Kompeten dengan nilai 3,72 Nilai maturitas Perseroan ini meningkat dari tahun 2014 sebesar 3,23.

HASIL PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN RISIKO (*RISK MATURITY*) JASA MARGA BERDASARKAN ATRIBUT

Karakter	Nilai	Tingkat Maturitas	
Budaya	3,89	MAHIR	LEVEL 4
Proses	3,58	KOMPETEN	LEVEL 3
Pengalaman	3,16	KOMPETEN	LEVEL 3
Aplikasi	3,85	MAHIR	LEVEL 4
Kepemimpinan	3,95	MAHIR	LEVEL 4
Prinsip	3,91	MAHIR	LEVEL 4
Tingkat Maturitas	3,72	KOMPETEN	LEVEL 3

PENINGKATAN NILAI MATURITAS MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN 2013, 2014 DAN 2015

Tahun	Jumlah Indikator	Nilai	Tingkat Maturitas
2013	6 Indikator	3,12	Kompeten, Level 3
2014	6 Indikator	3,23	Kompeten, Level 3
2015	6 Indikator	3,72	Kompeten, Level 3

Peningkatan nilai maturitas manajemen risiko di Jasa Marga menunjukkan bahwa Perseroan semakin intensif dalam menumbuhkan budaya sadar risiko di seluruh jajaran karyawan. Divisi Risk and Quality Management secara proaktif melakukan sosialisasi mengenai manajemen risiko dan melakukan pendampingan secara rutin tentang tata cara identifikasi dan proses input risiko ke dalam aplikasi Manajemen Risiko terhadap karyawan baik di kantor cabang maupun di anak perusahaan.

PROFIL VP RISK AND QUALITY MANAGEMENT

Divisi Risk and Quality Management dipimpin oleh Nixon Sitorus yang menjabat berdasarkan Keputusan Direksi No. 006/AA.P-6a/2015 tanggal 02 Februari 2015.

Profil VP Risk and Quality Management dapat dilihat di bagian Profil Jasa Marga.

Perkara Penting yang Dihadapi

Perkara Penting adalah permasalahan hukum yang dihadapi Jasa Marga selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum di Pengadilan. Sementara Nilai Gugatan merupakan nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Perseroan sebagai pihak tergugat atau nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Perseroan sebagai pihak penggugat, baik kerugian materiil maupun imateriil.

Sebagai perusahaan *pioneer* di bidang jalan tol, Jasa Marga terlibat dalam berbagai kasus hukum, yang memposisikan Jasa Marga baik sebagai Penggugat, Tergugat, ataupun sebagai Turut Tergugat. Selama tahun 2015, keseluruhan perkara penting yang dihadapi Jasa Marga merupakan perkara perdata. Berdasarkan jenis pokok perkara yang dihadapi, perkara penting Jasa Marga dapat dikelompokkan menjadi Perkara Tanah, Perkara Korporasi, Perkara Hubungan Industrial, dan Perkara Lain-Lain.

Atas perkara-perkara hukum di bawah ini, Perseroan berpendapat bahwa hasil dari kelanjutan pemeriksaan atau keputusan Pengadilan tersebut tidak akan membawa dampak material bagi Perseroan atau entitas anak Perseroan.

Berdasarkan estimasi Manajemen untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut maka Perseroan mencadangkan dana untuk penyelesaian perkara sebesar Rp 4.764.760.986,- pada RKAP 2015.

Rekapitulasi Perkara Hukum yang dihadapi oleh Perseroan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

JUMLAH PERKARA PENTING YANG DIHADAPI 2013-2015

2013	2014	2015
14	11	9

RINCIAN PERKARA 2015

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
	2014	2015
Perkara Tanah	6	5
Kasus Korporasi	3	3
Kasus Hubungan Industrial	1	-
Kasus Lain-Lain	1	1

PERKARA HUKUM DAN STATUS PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2015

Permasalahan Hukum	Jumlah Perkara		
	Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	9	-	-

Secara rinci perkara penting yang dihadapi Perseroan berdasarkan jenis perkara antara lain adalah sebagai berikut:

Perkara Tanah

KASUS ONIH BINTI RIDI

Perkara No.: 75/Pdt/2014/PT.DKI

Lembaga: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pihak

Penggugat: Urip bin Nasar dan
Onih binti Ridi

Tergugat: Jasa Marga

Pokok Perkara

Gugatan terkait kepemilikan tanah seluas 9.164 m² di Jalan Tol JORR Ruas Ulujami-Pondok Aren.

Status Perkara

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Maret 2014. Inti putusannya adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 205/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Upaya Manajemen

Saat ini Penggugat mengajukan Kasasi dan dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Nilai Gugatan

Rp 13.892.624.000

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan

Tidak berpengaruh.

KASUS SRI SUPARTINI

Perkara No.: 490 PK/Pdt/2007

Lembaga: Mahkamah Agung

Para Pihak

Penggugat: Sri Supartini Cs

Tergugat I: P2T Kabupaten Tangerang

Tergugat II: Departemen Pemukiman dan
Prasarana Wilayah

Tergugat III: Jasa Marga

Pokok Perkara

Gugatan terkait kepemilikan tanah seluas 5.500 m² di Jalan Tol JORR Ruas Ulujami-Pondok Aren.

Status Perkara

Perkara pada tingkat Peninjauan kembali (PK) telah diputus tanggal 03 Juli 2008. Inti putusannya adalah permohonan PK Jasa Marga tidak dikabulkan.

Upaya Manajemen

Jasa Marga telah mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri Tangerang dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang intinya adalah gugatan perlawanan tersebut tidak diterima. Atas putusan tersebut Jasa Marga telah menyatakan banding dan menyampaikan Memori Banding pada tanggal 03 Agustus 2015.

Nilai Gugatan

Rp 20.140.000.000

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan

Tidak berpengaruh.

KASUS MUSTAFA RAHMAN

Perkara No.: 1173 K/PDT/2012

Lembaga: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para PihakTergugat I: Departemen Pemukiman dan
Pengembangan Wilayah (Departemen
Pekerjaan Umum)

Tergugat II: Walikota Jakarta Timur

Tergugat III: PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Penggugat: Mustafa Rahman

Pokok PerkaraGugatan terkait dengan kepemilikan tanah seluas
6.670 m² yang terkena Jalan Tol JORR E1.**Status Perkara**Perkara di tingkat Peninjauan Kembali telah diputus
tanggal 06 Maret 2015. Inti putusannya adalah
permohonan Peninjauan Kembali dari Jasa Marga
ditolak.**Upaya Manajemen**Pada tanggal 14 Agustus Jasa Marga telah
mengajukan gugatan Perlawanan terhadap putusan
dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.**Nilai Gugatan**

Rp 17.775.000.000

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan

Tidak berpengaruh.

KASUS BENUA CHANDRA

Perkara No.: 704 K/Pdt/2007

Lembaga: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pihak

Penggugat: Benua Chandra

Tergugat I: Jasa Marga

Tergugat II-VI: Direktorat Jenderal Bina Marga
Cs.Tergugat VII: Direktur PT Perkebunan
Nusantara IITergugat VIII-IX: Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi
Sumatera Utara Cs.Tergugat X: Direktur PT Kawasan Industri
MedanTergugat XI-XVI: Bupati Kabupaten Deli Serdang
Cs.**Pokok Perkara**Gugatan terkait dengan kepemilikan tanah seluas
3.603 m² yang terkena Kantor dan Gerbang Tol Mabar
pada Jalan Tol Belmera.**Status Perkara**Perkara di tingkat Kasasi telah diputus tanggal 26
September 2007. Inti putusannya adalah menolak
permohonan Kasasi Jasa Marga.**Upaya Manajemen**Jasa Marga telah mengajukan Peninjauan Kembali ke
MA melalui PN Lubuk Pakam, dan sampai dengan saat
ini masih dalam proses pemeriksaan di MA.**Nilai Gugatan**

Rp 12.882.400.000

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan

Tidak berpengaruh.

KASUS FIKRI GANI

Perkara No.: 283/Pdt.G/2014/PN.Bks

Lembaga: Pengadilan Negeri Bekasi

Para Pihak

Penggugat: Fikri Gani

Tergugat I: Kantor Pertanahan Nasional

Tergugat II: Jasa Marga

Pokok PerkaraGugatan terkait dengan kepemilikan tanah seluas
1.935 m² di daerah Caman, Bekasi ruas Jalan Tol
Jakarta-Cikampek.**Status Perkara**Perkara di tingkat Pengadilan Negeri telah diputus
tanggal 10 Juni 2015. Inti putusannya adalah
mengabulkan gugatan Fikri Gani untuk sebagian.**Upaya Manajemen**Jasa Marga telah menyatakan Banding atas
putusan dimaksud pada tanggal 23 Juni 2015.**Nilai Gugatan**

Rp 13.545.000.000

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan

Tidak berpengaruh.

Kasus Korporasi

KASUS TIRTOBUMI II

Perkara No.: 180/PDT/2013/PT.DKI

Lembaga: Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Para Pihak

Penggugat: PT Tirtobumi

Tergugat: Jasa Marga

Turut: Menteri

Tergugat: Pekerjaan Umum

Pokok Perkara

Tirtobumi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Jasa Marga atas dasar Jasa Marga tidak melaksanakan Putusan BANI.

Status Perkara

Perkara di tingkat Banding telah diputus tanggal 15 Juli 2013. Inti putusannya mengabulkan permohonan banding Jasa Marga dan Menteri Pekerjaan Umum. Salinan resmi putusan Banding telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Desember 2013.

Upaya Manajemen

Penggugat telah mengajukan kasasi dan sedang menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Nilai Gugatan

Rp 1.247.576.000.000

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan

Tidak berpengaruh.

KASUS PELEBARAN JALAN TOL RUAS CIKAMPEK-CIBITUNG (BTS 1)

Perkara No.: 240 K/Pdt/2012

Lembaga: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Pihak

Dalam Konpensi

Penggugat: Jasa Marga

Tergugat: Bangun Tjipta Sarana (BTS)

Dalam Gugatan Balik

Penggugat: Bangun Tjipta Sarana (BTS)

Tergugat: Jasa Marga

Pokok Perkara

Gugatan Jasa Marga terhadap BTS terkait dengan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cikampek-Cibitung No. 109 tanggal 16 Oktober 1992.

Status Perkara

Perkara di tingkat Kasasi telah diputus tanggal 24 Juli 2012. Inti putusannya adalah permohonan Kasasi Jasa Marga dan BTS tidak dikabulkan.

Upaya Manajemen

Jasa Marga telah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan berkas perkara Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 21 Januari 2014. Saat ini masih proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim di tingkat Peninjauan Kembali.

Nilai Gugatan

- Tuntutan Jasa Marga Rp 583.053.000.000
- Tuntutan BTS (dalam rekonpensi) Rp 11.215.290.000.000

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan

Tidak berpengaruh.

KASUS PT MITRA JUJUR INDONESIA

Perkara No.: 252/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM

Lembaga: Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Para Pihak

Penggugat: PT Mitra Jujur Indonesia

Tergugat I: Jasa Marga

Tergugat II: PT Purnajasa Bimaprata

Turut Tergugat: PT Bank Sumut Cabang Khusus Jakarta

Pokok Perkara

Keberatan atas pemutusan Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Renovasi Gerbang Tol Tomang pada Jalan Tol Cawang-Tomang-Cengkareng.

Status Perkara

Perkara di tingkat Pengadilan Negeri telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 08 April 2015. Inti putusannya adalah gugatan PT Mitra Jujur Indonesia ditolak. Atas putusan tersebut, PT Mitra Jujur Indonesia mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Upaya Manajemen

Jasa Marga telah mengajukan Kontra Memori Banding. Saat ini sedang dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Nilai Gugatan

Rp 13.200.000.000

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan

Tidak berpengaruh.

Kasus Hubungan Industrial

Kasus Lain-Lain

KASUS THAMRIN TANJUNG

Perkara No.: 94/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim

Lembaga: Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Para Pihak

Penggugat 1: Ir. Thamrin Tanjung

Tergugat I: Kejaksaan Agung RI

Tergugat II: Pemerintah RI Cq. Kementerian Pekerjaan Umum

Tergugat III: Jasa Marga

Turut Tergugat I: PT Marga Nurindo Bhakti

Turut Tergugat II: PT Utama Karya

Turut Tergugat III: PT Yala Perkasa

Turut Tergugat IV: Konsorsium Utama Yala

Pokok Perkara

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Thamrin Tanjung kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Menteri Pekerjaan Umum dan Jasa Marga terkait eksekusi Jalan Tol JORR S berdasarkan Putusan No. 720 K/Pid/2001.

Status Perkara

Perkara di tingkat Pengadilan Negeri telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 April 2015. Inti putusannya adalah gugatan Thamrin Tanjung ditolak. Atas putusan tersebut, Thamrin Tanjung mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Upaya Manajemen

Saat ini Jasa Marga telah menunjuk Konsultan Hukum untuk menangani Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Nilai Gugatan

Rp 20.975.000.000.

Pengaruh Perkara terhadap Perseroan

Tidak berpengaruh.

Perkara di Anak Perusahaan

Sepanjang tahun 2015, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh Anak Perusahaan maupun terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan.

PERKARA DI ANAK PERUSAHAAN PER 31 DESEMBER 2015

No.	Nama Anak Perusahaan	Ada/Tidak ada Perkara	Nilai Gugatan
1	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road)	Tidak Ada	Tidak Ada
2	PT Marga Lingkar Jakarta (Jalan Tol JORR W2 Utara)	Tidak Ada	Tidak Ada
3	PT Marga Sarana Jabar (Jalan Tol Bogor Outer Ring Road)	Tidak Ada	Tidak Ada
4	PT Marga Kunciran Cengkareng (Jalan Tol Cengkareng-Kunciran)	Tidak Ada	Tidak Ada
5	PT Marga Trans Nusantara (Jalan Tol Kunciran-Serpong)	Tidak Ada	Tidak Ada
6	PT Marga Trans Jateng (Jalan Tol Semarang-Solo)	Tidak Ada	Tidak Ada
7	PT Marga Nujyasumo Agung (Jalan Tol Surabaya-Mojokerto)	Tidak Ada	Tidak Ada
8	PT Trans Marga Jatim Pasuruan (Jalan Tol Gempol-Pasuruan)	Tidak Ada	Tidak Ada
9	PT Jasamarga Bali Tol (Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa)	Gugatan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, pada tanggal 1 Desember 2015.	Materiil : Rp 64.576.067.774 Immateriil : Rp 30.000.000.000
10	PT Marga Bumi Adhika Raya (Jalan Tol Gempol-Pandaan)	Tidak Ada	Tidak Ada
11	PT Jasa Marga Kualanamu Tol (Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi)	Tidak Ada	Tidak Ada
12	PT Solo Ngawi Jaya (Jalan Tol Solo-Ngawi)	Tidak Ada	Tidak Ada
13	PT Ngawi Kertosono Jaya (Jalan Tol Ngawi-Kertosono)	Tidak Ada	Tidak Ada
14	PT Cinere Serpong Jaya (Jalan Tol Cinere-Serpong)	Tidak Ada	Tidak Ada
15	PT Jasa Layanan Pemeliharaan (Jasa Konstruksi, Pemeliharaan Jalan Tol, Persewaan Kendaraan Tol)	Tidak Ada	Tidak Ada
16	PT Jasamarga Properti (Pembangunan, Perdagangan dan Jasa Terkait Properti)	Tidak Ada	Tidak Ada
17	PT Jasa Layanan Operasi (Layanan Operasi Jalan Tol)	Tidak Ada	Tidak Ada

Perkara yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2015, tidak ada perkara yang dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Informasi tentang Sanksi Administratif

Pada tahun 2015, Jasa Marga menerima sanksi berupa denda sebesar Rp 750.000 atas keterlambatan pembayaran biaya tahunan tahap II ke Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2015, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan oleh Otoritas Pasar Modal ataupun otoritas lainnya kepada Jasa Marga, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan.

KEPATUHAN JASA MARGA TERHADAP PERATURAN OJK

Aspek Kepatuhan	Bentuk Kepatuhan
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	Penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2015 sesuai dengan Peraturan OJK.
Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik	Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dan menyesuaikan dengan Peraturan OJK.
Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik	Perseroan telah memiliki Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko.
Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik	Perseroan telah memiliki Corporate Secretary.
Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015	Perseroan telah mengungkapkan dan memenuhi semua rekomendasi atas pedoman tata kelola perusahaan terbuka berdasarkan Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK, kecuali dalam hal terkait <i>self-assessment</i> Dewan Komisaris dan Direksi, serta kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Pada rekomendasi yang belum terpenuhi, telah ditetapkan rencana tindak lanjut dengan target penyelesaian tahun 2016 dan implementasi tahun 2017.
Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Perseroan melaporkan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham dan Obligasi ke OJK dan BEI tepat waktu.
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Butir V	Penyelenggaraan Public Expose Perseroan pada tahun 2015 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Ketentuan III.3.4 dan III.3.5	Perseroan melaporkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek ke BEI dan OJK tepat waktu.
<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-346/BL/2011 Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Ketentuan III.1.6.3 	Publikasi Laporan Keuangan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.
<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-431/BL/2012 Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Ketentuan III.2 	Publikasi Laporan Tahunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

Kode Etik

Etika dan budaya merupakan landasan penerapan GCG di Jasa Marga, mengingat bahwa organisasi tidak lain adalah terdiri dari orang-orang di dalamnya. Dalam mengelola GCG, maka penerapan GCG tidak dapat dipisahkan dari menjalankan bisnis yang beretika dan membentuk kesadaran Perseroan dan karyawan yang memiliki kepekaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar tidak terjadi benturan kepentingan dan benturan kepada peraturan perundangan yang ada.

Dalam pengembangan GCG, Jasa Marga telah merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut etika perusahaan. Jasa Marga mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan Visi, Misi, dan budaya yang dimiliki melalui implementasi Etika Usaha dan Etika Kerja.

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis dalam setiap aktivitas bisnis Perseroan sebagaimana tercantum dalam Etika Usaha dan Etika Kerja.

Pedoman Perilaku

Perseroan telah mempunyai Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) sejak tahun 2005 berdasarkan Keputusan Direksi No. 77/KPTS/2005. Pedoman Perilaku tersebut disusun untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik dan benar sehingga diperlukan suatu pedoman yang bertujuan untuk membentuk dan mengatur kesesuaian tingkah laku sehingga mencapai penerapan GCG yang konsisten sebagai budaya Perseroan yang memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga tercapainya Visi dan Misi Perseroan.

Dengan semangat perubahan, telah dilakukan revisi terhadap buku Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Jasa Marga yang merupakan bagian dari implementasi GCG yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam melaksanakan tugas bagi seluruh jajaran Manajemen dan Insan Jasa Marga, melalui Keputusan Direksi No. 175/KPTS/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan acuan bagi seluruh Insan Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan dalam bekerja dan berinteraksi dengan segenap *stakeholders* Perseroan. Dengan nilai-nilai pokok Perseroan dan melaksanakan Pedoman Perilaku Perseroan

secara konsisten seluruh Insan Jasa Marga, dimanapun ia berada dan bekerja senantiasa mendukung terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang pada akhirnya akan meningkatkan citra perusahaan (*corporate image*) bagi seluruh *stakeholders*-nya.

Pokok-pokok Kode Etik

Pedoman perilaku Perseroan mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan Jasa Marga.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) adalah:

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Perseroan menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat, dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh *Stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perseroan dan Pelanggan serta Mitra Kerja sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Perseroan menjamin kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan pertanggungjawaban Jajaran Perseroan yang memungkinkan pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ kerja Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/ atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perseroan kepadanya.

3. **Bertanggung Jawab (*Responsibility*)**

Perseroan menjamin kesesuaian dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.

4. **Kemandirian (*Independency*)**

Perseroan menjamin pengelolaan Perseroan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (Fairness)

Perseroan menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak Stakeholders berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Perilaku tersebut disusun untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan yang baik dan benar sehingga diperlukan suatu pedoman yang bertujuan untuk membentuk dan mengatur kesesuaian tingkah laku sehingga mencapai penerapan GCG yang konsisten sebagai budaya Perseroan yang memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga tercapainya Visi dan Misi Perseroan.

Isi dan Keberlakuan Pedoman Perilaku

Pedoman perilaku Perseroan mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan Jasa Marga.

Pedoman Perilaku berisi hal-hal sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*
- Bab III Etika Bisnis Perusahaan
- Bab IV Etika/Tuntutan Perilaku Insan Jasa Marga
- Bab V Penegakan dan Pelaporan

Sesuai dengan ketentuan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah disahkan melalui Keputusan Direksi No. 175/KPTS/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct), Pedoman Perilaku berlaku bagi seluruh Insan Jasa Marga, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Vice President/General Manager, Manager/Deputy General Manager, dan Staf.



SOSIALISASI DAN UPAYA PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

Pedoman Perilaku diungkapkan dan/atau disebarikan kepada semua insan Perseroan melalui berbagai media yang dimiliki Perseroan, termasuk melalui teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua pegawai dengan mudah setiap saat. Secara periodik, kepada segenap insan Perseroan disampaikan melalui media Memo dan/atau Surat Edaran dari Direksi tentang pelaksanaan etika bisnis.

Media Sosialisasi Penyebaran Pedoman Perilaku antara lain melalui:

- Website
- Buku saku
- Spanduk
- Banner
- Buletin
- Pernyataan Komitmen yang ditandatangani bersama, diperbanyak dan dibingkai serta didistribusikan ke seluruh Unit Kerja dan Cabang
- Jingle
- Iklan di koran

Untuk mewujudkan perilaku Insan Jasa Marga yang berlandaskan etika bisnis, terdapat sejumlah inisiatif strategis yang dilakukan, antara lain melalui:

1. Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap langkah Perseroan, yang tertuang dalam Pakta Integritas yang diperbaharui setiap awal tahun.
2. Keteladanan Pimpinan dengan memberi contoh sikap dan perilaku yang tidak bertentangan dengan kebijakan dan peraturan Perseroan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pada tahun 2015, upaya penegakan Pedoman Perilaku dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

1. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Insan Perseroan yang diperbaharui setiap tahun.
2. Sosialisasi melalui media internal perusahaan (Berita Jalan Tol dan Info Tol).
3. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan tingkat AVP pada tahun 2015.

- | | |
|---|---|
| 4. Pelaporan Gratifikasi kepada KPK dan kerja sama program. | 6. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Jasa Marga di Departemen Compliance seksi GCG. |
| 5. Pelaporan Gratifikasi kepada KPK dan kerja sama Program Pengendalian Gratifikasi dengan KPK. | 7. Iklan larangan Gratifikasi di media massa dan website. |

Upaya penegakan Pedoman Perilaku dalam hubungan dengan *stakeholders* Perseroan sebagai berikut:

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Transparansi (<i>Transparency</i>), Akuntabilitas (<i>Accountability</i>), Bertanggung Jawab (<i>Responsibility</i>), Kemandirian (<i>Independency</i>), Kewajaran (<i>Fairness</i>).
PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
Berdasarkan Keputusan Direksi No. 175/KPTS/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>).
ETIKA
Nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

ETIKA BISNIS	ETIKA KERJA/TUNTUTAN PERILAKU INSAN JASA MARGA
<p>Cara-cara baik untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, Perseroan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun Perseroan di masyarakat.</p>	<p>Sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap Pimpinan dan Karyawan dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan antar Karyawan dan Perseroan.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan. 2. Penanganan Gratifikasi. 3. Kepedulian Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 4. Pemberian Kesempatan yang Sama kepada Karyawan untuk Mendapatkan Pekerjaan, Promosi dan Pemberhentian Kerja. 5. Standar Etika dalam Berhubungan dengan <i>Stakeholders</i>: <ol style="list-style-type: none"> a. Hubungan dengan Insan Jasa Marga. b. Hubungan dengan Pemerintah. c. Hubungan dengan Pemegang Saham. d. Hubungan dengan Pengguna Jalan Tol dan Pelanggan Lainnya. e. Hubungan dengan Mitra Usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Insan Jasa Marga. 2. Menjaga Nama Baik Perseroan. 3. Menjaga Hubungan Baik antar Insan Jasa Marga. 4. Menjaga Kerahasiaan Perusahaan. 5. Menjaga dan Menggunakan Aset Perseroan. 6. Menjaga Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja. 7. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok. 8. Melakukan Pencatatan Data Perusahaan dan Penyusunan Laporan. 9. Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan Pribadi (<i>Insider Trading</i>). 10. Penanganan Gratifikasi. 11. Tidak Memanfaatkan Posisi untuk Kepentingan Pribadi (Benturan Kepentingan). 12. Aktivitas Politik.
<ol style="list-style-type: none"> f. Hubungan dengan Pesaing. g. Hubungan dengan Kreditur/Investor. h. Hubungan dengan Pemasok/Kontraktor. i. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar. j. Hubungan dengan Media Massa. k. Hubungan dengan Anak Perusahaan. 6. Standar Etika Jajaran Manajemen dan Karyawan: <ol style="list-style-type: none"> a. Perilaku Sebagai Atasan terhadap Bawahan. b. Perilaku Sebagai Bawahan terhadap Atasan. c. Perilaku Sebagai Rekan Kerja. 7. Hak Atas Kekayaan Intelektual (<i>Intellectual Property Rights</i>). 	

Setiap Insan Jasa Marga telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen penerapan GCG dalam operasional Perseroan. Persentase penandatanganan komitmen *code of conduct* oleh Insan Jasa Marga adalah sebanyak 100%.

SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

Setiap Insan Jasa Marga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

- Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.

TINGKAT HUKUMAN DAN SANKSI

Tingkat Hukuman	Jenis Sanksi
Hukuman Displin Ringan	Surat Peringatan Pertama
Hukuman Displin Sedang	• Surat Peringatan Kedua • Surat Peringatan Ketiga
Hukuman Displin Berat	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

- Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.
- Sanksi bagi mitra kerja atau stakeholders lain yang melakukan pelanggaran adalah sesuai ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Selama tahun 2015, tidak ada pelanggaran Kode Etik dan pengenaan sanksi atas pelanggaran Kode Etik di Perseroan.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen

Program MSOP/ESOP Jasa Marga

Di Jasa Marga tidak terdapat program MSOP/ESOP, namun Perseroan memiliki Program Penjatahan Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation – ESA*). Tujuan utama program ini adalah agar karyawan memiliki *sense of belonging* yang dapat memacu produktifitas kerja, sehingga berdampak pada kinerja korporasi secara keseluruhan dan bermuara pada peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh para *stakeholder*.

Program ESA terdiri dari:

1. Saham Bonus
Komisaris (selain Komisaris Independen), Direksi dan seluruh karyawan tetap Jasa Marga yang memenuhi kriteria tertentu menerima Saham Bonus pada saat Penawaran Umum Perdana sebesar ekuivalen dengan satu bulan gaji bulan Juni 2007. Jasa Marga mengantisipasi untuk memberikan sekitar 11.862.000 saham di dalam skema Saham Bonus yang diberikan kepada Komisaris non Independen, Direksi dan karyawan masing-masing sebesar 1,7% dan 98,3%. Saham Bonus tersebut tidak dapat dijual maupun dipindahtangankan selama tiga tahun (*periode lock up*).
2. Saham Jatah Pasti
Selain pemberian Saham Bonus, peserta diberikan kesempatan untuk membeli Saham Jatah Pasti pada saat Penawaran Umum Perdana. Jumlah Saham Jatah Pasti adalah sekitar 192.138.000 saham. Untuk pemesanan Saham Jatah Pasti dilakukan penjatahan secara proporsional berdasarkan gaji bulanan karyawan dan dilakukan beberapa pembatasan tertentu.

Jumlah Saham ESA

Sesuai RUPSLB pada tanggal 12 September 2007, pemegang saham menyetujui rencana Program Penjatahan Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation – ESA*), mengacu pada peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 yang memberikan kesempatan bagi karyawan, manajemen dan pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan yang diterbitkan Perseroan, untuk memiliki maksimum 10% dari saham yang ditawarkan kepada publik (atau sebanyak 204.000.000 lembar).

Jangka Waktu ESA

Sesuai dengan ketentuan, salah satu program ESA, yaitu Saham Bonus tidak dapat dijual maupun dipindahtangankan selama 3 (tiga) tahun (*periode lock up*).

Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen yang Berhak

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 182.1/KPTS/2007 tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dalam Proses Privatisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., peserta program ESA adalah Karyawan Tetap, Direksi, Dewan Komisaris yang bukan Komisaris Independen, Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan, dan Staf Sekretaris Direksi Perseroan yang tercatat dalam Administrasi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2007.

Harga Exercise

Karena merupakan Program ESA, maka tidak ada harga exercise. Harga saham pada saat IPO adalah sebesar Rp 1.700 per lembar saham.

Kepemilikan Saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan sampai dengan 31 Desember 2015 dapat dilihat pada bagian Profil Jasa Marga.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyimpangan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Jasa Marga dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan.

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk terus menyempurnakan implementasi GCG, pelanggaran terhadap implementasi GCG dan *Code of Conduct* harus dihindari oleh segenap Insan Jasa Marga. Terkait dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki *Whistleblowing System* sebagai media penyampaian pelaporan pelanggaran terhadap implementasi GCG dan *Code of Conduct* Perseroan.

Perseroan telah menyediakan sarana *whistleblowing system* JASA MARGA AMANAH yang dapat digunakan oleh seluruh Insan Jasa Marga maupun pihak eksternal sejak tanggal 16 Januari 2013. Pengelolaan *whistleblowing system* Perseroan dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Direksi No. 09/KPTS/2013 tanggal 13 Januari 2013 tentang *Whistleblowing System* PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan Keputusan Direksi No. 10/KPTS/2013 tanggal 13 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Setiap laporan yang masuk akan dipelajari, diklasifikasikan dan ditindaklanjuti melalui penyelidikan mendalam berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Keputusan terhadap terbukti/tidaknya pelaporan tersebut akan dibuat dan diambil berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan dan motif tindakan.

Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran lisan, surat peringatan (I, II, III), hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Perseroan tidak akan mentolerir setiap pelanggaran terkait dengan integritas.

Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) merupakan suatu mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran yang dilakukan secara rahasia yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan Perseroan. Pelaporan ditujukan melalui suatu mekanisme baku dan dikelola secara profesional oleh Komisi Pelaporan Pelanggaran yang dibantu oleh Pengelola Administrasi Sistem Pelaporan Pelanggaran yaitu PT Deloitte Konsultan Indonesia yang terpilih melalui proses pengadaan barang/jasa di Perseroan.

KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

No.	Susunan Anggota	Kedudukan dalam Tim
1	Head of Internal Audit	Ketua Merangkap Anggota
2	Corporate Secretary	Sekretaris Merangkap Anggota
3	VP Legal	Anggota
4	GM Human Capital Services	Anggota
5	VP Risk and Quality Management	Anggota

Landasan Penyusunan *Whistleblowing System*

1. Keinginan Perseroan untuk terus menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di seluruh lingkungan Perseroan, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi.
2. Sebagai komitmen Perseroan untuk menyediakan media bagi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab.
3. Sebagai salah satu alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di Perseroan.

Maksud, Tujuan dan Manfaat *Whistleblowing System*

Maksud, Tujuan dan Manfaat penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) di Perseroan adalah:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*).
3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
4. Timbulnya keengganannya untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak).

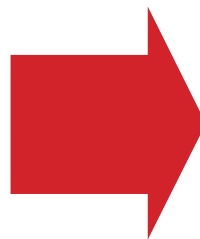
Sosialisasi *Whistleblowing System*

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) di internal Perseroan disampaikan melalui berbagai media seperti buletin internal, poster, sosialisasi etika maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait. Untuk eksternal, sosialisasi dilakukan melalui *website* Perseroan dan pengiriman surat edaran/memo.

PENINGKATAN PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

2014

1. Penerapan *Whistleblowing System* sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku
2. Sosialisasi *Whistleblowing System* melalui cetak buku saku *Whistleblowing System* dan media internal Perseroan
3. Evaluasi penerapan *Whistleblowing System* di Perseroan



2015

1. Penerapan *Whistleblowing System* sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku
2. Sosialisasi *Whistleblowing System* melalui cetak buku saku *Whistleblowing System* dan media internal Perseroan
3. Evaluasi penerapan *Whistleblowing System* di Perseroan
4. Penyusunan program tindak lanjut *Whistleblowing System* untuk tahun 2016 oleh Tim Pengelolaam *Whistleblowing System*

Ruang Lingkup *Whistleblowing System*

Ruang Lingkup Pelaporan Pelanggaran yang akan ditindaklanjuti oleh *Whistleblowing System* adalah tindakan yang dapat merugikan Perseroan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perseroan
3. Pemasaran
4. Perbuatan curang
5. Benturan Kepentingan
6. Gratifikasi

Sarana Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

Pelapor menyampaikan laporan dalam bentuk surat dengan disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Laporan ini disampaikan melalui salah satu di antara cara berikut:

SARANA PELAPORAN PELANGGARAN

-  +62 21 23 50 7022
-  0811 1255 550
-  +62 21 2350 7023
-  <http://jasamarga.tipoffs.asia>
-  jasamarga@tipoffs.asia
-  P.O Box 2332, JKP 10023

Khusus untuk Pelaporan melalui sarana telepon dan sms, maka waktu Pelaporan secara live adalah pukul 07.00 WIB s.d. 21.00 WIB.

Pelaporan yang masuk di luar waktu tersebut, akan dialihkan ke voice mail.

Mekanisme Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Mekanisme penerimaan pelaporan pelanggaran dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

MEKANISME PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN



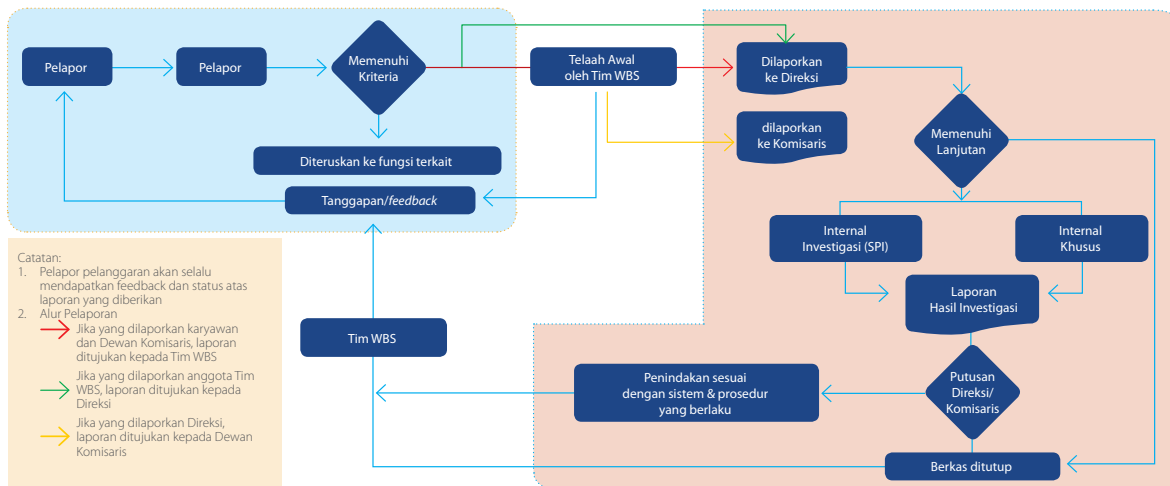
Alur Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran

Jika dokumen dan bukti-bukti yang disampaikan lengkap, Komisi Pelaporan Pelanggaran melakukan pemilahan data dan memutuskan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyelidikan. Jika keputusannya adalah cukup bukti, maka laporan tersebut akan ditingkatkan statusnya ke tahap penyelidikan.

Laporan yang tidak terbukti akan dikembalikan kepada pelapor. Namun apabila terbukti, Komisi Pelaporan Pelanggaran akan melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Direksi. Laporan yang berkaitan dengan jajaran manajemen di bawah Direksi disampaikan dalam bentuk surat dan ditujukan kepada Direktur Utama, sedangkan laporan-laporan yang berkaitan dengan Direksi akan ditujukan kepada Dewan Komisaris.

Alur proses Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

ALUR PROSES SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN



Perlindungan Terhadap Pelapor

Perseroan menyediakan fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email) yang independen, bebas, dan rahasia bagi pelapor, agar terlaksana proses pelaporan yang aman. Selain itu, WBS juga menjaga kerahasiaan identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pelapor dan anggota keluarga atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Informasi pelaksanaan tindak lanjut laporan akan disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang identitasnya lengkap.

Implementasi Whistleblowing System Tahun 2015

Selama tahun 2015, pelaporan pelanggaran yang masuk adalah sebanyak 21 laporan. Laporan yang telah ditindaklanjuti sampai dengan proses akhir (selesai) sebanyak 17 laporan, sedangkan sisanya yaitu 4 laporan masih dalam proses penyelidikan.

JUMLAH PELAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2015

Kategori Laporan Pengaduan	Jumlah
Perbuatan Curang	12
Pemerasan	4
Penyimpangan dari Peraturan	3
Penyalahgunaan Jabatan	1
Gratifikasi	1
Total	21

Konsistensi Penerapan GCG

Perlakuan yang Sama Terhadap Seluruh Pemegang Saham

Jasa Marga menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Jasa Marga juga memberikan perlakuan yang adil terhadap saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek *insider trading* dan *self-dealing*, dan mengharuskan Dewan Komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Di samping itu Jasa Marga mengakui hak-hak *stakeholders*, seperti ditentukan dalam Undang Undang, dan mendorong kerja sama yang aktif antara Perseroan dengan para *stakeholders* tersebut.

Jasa Marga menjamin bahwa dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, Pemegang Saham berhak memperoleh perlakuan yang sama dan kedudukan yang seimbang dalam menyuarakan pendapatnya dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang penting dan strategis sesuai dengan jumlah dan jenis saham yang dimiliki, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan assessment GCG tahun 2015 (self-assessment), pada aspek Pemegang Saham dan RUPS, Perseroan memperoleh nilai sebesar 8,611 dengan tingkat pemenuhan 95,68%.

Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan Perseroan dalam menerapkan Pengadaan Barang dan Jasa tertuang dalam Keputusan Direksi No. 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan. Kebijakan ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya No. 15/KPTS/2013 dan turunannya yang mengatur pengguna barang dan jasa, pengelola pengadaan barang dan jasa, pengelola kontrak pengadaan barang dan jasa, pengelola penyedia barang dan jasa, pengelola material, tim pengadaan, dan pejabat berwenang serta penyedia barang dan jasa sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta peran para pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kebijakan ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur dasar penunjukan langsung oleh Perseroan kepada Anak Perusahaan serta peningkatan batas wewenang pemberian persetujuan ijin prinsip, khususnya kepada General Manager Cabang untuk pengadaan jasa pemborongan, yang semula sampai dengan Rp 25 miliar menjadi sampai dengan Rp 75 miliar, dan peningkatan nilai pengadaan barang/jasa dengan Pemilihan Langsung yang semula nilai di atas Rp100 juta sampai dengan Rp 500 juta menjadi di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 700 juta. Perubahan kebijakan ini dibuat dengan pertimbangan adanya perubahan terhadap struktur organisasi di tahun 2014 maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kembali atas konsep keputusan Direksi tentang pengadaan barang dan jasa. Dalam perubahan aturan Direksi ini, Perseroan juga telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Dengan diterbitkan SK direksi ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam berbagai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang demi mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, kompetitif, transparan adil dan wajar serta akuntabel.

Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa adalah untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan Perseroan dengan mempertimbangkan kualitas dan *delivery time* dari sumber yang tepat dengan total biaya terendah dan dilakukan melalui strategi, perencanaan, proses dan pengendalian pengadaan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Untuk mencapai sasaran utama Pengelolaan Rantai Pasokan yaitu menjamin terlaksananya kegiatan usaha serta penciptaan nilai tambah (*value creation*) dan peningkatan daya saing Perseroan, Perseroan mempunyai kebijakan manajemen sebagai berikut:

- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Penyedia Barang dan Jasa

Kebijakan pengadaan barang dan jasa di Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya No. PER-15/MBU/2012 yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan dana selain dana dari APBN/APBD.

ETIKA PERSEROAN DALAM PENYEDIAAN BARANG DAN JASA

Perseroan melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip kompetitif, transparan, adil, wajar dan akuntabel. Perilaku etis yang diharapkan dalam berhubungan dengan penyedia barang dan jasa antara lain:

- Penentuan penyedia barang dan jasa harus didasarkan pada mutu produk, layanan purna jual, garansi, prestasi dan rekam jejak dengan mengutamakan kepentingan Perseroan.
- Menghormati hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian perikatan dan ketentuan perundang-undangan.
- Menjalin komunikasi yang terbuka selama proses pelaksanaan pengadaa hingga terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.
- Melakukan evaluasi atas penyedia barang dan jasa serta memberikan tindakan tegas kepada penyedia barang dan jasa yang berperilaku tidak etis.

PENERAPAN E-PROCUREMENT

Untuk mencegah timbulnya praktik KKN, selain perlu perbaikan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan akuntabel, perlu pula dicari alternatif lain yang memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), terutama prinsip keterbukaan (*transparency*) serta prinsip keadilan (*fairness*).

Di dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Negara BUMN telah merilis Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Peraturan tersebut secara eksplisit menjelaskan Tata Kelola Teknologi Informasi. Dengan adanya peraturan tersebut, BUMN diwajibkan untuk menerapkan prinsip

Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam aspek bisnis dan pengelolaan perusahaan pada semua jajaran perusahaan dengan dukungan IT.

Sebagai wujud komitmen penerapan GCG dan Pakta integritas, Jasa Marga terus konsisten hingga saat ini untuk mengelola proses pengadaan dan kemitraan dengan menggunakan sistem e-Tendering melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/*e-Procurement* yang meminimalkan kontak fisik antara pemasok/mitra dengan panitia karena keseluruhan proses tender dan negosiasi telah berbasis komputer sehingga berlangsung adil dan transparan.

e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/ internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Sesuai Keputusan Direksi No. 149/KPTS/DIR/2013 tanggal 30 Agustus 2013, melalui Divisi General Affairs dibuat LPSE dengan bantuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pengadaan secara elektronik (*e-Procurement*) bagi Perseroan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dengan harga dan biaya transaksi lebih murah, dan siklus pengadaan yang lebih pendek. Dengan demikian menghindari proses korupsi, serta meningkatkan produktivitas kerja.

Beberapa manfaat yang telah diperoleh antara lain kecepatan proses tender, penetapan calon peserta tender secara elektronik sesuai persyaratan yang ditentukan, pemilihan pemenang secara elektronik dan manfaat lainnya terkait dengan kualitas proses yang semakin baik, kewajaran harga, keadilan, transparansi dan mencegah terjadinya intervensi.

PAKTA INTEGRITAS MITRA KERJA

Sebagai bentuk komitmen penerapan GCG dalam pengadaan barang dan jasa, Perseroan mewajibkan vendor dan mitra kerja untuk menandatangani Pakta Integritas dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa.

PAKTA INTEGRITAS INSAN JASA MARGA

Dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, Perseroan juga mewajibkan Insan Jasa Marga untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk tidak adanya benturan kepentingan dan sebagai wujud transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Jasa Marga berkomitmen untuk senantiasa menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dengan kualitas dan standar yang tinggi. Untuk mendukung penerapan GCG dalam kaitannya dengan teknologi informasi, Perseroan menyadari perlunya penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi (*IT Governance*) ke dalam proses bisnis Perseroan. Saat ini kedudukan Teknologi Informasi di Perseroan adalah sebagai pendukung untuk mencapai efisiensi dan efektivitas proses bisnis.

KEBIJAKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/2013 mengenai Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi (TI), maka Jasa Marga telah menetapkan Kebijakan Tata Kelola TI sebagai panduan dalam implementasi Tata Kelola TI yang menyeluruh dan untuk mengoptimalkan kontribusi TI dalam pencapaian Sasaran Jangka Panjang Perusahaan. Selain Peraturan Menteri BUMN, kebijakan Tata Kelola TI mengacu pada standar internasional ISO 38500 dan COBIT yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

BAGAN KEBIJAKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI



Dengan disahkannya berbagai Kebijakan Tata Kelola TI, maka Direksi telah melaksanakan amanat Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Direksi dapat menetapkan Tata Kelola Teknologi Informasi yang efektif".

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Prinsip-prinsip Tata Kelola TI Perusahaan pada Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi adalah:

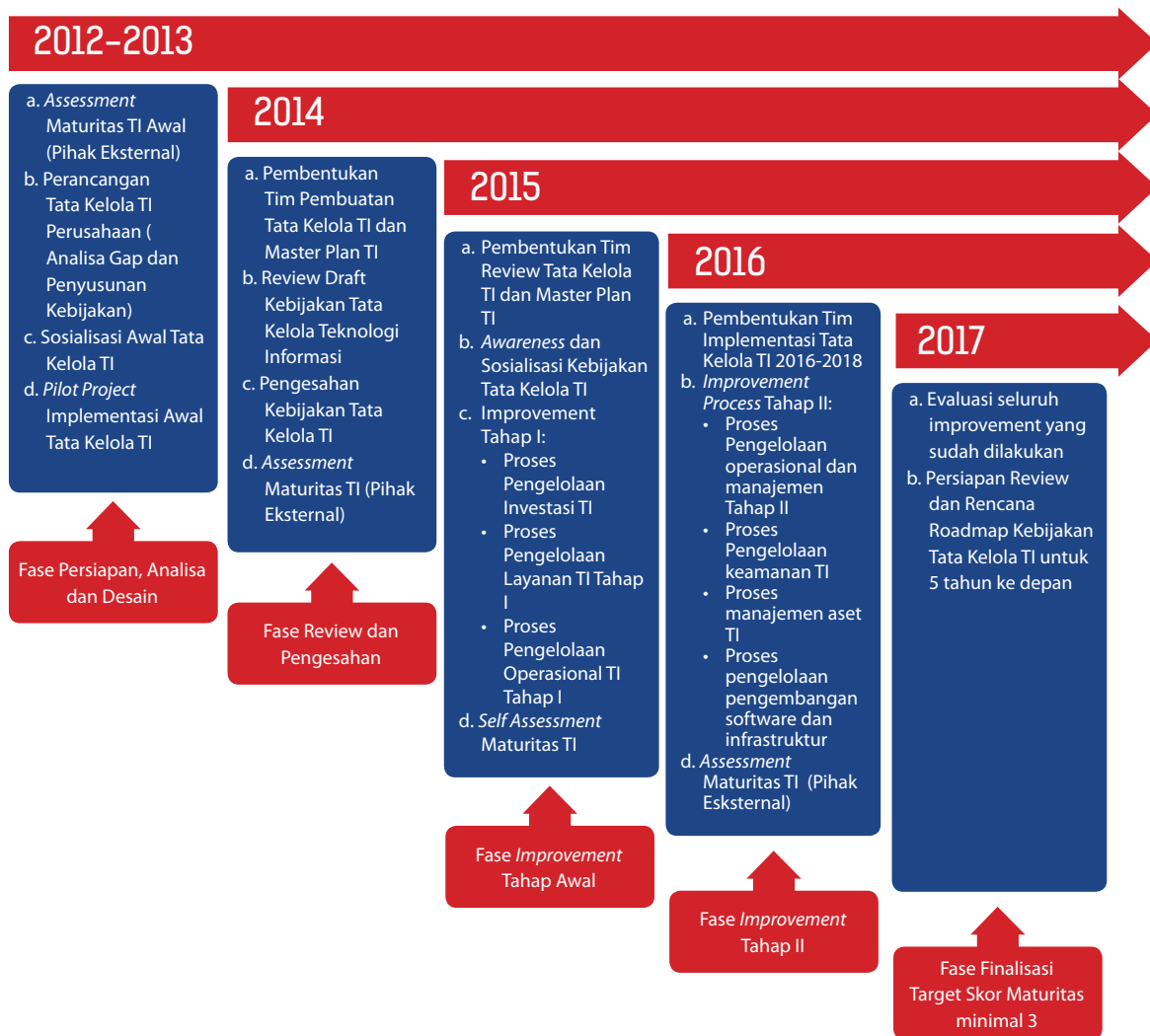
1. Perencanaan TI yang terarah dan sistematis sehingga terjadi kesesuaian antara pengembangan dan implementasi TI dengan Tujuan Bisnis Perusahaan;
2. Investasi TI sejalan dan selaras dengan strategi Perusahaan dengan memperhitungkan kapabilitas TI sehingga memberikan keuntungan optimal;
3. Implementasi TI yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan mutu dan risiko sesuai peraturan Perusahaan;
4. Pengelolaan operasional TI yang efektif dan efisien;
5. Pengendalian yang konsisten terhadap kinerja operasional Teknologi Informasi dan kepatuhan terkait peraturan dan perundangan yang berlaku.
6. Perbaikan berkelanjutan terhadap seluruh dimensi pengelolaan TI.

Prinsip-prinsip tersebut akan diterapkan lebih lanjut ke aktivitas pengelolaan TI serta pelaksanaan roadmap pengembangan TI sesuai Master Plan TI melalui berbagai Pedoman dan Standar yang dituangkan dalam KPTS VP IT dengan pengawasan Komite Pengarah TI.

ROADMAP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Target yang ingin dicapai oleh Perseroan dari penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi adalah proses perbaikan berkelanjutan terhadap pengelolaan TI dilihat dari 4 siklus utama proses TI yaitu Perencanaan, Pengembangan atau Akuisisi, Pengoperasian serta Pemantauan dan Evaluasi. Indikator dari keberhasilan penerapan Tata Kelola TI adalah Skor Maturitas TI, dimana pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/2013 dipersyaratkan target Skor Maturitas TI dalam 5 tahun ke depan adalah minimal 3.

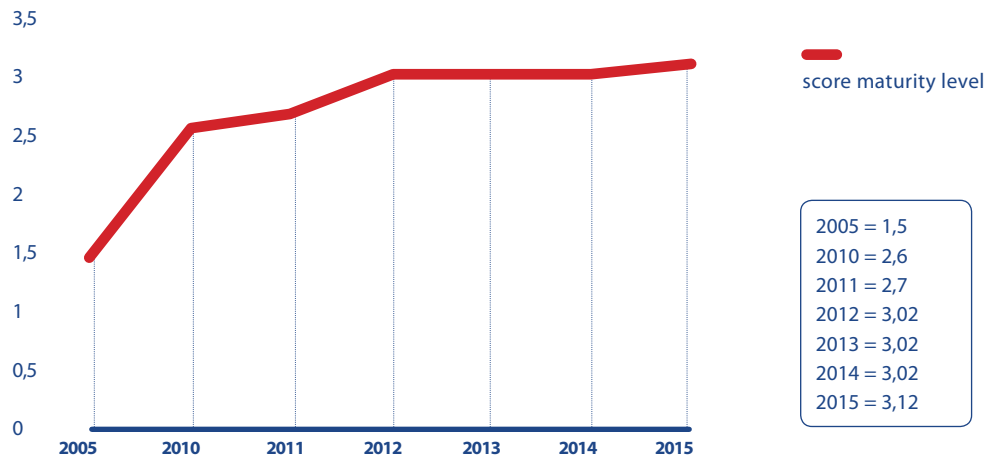
BAGAN ROADMAP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI



ASSESSMENT MATURITY LEVEL TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Pengukuran Maturity Level Tata Kelola TI merupakan mekanisme untuk mengukur tingkat penerapan Tata Kelola TI dengan keluaran berupa indeks maturitas TI dengan rentang level dari 0 (non eksis) – 5 (optimal) yang menunjukkan kualitas pelaksanaan dari masing-masing pengendalian di dalam organisasi Perusahaan. Pada pengukuran akhir 2015 dengan metode *self-assessment* Jasa Marga telah mencapai nilai 3,12 (meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 3,02).

NILAI INFORMATION TECHNOLOGY MATURITY LEVEL



MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sesuai dengan KPTS No. 209/KPTS/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Master Plan TI Tahun 2014-2018 disebutkan bahwa Master Plan TI dijadikan panduan bagi Perusahaan dalam melakukan investasi dan implementasi di bidang TI yang meliputi kebutuhan arsitektur, infrastruktur, dan aplikasi yang dibutuhkan agar sesuai dengan Sasaran Jangka Panjang Perusahaan. Master Plan TI ini disusun berdasarkan Panduan Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi BUMN yang ada pada PERMEN BUMN No. PER-02/MBU/2013. Berikut diberikan program yang dibagi berdasarkan strategi bisnis perusahaan.

TABEL PROGRAM KERJA MASTER PLAN TI JASA MARGA 2014-2018

Bidang	Program Kerja
Strategi Pengembangan Bisnis Jalan Tol (<i>Growth</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja. 2. Implementasi ERP Modul Keuangan di Anak Perusahaan.
Strategi Pengoperasian Jalan Tol (<i>Operational Excellent</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi <i>Asset Management</i>. 2. Integrasi aplikasi <i>Toll Maintenance</i> dengan ERP. 3. Integrasi <i>Toll Collection System</i> dengan ERP. 4. Peningkatan sistem <i>Customer Service</i>. 5. Peningkatan sistem <i>Call Center</i>. 6. Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja. 7. Peningkatan pelayanan transaksi non tunai.
Strategi Pengelolaan Keuangan (<i>Financial Sustainability</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi <i>Asset Management</i>. 2. Pendefinisian dan standarisasi data. 3. Integrasi aplikasi <i>Toll Maintenance</i> dengan ERP. 4. Integrasi <i>Toll Collection System</i> dengan ERP. 5. Integrasi <i>Enterprise Management System, Single Sign-on & Security</i>. 6. Implementasi <i>business intelligence</i>. 7. Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja. 8. Implementasi ERP Modul Keuangan di Anak Perusahaan. 9. Peningkatan pelayanan transaksi non tunai.

Bidang	Program Kerja
Strategi Organisasi & SDM (<i>Organization & Human Capital</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian transformasi organisasi TI. 2. Pengembangan dan pengelolaan SDM TI. 3. Pendefinisian dan standarisasi data. 4. Implementasi <i>e-Procurement</i>. 5. Implementasi <i>knowledge management</i>. 6. Peningkatan implementasi infrastruktur TI (integrasi server terpusat dan firewall). 7. Integrasi <i>Enterprise Management System, Single Sign-on & Security</i>. 8. Peningkatan ERP-HRMS. 9. Implementasi <i>business intelligence</i>. 10. Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja.
Strategi Pengembangan Bisnis Lain (<i>Business Diversification</i>)	Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja.
Kepatuhan dan Manajemen Risiko (GCG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja, audit dan tata kelola TI. 2. Pendefinisian dan standarisasi data. 3. Implementasi <i>Corporate Governance System</i>. 4. Integrasi <i>Enterprise Management System, Single Sign-on & Security</i>. 5. Pengembangan keamanan sistem (ISO 27000). 6. <i>Business Continuity Plan</i>. 7. Implementasi <i>content management</i>. 8. Implementasi <i>business intelligence</i>. 9. Pemenuhan permintaan aplikasi dari unit kerja.

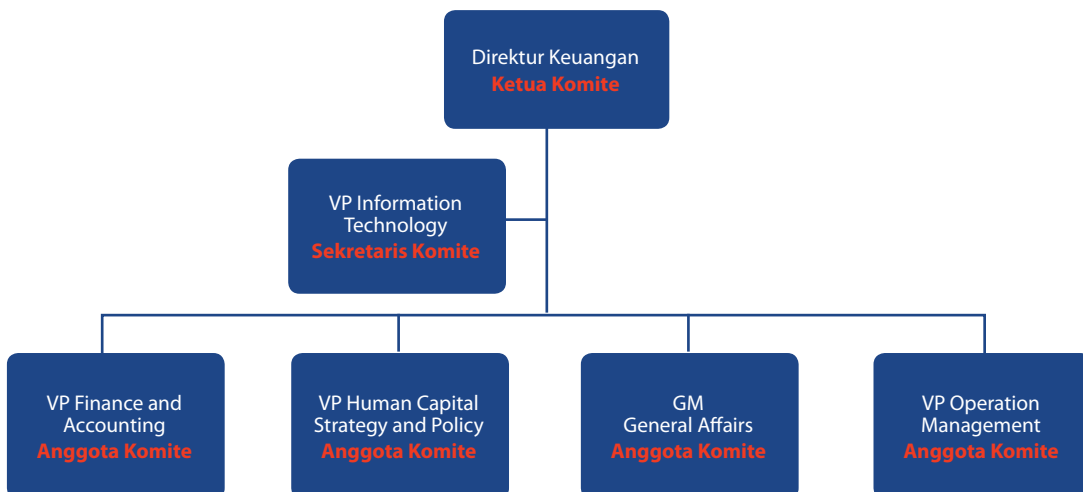
KOMITE PENGARAH TI (IT STEERING COMMITTEE)

Melalui Keputusan Direksi No. 212/KPTS/2014 tanggal 31 Desember 2014, Direksi telah menetapkan Komite Pengarah Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *IT Steering Committee* untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyelaraskan Strategi TI dan Bisnis (*Strategic Alignment*), melalui arahan strategis dan keputusan terkait program implementasi TI / solusi TI yang sejalan dengan strategi, tujuan dan prioritas bisnis perusahaan.
2. Memastikan pengelolaan TI perusahaan berjalan optimal sesuai dengan *Master Plan* dan Tata Kelola TI sehingga dapat memberikan nilai/manfaat yang ditetapkan (*Value Delivery*).
3. Mengoptimalkan sumber daya TI (*Resource Management*) untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas pemanfaatan infrastruktur, aplikasi, *human capital* dan informasi.
4. Menjaga aset TI dari kejadian yang tidak diinginkan (*Risk Management*) demi kelancaran operasi bisnis.
5. Melakukan pengawasan terhadap proses dan kinerja TI (*Performance Measurement*) secara periodik

IT Steering Committee diharapkan dapat menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Tata Kelola Teknologi Informasi di Perusahaan. Susunan keanggotaan dari *IT Steering Committee* ini adalah sebagai berikut:

BAGAN KEANGGOTAAN IT STEERING COMMITTEE



Auditor Eksternal

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perseroan dilakukan dengan melaksanakan audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Audit laporan keuangan Perseroan pada periode tahun buku 2009, 2010 dan 2011 dilakukan oleh KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan. Pada 3 (tiga) periode tahun buku berikutnya (2012, 2013 dan 2014), audit laporan keuangan Perseroan dilakukan oleh KAP RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto. Sedangkan Audit laporan keuangan Perseroan pada tahun buku 2015 dilakukan oleh, Purwantonono, Sungkoro & Surja/"PSS" (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited)-dahulu bernama Purwantonono, Suherman & Surja.

AUDITOR EKSTERNAL PERSEROAN 2011-2015

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Kontrak (Rp)	Partner Pelaksana
2011	HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan	1.065.000.000	Drs. Hartono, Ak., CPA
2012	RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	1.622.500.000	Saptoto Agustomo
2013	RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	1.245.750.000	Saptoto Agustomo
2014	RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	1.452.000.000	Saptoto Agustomo
2015	KAP Purwantonono, Sungkoro & Surja	1.925.000.000	E. Batara Manurung

AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2015

Dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bapepam-LK yaitu KAP Purwantonono, Sungkoro & Surja/"PSS" (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited). Penunjukan KAP tersebut telah melalui proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan dan telah mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan pada tanggal 18 Maret 2015 atas rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan.

Lingkup Audit yang dilakukan KAP Purwantonono, Sungkoro & Surja/"PSS" (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) mencakup:

- Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
- Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
- Audit Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku pada tahun buku 2015.
- Audit Kepatuhan terhadap sistem pengendalian intern perusahaan.

Proses Penunjukan Auditor Eksternal

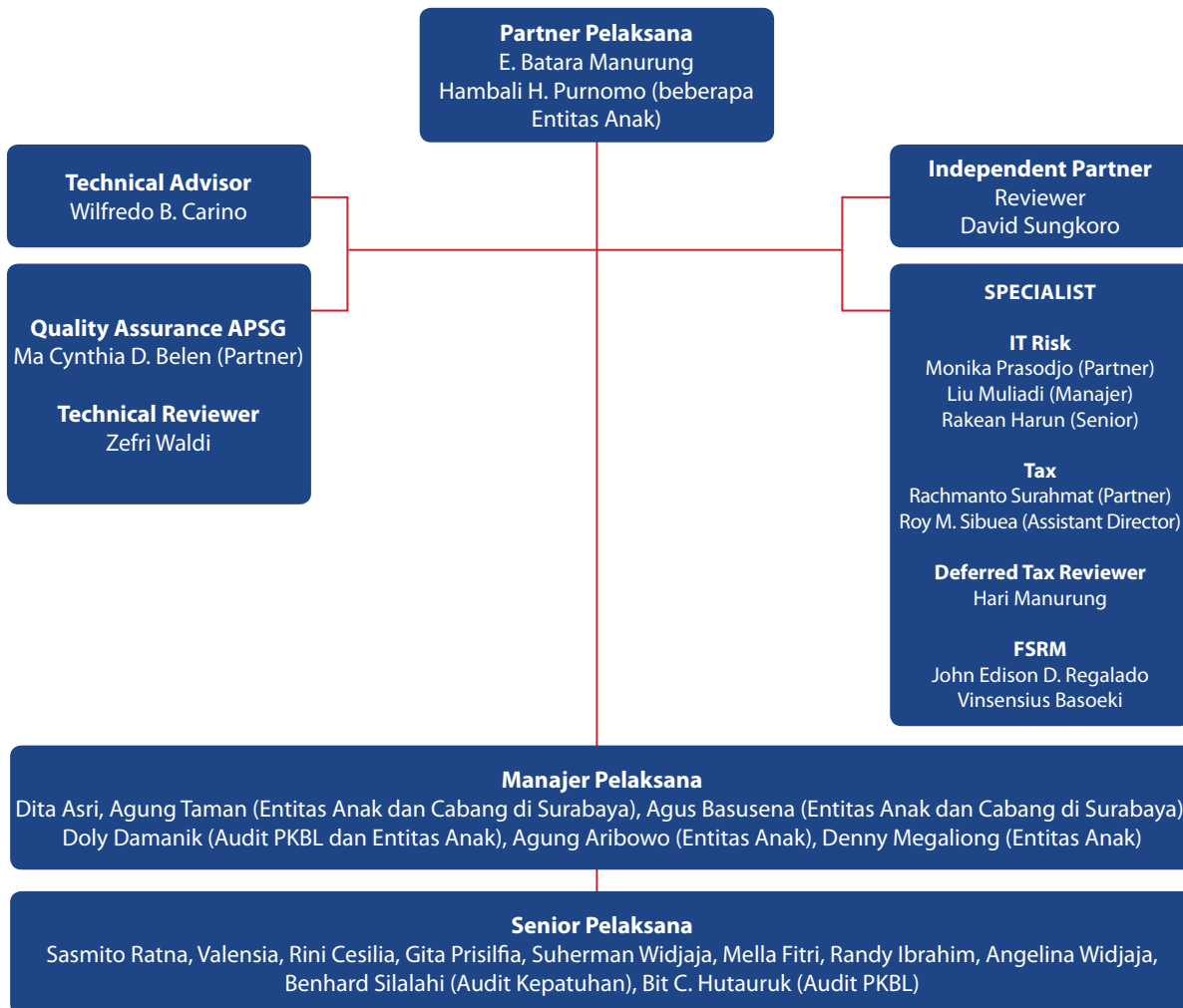
Proses penunjukan Auditor Eksternal dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik.
2. Komite Audit melaporkan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2015 kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyampaikan Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Rangka Audit Umum PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2015 melalui Surat Dewan Komisaris Perseroan No. DK/013/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2015.
4. Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik.

Jasa Lain

Pihak yang ditunjuk Perseroan sebagai Auditor Eksternal tidak memberikan jasa lain selain lingkup audit sebagaimana tersebut di atas. Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.925.000.000,- (satu miliar, sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) termasuk PPN dan belum termasuk Out of Pocket Expenses (OPE). KAP Purwantonono, Sungkoro & Surja/"PSS" (Firma Anggota Ernst & Young Global Limited) yang ditunjuk telah menyelesaikan tugasnya secara independen sesuai standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

STRUKTUR TIM AUDITOR EKSTERNAL JASA MARGA TAHUN 2015



Akses terhadap Informasi dan Data Perseroan

Perseroan senantiasa melakukan pembaharuan (*updating*) sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi. Selain itu, Perseroan juga terus berupaya memperkuat platform teknologi informasi untuk menjaga dan meningkatkan kehandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran melalui situs web www.jasamarga.com.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap keterbukaan informasi, Jasa Marga juga senantiasa melakukan pelaporan terhadap informasi dan fakta material kepada otoritas pasar modal baik melalui surat kepada Bapepam-LK maupun secara *electronic reporting* kepada

Bursa Efek Indonesia. Jasa Marga juga secara aktif melakukan publikasi dari setiap aksi korporasi yang dilakukan melalui *press release*, dan publikasi tersebut dapat diunduh melalui situs web Jasa Marga.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi Corporate Secretary (Mohammad Sofyan) dan Investor Relations Department (Rudi Kurniadi) melalui telepon: (62-21) 841 3630, 841 3526, faksimili: (62-21) 841 3540, dan e-mail: sekper@jasamarga.co.id dan investor.relations@jasamarga.co.id



08

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- STRATEGI DAN KEBIJAKAN UMUM
- TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN HIDUP
- TANGGUNG JAWAB KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA
- LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
- TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



Sepanjang tahun 2015, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mencakup program pelestarian lingkungan hidup, program di bidang ketenagakerjaan, keselamatan & kesehatan kerja, serta program pengembangan sosial dan kemasyarakatan.

Strategi dan Kebijakan Umum

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam infrastruktur jalan tol, Perseroan berperan serta dalam pergerakan kemajuan ekonomi dan budaya di wilayah yang dilewatinya. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung keberlanjutan bisnis Perseroan, yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Perseroan terus melaksanakan aktivitas berkelanjutan sebagai tanggung jawab sosial Perseroan yang memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif pada ketiga aspek di atas.

Sebagai wujud nyata, aktivitas tanggung jawab sosial Perseroan didasarkan pada **triple bottom line**, yaitu *people*, *planet*, dan *profit*.

Sebagai landasan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Perseroan mengacu kepada Undang

Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Di samping itu Perseroan juga tunduk kepada peraturan perundangan lainnya.

Dalam mewujudkan komitmennya, di sepanjang tahun 2015, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan TJSL yang mencakup program pelestarian lingkungan hidup, program di bidang ketenagakerjaan, kesehatan & keselamatan kerja, program pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang meliputi program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat, program bantuan bencana alam dan bantuan masyarakat, dan program yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen.

Tanggung Jawab Lingkungan Hidup

Perseroan menyadari bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan memberikan dampak bagi lingkungan, baik lingkungan yang berada di area Kantor Pusat maupun area operasional. Untuk itu Perseroan secara proaktif membina budaya tanggung jawab lingkungan tidak saja terhadap karyawan tetapi juga meliputi masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan Perseroan dalam mengembangkan, membangun dan mengelola jalan tol, selain untuk mendukung program-program nasional yang terkait dengan lingkungan hidup. Upaya untuk meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas bisnis ini terus menjadi fokus perbaikan utama Perseroan. Untuk memenuhi hal tersebut, Perusahaan membangun Sistem Manajemen Lingkungan sejak akhir tahun 2013 dengan menerbitkan KPTS No 165 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan.

Kebijakan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai Perusahaan yang mengoperasikan dan mengembangkan Jalan Tol, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan berkaitan dengan aktivitas Perusahaan.

Perusahaan akan melakukan pengelolaan dan pengendalian lingkungan secara komprehensif, berdasarkan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, agar dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dan masyarakat sekitar, dengan ketentuan, sebagai berikut:

- Perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan, berdasarkan atas skala prioritas.
- Perusahaan mencegah dan bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.
- Fungsi perencanaan dan pengendalian lingkungan di sekitar usaha Perusahaan dilaksanakan oleh Kantor Pusat bersama Kantor Cabang dan Anak Perusahaan.
- Fungsi pelaksanaan dan pengawasan terhadap lingkungan di sekitar usaha Perusahaan dilaksanakan oleh Kantor Cabang dan Anak Perusahaan.
- Direksi, seluruh Karyawan dan Mitra Usaha Perusahaan memiliki peran dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

- Menyempurnakan sistem manajemen lingkungan secara terus menerus sesuai kondisi terakhir dan mendorong seluruh Karyawan untuk selalu mengembangkan dan memelihara budaya sadar lingkungan, guna meningkatkan Nilai Perusahaan dan menjaga kepercayaan *Stakeholder*.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. bertanggung jawab untuk memastikan agar Kebijakan Manajemen Lingkungan ini disosialisasikan, diimplementasikan dan ditinjau efektivitasnya secara berkala. Berikut adalah penjelasan mengenai Dasar dan Struktur Tata Kelola Sistem Manajemen Lingkungan Perseroan:

1. Dasar Pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan

Dalam melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan hidup, Perseroan bersandar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya:

1. Undang Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol terkait substansi pelayanan untuk indikator kebersihan dan tanaman.
5. Surat Edaran Direksi No. 18/SE/2010 tentang Penghematan Energi dan Pelestarian Lingkungan yang berisi:
 - Penghematan energi melalui penggunaan teknologi baru yang dapat mengurangi penggunaan energi.
 - Penggunaan produk-produk yang mengacu kepada eco product (produk yang ramah lingkungan).
 - Inventarisasi jumlah pohon dalam setiap kegiatan proyek yang akan ditanam kembali.
 - Penanaman pohon sebagai akibat dari penebangan pohon yang harus dilakukan.
6. Keputusan Direksi No. 165/KPTS/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang bertujuan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di sekitar usaha Perseroan, menjaga kebersihan dan kelestarian fungsi lingkungan.

2. Struktur Tata Kelola Sistem Manajemen Lingkungan

Berikut adalah Struktur Tata Kelola Sistem Manajemen Lingkungan



Kegiatan yang Dilakukan

Program Lingkungan

Sesuai dengan aspek-aspek pengelolaan lingkungan di Perseroan, dilakukan program-program lingkungan antara lain:

Penghijauan	Pengelolaan AMDAL dan RKL/RPL	Pengelolaan Sampah	Efisiensi dan Konservasi Air	Upaya Mitigasi Emisi Karbon
<p>Dilakukan sebagai salah satu upaya Perseroan untuk memperbaiki kualitas udara di lingkungan jalan tol.</p> <p>Pada tahun 2015, jumlah pohon yang ditanam sejumlah 57.088 dengan berbagai jenis pohon, di antaranya pohon mahoni, trembesi, akasia dan jenis pohon lainnya.</p>	<p>Kepedulian Perseroan terhadap lingkungan dimulai semenjak rencana pembangunan jalan tol, dimana Perseroan sudah memperhatikan pengelolaan lingkungan melalui penerapan AMDAL terhadap proyek jalan tol baru. Dalam rangka menjaga dan memelihara kualitas lingkungan seluruh jalan tol yang telah beroperasi, Perseroan melalui Cabang dan Anak Perusahaan telah melaksanakan program Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pada jalan tol beroperasi.</p>	<p>Dilakukan dengan melakukan pemilahan sampah organik dan organik serta sampah B3 di Unit Kerja. Peningkatan pengelolaan sampah di gerbang tol juga dilakukan sebagai bukti kepedulian Perseroan serta untuk pemenuhan Standart Pelayanan Minimal.</p>	<p>Dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan untuk memastikan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Sosialisasi penghematan air dengan memasang sticker hemat air di setiap sarana penggunaan air.</p> <p>Penampungan air wudhu dari area masjid dan menggunakannya kembali untuk menyiram tanaman tanaman di lingkungan kantor</p> <p>Pembuatan lubang biopori di beberapa area Perseroan.</p>	<p>Dilakukan dengan penghematan energi listrik. Perseroan berupaya menerapkan budaya hemat energi dengan memasang himbauan hemat listrik serta penggunaan lampu hemat energi.</p>

Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Tahun 2015 dilaksanakan proses audit sertifikasi ISO 14001 di Cabang Jakarta-Cikampek serta persiapan sertifikasi di Cabang Cawang tomang Cengkareng.

Dampak Keuangan Dari Kegiatan Tanggung Jawab Lingkungan Hidup

Guna mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan lingkungan, Perseroan secara khusus telah mengalokasikan biaya pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2015, Perseroan telah mengeluarkan dana untuk pengelolaan lingkungan sebesar Rp 53,52 miliar.

Tanggung Jawab Ketenagakerjaan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja

Konsep karyawan sebagai *human capital* bagi Perseroan menunjukkan bahwa karyawan merupakan bagian penting dari pengembangan Perseroan ke depan. Perseroan memberikan perhatian dan komitmen tinggi dalam hal Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal ini dapat dilihat dari pemantauan efektivitas secara berkala dan melakukan perubahan-perubahan baik untuk kebijakan, program maupun pemberian benefit untuk memastikan hal tersebut terjamin pelaksanaannya dengan baik agar karyawan dapat berkontribusi dengan optimal dan menjaga eksistensi Perseroan.

Ketenagakerjaan

Kebijakan

Dengan paradigma baru, yaitu memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal insani (*human capital*) maka Perseroan menempatkan SDM sebagai subyek yang harus dikelola dengan baik agar mampu menjadi modal untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam jangka panjang secara berkelanjutan.

Undang Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan menjadi acuan seluruh kebijakan ketenagakerjaan Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hubungan kerja.



Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia ini diterapkan oleh Perseroan dengan mengupayakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kepatuhan terhadap perundang undangan ketenagakerjaan.
2. Menjunjung tinggi hak-hak asasi pekerja.
3. Memberikan program peningkatan dan pelatihan kompetensi.
4. Menjunjung kesetaraan gender dan jenjang karir.

Berikut adalah penjelasan terkait kebijakan Perseroan dalam hal ketenagakerjaan:

A. Pengelolaan Hubungan Karyawan dengan Manajemen

Hubungan antara karyawan dengan Manajemen Perseroan telah terbina dengan baik. Serikat Karyawan Jasa Marga (SKJM) merupakan organisasi yang berhak mewakili karyawan dalam berhubungan dengan Manajemen dan telah terlibat secara aktif dalam perundingan PKB dengan Manajemen.

B. Hubungan Kerja

• Kesetaraan dalam Rekrutmen SDM

Rekrutmen SDM Jasa Marga dilakukan melalui rekrutmen internal dan eksternal. Rekrutmen internal dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah dimiliki agar tercapai efisiensi biaya pergantian karyawan dan didapatkan kandidat terbaik sesuai keperluan serta secara bersamaan memfasilitasi pengembangan karir bagi karyawan yang ada. Rekrutmen eksternal difokuskan pada perekrutan karyawan untuk mengisi kekosongan posisi di Jasa Marga.

• Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Jasa Marga tidak memiliki kebijakan internal terkait ketenagakerjaan yang membedakan penerapannya berdasarkan gender. Seluruh peraturan yang berlaku diterapkan secara konsisten dan setara kepada seluruh karyawan tanpa membedakan gender. Demikian pula dengan kesempatan kerja yang ditawarkan berlaku bagi seluruh karyawan.

• Pengembangan Kompetensi

Penguatan kompetensi SDM dilakukan dengan pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan kompetensi soft skill dan hard skill, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap strategibisnis dan operasional. Program peningkatan dan pelatihan kompetensi bagi karyawan saat ini dikelola melalui pembentukan Jasa Marga Development Center (JMDC).

• Sistem Manajemen Karir dan Sistem Manajemen Talenta

Pergerakan karir karyawan baik berupa promosi dan maupun rotasi tahun 2015 meningkat jumlahnya jika dibandingkan dengan tahun 2014. Sistem Manajemen karir Perseroan dituangkan dalam Keputusan Direksi No. 100/KPTS/2014 tanggal 16 Juni 2014.

• Penghargaan Karyawan

Secara rutin, Jasa Marga memberikan apresiasi kepada karyawan yang berprestasi dalam mendukung kegiatan operasional Perseroan, karyawan yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Perseroan. Pemberian penghargaan ini untuk memotivasi karyawan agar memberikan kontribusi yang lebih baik di periode mendatang.

C. Hari Kerja dan Waktu Kerja

Untuk menghindari eksploitasi tenaga kerja secara berlebihan, Perseroan telah menetapkan batasan waktu kerja bagi pekerja. Waktu kerja disesuaikan dengan daerah kerja serta sifat pekerjaan. Di Perseroan berlaku waktu kerja biasa, waktu kerja shift.

Hari kerja untuk karyawan yang tidak terkena rotasi adalah 5 hari dengan waktu kerja 8 jam sehari dan selama-lamanya 40 jam per minggu. Sedangkan untuk karyawan yang terkena rotasi kerja sifit ditetapkan selama 7 jam dan selama-lamanya 40 jam per minggu. Dalam hal pekerja menjalankan pekerjaan melebihi waktu kerja yang ditentukan, maka kepada pelaksana diberikan kompensasi berupa upah lembur sesuai ketentuan perundangan.

D. Istirahat dan Cuti Karyawan

Perseroan memberikan istirahat dan cuti tahunan antara lain istirahat mingguan, hari libur nasional, cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti bersama dan istirahat panjang.

E. Remunerasi Karyawan

Jasa Marga memahami bahwa kompensasi dan benefit yang diberikan Perseroan berimbang pada kondusivitas kinerja serta perputaran dari karyawan. Oleh karena itu Jasa Marga memberikan paket remunerasi yang kompetitif bagi karyawannya yang terdiri dari gaji bulanan, berbagai tunjangan dan fasilitas antara lain pensiun dan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku dan secara rutin dievaluasi agar pergerakan gaji karyawan sesuai dengan harga pasar.

- **Penggajian**

Pemberian kompensasi bulanan pekerjaan yang sesuai. Nilai persentase imbal jasa terendah yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Rp3.608.000. Nilai ini lebih besar 180% dibandingkan UMR pada daerah bersangkutan. Pemberian imbal jasa maupun promosi karyawan yang berkompeten tanpa membedakan gender maupun SARA.

- **Tunjangan Hari Raya**

Sebagai bentuk penghargaan untuk karyawan dan bukti adanya keragaman dalam perusahaan, semua karyawan diberikan Tunjangan Hari Raya sesuai dengan agama yang dianutnya.

- **Insentif Kinerja**

Perusahaan memberikan insentif kinerja sebagai imbalan atas kinerja Karyawan pada jabatannya. Insentif kinerja terdiri dari Insentif Lalu Lintas untuk karyawan operasional, Bonus sebagai penghargaan atas tercapainya kinerja Perusahaan, dan Insentif Kinerja Jangka Panjang

F. Kesejahteraan

- **Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Perusahaan mendaftarkan/memasukkan seluruh Karyawan menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- **Program Asuransi Kumpulan Diri**

Diperuntukkan bagi Karyawan Operasional Berisiko Tinggi. Mengingat besarnya risiko karyawan operasional yang bekerja di jalan, Perseroan memberikan tambahan benefit dengan mengikutsertakan Karyawan yang tugas pokok dan fungsinya harus berada di lapangan, dalam program Asuransi Kecelakaan.

- **Program Pensiun**

Karyawan Jasa Marga diikutsertakan dalam Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP). Penyelenggaraan PPMP diselenggarakan oleh Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM) yang didirikan oleh Perusahaan. Program PPMP diikuti oleh karyawan yang mulai bekerja di perusahaan sebelum 01 Juli 2012. Sedangkan PIIP diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan diikuti oleh karyawan yang mulai bekerja di perusahaan sejak tanggal 01 Juli 2012.

- **Program Purna Karya**

Program ini diberikan kepada karyawan dengan manfaat ketika berhenti pada usia pensiun normal akan mendapat 24 x PhDA (Penghasilan Dasar Asuransi), sedangkan karyawan yang berhenti pada usia pensiun dipercepat dan sebelum memasuki usia pensiun dipercepat akan mendapatkan manfaat proposional sesuai peraturan Perseroan.

- **Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan**

Perseroan mengikutsertakan seluruh karyawan kedalam program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan. Dasar perhitungan iuran JHT dihitung dari penghasilan yang proporsinya dibayar sebesar 2% oleh karyawan dan 3,7% oleh Perseroan.

- **Jaminan Kesehatan**

Manfaat jaminan kesehatan berupa manfaat dalam bentuk fasilitas kesehatan yang akan diterima bagi para pensiunan. Dengan manfaat ini pensiunan akan merasa nyaman atas biaya kesehatan yang sewaktu waktu apabila diperlukan.

G. Pembinaan karyawan

Perseroan memastikan bahwa semua karyawan baik atasan maupun bawahan mengetahui kewajiban dan tanggung jawab masing-masing untuk menghindari adanya pelanggaran disiplin.

Kegiatan Yang Dilakukan

1. Pemberian imbal jasa pekerjaan yang sesuai. Jasa Marga memahami bahwa kompensasi dan benefit yang diberikan Perseroan berimbang pada kondusivitas kinerja serta perputaran dari karyawan. Oleh karena itu, Perseroan mengupayakan imbal jasa terbaik melebihi ketentuan perundang undangan yaitu di atas UMR, sesuai kemampuan Perseroan dan tanpa memberatkan jam kerja karyawan. Nilai persentase imbal jasa terendah yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Rp 3.608.000. Nilai ini lebih besar 180% dibandingkan UMR pada daerah bersangkutan.
2. Perseroan mendukung terbentuknya beberapa perkumpulan dan perserikatan yang dimaksudkan sebagai wadah aspirasi dan bakat seni maupun olahraga karyawan seperti LKS bipartit, jasmapala, dan baporseni (olah raga dan seni).
3. Keterbukaan dan kesetaraan dalam rekrutmen SDM. Perusahaan mengumumkan program rekrutmen dan seleksi karyawan baru, diantaranya melalui *website* resmi Perseroan yakni www.jasamarga.co.id, bekerja sama dengan surat kabar yang beredar secara nasional, portal BUMN, *twitter* resmi Perseroan, media *online*, poster dan *career development program* berbagai universitas ternama di Indonesia.

Perseroan menjunjung tinggi asas kesetaraan dimana pelamar berasal dari berbagai suku, wilayah, agama, ras dan gender.
4. Penandatanganan PKB 2014-2016 yang memuat kesepakatan-kesepakatan antara Manajemen dengan Serikat Karyawan Jasa Marga (SKJM) pada tanggal 23 Juli 2014.
5. Pengembangan Kompetensi. Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui Jasa Marga Development Center (JMDC). Sepanjang tahun 2015, JMDC telah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan dengan total pelaksanaan 29.923 hari orang pelatihan menurut kategori operasional dan non operasional dengan total peserta 13.360 orang.
6. Gender dan Kesempatan Kerja. Kebijakan dalam hal kesempatan kerja, baik penempatan karyawan maupun pengembangan karir karyawan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Jasa Marga melaksanakan pengisian formasi dan pengembangan karir secara selektif dan terbuka tanpa diskriminasi (gender ras suku agama), dengan memprioritaskan sumber dari dalam Perusahaan dengan memperhatikan prestasi kerja, kemampuan dan kompetensi Karyawan.
7. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan kepada karyawan yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

- 8. Pemberian imbal jasa maupun promosi karyawan yang berkompoten tanpa membedakan gender maupun SARA.
- 9. Survey Kepuasan Pekerja. Perseroan secara rutin melakukan survey kepuasan pekerja, sehingga Perseroan dapat menerima feedback langsung dari pekerja. Melalui survey ini diharapkan setiap pekerja Jasa Marga dapat menyampaikan pandangan mengenai berbagai aspek yang menentukan level kepuasan kerja serta dapat menyampaikan saran dan masukan kepada Manajemen Jasa Marga terkait hal yang dapat meningkatkan tingkat kepuasan dan produktivitas pekerja Jasa Marga.

Pada tahun 2015 hasil *Engagement Ratio Index* (ERI) adalah 1,97, turun bila dibandingkan tahun 2014 (skor ERI = 2,17).

SKOR ERI PERSEROAN

Tahun	Skor
2014	2,17
2015	1,97

- 10. *Turnover* Karyawan. Untuk menjaga tingkat *turnover* karyawan, Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan dalam mengembangkan karir serta paket remunerasi yang kompetitif dalam bentuk manfaat dan fasilitas yang diterima oleh karyawan.

Sejauh ini tingkat *turnover* karyawan Jasa Marga sangat kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah karyawan yang mengundurkan diri dari Perseroan. Pada tahun 2015 terdapat 1 orang karyawan yang mengundurkan diri.

TURNOVER KARYAWAN 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Karyawan	5.154	5.075	4.883	4.691	4.591
Jumlah Karyawan Mengundurkan Diri	2	1	2	3	1
Persentase (%)	0,04	0,02	0,04	0,06	0,02

Penghargaan yang Diperoleh

Dengan berbagai upaya transformasi sistem, pada tahun 2015 Perseroan memperoleh penghargaan dari berbagai pihak yaitu Index Human Capital Study Award 2015-The Best for Human Capital Initiative, HR Excellence Award 2015 - kategori HR Transformation dan Reward Management dengan predikat Good, dan Anugerah Business Review-2nd The Best Corporation for Learning Organization of The Year.

Target ke Depan

Target jangka panjang kedepan adalah menyiapkan karyawan menjadi kader yang siap memimpin dan mengembangkan bisnis perusahaan dalam era globalisasi. Upaya yang akan dilakukan Perseroan di antaranya pemberian beasiswa S2 dan S3 serta pelatihan kepemimpinan dengan fokus pada *global acumen*.

Dampak Keuangan dari Kegiatan Ketenagakerjaan

Perseroan secara berkesinambungan melakukan praktik ketenagakerjaan layak untuk terus menjaga karyawan sebagai aset utama. Dalam upaya untuk melaksanakan praktik ketenagakerjaan ini sepanjang tahun 2015, total biaya yang telah dikeluarkan Perseroan adalah Rp 1,55 triliun.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kebijakan

Perseroan sadar bahwa karyawan adalah *asset* perusahaan yang perlu dikelola serta dipenuhi hak dan kewajibannya, salah satunya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk memenuhi hal tersebut, Perseroan menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk karyawan dengan membuat kebijakan, target dan struktur tata kelola K3 serta melakukan review setiap tahunnya.

Komitmen Jasa Marga untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan dilingkungan kerja diwujudkan dalam kebijakan Perseroan yang diatur dalam Keputusan Direksi No.162/KPTS/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Serta Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan Proyek Konstruksi dan Surat Edaran Direksi No.20/SE-DIR/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mewajibkan Perseroan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), maka seluruh Cabang telah menerapkan Sistem Manajemen K3 berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan melindungi karyawan, pelanggan, aset, mitra kerja dan lingkungan dari potensi bahaya yang mungkin terjadi. Sejak tahun 2011 pengelolaan K3 difokuskan untuk mencapai tingkat **zero accident**. Program ini diselenggarakan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan aturan K3 Dinas Tenaga Kerja setempat serta dievaluasi dan dinilai setiap tahun. Berikut adalah Dasar dan Struktur Tata Kelola Pelaksanaan Sistem Manajemen K3.

1. Dasar Pelaksanaan Sistem Manajemen K3

Dasar pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan Perseroan mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

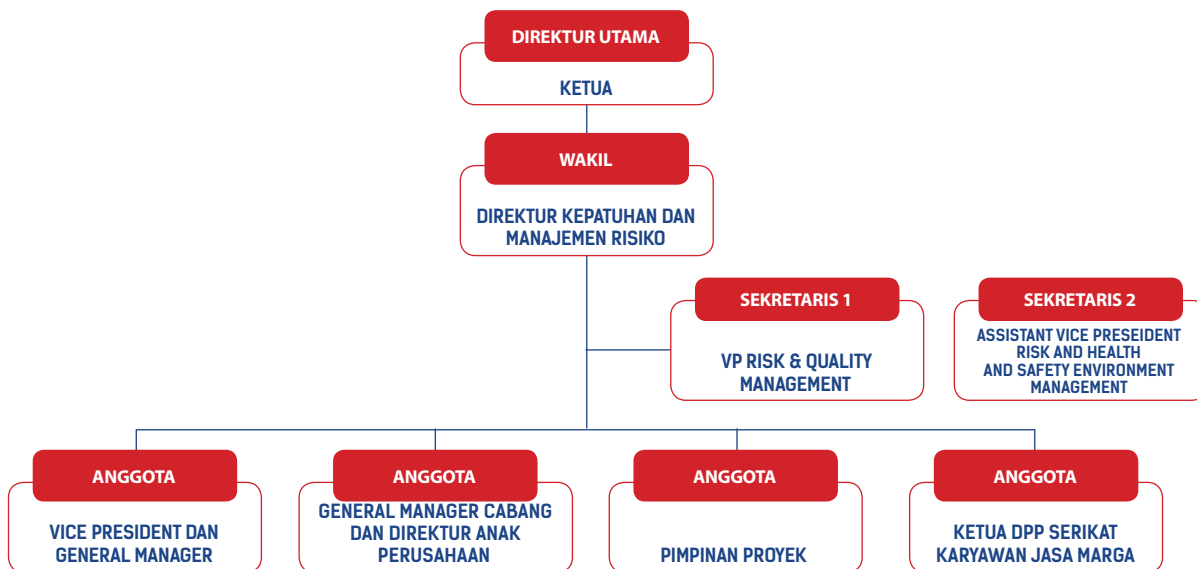
- a. Undang Undang No. 01 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

- b. Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
 - Pasal 86, bahwa pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
 - Pasal 87, bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- d. OHSAS 18001: 2007.
- e. Keputusan Direksi No. 129/KPTS/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Kebijakan Mutu dan K3, Manual Manajemen Mutu dan Pedoman Perbaikan Berkelanjutan di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- f. Keputusan Direksi No. 162/KPTS/2010 tentang Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan Proyek Konstruksi di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- g. Surat Edaran Direksi No. 20/SE-DIR/2010 perihal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- h. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN:
 - Pasal 36, Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMN lainnya, memenuhi peraturan perundangundangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

2. Struktur Tata Kelola Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan membentuk Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang memantau pelaksanaan K3 di Perusahaan.

ORGANISASI PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) KORPORAT



Kegiatan Yang Dilakukan

1. Program K3

a. Sosialisasi terkait SMK3

Sosialisasi SMK3 dilakukan dalam bentuk *parenting visit* ke Cabang dan Anak Perusahaan oleh Divisi Risk and Quality Management untuk kembali merefresh pengetahuan unit kerja terkait K3 serta meningkatkan kesadaran daam berbudaya K3. Selain sebagai media sosialisasi, parenting visit juga dibuat sebagai media bagi Cabang dan Anak Perusahaan untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem yang selanjutnya didiskusikan bersama untuk perbaikan.

b. *Cross Audit* SMK3 sesuai PP Nomor 50 Tahun 2012

Untuk mengetahui kesesuaian tingkat penerapan K3 di cabang-cabang dengan PP 50 tahun 2012 maka Perseroan melakukan *Cross Audit* dengan personil auditor dari cabang lain yang sudah mendapatkan pelatihan Auditor SMK3 Kemenakertrans. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan objektivitas dalam hasil auditnya. *Cross audit* dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan peningkatan penerapan SMK3 di Cabang.

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan K3 tahun 2015:

- Evaluasi pelaksanaan Kegiatan K3 Cabang-Cabang
- Evaluasi data laporan P2K3 Cabang
- Evaluasi HIRAC Cabang

d. Program kesehatan

1) Pencegahan (preventif)

- Vaksinasi untuk kepentingan pencegahan penyakit bagi anak kandung karyawan dapat dilakukan vaksinasi dasar.
- Uji Kesehatan Berkala (UKB) setiap 1 tahun sekali dalam rangka mendeteksi dini suatu penyakit karyawan.
- Pemberian Gizi Kerja kepada karyawan yang terkena rotasi kerja shift berupa Susu untuk meningkatkan daya tahan tubuh karyawan.
- Penyemprotan dan pengasapan jentik-jentik nyamuk untuk mencegah penyebaran demam berdarah.
- Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan & keluarga karyawan untuk mengikuti program Keluarga Berencana.
- Perusahaan melakukan pemeriksaan pap smear 1 (satu) tahun sekali untuk mendeteksi dini penyakit kanker mulut rahim terhadap karyawan dan atau istri karyawan.

- 2) Pengobatan (kuratif)
 - Penggantian biaya sebesar 80% untuk biaya rawat jalan dapat dilakukan oleh karyawan dan keluarga karyawan ke dokter, atau bidan berpraktek di rumah sakit, klinik, atau tempat praktek lainnya.
 - Karyawan dan keluarga karyawan yang menjalani rawat inap di rumah sakit dapat langsung ke rumah sakit dengan kelas perawatan I untuk Grade E s.d 3 dan untuk kelas perawatan II untuk Grade 4 s.d 5 dan Grade P dan M.
 - Pemeriksaan kehamilan dan bantuan persalinan dalam 1 kali proses kehamilan yang ditanggung perusahaan sebanyak-banyaknya 9 kali.
 - Perusahaan memberikan penunjang diagnostik berupa USG sebanyakbanyaknya 2 kali kecuali ada kelainan kandungan atas rekomendasi dokter spesialis.
 - Pemeliharaan dan pengobatan, perawatan gigi penggantian biayanya sebesar 80%.
- 3) Mempertahankan kesehatan (promotif)
 - Perusahaan mengadakan ceramah kesehatan secara periodik secara rutin tiap 3 bulan sekali, baik di Kantor Pusat maupun di Cabang dengan tema kesehatan yang berbeda-beda.
 - Perusahaan membuat *weekly info* yang terbit setiap Jumat dengan salah satu temanya adalah tentang kesehatan untuk menambah pengetahuan karyawan.
 - Perusahaan memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan olah raga (contoh: Senam Kesehatan Jasmani (SKJ) setiap hari jumát, olahraga basket, tennis, zumba, golf, bowling dan kegiatan olah raga lainnya) untuk meningkatkan stamina dan kesehatan para karyawan.
- 4) Pemulihan kesehatan (rehabilitatif)
 - Pembuatan dan pemasangan gigi palsu atas indikasi medis hanya berlaku bagi karyawan yang memiliki masa kerja minimal 3 tahun, maksimal dalam 1 tahun 3 (tiga) gigi palsu.
 - Pemeriksaan mata dan pembelian kaca mata bagi karyawan atas rekomendasi dokter, diberikan hanya kepada karyawan yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun hanya untuk 1 kali dalam 2 tahun.
 - Alat bantu diberikan kepada karyawan yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun dan diberikan dalam jangka waktu 3 tahun sekali.

2. Data Kecelakaan Kerja

Pada tahun 2015, angka statistik kecelakaan kerja di Jasa Marga mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya, yaitu tidak ada kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia.

Cabang	Luka Ringan			Luka Berat			Meninggal Dunia		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Jagorawi	0	0	0	0	1	0	0	0	0
CTC	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Surabaya-Gempol	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Belmera	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Palikanci	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Purbaleunyi	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Jakarta-Tangerang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jakarta-Cikampek	0	0	0	1	0	0	1	0	0
PT JLJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Pemenuhan kompetensi

Pemenuhan kompetensi di bidang K3 dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan SMK3 agar berjalan dengan baik serta sebagai upaya perusahaan dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Pada tahun 2015 Perseroan berupaya meningkatkan jumlah Ahli K3 Umum, Ahli K3 Konstruksi dan Auditor SMK 3 untuk pemenuhan kompetensi di bidang K3 secara merata di seluruh unit kerja.

KOMPETENSI K3 KARYAWAN DI KANTOR PUSAT, CABANG, PROYEK DAN ANAK PERUSAHAAN TAHUN 2015

Kompetensi	Terlatih	Purnabakti	Aktif
Auditor SMK3	25	1	24
Ahli K3 Umum	81	4	77
Ahli K3 Konstruksi	43	25	18
Safety Officer	56	5	51
HIPERKES	1	0	1

3. Pencapaian Bidang K3

- Pada Bulan Februari 2015, Cabang Semarang memperoleh penghargaan atas kepatuhannya dalam melaporkan kegiatan P2K3 di Perusahaan untuk tahun 2014 serta Penghargaan *Zero Accident* atas prestasinya dalam melaksanakan program K3 tehitung sejak 01 Januari 2011 s.d 30 November 2014
- Pada bulan Agustus Tahun 2015, Cabang Jakarta Cikampek dan PT Jalantol Lingkar Luar Jakarta mendapatkan Penghargaan *Zero Accident* atas prestasinya dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tanpa kecelakaan kerja, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2012 s.d 31 Desember 2014.

4. Sertifikasi Bidang K3

Sebagai upaya dalam menjamin persyaratan K3 dipenuhi oleh Perusahaan untuk memastikan K3 berjalan dengan efektif, maka dilakukan sertifikasi OHSAS 18001:2007 (*Occupational Health & Safety Assessment Series*) yang terintegrasi dengan ISO 9001 untuk semua Cabang dimulai dari tahun 2010 dan diperbaharui setiap 3 tahun sekali. Data sertifikasi dapat dilihat dalam Bab Profil Perseroan.

5. Data kinerja K3

Dalam rangka peningkatan penerapan Sistem Manajemen K3 di lingkungan Perseroan, Perseroan melakukan *cross audit* antar Cabang. Pemenuhan persyaratan K3 di Cabang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebagai bukti telah tumbuhnya kesadaran akan pentingnya budaya K3 di Perseroan.

PEMENUHAN PERSYARATAN SMK3 BERDASARKAN PP NOMOR 50 TAHUN 2012

	2012	2013	2014	2015
Presentase Pemenuhan	69,4	70,4	71	72,1

Dampak Keuangan bidang K3

Perseroan secara berkesinambungan melakukan praktik K3 untuk terus menjaga karyawan sebagai aset utama. Upaya untuk melaksanakan praktik K3 ini, sepanjang tahun 2015, total investasi yang telah dikeluarkan Perseroan adalah Rp 96,15 miliar.

Laporan Tanggung Jawab Sosial

Komitmen Jasa Marga dalam Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

Jasa Marga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Perseroan yakin dengan peningkatan kualitas program TJSL akan memberikan respon positif untuk pertumbuhan bisnis pada tahun-tahun mendatang.

Keberlanjutan program tanggung jawab sosial dan lingkungan senantiasa memerlukan inovasi dalam peningkatan kualitas program. Perseroan tidak berhenti dalam mengembangkan program baru yang dapat menjangkau masyarakat luas serta terus memperbaharui program yang telah memberikan dampak nyata bagi *stakeholder*.

Dengan berlandaskan pada itikad untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjalankan amanah dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan, Perseroan mengajak setiap insan Jasa Marga untuk menyingsingkan lengan mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Kebijakan

Sebagai operator jalan tol dan Badan Usaha Milik Negara, kontribusi Perseroan kepada masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan dilaksanakan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikelola oleh Unit Corporate Secretary mulai tahun 2014 dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dikelola Unit Community Development Program sejak tahun 1992.

Sumber anggaran dana untuk program CSR menggunakan alokasi anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan setiap tahunnya sedangkan sumber anggaran dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menggunakan anggaran perusahaan dari Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikelola oleh unit Community Development diatur dalam:

- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil. Program dilaksanakan melalui Unit Community Development Program.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No.: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
- Keputusan Direksi No. 166/KPTS/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Kegiatan yang Dilakukan

Program Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Mudik Gratis Bareng Jasa Marga Tahun 2015

Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat yang akan merayakan Lebaran di kampung halaman, Perseroan menyelenggarakan acara "Mudik Gratis Bareng Jasa Marga 2015" yang diikuti oleh 1307 peserta yang terdiri dari:

- Pekerja yang menunjang aktivitas Perseroan (Pengemudi, Petugas Pembantu Sarana Rumah Tangga, Petugas Kebersihan, Penyapu Jalan, Petugas Harian Lepas, Satpam, dan Hansip) beserta keluarga yang berasal dari Kantor Pusat, Cabang dan Proyek Jasa Marga.
- Masyarakat sekitar jalan tol Jasa Marga yang membutuhkan.

Acara ini merupakan peran aktif Perseroan dalam menekan terjadinya jumlah kecelakaan saat arus mudik lebaran. Dalam kegiatan tersebut Perseroan juga memberikan edukasi tentang tertib berlalu lintas di jalan raya kepada para awak bis (sopir dan kondektur).

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Untuk menekan penggunaan kendaraan roda dua yang digunakan saat mudik.
- Untuk membina hubungan baik dengan stakeholder Perseroan, khususnya masyarakat di sekitar lingkungan Perseroan.
- Untuk memelihara kepercayaan masyarakat kepada Perseroan.
- Untuk meningkatkan citra positif Perseroan.

Dalam acara ini, Jasa Marga menyiapkan 28 bis dengan tujuan akhir Solo yang melewati dua alternatif jalur yaitu Jalur Utara dan Jalur Selatan. Sebagai upaya memberikan edukasi tentang tertib berlalu lintas di jalan raya, para awak bis (supir dan kondektur) mendapat arahan *Safety Driving* dari pihak kepolisian. Selain itu, mereka juga menjalani tes kesehatan oleh tim medis dari Jasa Marga yang terdiri dari tiga dokter dan tiga paramedis. Kegiatan ini bertujuan agar acara mudik gratis bareng jasa marga dapat berjalan dengan aman dan lancar.



BUMN HADIR UNTUK NEGERI PERINGATAN 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA



Dalam rangka memperingati HUT RI ke-70 RI tahun 2015, sesuai dengan Surat Meneteri Negara BUMN Nomor: S-458/MBU/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Peringatan 70 Tahun Indonesia Merdeka "BUMN Hadir untuk Negeri", seluruh BUMN diminta untuk melakukan berbagai kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMN sebagai wujud terima kasih seluruh BUMN kepada Negara. Karena kehadiran dan peran BUMN tidak bisa lepas dari sejarah bangsa Indonesia.

Pada kegiatan ini, Perseroan menjadi PIC kegiatan di Provinsi Sumatera Selatan. Ada tujuh kegiatan wajib yang dilakukan secara bersamaan di 34 Provinsi. yang dilaksanakan sebelum, sesudah, dan pada saat hari-H perayaan HUT Ke-70 RI. Tujuh

kegiatan wajib yang dilaksanakan di wilayah Sumatera Selatan adalah Jalan Sehat sepanjang 8 Km, Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular, Donor Darah dan Pengobatan Gratis, Upacara, Penambahan Fasilitas Laboratorium untuk 17 SMK di Sumatera Selatan, Bedah Rumah untuk 45 veteran, Penjualan Sembako Murah, Partisipasi dalam Lomba tradisional yang diikuti oleh masyarakat di Sumatera Selatan (Perahu Bidar dan Ketek Hias) serta program Siswa Mengenal Nusantara. Ketujuh kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perseroan bersama dengan beberapa BUMN lainnya, yaitu PT Pupuk Sriwijaya, PT Angkasa Pura II, PT Bukit Asam (Persero) Tbk., PT Indofarma (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Utama Karya dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini di Provinsi Sumatera Selatan adalah sekitar Rp 3,12 miliar.



Jalan Sehat 8 KM



Bakti Kesehatan



Sembako Murah



Ketek Hias



Siswa Mengenal Nusantara



Penambahan Fasilitas Lab 17 SMK



Perahu Bidar

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

1. Program Kemitraan

Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 010/KPTS/1997 tanggal 03 Februari 1997. Unit PKBL merupakan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Bagian Laba BUMN. Keputusan ini kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bima Lingkungan (PKBL) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Sasaran dari kegiatan Unit PKBL yaitu usaha kecil, dalam hal ini perorangan atau badan usaha dan koperasi memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pemberian pinjaman modal usaha secara bergulir kepada usaha kecil dan menengah serta melakukan pembinaan usaha agar dapat menjadi tangguh dan mandiri. Upaya pembinaan usaha dilakukan dengan:

- Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Bina Program Kemitraan.
- Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diambil dari alokasi dana Program BL, maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Kebijakan Unit Community Development di lingkungan Perseroan dilakukan melalui jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Pusat dan 9 (Sembilan) kantor cabang dengan pembagian wilayah binaan dan jumlah mitra binaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebagai berikut:

AKUMULASI MITRA BINAAN DAN WILAYAH BINAAN 2014 DAN 2015

Kantor Pusat/ Cabang	Wilayah Binaan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Kantor Pusat	Di luar wilayah operasional kantor cabang	9.149	9.149
Jagorawi	Jakarta Timur, Bogor, Sukabumi	1.053	993
Jakarta-Cikampek	Bekasi, Cikarang, Karawang, Cikampek, Purwakarta	1.413	1.361
Jakarta-Tangerang	Jakarta Barat, Banten	1.115	1.082
Cawang-Tomang-Cengkareng	Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat	1.174	1.117
Purbaleunyi	Bandung, Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Cianjur dan Cimahi	1.349	1.288
Surabaya-Gempol	Jawa Timur	2.312	2.264
Semarang	Jawa Tengah	2.381	2.340
Belmera	Sumatera Utara	1.577	1.530
Palikanci	Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu	1.305	1.253

Mitra Binaan

Pelaksanaan Program Kemitraan (PK) tahun 2015, Community Development Program telah menyalurkan dana sebesar Rp 15.040.000.000,- dana tersebut diserap oleh 451 mitra binaan (MB) yang tersebar di seluruh wilayah Cabang Jasa Marga. Bidang usaha yang dijalankan mitra binaan bervariasi mulai dari sektor Industri, Jasa, Perdagangan, Perikanan dan Peternakan.

Selain penyaluran pinjaman, Community Development juga telah melakukan monitoring kepada mitra binaan serta melakukan penagihan terhadap kewajiban MB, guna digulirkan kembali kepada masyarakat yang masih membutuhkan. Untuk mendukung penyaluran program kemitraan diatas, Community Development juga memberi dukungan melalui penyelenggaraan pelatihan dengan berbagai modul kegiatan antara lain pembukuan, kewirausahaan dan motivasi. Guna membantu memajukan para mitra, selain menyalurkan berupa dana bergulir Community Development juga memberi bantuan promosi kepada mitra binaan dalam bentuk pameran.

PENYALURAN PINJAMAN PROGRAM KEMITRAAN TAHUN 2015

No	Cabang	Industri		Jasa		Perdagangan		Perkebunan		Pertanian		Peternakan		Jumlah	
		Rp	MB	Rp	MB	Rp	MB	Rp	MB	Rp	MB	Rp	MB	Rp	MB
1	Jagorawi	130.000.000	4	320.000.000	10	1.125.000.000	46	-	-	-	-	-	-	1.575.000.000	60
2	Cikampek	65.000.000	3	90.000.000	4	1.260.000.000	45	-	-	-	-	-	-	1.425.000.000	52
3	Tangerang	145.000.000	2	170.000.000	4	1.185.000.000	27	-	-	-	-	-	-	1.500.000.000	33
4	CTC	20.000.000	1	115.000.000	3	1.425.000.000	53	-	-	-	-	-	-	1.560.000.000	57
5	Palikanci	240.000.000	9	240.000.000	8	990.000.000	34	-	-	30.000.000	1	-	-	1.500.000.000	52
6	Purbaleunyi	610.000.000	16	130.000.000	3	1.485.000.000	39	-	-	135.000.000	3	-	-	2.360.000.000	61
7	Semarang	420.000.000	9	150.000.000	6	930.000.000	26	-	-	-	-	-	-	1.500.000.000	41
8	Surabaya	375.000.000	10	575.000.000	14	940.000.000	22	35.000.000	1	-	-	75.000.000	1	2.000.000.000	48
9	Belmera	175.000.000	5	425.000.000	11	985.000.000	30	-	-	-	-	45.000.000	1	1.630.000.000	47
Total		2.180.000.000	59	2.215.000.000	63	10.325.000.000	322	35.000.000	1	165.000.000	4	120.000.000	2	15.040.000.000	451

2. Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan (BL) merupakan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian berbagai bentuk bantuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 dana Program BL disalurkan dalam bentuk:

1. Bantuan korban bencana alam.
2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan.
3. Bantuan peningkatan kesehatan.
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.
5. Bantuan sarana ibadah.
6. Bantuan pelestarian alam.
7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
8. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan

Kegiatan program Bina Lingkungan yang telah dilakukan oleh Perusahaan sepanjang tahun 2015 diantaranya sebagai berikut:

- Bantuan korban bencana alam. Sebagai salah satu bentuk kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat sekitar, Perusahaan memberikan bantuan air bersih bagi warga yang mengalami kekeringan di musim kemarau di 8 Kantor Cabang sekitar wilayah operasional. Selain itu Perusahaan juga memberikan bantuan untuk korban bencana gunung Sinabung berupa pembuatan sumur dan MCK
- Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan Perseroan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sekitar dengan melakukan pelatihan untuk guru TK, PAUD & Da'i, memberikan bantuan berupa media bermain dan belajar tematik eduitment; bantuan sarana/prasarana belajar, sarana/prasarana sekolah dan memberikan bantuan sepeda motor untuk guru-guru teladan tingkat SD dan SMP dengan jumlah 45 (empat puluh lima) sepeda motor serta renovasi sekolah-sekolah dan Madrasah di seluruh operasional Perusahaan & di luar operasional Perusahaan.
- Bantuan peningkatan kesehatan. Perseroan melakukan bantuan peningkatan kesehatan secara rutin, diantaranya dalam bentuk pengobatan gratis diantaranya kepada warga sekitar wilayah Cabang serta pengemudi di beberapa terminal, yaitu terminal Pulogadung, terminal Kampung Rambutan dan terminal Bekasi.
- Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.

Pengembangan sarana dan prasarana umum yang dilakukan Perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial Perusahaan diantaranya:

- Memberikan mobil kebersihan dan pembuatan bak sampah untuk meningkatkan pengelolaan sampah masyarakat sekitar
- Pembangunan taman, saluran dan sarana air bersih di lingkungan warga sekitar
- Pembangunan jembatan untuk penyeberangan orang
- Pembuatan rambu dan marka jalan
- Pembuatan MCK untuk masyarakat umum
- Bantuan material untuk perkerasan jalan
- Bantuan berupa alat musik untuk sanggar seni

- Bantuan sarana ibadah.

Upaya peningkatan sarana ibadah di wilayah masyarakat sekitar dilakukan dalam bentuk pembangunan tempat wudhu dan Madrasah, perbaikan sarana ibadah dan bantuan bahan material dalam pembangunan sarana ibadah.

- Bantuan pelestarian alam.
Program / kegiatan pelestarian alam yang dilakukan Perusahaan diantaranya: penanaman pohon di berbagai wilayah operasional Cabang; pemberian bibit pohon dan biopori; program "Bank Sampah"; dan sosialisasi larangan membuang sampah sekaligus melakukan pembersihan sampah di jalan tol.
- Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Perusahaan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dalam bidang pengembangan sosial masyarakat dengan memberikan pembinaan keterampilan membuat kue kering, membuat aksesoris dari manik-manik, pemberian mesin jahit dan pelatihan garmen, pemberian bibit kambing sebagai upaya menciptakan masyarakat yang mandiri, serta pemberian sembako. Bantuan program Bina Lingkungan selain diberikan di wilayah operasional Perusahaan, diberikan pula di wilayah Sukabumi, Cianjur, Tegal, Boyolali, Lamongan, Lampung, Padang, Aceh, Kepalaun Riau, Jambi dan Kendari.

Perpustakaan Keliling PT Jalantol Lingkarluar Jakarta



Perpustakaan keliling merupakan kegiatan Perusahaan yang dilakukan secara konsisten sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Lokasi penyebaran kegiatan perpustakaan keliling yang dilakukan oleh PT Jalantol Lingkarluar Jakarta meliputi TK dan Sekolah Dasar yang berada dalam koridor pengoperasian Jalan Tol JORR.

Peminat perpustakaan keliling PT JLJ tahun ini semakin meningkat, tidak hanya siswa TKK dan SD, tetapi para siswa SMP turut ikut serta menikmati bacaan di sekeliling mobil operasional pustaka melalui izin dari para guru, bahkan ada permintaan dari TPA (Taman Pendidikan Agama) untuk dapat menikmati gelar perpustakaan keliling.

Tujuan dilaksanakannya program perpustakaan keliling diantaranya:

- Merangsang pertumbuhan maupun peningkatan kesadaran untuk melakukan aktifitas membaca sebagai bagian dari budaya.
- Menumbuh-kembangkan komunikasi dan sosialisasi kepada komunitas pendidikan / sekolah – sekolah di sekitar koridor tentang keberadaan Perusahaan yang berimbas pada corporate image yang positif.
- Sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang harus diemban oleh Perusahaan pada wilayah pengoperasian Perusahaan.

70 tahun Indonesia Merdeka Jasa Marga Hadir untuk Negeri



Partisipasi Jasa Marga dalam memeriahkan HUT RI ke-70 kali ini mengusung tema “70 tahun Indonesia Merdeka Jasa Marga Hadir untuk Negeri”, dengan melakukan kegiatan Program Bina Lingkungan (CSR) di seluruh Cabang Jasa Marga dengan program 17.8.45. Penjelasan sebagai berikut:

- Pemberian bantuan renovasi kepada 17 Sekolah Dasar di Wilayah Operasional Jasa Marga, masing-masing cabang melakukan bantuan kepada 2 Sekolah Dasar dengan biaya maksimal 100.000.000 (seratus juta rupiah)/sekolah.

Jumlah bantuan renovasi sekolah untuk seluruh cabang adalah sebesar 1,572,496,542 (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)

- Pemberian bantuan air bersih selama 8 (delapan) hari untuk wilayah yang mengalami kekeringan di Wilayah Operasional Jasa Marga. Masing-masing cabang dengan kapasitas tanki 8000 liter sehari 2 rits. Jumlah bantuan air bersih untuk seluruh cabang adalah Rp.173.903.100 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu seratus rupiah).
- Pemberian bantuan untuk guru-guru teladan tingkat SD dan SMP sebanyak 45 (empat puluh lima) buah sepeda motor. Masing-masing cabang memberikan bantuan kepada 5 (lima) orang guru teladan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat. Jumlah bantuan sepeda motor untuk seluruh cabang adalah sebesar Rp. 737.825.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dampak Keuangan dari Kegiatan

Dampak keuangan dari tanggung jawab Perseroan terhadap pengembangan sosial dan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 23,95 miliar. Dana tersebut direalisasikan pada Program Kemitraan senilai Rp 15,04 miliar untuk 451 Mitra Binaan dan senilai Rp 8,91 miliar untuk Program Bina Lingkungan.

1. Program Kemitraan

Sektor Usaha	Mitra Binaan	Jumlah Biaya (Rp)
Industri	59	2,180,000,000
Jasa	63	2,215,000,000
Perdagangan	322	10,325,000,000
Pertanian	4	165,000,000
Perkebunan	1	35,000,000
Peternakan	2	120,000,000
TOTAL	451	15,040,000,000

2. Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan	Total Biaya (Rp)
Kesehatan	484,422,700
Pendidikan	3,345,465,237
Sarana Umum	1,652,127,424
Sarana Ibadah	1,625,653,383
Bencana Alam	248,030,300
Pelestarian Alam	156,848,160
Pengentasan Kemiskinan	436,671,000
Pelatihan	94,325,000
Pameran	865,360,000
TOTAL	8,908,902,204

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No.: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara untuk Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra Binaan Program Kemitraan menjadi bagian dalam penyaluran Program Bina Lingkungan. Adapun dana hibah sebelum PER-09/MBU/07/2015 adalah pelatihan sebesar Rp 63.475.313 dan pameran sebesar Rp 619.729.909.

Tanggung Jawab kepada Konsumen

Perseroan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai aspek yang mendasar dan penting. Keamanan, kenyamanan dan kelancaran di jalan tol bagi pengguna jalan tol adalah komitmen Perseroan untuk mewujudkan kepuasan pelanggan.

Kebijakan

Industri jalan tol di Indonesia mempunyai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16/PRT/M/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal yang harus dicapai Badan Usaha Jalan Tol dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Untuk memenuhi SPM tersebut, Perseroan mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SE-DIR/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang Pedoman Pengukuran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol serta Kebijakan Direksi No. 111/KPTS/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Pedoman Pelayanan Ekselen di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Survey Kepuasan Pelanggan

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk memenuhi tanggung jawab kepada pengguna jalan tol sebagai konsumen atau pelanggan. Salah satunya melalui Survey Kepuasan Pelanggan yang rutin dilakukan setiap tahun. Tujuan dilakukannya Survey Kepuasan Pelanggan adalah :

- Mengetahui *customer profile* baik berdasarkan karakteristik pelanggan (sosial demografi) maupun karakteristik *mobility*;
- Mengetahui *customer behaviour* yang berhubungan dengan layanan jalan tol;
- Mendapatkan *customer perception* dan jenis layanan termasuk mengetahui alasan pelanggan menggunakan jalan tol dan *needs and wants* pengguna jalan tol terhadap jasa layanan Jasa Marga;
- Mengukur *customer index*, yakni indeks kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan, prioritas kebutuhan pelanggan, *priority for improvement*, kecepatan respon dan penyelesaian komplain pelanggan, dan indeks loyalitas pelanggan;
- Mengukur media *effectiveness* untuk berkomunikasi dengan para pelanggan Tahun 2015

Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Jalan Tol Tahun 2015, Indeks Kepuasan Pelanggan Jalan Tol Perseroan adalah 4,2 dalam skala 1-6.

Jasa Marga berkomitmen untuk mengimplementasikan program kepuasan pelanggan, dengan mengkampanyekan pentingnya pelayanan prima atau **Service Excellence** dengan prioritas utama pada aspek keselamatan pekerja, area kerja, perlengkapan dan lingkungan. komitmen ini dilakukan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecepatan waktu transaksi guna mengurangi antrian di gerbang-gerbang tol.
2. Memperlancar lalu lintas melalui peningkatan kapasitas layanan dan pemberian informasi lalu lintas yang **real time** dalam rangka mengurangi gangguan perjalanan.
3. Meningkatkan kualitas konstruksi jalan, jembatan dan bangunan pelengkap operasional.

Kegiatan Yang Dilakukan

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum

Beberapa cara telah dilakukan dan disempurnakan pada tahun 2015, tidak lain untuk memberikan kenyamanan dan jaminan perlindungan konsumen melalui jalan tol yang lancar aman dan nyaman. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16/PRT/M/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal yang harus dicapai Badan Usaha Jalan Tol dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Salah satu poin penting dalam evaluasi SPM BPJT adalah indikator *Rutting* (tidak ada *rutting* 100%), Tempat Istirahat dan Pelayanan (TI/TIP), Sistem Informasi Kondisi Lalu Lintas (VMS sebelum akses masuk dan di ruas jalan tol), Lingkungan (kebersihan, tanaman dan rumput) yang menjadi persyaratan baru produk layanan jalan tol. Evaluasi dan penilaian SPM BPJT menunjukkan hasil bahwa jalan tol Perseroan telah memenuhi standar penyediaan informasi produk layanan yang mendukung keamanan bagi pelanggan. Peningkatan kualitas dari produk layanan ini terus ditingkatkan dengan target melebihi standar peraturan yang berlaku (*beyond the standard*).

Dalam rangka senantiasa meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jalan tol sebagai pelanggan Perseroan, selain juga untuk pemenuhan SPM, Perseroan selama tahun 2015 diantaranya melakukan hal-hal sebagai berikut:

STRATEGI PELAYANAN DAN APLIKASINYA DI JALAN TOL

Strategi Pelayanan	Aplikasi di Jalan Tol
Meningkatkan akurasi pendapatan tol sehingga tercapai <i>zero loss</i> melalui peningkatan sistem pengamanan pendapatan tol yang dilakukan secara bertahap dengan prioritas cabang yang memiliki volume lalu lintas tinggi dan melakukan pergantian peralatan tol yang berumur lebih dari 5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan GTO Entrance, Gardu Exit dan GTO e-Toll. 2. Pemasangan CCTV, RTMS, TCT, ALB, <i>magazine train</i> dalam gardu tol. 3. Peningkatan peralatan tol.
Menciptakan jalan tol yang lancar, aman dan nyaman melalui modernisasi teknologi operasi dengan penerapan teknologi diutamakan pada ruas-ruas jalan tol dengan volume lalu lintas tinggi dan meningkatkan pusat layanan informasi lalu lintas dan pengaduan yang dengan mudah dapat diakses dan selalu <i>real time</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana teknologi operasional (CCTV, VMS, RTMS, Fiber Optik). 2. Pengadaan sarana penunjang operasional (radio komunikasi, GPS, <i>speed gun</i>, <i>retroreflektometer</i>, <i>moving roller</i>, alat pemadam kebakaran). 3. Pengecatan marka jalan lajur khusus GTO dan pengadaan pemasangan portal GTO. 4. <i>Zero Potholes</i> dan <i>preventive maintenance</i>. 5. Program <i>Scrapping-Filling-Overlay</i> (SFO) diutamakan pada lokasi-lokasi dengan repetisi beban dan atau tingkat kerusakan (kondisi jalan) kritis. 6. Program peningkatan kapasitas diprioritaskan pada ruas jalan tol dengan V/C rasio mendekati 0.8 berdasarkan PPJT. 7. Modernisasi penggunaan teknologi operasi tepat guna dan inovatif dengan penggunaan material yang bernilai ekonomi tinggi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pemeliharaan serta memastikan ketersediaan fungsi dan sarana penunjang/pelengkap jalan tol guna menjaga keamanan dan keselamatan sesuai dengan koridor syarat-syarat SPM. 8. Responsif terhadap upaya-paya pelestarian alam melalui penghutan jalan tol dalam rangka mendukung program pengurangan emisi karbon dan penggunaan <i>green technology</i> dan <i>green construction</i>.



Pelayanan kepada Konsumen saat Arus Mudik Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru

Dalam menghadapi arus mudik Idul Fitri, Natal 2015 dan Tahun Baru 2016, Perseroan melakukan berbagai upaya untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas. Hal tersebut dilakukan sebagai komitmen Perseroan untuk terus memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jalan. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut

1. Rekayasa Lalu Lintas Arus Mudik yaitu dengan memberlakukan contra flow di beberapa ruas tol yang padat volume lalu lintas
2. Optimalisasi layanan transaksi dengan menambah gardu operasi dan perubahan mekanisme transaksi
3. Peningkatan layanan informasi melalui twitter @PTJASAMARGA dan Jasa Marga Traffic Information Center (JMTIC), dimana pengguna jalan dapat memperoleh informasi mengenai kondisi lalu lintas beserta permintaan layanan lalu

lintas seperti Derek, Ambulans maupun Patroli Layanan Jalan Tol dengan menghubungi Call Center JMTIC di nomor 14080.

4. Posko Pelayanan Terpadu untuk memantau kondisi arus lalu lintas arus mudik dan balik pada ruas jalan tol yang menjadi lintasan utama arus lalu lintas saat Mudik Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
5. Kampanye keselamatan guna menunjang kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas. Kampanye keselamatan dilakukan dengan menyampaikan pesan yang informatif kepada pengguna jalan melalui pemasangan spanduk keselamatan lalu lintas dan *Variable Message Sign (VMS)*
6. Layanan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) yang memadai

Perlindungan terhadap Konsumen

Dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna jalan tol, Perseroan terus mengembangkan dan memperbaharui sistem pelayanan informasi, transaksi dan konstruksi.

Pelayanan Informasi

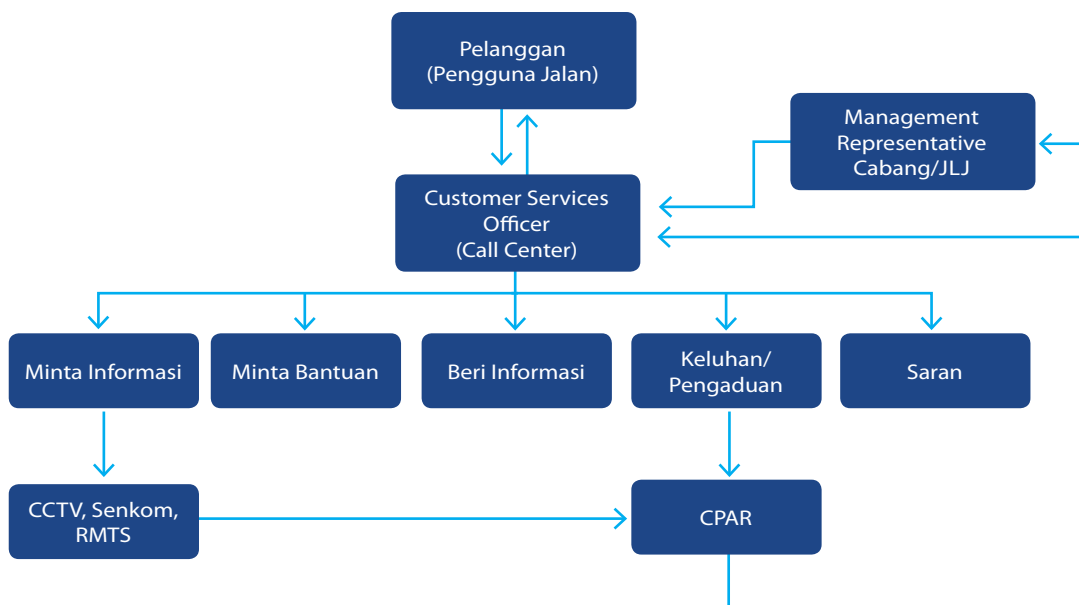
Dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna jalan tol, Perseroan terus mengembangkan dan memperbaharui sistem pelayanan informasi, lalu lintas, transaksi dan konstruksi.

1. Jasa Marga Traffic Information Center (JMTIC)

Sebagai sarana penyediaan informasi produk layanan yang mendukung keamanan bagi pelanggan, Jasa Marga memiliki pusat informasi, yakni Jasa Marga Traffic Information Center (JMTIC) yang merupakan media komunikasi bagi para pemakai jalan tol. JMTIC akan mencatat dan menindaklanjuti pertanyaan dan keluhan pemakai jalan. Pada tahun 2015, Perseroan meluncurkan *line call center* baru yaitu 14080.



SKEMA ALUR PENYEDIAAN INFORMASI MELALUI JMTIC



Sepanjang tahun 2015, jumlah telpon yang masuk sebanyak 500.214 telpon menurun 17,92% dari tahun 2014 yang menerima total 609.439 telpon.

TUJUAN PENELEPON MENGHUBUNGI JMTIC TAHUN 2014 DAN 2015

No.	Tujuan	2014	% thd Total 2014	2015	% thd Total 2015
1.	Minta Informasi	593.158	97,33%	492.379	80,79%
2.	Minta Bantuan	12.580	2,06%	5.429	0,89%
3.	Beri Informasi	2.548	0,42%	1.775	0,29%
4.	Pengaduan/Keluhan	1.049	0,17%	568	0,09%
5.	Saran	104	0,02%	63	0,01%
TOTAL		609.439		500.214	

Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap *call center* JMTIC, Perseroan aktif melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan tol melalui iklan di media *online* (www.detik.com) dan *Variable Message Sign* (VMS).

2. **Twitter @PTJASAMARGA**

Perseroan memahami bahwa setiap pengguna jalan tol menghendaki kemudahan dalam mengakses informasi mengenai kondisi lalu lintas di jalan tol. Seiring meningkatnya kebutuhan pengguna jalan tol akan informasi kondisi lalu lintas terkini dan demi meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol, selain menyediakan Layanan *Call Center*, JMTIC juga menyediakan akses kepada pengguna jalan tol melalui twitter @PTJASAMARGA. Saat ini, *twitter* @PTJASAMARGA dikendalikan oleh seorang operator *twitter* yang terintegrasi dengan unit kerja JMTIC.

Informasi yang masuk dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Minta informasi kondisi lalu lintas
- b. Minta bantuan petugas
- c. Memberikan informasi kondisi lalu lintas
- d. Pengaduan/keluhan/kritik
- e. Saran
- f. Pertanyaan (Selain informasi kondisi lalu lintas)

Saat ini *twitter* @PTJASAMARGA memberikan informasi kondisi lalu lintas setiap 30 menit sekali. Pada tahun 2015, jumlah *follower twitter* Jasa Marga mencapai 161.105 *follower*, meningkat 60.575 *follower* atau 60,62% dibanding tahun 2015.

3. **Website www.jasamarga.com**

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan dituntut untuk tampil dengan citra positif yang terus meningkat. Selain itu tuntutan keterbukaan informasi perusahaan yang cepat, tepat dan akurat merupakan salah satu ciri perusahaan terbuka. Guna hal tersebut Perseroan telah memiliki media sosialisasi dan informasi *online* yang mendukung strategi komunikasi perusahaan yaitu www.jasamarga.com.

4. **Website www.jasamargalive.com dan m.jasamargalive.com**

Untuk mendapatkan informasi kondisi visual lalu lintas di jalan tol secara *real time*, Perseroan menyediakan fasilitas aplikasi pemantau CCTV lajur jalan tol yang dapat diakses melalui *browser* lintas sistem operasi (*inter-platform*). Untuk pengguna komputer Desktop berbagai jenis sistem operasi, seperti Microsoft Windows, Apple MacOS ataupun Linux, dapat mengakses CCTV tersebut pada alamat www.jasamargalive.com. Sedangkan untuk pengguna yang memakai gadget seperti Google Android ataupun Apple iOS bisa mengakses CCTV tersebut pada alamat m.jasamargalive.com. Hal ini dilakukan agar pengguna jalan tol bisa mengakses data yang disajikan Perseroan dengan berbagai macam komputer dan *gadget* terkini. Untuk dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan penyajian informasi lalu lintas secara *real time*, pada tahun 2015, Perseroan melakukan kegiatan pemeliharaan rutin dan optimalisasi peningkatan kemampuan *streaming* dengan peningkatan *server*.

Pelayanan Operasional

Untuk peningkatan pelayanan di bidang transaksi, Perseroan melakukan berbagai upaya diantaranya peningkatan jumlah Gardu Tol Otomatis (GTO) pada ruas-ruas yang dikelola menjadi sejumlah 399 gardu atau sebesar 40% dari total gardu operasi. Pada bulan Desember tahun 2014, Perseroan bekerja sama dengan Bank Mandiri juga telah melakukan launching penerapan e-toll card di sistem tertutup pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Jagorawi. Ke depannya, di tahun 2016 Perseroan menargetkan dapat menambah jumlah GTO menjadi sebesar 50% dari total gardu operasi.

Dalam menjaga kenyamanan, keamanan dan kelancaran di jalan tol, Perseroan senantiasa menjaga kualitas jalan tol yang dikelola melalui program-program sebagai berikut:

1. *Scrapping Filling Overlay (SFO)*
Pada tahun 2015, Perseroan telah melakukan kegiatan SFO untuk menjaga kualitas jalan tol yang tersebar di seluruh ruas yang dikelola oleh Perseroan. Perseroan mengeluarkan dana sekitar Rp 294 miliar untuk kegiatan tersebut.
2. Penerangan jalan tol
Tahun 2015, sarana elektronik jalan tol berupa penerangan jalan tol melingkupi 13.336 titik lampu PJU.

Dampak Keuangan

Nilai biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen selama tahun 2015 adalah sebesar Rp Rp 296 miliar.



**Tanggung Jawab
Manajemen Atas
Laporan Tahunan
2015**



Surat Pernyataan Anggota Tentang Tanggung Jawab Atas PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tahun 2015 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2016

Dewan Komisaris



Refly Harun
Komisaris Utama/
Komisaris Independen



Akhmad Syakhroza
Komisaris



Hambra
Komisaris



Boediarso Teguh Widodo
Komisaris



Taufik Widjoyono
Komisaris



Sigit Widyawan
Komisaris Independen

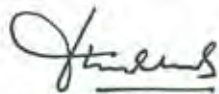
Dewan Komisaris dan Direksi

Laporan Tahunan 2015

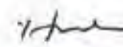
Direksi



Adityawarman
Direktur Utama



Christantio Prihambodo
Direktur Operasi



Hasanudin
Direktur Pengembangan Usaha



Reynaldi Hermansjah
Direktur Keuangan/Direktur Independen



Achiran Pandu Djajanto
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko



Muh Najib Fauzan
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum

Daftar Istilah

Istilah/ Singkatan	Keterangan
JSMR	Jujur, Sigap, Mumpuni dan Respek Tata Nilai Jasa Marga yang menjadi landasan setiap Insan Jasa Marga dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. JSMR juga merupakan kode ticker saham Jasa Marga.
JMTIC	Jasa Marga Traffic Information Center Layanan call center Jasa Marga yang memberikan informasi mengenai kondisi ruas-ruas jalan tol Jasa Marga kepada pemakai jalan serta merupakan media untuk menerima saran/keluhan dari pemakai jalan, dengan menghubungi 14080 .
GTO	Gardu Tol Otomatis Gardu tol dengan proses pelayanan transaksi secara swalayan dengan menggunakan peralatan tol.
e-Toll Card	Kartu yang digunakan untuk transaksi pembayaran tol secara elektronik.
e-Toll Pass	Sistem transaksi tanpa henti pada GTO, dengan menggunakan e-Toll Card yang dipasang pada OBU.
OBU	On Board Unit Alat penunjang transaksi tanpa henti yang terpasang di kendaraan yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara transceiver dan kartu pembayaran elektronik (e-Toll Card).
VMS	Variable Message Sign Papan rambu elektronik yang menampilkan informasi mengenai kondisi lalu lintas jalan tol.
RTMS	Remote Traffic Microwave Sensor Sensor yang dipasang di jalan tol untuk mendeteksi kecepatan kendaraan yang melewati jalan tol.
CCTV	Closed Circuit Television Perangkat kamera video digital yang dipasang di suatu tempat agar situasi dan kondisi di tempat tersebut dapat dipantau melalui layar monitor dari tempat lain.
KTME	Kartu Tanda Masuk Elektronik Tanda bukti masuk jalan tol pada sistem tertutup yang dalam pengoperasiannya menggunakan chip, berfungsi untuk menyimpan identitas kendaraan berupa golongan kendaraan dan asal gerbang yang dilakukan secara elektronik oleh peralatan tol.
TCT	Toll Collector Terminal Peralatan transaksi lalu lintas/kendaraan pada gardu tol berupa komputer khusus yang digunakan untuk menerima dan melayani transaksi serta terhubung dengan berbagai jenis peralatan utama dan peralatan pendukung sesuai dengan jenis gardu.
ALB	Automatic Lane Barrier Peralatan manajemen lalu lintas pada gardu tol yang dilengkapi dengan palang pintu yang dipasang di lajur gardu tol dengan fungsi sebagai penghalang lajur yang bekerja secara otomatis.
Magazine Train	Rel untuk mengangkut tempat KTME.
SPM	Standar Pelayanan Minimal Ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol.
Zero Pothole	Tidak ada lubang Salah satu tolok ukur dalam SPM dalam aspek kondisi jalan, yaitu tidak ada lubang 100%.
SFO	Scrapping Filling Overlay Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk menjaga aspal jalan tol tetap pada kondisi baik.
V/C ratio	Volume/Capacity Ratio Rasio yang digunakan untuk mengukur kepadatan kendaraan di jalan tol.
PJU	Penerangan Jalan Umum Lampu yang dipasang pada sisi jalan tol untuk menerangi jalan tol.
PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol Badan yang merupakan regulator di industri jalan tol di Indonesia yang berada di bawah Kementerian PUPR dan bertanggung jawab kepada Menteri PUPR.
PPJT	Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Perjanjian antara Kepala BPJT yang ditugaskan Menteri PUPR atas nama Pemerintah dengan BUJT untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol.
BUJT	Badan Usaha Jalan Tol Perusahaan pengelola jalan tol yang didirikan untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol.
TPT	Tim Pengadaan Tanah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat (Menteri PUPR) dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol dan berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR.
P2T	Panitia Pengadaan Tanah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
CPAR	Corrective Preventive Action Request Langkah-langkah perbaikan dalam suatu proses atas ketidaksesuaian yang ditemukan untuk segera ditindaklanjuti, dilakukan koreksi dan dicegah supaya tidak terulang lagi.

Referensi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
I.	Umum	
1.	Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal Laporan Tahunan juga dibuat selain dalam Bahasa Indonesia, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, maka Laporan Tahunan dimaksud harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah Laporan Tahunan dalam Bahasa Indonesia.	✓
2.	Laporan Tahunan wajib dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Gambar, grafik, tabel, dan diagram disajikan dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas.	✓
3.	Laporan Tahunan wajib dicetak pada kertas berwarna terang yang berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dimungkinkan untuk direproduksi dengan fotokopi.	✓
4.	Laporan Tahunan ditampilkan di website perusahaan.	✓
II.	Ikhtisar Data Keuangan Penting	
1.	Ikhtisar data keuangan penting disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun, yang memuat paling kurang:	
1.	Pendapatan.	50-51
2.	Laba bruto.	50-51
3.	Laba (rugi).	50-51
4.	Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	50-51
5.	Total laba (rugi) komprehensif.	50-51
6.	Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	50-51
7.	Laba (rugi) bersih per saham.	50-51
8.	Jumlah aset.	50-51
9.	Jumlah liabilitas.	50-51
10.	Jumlah ekuitas.	50-51
11.	Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	50-51
12.	Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	50-51
13.	Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan.	50-51
14.	Rasio lancar.	50-51
15.	Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	50-51
16.	Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	50-51
17.	Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya.	50-51
2.	Laporan Tahunan wajib memuat informasi mengenai saham yang diterbitkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling kurang meliputi:	
1.	Jumlah saham beredar.	53-54
2.	Jumlah saham beredar.	53-54
3.	Kapitalisasi pasar.	53-54
4.	Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan.	53-54
5.	Volume perdagangan.	53-54
3.	Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai nominal saham, maka informasi harga saham sebagaimana dimaksud dalam angka (2), wajib ditambahkan penjelasan antara lain mengenai:	-
1.	Tanggal pelaksanaan aksi korporasi.	-
2.	Rasio <i>stock split</i> , <i>reverse stock</i> , dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai saham.	-
3.	Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi.	-
4.	Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.	-
4.	Dalam hal perdagangan saham perusahaan dihentikan sementara (suspension) dalam tahun buku, maka Laporan Tahunan wajib memuat penjelasan mengenai alasan penghentian sementara tersebut.	-

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
5.	Dalam hal penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka (4) masih berlangsung hingga tanggal penerbitan Laporan Tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan pula tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut.	-
III.	Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:	
1.	Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan.	78-79
2.	Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi.	80
3.	Perubahan komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada).	77-78
IV.	Laporan Direksi Laporan Direksi paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:	
1.	Kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan.	84-86
2.	Gambaran tentang prospek usaha.	86
3.	Penerapan tata kelola perusahaan.	87
4.	Perubahan komposisi Direksi dan alasan perubahannya (jika ada).	84
V.	Profil Perusahaan Profil perusahaan paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:	
1.	Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, alamat surat elektronik (email), dan laman (website) perusahaan dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan, yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perusahaan.	4, 46-49
2.	Riwayat singkat perusahaan.	14-15
3.	Kegiatan usaha perusahaan menurut Anggaran Dasar terakhir, serta jenis produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	5, 15
4.	Struktur organisasi perusahaan dalam bentuk bagan, paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan.	20-21
5.	Visi dan Misi perusahaan.	7
6.	Profil Dewan Komisaris, meliputi:	
1.	Nama.	34-35
2.	Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukan pertama kali pada Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam Berita Acara Keputusan RUPS.	34-35
3.	Riwayat pendidikan.	34-35
4.	Penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	243
5.	Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta Pemegang Saham (jika ada).	271
7.	Profil Direksi, meliputi:	
1.	Nama dan uraian singkat tentang tugas dan fungsi yang dilaksanakan.	252-258
2.	Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukan pertama kali pada Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam Berita Acara Keputusan RUPS.	36-37
3.	Riwayat pendidikan.	36-37
4.	Penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	261
5.	Pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya dan Pemegang Saham (jika ada).	271
8.	Dalam hal terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf a, maka susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang terakhir dan sebelumnya.	-
9.	Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya dalam tahun buku misalnya, aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dilakukan.	32-33, 183-187

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
10.	Uraian tentang nama Pemegang Saham dan persentase kepemilikannya pada akhir tahun buku yang terdiri dari:	
1.	Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima per seratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.	59
2.	Komisaris dan Direktur yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik.	60
3.	Kelompok Pemegang Saham masyarakat, yaitu kelompok Pemegang Saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima per seratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik.	59
11.	Informasi mengenai Pemegang Saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram.	59
12.	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada). Untuk entitas anak, agar ditambahkan informasi mengenai alamat.	22-27, 47-48
13.	Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham perusahaan dicatatkan (jika ada).	58
14.	Kronologis pencatatan Efek lainnya dan peringkat Efek (jika ada).	58-59
15.	Nama dan alamat perusahaan pemeringkat Efek (jika ada).	
16.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal. Terhadap profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, wajib diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, fee, dan periode penugasan yang telah dilakukan.	48-49
17.	Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada).	68-73
VI.	Analisa dan Pembahasan Manajemen	
	Laporan Tahunan wajib memuat uraian yang membahas dan menganalisis Laporan Keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling kurang mencakup:	
1.	Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengenai:	
1.	Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya.	91-114
2.	Pendapatan.	91-114
3.	Profitabilitas.	91-114
2.	Analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, antara lain mengenai:	
1.	Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.	126-136
2.	Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas.	137-143
3.	Ekuitas.	144
4.	Pendapatan, beban, laba (rugi), pendapatan komprehensif lain dan total laba (rugi) komprehensif.	115-126
5.	Arus kas.	144-145
3.	Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	146
4.	Tingkat kolektibilitas piutang perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	146
5.	Struktur permodalan dan kebijakan Manajemen atas struktur permodalan tersebut.	147
6.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	147
7.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.	147
8.	Prospek usaha dari perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	148
9.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.	147

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
10.	Target/proyeksi yang ingin dicapai perusahaan paling lama untuk satu tahun mendatang, mengenai pendapatan, laba (rugi), struktur modal, kebijakan dividen, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.	147
11.	Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar.	148
12.	Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas) dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir.	148
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum:	
1.	Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana, maka wajib diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku.	149
2.	Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.4, maka Emiten wajib menjelaskan perubahan tersebut.	-
14.	Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku (jika ada), yang antara lain memuat:	151
1.	Tanggal, nilai dan obyek transaksi.	151
2.	Nama pihak yang bertransaksi.	151
3.	Sifat Hubungan afiliasi (jika ada).	151
4.	Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.	151
5.	Pemenuhan ketentuan terkait.	151
15.	Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap Laporan Keuangan (jika ada).	151
16.	Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap Laporan Keuangan (jika ada).	151-153
VII. Tata Kelola Perusahaan		
Tata kelola perusahaan memuat uraian singkat, yang paling kurang meliputi hal-hal sebagai berikut:		
1.	Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	
1.	Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	233-241
2.	Pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris.	247-248
3.	Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut.	243-245, 268-270
2.	Direksi, mencakup antara lain:	
1.	Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.	252-258
2.	Pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Direksi, serta hubungan antara Remunerasi dengan kinerja perusahaan.	265-267
3.	Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut.	261-264
4.	Keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasinya pada tahun buku, serta alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.	222-229
5.	Pengungkapan kebijakan perusahaan tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi (jika ada).	272-273
3.	Komite Audit, mencakup antara lain:	
1.	Nama.	38
2.	Riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukan.	38
3.	Riwayat pendidikan.	38
4.	Periode jabatan anggota Komite Audit.	38
5.	Pengungkapan independensi Komite Audit.	276
6.	Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut.	277
7.	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (charter) Komite Audit.	278

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
4.	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, yang mencakup antara lain:	
1.	Nama.	39
2.	Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukan.	39
3.	Riwayat pendidikan.	39
4.	Periode jabatan anggota komite.	39
5.	Pengungkapan kebijakan perusahaan mengenai independensi anggota komite.	281
6.	Uraian tugas dan tanggung jawab.	280
7.	Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.	282
8.	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	283-285
5.	Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan.	
1.	Nama.	40
2.	Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukan.	40, 288
3.	Riwayat pendidikan.	40
4.	Periode jabatan Sekretaris Perusahaan.	40
5.	Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku.	287
6.	Uraian mengenai Unit Audit Internal.	
1.	Nama.	40
2.	Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukan.	40, 293
3.	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi Audit Internal (jika ada).	290
4.	Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal.	289
5.	Tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (charter) unit audit internal.	291
6.	Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku.	292-293
7.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern (internal control) yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai:	
1.	Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.	294
2.	Review atas efektivitas sistem pengendalian intern.	294
8.	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai:	
1.	Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan.	295-300
2.	Jenis risiko dan cara pengelolaannya.	301-305
3.	Review atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan.	305-310
9.	Perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang sedang menjabat, antara lain meliputi:	
1.	Pokok perkara/gugatan.	310-315
2.	Status penyelesaian perkara/gugatan.	310-315
3.	Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan.	310-315
10.	Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku terakhir (jika ada).	316
11.	Informasi mengenai kode etik dan budaya perusahaan (jika ada) meliputi:	
1.	Pokok-pokok kode etik.	317-318
2.	Pokok-pokok budaya perusahaan (corporate culture).	9
3.	Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya.	10-11
4.	Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan perusahaan.	9
12.	Uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain jumlah, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga exercise (jika ada).	320

Pembahasan & Penjelasan		Halaman
13.	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) di Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan (jika ada), antara lain meliputi:	
1.	Cara penyampaian laporan pelanggaran.	323
2.	Perlindungan bagi pelapor.	324
3.	Pihak yang mengelola pengaduan.	321
4.	Hasil dari penanganan pengaduan.	324
VIII. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan		
1.	Bahasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	
a.	Lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki, dan lain-lain.	338-339
b.	Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat perpindahan (turnover) karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain.	340-348
c.	Pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.	349-354
d.	Tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	355-360
1.	Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) pada Laporan Tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Tahunan kepada Bapepam dan LK, seperti Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) atau Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility Report).	✓
IX. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit		
	Laporan Keuangan Tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan wajib disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud wajib memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur pada Peraturan No. VIII.G.11 atau Peraturan No. X.E.1.	✓
X. Tanda Tangan Dewan Komisaris dan Direksi		
1.	Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.	✓
2.	Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dibubuhkan pada lembaran tersendiri dalam Laporan Tahunan dimana dalam lembaran dimaksud wajib mencantumkan pernyataan bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan, sesuai dengan Formulir No. X.K.6-1 Lampiran Peraturan ini.	362-363
3.	Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Laporan Tahunan.	-
4.	Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang menandatangani Laporan Tahunan wajib menyatakan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Laporan Tahunan.	-



Laporan Keuangan Konsolidasian



**PT Jasa Marga (Persero) Tbk
dan entitas anaknya/*and its subsidiaries***

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Consolidated financial statements as of December 31, 2015
and for the year then ended with independent auditors' report*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2015 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Board of Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	6	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7-189	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015
PT JASA MARGA (Persero) Tbk.
DAN ANAK PERUSAHAAN**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS AS AT
AND FOR THE PERIOD ENDED
DECEMBER 31, 2015
PT JASA MARGA (Persero) Tbk.
AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- | | | | | | | |
|----|-----------------|---|--------------------------------------|---|----|-------------------------------|
| 1. | Nama | : | Adityawarman | : | 1. | Name |
| | Alamat Kantor | : | Plaza Tol TMII – Jakarta Timur 13550 | : | | Office Address |
| | Alamat Domisili | : | - | : | | Domicile as Stated in ID Card |
| | Nomor Telepon | : | (021) 8413526 | : | | Phone Number |
| | Jabatan | : | Direktur Utama / President Director | : | | Position |
| 2. | Nama | : | Reynaldi Hermansjah | : | 2. | Name |
| | Alamat Kantor | : | Plaza Tol TMII – Jakarta Timur 13550 | : | | Office Address |
| | Alamat Domisili | : | - | : | | Domicile as Stated in ID Card |
| | Nomor Telepon | : | (021) 8413526 | : | | Phone Number |
| | Jabatan | : | Direktur / Director | : | | Position |

Menyatakan bahwa :

State that:

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1. | Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk; | 1. | <i>We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements PT Jasa Marga (Persero) Tbk;</i> |
| 2. | Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia; | 2. | <i>The financial statements have been prepared and presented in accordance with financial accounting standard in Indonesia;</i> |
| 3. | a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. | a. <i>All information contained in the financial statements is complete and correct;</i> |
| | b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | | b. <i>The financial statements do not contain misleading material information or facts, do not omit material information and facts.</i> |
| 4. | Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam perusahaan. | 4. | <i>We are responsible for the Company internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The Statement letter is made truthfully.

Jakarta, 29 Januari 2016 / Jakarta, January 29, 2016



Adityawarman
Direktur Utama
President Director

Reynaldi Hermansjah
Direktur
Director

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta 13550 – Indonesia
Tel. (62-21) 841 3520, 841 3530
Fax: (62-21) 840 1533, 841 3540
jasmar@jasamarga.com
www.jasamarga.com



Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kay. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel: +62 21 5289 6000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Lapran Auditor Independen

Laporan No. RPC-260/PSS/2016

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-260/PSS/2016

*The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Jasa Marga (Persero) Tbk*

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2015, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-260/PSS/2016 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasinya tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-260/PSS/2016 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Jasa Marga (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2015, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

As disclosed in Note 4 to the accompanying consolidated financial statements, the Company restated the consolidated financial statements as of December 31, 2014 and for the year then ended, and the consolidated statement of financial position as of January 1, 2014/December 31, 2013 as required by Indonesian Financial Accounting Standards. Our opinion is not modified in respect of this matter.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-260/PSS/2016 (lanjutan)

Report No. RPC-260/PSS/2016 (continued)

Hal lain

Other matter

Laporan keuangan konsolidasian PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya No. R/018.AGA/sat.3/2015 tanggal 28 Januari 2015 menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas laporan keuangan konsolidasian tersebut sebelum penyajian kembali sebagaimana didiskusikan di atas.

The consolidated financial statements of PT Jasa Marga (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2014 and for the year then ended, and the consolidated statement of financial position as of January 1, 2014/December 31, 2013 were audited by other independent auditors whose report No. R/018.AGA/sat.3/2015 dated January 28, 2015 expressed an unmodified opinion with emphasis of matter paragraph on such consolidated financial statements prior to the restatement discussed above.

Purwanto, Sungkoro & Surja

E. Batara Manurung, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0693/*Public Accountant Registration No. AP.0693*

29 Januari 2016/*January 29, 2016*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2015
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

(Disajikan kembali - Catatan 4/
As restated - Note 4)

	Catatan/ Notes	31 Desember 2015/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ December 31, 2014	1 Januari 2014/ 31 Desember 2013/ January 1, 2014/ December 31, 2013	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2c,2d,2o,2r, 5,45,49e	3.323.221.103	3.290.783.678	3.514.061.335	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	2d,2o,6,45,49e 2d,2o,7, 2d,2o,7,	6.955.133	7.143.512	6.627.910	Short-term investments
Piutang lain-lain	45,49a,49e	164.374.388	48.089.417	177.197.911	Other receivables
Persediaan	2e,8	20.153.707	21.959.567	-	Inventories
Biaya dibayar dimuka	2f,9	69.922.865	55.174.260	25.767.565	Prepayment
Pajak dibayar dimuka	2m,19a	144.419.307	122.633.703	64.649.664	Prepaid taxes
TOTAL ASET LANCAR		3.729.046.503	3.545.784.137	3.788.304.385	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain	2d,2o,7,45,49a,49e	132.813.579	99.281.519	19.750.666	Other receivables
Dana ditetapkan penggunaannya	2d,2o,10,45,49e	1.486.630.839	816.903.789	459.315.101	Restricted funds
Aset pajak tangguhan	19c	12.431.574	2.839.975	8.343.363	Deferred tax assets
Investasi pada entitas asosiasi - neto	2d,2g,2k,11	166.001.306	171.345.274	179.237.078	Investments in associates - net
Aset tetap - neto	2h,12	913.842.793	701.684.883	591.364.119	Fixed assets - net
Properti investasi	2i,13	84.335.110	-	-	Investment properties
Aset takberwujud - neto					Intangible assets - net
Hak pengusahaan jalan tol	2j,14	24.864.720.272	23.941.404.497	21.959.625.744	Toll road concession rights
Lainnya	15	3.957.069.367	2.169.943.359	641.118.536	Others
Goodwill	2b,16	41.848.567	41.848.567	41.848.567	Goodwill
Aset keuangan lainnya	2o,17,49e	329.107.444	244.607.444	244.607.444	Other financial assets
Aset tidak lancar lainnya	18	1.007.135.133	124.319.199	130.965.455	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		32.995.935.984	28.314.178.506	24.276.176.073	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		36.724.982.487	31.859.962.643	28.064.480.458	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2015
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

(Disajikan kembali - Catatan 4/
As restated - Note 4)

	Catatan/ Notes	31 Desember 2015/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ December 31, 2014	1 Januari 2014/ 31 Desember 2013/ January 1, 2014/ December 31, 2013	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	2d,2o,20 45,46,49e	137.465.749	182.096.348	100.031.436	Trade payables
Utang kontraktor	2d,2o,21 45,46,49e	1.661.724.335	998.080.943	1.153.448.281	Contractors payable
Utang pajak	2m,19b	163.865.088	263.524.321	107.060.403	Taxes payable
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	2o,22,49e	47.430.707	73.167.095	55.916.162	Other financial liabilities
Beban akrual	2o,23	356.947.861	320.441.733	346.614.375	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2n	132.089.594	84.437.680	118.064.239	Short-term employee benefits liability
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2o,49e				Current maturities of long-term liabilities
Utang bank	2d,24,45,46a	1.121.696.392	653.660.986	951.057.511	Bank loans
Utang lembaga keuangan bukan bank	25,46h 2d,26	1.347.897.302	-	-	Non-bank financial institutions loan
Utang obligasi	2d,26	1.477.377.192	-	700.000.000	Bonds payable
Liabilitas pembebasan tanah	2d,28	1.119.336.038	1.500.719.209	1.112.701.093	Land acquisition liabilities
Utang sewa pembiayaan	2h,2l,29	14.246.400	15.484.840	19.776.022	Capital lease payable
Provisi pelapisan jalan	2t,30	163.710.293	209.396.402	206.136.188	Provision for overlay
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		7.743.786.951	4.301.009.557	4.870.805.710	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Pendapatan diterima di muka	31	122.481.772	74.577.125	71.028.456	Unearned revenues
Liabilitas pajak tangguhan	2m,19c	556.877.839	390.457.191	334.801.040	Deferred tax liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2o,49e 2d,24,45				Long-term liabilities - net of current maturities
Utang bank	46a	7.303.051.412	6.484.840.290	5.320.197.953	Bank loans
Utang obligasi	2d,26	4.671.253.480	6.144.430.063	5.144.375.988	Bonds payable
Liabilitas kerjasama operasi	2d,27,46a 2d,28	820.300	22.206.213	22.206.213	Joint operation liabilities
Liabilitas pembebasan tanah	2l,29,46a	1.523.256.730	1.369.223.143	566.171.896	Land acquisition liabilities
Utang sewa pembiayaan		21.890.917	34.479.992	47.125.235	Capital lease payable
Provisi pelapisan jalan	2t,30	176.067.644	153.254.266	122.735.722	Provision for overlay
Liabilitas jangka panjang lainnya	2o,47h,49e	1.281.190.306	819.424.909	458.665.081	Other long-term liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2n,32	955.640.670	1.045.330.573	917.054.084	Long-term employee benefits liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		16.612.531.070	16.538.223.765	13.004.361.668	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		24.356.318.021	20.839.233.322	17.875.167.378	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2015
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

(Disajikan kembali - Catatan 4/
As restated - Note 4)

	Catatan/ Notes	31 Desember 2015/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ December 31, 2014	1 Januari 2014/ 31 Desember 2013/ January 1, 2014/ December 31, 2013	
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					Equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Modal saham - nilai nominal Rp500 (rupiah penuh) per saham					Capital stock - Rp500 par value (full amount) per share
Modal dasar - 19.040.000.000 saham					Authorized - 19,040,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham seri A Dwiwarna dan 6.799.999.999 saham seri B	33	3.400.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000	Issued and fully paid - 1 series A Dwiwarna share and 6,799,999,999 series B shares
Tambahan modal disetor - neto	34	2.453.890.100	2.453.890.100	2.453.890.100	Additional paid-in capital - net
Saldo laba		4.895.330.345	3.920.148.320	3.032.946.068	Retained earnings
Penghasilan komprehensif lain:					Other comprehensive income:
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	2d	2.425.483	2.613.862	2.098.260	Unrealized gain on available-for-sale securities
Kerugian aktuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2n,32	(333.140.643)	(316.506.521)	(259.191.934)	Actuarial loss on long-term employee benefits liability
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Nonpengendali	36a	10.418.505.285 1.950.159.181	9.460.145.761 1.560.583.560	8.629.742.494 1.559.570.586	Net Equity Attributable to Owners of the Parent Entity Non-Controlling Interests
TOTAL EKUITAS		12.368.664.466	11.020.729.321	10.189.313.080	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		36.724.982.487	31.859.962.643	28.064.480.458	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended
December 31, 2015
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,

	2015	Catatan/ Notes	2014 (Disajikan kembali - Catatan 4/ As restated - Note 4)	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan tol dan usaha lainnya	7.630.678.119	2q,37	7.227.786.012	Toll and other operating revenues
Pendapatan konstruksi	2.217.563.931	2q,38	1.946.031.295	Construction revenue
Total	9.848.242.050		9.173.817.307	Total
BEBAN PENDAPATAN				COST OF REVENUES
Beban tol dan usaha lainnya	(3.518.021.450)	2q,39	(3.562.757.971)	Toll and other operating expenses
Beban konstruksi	(2.202.400.639)	2q,38	(1.921.067.434)	Construction expense
Total	(5.720.422.089)		(5.483.825.405)	Total
LABA BRUTO	4.127.819.961		3.689.991.902	GROSS PROFIT
Penghasilan lain-lain	272.908.812	2q,41	287.857.608	Other income
Beban umum dan administrasi	(893.258.848)	2q,40	(884.842.796)	General and administrative expenses
Beban lain-lain	(29.804.780)	2q,42	(20.283.190)	Other expenses
LABA USAHA	3.477.665.145		3.072.723.524	PROFIT FROM OPERATIONS
Biaya keuangan - neto	(1.405.042.942)	43	(1.215.320.255)	Finance costs - net
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi	(4.317.970)	2g,11	(6.741.959)	Share in net loss of associates
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.068.304.233		1.850.661.310	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSE
Kini	(585.399.690)	2m,19c	(533.602.367)	Current
Tangguhan	(163.703.997)	2m,19c	(80.044.771)	Deferred
TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(749.103.687)		(613.647.138)	TOTAL INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	1.319.200.546		1.237.014.172	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya				Item that will not be reclassified to profit or loss in subsequent periods
Rugi aktuarial atas liabilitas imbangan kerja jangka panjang	(16.634.122)	32	(57.314.587)	Actuarial loss on long-term employee benefits liability
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya				Item that will be reclassified to profit and loss in subsequent period
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual	(188.379)		515.602	Unrealized gain (loss) on available-for-sale securities
BEBAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	(16.822.501)		(56.798.985)	OTHER COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.302.378.045		1.180.215.187	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to
Pemilik entitas induk	1.449.326.765		1.365.670.215	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	(146.948.720)		(185.455.028)	Non-controlling interests
TOTAL	1.302.378.045		1.180.215.187	TOTAL
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	1.466.381.586		1.421.729.172	Profit for the year attributable to
Kepentingan nonpengendali	(147.181.040)	36b	(184.715.000)	Owners of the parent entity
TOTAL	1.319.200.546		1.237.014.172	TOTAL
LABA PER SAHAM (RUPIAH PENUH)	215,64	2p,44	209,08 EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended December 31, 2015
(Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated)**

Enkita yang dapat ditelusuri kepada Pemilik Entitas Induk/Equity attributable to Owners of the Parent Entity

		Saldo labar/retained earnings											
		Saldo Laba/Retained Earnings					Penghasilan (laban) komprehensif lain/Other comprehensive income (loss)						
		Modal ditempatkan dan disetor penuh/Registered and share capital	Tambahan modal disetor/Additional paid-in capital - net	Tahap dibayar/ pengusutan/Approved	Belanja/ dikurangkan/ Appropriated	Total	Keuntungan (Rugi) ditransfer dari rekening lain/Unrealized gain (loss) on available-for-sale securities	Akumulasi kerugian potensial/Actual liabilities potential loss of long-term employee benefits liability	Total	Total	Keuntungan komprehensif/Noncontrolling interests	Total ekuitas/Total equity	
	Saldo awal 1 Januari 2014, setelah penyajian kembali	3.400.000.000	2.483.880.100	3.801.456.867	31.408.101	3.822.346.888	2.098.280	(258.191.924)	(297.093.674)	8.629.742.484	1.589.570.586	10.189.313.070	Balance, January 1, 2014, as restated
35	Oborangan umum/General reserve	-	-	776.790.041	(776.790.041)	-	-	-	-	(534.526.920)	-	(534.526.920)	Appropriated for general reserve
44	Liha tahun berjalan/Current year surplus	-	-	-	1.421.728.912	1.421.728.912	515.002	(37.314.587)	(37.314.587)	1.421.729.172	(184.716.000)	1.237.014.172	Rembursement of employee benefits obligations
	Pengukuran kembali kewajiban modal kerja/Measurement of employee benefits obligations	-	-	-	-	-	515.002	(37.314.587)	(37.314.587)	515.002	-	515.002	Resale new shares by subsidiaries to noncontrolling interest
	Pembelian saham baru oleh entitas anak kepada kepentingan nonpengendali/Share purchase by subsidiaries to noncontrolling interest	-	-	-	-	-	-	-	-	185.727.974	-	185.727.974	
	Saldo awal 31 Desember 2014, setelah penyajian kembali	3.400.000.000	2.483.880.100	3.822.246.808	116.922.312	3.820.148.320	2.613.862	(318.508.821)	(313.982.689)	9.469.145.781	1.569.858.580	11.029.728.321	Balance December 31, 2014, as restated
35	Oborangan umum/General reserve	-	-	252.000.000	(252.000.000)	-	-	-	-	(491.199.961)	-	(491.199.961)	Appropriated reserve
44	Liha tahun berjalan/Current year surplus	-	-	87.258.808	(87.258.808)	-	-	-	-	1.469.381.586	(147.181.040)	1.319.200.546	Other income for the year
	Pengukuran kembali kewajiban modal kerja/Measurement of employee benefits obligations	-	-	-	1.469.381.586	1.469.381.586	-	(16.634.122)	(16.634.122)	(16.634.122)	-	(16.634.122)	Rembursement of employee benefits obligations
	Pembelian saham baru oleh entitas anak kepada kepentingan nonpengendali/Share purchase by subsidiaries to noncontrolling interest	-	-	-	-	-	-	-	-	(188.379)	-	(188.379)	Resale new shares by subsidiaries to noncontrolling interest
	Saldo awal 31 Desember 2015	3.400.000.000	2.483.880.100	4.716.474.603	179.856.842	4.896.330.346	2.425.483	(333.140.643)	(330.716.180)	10.418.505.285	1.950.193.181	12.368.698.466	Balance, December 31, 2015

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year then ended
December 31, 2015
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
2015	Catatan/ Notes	2014 (Disajikan kembali- Catatan 4/As restated - Note 4)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pendapatan tol		6.646.392.546	Cash receipts from toll revenues
Penerimaan kas dari pendapatan lainnya	419.856.168	581.393.466	Cash receipts from other revenues
Pembayaran kepada pemasok	(1.649.711.061)	(1.954.389.874)	Cash paid to contractors
Pembayaran kepada karyawan	(1.585.759.184)	(1.288.704.552)	Cash paid to employees
Pembayaran beban kerjasama operasi	(294.224.080)	(313.039.817)	Cash paid to joint operation expenses
Pembayaran biaya pelapisan ulang	(289.329.811)	(348.405.365)	Overlay charges expenditure
Kas neto diperoleh dari operasi	3.721.856.733	3.323.246.404	Net cash generated from operations
Penerimaan bunga	178.822.453	255.622.494	Receipts from interest income
Pembayaran bunga	(1.172.057.381)	(1.117.383.678)	Interest paid
Pembayaran pajak penghasilan	(1.015.078.776)	(702.099.525)	Income tax paid
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.713.543.029	1.759.385.695	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan hak pengusahaan jalan tol	(3.366.145.268)	(3.327.023.000)	Acquisitions of toll road concession rights
Penambahan investasi jangka panjang - neto	(472.046.200)	-	Addition of long-term investment - net
Penambahan aset tetap	(174.763.419)	(232.164.307)	Acquisitions of fixed assets
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.012.954.887)	(3.559.187.307)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan liabilitas jangka panjang:			Proceeds from long-term liabilities:
Utang bank	1.936.892.064	1.225.125.080	Bank loans
Utang lembaga keuangan bukan bank	1.349.281.896	-	Non-bank financial institution loan
Penerbitan utang obligasi	-	997.124.948	Issuance of bonds payable
Penerimaan dari tambahan penerbitan saham di entitas anak oleh pihak nonpengendali	536.756.661	185.248.474	Proceeds from additional issuance of shares in a subsidiary to non-controlling interests
Pencairan (penempatan) dana ditetapkan penggunaannya - neto	47.199.454	(374.312.610)	Increase (decrease) of restricted fund - net
Pembayaran dividen	(491.199.561)	(537.102.256)	Payments of dividends
Pembayaran liabilitas jangka panjang:			Payments of long-term liabilities:
Utang bank	(821.884.270)	(495.195.199)	Bank loans
Utang obligasi	-	(700.000.000)	Bonds payable
Penerimaan (pembayaran) bantuan pembebasan tanah	(225.196.961)	1.275.635.518	Proceeds from (payment for) land acquisition loans
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	2.331.849.283	1.576.523.955	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	32.437.425	(223.277.657)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	3.290.783.678	3.514.061.335	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	3.323.221.103	3.290.783.678	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Informasi tambahan atas aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 50.

Supplementary information on non-cash activities is disclosed in Note 50.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Perusahaan") dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") No. 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia mengenai pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan, pemeliharaan dan pengadaan jaringan jalan tol, serta ketentuan-ketentuan pengusahaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 1978 juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/KMK.06/1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga, tanggal 27 Februari 1978). Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris Kartini Mulyadi, S.H., No. 1 tanggal 1 Maret 1978. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/130/1 tanggal 22 Februari 1982 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 766 dan No. 767, tanggal 2 Maret 1982 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tanggal 10 September 1982, tambahan No. 1138.

Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir diaktakan dalam akta notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., No. 61 tanggal 26 Maret 2015, mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan agar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0019825 tanggal 27 Maret 2015.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang perusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas.

1. GENERAL

a. The Company's establishment

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (the "Company") was established under the Government Regulation of the Republic of Indonesia (the "Government") No. 4 Year 1978 regarding the State Capital Investment for the establishment of a State-Owned Company (Persero) in the area of management, maintenance and development of toll roads, and the detailed management regulations (State Gazette No. 4 Year 1978 in conjunction with the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 90/KMK.06/1978 regarding the Determination of the Share Capital of the Company dated February 27, 1978). The Company was established based on Notarial Deed No. 1 dated March 1, 1978 of Kartini Mulyadi, S.H. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. Y.A.5/130/1 dated February 22, 1982 and was filed in Jakarta High Court No. 766 and 767 on March 2, 1982 and was published in the State Gazette No. 73, dated September 10, 1982, addition No. 1138.

The Company's articles of association has been amended several times, the latest amendment of which was notarized under deed No. 61 dated March 26, 2015 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., concerning the change of terms in the articles of association in compliance with the regulation of the Indonesian Financial Services Authority. The deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0019825 dated March 27, 2015.

According to Article 3 of the Company's articles of association, its scope of activities is mainly to engage in performing and assisting the Government's programs and policies in economy sector and generally in national development, especially in development of toll roads and all their supporting facilities while complying to the principles of limited liability company.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol;
- (ii) Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatot) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatot untuk tempat istirahat kendaraan dan pelayanan berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya, baik diusahakan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain; dan
- (iii) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, baik secara langsung maupun melalui penyertaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersial pada tahun 1978.

Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol: Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah. Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol. Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta. Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.

Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550. Perusahaan mengoperasikan 11 ruas jalan tol yang dikelola oleh sembilan kantor cabang dan 14 entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

a. The Company's establishment (continued)

To achieve these objecting, the Company performs the following activities:

- (i) Performs technical planning for construction, operation and/or maintenance of toll road;
- (ii) Organizes the land in toll road area (Rumijatot) and the land along the Rumijatot designated for vehicle rest area and service including the facilities and other businesses operating there either separately or in cooperation with other parties; and
- (iii) Performs other activities and business in order to utilize and develop the Company's resources, either directly or through investments, subject to laws and regulations.

The Company started its commercial operations in 1978.

The Company run their operations based on Law No. 38 year 2004 about the Road and PP No. 15 year 2005 regarding Toll road management authority of the government. Some of Government authority in the administration of toll roads are implemented by the Toll Road Regulatory Agency. Toll road concession are implemented by state-owned enterprises and/ or regional owned enterprises and/ or private companies. Concession are granted by the Government to the business entities through transparent and open auctions.

The Company's office is located in Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550. The Company operates 11 toll roads, which are managed by its nine branch offices and 14 subsidiaries, with detail as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Kantor Cabang/Branch Offices	Ruas Jalan Sections	Tol/Toll Road	Panjang Jalan/Length (KM)	Mulai konsesi (Tahun)/ Start of concession (Year)	Periode masa konsesi (Tahun)/Concession period (Year)
Jagorawi	Jakarta - Bogor- Ciawi		59	2005	40
Jakarta - Tangerang	Jakarta - Tangerang		33	2005	40
Cawang - Tomang - Cengkareng	Cawang - Tomang - Pluit dan/ and Prof. Dr. Ir. Sedyatmo		24 dan/and 14	2005	40
Surabaya - Gempol	Surabaya - Gempol		49	2005	40
Jakarta - Cikampek	Jakarta - Cikampek		83	2005	40
Purbaleunyi	Cikampek - Padalarang dan/and Padalarang - Cileunyi		59 dan/and 64	2005	40
Semarang	Semarang Seksi/Section A B C		25	2005	40
Belmera	Belawan - Medan - Tanjung Morawa		43	2005	40
Palikanci	Palimanan - Kanci		26	2005	40
Kantor Pusat	Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR)		49	2005	35

Selain itu, Perusahaan juga melakukan usaha lain melalui cabang sebagai berikut:

In addition, the Company also manages other business activities through its branches, as follows:

Kantor Cabang/Branch Offices	Jenis Usaha/ Nature of Business
<i>Unit Rest Area and Business*</i>	Pengelolaan <i>rest area</i> di jalan tol dan SPBU/ <i>Management of the rest area on the highway and gas stations</i>
<i>Jasa Marga Development Center</i>	Penyelenggara pelatihan dan pengembangan SDM/ <i>Organizes training and development of human resources</i>

*) Pada bulan Januari 2016, dilikuidasi dan dialihkan ke PT Jasa Marga Properti (JMP, entitas anak)

*) *In January 2016, Liquidated and diverted by PT Jasa Marga Properti (JMP, a subsidiary)*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum Perusahaan

Pada tanggal 1 Nopember 2007, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), selanjutnya menjadi Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, melalui Surat No. S-5526/BL/2007 untuk melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 2.040.000.000 saham atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp500 (rupiah penuh) setiap saham yang berasal dari saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan kepada masyarakat, dengan harga penawaran sebesar Rp1.700 (rupiah penuh) per saham melalui pasar modal dan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (selanjutnya digabung dan menjadi Bursa Efek Indonesia).

Sejak penawaran umum perdana sampai dengan tahun pelaporan terakhir Perusahaan melakukan aksi korporasi sebagai berikut:

1. Pembelian kembali saham Perusahaan pada 24 Oktober 2008 sampai dengan 12 Januari 2009 dilakukan mengingat kondisi pasar saham saat itu berpotensi krisis dimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) menurun cukup signifikan sehingga memberikan peluang pada Perusahaan untuk membeli kembali sahamnya dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Perusahaan dalam hal ini dibantu oleh PT Bahana Securities sebagai Perusahaan Wakil Perantara Perdagangan Efek. Dana yang dikeluarkan Perusahaan untuk membeli kembali 24.523.500 lembar saham (*Treasury Stock*) sejumlah Rp21.837.595.
2. Sesuai dengan Poin 4D Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-105/BL/2010, Peraturan XI.B2 perihal Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka *treasury stock* tersebut telah memasuki periode wajib menjual (sudah dikuasai Perusahaan selama 3 tahun) dan wajib untuk dijual kembali. Perusahaan dalam penjualan kembali saham *Treasury* dibantu oleh PT Danareksa Sekuritas. Masa penjualan berlangsung dari tanggal 5 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012.

1. GENERAL (continued)

b. The Company's initial public offering

On November 1, 2007, the Company received from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions (BAPEPAM-LK), currently known as the Indonesian Financial Services Authority, its notice letter No. S-5526/BL/2007, which stated the effectivity to conduct an Initial Public Offering (IPO) of 2,040,000,000 Series B shares with par value of Rp500 (full amount) of the Company at an offering price per share of Rp1,700 (full amount) through capital market and registered both in the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges (subsequently combined as the Indonesia Stock Exchange).

Since its initial public offering until the last reporting period, the Company has made the following corporate actions:

1. Buy back of the Company's shares on October 24, 2008 until January 12, 2009 was done considering the condition of the stock market, indication of potential crisis where the Composite Stock Price Index (CSPI) in Indonesia Stock Exchange (IDX) significantly decreased thus providing an opportunity for the Company to buy back its shares subject to the ability of the Company and applicable regulations. The Company, in this case, was aided by PT Bahana Securities as its Corporate Broker Securities Trading. Funds issued by the Company to buy back 24,523,500 shares (*Treasury Stock*) amounted to Rp21,837,595.
2. Based on Point 4D of Bapepam-LK Regulation No. KEP-105/BL/2010, XI.B2 Regulations regarding Buy Back Shares issued by the Issuer or Public Company, the Company has reached the maximum period of holding its treasury stock (already held by the Company for 3 years) and therefore it was mandatory for resale. The Company was aided by PT Danareksa Securities in the resale of treasury shares. Sales period lasted from April 5, 2012 to June 25, 2012.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum obligasi Perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah utang obligasi yang belum dilunasi atau belum jatuh tempo adalah sebesar Rp6.161.000.000, dengan rinciannya sebagai berikut:

No.	Obligasi/ Bonds	Total (Rp Juta)/ Par value (Rp Million)	Tenor (Tahun/ Years)	Tanggal Penerbitan/ Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Status
1.	Obligasi JORR II (A)	77.377	12	01/05/2006	01/05/2018	Belum lunas/ Not yet paid *)
2.	Obligasi JORR II (B)	77.377	12	01/05/2006	01/05/2018	Belum lunas/ Not yet paid *)
3.	Obligasi JORR II (C)	104.400	15	01/05/2006	01/05/2021	Belum lunas/ Not yet paid
4.	Jasa Marga XII (Q)	1.000.000	10	07/06/2006	07/06/2016	Belum lunas/ Not yet paid
5.	Jasa Marga XIII (R)	1.500.000	10	21/6/2007	21/6/2017	Belum lunas/ Not yet paid
6.	Jasa Marga XIV (JM - 10)	1.000.000	10	10/12/2010	10/12/2020	Belum lunas/ Not yet paid
7.	Jasa Marga Seri / Series S B	400.000	3	27/09/2013	27/09/2016	Belum lunas/ Not yet paid
8.	Jasa Marga Seri / Series S C	1.000.000	5	27/09/2013	27/09/2018	Belum lunas/ Not yet paid
9.	Jasa Marga Seri / Series T	1.000.000	5	19/09/2014	19/09/2019	Belum lunas/ Not yet paid

*) Dilunasi sebagian pada tanggal 24 November 2008 sebesar Rp923.

*) Partially paid on November 24, 2008, amounting to Rp923

d. Dewan komisaris dan direksi, komite audit serta karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. The Company's public bond offering

On December 31, 2015, the total amount of bonds that have not been paid or not yet reached their maturity date amounted to Rp6,161,000,000, with the as follows:

d. Boards of commissioners and directors, audit committee and employees

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors was as follows:

**31 Desember 2015/
December 31, 2015**

**31 Desember 2014/
December 31, 2014**

Direksi/Directors

Direktur Utama/President Director
Direktur/Director
Direktur/Director
Direktur/Director
Direktur/Director
Direktur/Director

Ir. Adityawarman
Ir. Hasanudin, M.Eng.Sc.
Ir. Reynaldi Hermansjah
Ir. Muh. Najib Fauzan, M.Sc.
Christantio Prihambodo, S.T.
Achiran Pandu Djajanto, S.H, M.M.

Ir. Adityawarman
Ir. Hasanudin, M.Eng.Sc.
Ir. Reynaldi Hermansjah
Ir. Abdul Hadi H.S, M.M.
Ir. Muh. Najib Fauzan, M.Sc.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan komisaris dan direksi, komite audit serta karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Komisaris Utama/*President Commissioner*
Komisaris/*Commissioner*
Komisaris/*Commissioner*
Komisaris/*Commissioner*
Komisaris/*Commissioner*
Komisaris Independen/*Independent Commissioner*
Komisaris Independen/*Independent Commissioner*

Susunan komite audit adalah sebagai berikut:

Komite Audit/Audit Committee

Ketua/*Chairman*

Anggota/*Members*

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, ketua unit audit internal masing-masing adalah Haris Prayudi dan Djoko Dwijono.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Sekretaris Perusahaan masing-masing adalah Mohammad Sofyan dan David Wijayatno.

Penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Perusahaan mengacu pada Peraturan Meneg BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 26. Unit audit internal merupakan bagian dari sistem pengendalian intern Perusahaan yang didalam pelaksanaan tugas auditnya menggunakan kerangka sistem pengendalian intern COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*).

1. GENERAL (continued)

d. Boards of commissioners and directors, audit committee and employees (continued)

The compositions of the Company's Boards of Commissioners and Directors are as follows: (continued)

**31 Desember 2015/
December 31, 2015**

**31 Desember 2014/
December 31, 2014**

Refly Harun, S.H, M.H, LL.M
Prof. Dr. Akhmad Syakhroza
Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E
Ir. Taufik Widjojono, M.Sc.
Hambra, S.H, M.Hum
Sigit Widyawan, S.E, M.Ak.
-

Ir. Agoes Widjanarko, MIP.
Ibnu Purna Muchtar, S.E., MA.
Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E.
Prof. Dr. Akhmad Syakhroza
-
Mayjen. (Purn) Samsuodin
Irjen Polisi (Purn) Drs. Michael
Dendron Primanto, S.H., M.H

The compositions of the audit committee is as follows:

**31 Desember 2015/
December 31, 2015**

**31 Desember 2014/
December 31, 2014**

Sigit Widyawan S.E., M.Ak.

Ir. Agita Widjajanto, M.Sc.
Drs. Rustam Wahyudi, Ak.

Irjen Polisi (Purn) Drs. Michael
Dendron Primanto, S.H., M.H.
Ir. Agita Widjajanto, M. Sc.
Drs. Rustam Wahyudi, Ak.

As of December 31, 2015 and 2014, the chairman of the internal audit unit are Haris Prayudi and Djoko Dwijono, respectively.

As of December 31, 2015 and 2014, the Corporate Secretary are Mohammad Sofyan and David Wijayatno, respectively.

Implementation of internal control systems made by the Company refers to the State Enterprises Minister Regulation No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at the State-owned Enterprise Article 26. Internal audit unit is part of the Company's system of internal control in the execution of audit assignments using the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) framework for internal control system.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan komisaris dan direksi, komite audit serta karyawan (lanjutan)

Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") memiliki 4.561 dan 4.692 karyawan tetap masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 (tidak diaudit).

e. Entitas anak yang dikonsolidasikan

Entitas anak yang dimiliki Perusahaan, secara langsung maupun tidak langsung, adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Board of commissioners and directors, audit committee and employees (continued)

The Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group") had 4,561 and 4,692 permanent employees as of December 31, 2015 and 2014, respectively (unaudited).

e. Consolidated subsidiaries

The Company's subsidiaries, directly or indirectly owned, are as follows:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Aktivitas utama/ Principal activity	Domisili/ Domicile	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Periode masa konsesi (Tahun)/ Concession period (Year)	Total aset sebelum eliminasi (dalam jutaan rupiah)/ Total assets before elimination (in million rupiah)	
			2015	2014			31 Desember/ December 31, 2015	2014
Langsung/Direct								
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ), berdiri tanggal 22 Desember 2000/established on December 22, 2000	Jasa pengoperasian jalan tol/Toll road operation services	Jakarta	99,90	99,90	1 Oktober 2001/ October 1, 2001	35	144.341	130.890
PT Marga Sarana Jabar (MSJ), berdiri tanggal 11 Mei 2007/established on May 11, 2007	Penyelenggaraan ruas jalan tol Bogor Outer Ring Road/ Operator of the Bogor Outer Ring Road toll road	Bogor	55,00	55,00	23 November 2009/November 23, 2009	45	868.634	860.380
PT Trans Marga Jateng (TMJ), berdiri tanggal 7 Juli 2007/ established on July 7, 2007	Penyelenggaraan ruas jalan tol Semarang - Solo/ Operator of the Semarang - Solo toll road	Semarang	73,91	73,91	17 November 2011/November 17, 2011	45	4.038.494	3.729.260
PT Marga Trans Nusantara (MTN), berdiri tanggal 14 Mei 2008/established on May 14, 2008	Penyelenggaraan ruas jalan tol Kunciran - Serpong/Operator of the Kunciran - Serpong toll road	Tangerang	60,00	60,00	Tahap pengembangan/ Under development stage	35	849.329	788.351
PT Marga Nujyasumo Agung (MNA), berdiri tanggal 19 Agustus 1994/established August 19, 1994	Penyelenggaraan ruas jalan tol Surabaya - Mojokerto/ Operator of the Surabaya - Mojokerto toll road	Surabaya	55,00	55,00	5 September 2011/ September 5, 2011	42	2.997.764	2.287.880
PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ), berdiri tanggal 24 Agustus 2009/established on August 24, 2009	Penyelenggaraan ruas jalan tol Lingkarluar Jakarta Seksi W2 Utara/ Operator of the Jakarta Outerring Road section W2 Utara toll road	Jakarta	65,00	65,00	22 Juli 2014/ July 22, 2014	40	2.000.952	2.026.712
PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP), berdiri tanggal 28 Juni 2010/established on June 10, 2010	Penyelenggaraan ruas jalan tol Gempol Pasuruan/Operator of the Gempol - Pasuruan toll road	Sidoarjo	98,09	97,20	Tahap pengembangan/ Under development stage	45	1.134.567	932.902

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Entitas anak yang dikonsolidasikan (lanjutan)

e. Consolidated subsidiaries (continued)

Entitas Anak/ Subsidiaries	Aktivitas utama/ Principal activity	Domisili/ Domicile	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Periode masa konsesi (Tahun)/ Concession period (Year)	Total aset sebelum eliminasi (dalam jutaan rupiah)/ Total assets before elimination (in million rupiah)	
			2015	2014			31 Desember/December 31, 2015	2014
Langsung/Direct (lanjutan/continued)								
PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC), berdiri tanggal 14 Mei 2008/ <i>established on May 14, 2008</i>	Penyelenggaraan ruas jalan tol Kunciran - Cengkareng/ <i>Operator of the Kunciran - Cengkareng toll road</i>	Tangerang	76,20	76,20	Tahap pengembangan/ <i>Under development stage</i>	35	988.297	940.951
PT Jasa Layanan Pemeliharaan (JLP), berdiri tanggal 26 Agustus 1988/ <i>established on August 26, 1988</i>	Pengusahaan jasa konstruksi dan pemeliharaan jalan tol, jasa sewa peralatan tol, serta jasa sewa kendaraan/ <i>Services in toll road construction and maintenance, toll road equipments rental, and vehicles rental</i>	Jakarta	99,49	99,49	10 Februari 1989/ <i>February 10, 1989</i>	-	211.445	157.902
PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT), berdiri tanggal 25 September 1996/ <i>established on September 25, 1996</i>	Penyelenggaraan ruas jalan tol Gempol - Pandaan/ <i>Operator of the Gempol - Pandaan toll road</i>	Surabaya	90,71	79,84	18 Juni 2015/ <i>June 18, 2015</i>	35	1.243.767	1.153.799
PT Jasamarga Bali Tol (JBT), berdiri tanggal 22 Agustus 2011/ <i>established on August 22, 2011</i>	Penyelenggaraan ruas jalan tol Nusa Dua - Tanjung Benoa/ <i>Operator of the Nusa Dua - Tanjung Benoa toll road</i>	Bali	55,00	55,00	1 Oktober 2013/ <i>October 1, 2013</i>	45	1.984.828	2.074.008
PT Jasamarga Properti (JMP), berdiri tanggal 15 Januari 2013/ <i>established on January 15, 2013</i>	Pengembangan bisnis properti/ <i>Develop business in property</i>	Jakarta	99,48	99,40	15 Januari 2013/ <i>January 15, 2013</i>	-	447.108	120.394
PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT), berdiri tanggal 25 November 2014/ <i>established on November 25, 2014</i>	Penyelenggaraan ruas jalan tol Medan - Kualanamu - Tebing tinggi/ <i>Operator of the Medan - Kualanamu - Tebing tinggi toll road</i>	Medan	55,00	55,00	Tahap pengembangan/ <i>Under development stage</i>	40	301.965	80.291
PT Solo Ngawi Jaya (SNJ), berdiri tanggal 24 Maret 2009/ <i>established on March 24, 2009</i>	Penyelenggaraan ruas jalan tol Solo - Ngawi/ <i>Operator of the Solo - Ngawi toll road</i>	Solo	59,99	-	Tahap pengembangan/ <i>Under development stage</i>	40	1.666.514	-

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

e. Entitas anak yang dikonsolidasikan (lanjutan)

Entitas Anak/ Subsidiaries	Aktivitas utama/ Principal activity	Domisili/ Domicile	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Periode masa konsesi (Tahun)/ Concession period (Year)	Total aset sebelum eliminasi (dalam jutaan rupiah)/ Total assets before elimination (in million rupiah)	
			2015	2014			31 Desember/December 31, 2015	2014
Langsung/Direct (lanjutan/continued)								
PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ), berdiri tanggal 24 Maret 2009/established on March 24, 2009	Penyelenggaraan ruas jalan tol Ngawi - Kertosono/ Operator of the Ngawi - Kertosono toll road	Ngawi	59,99	-	Tahap pengembangan/ Under development stage	40	544.337	-
PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), berdiri tanggal 10 Juli 2008/established on July 10, 2008	Penyelenggaraan ruas jalan tol Cinere - Serpong/ Operator of the Cinere - Serpong toll road	Serpong	55,00	-	Tahap pengembangan/ Under development stage	40	64.724	-
PT Jasa Layanan Operasi (JLO), berdiri tanggal 21 Agustus 2015/established on August 21, 2015	Jasa pengoperasian jalan tol/Toll road operation services	Jakarta	99,90	-	30 September 2015/ September 30, 2015	-	47.901	-

Pendirian dan akuisisi entitas anak:

PT Jasa Layanan Operasi (JLO)

Berdasarkan Akta Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., No. 7 tanggal 21 Agustus 2015, Perusahaan dan Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga (INKOPKAR) mendirikan JLO. JLO bergerak dibidang jasa pengoperasian jalan tol. JLO memulai usahanya secara komersial pada bulan September 2015. Pada tanggal 31 Desember 2015, kepemilikan saham Perusahaan di JLO adalah sebesar 99,90%.

PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)

Berdasarkan akta pengambilalihan dan pengalihan saham yang diaktakan dalam akta notaris Fathiah Helmi, S.H. No. 35 tanggal 10 Juni 2015, Perusahaan mengakuisisi 2.173.636 saham NKJ dengan harga total sebesar Rp13.170.000 dari PT Thiess Contractors Indonesia (TCI) dan PT Ferino Putra (FP).

Pada tanggal 31 Desember 2015, kepemilikan saham Perusahaan di NKJ adalah sebesar 59,99%.

1. GENERAL (continued)

e. Consolidated subsidiaries (continued)

Establishment and acquisition of subsidiaries:

PT Jasa Layanan Operasi (JLO)

Based on Notarial Deed No. 7 dated August 21, 2015 of Rina Utami Djauhari, S.H., the Company and Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga (INKOPKAR) established JLO. JLO's activities are mainly in toll road operation services. JLO started its commercial operations in September 2015. As of December 31, 2015, the Company's ownership in JLO shares represented 99.90% interest.

PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ)

Based on share sale and purchase agreement, which is notarized under deed No. 35 dated June 10, 2015 of Fathiah Helmi, S.H., the Company acquired 2,173,636 NKJ shares for a total consideration of Rp13,170,000 from PT Thiess Contractors Indonesia (TCI) and PT Ferino Putra (FP).

As of December 31, 2015, the Company's ownership in NKJ shares represented 59.99% interest.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

e. Entitas anak yang dikonsolidasikan (lanjutan)

Pendirian dan akuisisi entitas anak: (lanjutan)

PT Solo Ngawi Jaya (SNJ)

Berdasarkan akta pengambilalihan dan pengalihan saham yang diaktakan dalam akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 34 tanggal 10 Juni 2015, Perusahaan mengakuisisi 11.366.999 saham SNJ dengan harga total sebesar Rp250.230.000 dari TCI dan FP.

Pada tanggal 31 Desember 2015, kepemilikan saham Perusahaan di SNJ adalah sebesar 59,99% kepemilikan saham.

PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)

Berdasarkan akta pengambilalihan saham yang diaktakan dalam akta notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 79 tanggal 29 Juni 2015, Perusahaan mengakuisisi 1.376.602 saham CSJ dengan harga total sebesar Rp110.000.000 dari TCI.

Pada tanggal 31 Desember 2015, kepemilikan Perusahaan di CSJ adalah sebesar 55%.

Selisih neto antara nilai akuisisi dengan nilai wajar aset neto NKJ, SNJ dan CSJ sebesar Rp176.034 dicatat sebagai bagian dari akun "hak perusahaan jalan tol" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2015.

PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)

Berdasarkan Akta Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., No. 30 tanggal 17 Juni 2015, Perusahaan setuju untuk membeli 31.550.000 lembar saham JPT yang dimiliki oleh PT Margabumi Matraraya (pihak ketiga) dengan harga beli sebesar Rp33.716.063.000. Disamping itu, pada tanggal 25 Juni, 11 September dan 10 November 2015, Perusahaan melakukan tambahan setoran modal sehingga pada tanggal 31 Desember 2015, kepemilikan saham Perusahaan di JPT naik dari 79,84% menjadi sebesar 90,71%.

1. GENERAL (continued)

e. Consolidated subsidiaries (continued)

Establishment and acquisition of subsidiaries: (continued)

PT Solo Ngawi Jaya (SNJ)

Based on share sale and purchase agreement, which is notarized under deed No. 34 dated June 10, 2015 of Fathiah Helmi, S.H., the Company acquired 11,366,999 SNJ shares for a total consideration of Rp250,230,000 from TCI and FP.

As of December 31, 2015, the Company's ownership in SNJ shares represented 59.99% interest.

PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)

Based on share sale and purchase agreement, which is notarized under deed No. 79 dated June 29, 2015 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the Company acquired 1,376,602 CSJ shares for Rp110,000,000 from TCI.

As of December 31, 2015, the Company's ownership in CSJ, which represented 55% interest.

The net difference amounting to Rp176,034 between the acquisition cost and fair value of net assets of NKJ, SNJ and CSJ was recorded as "toll road concession rights" in the 2015 consolidated statement of financial position.

PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)

Based on Notarial Deed No. 30 dated June 17, 2015 of Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., the Company agreed to acquired 31,550,000 shares of JPT owned by PT Margabumi Matraraya (third party) for a total purchase price amounting to Rp33,716,063,000. Additionally, on June 25, September 11 and November 10, 2015, the Company made additional capital injection therefore, the Company's ownership in JPT increased from 79.84% to 90.71%.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

e. Entitas anak yang dikonsolidasikan (lanjutan)

Perubahan kepemilikan entitas anak selama tahun berjalan:

PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)

Pada tanggal 19 Mei 2015, Perusahaan menyetorkan seluruh tambahan saham baru yang dikeluarkan oleh TJP sebanyak 12.500.000 saham dengan harga sebesar Rp125.000.000.000 yang diaktakan pada Akta Notaris Dra. EC. Inggriati Djojoseputro, S.H., No. 1 tanggal 3 Juni 2015. Sebagai akibat dari transaksi diatas, pada tanggal 31 Desember 2015, kepemilikan saham Perusahaan di TJP naik dari 97,20% menjadi sebesar 98,09%.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") serta Peraturan-peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.

Selain laporan arus kas konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asas akrual, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

1. GENERAL (continued)

e. Consolidated subsidiaries (continued)

Changes of ownership in subsidiaries during the year:

PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)

On May 19, 2015, the Company subscribed for all 12,500,000 new shares issued by TJP for Rp125,000,000,000 which notarized under Notarial Deed No. 1 dated June 3, 2015 of Dra. EC. Inggriati Djojoseputro, S.H. As a result of the above transactions, the Company's ownership in TJP increased from 97.20% to 98.09%.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and the Regulations and the Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by the Indonesian Financial Services Authority.

Except for the consolidated statement of cash flows, the consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are stated on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statement of cash flows, which has been prepared using the direct method, presents cash receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**a. Penyajian laporan keuangan konsolidasian
(lanjutan)**

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah rupiah yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

Pada tahun 2015, seiring dengan meningkatnya nilai transaksi non-tol pada Kelompok Usaha dan bertambahnya entitas anak non-tol, maka untuk memenuhi aturan standar akuntansi keuangan yang berlaku, Perusahaan mengubah format laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha seperti yang disebutkan pada Catatan 1e, dimana Perusahaan mempunyai persentase kepemilikan lebih dari 50%, baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki pengendalian atas entitas tersebut.

Laporan keuangan entitas anak disiapkan untuk periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten.

Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah hak suara entitas. Pengendalian juga ada ketika Perusahaan memiliki setengah atau kurang dari hak suara suatu entitas jika terdapat:

1. kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
2. kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
3. kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi atau badan pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau badan tersebut; atau

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements (continued)**

The reporting currency used in the consolidated financial statements is the Indonesian rupiah, which is also the functional currency of the Group.

In 2015, along with the increasing value of the non-toll transactions on the Group and the addition of non-toll subsidiaries to comply with applicable financial accounting standards, the Company changed the format of consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Group as disclosed in Note 1e, in which the Company maintains equity ownership of more than 50%, either directly or indirectly through another subsidiary and have control over the entity.

The financial statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting period as that of the Company using consistent accounting policies.

A subsidiary is fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtains control, and continues to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through another subsidiary, more than half of the voting rights of an entity. Control also exists when the Company owns half or less of the voting rights of an entity when there is:

1. power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with other investors;
2. power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or an agreement;
3. power to appoint or remove the majority of the members of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body; or

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

4. kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau badan pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau badan tersebut.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka akan:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali (KNP);
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka akan:

- mengakui setiap keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian Perusahaan atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lain ke laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

Rugi entitas anak yang kepemilikannya tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

4. power to cast the majority of votes at meetings of the board of directors or equivalent governing body and control of the entity is by that board or body.

A change in the Company's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Company loses control over a subsidiary, it:

- derecognizes the assets (including *goodwill*) and liabilities of the subsidiary;
- derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests (NCI);
- derecognizes the cumulative translation differences recorded in equity, if any;
- recognizes the fair value of the consideration received;
- recognizes the fair value of any investment retained;

A change in the Company's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Company loses control over a subsidiary, it:

- recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and
- reclassifies its share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate.

Losses of non-wholly owned subsidiaries are attributed to the NCI even if such losses result in a deficit balance for the NCI.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam kelompok ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Seluruh transaksi dan saldo akun antar perusahaan yang signifikan (termasuk laba atau rugi yang signifikan yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis, jika ada, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Kelompok Usaha memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan termasuk dalam beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Kelompok Usaha mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih nilai lebih agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diakui.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

NCI represent the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries not attributable directly or indirectly to the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.

All significant intercompany transactions and account balances (including the related significant unrealized gains or losses) have been eliminated.

Business combinations

Business combinations, if any, are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured at the aggregate value of the consideration transferred, measured at fair value on acquisition date and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Group elects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities recognized.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Kombinasi bisnis (lanjutan)

Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen menilai kembali identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diasumsikan.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (UPK) dari Kelompok Usaha yang diharapkan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan bagian dari UPK yang tersisa.

c. Setara kas

Deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan yang tidak dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai "Setara Kas".

Bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya untuk digunakan sebagai jaminan tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari "Kas dan Setara Kas" melainkan disajikan pada akun "Dana ditetapkan penggunaannya" dan sebagai bagian dari "Aset Tidak Lancar".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Principles of consolidation (continued)

Business combinations (continued)

If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary-acquiree, the difference is recognized in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's cash-generating units (CGU) that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGU.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the disposed operation is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed in this circumstance is measured based on the relative values of the disposed operation and the portion of the CGU retained.

c. Cash equivalents

Time deposits with maturities of three months or less at the time of placement, which are not restricted, are classified as "Cash Equivalents".

Cash in banks and time deposits which are restricted as to use or are used as collateral for obligations are not classified as part of "Cash and Cash Equivalents". There are presented in "Restricted funds" and as part of "Non-current Assets".

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang terkait.

e. Persediaan

Properti yang diperoleh atau dalam penyelesaian untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang tidak untuk disewakan atau untuk mendapatkan kenaikan nilai, dicatat sebagai persediaan.

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata.

Biaya perolehan tanah sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah untuk pengembangan, biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan real estat serta biaya-biaya pinjaman, jika ada. Pada saat dijual, semua biaya dialokasikan secara proporsional berdasarkan luas area masing-masing.

Biaya pengembangan tanah, termasuk tanah yang digunakan sebagai jalan dan prasarana atau area yang tidak dapat dijual lainnya, dialokasikan kepada luas area yang dapat dijual.

Biaya perolehan bangunan dalam penyelesaian dipindahkan ke rumah, ruko dan apartemen (*strata title*) tersedia untuk dijual pada saat pembangunan telah selesai.

Untuk proyek properti tempat tinggal, pada saat pengembangan dan pembangunan infrastruktur dilaksanakan, akun ini dipindahkan ke persediaan. Untuk proyek properti komersial, pada saat selesainya pengembangan tanah dan pembangunan infrastruktur, akun ini akan tetap sebagai bagian dari persediaan atau direklasifikasi ke aset tetap atau properti investasi, mana yang lebih sesuai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

d. Transactions with related parties

The Group has transactions with certain parties which have related party relationships as defined under PSAK 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures".

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

e. Inventories

Properties acquired or being constructed for sale in the ordinary course of business, rather than to be held for rental or capital appreciation, are classified as inventories.

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the average method.

The cost of land under development consists of the cost of land for development, direct and indirect development costs related to real estate development activities and borrowing costs, if any. At the time of sale, total project costs are allocated proportionately based on their respective areas.

The cost of land development, including land which is used for roads and infrastructure or other unsaleable area, is allocated to the saleable area.

*The cost of buildings under construction is transferred to houses, shop houses and apartments (*strata title*) available for sale when the construction is substantially completed.*

For residential property project, at the time development and construction of infrastructures are being done, this account is reclassified to inventories. For commercial property project, upon the completion of development and construction of infrastructure, this account either remains as part of inventories or is reclassified to fixed assets or investment property, whichever is more appropriate.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Persediaan (lanjutan)

Komisi yang tidak dapat dikembalikan yang dibayarkan kepada agen penjualan atas penjualan unit real estat dibebankan pada saat dibayar.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal yang didasarkan pada harga pasar pada tanggal pelaporan dan didiskontokan untuk nilai waktu uang, jika material, dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya untuk melaksanakan penjualan. Penurunan nilai persediaan ditetapkan setiap tanggal pelaporan untuk mengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi neto dan penurunannya diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian tahun yang bersangkutan.

f. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan pada operasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa yang diharapkan dapat memberikan manfaat.

g. Investasi pada entitas asosiasi dan perusahaan lainnya

Investasi Kelompok Usaha pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Kelompok Usaha mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Kelompok Usaha atas laba atau rugi neto, dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi sejak tanggal perolehan.

Investasi pada saham yang tidak tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari 20% dicatat pada biaya perolehannya dan disajikan sebagai "Aset tidak lancar lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Inventories (continued)

Non-refundable commissions paid to sales or marketing agents on the sale of real estate units are expensed when paid.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, based on market prices at the reporting date and discounted for the time value of money if material, less estimated costs to complete and estimated costs to sell. The decline in value of inventories is determined every reporting date to write down the carrying amount of inventories to their net realizable value and the decline is recognized as a loss in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

f. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations using the straight-line method over the years their are expected to benefit.

g. Investments in associates and other company

The Group's investments in its associates are accounted for using the equity method. An associate is an entity in which the Group has significant influence. Under the equity method, the cost of investment is increased or decreased by the Group's share in net earnings or losses of, and dividends received from, the associate since the date of acquisition.

Investment in shares with ownership interest of less than 20% that do not have readily determinable its fair value is stated at cost (the cost method) and disclosed as "Other non-current assets" in the consolidated statement of financial position.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Investasi pada entitas asosiasi dan perusahaan lainnya (lanjutan)

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika dapat diterapkan, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi.

Kelompok Usaha menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Kelompok Usaha menentukan apakah perlu untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi.

Apabila terdapat bukti obyektif penurunan nilai, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya, dan mengakui penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

h. Aset tetap

Kelompok Usaha menggunakan model biaya dalam pengukuran aset tetapnya. Aset tetap, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap termasuk: (a) harga pembelian, (b) setiap biaya yang diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi masa kini. Pada saat pemeliharaan dan perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya tersebut diakui ke dalam nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dibebankan langsung pada operasi berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Investments in associates and other company (continued)

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income reflects the share of the results of operations of the associates. Where there has been a change recognized directly in the equity of the associates, the Group recognizes its share of any such changes and discloses this, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associates are eliminated to the extent of the Group's interest in the associates.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that its investments in the associates are impaired. The Group determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on the Group's investments in its associates.

If there is objective evidence of impairment, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of investments in associates and their carrying value, and recognizes the impairment in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

h. Fixed assets

The Group uses the cost model for fixed assets measurement. Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. The cost of fixed assets includes: (a) purchase price, and (b) any costs directly attributable to bringing the assets to their present location and condition. When significant renewals and betterments are performed, their costs are recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are charged directly to current operations.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

h. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset, sebagai berikut:

	Tahun/Years
Gedung kantor dan bangunan lain	20
Peralatan operasional dan kantor	3 - 5
Kendaraan	3 - 5

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Aset dalam penyelesaian merupakan proyek dalam pelaksanaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan amortisasi aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, apabila diperlukan, pada setiap akhir tahun buku.

i. Properti investasi

Properti investasi Kelompok Usaha terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana, dan peralatan yang dikuasai Kelompok Usaha untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

h. Fixed assets (continued)

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets, as follows:

	Tahun/Years
Office and other buildings	20
Operational and office equipment	3 - 5
Vehicles	3 - 5

Land is stated at cost and not depreciated. Costs associated with the acquisition of legal right of land when the land was first acquired are recognized as part of the cost of land. Costs associated with the extension or renewal of legal right of land are recognized as intangible asset which is amortized over the legal life of the land right or economic life of the land, whichever is shorter.

Projects in progress are stated at cost and presented as part of fixed assets. The accumulated costs are reclassified to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and the constructed asset is ready for its intended use.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is credited or charged to current operations in the year the asset is derecognized.

The fixed assets' residual values, useful lives and methods of depreciation and amortization are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

i. Investment properties

Investment properties of the Group consist of land and building and infrastructures held by the Group to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Total tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Penyusutan bangunan dan prasarana dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atas taksiran masa manfaat ekonomis berkisar dari 3 tahun sampai dengan 20 tahun.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Untuk pengalihan dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Kelompok Usaha menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan Kelompok Usaha menjadi properti investasi, Kelompok Usaha mencatat properti investasi tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Investment properties (continued)

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any, except for land which is not depreciated. Such cost includes the cost of replacing part of the investment properties, if the recognition criteria are met, and excludes the daily expenses on their usage.

Depreciation of buildings and infrastructures is computed using the straight-line method over their estimated useful lives ranging from 3 years to 20 years.

An investment property should be derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal of an investment property is credited or charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

Transfers to investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of owner-occupation, commencement of an operating lease to another party or end of construction or development. Transfers from investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the commencement of owner occupation or commencement of development with a view to sell.

For a transfer from investment properties to owner-occupied property, the Group uses the cost method at the date of change in use. If an owner-occupied property becomes an investment property, the Group records the investment property in accordance with the fixed assets policies up to the date of change in use.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Perjanjian konsesi jasa

Kelompok Usaha telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Kelompok Usaha membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset tak berwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jalan tol yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Kelompok Usaha dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/BPJT. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/BPJT pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Service concession arrangement

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are toll road concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of the toll road. During the construction period, the accumulated toll road construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") for no consideration.

Concession asset granted to the Group are transferrable with approval from the Government/BPJT. These concession right assets will be transferred to the Government/BPJT at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Selama periode hak pengusahaan jalan tol, aset hak pengusahaan jalan tol dapat dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasi Kelompok Usaha jika jalan tol diserahkan (dikuasakan) kepada pihak lain atau Pemerintah/BPJT mengubah status jalan tol menjadi jalan non-tol atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Selain itu, Kelompok Usaha mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Kelompok Usaha menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Kelompok Usaha diakui pada nilai wajar.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol atau peningkatan kapasitas jalan tol yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman lain yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut telah selesai dan aset konsesi telah siap untuk dioperasikan.

Kelompok Usaha mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset tak berwujud dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset tak berwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**j. Service concession arrangement
(continued)**

During the toll road concession rights period, the concession rights assets may be derecognized from the consolidated statement of financial position of the Group if the toll road is transferred to another party or the Government/BPJT has changed the status of the toll road to non-toll road or if there is no economic benefit expected from usage of the toll road. Gain or loss from discontinuance or disposal of concession assets is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

Construction contract comprehends all the amounts of toll road construction costs or toll road improvement consisting of land acquisition cost, feasibility study cost and other costs that are directly attributable to the toll road construction, including construction costs for access roads, alternative roads and required public road facilities, interest and other borrowing costs, either directly or indirectly used for financing the development of assets. These costs are capitalized until the construction is completed and the concession assets are ready to be operated.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Perubahan metode amortisasi hak perusahaan jalan tol

Sebelum tanggal 1 Januari 2015, aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi yang dikurangi dengan masa pembangunan jalan tol, dengan menggunakan metode garis lurus.

Sejak tanggal 1 Januari 2015, aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. aset hak perusahaan jalan tol untuk jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode unit pemakaian berdasarkan volume lalu lintas.
2. aset hak perusahaan jalan tol selain jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus.

Perubahan metode amortisasi ini diterapkan secara prospektif.

Aset kerjasama operasi

Jalan tol yang pembangunannya didanai oleh investor tanpa kuasa penyelenggaraan dengan pola bagi pendapatan atau bagi hasil tol untuk masa tertentu, selama pengoperasiannya dikendalikan oleh Perusahaan, dicatat sebagai jalan tol kerjasama operasi dan liabilitas (jangka panjang) kerjasama operasi pada saat jalan tol selesai dibangun dan diserahkan oleh investor kepada Perusahaan untuk operasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**j. Service concession arrangement
(continued)**

Construction cost is the value of the construction contract.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

Change in method of amortization of toll road concession rights

Before January 1, 2015, the concession assets are amortised over the concession period minus construction period using the straight line method.

Effective January 1, 2015, the concession assets are amortized over the concession period using the following method:

1. *toll road concession rights for toll roads and toll bridges are amortised using unit of usage method based on traffic volume.*
2. *toll road concession rights aside from toll roads and toll bridges are amortised using straight line method.*

The change in the amortization method is applied on a prospective basis.

Joint operation assets

The construction of toll road is funded by investors without operation rights under revenue or profit sharing scheme for certain period of time, while the operation is controlled by the Company and is recorded as joint operation toll road and joint operation liabilities (long-term) when the construction is completed and transferred by the investor to the Company for operation.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

Provisi pelapisan jalan tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Kelompok Usaha mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yaitu antara lain dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi pelapisan ulang jalan tol diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan, atau pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset. Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Kelompok Usaha sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian sesuai maksud penggunaannya selesai secara substansial.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**j. Service concession arrangement
(continued)**

Provision for overlay

In operating toll roads, the Group is obliged to maintain quality in accordance with the SPM (Minimum Service Standards) established by the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia, i.e., by performing overlay regularly. The cost of this overlay is periodically provided for based on estimated utilization of toll road by customers. The estimated net provision for overlay is discounted to its present value that reflects current provision.

Borrowing costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use are substantially completed.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Kelompok Usaha membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai", jika ada.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, transaksi pasar terkini dijadikan sebagai acuan, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, digunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Impairment of non-financial assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or its cash-generating unit's (CGU's) fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as "impairment losses", if any.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the asset.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**k. Penurunan nilai aset non-keuangan
(lanjutan)**

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah terbalik. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Apabila terdapat pembalikan penurunan nilai, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah disesuaikan, penyusutan bersih, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tiap UPK (atau kelompok UPK) terkait dari *goodwill*. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode-periode berikutnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**k. Impairment of non-financial assets
(continued)**

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than *goodwill* may no longer exist or may have reversed. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than *goodwill* is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized.

If there is reversal of impairment, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. However, the reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for *goodwill* by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGU) to which the *goodwill* relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to *goodwill* can not be reversed in future periods.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Sewa

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 30 (Revisi 2011), "Sewa". PSAK ini menetapkan bahwa klasifikasi dari setiap elemen sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi secara terpisah bagi suatu perjanjian sewa yang mengandung elemen tanah dan bangunan.

Kelompok Usaha sebagai lessee

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa, atau perjanjian yang mengandung sewa, didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewa pembiayaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa.

Aset sewa pembiayaan yang dimiliki oleh lessee dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan secara konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset sewa pembiayaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Leases

The Group has adopted PSAK 30 (Revised 2011), "Leases". This PSAK prescribes separate classification of each element as finance lease or operating lease if a lease consists of land and building.

The Group as lessee

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. A lease that transfers substantially to the lessee all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset is classified as a finance lease.

At the commencement of the lease term, a lessee recognizes finance lease as an asset and a liability in its statement of financial position at an amount equal to the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between the finance charge and the reduction of the outstanding liability. The finance charges are allocated to each period during the lease term.

Leased asset held by the lessee under a finance lease is depreciated consistently using the same method used with that for depreciable assets that are directly owned, or is fully depreciated over the shorter of the lease term and its useful life, if there is no reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term.

Leases which do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Perpajakan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan".

Pajak penghasilan non-final - pajak kini

Aset dan liabilitas pajak penghasilan kini untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya diukur pada jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak penghasilan final

Penghasilan dari penjualan rumah (subsidi dan non-subsidi) dan penghasilan dari sewa gedung merupakan subjek pajak final masing-masing sebesar 1%, 5% dan 10%. Pajak penghasilan final dihitung pada jumlah total tagihan untuk nilai kontrak yang dikumpulkan selama setahun. Oleh karena itu, tidak ada aset/kewajiban pajak tangguhan yang diakui.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak kini sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada tahun berjalan untuk tujuan akuntansi.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak kini sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada tahun berjalan untuk tujuan akuntansi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Taxation

Effective dated January 1, 2015, the Group has adopted PSAK 46 (Revised 2014), "Income Tax".

Non-final income tax - current tax

Current income tax assets and liabilities for the current and prior years are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authorities. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted by the reporting date.

Final income tax

Income from sale of real property (subsidi and non-subsidi) and income from rental building is subject to final tax rates of 1%, 5% and 10%, respectively. The final income tax is calculated on the total amount of billings for the contract value which is collected during the year. Accordingly, no deferred income tax asset/liability is recognized.

The differences between the carrying amounts of existing assets or liabilities related to the final income tax and their respective tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities. Current tax expense related to income subject to final income tax is recognized in proportion to total income recognized during the current year for accounting purposes.

The differences between the carrying amounts of existing assets or liabilities related to the final income tax and their respective tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities. Current tax expense related to income subject to final income tax is recognized in proportion to total income recognized during the current year for accounting purposes.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan final (lanjutan)

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan final pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

Pajak pertambahan nilai (PPN)

Pendapatan, beban dan aset diakui setelah dikurangi dengan jumlah PPN, kecuali:

- Ketika PPN yang terjadi sehubungan dengan pembelian aset atau jasa tidak dapat diklaim kepada kantor pajak, dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai beban.
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk PPN.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada akhir tahun pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Taxation (continued)

Final income tax (continued)

The difference between the final income tax paid and the amount charged as final income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income is recognized as prepaid tax or tax payable.

Value added tax (VAT)

Revenues, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the Tax Office, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable.
- Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the end of the reporting year.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and unused tax losses carry-forward, to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the deductible temporary differences and the unused tax losses carry-forward can be utilized.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat penghasilan kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan dapat digunakan.

Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar penghasilan kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

n. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Kelompok Usaha mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek (jika ada) ketika jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah jasa tersebut diberikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at the end of each reporting period and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity and taxation authority.

n. Employee benefits

Short-term employee benefits

The Group recognizes short-term employee benefits liability (if any) when services are rendered and the compensation for such services are to be paid within twelve months after such services are rendered.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja

Program pensiun

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang menggantikan PSAK 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja". Selain itu, Kelompok Usaha juga menerapkan ISAK 15, "PSAK 24: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya".

PSAK 24 (Revisi 2013), antara lain, menghapuskan "pendekatan koridor" yang diperbolehkan dalam versi sebelumnya dan memberikan perubahan signifikan dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan imbalan kerja.

Penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian. Kelompok Usaha menggunakan kebijakan yang baru untuk mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial, yaitu langsung seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 disajikan kembali (Catatan 4). Penerapan ISAK 15 tidak memiliki dampak yang signifikan pada laporan keuangan konsolidasian.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi nilai wajar aset program, yang disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga obligasi perusahaan berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh temponya kurang lebih sama dengan kewajiban yang bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits

Pension program

Effective January 1, 2015, the Group applied PSAK 24 (Revised 2013), "Employee Benefits", which superseded PSAK 24 (Revised 2010), "Employee Benefits". In addition, the Group also applied ISAK 15, "PSAK 24: The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction".

PSAK 24 (Revised 2013), among others, eliminate the "corridor approach" permitted under the previous version and significant changes in the recognition, presentation and disclosure of post-employment benefits.

The adoption of PSAK 24 (Revised 2013) has a significant impact on the consolidated financial statements. The Group applied the revised policy for recognizing actuarial gains or losses, which are directly recognized in other comprehensive income. Therefore, the consolidated financial statements as of December 31, 2014 and for the year then ended and the statement of financial position as of January 1, 2014/December 31, 2013 were restated (Note 4). The adoption of ISAK 15 did not have significant impact on the consolidated financial statements.

The liability recognized in the consolidated statements of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the consolidated statement of financial position date less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and past service cost. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected-unit-credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Program pensiun (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian aktuarial dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial dilaporkan di saldo laba.

Perusahaan memiliki berbagai program pensiun sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan Perusahaan. Program ini pada umumnya didanai melalui pembayaran kepada pengelola dana pensiun sebagaimana ditentukan dalam perhitungan aktuarial yang dilakukan secara berkala. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi. Program pensiun iuran pasti adalah sebuah program pensiun dimana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada tahun kini dan sebelumnya.

Perusahaan harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan Undang-undang No. 13/2003 tentang "Ketenagakerjaan" (UU Ketenagakerjaan). Program pensiun Perusahaan berdasarkan perhitungan imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan imbalan yang disediakan oleh program pensiun Perusahaan akan melebihi imbalan pensiun minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan.

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk pegawai tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Jasa Marga (DPJM). Manfaat pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja pegawai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Pension program (continued)

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly recognized in other comprehensive income. Accumulated actuarial gains and losses are reported in retained earnings.

The Company has pension schemes in accordance with prevailing labor-related laws and regulations and the Company's policy. The schemes are generally funded through payments to trustee-administered funds as determined by periodic actuarial calculations. A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors, such as age, years of service or compensation. A defined contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity (a fund) and will have no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years.

The Company is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 (Labor Law). The Company's pension plan based on the calculation of the benefit obligation performed by the actuaries provides that the expected benefits under the Company's pension plan will exceed the minimum requirements of the Labor Law.

The Company provides a defined benefit pension plan covering all permanent employees which is managed by the Jasa Marga Pension Fund (DPJM). Pension benefit to be paid are determined based on basic pension income and the period of the employment.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Program pensiun (lanjutan)

DPJM telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-370/KM.17/1997, tanggal 15 Juli 1997 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan No.KEP-379/KM.6/2004, tanggal 14 September 2004.

Jumlah iuran karyawan untuk program pensiun sebesar 3% dari gaji pokok dan sisa pendanaan sebesar 13,7% menjadi beban Perusahaan.

Program purna karya

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 163/KPTS/2003, tanggal 23 September 2003, Perusahaan akan memberikan tunjangan purna karya berupa pembayaran sekaligus sebanyak 24 kali penghasilan terakhir (diluar lembur dan tunjangan pajak) kepada karyawan yang berhenti bekerja karena pensiun, meninggal, atau cacat. Bagi karyawan yang memasuki usia pensiun dipersyaratkan memiliki masa kerja minimal 25 tahun. Surat keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2003.

Imbalan pelayanan kesehatan pensiun

Jumlah iuran premi bulanan *coming service* setiap bulan adalah sebesar 6% dari Penghasilan Dasar Asuransi (PhDA) dengan proporsi Perusahaan dan karyawan masing-masing sebesar 4% dan 2% dari PhDA.

Perusahaan mengadakan kontrak kerjasama pengelolaan program Purna Karya karyawan dengan AJB Bumiputera 1912, melalui Perjanjian No. 34/Kontrak-DIR/2007 dan No. 441/AJB/JM/ PKS/12/07, tanggal 19 Desember 2007. Program Purna Karya dalam kontrak ini akan memberikan manfaat dalam bentuk uang purna karya secara sekaligus (*lumpsum*) kepada karyawan tetap yang berhenti bekerja.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Pension program (continued)

The DPJM has been approved by the Decree of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No.KEP-370/KM.17/1997, dated July 15, 1997 and amended by the Decree No.KEP-379/KM.6/2004, dated September 14, 2004.

The employees contribute 3% of their basic salaries to the plan and the remaining funding of 13.7% is contributed by the Company.

Post retirement benefit program

Based on the Company's Directors Decree No. 163/KPTS/2003, dated September 23, 2003, the Company provides retirement benefit which is equal to 24 times the monthly salary (excluding overtime and tax allowance) for employees who cease work due to retirement, death, or disability. Employees who have reached retirement age are required to have a minimum working period of 25 years to obtain this benefit. This decree was effective on January 1, 2003.

Post-retirement health care benefits

The amount of monthly premium contribution for coming service is 6% from insurance basic income which represent 4% and 2% from insurance basic income of the Company and employee proportion, respectively.

The Company entered into a cooperation agreement to manage employee Post Retirement with AJB Bumiputera 1912, through agreement No. 34/Kontrak-DIR/2007 and No. 441/AJB/JM/ PKS/12/07, dated December 19, 2007. The post retirement in this contract will give a benefit in post retirement cash in lump sum to the retired of permanent employee.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja (lanjutan)

**Imbalan pelayanan kesehatan pensiun
(lanjutan)**

Perusahaan menyediakan imbalan kesehatan pasca-kerja untuk pensiunan yang berhak. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum tertentu. Prakiraan biaya imbalan ini masih harus diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metode akuntansi yang sama dengan metode yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang memenuhi kualifikasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 228/KPTS/2006, tanggal 26 Desember 2006, tentang Penyempurnaan Keputusan Direksi No. 61/KPTS/2001 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan dan Keluarga, yang bertujuan untuk tetap menjaga agar pensiunan dan keluarga pensiunan dapat melakukan pola hidup sehat dan memiliki produktivitas yang tinggi, keluarga pensiunan yang mendapat bantuan pengobatan dari Perusahaan dibatasi dengan jumlah anak sebanyak-banyaknya 3 orang dan telah terdaftar di Perusahaan.

Perusahaan menghitung liabilitas imbalan pasca kerja dengan metode *projected-unit-credit*, sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013). Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Biaya jasa lalu sebagai dampak perubahan asumsi aktuarial bagi karyawan aktif diakui langsung dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Imbalan kerja atas pemutusan hubungan kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

**Post-retirement health care benefits
(continued)**

The Company provides post-retirement health care benefits to its entitled retirees. The entitlement to these benefits is usually based on the employees' remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting method similar to that for defined benefit pension plans. These obligations are valued annually by independent qualified actuaries.

Based on the Directors' Decree No. 228/KPTS/2006, dated December 26, 2006 regarding Improvement of the Directors' Decrees No. 61/KPTS/2001 about The Management of Health Maintenance for the Pensioner and Family, which its objective is to allow the pensionary and their family to have a healthy life and high productivity, the pensionary family that are eligible to receive medical assistance from the Company are limited to 3 children that are registered with the Company.

Based on PSAK 24 (Revised 2013), the Company has calculated the liability for other employee benefits using the projected-unit-credit method. Current service cost is recognized as an expense in the current year. Past service cost, actuarial adjustments and the effect of changes in actuarial assumptions for active employees are directly recognized in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. Employee benefits for terminations are recognized as liabilities and expenses when they occur.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Entitas Anak

Program Pensiun

JLJ menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetapnya. Program pensiun didanai seluruhnya oleh JLJ. Kontribusi yang diberikan JLJ dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Program Imbalan Kerja Lainnya

JLJ, JBT, JLP, TMJ dan MNA (Entitas Anak) membukukan liabilitas program imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013), liabilitas atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Entitas Anak sehubungan dengan estimasi liabilitas tersebut.

Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Biaya jasa lalu sebagai dampak perubahan asumsi aktuarial bagi karyawan aktif diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama sisa masa kerja rata-rata karyawan tersebut. Imbalan kerja atas pemutusan hubungan kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi.

o. Instrumen keuangan

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian" PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Subsidiaries

Pension Program

JLJ provides a defined contribution pension program covering all permanent employees. The pension program is entirely funded by JLJ. The contribution borne by JLJ is charged to the statement of income in the current period.

Other Employee Benefit Program

JLJ, JBT, JLP, TMJ and MNA (Subsidiaries) recognized other employee benefit liabilities conducted in accordance with Labor Law No.13 Year 2003. Based on PSAK 24 (Revised 2013), employee benefit liabilities are estimated using the *projected-unit-credit* method. No funding is provided by Subsidiaries related with estimation of employee benefits.

Current service cost is recognized as an expense in the current year. Past service cost as effect of changes in actuarial assumptions for active employees are recognized in profit or loss and other comprehensive over the estimated average remaining working period of those employees. Employee benefits for terminations are recognized as liabilities and expenses when they occur.

o. Financial instruments

The Group has adopted PSAK 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", PSAK 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and PSAK 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures".

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir tahun pelaporan.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2015, aset keuangan Kelompok Usaha mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang lain - lain, dana yang ditetapkan penggunaannya dan aset keuangan lainnya, yang seluruhnya dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun pada saat proses amortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Financial instruments (continued)

1. Financial assets

Initial recognition and measurement

Financial assets within the scope of PSAK 55 are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, and available-for-sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each financial year end.

At initial recognition, financial assets are recognized at fair value and, in the case of investments not at fair value through profit or loss, the fair value includes directly attributable transaction costs.

As of December 31, 2015, the Group's financial assets included, cash and cash equivalents, short-term investments, other receivables, restricted funds and other financial assets which are all classified as loans and receivables.

Subsequent measurement

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Kelompok Usaha telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through", dan salah satu diantara (a) Kelompok Usaha telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Kelompok Usaha tidak mentransfer atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Penurunan nilai

Pada setiap akhir periode pelaporan Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Group has transferred the rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Impairment

The Group assesses at the end of each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is an objective evidence of impairment as a result of one or more events that have occurred after the initial recognition of the asset (incurred "loss events") and those loss events have an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Kelompok Usaha pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan kelompok Usaha menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Impairment (continued)

Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization, and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and the group is collectively assessed for impairment.

Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Nilai tercatat aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun cadangan dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang, beserta dengan penyisihan terkait, dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan atas pemulihan di masa depan dan semua agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Kelompok Usaha. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi.

2. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Kelompok Usaha menentukan klasifikasi liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Impairment (continued)

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the financial asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written - off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group. If, in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. The reversal shall not result in the carrying amount of the financial asset exceeding what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. The recovery is recognized in profit or loss.

2. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities at amortized cost. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

At initial recognition, financial liabilities are recognized at fair value and, in the case of financial liabilities at amortized cost, include directly attributable transaction costs.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal dan pengukuran (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2015, liabilitas keuangan Kelompok Usaha mencakup utang usaha, utang kontraktor, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, beban akrual, liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka panjang lainnya yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan diakui dalam laba atau rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Financial instruments (continued)

2. Financial liabilities (continued)

Initial recognition and measurement
(continued)

As of December 31, 2015, the Group's financial liabilities included trade payables, contractors payable, other financial liabilities, accrued expenses, long-term liabilities and other long term liabilities, which are classified as financial liabilities at amortized cost.

After initial recognition, interest - bearing financial liabilities at amortized cost are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains or losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

A financial liability is derecognized when it is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original financial liability and the recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Instrumen keuangan (lanjutan)

3. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

4. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau harga yang diminta pada penutupan bisnis pada akhir tahun pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (*arm's length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lainnya.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

p. Laba per saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Financial instruments (continued)

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

4. Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting year. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transaction, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

When the fair value of the financial instruments not traded in an active market cannot be reliably determined, such financial assets are recognized and measured at their carrying amount.

p. Earnings per share

Earnings per share amount is computed by dividing the profit for the year attributable to the owners of the parent entity by the weighted average number of outstanding issued and fully paid shares during the year.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan tol

Pendapatan dari hasil pengoperasian jalan tol Kelompok Usaha diakui pada saat penjualan karcis tol. Pendapatan tol dari hasil kerjasama pengoperasian jalan tol dengan investor dengan kuasa penyelenggaraan diakui pada saat penjualan karcis tol setelah dikurangi bagian investor tersebut. Pembayaran kepada investor tanpa kuasa penyelenggaraan dicatat sebagai angsuran liabilitas kerjasama operasi. Selisih antara jumlah pembayaran ini dengan angsuran liabilitas kerjasama operasi dicatat sebagai beban atau penghasilan kerjasama operasi.

Pendapatan sewa

Pendapatan sewa iklan, lahan dan tempat peristirahatan serta pendapatan jasa pengoperasian diakui sebagai pendapatan sesuai masa sewa. Sewa diterima dimuka disajikan sebagai "Pendapatan diterima dimuka".

Pendapatan penjualan properti

JMP (entitas anak) mengakui pendapatan dari penjualan real estat dengan metode akrual penuh (*full accrual method*) sesuai dengan PSAK 44, "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat". Berdasarkan metode di atas, pendapatan dari penjualan real estat diakui dengan metode akrual penuh (*accrual method*) bila seluruh syarat berikut telah terpenuhi:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Revenue and expense recognition

Toll revenues

The Group's revenues from toll road operations are recognized upon the sale of toll tickets. Revenue from profit sharing arrangement between the Group and investor are recognized when toll tickets are sold, net of investor's share. Payments to investors without operating rights are recorded as a mandatory installment under joint operation. The excess of total payments over mandatory installment under joint operation is recorded as joint operation expense or revenue.

Rental income

Revenues from advertisement, space and rest area rental and income from toll road operating service are recognized as income over the lease term. Rent revenue received in advance are presented as "unearned revenue".

Revenue from sale of property

JMP (a subsidiary) recognizes revenues from real estate sales using the full accrual method in accordance with PSAK 44, "Accounting for Real Estate Development Activities". Based on this method, the revenue from real estate sales is recognized using the full accrual method if all of the following conditions are met:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan penjualan properti (lanjutan)

- (i) Pendapatan dari penjualan bangunan rumah, ruko dan bangunan sejenis lainnya beserta kavling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi:
1. Proses penjualan telah selesai.
 2. Harga jual akan tertagih, jumlah pembayaran oleh pembeli telah memadai, yaitu setidaknya telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli;
 3. Tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi dimasa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan
 4. Penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.
- (ii) Pendapatan dari penjualan kavling tanah tanpa bangunan yang tidak memerlukan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan diakui dengan metode akrual penuh apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi:
1. Total pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan total tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli.
 2. Harga jual akan tertagih.
 3. Tagihan penjual tidak bersifat subordinasi terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli di masa yang akan datang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**q. Revenue and expense recognition
(continued)**

Revenue from sale of property (continued)

- (i) Revenues from sales of houses, shop houses, and other similar property and related land are recognized under the full accrual method if all of the following conditions are met:
1. A sale is consummated.
 2. The selling price is collectible, the amount paid by a buyer is sufficient, i.e., it has reached at least 20% of the agreed selling price, and the amount is not refundable by the buyer;
 3. The seller's receivable is not subject to future subordination against other loans which will be obtained by the buyer; and
 4. The seller has transferred to the buyer the usual risks and rewards of ownership in a transaction that is in substance a sale and does not have a substantial continuing involvement with the property.
- (ii) Revenues from sales of lots that do not require the seller to construct building are recognized under the full accrual method if all of the following conditions are met:
1. Total payments by the buyer are at least 20% of the agreed selling price and the amount is not refundable.
 2. The selling price is collectible.
 3. The receivable is not subordinated to other loans in the future.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan penjualan properti (lanjutan)

(ii) Pendapatan dari penjualan kavling tanah tanpa bangunan yang tidak memerlukan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan diakui dengan metode akrual penuh apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi: (lanjutan)

4. Proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk menyelesaikan kavling tanah yang dijual, seperti liabilitas untuk mematangkan kavling tanah atau liabilitas untuk membangun Fasilitas-Fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau yang menjadi liabilitas penjual, sesuai dengan pengikatan jual beli atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Hanya kavling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan di atas kavling tersebut.

(iii) Pendapatan penjualan unit bangunan kondominium, apartemen, perkantoran, pusat belanja dan bangunan sejenis lainnya, serta unit dalam kepemilikan secara *time-sharing*, diakui dengan metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*) apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi:

1. Proses konstruksi telah melampaui tahap awal, yaitu fondasi bangunan telah selesai dan semua persyaratan untuk memulai pembangunan telah terpenuhi
2. Jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli dan
3. Jumlah pendapatan penjualan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan andal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**q. Revenue and expense recognition
(continued)**

Revenue from sale of property (continued)

(ii) *Revenues from sales of lots that do not require the seller to construct building are recognized under the full accrual method if all of the following conditions are met: (continued)*

4. *The land development process is complete so that the seller has no further obligations related to the lots sold, such as obligation to construct amenities or obligation to build other facilities applicable to the lots sold as provided in the agreement between the seller and the buyer or regulated by law;*

5. *Only the lots are sold, without any requirement of the seller's involvement in the construction of building on the lots.*

(iii) *The revenues from sale of condominiums, apartments, office buildings, shopping centers and other buildings of similar type and time-sharing ownership units are recognized using the percentage of completion method if all of the following criteria are satisfied.*

1. *The construction process already commenced, that is, the building foundation has been completed and all of the requirements to commence construction have been fulfilled.*
2. *Total payments by the buyer have reached 20% of the agreed sale price and that amount is not refundable; and*
3. *The amount of revenue and the cost of the property can be reliably estimated.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan penjualan properti (lanjutan)

Pendapatan penjualan unit bangunan kondominium, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan dan bangunan sejenis lainnya, serta unit dalam kepemilikan secara *time-sharing* yang telah selesai proses pembangunannya diakui dengan metode akrual penuh.

Jika terdapat salah satu kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pembayaran uang yang diterima dari pembeli harus diakui sebagai uang muka yang diterima sampai seluruh kriteria tersebut terpenuhi.

Uang sewa ruko diterima dimuka dicatat sebagai "Pendapatan diterima dimuka". Pendapatan ditangguhkan tersebut diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu sewa. Uang jaminan yang diterima dari pelanggan disajikan sebagai bagian dari "Uang jaminan penyewa".

Pendapatan bunga diakui dengan mempertimbangkan hasil efektif aset tersebut.

Pendapatan konstruksi dan beban konstruksi

Kelompok Usaha mengakui aset tak berwujud untuk jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan dimana Kelompok Usaha menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Pada fase konstruksi, Kelompok Usaha mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan basis kontrak biaya-plus. Beban konstruksi diakui sejak kegiatan konstruksi dimulai sampai dengan proses pembangunan aset selesai dan siap untuk digunakan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**q. Revenue and expense recognition
(continued)**

Revenue from sale of property (continued)

The revenue from the sale of condominiums, apartments, office building, shopping centers, and other buildings of similar type and time-sharing ownership units, the constructions of which have been completed, shall be recognized using the full accrual method.

If any of the above conditions is not met, the payments received from the buyer are recorded as advances received until all of the criteria are met.

Rental payments received in advance from tenants of shop houses are recorded as "Unearned Revenues". Such unearned income is recognized as income over the terms of the lease contracts. Deposits received from customers are presented as part of "Tenants' deposits".

Interest income is recognized as the interest accrues, taking into account the effective yield on the asset.

Construction revenue and construction cost

The Group recognizes intangible assets for construction services and increased capacity in which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public usage of the service. In the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction by using cost-plus contract basis. Construction cost are recognized during construction stage up to construction activity was finished and asset ready to use.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya.

Beban pokok penjualan tanah

Beban pokok penjualan tanah ditentukan berdasarkan nilai perolehan tanah ditambah pengeluaran-pengeluaran lain untuk pengembangan tanah. Beban pokok penjualan rumah tinggal meliputi seluruh beban pembangunan untuk menyelesaikan pekerjaan.

r. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
1 dolar Amerika Serikat (US\$)	13.795	12.440

Transaksi dalam mata uang asing tidak signifikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**q. Revenue and expense recognition
(continued)**

Expenses

Expenses are recognized when they are incurred.

Cost of land sold

Cost of land sold is determined based on acquisition cost of the land plus other estimated expenditures for its improvement and development. The cost of residential house sold is determined based on actual cost incurred to complete the work.

**r. Foreign currency transactions and
balances**

Transactions involving foreign currencies are translated to rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made.

At consolidated statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction day of the year, as published by Bank Indonesia. The resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

The exchange rates used were as follows:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
1 United States dollar (US\$)	13.795	12.440

Transactions in foreign currencies are insignificant.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

s. Pelaporan segmen

Segmen adalah bagian khusus Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai dengan segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

t. Provisi

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dimana ada kemungkinan besar bahwa untuk penyelesaian kewajiban tersebut diperlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik saat ini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan.

u. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Segment reporting

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged in providing certain products (business segment), which component is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment, as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated.

t. Provisions

A provision is recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

All provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligations, the provisions are reversed.

u. Contingencies

Unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan laporan keuangan konsolidasian. Namun, ketidakpastian atas asumsi dan estimasi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas pada masa mendatang.

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha, manajemen telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

• Pengelompokan aset keuangan dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan pengelompokan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 55 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti yang diungkapkan pada Catatan 2o.

• Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

BPJT memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Kelompok Usaha termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan tol (Catatan 2j). Pada akhir masa konsesi jasa, Kelompok Usaha harus menyerahkan jalan tol kepada BPJT tanpa biaya, dalam keadaan beroperasi dan kondisi yang baik,

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure to the consolidated financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require a material adjustment to the carrying amounts of the assets or liabilities in future periods.

a. Judgments

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgments, apart from those including estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

• Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2o.

• Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

The BPJT granted the Group the rights, obligations and privileges including the authority to finance, design, construct, operate and maintain the toll roads (Note 2j). Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the toll roads to the BPJT without cost, fully operational and in good working condition, including any

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

- Perjanjian konsesi jasa (lanjutan)

termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, pekerjaan, fasilitas jalan dan peralatan tol yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian fasilitas jalan tol.

Kelompok Usaha berpendapat bahwa PPJT memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Kelompok Usaha diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Kelompok Usaha mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi sebesar Rp2.217.563.931.

Kelompok Usaha mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 34. Kelompok Usaha mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima dan menambahkan margin, berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu, pada saat penentuan tarif awal jalan tol sebelum jalan tol dioperasikan.

Peningkatan pendapatan konstruksi pada tahun 2015 mengakibatkan perubahan kenaikan di dalam laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (EBITDA).

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

a. Judgments (continued)

- Service concession arrangement (continued)

and all existing land, works, toll road facilities and equipment found therein directly related to, and in connection with, the operation of the toll road facilities.

The Group has made judgment that the PPJT qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the year ended December 31, 2015, the Group recognized construction revenue amounting to Rp2,217,563,931.

The Group recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK 34. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received and will add the margin, based on management estimation calculated in certain model, in determining the initial toll road tariff before the toll road is operated.

The increase in construction revenue in 2015 did result in a proportionate increase in the earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

• Pengakuan pendapatan penjualan properti

Ketika kontrak untuk penjualan properti atas penyelesaian konstruksi dinilai berdasarkan kontrak konstruksi, pendapatan diakui dengan metode persentase penyelesaian, sesuai dengan tahapan konstruksi (Catatan 2q). Persentase penyelesaian dibuat berdasarkan tahapan penyelesaian proyek atau kontrak, ditentukan berdasarkan pembagian biaya-biaya kontrak yang dikeluarkan sampai dengan saat ini terhadap estimasi biaya proyek atau kontrak.

• Pengklasifikasian properti

JMP menentukan apakah sebuah properti yang diperoleh diklasifikasikan sebagai properti investasi atau persediaan properti:

- Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan (terutama kantor dan properti ritel) yang tidak bertujuan untuk digunakan oleh atau dalam kegiatan operasi Kelompok Usaha, tidak juga untuk dijual dalam kegiatan bisnis, tetapi digunakan untuk memperoleh pendapatan sewa dan peningkatan nilai.
- Persediaan properti terdiri dari properti yang bertujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis. Secara khusus, berkaitan dengan properti hunian yang dikembangkan oleh Kelompok Usaha dan digunakan untuk dijual sebelum atau pada saat penyelesaian konstruksi.

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan dalam paragraf berikut. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

a. Judgments (continued)

• Revenue recognition of sale of a property

When a contract for the sale of a property upon completion of construction is judged to be a construction contract, revenue is recognized using the percentage of completion method as construction progresses (Note 2q). The percentage of completion is made by reference to the stage of completion of the project or contract, determined based on the proportion of the contract costs incurred to date to the total estimated costs of the project or contract.

• Classification of property

JMP determines whether an acquired property is classified as investment property or property inventory:

- *Investment property consists of land and buildings (principally offices and retail property) which are not occupied substantially for use by, or in the operations of, the Group, nor for sale in the ordinary course of business, but are held primarily to earn rental income and capital appreciation.*
- *Property inventory consists of property that is held for sale in the ordinary course of business. In particular, it pertains to the residential property that the Group develops and intends to sell on or before the completion of construction.*

b. Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed in the following paragraphs. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes will be reflected in the assumptions when they occur.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

• Instrumen keuangan

Kelompok Usaha mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, nilai perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Kelompok Usaha menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Kelompok Usaha.

• Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp913.842.793 dan Rp701.684.883.

• Amortisasi hak perusahaan jalan tol

Berdasarkan penelaahan manajemen Kelompok Usaha, mulai tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha memutuskan untuk mengganti metode amortisasi hak perusahaan jalan tol - jalan dan jembatan dari metode garis lurus selama masa konsesi menjadi metode "Pola konsumsi jalan tol yang diakibatkan oleh lalu lintas" selama masa konsesi. Perubahan metode amortisasi ini diterapkan secara prospektif. Nilai tercatat neto atas hak perusahaan jalan tol Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp24.864.720.272 dan Rp23.941.404.497

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

• Financial instruments

The Group recorded certain assets and financial liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidence, the amount of change in value reasonably may be different when the Group uses different valuation methodologies. Changes in fair value of financial assets and liabilities can indirectly affect profit or loss of the Group.

• Depreciation of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated using the straight-line method over their estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of fixed assets to be between 3 and 20 years. This is the range of common life expectancies applied in the industry in which the Group conducts its business. Changes in the level of usage and technological developments could impact the economic useful lives and residual values of assets and, therefore, future depreciation charges may be revised. The carrying value of net fixed assets of the Group as of December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp913,842,793 and Rp701,684,883, respectively.

• Amortization of toll road concession right

Based on the Group's management assessment, starting January 1, 2015, the Group decided to change its amortization method of toll road concession rights - road and bridge from the straight line method over the concession period to the "Pola konsumsi jalan tol yang diakibatkan oleh lalu lintas" method over the concession period. The change in the amortization method is applied on a prospective basis. The net carrying value of toll road concession rights of the Group as of December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp24,864,720,272 and Rp23,941,404,497, respectively.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

• Estimasi volume lalu lintas

Dalam menentukan amortisasi hak perusahaan jalan tol, manajemen memproyeksikan volume lalu lintas setelah tahun berjalan selama sisa periode perjanjian konsesi. Volume lalu lintas diproyeksikan berdasarkan jumlah kendaraan dan disesuaikan dengan perbandingan terhadap volume lalu lintas aktual. Namun seiring berjalannya waktu, volume lalu lintas aktual dapat berbeda dengan estimasi tersebut, bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tarif tol dan volume lalu lintas.

Manajemen melakukan penilaian secara periodik terhadap total proyeksi volume lalu lintas. Kelompok Usaha akan menunjuk suatu konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas profesional independen dan membuat penyesuaian yang tepat apabila terdapat perbedaan yang material antara proyeksi volume lalu lintas dan volume lalu lintas aktual.

Kelompok Usaha menunjuk konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas profesional independen pada jalan tol utama pada tahun 2014.

• Pengendalian atas entitas anak

Direksi Perusahaan menilai apakah Kelompok Usaha memiliki pengendalian atas Entitas Anak berdasarkan kemampuan Kelompok Usaha untuk mengarahkan kegiatan yang relevan dari Entitas Anak secara sepihak. Dalam membuat pertimbangannya, direksi menganggap ukuran absolut kepemilikan Kelompok Usaha pada Entitas Anak dan ukuran relatif dan penyebaran kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya. Setelah penilaian, direksi menyimpulkan bahwa Kelompok Usaha memiliki hak suara yang cukup dominan untuk mengarahkan kegiatan yang relevan dari Entitas Anak dan karenanya Kelompok Usaha memiliki pengendalian atas Entitas Anak.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

• Estimation of traffic volume

In determining amortisation of toll road concession rights, the management has to project traffic volume after current year for the remaining years of the concession agreement. Traffic volume is projected based on the number of vehicles and adjusted by comparison to actual vehicle volume. However, the actual vehicle volume in the future could differ from the estimate, depending upon changes in external factors that may affect toll rates and vehicle volume.

The Management perform periodic assessment on the total projected traffic volume. The Group will appoint an independent professional traffic consultant to perform independent professional traffic studies and make an appropriate adjustment if there is a material difference between projected and actual traffic volume

The Group appointed independent professional traffic consultants to perform independent professional traffic studies on its main toll roads in 2014.

• Control over subsidiary

The directors of the Company assessed whether or not the Group has control over a subsidiary based on whether the Group has the practical ability to direct the relevant activities of the subsidiary unilaterally. In making their judgment, the directors considered the Group's absolute size of holding in the subsidiary and the relative size of and dispersion of the shareholdings owned by the other shareholders. After assessment, the directors concluded that the Group has a sufficiently dominant voting interest to direct the relevant activities of the subsidiary and therefore the Group has control over the subsidiary.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

• Provisi pelapisan jalan tol

Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini pada tanggal pelaporan.

• Aset konsesi dalam pengerjaan

Umur konsesi atas hak konsesi jalan tol mulai berlaku efektif sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh BPJT, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum kegiatan konstruksi dimulai atau biaya pra konstruksi jalan tol, termasuk biaya pembebasan lahan atau tanah ditangguhkan sehingga belum dihitung margin konstruksinya.

• Imbalan kerja

Penentuan kewajiban Kelompok Usaha untuk menyediakan imbalan kerja bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung nilai-nilai tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan oleh Kelompok Usaha langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan atas asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material atas estimasi liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp955.640.670 dan Rp1.045.330.573.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

• Provision for overlay

The cost of this overlay will be provisioned periodically based on the estimated utilization of toll road by customers. This provision is measured using the present value of management's estimate of the expenditures required to settle present obligation at the reporting date.

• Concession asset in progress

The concession period of toll road concession rights effective from Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) published by BPJT, so that the costs incurred before the construction activities started or pre-construction costs of toll roads, including the cost of land or soil acquisition suspended and therefore, the construction margin has not been determined.

• Employee benefits

The determination of the Group's obligations for cost of providing employee benefits is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rate, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Actual results that differ from the assumptions set forth by the Group are recognized immediately in profit or loss as incurred. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions used can materially affect the estimated liability for employee benefits and employee benefits expense. The amount of the estimated employee benefits liability as of December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp955,640,670 and Rp1,045,330,573, respectively.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN
ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

• Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Rincian atas sifat dan nilai tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 19.

• Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga semua bagian dari aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak masa yang akan datang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN TAHUN 2014 DAN 2013**

Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013 sehubungan dengan:

- (i) Penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha telah menerapkan secara retrospektif PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".

PSAK ini menetapkan antara lain, (i) menghapuskan "corridor approach" yang digunakan dalam PSAK sebelumnya dan (ii) perubahan signifikan dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan imbalan pasca-kerja yang antara lain sebagai berikut:

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

• Income tax

Significant considerations are made in determining corporate income tax liability. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the normal course of business. The Group recognizes the income tax liability based on estimates of whether there will be an additional income tax. Details of the nature and amount of recorded income tax are disclosed in Note 19.

• Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that taxable income will be available so that all of part of the deferred tax assets can be utilized. Significant estimates by management are required in determining the total deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable income together with future tax planning strategies.

**4. RESTATEMENT OF 2014 AND 2013
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

The Company restated its consolidated financial statements as of December 31, 2014 and for the year then ended, and the consolidated statement of financial position as of January 1, 2014/December 31, 2013 due to:

- (i) Application of PSAK 24 (Revised 2013), "Employee Benefits".

Effective January 1, 2015, the Group has retrospectively adopted PSAK 24 (Revised 2013), "Employee Benefits".

This PSAK provides, among others, (i) the elimination of the "corridor approach" permitted under the previous version and (ii) significant changes in the recognition, presentation and disclosure of post-employment benefits which, among others, are as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN 2014 DAN 2013 (lanjutan)

- Keuntungan dan kerugian aktuarial saat ini diharuskan untuk diakui dalam pendapatan komprehensif lain (OCI) dan dikeluarkan secara permanen dari laba atau rugi.
- Keuntungan yang diharapkan atas *plan assets* tidak lagi diakui dalam laba atau rugi. Keuntungan yang diharapkan digantikan dengan mengakui pendapatan bunga (atau beban) atas program manfaat pasti bersih (atau liabilitas) dalam laba atau rugi, yang dihitung menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban pensiun.
- Biaya jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan tidak bisa lagi ditangguhkan dan diakui periode mendatang. Semua biaya jasa lalu akan diakui lebih awal ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika Kelompok Usaha mengakui biaya restrukturisasi atau biaya pemutusan terkait.

Perubahan tersebut dibuat supaya aset atau liabilitas pensiun bersih diakui dalam posisi laporan keuangan konsolidasian untuk menggambarkan nilai penuh dari defisit atau surplus program.

- (ii) Penerapan PSAK 44, "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate" untuk JMP.
- (iii) Penyajian kembali pengakuan pajak tangguhan pada JLP dan MSJ terkait penerapan PSAK 46 (Revisi 2013), "Pajak Penghasilan".
- (iv) Penyajian kembali aset tetap - net dan aset tak berwujud - neto pada MSJ yang disebabkan oleh karena perubahan klasifikasi dan adanya informasi tambahan atas utang kontraktor.

Penyesuaian penyajian kembali tersebut berdampak material atas beberapa akun; oleh karena itu, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasiannya tanggal 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

4. RESTATEMENT OF 2014 AND 2013 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

- Actuarial gains and losses are now required to be recognized in other comprehensive income (OCI) and excluded permanently from profit or loss.
- Expected return on plan assets will no longer be recognized in profit or loss. Expected returns are replaced by recognizing interest income (or expense) on the net defined benefit asset (or liability) in profit or loss, which is calculated using the discount rate used to measure the pension obligation.
- Unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period. Instead, all past service costs will be recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs and when the Group recognizes the related restructuring or termination costs.

Such changes are made in order that the net pension assets or liabilities are recognized in the consolidated statements of financial position to reflect the full value of the plan deficit or surplus.

- (ii) Application of PSAK 44, "Accounting For Real Estate Development Activities" for JMP.
- (iii) Restatement of recognition for deferred tax of JLP and MSJ due to the implementation of PSAK 46 (Revised 2013), "Pajak Penghasilan".
- (iv) Restatement of fixed asset - net and concession asset - net, depreciation and amortization expense of MSJ due to change in classification and additional information of contractor payable.

These restatement adjustments materially impacted several accounts; therefore, the Company restated its consolidated financial statements as of December 31, 2014 and January 1, 2014/December 31, 2013, and for the year ended December 31, 2014.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN 2014 DAN 2013 (lanjutan)

Selain itu, akun-akun pada laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013, dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan penyajian laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan rincian sebagai berikut:

4. RESTATEMENT OF 2014 AND 2013 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Furthermore, the accounts in the consolidated financial statements as of December 31, 2014 and January 1, 2014/December 31, 2013, and for the year ended December 31, 2014, have been reclassified to correct the accounts classification in the disclosures to the consolidated financial statements as of December 31, 2014 and for the year then ended with details are as follows:

Dari/From	Menjadi/To	Jumlah/Amount
<u>Pada tanggal 31 Desember 2014/As of December 31, 2014</u>		
Piutang lain-lain- lancar / <i>Other receivables - current</i>	Piutang lain-lain- tidak lancar / <i>Other receivables - non current</i>	99.281.519
Aset tidak lancar lainnya/ <i>Other non-current assets</i>	Persediaan/ <i>Inventories</i>	21.959.567
Beban akrual/ <i>Accrued expenses</i>	Liabilitas imbalan kerja jangka pendek lainnya/ <i>Short-term employee benefits liability</i>	84.437.680
Utang lain-lain/ <i>Other payables</i>	Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya/ <i>Other financial liabilities</i>	73.167.095
Liabilitas pajak tangguhan/ <i>Deferred tax liabilities</i>	Aset pajak tangguhan/ <i>Deferred tax assets</i>	14.878.988
Pendapatan usaha lainnya/ <i>Other operating revenues</i>	Pendapatan tol dan usaha lainnya/ <i>Toll and other operating revenues</i>	581.393.466
Beban pengumpulan tol/ <i>Toll collection expenses</i>	Beban tol dan usaha lainnya/ <i>Toll and other operating expenses</i>	1.053.123.401
Beban pelayanan pemakai jalan tol/ <i>Toll road service expenses</i>	Beban tol dan usaha lainnya/ <i>Toll and other operating expenses</i>	555.116.855
Beban pemeliharaan jalan tol/ <i>Toll road maintenance expenses</i>	Beban tol dan usaha lainnya/ <i>Toll and other operating expenses</i>	1.361.569.988
Beban kerjasama operasi/ <i>Joint operation expenses</i>	Beban tol dan usaha lainnya/ <i>Toll and other operating expenses</i>	313.039.817
Beban pengumpulan tol/ <i>Toll collection expenses</i>	Beban umum dan administrasi/ <i>General and administrative expenses</i>	13.716.251
<u>Pada tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013/As of January 1, 2014/December 31, 2013</u>		
Beban akrual/ <i>Accrued expenses</i>	Liabilitas imbalan kerja jangka pendek lainnya/ <i>Short-term employee benefits liability</i>	118.064.239
Utang lain-lain/ <i>Other payables</i>	Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya/ <i>Other financial liabilities</i>	55.916.162
Liabilitas pajak tangguhan/ <i>Deferred tax liabilities</i>	Aset pajak tangguhan/ <i>Deferred tax assets</i>	7.647.664
Beban akrual/ <i>Accrual expenses</i>	Aset tidak lancar lainnya/ <i>Other non current assets</i>	20.535.748

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN TAHUN 2014 DAN 2013
(lanjutan)**

**4. RESTATEMENT OF 2014 AND 2013
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(continued)**

Akun-akun yang dipengaruhi atas penyajian kembali dan reklasifikasi diikhtisarkan sebagai berikut:

The accounts affected by the restatement and reclassification are summarized as follows:

	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	Penyesuaian atas penyajian kembali/ Restatement adjustments	Reklasifikasi/ Reclassifications	Setelah penyajian kembali/ After restatement	
					Consolidated statement of financial position as of December 31, 2014
					Assets
Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014					
Aset					
Piutang lain-lain - lancar	148.828.618	(1.457.682)	(99.281.519)	48.089.417	Other receivables - current
Persediaan	-	-	21.959.567	21.959.567	Inventories
Biaya dibayar di muka	71.982.203	3.727.805	(20.535.748)	55.174.260	Prepaid expenses
Piutang lain-lain - tidak lancar	-	-	99.281.519	99.281.519	Other receivables - non current
Aset tetap - neto	701.727.320	(42.437)	-	701.684.883	Fixed assets - net
Hak pengusahaan jalan tol - neto	23.935.414.790	5.989.707	-	23.941.404.497	Toll road concession rights - net
Aset takberwujud lainnya - neto	2.183.168.194	(13.224.835)	-	2.169.943.359	Other intangible assets - net
Aset pajak tangguhan	-	(12.039.013)	14.878.988	2.839.975	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	121.560.897	4.182.121	(1.423.819)	124.319.199	Other non-current assets
					Liabilities and equity
Liabilitas dan ekuitas					
Utang usaha	191.675.486	(9.579.138)	-	182.096.348	Trade payables
Utang kontraktor	990.488.834	7.592.109	-	998.080.943	Contractor payables
Utang pajak	261.565.448	1.958.873	-	263.524.321	Taxes payable
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	-	-	73.167.095	73.167.095	Other financial liabilities
Beban akrual	416.264.415	(11.385.002)	(84.437.680)	320.441.733	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	-	84.437.680	84.437.680	Short-term employee benefits liability
Pendapatan diterima dimuka	74.228.697	348.428	-	74.577.125	Unearned revenue
Liabilitas pajak tangguhan	623.500.126	(218.163.947)	(14.878.988)	390.457.191	Deferred tax liabilities
Utang lain-lain	73.661.131	(494.036)	(73.167.095)	-	Other payables
Provisi pelapisan jalan tol	366.108.597	(3.457.929)	-	362.650.668	Provision for overlay
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	390.989.981	654.340.592	-	1.045.330.573	Long-term employee liability
Saldo laba	4.009.691.773	(89.543.453)	-	3.920.148.320	Retained earnings
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	(316.506.521)	-	(316.506.521)	Actuarial loss on long-term employee benefits liability
Kepentingan nonpengendali	1.558.799.894	1.783.666	-	1.560.583.560	Non-controlling interests
					Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2014
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014					
Pendapatan tol dan usaha lainnya	7.229.494.194	(1.708.182)	-	7.227.786.012	Toll and other operating revenues
Beban tol dan usaha lainnya	-	-	3.562.757.971	(3.562.757.971)	Toll and other operating expenses
Beban pengumpulan tol	(1.082.602.766)	15.763.114	1.066.839.652	-	Toll collection expenses
Beban pelayanan pemakai jalan tol	(556.720.050)	1.603.195	555.116.855	-	Toll road service expenses
Beban pemeliharaan jalan tol	(1.364.537.738)	2.967.750	1.361.569.988	-	Toll road maintenance expenses
Beban kerjasama operasi	(313.039.817)	-	313.039.817	-	Joint operation expenses
Penghasilan lain-lain	287.553.459	304.149	-	287.857.608	Other income
Beban umum dan administrasi	(1.160.585.462)	9.551.006	266.191.660	(884.842.796)	General and administrative expenses
Beban pajak penghasilan	(606.642.066)	(7.005.072)	-	(613.647.138)	Income tax expense
Kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	57.314.587	-	(57.314.587)	Actuarial loss on long-term employee benefits liability
Laba tahun berjalan	1.215.331.727	21.682.445	-	1.237.014.172	Profit for the year
					Consolidated statement of financial position as of January 1, 2014/ December 31, 2013
Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2014/ 31 Desember 2013					
Aset					
Aset tetap - neto	591.313.394	50.725	-	591.364.119	Fixed assets - net
Hak pengusahaan jalan tol - neto	21.962.121.146	(2.495.402)	-	21.959.625.744	Toll road concession rights - net
Aset pajak tangguhan	-	695.699	7.647.664	8.343.363	Deferred tax assets
					Liabilities and equity
Liabilitas dan ekuitas					
Liabilitas pajak tangguhan	548.501.554	(206.052.850)	(7.647.664)	334.801.040	Deferred tax liabilities
Provisi pelapisan jalan tol	124.954.213	(2.218.491)	-	122.735.722	Provision for overlay
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	56.409.411	(493.249)	-	55.916.162	Other financial liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	326.108.985	590.945.099	-	917.054.084	Long-term employee liability
Saldo laba	3.140.790.240	(107.844.172)	-	3.032.946.068	Retained earnings
Kerugian atas aktuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	(259.191.934)	-	(259.191.934)	Actuarial loss on long-term employee benefits liability
Kepentingan nonpengendali	1.561.168.645	(1.598.059)	-	1.559.570.586	Non-controlling interests

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

5. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Kas - rupiah		
Kas	71.758.079	54.655.364
Kas proyek	710.000	710.000
Total Kas	72.468.079	55.365.364
Bank		
Rupiah		
Pihak berelasi (Catatan 45)	406.862.939	233.439.581
Pihak ketiga		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	37.851.346	19.279.074
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	6.330.091	1.915.295
PT Bank Permata Tbk	5.381.130	21.918.384
PT Bank Central Asia Tbk	5.218.508	483.641
PT Bank Bukopin Tbk	2.119.780	1.307.483
PT Bank Syariah Mandiri	1.299.378	9.195.739
PT Bank DBS Indonesia	930.103	454.189
PT Bank DKI	321.929	243.846
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	308.557	5.465.509
PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	187.730	339.735
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	75.710	815.597
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	33.809	186.328
PT Bank Jabar Banten Syariah	28.447	296.325
PT Bank Jasa Jakarta	1.964	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	605	605
Sub-total	466.952.026	295.341.331
Dolar Amerika Serikat		
Pihak berelasi (Catatan 45)	797.154	1.116.701
Total Bank	467.749.180	296.458.032
Deposito berjangka		
Rupiah		
Pihak berelasi (Catatan 45)	1.678.260.000	1.922.336.000
Pihak ketiga		
PT Bank Bukopin Tbk	585.250.000	348.100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	215.440.000	151.740.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	75.000.000	139.400.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	73.500.000	79.500.000
PT Bank Sinar Harapan Bali	39.000.000	10.000.000
PT Bank Syariah Bukopin	32.500.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	12.050.000	35.050.000
PT Bank DKI	12.124.162	46.182.826
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.000.000	65.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	10.000.000	9.000.000

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of:

Cash on Hand - rupiah	
Cash on hand	
Cash for project	
Total Cash on Hand	
Cash in Banks	
Rupiah	
Related parties (Note 45)	
Third parties	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	
PT Bank Permata Tbk	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank Bukopin Tbk	
PT Bank Syariah Mandiri	
PT Bank DBS Indonesia	
PT Bank DKI	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	
PT Muamalat Indonesia Tbk	
PT Bank Jabar Banten Syariah	
PT Bank Jasa Jakarta	
PT Bank OCBC NISP Tbk	
Sub-total	
United States dollar	
Related parties (Note 45)	
Total Cash in Banks	
Time Deposits	
Rupiah	
Related parties (Note 45)	
Third parties	
PT Bank Bukopin Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	
PT Muamalat Indonesia Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
PT Bank Sinar Harapan Bali	
PT Bank Syariah Bukopin	
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	
PT Bank DKI	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (lanjutan)

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Deposito berjangka Rupiah		
Pihak ketiga (lanjutan)		
PT Bank Syariah Mega Indonesia	10.000.000	-
PT Bank Panin Tbk	10.000.000	-
PT Bank Victoria International	2.000.000	2.000.000
PT Bank DBS Indonesia	1.705.182	1.467.456
PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	1.000.000	5.000.000
PT Bank Permata Tbk	-	83.000.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	-	20.000.000
PT Bank Panin Syariah Tbk	-	7.500.000
Sub-total	2.767.829.344	2.925.276.282
Dolar Amerika Serikat Pihak berelasi (Catatan 45)	15.174.500	13.684.000
Total Deposito Berjangka	2.783.003.844	2.938.960.282
Total kas dan setara kas	3.323.221.103	3.290.783.678

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

This account consists of: (continued)

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Time Deposits Rupiah		
Third parties (continued)		
PT Bank Syariah Mega Indonesia	-	-
PT Bank Panin Tbk	-	-
PT Bank Victoria International	2.000.000	2.000.000
PT Bank DBS Indonesia	1.467.456	1.467.456
PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	5.000.000	5.000.000
PT Bank Permata Tbk	83.000.000	83.000.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	20.000.000	20.000.000
PT Bank Panin Syariah Tbk	7.500.000	7.500.000
Sub-total	2.925.276.282	2.925.276.282
United States dollar Related parties (Note 45)	13.684.000	13.684.000
Total Time Deposits	2.938.960.282	2.938.960.282
Total cash and cash equivalents	3.290.783.678	3.290.783.678

Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The ranges of annual interest rates on time deposits were as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014
Rupiah	6,91% - 9,12%	4,5% - 11,0%
Dolar Amerika Serikat	1,5%	1,5%

Kas proyek merupakan uang tunai dan rekening giro yang tersedia untuk membiayai pemeliharaan dan pembangunan jalan tol.

Cash for project represent cash on hand and in banks to finance expenditures related to maintenance and toll roads construction.

6. INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Efek tersedia untuk dijual		
Reksadana Mandiri Investasi		
Dana Obligasi Seri II (Catatan 45)	4.529.650	4.529.650
Kenaikan nilai aset bersih	2.425.483	2.613.862
Total	6.955.133	7.143.512

6. SHORT-TERM INVESTMENTS

Short-term investments consist of:

Marketable securities available-for-sale
Mutual Fund Mandiri
Investment - Bond II Series (Note 45)
Increase in net assets value

Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

6. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)

Mutasi kenaikan nilai aset bersih adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Saldo awal	2.613.862	2.098.260
Laba (rugi) belum direalisasi	(188.379)	515.602
Neto	2.425.483	2.613.862

6. SHORT-TERM INVESTMENTS (continued)

A movement of increase in net assets value is as follows:

*Beginning balance
Unrealized profit (loss)*

Net

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari pendapatan yang akan diterima dari sewa lahan, sewa tempat istirahat, sewa ruang iklan dan bunga deposito berjangka yang akan diterima.

7. OTHER RECEIVABLES

This account consists of revenues to be received from rent of land, rest areas, advertisement spaces and interest on time deposits.

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Piutang lain-lain - lancar		
Pihak berelasi - rupiah (Catatan 45)	55.524.943	22.348.393
Pihak ketiga - rupiah		
Pegawai	18.663.020	108.274
PT Pertamina Retail	7.020.431	679.963
PT Solitronindo	3.905.898	2.506.661
PT Graha Sarana Duta	464.967	5.653.384
PT Hardi Agung	251.739	251.739
PT Nancy Wijaya	-	9.500.000
PT Indocement Tunggal Prakarsa	-	1.381.972
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	78.543.390	15.779.670
Sub-total	164.374.388	58.210.056
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(10.120.639)
Piutang lain-lain - lancar - neto	164.374.388	48.089.417
Piutang lain-lain - tidak lancar		
Pihak berelasi		
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) (Catatan 45)	132.813.579	99.281.519
Piutang lain-lain - neto	132.813.579	99.281.519

*Other receivables - current
Related party - rupiah (Note 45)
Third parties - rupiah
Employees
PT Pertamina Retail
PT Solitronindo
PT Graha Sarana Duta
PT Hardi Agung
PT Nancy Wijaya
PT Indocement Tunggal Prakarsa*

Others (each below Rp1 billion)

Sub-total

Allowance for impairment loss

Other receivables - current - net

*Other receivables - current
Related party
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) (Note 45)*

Other receivables - net

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

7. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014
Saldo awal tahun	10.120.639	-
Cadangan selama tahun berjalan	(10.120.639)	10.120.639
Saldo akhir tahun	-	10.120.639

Penyisihan kerugian penurunan nilai merupakan penurunan nilai secara individual. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi atas penurunan nilai piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2015.

8. PERSEDIAAN

Akun ini merupakan persediaan yang dimiliki oleh JMP, entitas anak, berupa tanah pengembangan dan rumah tinggal masing - masing sebesar Rp20.153.707 dan Rp21.959.567 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Uang muka internal	66.047.922	44.706.080
Biaya dibayar dimuka	3.835.184	10.450.793
Uang muka pekerjaan	39.759	17.387
Total	69.922.865	55.174.260

7. OTHER RECEIVABLES (continued)

The movements of the allowance for impairment loss account are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014
Saldo awal tahun	-	-
Cadangan selama tahun berjalan	(10.120.639)	10.120.639
Saldo akhir tahun	-	10.120.639

Allowance for impairment loss represents individual impairment. Based on a review of the status of other receivables at the end of the year, management believes that the above allowance for impairment loss of other receivables is sufficient to cover possible losses that may arise from impairment of other receivables as of December 31, 2015.

8. INVENTORIES

This account represents inventories owned by JMP, a subsidiary, consisting of land for development and residential houses, which amounted to Rp20,153,707 and Rp21,959,567 as of December 31, 2015 and 2014, respectively.

9. PREPAID EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Uang muka internal	66.047.922	44.706.080
Biaya dibayar dimuka	3.835.184	10.450.793
Uang muka pekerjaan	39.759	17.387
Total	69.922.865	55.174.260

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

10. DANA YANG DITETAPKAN PENGGUNAANNYA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Rekening khusus	1.064.017.216	604.798.152
Jaminan sindikasi bank:		
Pihak berelasi (Catatan 45)	202.499.800	130.667.718
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	4.650.728	4.390.033
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	329.171	156.443
Sub-total	207.479.699	135.214.194
Jaminan pelaksanaan:		
Pihak berelasi (Catatan 45)	162.122.340	16.350.000
Jaminan pembebasan tanah:		
Pihak ketiga		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	31.855.067	32.110.503
PT Bank UOB Indonesia	12.100.000	-
PT Bank Bukopin Tbk	8.800.000	6.800.000
Pihak berelasi (Catatan 45)	256.517	21.630.940
Sub-total	53.011.584	60.541.443
Total	1.486.630.839	816.903.789

Rekening khusus

Rekening khusus merupakan rekening atas pendapatan tol dari pengoperasian ruas JORR Seksi S setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan yang dipisahkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 80.1/KPTS/M/ 2013 tanggal 25 Februari 2013 (Catatan 46h).

10. RESTRICTED FUNDS

This account consists of:

31 Desember/December 31,	
2015	2014
	<i>Appropriated account</i>
	<i>Syndicated bank guarantee: Related parties (Note 45)</i>
	<i>Third parties</i>
	<i>PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah</i>
	<i>Sub-total</i>
	<i>Performance bond: Related parties (Note 45)</i>
	<i>Land acquisition guarantee: Third parties</i>
	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk PT Bank UOB Indonesia PT Bank Bukopin Tbk</i>
	<i>Related parties (Note 45)</i>
	<i>Sub-total</i>
	<i>Total</i>

Appropriated account

Appropriated account represents account derived from operational income of JORR Section S after deduction of operational and maintenance expenses which were separated and transferred to a specific account in accordance with the Decision Letter of the Minister of Public Works No.80.1/KPTS/M/2013 dated February 25, 2013 (Note 46h).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI - NETO

Rincian investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

11. INVESTMENTS IN ASSOCIATES - NET

The details of the investments in associates are as follows:

31 Desember 2015/December 31, 2015

Perusahaan asosiasi/ Associated company	Status/Status	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	Nilai tercatat penyertaan awal tahun/ Carrying value at beginning of year	Perubahan selama periode berjalan/ Changes in current period			Nilai tercatat penyertaan akhir tahun/ Carrying value at end of year
				Penambahan (pengurangan) penyertaan/ Additions (deduction) of investment	Bagian laba (rugi) bersih/ Portion in net profit (loss)	Penerimaan dividen/ Dividend received	
PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	34,83	56.787.000	-	-	-	56.787.000
PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	30,00	16.914.266	-	-	-	16.914.266
PT Ismawa Trimitra (IT)	Operasi/Operate	25,00	8.857.225	(104.575)	1.075.496	(1.025.997)	8.802.149
PT Bukaka Marga Utama (BMU)	Belum Operasi/ Not Yet Operated	20,00	9.436.000	-	-	-	9.436.000
PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)	Operasi/Operate	21,24	162.488.046	(15.239)	(5.273.653)	-	157.199.154
Sub-total			254.482.537	(119.814)	(4.198.157)	(1.025.997)	249.138.569
Dikurangi/Deducted:							
Penurunan nilai penyertaan pada CBMP/ Impairment of investment in CBMP			(56.786.999)				(56.786.999)
Penurunan nilai penyertaan pada CGMN/ Impairment of investment in CGMN			(16.914.265)				(16.914.265)
Penurunan nilai penyertaan pada BMU/ Impairment of investment in BMU			(9.435.999)				(9.435.999)
Sub-total			(83.137.263)				(83.137.263)
Total			171.345.274				166.001.306

31 Desember 2014/December 31, 2014

Perusahaan asosiasi/ Associated company	Status/Status	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	Nilai tercatat penyertaan awal tahun/ Carrying value at beginning of year	Perubahan Selama periode berjalan/ Changes in current period			Nilai tercatat penyertaan akhir tahun/ Carrying value at end of year
				Penambahan (pengurangan) penyertaan/ Additions (deduction) of investment	Bagian laba (rugi) bersih/ Portion in net profit (loss)	Penerimaan dividen/ Dividend received	
PT Citra Bhakti Margatama Persada (CBMP)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	34,83	56.787.000	-	-	-	56.787.000
PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	30,00	16.914.266	-	-	-	16.914.266
PT Ismawa Trimitra (IT)	Operasi/Operate	25,00	8.976.442	-	1.030.628	(1.149.845)	8.857.225
PT Bukaka Marga Utama (BMU)	Belum Operasi/ Not Yet Operated	20,00	9.436.000	-	-	-	9.436.000
PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ)	Operasi/Operate	21,24	170.260.633	-	(7.772.587)	-	162.488.046
Sub-total			262.374.341	-	(6.741.959)	(1.149.845)	254.482.537
Dikurangi/Deducted:							
Penurunan nilai penyertaan pada CBMP/ Impairment of investment in CBMP			(56.786.999)				(56.786.999)
Penurunan nilai penyertaan pada CGMN/ Impairment of investment in CGMN			(16.914.265)				(16.914.265)
Penurunan nilai penyertaan pada BMU/ Impairment of investment in BMU			(9.435.999)				(9.435.999)
Sub-total			(83.137.263)				(83.137.263)
Total			179.237.078				171.345.274

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI – NETO
(lanjutan)**

Informasi tambahan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	Total aset/ Total assets	Total liabilitas/ Total liabilities	Total pendapatan/ Total revenues	Laba (rugi) neto/ Net income (loss)	
2015					2015
IT	48.161.217	2.295.800	18.508.317	4.301.989	IT
TLKJ	1.540.010.346	1.049.052.410	132.698.723	(24.828.876)	TLKJ
2014					2014
IT	49.971.459	2.341.175	16.974.352	4.103.991	IT
TLKJ	1.483.635.757	967.848.945	216.151.099	(36.653.630)	TLKJ

**11. INVESTMENTS IN ASSOCIATES – NET
(continued)**

Additional information as of December 31, 2015 and 2014 and for the years then ended on the investments in associates is as follows:

CBMP

CBMP didirikan berdasarkan Akta No. 50, tanggal 11 Desember 1995 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Penyertaan pada CBMP dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol JORR Seksi E2-E3-N (Cikunir-Cakung-Cilincing-Tanjung Priok) untuk jangka waktu 33 tahun yang berakhir pada tahun 2028, Perusahaan memiliki 56.787.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp56.787.000 yang merupakan 34,83% kepemilikan.

Pembangunan jalan tol oleh CBMP dibiayai dari fasilitas pinjaman sindikasi bank. Krisis ekonomi telah menyebabkan ketidakpastian terhadap kemampuan CBMP dalam menyelesaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo dan dalam merealisasikan fasilitas pinjaman untuk pembiayaan jalan tol tahap konstruksi. Restrukturisasi perbankan yang dilakukan terhadap sebagian dari kreditur CBMP telah mengakibatkan penghentian pelaksanaan pembangunan jalan tol. Adanya surat Perusahaan kepada CBMP No. AA.02.1009 tanggal 25 Juli 2000 mengenai pengakhiran PKP No. 96 tanggal 16 Desember 1995 mengakibatkan penyertaan Perusahaan pada entitas asosiasi ini tidak memiliki nilai ekonomis. Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai penyertaan saham pada CBMP pada tahun 2000 sebesar Rp56.786.999.

CBMP

CBMP was established based on the Deed No.50, dated December 11, 1995, of Notary Siti Pertrwi Henny Singgih, S.H. The investment in CBMP was made in relation to the construction and operation of JORR toll road Section E2-E3-N (Cikunir-Cakung-Cilincing-Tanjung Priok) for a period of 33 years ending in 2028. The Company owns 56,787,000 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp56,787,000, representing 34.83% ownership.

Toll road construction by CBMP was financed by loan facilities from a banking syndicate. The economic crisis created an uncertainty about the ability of CBMP to settle its liabilities at the maturity date and in using its loan facilities to finance the toll road construction progress. A banking restructuring conducted by certain of CBMP's creditors resulted to the stoppage of toll road construction. The Company issued Letter No. AA.02.1009, dated July 25, 2000, to CBMP regarding the termination of the Concession Agreement No. 96, dated December 16, 1995. As a consequence of this termination, the Company's investment in the associate company has no economic value. The Company has recognized loss on impairment of the investment shares of CBMP in 2000 amounting to Rp56,786,999.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI - NETO
(lanjutan)**

CGMN

CGMN didirikan berdasarkan Akta No. 300, tanggal 22 Desember 1993 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., juncto Akta No. 67 tanggal 7 Juli 1994 dari Notaris Sri Laksmi Damayanti, S.H. Penyertaan pada CGMN dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Cikampek-Padalarang. Perusahaan memiliki 5.310 saham dengan nilai nominal Rp1.841 per lembar saham atau setara dengan Rp9.775.710 yang merupakan 30% kepemilikan.

Berdasarkan surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. KU.201-Mn/68 tanggal 4 Maret 1996 dan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1562/A/52/0496 tanggal 18 April 1996, Perusahaan memperoleh pengalihan *Intellectual Property Rights* (IPR) dalam bentuk disain proyek jalan tol Cikampek – Padalarang sebesar UK Poundsterling 4.700.000 atau setara dengan Rp16.914.266 sebagai Tambahan Modal Disetor Pemerintah pada Perusahaan. Selanjutnya, Perusahaan mengalihkan IPR tersebut kepada CGMN sebagai penyertaan saham Perusahaan di CGMN. Berdasarkan perjanjian usaha patungan antara Perusahaan dengan CGMN, IPR tersebut dinilai setara dengan US\$8.530.000. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CGMN tanggal 10 Juli 1998 mengenai Peningkatan Modal Disetor, kepemilikan saham pada CGMN sejumlah 8.530 lembar saham dengan nilai nominal US\$8.530.000 atau setara dengan Rp16.914.266.

Berdasarkan surat Perusahaan kepada CGMN No. AA.HK01.1273 tanggal 25 Juli 2001 mengenai pengakhiran PKP No. 297 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia (Menkimpraswil) No. 417 tanggal 18 Juli 2001 mengenai pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 321/KPTS/1994, tanggal 24 Oktober 1994 mengenai Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan Jalan Tol Cikampek - Padalarang kepada Perusahaan dalam bentuk usaha patungan dengan CGMN mengakibatkan penyertaan Perusahaan pada entitas asosiasi ini tidak memiliki nilai ekonomis. Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai penyertaan saham pada CGMN sebagai beban tahun 2001 sebesar Rp16.914.266.

**11. INVESTMENTS IN ASSOCIATES - NET
(continued)**

CGMN

CGMN was established based on the Deed No. 300, dated December 22, 1993, of Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., in conjunction with the Deed No. 67 dated July 7, 1994 of Notary Sri Laksmi Damayanti, S.H. The investment in CGMN was made in relation to the construction and operation of the Cikampek – Padalarang toll road project. The Company owns 5,310 shares at par value of Rp1,841 per share or equivalent to Rp9,775,710 representing 30% ownership.

Based on the Decree of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia No. KU.201-Mn/68 dated March 4, 1996 and the Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1562/A/52/0496 dated April 18, 1996, the Company obtained a transfer of “Intellectual Property Rights (IPR)” in the form of project design of Cikampek – Padalarang toll road amounting to Great Britain Poundsterling 4,700,000 or equivalent to Rp16,914,266 as additional paid-in capital from the Government to the Company. The Company then transferred the IPR to CGMN as an investment by the Company to CGMN. Based on the joint venture agreement between the Company and CGMN, the IPR was valued at US\$8,530,000. According to the decision during the Extraordinary General Meeting of Shareholders held by CGMN on July 10, 1998 regarding the increase in paid up capital, the Company owns 8,530 shares at par value of US\$8,530,000 or equal to Rp16,914,266.

On July 25, 2001, based on the Company’s Letter No. AA.HK01.1273 to CGMN regarding termination of the Concession Agreement No. 297 in order to implement the Decree of the Minister of Settlement and Regional Infrastructure of the Republic of Indonesia No. 417 dated July 18, 2001 regarding cancellation of the Decree of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia No. 321/KPTS/1994 dated October 24, 1994 regarding the Granting of license to Concession Agreement to the Company to operate the Cikampek - Padalarang toll road in the form of a joint venture with CGMN. Due to such termination, the investment in CGMN has no economic value. The Company recognized loss on the permanent impairment of this investment in shares of CGMN in 2001 amounting to Rp16,914,266.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI - NETO
(lanjutan)**

IT

IT didirikan berdasarkan akta notaris No. 69 tanggal 14 Juni 1995 dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., dalam rangka pengusahaan jasa sewa ruang perkantoran dan tempat istirahat di ruas tol. Anggaran dasar IT telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris No. 1 tanggal 4 September 2014 dari Lumassia, S.H. Akta perubahan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27882.40.22.2014 tanggal 4 September 2014. IT berdomisili di Jakarta.

Perusahaan memiliki 6.250.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp6.250.000, yang merupakan 25% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2015.

BMU

BMU didirikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 17 Februari 1997 dari Notaris Sri Rahayu Sedyono, S.H. Penyertaan pada BMU dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Ciawi-Sukabumi. Perusahaan memiliki 4.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp2.359 per lembar saham atau setara dengan Rp9.436.000 yang merupakan 20% kepemilikan.

Pemegang saham mayoritas BMU tidak dapat memberi kepastian atas pembangunan ruas jalan tol yang telah disetujui sesuai dengan PKP. Perusahaan mengakui kerugian penurunan nilai atas penyertaan saham pada BMU sebagai beban tahun 2005 sebesar Rp9.435.999.

TLKJ

TLKJ didirikan berdasarkan akta notaris No. 18 tanggal 19 Januari 2006 dari Agus Madjid, S.H., dalam rangka pengusahaan ruas tol Cinere-Jagorawi. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-03269.HT.01.01 tanggal 7 Februari 2006.

**11. INVESTMENTS IN ASSOCIATES - NET
(continued)**

IT

PT Ismawa Trimitra was established based on notarial deed No. 69 dated June 14, 1995 of Imas Fatimah, S.H., aimed to develop services in office spaces and rest area spaces for rental. IT's articles of association had been amended several times, with the latest of which was based on notarial deed No. 1 dated September 4, 2014 of Lumassia, S.H. The deed of amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-27882.40.22.2014 dated September 4, 2014. IT is domiciled in Jakarta.

The Company owns 6,250,000 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp6,250,000, which represent 25% ownership as of December 31, 2015.

BMU

BMU was established based on the Deed No. 5 dated February 17, 1997 of Notary Sri Rahayu Sedyono, S.H. The investment in BMU was made in relation to the construction and operation of the Ciawi-Sukabumi toll road project. The Company owns 4,000 shares at par value Rp2,359 per share or equivalent to Rp9,436,000, which represent of 20% ownership.

Since the majority shareholders of BMU could not give assurance regarding the toll road development as agreed under the Concession Agreements, the Company recognized loss on impairment of this investment in 2005 amounting to Rp9,435,999.

TLKJ

TLKJ was established based on notarial deed No. 18 dated January 19, 2006 of Agus Madjid, S.H., aimed to develop Cinere-Jagorawi toll road. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-03269.HT.01.01 dated February 7, 2006.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI - NETO
(lanjutan)**

TLKJ (lanjutan)

Anggaran Dasar TLKJ telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris No. 76 tanggal 29 November 2012 dari Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Akta perubahan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-42622 tanggal 30 November 2012. TLKJ berdomisili di Jakarta.

Perusahaan memiliki 131.688 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp131.688.000, yang merupakan 21,24% kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2015.

**11. INVESTMENTS IN ASSOCIATES - NET
(continued)**

TLKJ (continued)

TLKJ's Articles of Association had been amended several times, with the latest of which was based on notarial deed No. 76 dated November 29, 2012 of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The deed of amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.10-42622 dated November 30, 2012. TLKJ is domiciled in Jakarta.

The Company owns 131,688 shares at par value of Rp1,000 per share or equivalent to Rp131,688,000, which represent 21.24% ownership as of December 31, 2015.

12. ASET TETAP - NETO

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

12. FIXED ASSETS – NET

The details of fixed assets are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015/ Year ended December 31, 2015					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya perolehan					At cost
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Hak atas tanah	7.694.209	-	-	-	7.694.209
Gedung kantor dan bangunan lain	224.424.076	22.910.905	66.214	-	247.268.767
Peralatan operasi dan kantor	804.614.881	120.851.102	872.605	(495.165)	924.098.213
Kendaraan	58.985.794	5.963.585	6.365.715	-	58.583.664
Sub-total	1.095.718.960	149.725.592	7.304.534	(495.165)	1.237.644.853
					Sub-total
<u>Sewa pembiayaan</u>					<u>Leases</u>
Peralatan tol	163.282.860	-	-	-	163.282.860
					Toll equipment
<u>Aset dalam pelaksanaan</u>	198.124.805	339.006.336	5.483.938	(131.283.613)	400.363.590
					<u>Construction in progress</u>
Total	1.457.126.625	488.731.928	12.788.472	(131.778.778)	1.801.291.303
					Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>					<u>Direct ownership</u>
Gedung kantor dan bangunan lain	83.461.364	11.394.959	685.497	-	94.170.826
Peralatan operasi dan kantor	628.801.420	111.406.186	921.552	(13.754)	739.272.300
Kendaraan	33.800.975	8.071.864	5.142.154	-	36.730.685
Sub-total	746.063.759	130.873.009	6.749.203	(13.754)	870.173.811
					Sub-total
<u>Sewa pembiayaan</u>					<u>Leases</u>
Peralatan tol	9.377.983	7.896.716	-	-	17.274.699
					Toll equipment
Total	755.441.742	138.769.725	6.749.203	(13.754)	887.448.510
					Total
Nilai Buku Neto	701.684.883				913.842.793
					Net Book Value

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

12. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

12. FIXED ASSETS - NET (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014/
Year ended December 31, 2014

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan						At cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Hak atas tanah	3.329.787	4.364.422	-	-	7.694.209	Land rights
Gedung kantor dan bangunan lain	200.584.547	23.839.529	-	-	224.424.076	Office and other buildings
Peralatan operasi dan kantor	671.499.525	146.453.043	13.476.252	138.565	804.614.881	Operational and office equipment
Kendaraan	50.486.084	14.539.003	6.039.293	-	58.985.794	Vehicle
Sub-total	925.899.943	189.195.997	19.515.545	138.565	1.095.718.960	Sub-total
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Leases</u>
Peralatan tol	163.282.860	-	-	-	163.282.860	Toll equipments
<u>Aset dalam konstruksi</u>	130.159.479	124.800.532	-	(56.835.206)	198.124.805	<u>Construction in progress</u>
Total	1.219.342.282	313.996.529	19.515.545	(56.696.641)	1.457.126.625	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Gedung kantor dan bangunan lain	74.644.068	8.817.296	-	-	83.461.364	Office and other buildings
Peralatan operasi dan kantor	524.087.660	118.089.848	13.376.088	-	628.801.420	Operational and office equipment
Kendaraan	29.105.577	7.852.071	3.156.673	-	33.800.975	Vehicle
Sub-total	627.837.305	134.759.215	16.532.761	-	746.063.759	Sub-total
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Leases</u>
Peralatan tol	140.858	9.237.125	-	-	9.377.983	Toll equipments
Total	627.978.163	143.996.340	16.532.761	-	755.441.742	Total
Nilai Buku Neto	591.364.119				701.684.883	Net Book Value

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets is allocated as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014	
Beban tol dan usaha lainnya (Catatan 39)	78.374.403	94.835.830	Toll and other operating expenses (Note 39)
Beban umum dan administrasi (Catatan 40)	60.395.322	49.160.510	General and administrative expenses (Note 40)
Total	138.769.725	143.996.340	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

12. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Rincian tingkat penyelesaian atas penambahan aset tetap dalam konstruksi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	Penyelesaian/ Percentage of Completion		
	2015	2014	
Gedung kantor	93%	50%	Other buildings
Sarana pelengkap	50%	81%	Facility

Kelompok Usaha telah mengasuransikan aset tetapnya terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Jasa Raharja Putra, PT Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Himalaya Pelindung dan PT Asuransi Sinar Mas, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp368.213.937 pada tahun 2015. Manajemen Kelompok Usaha berpendapat bahwa nilai pertanggungannya cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

12. FIXED ASSETS - NET (continued)

The details additional of property and equipment under construction in progress as of December 31, 2015 and 2014 are as follows:

The Group's fixed assets are insured against fire and other risks with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Jasa Raharja Putra, PT Asuransi Staco Mandiri, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Takaful Umum, PT Asuransi Himalaya Pelindung dan PT Asuransi Sinar Mas, with total coverage amounting to Rp368,213,937 in 2015. Management of the Group believes that the coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

13. PROPERTI INVESTASI

Akun ini merupakan properti investasi yang dimiliki oleh JMP, entitas anak.

13. INVESTMENT PROPERTIES

This account represents investment properties owned by JMP, a subsidiary.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015/ Year ended December 31, 2015						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan						At cost
Properti investasi	-	85.016.445	-	-	85.016.445	Investment properties
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Properti investasi	-	681.335	-	-	681.335	Investment properties
Nilai Buku Neto	-				84.335.110	Net Book Value

Penyusutan sebesar Rp681.335 (Catatan 40) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibebankan pada akun beban tol dan usaha lainnya.

Depreciation amounting to Rp681,335 (Note 40) for the year ended December 31, 2015 was charged to toll and other operating expenses.

Properti investasi terutama merupakan investasi pada bangunan yang terletak di TB Simatupang dan Hayam Wuruk, Jakarta. Properti investasi tersebut disewakan.

Investment properties represent investment in land and buildings located at TB Simatupang and Hayam Wuruk, Jakarta. These investment properties are rented.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

14. HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL - NETO

Aset hak pengusahaan jalan tol merupakan hak konsesi dari Pemerintah Republik Indonesia berupa pengusahaan jalan tol yang diberikan kepada Kelompok Usaha, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015/
Year ended December 31, 2015

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan	28.212.135.198	1.572.912.134	67.636.737	-	29.717.410.595	Acquisition cost
Akumulasi amortisasi	4.270.730.701	582.391.629	432.007	-	4.852.690.323	Accumulated amortization
Nilai Buku Neto	23.941.404.497				24.864.720.272	Net Book Value

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014/
Year ended December 31, 2014

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan	25.541.535.264	2.670.599.934	-	-	28.212.135.198	Acquisition cost
Akumulasi amortisasi	3.581.909.520	688.821.181	-	-	4.270.730.701	Accumulated amortization
Nilai Buku Neto	21.959.625.744				23.941.404.497	Net Book Value

Berdasarkan penelaahan manajemen Kelompok Usaha, mulai tanggal 1 Januari 2015, Kelompok Usaha memutuskan untuk mengganti metode amortisasi hak pengusahaan jalan tol - jalan dan jembatan dari metode garis lurus selama masa konsesi menjadi metode unit pemakaian berdasarkan volume lalu lintas. Perubahan metode amortisasi ini diterapkan secara prospektif.

Beban amortisasi hak pengusahaan jalan tol untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp582.391.629 dan Rp688.821.181 (Catatan 39) dan dibebankan sebagai bagian dari beban tol dan usaha lainnya untuk ruas jalan tol yang sudah beroperasi secara komersial.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke dalam hak pengusahaan jalan tol - aset konsesi dalam penyelesaian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp485.046.029.

Berdasarkan penilaian manajemen, tidak ada perubahan nilai wajar yang signifikan terhadap nilai hak pengusahaan jalan tol pada tanggal 31 Desember 2015.

Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai hak pengusahaan jalan tol lainnya pada tanggal 31 Desember 2015.

14. TOLL ROAD CONCESSION RIGHTS - NET

Toll road concession rights are granted by the Government of Indonesia in the form of toll road concessions to the Group, with details as follows:

Based on the Group's management assessment, starting January 1, 2015, the Group decided to change its amortization method of toll road concession rights - road and bridge from the straight line method over the concession period to the unit of usage method based on traffic volume. The change in the amortization method is applied on a prospective basis.

Amortization of toll road concession rights for the years ended December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp582,391,629 and Rp688,821,181 (Note 39) and charged to toll and other operating expenses for the toll road section that already operated.

The borrowing cost capitalized to toll road concession rights - concession assets in progress for the years ended December 31, 2015 amounted to Rp485,046,029.

Based on management's assessment, there is no significant change in the fair value of the toll road concession rights as of December 31, 2015.

The Group's Management believes that there was no impairment in the value of other toll road concession rights as of December 31, 2015.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

15. ASET TAKBERWUJUD LAINNYA

Rincian aset tak berwujud lainnya adalah sebagai berikut:

15. OTHER INTANGIBLE ASSETS

The details of other intangible assets are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015/ Year ended December 31, 2015						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan						At cost
Tanah pra-konstruksi	2.141.969.107	1.793.409.169	3.833.500	-	3.931.544.776	Pre-construction land
Perangkat lunak	60.206.766	25.037.827	-	(11.134.315)	74.110.278	Software
Sub-total	2.202.175.873	1.818.446.996	3.833.500	(11.134.315)	4.005.655.054	Sub-total
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortization
Perangkat lunak (Catatan 39)	32.232.514	16.353.172	-	-	48.585.687	Software (Note 39)
Nilai Buku Neto	2.169.943.359				3.957.069.367	Net Book Value

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014/ Year ended December 31, 2014						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan						At cost
Tanah pra-konstruksi	630.024.173	1.511.944.934	-	-	2.141.969.107	Pre-construction land
Perangkat lunak	32.936.993	27.269.773	-	-	60.206.766	Software
Sub-total	662.961.166	1.539.214.707	-	-	2.202.175.873	Sub-total
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortization
Perangkat lunak	21.842.630	10.389.884	-	-	32.232.514	Software
Nilai Buku Neto	641.118.536				2.169.943.359	Net Book Value

16. GOODWILL

Saldo goodwill merupakan selisih antara nilai wajar aset neto perusahaan yang diakuisisi dari pihak ketiga dengan nilai akuisisi secara keseluruhan, dengan detail sebagai berikut:

16. GOODWILL

The balance of goodwill consists of the difference between fair value of net assets of the following companies acquired from third parties and the total acquisition price:

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	
Nilai tercatat			Carrying amount
PT Marga Nujyasumo Agung	36.879.508	36.879.508	PT Marga Nujyasumo Agung
PT Marga Kunciran Cengkareng	2.120.709	2.120.709	PT Marga Kunciran Cengkareng
PT Jasa Layanan Pemeliharaan	2.848.350	2.848.350	PT Jasa Layanan Pemeliharaan
Total	41.848.567	41.848.567	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

17. ASET KEUANGAN LAINNYA

Perusahaan memiliki penyertaan saham yang dikategorikan sebagai aset keuangan tersedia untuk di jual yang dicatat sebagai harga perolehan dengan rincian sebagai berikut:

Entitas/Entity	Status/Status	31 Desember 2015/ December 31, 2015		31 Desember 2014/ December 31, 2014	
		Rp	%	Rp	%
PT Jakarta Lingkar Barat Satu (JLB)	Operasi/Operating	180.632.000	19,10	180.632.000	19,10
PT Marga Mandala Sakti (MMS)	Operasi/Operating	28.000.000	1,94	28.000.000	1,94
PT Citra Margatama Surabaya (CMS)	Operasi/Operating	20.000.000	5,26	20.000.000	5,26
PT Marga Nurindo Bhakti (MNB)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	9.500.000	4,75	9.500.000	10,00
PT Margabumi Matraraya (MBMR)	Operasi/Operating	-	-	5.500.000	4,92
PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	4.725.000	15,00	4.725.000	15,00
PT Margaraya Jawa Tol (MJT)	Belum Operasi/ Not Yet Operating	4.143.438	2,47	4.143.438	2,47
PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)	Operasi/Operating	3.332.000	1,47	3.332.000	1,47
PT Jatim Marga Utama (JMU)	Belum Operasi/ Not Yet Operating	3.000.000	7,00	3.000.000	7,00
PT Marga Mawatindo Esprit (MME)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	2.780.862	8,33	2.780.862	8,33
PT Marga Net One Limited (MNOL)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	15.291	10,00	15.291	10,00
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	Belum Operasi/ Not Yet Operating	90.000.000	12,00	-	-
Total		346.128.591		261.628.591	
Dikurangi/Deducted:					
Penurunan Nilai Penyertaan pada MNB/ Impairment of Investment in MNB		(9.499.999)		(9.499.999)	
Penurunan Nilai Penyertaan pada CMSP/ Impairment of Investment in CMSP		(4.724.999)		(4.724.999)	
Penurunan Nilai Penyertaan pada MME/ Impairment of Investment in MME		(2.780.860)		(2.780.860)	
Penurunan Nilai Penyertaan pada MNOL/ Impairment of Investment in MNOL		(15.289)		(15.289)	
		(17.021.147)		(17.021.147)	
Neto/Net		329.107.444		244.607.444	

a. PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)

Perusahaan telah melakukan pengakhiran kerjasama penyelenggaraan jalan tol JORR Seksi W1 dan pencabutan izin kerjasama dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 80/KPTS/1997 tanggal 4 April 1997 sehubungan dengan tidak adanya kejelasan kelanjutan pembangunan proyek jalan tol JORR W-1. Menunjuk surat Menteri Pekerjaan Umum No. JL.0103-Mn/271 tanggal 31 Maret 2005, Menteri Pekerjaan Umum meminta Perusahaan dan JLB melakukan penilaian kembali tentang kelayakan untuk melanjutkan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan ruas jalan tol JORR Seksi W-1.

17. OTHER FINANCIAL ASSETS

The Company has investment in shares categorized as available-for-sale financial asset that accounted for at cost with details as follow:

Entitas/Entity	Status/Status	31 Desember 2015/ December 31, 2015		31 Desember 2014/ December 31, 2014	
		Rp	%	Rp	%
PT Jakarta Lingkar Barat Satu (JLB)	Operasi/Operating	180.632.000	19,10	180.632.000	19,10
PT Marga Mandala Sakti (MMS)	Operasi/Operating	28.000.000	1,94	28.000.000	1,94
PT Citra Margatama Surabaya (CMS)	Operasi/Operating	20.000.000	5,26	20.000.000	5,26
PT Marga Nurindo Bhakti (MNB)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	9.500.000	4,75	9.500.000	10,00
PT Margabumi Matraraya (MBMR)	Operasi/Operating	-	-	5.500.000	4,92
PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	4.725.000	15,00	4.725.000	15,00
PT Margaraya Jawa Tol (MJT)	Belum Operasi/ Not Yet Operating	4.143.438	2,47	4.143.438	2,47
PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)	Operasi/Operating	3.332.000	1,47	3.332.000	1,47
PT Jatim Marga Utama (JMU)	Belum Operasi/ Not Yet Operating	3.000.000	7,00	3.000.000	7,00
PT Marga Mawatindo Esprit (MME)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	2.780.862	8,33	2.780.862	8,33
PT Marga Net One Limited (MNOL)	Pengakhiran PKP/ Termination of Concession	15.291	10,00	15.291	10,00
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	Belum Operasi/ Not Yet Operating	90.000.000	12,00	-	-
Total		346.128.591		261.628.591	
Dikurangi/Deducted:					
Penurunan Nilai Penyertaan pada MNB/ Impairment of Investment in MNB		(9.499.999)		(9.499.999)	
Penurunan Nilai Penyertaan pada CMSP/ Impairment of Investment in CMSP		(4.724.999)		(4.724.999)	
Penurunan Nilai Penyertaan pada MME/ Impairment of Investment in MME		(2.780.860)		(2.780.860)	
Penurunan Nilai Penyertaan pada MNOL/ Impairment of Investment in MNOL		(15.289)		(15.289)	
		(17.021.147)		(17.021.147)	
Neto/Net		329.107.444		244.607.444	

a. PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)

The Company had terminated its cooperation in completing Toll Road JORR Section W1 and withdrawn its cooperation license in the Decree of the Minister of Public Works No. 80/KPTS/1997 dated April 4, 1997 since there's no clear intention to continue construction project of Toll Road JORR W-1. With reference to the Decree of the Minister of Public Works No. JL.0103-Mn/271 dated March 31, 2005, the Minister of Public Works asked the Company and JLB to conduct re-evaluation on the feasibility of continuing the cooperation in development of Toll Road JORR Section W-1.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

17. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

**a. PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)
(lanjutan)**

Pada tanggal 2 Februari 2007, JLB selaku pemegang hak pengusahaan jalan tol JORR Seksi W-1, telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) JORR Seksi W-1 No. 02/PPJT/II/Mn/2007 dengan masa konsesi selama 35 tahun dan berlaku efektif sejak 2 Februari 2007. Berdasarkan perjanjian penyertaan saham pada JLB No. 2 tanggal 4 Februari 2009 dari Notaris Febrian, S.H., Perusahaan melakukan penyertaan pada JLB dengan cara *in-kind* berupa bangunan Simpang Susun Penjaringan dengan nilai penyertaan sebesar Rp180.632.000 atau setara dengan 180.632 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham, atau setara dengan 23% penyertaan dari total saham ditempatkan.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 18 tanggal 28 September 2009 dari Notaris Kartono, S.H., penyertaan Perusahaan terdilusi menjadi sebesar 19,1%.

b. PT Marga Mandala Sakti (MMS)

MMS didirikan berdasarkan Akta No. 14 tanggal 4 Oktober 1989 dari Notaris Kartini Muljadi, S.H. Penyertaan pada MMS dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Tangerang - Merak. Perusahaan memiliki 28.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp28.000.000 yang merupakan 8,68% kepemilikan. Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 4 April 1995 dari Notaris Sutjipto, S.H., penyertaan saham Perusahaan pada MMS sebesar 14.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham telah dijamin oleh MMS sehubungan dengan fasilitas kredit sindikasi yang diperoleh MMS.

17. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

**a. PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB)
(continued)**

On February 2, 2007, JLB as the owner of concession rights of Toll Road JORR Section W1 has entered into Contract of Concession Toll Road JORR Section W-1, No. 02/PPJT/II/Mn/2007 with concession period of 35 years, effective on February 2, 2007. Based on agreement to investments in shares of JLB No. 2 dated February 4, 2009 from Notary Febrian, S.H., the Company participated in JLB by building Simpang Susun Penjaringan for participation value of Rp180,632,000 or equivalent to 180,632 shares with par value Rp1,000,000 per share, or equivalent to 23% participation from total issued share capital.

Based on Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 18 dated September 28, 2009 by Notary Kartono, S.H., the Company's ownership was diluted to 19.1%.

b. PT Marga Mandala Sakti (MMS)

MMS was established based on the Deed No.14 dated October 4, 1989 of Notary Kartini Muljadi, S.H. The investment in MMS relates to the construction and operation of the Tangerang - Merak toll road. The Company originally owned 28,000,000 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp28,000,000, which represent 8.68% ownership. Based on the Deed No. 4 dated April 4, 1995 of Notary Sutjipto, S.H., the investment in MMS amounting to 14,000,000 shares with the par value of Rp1,000 (full amount) per share has been pledged by the Company in connection with syndicated credit facilities received by MMS.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

17. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

b. PT Marga Mandala Sakti (MMS) (lanjutan)

Berdasarkan risalah RUPSLB dengan Akta No. 5 tanggal 9 Desember 2004 dari Notaris Hendra Karyadi, S.H., para pemegang lembar saham menyetujui penerbitan 921.310.773 lembar saham baru kepada pemegang obligasi konversi. Para pemegang saham lama menyatakan telah melepaskan hak masing-masing untuk membeli saham baru yang diterbitkan kepada pemegang obligasi konversi tersebut. Perubahan pemegang saham tersebut sesuai dengan Akta No. 11 tanggal 1 Agustus 2005 dari Notaris Benny Kristianto, S.H., mengenai perubahan pemegang saham MMS dan telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Administrasi Hukum Umum No. C-UM.02.01.14078, tanggal 23 September 2005, sehingga kepemilikan Perusahaan pada MMS menjadi sebesar 1,94%.

c. PT Citra Margatama Surabaya (CMS)

CMS didirikan berdasarkan Akta No. 99 tanggal 26 Desember 1996 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Penyertaan pada CMS dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Waru-Juanda. Perusahaan memiliki 8.550.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau sebesar Rp8.550.000 yang merupakan 15% kepemilikan.

Berdasarkan Akta No. 717 tanggal 27 Juni 2007 dari Notaris Margaretha Dynawati, S.H., para pemegang saham antara lain menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp380.000.000. Perusahaan hanya melakukan setoran modal sebesar Rp20.000.000 dari Rp48.000.000 yang ditetapkan. Dengan demikian kepemilikan Perusahaan di CMS mengalami penurunan menjadi sebesar 5,26% yang merupakan 20.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp20.000.000.

17. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

b. PT Marga Mandala Sakti (MMS) (continued)

Based on the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders as included in the Deed No. 5 dated December 9, 2004 of Notary Hendra Karyadi, S.H., the shareholders agreed with the issuance of 921,310,773 new shares to convertible bondholders. The predecessor shareholders had already waived their rights to subscribe for new shares issued to the convertible bondholders. This change of shareholders, according to the Deed No. 11 dated August 1, 2005 of Notary Benny Kristianto, S.H., regarding the change of MMS shareholders, has been received by the Directorate General of General Law Administration, Department of Law and Human Rights under receipt No.C-UM.02.01.14078, dated September 23, 2005, as a consequence, the Company's ownership in MMS become 1.94%.

c. PT Citra Margatama Surabaya (CMS)

CMS was established based on the Deed No. 99 dated December 26, 1996 of Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. The investment in CMS was made in relation to the constructions and operations of the Waru-Juanda toll road project. The Company owns 8,550,000 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp8,550,000, which represent 15% ownership.

Based on the Deed No. 717 dated June 27, 2007 of Notary Margaretha Dynawati, S.H., the shareholders agreed to increase the issued and paid up capital to become Rp380,000,000. The Company had paid up capital amounted to Rp20,000,000 from total of Rp48,000,000. Therefore, the Company's ownership in CMS has become 5.26%, representing 20,000,000 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp20,000,000.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

17. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

**c. PT Citra Margatama Surabaya (CMS)
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta No. 40 tanggal 21 Mei 2005 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Perusahaan dan CMS mengadakan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan yang mengubah wewenang penyelenggaraan jalan tol Waru - Tanjung Perak menjadi kurang lebih 12 Km. Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan telah dialihkan menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara Pemerintah dengan CMS pada tanggal 12 Februari 2007 dengan masa hak pengusahaan (konsesi) hingga tahun 2040. Jalan Tol Waru - Juanda telah beroperasi sejak bulan April 2008.

d. PT Marga Nurindo Bhakti (MNB)

MNB didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 2 Desember 1991 dari Notaris BRAY Mahyastoeti Notonogoro, S.H., juncto Akta No. 19 tanggal 4 Maret 1998 dari Agus Madjid, S.H. Penyertaan pada MNB dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol JORR Seksi S dan E1 (Pondok Pinang - Jagorawi - Cikunir). Perusahaan memiliki 1.350 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar saham atau setara dengan Rp13.500.000 yang merupakan 10% kepemilikan.

Anggaran Dasar MNB telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris No. 23 tanggal 25 Desember 2010 dari Ny. Ety Roeswitha Moelia, S.H.. Akta perubahan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-06698 tanggal 3 Maret 2011.

Perusahaan memiliki 950 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar saham atau setara dengan Rp9.500.000 yang merupakan 4,75% kepemilikan.

Berdasarkan surat Perusahaan kepada MNB No. AA.HK.02.1143 tanggal 11 Agustus 2000, Perusahaan mengambil alih proyek yang dibangun oleh MNB. Pengambilalihan proyek ini mengakibatkan penyertaan Perusahaan dinilai sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan mengakui kerugian atas penurunan nilai penyertaan yang bersifat permanen tahun 2000 sebesar Rp9.499.999.

17. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

**c. PT Citra Margatama Surabaya (CMS)
(continued)**

Based on the Deed No. 40 dated May 21, 2005 of Notary Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., the Company and CMS entered into a Joint Operation Agreement that changed the authority of Waru - Tanjung Perak toll road to become approximately 12 Km. On February 12, 2007, such Joint Operation Agreement has been changed to a Concession Rights Agreement between the Government and CMS with concession right until year 2040. Waru - Juanda toll road has been operating since April 2008.

d. PT Marga Nurindo Bhakti (MNB)

MNB was established based on The Deed No. 9 dated December 2, 1991 of Notary BRAY Mahyastoeti Notonogoro, S.H., in conjunction with the Deed No. 19 dated March 4, 1998 of Agus Madjid, S.H. The investment in MNB relates to the construction and operation of the JORR toll road Section S and E1 (Pondok Pinang - Jagorawi - Cikunir). The Company owns 1,350 shares at par value of Rp10,000 per share or equivalent to Rp13,500,000, which represent 10% ownership.

MNB's Articles of Association had been amended several times, with the latest of which was based on notarial deed No. 23 dated December 25, 2010 of Ny. Ety Roeswitha Moelia, S.H.. The deed of amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.10-06698 dated March 3, 2011.

The Company has 950 shares with par value Rp10,000 per share or equivalent to Rp9,500,000, which represent 4.75% ownership.

Based on the Company's Letter No. AA.HK.02.1143 dated August 11, 2000 to MNB, the Company took over the JORR sections being built by MNB. As on consequence, the Company's investment in MNB has no more economic value, therefore, the Company recognized the loss on the permanent impairment of its investment in year 2000 amounting to Rp9,499,999.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

17. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

17. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

e. PT Margabumi Matraraya (MBMR)

e. PT Margabumi Matraraya (MBMR)

MBMR didirikan berdasarkan akta notaris No. 15 tanggal 15 Februari 1991 dari Tawangningrum Purwono, S.H., juncto akta notaris No. 15 tanggal 13 Agustus 1997 dari Agus Hashim Admad, S.H., dalam rangka perusahaan ruas tol Surabaya-Gresik. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C2-6158.HT.01.01.th.91 tanggal 28 Oktober 1991.

MBMR was established based on notarial deed No. 15 dated February 15, 1991 of Tawangningrum Purwono, S.H., in conjunction with notarial deed No. 15 dated August 13, 1997 of Agus Hashim Admad, S.H., with the aim to develop Surabaya-Gresik toll road. The deed of establishment was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-6158.HT.01.01.th.91 dated October 28, 1991.

Anggaran Dasar MBMR telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 4 tanggal 19 Desember 2014 dari Dra. EC. Inggriani Djojoseputro, S.H., sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-10184.40.21.2014 tanggal 23 Desember 2014. Berdasarkan akta Jual Beli Saham No. 28 tanggal 17 Juni 2015, Perusahaan telah menjual seluruh kepemilikan sahamnya di MBMR.

MBMR's Articles of Association had been amended several times, with the latest of which was based on notarial deed Decision Statement in the Off-General Shareholders' Meeting No. 4 dated December 19, 2014 of Dra. EC. Inggriani Djojoseputro, S.H., regarding the increase of issued and paid in capital. The deed of amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-10184.40.21.2014 dated December 23, 2014. Based on Share Purchase Deed No. 28 dated June 17, 2015, the Company had sold all of its share ownership in MBMR.

f. PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP)

f. PT Citra Mataram Satriamarga Persada (CMSP)

CMSP didirikan berdasarkan Akta No. 36 tanggal 12 April 1996 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Penyertaan pada CMSP dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol JORR Seksi W2 (Kebon Jeruk – Pondok Pinang). Perusahaan memiliki 4.725.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp4.725.000 yang merupakan 15% kepemilikan.

CMSP was established based on the Deed No. 36 dated April 12, 1996 of Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. The investment in CMSP relates to operation of the JORR Section W2 (Kebon Jeruk – Pondok Pinang) toll road project. The Company owns 4,725,000 shares at par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp4,725,000, which represent 15% ownership.

Berdasarkan surat Perusahaan kepada CMSP No. AA.HK.02.820 tanggal 21 Juni 2000, dinyatakan mengenai pengambilalihan proyek dan pengakhiran PKP. Penyertaan Perusahaan pada CMSP ini dipandang sudah tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga Perusahaan mengakui kerugian atas penurunan nilai penyertaan tahun 2000 sebesar Rp4.724.999.

Based on the Company Letter No. AA.HK.02.820 dated June 21, 2000 to CMSP, regarding the takeover of the project and termination of Concession Agreement, the Company's investment in CMSP was deemed to have no economic value, therefore, the Company has recognized the loss caused by the impairment of this investment in 2000 amounting to Rp4,724,999.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

17. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

g. PT Margaraya Jawa Tol (MJT)

MJT didirikan berdasarkan Akta No. 18 tanggal 6 Juni 1997 dari Notaris Enimarya Agoes Suwarako, S.H. Penyertaan pada MJT dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Waru (Aloha) – Tanjung Perak. Perusahaan memiliki 4.143.438 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp4.143.438 yang merupakan 5% kepemilikan.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai restrukturisasi MJT yang tercantum dalam Akta Notaris Adrian Djuaini, S.H, No. 17 tanggal 20 Oktober 2004, Perusahaan memperoleh 1.250.000 lembar saham dari hasil kapitalisasi atau konversi 20.000.000 saham baru sehingga kepemilikan saham Perusahaan menjadi 5.393.438 lembar saham atau setara dengan Rp5.393.438. Selain itu, MJT juga mengeluarkan saham baru dari saham portepel sebanyak 110.458.000 lembar saham. Perusahaan tidak ambil bagian dalam tambahan setoran modal disetor tersebut sehingga kepemilikan Perusahaan mengalami penurunan menjadi sebesar 2,47%. Pemerintah dan MJT telah menandatangani PPJT pada tanggal 19 Juli 2007 dengan masa konsesi hingga tahun 2047.

h. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)

BMN didirikan berdasarkan Akta No. 20 tanggal 12 April 1993 dari Notaris Mestariyana Habie, S.H. Penyertaan pada BMN dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Ujung Pandang yaitu Jalan Satando - Simpang Urip Sumoharjo/Petta Rani (tahap I) - Jalan Sultan Alauddin (tahap II). Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 5 September 1998, Perusahaan memiliki 3.332 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp3.332.000 yang merupakan 10% kepemilikan.

17. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

g. PT Margaraya Jawa Tol (MJT)

MJT was established based on the Deed No. 18 dated June 6, 1997 of Notary Enimarya Agoes Suwarako, S.H. The investment in MJT relates to the construction and operation of the Waru (Aloha) - Tanjung Perak toll road project. The Company originally owned 4,143,438 shares at par value of Rp1,000 (full amount), amounting to Rp4,143,438, which represent 5% ownership.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders, regarding MJT restructuring, as included in the Deed No. 17 dated October 20, 2004 of Notary Adrian Djuaini, S.H, the Company acquired 1,250,000 shares from capitalization or conversion of convertible bond to 20,000,000 new shares, hence, the Company's shares became 5,393,438 shares or equivalent to Rp5,393,438. In addition, MJT issued new shares from its portfolio of 110,458,000 shares. The Company did not increase its investment so that the Company's ownership decreased to 2.47%. The Government and MJT have entered into Concession Rights Agreement on July 19, 2007 with concession period until year 2047.

h. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)

BMN was established based on the Deed No. 20 dated April 12, 1993 of Notary Mestariyana Habie, S.H. The investment in BMN was made in relation to the construction and operation of the Ujung Pandang toll roads that is Jalan Satando - Urip Sumoharjo Interchange/Petta Rani (phase I) - Jalan Sultan Alauddin (phase II). Based on the Deed No. 25 dated September 5, 1998, the Company owns 3,332 shares at par value of Rp1,000 per share or equivalent to Rp3,332,000, which represent 10% ownership.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

17. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

**h. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)
(lanjutan)**

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 276/KPTS/1994 tanggal 26 Agustus 1994 dan Akta No. 322 tanggal 29 Agustus 1994, dari Notaris Mestariany Habie, S.H., menyatakan bahwa BMN mengoperasikan jalan tol selama 30 tahun untuk tahap I dan tahap II akan ditentukan kemudian namun tidak lebih dari 30 tahun sejak dioperasikannya jalan tol baik sebagian atau seluruhnya. Ruas jalan tol Ujung Pandang tahap I dan II telah dioperasikan sejak tahun 1998.

Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar BMN yang tercantum dalam Akta Karin Christiana Basoeki, S.H, No.13 tanggal 16 Mei 2008 terdapat peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor perusahaan. Dengan adanya perubahan tersebut penyertaan saham Perusahaan terdilusi menjadi sebesar 1,47%.

i. PT Jatim Marga Utama (JMU)

JMU didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 27 Desember 2002 dari Notaris Rosida, S.H., Perusahaan memiliki 12.858 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp12.858.000 yang merupakan 30% kepemilikan.

JMU merupakan perusahaan patungan antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah Jawa Timur. Perusahaan patungan ini didirikan dengan maksud untuk meneruskan kelanjutan proyek jalan tol Surabaya - Mojokerto yang telah terhenti setelah Menkimpraswil mencabut izin konsesi yang diberikan kepada PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) melalui surat Menkimpraswil No.418/KPTS/M/2001 tanggal 18 Juli 2001. Setelah Mahkamah Agung menolak pengajuan Peninjauan Kembali dari Menkimpraswil pada tanggal 31 Maret 2005, maka hak penyelenggaraan jalan tol dikembalikan kepada MNA. Sebagai akibatnya, JMU tidak lagi terlibat dalam proyek jalan tol tersebut. Pada tanggal 8 Mei 2007, JMU ikut serta dalam penyertaan saham TJP untuk proyek jalan tol Gempol Pasuruan dengan kepemilikan sebesar 20%.

17. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

**h. PT Bosowa Marga Nusantara (BMN)
(continued)**

The Decree of the Minister of Public Work No. 276/KPTS/1994 dated August 26, 1994 and the Deed No. 322 dated August 29, 1994 of Notary Mestariany Habie, S.H., states that BMN would operate phase I of the toll road for 30 years and phase II will be decided later but not for a period longer than 30 years for the operation of either part or all of the toll road. Phase I and Phase II of the Ujung Pandang toll road has been operating since 1998.

Based on amended the Article of Association of BMN as stated on the Deed No.13 dated May 16, 2008 of notary Karin Christiana Basoeki, S.H, there was an increase in BMN's authorized, issued and fully paid in capital. As result of such amendment, the Company's investment in shares has been diluted to 1.47%.

i. PT Jatim Marga Utama (JMU)

JMU was established based on the Deed No. 25 dated December 27, 2002 of Notary Rosida, S.H., The Company owns 12,858 shares at a par value of Rp1,000 per share or equivalent to Rp12,858,000, which represent 30% ownership.

JMU is a joint venture company with Local Government of East Java. JMU was established in order to continue the construction of the Surabaya - Mojokerto toll road project that was suspended after the Minister of Settlement and Regional Infrastructure cancelled the concession granted to PT Marga Nujyasumo Agung (MNA) as stated in its Letter No.418/KPTS/M/2001 dated July 18, 2001. After the Supreme Court refused the application for Judicial Review of Minister of Settlement and Regional Infrastructure, dated March 31, 2005, the concession rights have been returned to MNA. As a result, JMU is not longer involved in such toll road project. On May 8, 2007, JMU participated in investment in shares of TJP to develop toll road project of Gempol Pasuruan, with ownership of 20%.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

17. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

i. PT Jatim Marga Utama (JMU) (lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara RUPS JMU tanggal 6 Mei 2013, pemegang saham JMU memutuskan penurunan modal dasar menjadi Rp150.000.000 (sebelumnya Rp171.400.000) dan modal disetor menjadi Rp40.502.000.000 yang terdiri dari kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp37.502.000.000 atau setara dengan 93%, dan Perusahaan sebesar Rp3.000.000.000 atau setara dengan 7%. Penurunan tersebut akibat dari penghapusan piutang modal disetor ke Perusahaan sebesar Rp9.858.000. Perusahaan mereklasifikasi nilai saldo penyertaan sebesar Rp3.000.000 ke akan Aset Keuangan Lainnya sejak bulan Agustus 2014.

j. PT Marga Mawatindo Esprit (MME)

MME didirikan berdasarkan Akta No. 96 tanggal 30 Mei 1997 dari Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. Penyertaan pada MME dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Semarang - Demak. Perusahaan memiliki 1.154.364 lembar saham dengan nilai nominal Rp2.409 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp2.780.862 yang merupakan 8,33% kepemilikan.

Berdasarkan Surat No. 001/SPK-DIR/2003 tanggal 6 Januari 2003, Perusahaan dan MME sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan No. 58 tanggal 25 Februari 1998. Pengakhiran PKP ini mengakibatkan penyertaan pada perusahaan ini tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga Perusahaan mengakui adanya kerugian atas penurunan nilai penyertaan yang bersifat permanen tahun 2002 sebesar Rp2.780.861.

k. PT Marga Net One Limited (MNOL)

MNOL didirikan berdasarkan hukum Negara Bangladesh sebagaimana termuat dalam Incorporated Under The Company Act 1994 (ACT-XVIII of 1994) (*Private Company Limited By Shares*) dan *Memorandum of Association of Marga Net One Limited* tanggal 29 Februari 2003 *juncto Certificate of Incorporation No. C-50732 (1027)/ 2003* tanggal 11 Oktober 2003 yang dikeluarkan *Registrar of Joint Stock Companies Bangladesh*.

17. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

i. PT Jatim Marga Utama (JMU) (continued)

Based on Minutes of General Meeting of Shareholders of JMU dated May 6, 2013, JMU's shareholders decreased its authorized capital to Rp150,000,000, previously Rp171,400,000 and paid in capital to Rp40,502,000,000 with ownership consisting of East Java Provincial Government amounting to Rp37,502,000,000 or equivalent to 93% ownership, and the Company amounting to Rp3,000,000,000 or equivalent to 7% ownership. The decrease was a result of the write off of the paid in capital receivables from the Company amounting to Rp9,858,000. The company reclassified the balance of investment amounting to Rp3,000,000 to Other Financial Assets since August 2014.

j. PT Marga Mawatindo Esprit (MME)

MME was established based on the Deed No. 96 dated May 30, 1997 of Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. The investment in MME relates to the construction and operation of the Semarang - Demak toll road. The Company owns 1,154,364 shares at par value of Rp2,409 (full amount) per share or equivalent to Rp2,780,862, which represent 8.33% ownership.

Based on Letter No. 001/SPK-DIR/2003 dated January 6, 2003, the Company and MME agreed to terminate the Concession Rights Agreement No. 58 dated February 25, 1998. The result of such termination of Concession Rights Agreement caused the Company's investment to have no economic value, therefore, the Company recognized the loss on the permanent impairment of the investment in year 2002 amounting to Rp2,780,861.

k. PT Marga Net One Limited (MNOL)

MNOL was established based on the Law of Bangladesh as stated in The Company Act 1994 (ACT-XVIII of 1994) (Private Company Limited by Shares) and Memorandum of Association of Marga Net One Limited dated February 29, 2003, in conjunction with Certificate of Incorporation No. C-50732(1027)/ 2003 dated October 11, 2003, issued by the Bangladesh Registrar of Joint Stock Companies.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

17. ASET KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

**k. PT Marga Net One Limited (MNOL)
(lanjutan)**

Berdasarkan Memorandum of Association of MNOL tanggal 29 Februari 2003, Perusahaan memiliki 200 lembar saham dengan nominal TK 100 (mata uang Taka penuh) per lembar saham atau 10% kepemilikan dan setoran modal sejumlah US\$1.800 atau setara dengan Rp15.291 yang dilakukan pada tanggal 2 September 2003.

Perusahaan sepakat melakukan kerjasama pemberian jasa teknik dalam manajemen pengumpulan tol, manajemen lalu lintas dan manajemen pemeliharaan atas pengelolaan dan pengoperasian jembatan tol Jamuna di Bangladesh selama 5 tahun.

Perusahaan menganggap penyertaan pada MNOL sudah tidak memiliki nilai ekonomis disebabkan tidak adanya kepastian pengembalian investasi atas penyertaannya dan mengakui kerugian atas penurunan nilai penyertaan sebagai beban tahun 2006 sebesar Rp15.290.

l. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)

PSBI didirikan berdasarkan akta notaris No. 21 tanggal 2 Oktober 2015 dari Mala Mukti, S.H., LL.M, dalam rangka pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-2460435.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 12 Oktober 2015.

Perusahaan memiliki 90.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham atau setara dengan Rp90.000.000 yang merupakan 12% dari kepemilikan pada tanggal 31 Desember 2015.

17. OTHER FINANCIAL ASSETS (continued)

**k. PT Marga Net One Limited (MNOL)
(continued)**

Based on the Memorandum of Association of MNOL dated February 29, 2003, the Company owns 200 shares at par value of TK 100 (full Taka amount) per share or 10% ownership and subscribed to paid in capital amounting to US\$1,800 or equivalent to Rp15,291 on September 2, 2003.

The Company agreed to render technical services by providing a management of toll collection, traffic management, and management of maintenance for the operations of the Jamuna toll bridge in Bangladesh for 5 years.

The Company has identified that the investment in MNOL does not have any expected future economic benefit and, therefore, the Company recognized the loss on impairment its investment in 2006 amounting to Rp15,290 as an expense.

l. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)

PSBI was established based on notarial deed No. 21 dated October 2, 2015 from notary Mala Mukti, S.H., LL.M, for Jakarta-Bandung high speed train operation. Deeds of establishment were legalized by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Decision Letter No. AHU-2460435.AH.01.01 year 2015 dated October 12, 2015.

The Company has 90,000 shares with par value Rp1,000 per share or equivalent to Rp90,000,000 which is 12% of the ownership as of December 31, 2015.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

18. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

18. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	
Uang muka kontraktor	956.729.777	71.479.161	Advances for contractors
Jaminan	27.519.100	28.701.943	Guarantees
Aset diambil alih	34.203.915	34.203.915	Foreclosed assets
Jalan tol ruas Surabaya - Gempol			Surabaya - Gempol toll road
Seksi Porong - Gempol	12.027.508	12.027.508	Porong - Gempol Section
Lainnya	2.956.886	4.208.725	Others
Total aset lain-lain	1.033.437.186	150.621.252	Total other assets
Penyisihan penurunan nilai aset	(26.302.053)	(26.302.053)	Allowance for impairment losses
Neto	1.007.135.133	124.319.199	Net

a. Uang muka kontraktor

Merupakan uang muka kontraktor dan konsultan dalam rangka pembangunan jalan tol, pelapisan ulang, pengadaan peralatan jalan tol dan pengadaan jalan lain yang akan diperhitungkan dengan tagihan atas kemajuan pekerjaan kontraktor dan konsultan.

a. Advances for contractors

Represents down payments to contractors and consultants for toll road construction, overlay, toll road equipment procurement and other road procurements and are calculated from the invoice of working progress from the contractors and consultants.

b. Jaminan

Merupakan garansi bank yang ditempatkan Perusahaan selaku pemegang hak perusahaan jalan tol sebagai jaminan pelaksanaan dan penyelesaian konstruksi jalan tol.

b. Guarantee

This represents bank guarantee which was placed by the Company as the winner of concession right of toll road, as a guarantee of execution and completion of the toll road construction.

c. Aset diambil alih

c. Foreclosed assets

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	
Ruas tol Semarang - Demak (MME)	20.129.778	20.129.778	Semarang - Demak toll road (MME)
Ruas tol Cileunyi - Nagrek (PT Wijaya Karya)	12.000.000	12.000.000	Cileunyi - Nagrek toll road (PT Wijaya Karya)
Ruas tol Pandaan - Pasuruan (PT Giri Adya Sejati)	2.074.137	2.074.137	Pandaan - Pasuruan toll road (PT Giri Adya Sejati)
Sub total	34.203.915	34.203.915	Sub total
Penyisihan penurunan nilai aset:			Allowance for impairment losses:
Ruas tol Porong - Gempol	(12.227.916)	(12.227.916)	Porong - Gempol toll road
Ruas tol Cileunyi - Nagrek (PT Wijaya Karya)	(12.000.000)	(12.000.000)	Cileunyi - Nagrek toll road (PT Wijaya Karya)
Ruas tol Pandaan - Pasuruan (PT Giri Adya Sejati)	(2.074.137)	(2.074.137)	Pandaan - Pasuruan toll road (PT Giri Adya Sejati)
Sub total	(26.302.053)	(26.302.053)	Sub total
Neto	7.901.862	7.901.862	Net

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

18. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

d. Jalan Tol Ruas Surabaya - Gempol Seksi Porong - Gempol

Jalan tol Seksi Porong - Gempol merupakan bagian dari jalan tol Surabaya - Gempol yang mengalami dampak dari musibah genangan lumpur PT Lapindo Brantas sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya jalan tol tersebut (Catatan 47b).

Sehubungan dengan dilakukannya penutupan sebagian jalan tol Surabaya - Gempol Seksi Porong - Gempol pada tanggal 11 Juli 2006, dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pekerjaan Umum No. 297/KPTS/M/2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang Pencabutan Sementara Status Sebagai Jalan Tol Sebagian Ruas Jalan Tol Surabaya - Gempol Seksi Porong - Gempol, Perusahaan mencatat aset jalan tol seksi Porong - Gempol kedalam Aset Lain-Lain sebesar Rp12.027.508.

18. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

d. Surabaya - Gempol Toll Road Porong - Gempol Section

Section Porong - Gempol toll road which is part of Surabaya - Gempol toll road has been affected by mud disaster of PT Lapindo Brantas which resulted in malfunction of the toll road (Note 47b).

In line with the partial closure of Section Porong-Gempol of Surabaya-Gempol toll road on July 11, 2006, which followed up by letter from the Minister of Public Works No. 297/KPTS/M/2006 dated August 11, 2006 regarding the Temporary Revocation of Status of Some Part of Section Porong - Gempol of Surabaya - Gempol Toll Road, the Company recognised the Section Porong - Gempol toll road into Other Assets amounting to Rp12,027,508.

19. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar Dimuka

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Pajak penghasilan Perusahaan		
Pasal 21	496.533	-
Pasal 28a	120.817.859	120.817.859
Sub total	121.314.392	120.817.859
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 23	112.121	243.147
Pasal 25	-	-
Pajak Pertambahan Nilai	22.992.794	1.572.697
Sub total	23.104.915	1.815.844
Total	144.419.307	122.633.703

19. TAXATION

a. Prepaid taxes

Company income tax Article 21
Income tax article 28a
Sub total
Subsidiaries Income Taxes:
Article 23
Article 25
Value Added Tax
Sub total
Total

b. Utang pajak

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Perusahaan		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4 (2)	6.276.923	9.176.038
Pasal 21	20.485.542	22.639.595
Pasal 22	96.594	-
Pasal 23	1.996.502	2.008.861

The Company Income Taxes:
Article 4 (2)
Article 21
Article 22
Article 23

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. Taxation (continued)

b. Utang pajak (lanjutan)

b. Taxes payable (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	
Pasal 25	40.795.580	32.122.970	Article 25
Pasal 29:			Article 29:
2015	4.308.341	-	2015
2014	458.838	141.041.177	2014
Pajak Pertambahan Nilai	32.442.141	42.611.553	Value Added Tax
	<u>106.860.461</u>	<u>249.600.194</u>	
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Penghasilan:			Income Tax:
Pasal 4 (2)	28.150.508	5.177.222	Article 4 (2)
Pasal 21	2.008.464	4.259.803	Article 21
Pasal 22	2.583	-	Article 22
Pasal 23	275.198	668.655	Article 23
Pasal 25	134.206	-	Article 25
Pasal 26	15.046	14.293	Article 26
Pasal 29	5.811.220	546.490	Article 29
Pajak Bumi dan Bangunan	2.574.628	-	Land and building tax
Pajak Pertambahan Nilai	1.367.408	1.757.629	Value Added Tax
Kewajiban pajak lainnya	16.665.366	1.500.035	Other tax liabilities
	<u>57.004.627</u>	<u>13.924.127</u>	
Total	<u>163.865.088</u>	<u>263.524.321</u>	Total

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

Beban pajak penghasilan Kelompok Usaha terdiri dari:

The income tax expense of the Group consisted of the following:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014	
<u>Beban pajak kini</u>			<u>Current tax expense</u>
Perusahaan	(569.596.292)	(527.121.294)	Company
Entitas Anak	(15.803.398)	(6.481.073)	Subsidiaries
Total pajak penghasilan	(585.399.690)	(533.602.367)	Total income tax expense
<u>Beban pajak tangguhan</u>			<u>Deferred tax expense</u>
Perusahaan	(106.927.454)	(39.594.463)	Company
Entitas Anak	(56.776.543)	(40.450.308)	Subsidiaries
Total beban pajak tangguhan	(163.703.997)	(80.044.771)	Total deferred tax expense
Total beban pajak penghasilan	<u>(749.103.687)</u>	<u>(613.647.138)</u>	Total income tax expense

Pajak kini

Current tax

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak:

A reconciliation between the consolidated income before income tax as reported in the statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. Taxation (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Tax expenses (continued)

Pajak kini (lanjutan)

Current tax (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan badan	2.068.304.233	1.850.661.310	<i>Consolidated income before income tax</i>
Rugi Entitas Anak sebelum pajak penghasilan	404.972.949	503.310.072	<i>Loss of subsidiaries before income tax</i>
Efek eliminasi	(330.371.851)	(374.811.713)	<i>Elimination effect</i>
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan	2.142.905.331	1.979.159.669	<i>Income of the Company before income tax</i>
<u>Beda temporer</u>			<u>Temporary differences</u>
Penyusutan aset tetap dan hak perusahaan jalan tol	(276.671.541)	(234.015.500)	<i>Depreciation of fixed assets and toll road concession rights</i>
Penyisihan (penambahan) atas liabilitas imbalan kerja	(114.843.467)	53.931.611	<i>Provision (additional) of employee benefits liabilities</i>
Penyisihan (pembayaran) atas provisi pelapisan ulang	(36.194.808)	21.706.037	<i>Provision (payment) of overlay</i>
Sub-total	(427.709.816)	(158.377.852)	<i>Sub-total</i>
<u>Beda tetap</u>			<u>Permanent differences</u>
Bagian rugi entitas asosiasi	329.400.838	384.299.931	<i>Share in income of associates</i>
Biaya penghasilan layanan yang terkait dengan pajak final	198.934.173	173.856.413	<i>Cost of service related income subjected to final tax</i>
Beban bunga	163.556.575	134.687.115	<i>Interest expenses</i>
Beban umum dan administrasi	42.978.316	59.365.201	<i>General and administrative expenses</i>
Beban konstruksi	16.543.056	238.571.362	<i>Construction expenses</i>
Biaya perolehan penghasilan dikenakan pajak final	10.799.721	3.469.524	<i>Expenses related to income subjected to final tax</i>
Beban pajak	6.899.017		<i>Tax expense</i>
Beban pengumpulan tol	7.450.529	9.578.146	<i>Toll road collection expenses</i>
Beban bunga efektif <i>interest rate</i>	4.200.607	3.698.796	<i>Effective rate interest expenses</i>
Beban pelayanan pemakai jalan tol	3.671.675	5.135.293	<i>Toll road services expenses</i>
Provisi tantiem	2.775.000	1.000.000	<i>Provision of tantiem</i>
Beban pemeliharaan jalan tol	1.374.640	1.391.922	<i>Maintenance cost of toll road</i>
Beban piutang karyawan	998.759	861.844	<i>Employee receivable expenses</i>
Penghasilan dikenakan pajak final	(436.998.252)	(485.107.971)	<i>Income already subjected to final tax</i>
Pendapatan konstruksi	(16.857.374)	(243.104.218)	<i>Construction revenues</i>
Sub-total	335.727.280	287.703.358	<i>Sub-total</i>
Total	(91.982.536)	129.325.506	Total
Laba kena pajak Perusahaan	2.050.922.795	2.108.485.175	Taxable income of the Company
Estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan	2.050.922.795	2.108.485.175	<i>Estimated taxable income Company</i>
Beban pajak kini Perusahaan	512.730.699	527.121.294	<i>Current income tax expense Company</i>
Beban pajak atas koreksi pajak penghasilan badan tahun 2011	56.865.593	-	<i>Tax expense from correction of corporate income tax for fiscal year 2011</i>
Total	569.596.292	527.121.294	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014
Pajak penghasilan dibayar dimuka		
Pasal 23	619.888	604.480
Pasal 25	507.802.470	385.475.637
Total	508.422.358	386.080.117
Utang pajak penghasilan		
Perusahaan	4.308.341	141.041.177
Entitas Anak	5.811.220	546.490
Total	10.119.561	141.587.667

19. Taxation (continued)

c. Tax expenses (continued)

Current tax (continued)

Prepayment of income taxes	
Article 23	
Article 25	
Total	386.080.117
Income tax payable	
Company	
Subsidiaries	
Total	141.587.667

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan sendiri atas jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Koreksi pajak dari kantor pajak selama tahun 2015

Pada tanggal 23 Juni 2015, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Kantor Pajak sehubungan dengan pajak penghasilan (PPh) Badan tahun pajak 2011. Perusahaan berkewajiban untuk membayar kekurangan pajak penghasilan sebesar Rp56.865.593. Selanjutnya, Perusahaan juga berkewajiban untuk membayar kekurangan berbagai jenis pajak untuk tahun pajak 2011 sebesar Rp6.899.017. Saldo kurang bayar pajak sebagaimana dijelaskan di atas telah dibayar seluruhnya pada tanggal 15 Juli 2015 dan dibebankan pada laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2015.

Pada tanggal 22 Desember 2015, JLJ menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak dari Kantor Pajak sehubungan dengan pajak penghasilan badan tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp2.005.711 dan Rp807.352. Selanjutnya, pada tanggal 13 Januari 2016, JLJ menerima SKPKB berkaitan dengan pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak yang di terima sebelumnya. JLJ berkewajiban untuk membayar kekurangan pajak penghasilan sebesar saldo yang dijelaskan di atas dengan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2016.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company should submit its tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxes may assess and amend the tax payable within 5 years after the date when the tax becomes payable.

Tax corrections from tax office during 2015

On June 23, 2015, the Company received tax assessment letter related to under-payment tax assessment (SKPKB) from Tax Office in connection with corporate income tax for fiscal year 2011. The Company was liable for underpayment of corporate income tax amounting to Rp56,865,593. Additionally, the Company was also liable for underpayments related to various types of taxes for fiscal 2011 totalling Rp6,899,017. The aforesaid tax underpayment was fully paid on July 15, 2015 and charged directly to the 2015 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

On December 22, 2015, JLJ received notice of tax assessment from the Tax Office in connection with underpayment of the Company's income tax for the year 2013 and 2012, amounting to Rp2,005,711 and Rp807,352 respectively. Subsequently, on January 13, 2016, JLJ received SKPKB related the notice of tax assessment that previously received. JLJ was liable for the aforesaid tax underpayment with due date on February 12, 2016.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan sebagai berikut:

2015					
	1 Januari 2015/ January 1, 2015	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
Liabilitas (aset) Pajak Tangguhan					Deferred tax liabilities (asset)
<i>Perusahaan:</i>					<i>Company:</i>
Aset tetap dan aset tak berwujud	651.022.185	69.167.885	-	720.190.070	Fixed assets and intangible assets
Provisi pelapisan jalan	(84.593.961)	9.048.702	-	(75.545.259)	Provision for overlay
Liabilitas imbalan kerja	(257.178.566)	28.710.867	(5.591.043)	(234.058.742)	Employee benefits liability
Total	309.249.658	106.927.454	(5.591.043)	410.586.069	Total
<i>Entitas Anak:</i>					<i>Subsidiaries:</i>
Aset tetap dan aset tak berwujud	90.120.730	88.959.284	-	179.080.014	Fixed assets and intangible assets
Provisi pelapisan jalan tol	(5.756.658)	(3.215.932)	-	(8.972.590)	Provision for overlay
Liabilitas imbalan kerja	(3.213.543)	(1.132.425)	(1.283.905)	(5.629.873)	Employee benefits liability
Penyisihan kerugian penurunan piutang	(2.642.574)	2.627.623	-	(14.951)	Allowance for impairment losses
Rugi fiskal	-	(29.574.296)	-	(29.574.296)	Fiscal loss
Beban akrual	(140.397)	(887.712)	-	(1.028.108)	Accrued expenses
Total	78.367.558	56.776.543	(1.283.905)	133.860.196	Total
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian - neto	387.617.216	163.703.997	(6.874.948)	544.446.265	Consolidated deferred tax liability - net

2014 (Disajikan kembali - Catatan 4/As restated - Note 4)

	1 Januari 2014/ January 1, 2014	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember 2014/ December 31, 2014	
Liabilitas (aset) pajak tangguhan					Deferred tax liabilities (asset)
<i>Perusahaan:</i>					<i>Company:</i>
Aset tetap dan aset tak berwujud	592.518.310	58.503.875	-	651.022.185	Fixed assets and intangible assets
Provisi pelapisan jalan	(79.167.452)	(5.426.509)	-	(84.593.961)	Provision for overlay
Liabilitas imbalan kerja	(219.744.373)	(13.482.903)	(23.951.290)	(257.178.566)	Employee benefits liability
Total	293.606.485	39.594.463	(23.951.290)	309.249.658	Total
<i>Entitas Anak:</i>					<i>Subsidiaries:</i>
Aset tetap dan aset tak berwujud	43.826.740	46.293.990	-	90.120.730	Fixed assets and intangible assets
Provisi pelapisan jalan tol	(3.528.286)	(2.228.372)	-	(5.756.658)	Provision for overlay
Liabilitas imbalan kerja	(1.131.929)	(7.147.672)	5.066.058	(3.213.543)	Employee benefits liability
Penyisihan kerugian penurunan piutang	(2.390.137)	(252.437)	-	(2.642.574)	Allowance for impairment losses
Rugi fiskal	(3.925.196)	3.925.196	-	-	Fiscal loss
Beban akrual	-	(140.397)	-	(140.397)	Accrued expenses
Total	32.851.192	40.450.308	5.066.058	78.367.558	Total
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian - neto	326.457.677	80.044.771	(18.885.232)	387.617.216	Consolidated deferred tax liability - net

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku dan beban pajak penghasilan sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan	2.142.905.331	1.979.159.669	Income of the Company before income tax
Beda temporer	(106.927.455)	(39.594.463)	Temporary differences
Beda tetap	83.931.821	71.925.840	Permanent differences
Total	(22.995.634)	32.331.377	Total
Total	512.730.699	527.121.294	Total

19. Taxation (continued)

c. Tax Expenses (continued)

Deferred tax (lanjutan)

The reconciliation between the result of the multiplication of accounting income before income tax with the current tax rate and income tax expense is as follows:

20. UTANG USAHA

Akun ini merupakan utang kepada pemasok untuk pengadaan barang cetakan, alat tulis kantor, karcis tol, obat-obatan dan pakaian dinas serta utang usaha atas jasa pemeliharaan dan pembersihan jalan tol.

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	
Pihak ketiga	71.470.654	176.707.347	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 45)	65.995.095	5.389.001	Related parties (Note 45)
Total	137.465.749	182.096.348	Total

20. TRADE PAYABLES

This account represents payables to suppliers associated with the procurement of printing goods, office stationery, toll tickets, medicine, uniform, toll road maintenance and cleaning services.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

21. UTANG KONTRAKTOR

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor, konsultan dan rekanan sehubungan dengan pembangunan jalan, pelapisan ulang, pengadaan fasilitas tol dan bangunan lain.

21. CONTRACTORS PAYABLES

This account represents payables to contractors, consultants and partners associated with the construction of roads, overlay and procurement of toll facilities and other buildings.

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	
Pihak berelasi (Catatan 45)	1.427.402.641	762.347.467	Related parties (Note 45)
Pihak ketiga			Third parties
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	27.306.631	63.357.311	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
PT Module Intracs Yasatama	22.204.407	15.977.545	PT Module Intracs Yasatama
PT Delameta Bilano	12.567.147	8.259.490	PT Delameta Bilano
PT Kadi International	12.188.492	10.674.204	PT Kadi International
PT Aremix Planindo	12.034.213	5.781.001	PT Aremix Planindo
PT Roadmixindo Raya	10.125.430	7.864.232	PT Roadmixindo Raya
PT Marga Maju Mapan	9.447.235	6.344.717	PT Marga Maju Mapan
PT Perkasa Adiguna Sembada	8.188.388	11.686.209	PT Perkasa Adiguna Sembada
PT Sarana Dwi Makmur	7.374.448	-	PT Sarana Dwi Makmur
PT Widya Sapta Colas	6.656.755	2.030.319	PT Widya Sapta Colas
PT Cipta Marga Mandiri	5.356.347	-	PT Cipta Marga Mandiri
PT Wanita Mandiri Perkasa	4.763.685	-	PT Wanita Mandiri Perkasa
PT Aremix 3M	4.626.745	15.620.181	PT Aremix 3M
PT Barito Permai	4.280.395	-	PT Barito Permai
PT Perentjana Djaja	4.276.609	-	PT Perentjana Djaja
PT Eskapindo Matra	4.069.801	-	PT Eskapindo Matra
PT Helga Prima	3.450.991	-	PT Helga Prima
PT Pancatunggal Karsasejati	2.861.976	10.501.215	PT Pancatunggal Karsasejati
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 Miliar)	72.541.999	77.637.052	Others (each below Rp2 Billion)
Sub total	234.321.694	235.733.476	Sub total
Total	1.661.724.335	998.080.943	Total

22. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

22. OTHER CURRENT FINANCIAL LIABILITIES

This account consists of:

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	
Pihak ketiga			Third party
Sumbangan area pramuka Cibubur dan TMII	2.388.715	2.388.715	Payables to pramuka cibubur and TMII
PT PPA Finance	-	10.134.109	PT PPA Finance
Lainnya	45.041.992	60.644.271	Others
Total	47.430.707	73.167.095	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**22. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK
LAINNYA (lanjutan)**

Utang lain-lain Area Pramuka Cibubur dan Taman Mini Indonesia Indah merupakan sumbangan Perusahaan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Taman Mini Indonesia Indah yang didasarkan pada Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1981 tentang penggunaan sebagian dari pendapatan tol pada pintu gerbang menuju/dari Taman Mini Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur. Namun, sejak tanggal 26 Januari 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2008 mengenai pencabutan Keputusan Presiden No.14 Tahun 1981.

23. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Beban bunga		
Utang bank sindikasi	22.070.279	15.330.996
Utang obligasi	80.851.161	82.971.826
Utang bank		
PT Bank Central Asia Tbk	2.144.444	8.594.667
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.913.333	-
Utang lembaga keuangan bukan bank	2.860.065	-
Beban umum dan administrasi	184.410.465	180.040.540
Liabilitas pembebasan tanah	43.269.783	21.754.102
Beban kerjasama operasi	792.321	792.321
Lain-lain	18.636.010	10.957.283
Total	356.947.861	320.441.733

24. UTANG BANK

Utang bank jangka pendek:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Pihak berelasi (Catatan 45)	699.427.316	41.599.279
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	401.419.900	586.690.195
PT Bank DKI	10.097.935	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3.875.071	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2.607.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2.159.220	1.216.831
PT Bank DBS Indonesia	1.400.000	23.809.583
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	709.950	345.098
	422.269.076	612.061.707
Total	1.121.696.392	653.660.986

**22. OTHER CURRENT FINANCIAL LIABILITIES
(continued)**

Other payables Pramuka Cibubur Area and Taman Mini Indonesia Indah (TMII) represent the Company's contribution to Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Cibubur and TMII that is based on Presidential Decree No. 14 year 1981 regarding the use of a portion of toll revenue at the gateway to/from Taman Mini Indonesia Indah and Cibubur Scout Area Toll gates. However, on January 26, 2008, the Government issued Presidential Regulation No. 3 year 2008 for the revocation of the Presidential Decree No.14 year 1981.

23. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

Interest expenses
Syndicated bank loan
Bonds payable
Bank loans
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Non-bank financial institutions loan
General and administrative expenses
Land acquisition liabilities
Joint operation expenses
Others
Total

24. BANK LOANS

Short-term bank loan:

Related parties (Note 45)
Third party
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DKI
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

24. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Pihak berelasi (Catatan 45)	6.113.605.486	5.529.802.171
Pihak ketiga		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	270.830.382	197.095.855
PT Bank DKI	242.841.206	209.234.856
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	184.485.581	107.380.191
PT Bank Central Asia Tbk	141.009.803	137.348.875
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	139.062.055	129.544.531
PT Bank Bukopin Tbk	109.739.446	67.036.686
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	70.504.902	68.674.437
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	30.972.551	38.722.688
Sub-total	1.189.445.926	955.038.119
Total	7.303.051.412	6.484.840.290

Persyaratan rasio keuangan Perusahaan berdasarkan perjanjian kredit masing-masing bank adalah Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) maksimal 5:1 dan *Interest Coverage Ratio (ICR)* minimal 1,25:1.

Pinjaman pada PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 37 tanggal 25 Oktober 2005 dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit investasi dengan tujuan untuk pembiayaan proyek jalan tol JORR II (Seksi E1, E3) sebesar Rp350.000.000. Akta ini diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Investasi No. 53 tanggal 28 April 2006 untuk fasilitas kredit investasi sebesar Rp310.000.000 dan Akta Perjanjian Kredit No. 54 tanggal 28 April 2006 sebagaimana kemudian diubah dalam Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 6 tanggal 10 Agustus 2006 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 47 tanggal 29 Maret 2007 dan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 06 tanggal 6 Juni 2007 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas *time loan revolving* sebesar Rp40.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun dan mendapat tambahan jumlah pokok fasilitas kredit sebesar Rp596.000.000 sehingga jumlah fasilitas yang diterima Perusahaan menjadi sebesar Rp636.000.000.

24. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans:

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	
	6.113.605.486	5.529.802.171	<i>Related parties (Note 45)</i>
			<i>Third party</i>
			<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk</i>
			<i>PT Bank DKI</i>
			<i>PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara</i>
			<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
			<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk</i>
			<i>PT Bank Bukopin Tbk</i>
			<i>PT Bank Pembangunan Daerah Bali</i>
			<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah</i>
Sub-total	1.189.445.926	955.038.119	<i>Sub-total</i>
Total	7.303.051.412	6.484.840.290	Total

The Company's financial ratio requirement based on each bank's credit agreement is a Debt to Equity Ratio (DER) maximum of 5:1 and Interest Coverage Ratio (ICR) minimum of 1.25:1.

Loan from PT Bank Central Asia Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No. 37 dated October 25, 2005 of Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the Company has obtained loan facilities amounting to Rp350,000,000 for the purpose of financing JORR II toll road project (E1, E3 Section). The Deed has been changed with the Deed of Credit Agreement No. 53 dated April 28, 2006 for the loan facilities amounting to Rp310,000,000, and based on the Deed of Credit Agreement No. 54 dated April 28, 2006 as changed in Deed of Amendment to Working Capital Credit Agreement No. 6 dated August 10, 2006, Deed of Addendum to Credit Agreement No. 47 dated March 29, 2007 and Deed of Amendment to Credit Agreement No. 06 dated June 6, 2007 of Notary Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., the Company has obtained time loan revolving facility amounting to Rp40,000,000, for a period of 1 year and an additional credit facility amounting to Rp596,000,000. Total facilities obtained by the Company amounted to Rp636,000,000.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

24. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

Pinjaman pada PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Tingkat suku bunga pinjaman sama dengan suku bunga deposito rupiah untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan yang berlaku di BCA untuk nilai nominal lebih besar atau sama dengan Rp25.000.000 yang dipublikasikan secara umum ditambah 3,9% per tahun. Berdasarkan Akta Addendum No. 6 tanggal 2 Oktober 2015 oleh Notaris Karin Christiana Basoeki, S.H., jangka waktu kredit diperpanjang tanggal dari 13 Agustus 2015 menjadi jatuh tempo pada tanggal 13 Agustus 2016. Perusahaan tidak memberikan jaminan terhadap pinjaman ini. Utang bank diberikan secara *Negative Pledge*, sehingga debitur tidak menyerahkan jaminan/ agunan yang sifatnya preferen dan/atau separatis baik kepada bank maupun kepada kreditor lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan tidak memiliki saldo hutang pada fasilitas pinjaman tersebut.

Pinjaman pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 9 Agustus 2010, yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Addendum No.12 tanggal 6 Agustus 2015 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Tingkat bunga pinjaman mengacu pada suku bunga deposito 3 (tiga) bulan Bank ditambah 2,4% (dua koma empat persen). Batas waktu jatuh tempo fasilitas kredit modal kerja tersebut diperpanjang menjadi tanggal 8 Agustus 2016. Perusahaan wajib membayar provisi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 0,25% per tahun dihitung secara proporsional. Perusahaan tidak memberikan jaminan terhadap pinjaman ini. Utang bank diberikan secara *Negative Pledge*, sehingga debitur tidak menyerahkan jaminan/ agunan yang sifatnya preferen dan/atau separatis baik kepada bank maupun kepada kreditor lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan tidak memiliki saldo hutang fasilitas pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

24. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans (continued)

Loan from PT Bank Central Asia Tbk (continued)

The loan interest rate is equal to the rate of rupiah deposits for a period of 3 (three) months in BCA that applies to the nominal value of deposits greater than or equal to Rp25,000,000, published in general plus 3.9% per annum. Based on notarial deed of Amendment No. 6 dated October 2, 2015 by Karin Christiana Basoeki, S.H., the maturity date of loan has been extended from August 13, 2015 to August 13, 2016. The Company does not provide any guarantee against the loan. The bank loan is guaranteed with Negative Pledge, so that the Company does not need to submit a guarantee/collateral that are reserved and/or separated to the bank or other creditors. As of December 31, 2015, the Company has no outstanding loans payable in that credit facility.

Loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No. 22 dated August 9, 2010 which was lastly amended by the Deed of Amendment to Credit Agreement No.12 dated August 6, 2015, of Notary Jr. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the Company has obtained loan facilities amounting to Rp1,000,000,000, for a period of 1 year. The loan interest rate is equal to the bank deposit rate for 3 (three) months plus 2.4% (two point four percent). The maturity of this working capital credit facility has been extended to August 8, 2016. The Company is obliged to pay the provision fee to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at 0.25% per annum calculated proportionally. The Company does not provide any guarantee against is loan. The bank loan is guaranteed with Negative Pledge, so that the Company does not need to submit guarantee/collateral that are reserved and/or separated either to the bank or other creditors. As of December 31, 2015, the Company has no outstanding loans payable in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

24. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman pada PT Bank DBS Indonesia

JLP, entitas anak, mengadakan perjanjian gadai No. 29/PG-DBSI/III/2013 antara JLP dengan PT Bank DBS Indonesia yang dituangkan dalam akta notaris Sulistyanigsih, S.H., No. 88 tanggal 22 Februari 2013, JLP memperoleh fasilitas perbankan dari Bank dalam bentuk *Uncommitted Revolving Credit Facility* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum sebesar Rp30.000.000, *Uncommitted Omnibus Facility* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum sebesar Rp10.000.000 dan *Uncommitted Bank Guarantee Facility* dengan jumlah fasilitas tersedia maksimum sebesar Rp10.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo fasilitas kredit adalah sebesar Rp1.400.000.

Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank

a. PT Marga Sarana Jabar (MSJ)

Pada tanggal 18 November 2009, MSJ mengadakan perjanjian kredit sindikasi antara MSJ dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 64 tanggal 18 November 2009 oleh Notaris Fatimah, S.H.

Fasilitas kredit yang diterima MSJ adalah maksimum sebesar Rp1.053.447.000 yang terdiri dari Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp960.939.000 dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction*) sebesar Rp92.508.000 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2022. Pinjaman ini dikenakan suku bunga dengan menghitung *verage time deposit* ditambah margin 6 % pertahun. Saldo pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp540.507.499, dengan jaminan hak perusahaan jalan tol dan seluruh tagihan serta pendapatan dari perusahaan jalan tol, termasuk pendapatan tol dan tagihan atas pendapatan usaha lain selama masa konsesi yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp530.799.554.

24. BANK LOANS (continued)

Loan from PT Bank DBS Indonesia

JLP, a subsidiary, held the agreement of Pledge No. 29/PG-DBSI/III/2013 between the JLP and PT Bank DBS Indonesia as noted in the notary deed Sulistyanigsih, S.H., No. 88 dated February 22, 2013, JLP acquired the banking facilities from banks in the form of *Uncommitted Revolving Credit Facility* with a maximum amount of available facilities of Rp30,000,000, *Uncommitted Omnibus Facility* with maximum amount of available facilities of Rp10,000,000 and *Uncommitted Bank Guarantee Facility* with maximum amount of available facilities of Rp10,000,000. As of December 31, 2015, the loan payable balance for this credit facility amounted to Rp1,400,000.

Syndicates Loan with some banks

a. PT Marga Sarana Jabar (MSJ)

On November 18, 2009, MSJ signed a syndicated loan agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk based on Notarial Deed of Syndicated Loan Agreement No. 64 dated November 18, 2009 by Fatimah, S.H.

The maximum credit facility given amounted to Rp1,053,447,000 which consists of Investment Loan amounting to Rp960,939,000,000 (full amount) and Interest During Construction Loan amounting to Rp92,508,000 due on March 6, 2022. The loan bears interest rate equals to the average time deposits plus a margin of 6% per year. Loans payable balance as of December 31, 2015 amounted to Rp 540,507,499, which is guaranteed by concession rights and the entire billing and revenue from toll collection, including toll revenue and billing from other operating income during the concession period bounded by fiduciary loan guarantee amounting to Rp530,799,554.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

24. UTANG BANK (lanjutan)

**Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank
(lanjutan)**

b. PT Marga Nujyasumo Agung (MNA)

Pada tanggal 24 Januari 2007, MNA telah mengadakan perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Bukopin Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 33 yang kemudian terakhir kali diubah dengan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 21 tanggal 23 Oktober 2012 yang mana terdapat penambahan kreditur yaitu PT Bank Pembangunan Jawa Timur dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang dibuat dihadapan notaris Rina Utami Djauhari, S.H.

Maksimum fasilitas kredit yang diterima MNA adalah sebesar Rp2.289.230.000 yang terdiri dari Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp2.029.078.000 dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (Interest During Construction) sebesar Rp260.152.000 dengan jangka waktu kredit sejak tanggal efektif perjanjian sampai dengan tanggal 23 Desember 2023. Atas pinjaman ini perusahaan dikenakan suku bunga secara Weighted Average yang akan diperhitungkan oleh Agen Fasilitas yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan ketentuan Suku Bunga yang disepakati dan diberlakukan kepada para Kreditur. Jaminan pinjaman antara lain Tagihan atas pendapatan tol dan pendapatan usaha lain yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.356.656.000. Saldo fasilitas kredit pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.628.867.335

c. PT Trans Marga Jateng (TMJ)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 11 Desember 2009, TMJ mengadakan perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang kemudian terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Kredit Sindikasi No. 28 tanggal 18 April 2012 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.

24. BANK LOANS (continued)

Syndicates Loan with some banks (continued)

b. PT Marga Nujyasumo Agung (MNA)

On January 24, 2007, MNA signed a syndicated loan agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Bukopin based on Notarial Deed of Syndicated Loan Agreement No. 33, which was amended by Notarial Deed of Syndicated Loan Agreement No. 21 dated October 23, 2012 of Rina Utami Djauhari, S.H. This amendment added another two creditors, PT Bank Pembangunan Jawa Timur and PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

The maximum credit facility given amounted to Rp2,289,230,000, which consists of Investment Loan amounting to Rp2,029,078,000 and Interest During Construction Loan amounting to Rp260,152,000 valid from the date of agreement until December 23, 2023. The loan bears Weighted Average Interest Rate determined by the Facility Agent whereas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, referred to the agreed interest rate and charged to the creditors. Loan guarantees, among others, include claims on toll revenues and other operating income bounded by fiduciary loan guarantee amounting to Rp3,356,656,000. Loans payable balance for this credit facility as of December 31, 2015 amounted to Rp1,628,867,335.

c. PT Trans Marga Jateng (TMJ)

On December 11, 2009, TMJ signed a syndicated loan agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah based on notarial deed of Syndicated Loan Agreement No. 21 dated December 11, 2009, which was amended by notarial deed of Syndicated Loan Agreement I No. 28 dated April 18, 2012 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

24. UTANG BANK (lanjutan)

**Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank
(lanjutan)**

c. PT Trans Marga Jateng (TMJ) (lanjutan)

Maksimum fasilitas kredit yang diterima TMJ adalah sebesar Rp4.697.960.000 yang terdiri dari Fasilitas Kredit Tranche I sebesar Rp1.726.556.000 dan Tranche II sebesar Rp2.370.949.000 serta Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction*) Tranche I sebesar Rp225.825.000 dan Tranche II sebesar Rp374.630.000. Jangka waktu fasilitas kredit termasuk masa tenggang terhitung sejak ditandatanganinya akta perjanjian kredit sampai dengan tanggal 6 Maret 2022. Pinjaman dikenakan tingkat suku bunga *Average Time Deposit* untuk jangka waktu 3 bulan dari bank-bank sindikasi yang dimuat di media massa ditambah margin sebesar 6% per tahun. Jaminan pinjaman antara lain tagihan atas pendapatan tol dan pendapatan usaha lain yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp6.711.371.000. Saldo fasilitas kredit pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.637.337.032.

d. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 13 tanggal 13 Oktober 2011, MLJ menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank DKI untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Lingkarluar Jakarta Seksi W2 Utara.

Maksimum kredit yang tersedia adalah sebesar Rp1.554.000.000 yang terdiri dari Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp1.386.000.000 dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (*Interest During Construction*) sebesar Rp168.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 15 tahun sejak ditandatanganinya akta perjanjian kredit.

24. BANK LOANS (continued)

Syndicates Loan with some banks (continued)

c. PT Trans Marga Jateng (TMJ) (continued)

The maximum credit facility given amounted to Rp4,697,960,000, which consists of Investment Loan Tranche I amounting to Rp1,726,556,000 and Investment Loan Tranche II amounting to Rp2,370,949,000 and Interest During Construction Loan Tranche I amounting to Rp225,825,000 and Interest During Construction Loan Tranche II amounting to Rp374,630,000. Loan facility terms including the grace period from the signing date of loan agreement will last until March 6, 2022. The loan bears interest at average of 3-month time deposit rate published by syndicated banks plus a margin of 6% per year. Loan guarantees, among others, include claims on toll revenues and other operating income bounded by fiduciary loan guarantee amounting to Rp6,711,371,000. Loans payable balance for this credit facility as of December 31, 2015 amounted to Rp1,637,337,032.

d. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)

On October 13, 2011, MLJ signed a Syndicated Loan Agreement No. 13 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank DKI for financing project JORR North W2.

The maximum credit facility given amounted to Rp1,554,000,000, which consists of Investment Loan amounting to Rp1,386,000,000 and Interest During Construction Loan amounting to Rp168,000,000. Loan facility period is 15 years the signing date of the loan agreement.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

24. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank (lanjutan)

d. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) (lanjutan)

Tingkat suku bunga untuk 1 tahun pertama adalah 10%, untuk selanjutnya menggunakan tingkat suku bunga *Average Time Deposit* untuk jangka waktu 3 bulan dari bank-bank sindikasi yang dimuat di media massa ditambah margin 4% dengan jaminan berupa tagihan atas pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.149.000.000. Saldo fasilitas kredit pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.302.701.402.

e. PT Jasamarga Bali Tol (JBT)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tanggal 22 Juni 2012, JBT telah memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) Sindikasi Pembiayaan Proyek Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Maksimum fasilitas kredit sebesar Rp1.622.000.000 termasuk IDC sebesar Rp117.300.000.000 (rupiah penuh). Jangka waktu fasilitas kredit adalah 15 tahun sejak ditandatanganinya akta. Tingkat suku bunga untuk 1 tahun pertama adalah 10%, untuk selanjutnya menggunakan tingkat suku bunga Simple Interest Rate ditambah margin sebesar 5% dengan jaminan berupa hak konsesi, pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.484.780.000. Saldo fasilitas kredit pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.238.639.916.

24. BANK LOANS (continued)

Syndicates Loan with some banks (continued)

d. PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) (continued)

The loan bears an interest rate of 10% for the first year, and the average of 3-month time deposit rate published by syndicated banks plus a margin of 4% per year for the following years. Loan guarantees are the toll revenues and other operating income bounded by fiduciary loan guarantee amounting to Rp2,149,000,000. Loans payable balance for this credit facility as of December 31, 2015 amounted to Rp1,302,701,402.

e. PT Jasamarga Bali Tol (JBT)

On June 22, 2012, JBT signed a Syndicated Loan Agreement No. 79 with PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Bali for financing project Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa toll road.

The maximum credit facility given amounted to Rp1,622,000,000, which includes Interest During Construction Loan amounting to Rp117,300,000,000 (full amount). Loan facility period is 15 years from the signing date of the loan agreement. The loan bears interest rate of 10% for the first year, and at the Simple Interest Rate plus a margin of 5% per year for the following years. Loan guarantees are the concession rights, toll revenues and other operating income bounded by fiduciary loan guarantee amounting to Rp2,484,780,000. Loans payable balance for this credit facility as of December 31, 2015 amounted to Rp1,238,639,916.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

24. UTANG BANK (lanjutan)

**Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank
(lanjutan)**

f. PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 38 tanggal 12 Juni 2012, JPT menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan.

Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp733.000.000 termasuk IDC sebesar Rp84.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 15 tahun sejak ditandatanganinya akta. Tingkat suku bunga untuk 1 tahun pertama adalah 10,50%, untuk selanjutnya menggunakan tingkat suku bunga *Simple Interest Rate* ditambah margin 5,25% dengan jaminan berupa tagihan atas pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya yang akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.202.242.000. Saldo fasilitas kredit pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp698.315.697.

g. PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 5 tanggal 1 Juni 2012, TJP menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Gempol-Pasuruan.

24. BANK LOANS (continued)

Syndicates Loan with some banks (continued)

f. PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)

On June 12, 2012, JPT signed a Syndicated Loan Agreement No. 38 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk for financing project Gempol-Pandaan toll road.

The maximum credit facility given amounted to Rp733,000,000, which includes Interest During Construction Loan amounting to Rp84,000,000. Loan facility period is 15 years from the signing date of the loan agreement. The loan bears interest rate of 10.50% for the first year, and Simple Interest Rate plus a margin of 5.25% per year for the following years. Loan guarantees are the toll revenues and other operating income bounded by fiduciary loan guarantee amounting to Rp1,202,242,000. Loans payable balance for this credit facility as of December 31, 2015 amounted to Rp698,315,697.

g. PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)

On June 1, 2012, TJP signed a Syndicated Loan Agreement No. 5 with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk for financing project Gempol-Pasuruan toll road.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

24. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman Sindikasi dengan beberapa bank (lanjutan)

g. PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP) (lanjutan)

Maksimum fasilitas kredit yang diberikan adalah sebesar Rp1.937.600.000 yang terdiri dari Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp1.801.100.000 dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (Interest During Construction) sebesar Rp136.500.000 dengan jangka waktu kredit sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 30 Juni 2027. Tingkat suku bunga menggunakan Average Time Deposit untuk jangka waktu 3 bulan dari bank-bank sindikasi ditambah margin 5,25% selama masa konstruksi dan 5,00% sejak tanggal pengoperasian. Jaminan pinjaman berupa hak konsesi perusahaan jalan tol, pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya selama masa konsesi. Saldo fasilitas kredit pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp479.396.656.

h. PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 11 tanggal 14 Juli 2015, JMKT menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

Maksimum fasilitas kredit yang disediakan sebesar Rp2.850.000.000 yang terdiri dari Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp2.638.395.000 dan Fasilitas Bunga Masa Konstruksi (Interest During Construction) sebesar Rp211.605.000 dengan jangka waktu kredit maksimum 15 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 14 Juli 2030. Tingkat suku bunga menggunakan Average Time Deposit untuk jangka waktu 3 bulan dari bank-bank sindikasi ditambah margin 3,25% selama masa konstruksi dan 3,00% sejak tanggal pengoperasian. Jaminan pinjaman berupa hak konsesi, pendapatan tol dan pendapatan usaha lainnya selama masa konsesi. Saldo fasilitas kredit pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp116.832.162.

24. BANK LOANS (continued)

Syndicates Loan with some banks (continued)

g. PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP) (continued)

The maximum credit facility given amounted to Rp1,937,000,000, which consists of Investment Loan amounting to Rp1,801,000,000 and Interest During Construction Loan amounting to Rp136,500,000. Loan facility period valid from the signing date of the loan agreement until June 30, 2027. The loan bears interest at average of 3-month time deposit rate published by syndicated banks plus a margin of 5.25% per year from date of toll operation period. Loan guarantees are the toll revenues and other operating income during the concession period. Loans payable balance for this credit facility as of December 31, 2015 amounted to Rp479,396,656.

h. PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT)

On July 14, 2015 JMKT signed a Syndicated Loan Agreement No. 11 with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, and PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk for financing project Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi toll road.

The maximum credit facility given amounted to Rp2,850,000,000, which consists of Investment Loan amounting to Rp2,638,395,000 and Interest During Construction Loan amounting to Rp211,605,000 with maximum loan period of 15 years from the signing date of agreement or until July 14, 2030. The loan bears interest at average of 3-month time deposit rate published by syndicated banks plus a margin of 3.25% during construction time and 3.00% from the date of toll operation period. Loan guarantees are the concession rights, toll revenues and other operating income during the concession period. Loans payable balance as of December 31, 2015 amounted to for this credit facility Rp116,832,162.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

25. UTANG LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Pinjaman pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Berdasarkan akta notaris No. 44 tanggal 19 Juni 2015 dari Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tentang Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp750.000.000 dari SMI. Tingkat bunga pinjaman sebesar 9,25% dari jumlah fasilitas pembiayaan yang ditarik dan/atau digunakan dan belum dibayar kembali oleh Perusahaan per tahun. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan telah menarik seluruh fasilitas pinjaman sebesar Rp750.000.000.

Pada tanggal 30 Oktober 2015, NKJ, entitas anak, memperoleh pinjaman dari SMI dengan pagu pinjaman sebesar Rp230.000.000 untuk yang digunakan sebagai modal kerja. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, NKJ telah mencairkan fasilitas pinjaman Rp212.842.308 (setelah dikurangi *up-front fee* sebesar 0,25%). Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,85% per tahun.

Pada tanggal 30 Oktober 2015, SNJ, entitas anak, memperoleh pinjaman dari SMI dengan pagu pinjaman sebesar Rp470.000.000 untuk yang digunakan sebagai modal kerja. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, SNJ telah mencairkan fasilitas pinjaman sebesar Rp385.054.994 (setelah dikurangi *up-front fee* sebesar 0,25%) dari fasilitas pinjaman ini. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,85% per tahun.

25. NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS LOAN

Loan from PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Based on notarial deed No. 44 dated June 19, 2015 of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., on Working Capital Financing Agreement, the Company has obtained loan facility amounting to Rp750,000,000 from SMI. The loan interest rate is 9.25% which was calculated from the loan drawdown and/or used and has not been paid by the Company. As of December 31, 2015, the Company has drawn the entire loan facility amounting to Rp750,000,000.

On October 30, 2015, NKJ, a subsidiary, obtained a loan facility from SMI with maximum amount of Rp230,000,000 to use as working capital. As of December 31, 2015, NKJ has drawn down the loan facility amounted to Rp212,842,308 (after deducted up-front fee of 0.25%). The loan bears interest at 9.85% per annum.

On October 30, 2015, SNJ, a subsidiary, obtained a loan facility from SMI with maximum amount of Rp470,000,000 to use as working capital. As of December 31, 2015, SNJ has drawn down the loan facility amounted to Rp385,054,994 (after deducted up-front fee of 0.25%). The loan bears interest at 9.85% per annum.

26. UTANG OBLIGASI

26. BONDS PAYABLE

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	
Obligasi Jasa Marga:			Jasa Marga Bond:
XIII Seri R	1.500.000.000	1.500.000.000	XIII - R Series
XII Seri Q	1.000.000.000	1.000.000.000	XII - Q Series
XIV Seri JM - 10	1.000.000.000	1.000.000.000	XIV JM - 10 Series
Seri S C	1.000.000.000	1.000.000.000	Seri S C
Seri T	1.000.000.000	1.000.000.000	Seri T
Seri S B	400.000.000	400.000.000	Seri S B
JORR II	259.154.384	259.154.384	JORR II
Total	<u>6.159.154.384</u>	<u>6.159.154.384</u>	Total
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi	(10.523.712)	(14.724.321)	Unamortized bonds issuance cost
Total utang obligasi	<u>6.148.630.672</u>	<u>6.144.430.063</u>	Total bonds payable
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(1.477.377.192)	-	Current maturities
Utang obligasi bagian jangka panjang	<u>4.671.253.480</u>	<u>6.144.430.063</u>	Bonds payable of long - term portion

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

26. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Jumlah pembayaran kembali untuk utang obligasi menurut tahun jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tahun Jatuh Tempo/ Year of Maturity	Total
2016	1.477.377.192
2017	1.500.000.000
2018	1.077.377.192
2019	1.000.000.000
2020	1.000.000.000
2021	104.400.000
Total	6.159.154.384

Persyaratan rasio keuangan Perusahaan berdasarkan perjanjian obligasi adalah Rasio Utang terhadap Ekuitas maksimal 5:1 dan *Interest Coverage Ratio* minimal 1,25: 1.

a. Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 4 Mei 2007, Akta Adendum 1 No. 10 tanggal 6 Juni 2007, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., dengan nilai nominal obligasi sebesar Rp 1.500.000.000.000 (rupiah penuh), tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun. Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan. Jangka waktu obligasi yaitu 10 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2017. Bertindak selaku wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk peringkat obligasi adalah idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Berdasarkan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Jasa Marga XIII Seri R, tujuan penerbitan obligasi tersebut adalah untuk melunasi sebagian pinjaman (*refinancing*) Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Jabar dan utang bantuan pemerintah dengan proporsi masing-masing sekitar 48%, 25%, 10%, 14% dan 3%.

26. BONDS PAYABLE (continued)

The amounts of repayments of bonds payable by years of maturity as of December 31, 2015 are as follows:

The Company's financial ratio requirements for all bonds payable are maximum Debt to Equity Ratio of 5:1 and minimum Interest Coverage Ratio of 1.25:1.

a. Jasa Marga Bond XIII Series R Year 2007

Based on the Deed No. 26 dated May 4, 2007, the Deed of Addendum 1 No. 10 dated June 6, 2007, and Bond Trustee Agreement of Jasa Marga XIII Series R Year 2007 of Notary Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., with a par value of Rp1,500,000,000,000 (full amount), a fixed interest rate of 10.25% per annum, the bonds were offered at 100% of the principal amount. Bond interest is payable quarterly. The term of 10-years bonds and will mature on June 21, 2017. Acting as trustee is PT Bank Mega Tbk. The bond rating is idA+ as given by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Based on the Deed of Agreement Addendum I of the Trustee Agreement for Jasa Marga Bond XIII Series R, the Company issued these bonds to repay partially the outstanding bank loans due to Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Bukopin, bank Jabar and loan from government in the following proportions: 48%, 25%, 10%, 14% and 3%, respectively.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

26. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

b. Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006

Berdasarkan Akta No. 66 tanggal 18 Mei 2006, Akta Addendum I No. 74 tanggal 19 Juni 2006, Akta Addendum II No. 89 tanggal 26 Juni 2006 dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 dari Notaris Imas Fatimah, S.H., dengan nilai nominal obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000 (rupiah penuh), tingkat bunga tetap sebesar 13,5% per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan. Jangka waktu penyelesaian obligasi yaitu 10 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Juni 2016. Bertindak selaku wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk dan peringkat obligasi tersebut adalah idA+ dari Pefindo.

Berdasarkan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Jasa Marga XII Seri Q, tujuan penerbitan obligasi tersebut adalah untuk melunasi sebagian pinjaman (*refinancing*) Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank Jabar dengan proporsi masing-masing sekitar 15%, 28%, 53% dan 4%.

c. Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Tahun 2010

Pada bulan Oktober 2010, Perusahaan memperoleh pernyataan dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk efektifitas menerbitkan Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 tahun 2010. Nilai nominal obligasi adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (rupiah penuh) dengan tingkat bunga tetap 9,35% per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan. Jangka waktu penyelesaian obligasi yaitu 10 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Oktober 2020. Bertindak selaku wali amanat PT Bank Mega Tbk Berdasarkan surat No.1044/PEF-DirN11/2010 tanggal 29 Juli 2010, peringkat obligasi dari Pefindo adalah idAA+ (*double A; Stable Outlook*).

26. BONDS PAYABLE (continued)

b. Jasa Marga Bond XII Series Q Year 2006

Based on the Deed No. 66 dated May 18, 2006, the Deed of Addendum I No. 74 dated June 19, 2006, and the Deed of Addendum II No. 89 dated June 26, 2006, and Bond Trustee Agreement of Jasa Marga Bond XII Series Q Year 2006 of Notary Imas Fatimah, S.H., with par value of Rp1,000,000,000,000 (full amount), and a fixed interest rate of 13.5% per annum, the bonds were offered at 100% of principal amount. Bond interest is payable quarterly. The term of 10-year bond and will mature on June 6, 2016. Acting as trustee for this bond is PT Bank Mega Tbk and the bond rating is idA+ as given by Pefindo.

Based on the Deed of Addendum II of the Trustee Agreement for Jasa Marga Bond XII Series Q, the Company issued these bonds to repay part of the loans (refinancing) due to Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI and Bank Jabar in the following proportions: 15%, 28%, 53% and 4%, respectively.

c. Jasa Marga Bonds XIV Series JM-10 Year 2010

*In October 2010, the Company received statement from the Chairman of Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) for the effectivity of offering Jasa Marga Bond XIV Series JM-10 year 2010. The par value of bonds is Rp1.000.000.000.000 (full amount) with fixed interest rate of 9.35% per annum. The bonds were offered at 100% of the principal amount. The interests payable paid quarterly. The timing term of 10-year bond and will mature on October 12, 2020. Acting as trustee for the bonds is PT Bank Mega Tbk. Based on letter No.1044/PEF-DirN11/2010 dated July 29, 2010, the bonds rated by Pefindo is idAA+ (*double A; Stable Outlook*).*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

26. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

c. Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Tahun 2010 (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjamin Efek Obligasi tanggal 4 Agustus 2010 juncto Addendum 1 Akta Perjanjian Penjamin Emisi Efek Obligasi No. 45 tanggal 26 Agustus 2010 tujuan penerbitan obligasi adalah untuk pelunasan Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002, percepatan pelunasan Kredit Investasi Bank BCA, pengembangan investasi pada bidang usaha non-tol (bidang properti, bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta bidang engineering), dan pembiayaan modal kerja Perusahaan dengan proporsi masing-masing 43%, 27%, 25% dan 5%.

d. Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005

Berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005 No. 2 tanggal 5 Januari 2006, Perusahaan menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp261.000.000 yang terbagi dalam 3 Tranche, sebagai berikut:

- Tranche A sebesar Rp78.300.000 untuk jangka waktu 10 tahun dan dikenakan bunga sebesar 11,5% per tahun untuk 5 tahun pertama, dan sebesar 15,25% per tahun untuk 5 tahun setelahnya;
- Tranche B sebesar Rp78.300.000 untuk jangka waktu 12 tahun dan dikenakan bunga sebesar 12,5% per tahun untuk 5 tahun pertama, dan sebesar 15,25% per tahun untuk tahun ke enam dan selanjutnya; dan
- Tranche C sebesar Rp104.400.000 untuk jangka waktu 15 tahun dan dikenakan bunga sebesar 13,5% per tahun untuk 5 tahun pertama, dan sebesar 15,5% per tahun untuk tahun ke enam dan selanjutnya.

Pada tanggal 24 November 2008, Perusahaan telah membeli kembali sebagian dari JORR II ini sejumlah Rp1.845.625 yang meliputi sertifikat yang dimiliki Bank IFI dan menurut ketentuan surat Direktur Keuangan Perusahaan No.BA.KU2.1744 tanggal 28 November 2008 atas pengalihan tersebut dianggap sebagai pelunasan dipercepat.

26. BONDS PAYABLE (continued)

c. Jasa Marga Bonds XIV Series JM-10 Year 2010 (continued)

Based on the Deed of Bond Issuance Agreement dated August 4, 2010 in conjunction with Addendum 1 of the Deed of Bond Issuance Agreement No. 45 dated August 26, 2010, the purpose of the bonds is for settlement the Jasa Marga Bonds X Series O Year 2002, accelerated settlement of the Investment Credit due to Bank BCA, non-toll investment development (property, information technology and communication, and also engineering), and financing the Company's working capital with the following proportions: 43%, 27%, 25% and 5%, respectively.

d. Jasa Marga Bond JORR II Year 2005

Based on the Deed of Bond Issuance Agreement Jasa Marga JORR II Year 2005 No. 2 dated January 5, 2006, the Company issued bonds at par value of Rp261,000,000 divided into 3 Tranches as follows:

- Tranche A amounting to Rp78,300,000 for a term of 10 years with an interest rate of 11.5% per annum for the first 5 years, and 15.25% per annum for the next 5 years;
- Tranche B amounting to Rp78,300,000 for a term of 12 years with an interest rate of 12.5% per annum for the first 5 years and 15.25% per annum for the sixth year and there after; and
- Tranche C amounting to Rp104,400,000 for a term of 15 years with an interest rate of 13.5% per annum for the first 5 years and 15.5% per annum for the sixth year and there after.

On November 24, 2008, the Company repurchased portion of these JORR II amounting to Rp1,845,625, which covers the certificate owned by PT Bank IFI and according to the decision letter of the Company's Finance Director No.BA.KU2.1744 dated November 28, 2008, such transfer was assumed as accelerated settlement.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

26. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

d. Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005 (lanjutan)

Rincian jumlah sertifikat yang dimiliki oleh para kreditur pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

26. BONDS PAYABLE (continued)

d. Jasa Marga Bond JORR II Year 2005 (continued)

The details amount of certificates owned by creditors as of December 31, 2015 consist of:

	Tranche A dan/ and B*	Tranche C	Total
PT Bank Pan Indonesia (Panin) Tbk	134.828.777	89.885.851	224.714.628
PT Bank Bukopin Tbk	8.909.584	5.939.723	14.849.307
PT Bank Pembangunan Daerah DKI	6.638.733	4.425.822	11.064.555
PT Interartha Multi Finance	863.097	575.398	1.438.495
PT Bank Harapan Santosa (dalam likuidasi/ <i>in liquidation</i>)	531.809	354.540	886.349
PT Bank Guna Internasional (dalam likuidasi/ <i>in liquidation</i>)	405.764	270.509	676.273
PT Bank Windu Kentjana International Tbk	402.409	268.273	670.682
PT Bank Mega Tbk	378.401	252.267	630.668
PT Syariah Mega Indonesia	378.401	252.267	630.668
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk	286.657	191.105	477.762
PT Bank Swadesi Tbk	258.929	172.619	431.548
PT Bank Permata Tbk	257.340	171.560	428.900
PT Bank Bisnis Internasional	215.774	143.850	359.624
PT Bank Antardaerah	172.619	115.080	287.699
PT Bank Kesawan Tbk	138.509	92.339	230.848
PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	87.580	58.386	145.966
PT Bank IFI	-	1.230.411	1.230.411
Total	154.754.383	104.400.000	259.154.383

* Catatan: persentase jumlah utang obligasi *Tranche* A dan B masing-masing sebesar 50%.

* Notes: percentage of bonds payable under *Tranche* A and B is 50% each.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

26. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

e. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S

Pada bulan September 2013, Perusahaan memperoleh pernyataan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk efektifitas menerbitkan Obligasi berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S dengan nilai nominal sebesar Rp2.100.000.000 yang terdiri dari Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dengan nilai nominal Rp700.000.000, Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai nominal Rp400.000.000, Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan nilai nominal Rp1.000.000.000. Berdasarkan Prospektus Final Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S tujuan penerbitan obligasi adalah sekitar 84,36% digunakan untuk Pelunasan Obligasi Perseroan XI Seri P Tahun 2003, pelunasan Obligasi Jasa Marga I Seri JM-10 Tanpa Bunga (*zero coupon*), dan pelunasan Obligasi Jasa Marga JORR I, kemudian 7,48% digunakan untuk kegiatan pengembangan usaha Perusahaan melalui penyertaan modal di Entitas Anak Perusahaan (MNA, MLJ, JPT) dan 8,16% digunakan untuk modal kerja Perusahaan, yaitu peningkatan kapasitas jalan. Bertindak selaku wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk. Berdasarkan hasil pemeringkat atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat dari Pefindo No. 1150/PEF-Dir/IV/2013 tanggal 26 Juni 2013, hasil pemeringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2013 Perusahaan adalah idAA (*double A*).

26. BONDS PAYABLE (continued)

e. Jasa Marga Bond I Phase I Year 2013 Series S

In September 2013, the Company received an statement from Financial Services Authority (OJK) for the effectivity of offering Jasa Marga Bonds Phase I Year 2013 Series S with the par value of Rp2,100,000, consisting of, A Series Bonds with fixed interest rate of 8.40% per annum a term of 370 (three hundreds and seventy) days and par value of Rp700,000,000, B Series Bonds with fixed interest rate of 8.70% per annum, a term of 3 (three) years and par value of Rp400,000,000, and C Series Bonds with fixed interest rate of 8.90% per annum, a term of 5 (five) years and par value of Rp1,000,000,000. Based on the Prospectus of Jasa Marga bonds Phase I Year 2013 Series S, the purpose of the issued the bonds are: 84.36% is for settlement The Jasa Marga Bond XI Series P Year 2003, The Jasa Marga Bond I Series JM-10 (zero coupon), and The Jasa Marga Bond JORR I, 7.48% is for expansion of equity investment in subsidiaries (MNA, MLJ, JPT), and 8.16% is for the Company's working capital in enhancement of toll road capacity. Acting as trustee for the bonds is PT Bank Mega Tbk. Based on letters No. 1150/PEF-Dir/IV/2013, dated June 26, 2013, the Bonds rated by Pefindo is idAA (Double A).

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

26. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

f. Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T

Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 seri T diterbitkan tanggal 19 September 2014. Nilai nominal Obligasi adalah sebesar Rp1.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap 9,85% dan jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Informasi Tambahan (INTAM) Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T tujuan penerbitan obligasi adalah sekitar 70% digunakan untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S-A, dan sisanya sekitar 30% digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman kredit modal kerja Perusahaan. Bertindak selaku wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dalam surat No. 884/PEF-Dir/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 dari Pefindo, hasil pemeringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2013 Perusahaan adalah idAA (double A).

26. BONDS PAYABLE (continued)

f. Jasa Marga Bond I Phase II Year 2014 Series T

Jasa Marga Bond I Phase II 2014 T series was issued on September 19, 2014. The face value of bond is Rp1,000,000,000, with a fixed interest rate of 9.85% and a 5 (five) year term. In the Additional Information (INTAM) Report of Jasa Marga Bond I Phase II 2014 T Series, 70% of fund raised from the bond issuance; for the repayment of Jasa Marga Bond I Year 2013 Series S-A, while the remaining 30%; for funding some of the Company's working capital. The trustee for this bond is PT Bank Mega Tbk.

Based on the report of long-term notes payable rating in the letter No. 884/PEF-Dir/VI/2014 dated June 4, 2014 from Pefindo, the rating of Jasa Marga Bond I Year 2013 is idAA (double A).

27. LIABILITAS KERJASAMA OPERASI

Akun ini merupakan liabilitas kerjasama operasi kepada investor dalam pembiayaan pembangunan aset tetap jalan tol.

27. JOINT OPERATION LIABILITIES

This account represents liabilities under joint operation agreements with investors arising from acquisition of toll road assets.

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	
Bagi hasil pendapatan tol			
PT Jakarta Baru Cosmopolitan	820.300	820.300	Toll revenue sharing
PT Surya Cipta Swadaya	-	21.385.913	PT Jakarta Baru Cosmopolitan
			PT Surya Cipta Swadaya
Total	820.300	22.206.213	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

28. LIABILITAS PEMBEBASAN TANAH

Akun ini merupakan liabilitas Kelompok Usaha atas dana talangan pembelian tanah, untuk pembangunan ruas Jalan, dengan menggunakan dana talangan Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol. Penggunaan dana talangan tersebut oleh MNA adalah untuk pembangunan ruas jalan tol Surabaya - Mojokerto, untuk TMJ adalah untuk ruas Tol Semarang - Solo, untuk PT Margabumi Adhikaraya adalah untuk ruas tol Gempol-Pandaan, untuk TJP adalah untuk ruas tol Gempol-Pasuruan, untuk MTN adalah ruas Tol Kunciran-Serpong, dan untuk MLJ adalah ruas Tol Ulujami-Kebon Jeruk (JORR W2 Utara), serta untuk MSJ adalah ruas Tol Bogor Outer Ring Road. Selain itu, kewajiban pembebasan tanah merupakan kewajiban pembebasan tanah untuk pelunasan utang ganti rugi Jalan Tol Sedyatmo.

29. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Module Intracs Yasatama, PT New Module Int Efkom AG untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Tol pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek, Jalan Tol Cipularang dan Jalan Tol Padaleunyi dengan sistem pendanaan dari pihak kontraktor. Selanjutnya Pihak Kontraktor menyewakan peralatan tol kepada Perusahaan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung sejak ditandatangani Berita Acara Pengoperasian.

Saldo utang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	
Utang sewa pembiayaan	36.137.317	49.964.832	Capital lease payable
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(14.246.400)	(15.484.840)	Current portion
Bagian jangka panjang	21.890.917	34.479.992	Long-term portion

28. LAND ACQUISITION LIABILITIES

This account represents liabilities of the Group for the bail-out loan for land acquisition and for construction of roads by using bail out from the Public Service Assistance Unit - the Indonesian Toll Road Authority. The use of bail out funds by MNA is for construction of Surabaya - Mojokerto toll road, TMJ is for construction of Semarang - Solo toll Road, PT Margabumi Adhikaraya is for construction Gempol - Pandaan Toll Road, TJP is for construction Gempol- Pasuruan Toll Road, MTN is for construction Kunciran - Serpong Toll road, MLJ is for construction Ulujami-Kebon Jeruk (JORR North W2) and MSJ is for construction Bogor Outer Ring Road Toll Road. In addition, the land acquisition liabilities also represent settlement payable for widening of Sedyatmo Toll Road.

29. CAPITAL LEASE PAYABLE

The Company entered into a joint operation with PT Module Intracs Yasatama, PT New Module Int Efkom AG for Work Procurement and Maintenance of Toll Equipments at Jakarta-Cikampek Toll Road, Cipularang Toll Road and Padaleunyi Toll Road under financing system from the contractor. Then the Contractor party would rent units of toll equipment to the Company for a period of 8 (eight) years from the signing of the Minutes of Operation.

Total Capital lease payable as of December 31, 2015 and 2014 as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

30. PROVISI PELAPISAN JALAN TOL

Jumlah dari provisi pelapisan jalan tol ini terdiri dari:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Saldo awal:	362.650.668	328.871.910
Penambahan	327.438.763	382.184.123
Realisasi	(350.311.494)	(348.405.365)
Saldo akhir	339.777.937	362.650.668
Bagian jangka pendek	163.710.293	209.396.402
Bagian jangka panjang	176.067.644	153.254.266
Total	339.777.937	362.650.668

30. PROVISION FOR OVERLAY

The amounts of provision for overlay are as follows:

Beginning balance:
Addition
Realization
Ending balance
Current portion
Long term portion
Total

31. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka merupakan jumlah dari pendapatan sewa iklan, lahan, tempat peristirahatan dan digunakan atas pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol (Rumijatul).

31. UNEARNED REVENUE

Unearned revenue represents amounts received from rental of advertisements, space and rest areas, and for use of the Space Owned Toll Road Area (Rumijatul).

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tahun 2015 dan 2014 dihitung dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* oleh aktuaris independen, PT Padma Radya Aktuarial, berdasarkan laporannya pada tanggal 20 Januari 2016.

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The long-term employee benefits liability in 2015 and 2014 were calculated using the *projected-unit-credit* method by an independent firm of actuaries, PT Padma Radya Aktuarial, based on its reports dated January 20, 2016.

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014^{*)}
Perusahaan		
Program pensiun	266.190.411	308.944.082
Program kesehatan pensiunan	469.725.694	440.337.943
Program purna karya	115.717.208	201.685.747
Program pasca kerja lainnya	84.601.653	77.746.491
Sub Total	936.234.966	1.028.714.263

The Company
Pension program
Pension health - care program
Post-retirement benefits program
Other post-employment benefits program
Sub Total

^{*)} Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

^{*)} After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014 ^{*)}	
Entitas anak			Subsidiaries
Program pensiun dan imbalan Pasca kerja lainnya			Pension program and other post Benefits program
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	11.941.773	10.560.456	PT Jalantol Lingkarluar Jakarta
PT Marga Nujyasumo Agung	4.824.551	3.748.694	PT Marga Nujyasumo Agung
PT Jasa Layanan Pemeliharaan	1.286.845	1.262.351	PT Jasa Layanan Pemeliharaan
PT Marga Lingkar Jakarta	516.776	587.253	PT Marga Lingkar Jakarta
PT Jasamarga Bali Tol	397.874	114.876	PT Jasamarga Bali Tol
PT Marga Sarana Jabar	245.266	-	PT Marga Sarana Jabar
PT Trans Marga Jateng	192.619	342.680	PT Trans Marga Jateng
Sub Total	19.405.704	16.616.310	Sub Total
Total	955.640.670	1.045.330.573	Total

Estimasi liabilitas imbalan kerja yang diakui Perusahaan adalah sebagai berikut:

The estimated employee benefits liability recognized by the Company are as follows:

a. Program kesehatan pensiunan

a. Pension healthcare program

Perusahaan membukukan program kesehatan pensiunan sesuai PSAK 24 (Revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja. Perusahaan menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku 1 Januari 2015 - 31 Desember 2015. Berdasarkan "Ketentuan Transisi (Par 173)" maka Perusahaan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif. Untuk itu perhitungan pada tanggal 31 Desember 2014 disajikan kembali sesuai dengan ketentuan yang baru.

The Company recorded pension healthcare program in accordance with PSAK 24 (Revised 2013) regarding Employee Benefits. The Company implemented Statement for the period January 1, 2015 - December, 31 2015. Based on the "Transitional Provisions (Para 173)", the Company adopted this Statement retrospectively. Therefore, the calculation as of December 31, 2014 was restated in accordance with the new regulation.

Kewajiban atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit Method* berdasarkan asumsi aktuarial jangka panjang. Biaya Jasa lalu timbul karena terdapat perubahan skema manfaat di tahun 2015.

Employee benefits liability is estimated using the *Projected-Unit-Credit Method* based on long-term actuarial assumptions. Actuarial gains/ losses incurred are recognized directly in Other Comprehensive Income. Past service cost arised because of the changes in benefit schemes in 2015.

Perusahaan menyelenggarakan program fasilitas kesehatan untuk karyawan yang sudah pensiun bersama dengan keluarganya sesuai Peraturan Perusahaan. Perusahaan tidak melakukan pendanaan untuk Program ini.

The Company established a healthcare facility for employees who had retired together with their families in accordance with the Company regulation. The Company does not undertake any funding for this program.

^{*)} Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

^{*)} After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

a. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

a. Pension healthcare program (continued)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

Reconciliation of beginning and ending balance of present value of obligation is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014^{*)}	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	440.337.943	385.846.062	<i>Present value liability - beginning of Year</i>
Biaya bunga	36.615.602	31.646.799	<i>Interest cost</i>
Biaya jasa kini	10.779.982	9.122.853	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	28.008.340	-	<i>Past service cost</i>
Pembayaran imbalan	(14.896.857)	(10.101.016)	<i>Benefits paid</i>
Nilai kini liabilitas - akhir periode (ekspektasi)	500.845.010	416.514.698	<i>Present value liability - end of period (expectation)</i>
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto			<i>Re-measurement of liability (asset) defined return</i>
- Keuntungan/kerugian dari perubahan asumsi	(39.845.115)	16.480.712	<i>Gain/loss from changes in assumptions -</i>
- Penyesuaian atas pengalaman	8.725.799	7.342.533	<i>Experience adjustments -</i>
Nilai kini liabilitas - akhir periode	469.725.694	440.337.943	<i>Present value liability - end of period</i>
Nilai kini liabilitas tidak didanai - akhir tahun	469.725.694	440.337.943	<i>Present value liability unfunded - end of Year</i>
Nilai kini liabilitas - akhir periode	469.725.694	440.337.943	<i>Present value liability - end of period</i>

Rincian keuntungan (kerugian) aktuarial dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut :

The details of of actuarial gain (loss) in the consolidated statements of financial position are as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014^{*)}	
Penghasilan komprehensif lain			<i>Other comprehensive income</i>
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto			<i>Re-measurement of liability (asset) net defined return</i>
Keuntungan dan kerugian aktuarial			<i>Actuarial gain and loss</i>
- Perubahan asumsi aktuarial	(39.845.115)	16.480.712	<i>Changes in actuarial assumptions -</i>
- Penyesuaian atas pengalaman	8.725.799	7.342.533	<i>Experience adjustments -</i>
Penghasilan komprehensif lain	(31.119.316)	23.823.245	<i>Other comprehensive income</i>

^{*)} Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

^{*)} After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

Rincian beban yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014*)	
Biaya jasa kini	10.779.982	9.122.853	Current service cost
Biaya jasa lalu	28.008.340	-	Past service cost
Biaya bunga	36.615.602	31.646.799	Interest cost
Beban yang diakui	75.403.924	40.769.652	Recognized expenses

Rekonsiliasi saldo pengukuran kembali atas liabilitas/(aset) neto di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014 ¹⁾	
Jumlah pengukuran kembali			Re-measurement amount -
Awal periode	17.867.434	-	Beginning of period
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	(23.339.487)	17.867.434	Actuarial gain (loss)
Akumulasi jumlah pengukuran kembali	(5.472.053)	17.867.434	Accumulated amount of re-measurements

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014*)	
Liabilitas bersih awal tahun	440.337.943	385.846.062	Net liability - beginning of year
Beban periode berjalan	75.403.924	40.769.652	Recognized expenses
Pembayaran imbalan kerja oleh entitas	(14.896.857)	(10.101.016)	Payments of employee benefits from employer
Pengukuran kembali liabilitas/aset	(31.119.316)	23.823.245	Re-measurement of liability/ assets
Liabilitas bersih akhir periode	469.725.694	440.337.943	Net liability - end of period

*) Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

*) After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

Pada tahun berjalan saat ini dan lima tahun sebelumnya dari nilai kini kewajiban imbalan pasti, nilai wajar aset program dan defisit pada program adalah sebagai berikut:

	2015	2014	2013	2012	2011	
Nilai kini liabilitas manfaat pasti	469.725.694	440.337.943	385.846.062	330.967.879	259.738.117	Present value of defined benefits liability
Posisi pendanaan	<u>469.725.694</u>	<u>440.337.943</u>	<u>385.846.062</u>	<u>330.967.879</u>	<u>259.738.117</u>	Funding

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	2015	2014 ^{*)}	
Tingkat bunga aktuarial awal periode	9,20%	7,95%	Discount rate - beginning of year
Estimasi kenaikan biaya kesehatan	6,00%	6,00%	Health care increment
Proporsi pengambilan usia pensiun normal	100,00%	100,00%	Proportion of normal retirement age
Tingkat mortalita	TMI 2011 GAM 71	TMI 2011	Mortality rate
Tingkat cacat	10 % dari TMI 3		Disability rate
Metode aktuarial	Garis lurus/ Straight line		Actuarial method
Usia pensiun normal	55	55	Pension normal age
Analisis sensitivitas nilai kini kewajiban imbalan pasti	469.725.694	440.337.943	Sensitivity analysis PV defined benefits obligation

Asumsi tingkat biaya kesehatan (tingkat diskonto)/Assumption of health care costs	2015	2014
+ 1,00%	474.422.951	442.902.842
- 1,00%	465.028.438	437.738.755

b. Program pensiun

Perusahaan membukukan program pensiun karyawan sesuai PSAK 24 (Revisi 2013). Perusahaan menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku 1 Januari 2015 – 31 Desember 2015. Berdasarkan "Ketentuan Transisi (Par 173)" maka Perusahaan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif. Untuk itu perhitungan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 disajikan kembali sesuai dengan ketentuan yang baru.

Kewajiban atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit* berdasarkan asumsi aktuarial jangka panjang. Keuntungan/kerugian aktuarial yang timbul diakui langsung pada Pendapatan Komprehensif Lain

^{*)} Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

a. Pension healthcare program (continued)

The current year and previous five years funded status of present value of benefits obligation, fair value of plan assets and deficit in the program are as follows:

The actuarial assumptions used to determine post-employment benefits expense and liabilities are as follows:

b. Pension program

The Company recorded pension program of the employees in accordance with PSAK 24 (Revised 2013). The Company implemented Statement for January 1, 2015 - December, 31 2015. Based on the "Transitional Provisions (Para 173)", the Company adopted this Statement retrospectively. Therefore, the calculation as for the year ended December 31, 2014 was restated in accordance with the new determination.

Employee benefits liability are estimated using the *Projected-Unit-Credit Method* based on the long-term actuarial assumptions. Actuarial gains/ losses incurred are recognized directly in Other Comprehensive Income.

^{*)} After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Program pensiun (lanjutan)

Program pensiun ini dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun JASA MARGA yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia KEP-379/KM.6/2004 pada tanggal 14 September 2004. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut adalah sebanyak 4.430 karyawan aktif, 254 karyawan keluar dengan pensiun ditunda dan 1.154 pensiunan.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas yang adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014*)
Nilai kini liabilitas - awal tahun	1.047.056.888	910.659.663
Biaya bunga	59.314.777	72.852.773
Biaya jasa kini	25.667.505	34.377.722
Pembayaran imbalan	(46.410.023)	(37.833.583)
Nilai kini liabilitas - akhir periode (ekspektasi)	1.085.629.147	980.056.575
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto		
- Keuntungan/kerugian dari Perubahan asumsi	(42.311.971)	14.444.122
- Penyesuaian atas pengalaman	21.455.131	52.556.191
Nilai kini liabilitas - akhir periode	1.064.772.307	1.047.056.888
Nilai kini liabilitas tidak didanai - akhir periode	1.064.772.307	1.047.056.888
Nilai kini liabilitas didanai - Akhir periode	(798.581.896)	(738.112.806)
Nilai kini liabilitas - akhir periode	266.190.411	308.944.082

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari aset program adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014*)
Nilai wajar aset program awal periode	738.112.806	617.844.365
Ekspektasi imbal hasil dari aset program	58.310.912	64.873.658

*) Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

b. Pension program (continued)

The retirement program is managed by Yayasan Dana Pensiun JASA MARGA which has been approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia KEP-379/KM.6 /2004 on September 14, 2004. The number of employees which are entitled to these benefits are 4,430 active employees, 254 resigned employees with deferred pensions and 1,154 retired employees.

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of obligation is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014*)
Present value liability - beginning of year	910.659.663	910.659.663
Interest cost	59.314.777	72.852.773
Current service cost	25.667.505	34.377.722
Benefits paid	(46.410.023)	(37.833.583)
Present value liability - end of period (expectation)	1.085.629.147	980.056.575
Re-measurement of net liability (asset)		
Gain/loss changes in from assumptions - Experience adjustments -	(42.311.971)	14.444.122
	21.455.131	52.556.191
Present value liability - end of period	1.064.772.307	1.047.056.888
Present value liability unfunded - End of period	1.064.772.307	1.047.056.888
Present value liability funded - End of period	(798.581.896)	(738.112.806)
Present value liability -end of period	266.190.411	308.944.082

The reconciliation of beginning and ending balance of asset program is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014*)
Assets program - beginning of period	617.844.365	617.844.365
Return on investments	58.310.912	64.873.658

*) After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Program pensiun (lanjutan)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari aset program adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014*)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto		
- Imbal hasil aset program	(65.465.784)	30.154.576
Pembayaran iuran - pemberi kerja	109.271.965	58.184.710
Pembayaran iuran - peserta program	4.762.020	4.889.080
Pembayaran imbalan kerja	(46.410.023)	(37.833.583)
Aset program akhir periode (aktual)	798.581.896	738.112.806

Rincian keuntungan/(kerugian) aktuarial dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014*)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto		
Keuntungan dan kerugian aktuarial		
- perubahan asumsi aktuarial	(42.311.971)	14.444.122
- penyesuaian atas pengalaman	21.455.131	52.556.191
Imbal hasil atas aset program	65.465.784	(30.154.576)
Penghasilan komprehensif lain	44.608.944	36.845.737

Rincian beban yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014*)
Biaya jasa kini	20.905.485	29.488.642
Biaya bunga	1.003.865	7.979.114
Beban yang diakui	21.909.350	37.467.756

*) Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

b. Pension program (continued)

The reconciliation of beginning and ending balance of asset program is as follows: (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014*)
Re-Measurement of liability (Asset) net defined return		
-Return of program's asset	(65.465.784)	30.154.576
Payment of contributions from employee	109.271.965	58.184.710
Payment of contributions from employee	4.762.020	4.889.080
Benefits paid	(46.410.023)	(37.833.583)
Assets program - end of period (actual)	798.581.896	738.112.806

The details of actuarial gain/(loss) in the consolidated statements of financial position are as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014*)
Re-measurement of liability (asset)		
Actuarial gain and loss		
Changes in actuarial assumptions -		
Experience adjustments -	(42.311.971)	14.444.122
Return on program's asset	21.455.131	52.556.191
	65.465.784	(30.154.576)
Other comprehensive income	44.608.944	36.845.737

The details of expenses recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014*)
Current service cost	20.905.485	29.488.642
Interest cost	1.003.865	7.979.114
Recognized expenses	21.909.350	37.467.756

*) After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

b. Program pensiun (lanjutan)

b. Pension program (continued)

Rekonsiliasi saldo pengukuran kembali atas liabilitas/(aset) neto di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation of re-measurement on net of liability/(asset) in the consolidated statement of financial position are as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014*)	
Jumlah pengukuran kembali Awal periode (Keuntungan) kerugian aktuarial	210.290.256 33.456.708	182.655.953 27.634.302	Re-Measurement amount - Beginning of period Actuarial gain (Loss)
Akumulasi jumlah pengukuran kembali	243.746.964	210.290.255	Accumulated amount of re-measurements

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014*)	
Liabilitas bersih awal tahun	308.944.082	292.815.299	Net liability - beginning of year
Beban periode berjalan	21.909.350	37.467.756	Recognized expenses
Pembayaran iuran periode berjalan	(109.271.965)	(58.184.710)	Contribution of employer for the period
Pengukuran kembali liabilitas/aset	44.608.944	36.845.737	Re-measurement of liability/assets
Liabilitas bersih akhir periode	266.190.411	308.944.082	Net liability - end of period

Pada tahun berjalan saat ini dan lima tahun sebelumnya dari nilai kini kewajiban imbalan pasti, nilai wajar aset program dan defisit pada program adalah sebagai berikut:

The current year and previous five years of funded status of present value of benefit obligation, fair value of plan asset and deficit in the program are as follows:

	2015	2014	2013	2012	2011	
Nilai kini liabilitas manfaat pasti	1.064.772.307	1.047.056.888	910.659.663	1.045.409.247	705.743.341	Present value of defined benefits liability
Nilai wajar aset Program	(798.581.896)	(738.112.806)	(617.844.365)	(614.800.233)	(568.750.035)	Fair value of program assets
Posisi pendanaan	266.190.411	308.944.082	292.815.298	430.609.014	136.993.306	Funding

*) Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

*) After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

b. Program pensiun (lanjutan)

b. Pension program (continued)

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used to determine post-employment benefits expenses and liabilities are as follows:

31 Desember/December 31,		
2015	2014^{*)}	
Tingkat diskonto	9,00%	7,90% <i>Discount rate</i>
Estimasi kenaikan gaji pegawai Aktif	5,00%	5,00% <i>Salary Increment</i>
Tingkat mortalita	100% TMI III	100% TMI III <i>Mortality rate</i>
Tingkat cacat	10% TMI III	10% TMI III <i>Disability rate</i>
Tingkat mengundurkan diri		<i>Early retirement rate</i>
	<u>Usia/Age</u>	<u>Tingkat</u>
	15 – 29	6%
	30 – 34	3%
	35 – 39	1.8%
	40 – 50	1.2%
	51 – 52	0.6%
	> 52	0%
Metode aktuarial	Garis lurus/ <i>Straight line</i>	<i>Actuarial method</i>
Usia pensiun normal	56	<i>Pension normal age</i>
Usia pensiun dini	46	<i>Early pension age</i>
Proporsi pengambilan usia pensiun normal	100%	
Analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:		<i>Sensitivity analysis on December 31, 2015 is as follows:</i>
Analisis sensitivitas		<i>Sensitivity analysis</i>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.064.772.307	<i>PV defined benefit obligations</i>
Asumsi tingkat diskonto		<i>Discount rate assumptions</i>
+ 1,00%	1.121.912.902	+ 1.00%
- 1,00%	1.013.250.016	- 1.00%
Asumsi tingkat kenaikan gaji		<i>Salary increment assumptions</i>
+ 1,00%	1.000.635.793	+ 1.00%
- 1,00%	1.137.474.131	- 1.00%
Metode analisis sensitivitas	Deterministic Method	<i>Sensitivity analysis method</i>
Komposisi nilai wajar aset program		<i>Compositions of fair value of assets program</i>
Instrumen ekuitas	6%	<i>Equity instrument</i>
Deposito berjangka	7%	<i>Time deposits</i>
Reksadana	27%	<i>Mutual fund</i>
Obligasi	51%	<i>Bond</i>
Properti	2%	<i>Property</i>
Asset lainnya	7%	<i>Group saving product</i>
Total	100%	Total

*) Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

*) After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Program purna karya

Perusahaan membukukan purna karya sesuai PSAK 24 (Revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja. Perusahaan menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku 1 Januari 2015 - 31 Desember 2015. Berdasarkan "Ketentuan Transisi (Par 173)" maka Perusahaan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif. Untuk itu perhitungan pada tanggal 31 Desember 2014 disajikan kembali sesuai dengan ketentuan yang baru.

Kewajiban atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode Projected Unit Credit Method berdasarkan asumsi aktuarial jangka panjang. Perusahaan menyelenggarakan program ini sesuai perjanjian kerja bersama. Perusahaan melakukan pendanaan sehubungan dengan program manfaat karyawan tersebut yang ditempatkan pada program asuransi dikelola oleh AJB Bumiputera.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan tersebut pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebanyak 4.580 karyawan.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014*)	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	496.964.329	420.680.113	<i>Present value liability – beginning of Year</i>
Biaya bunga	32.756.486	33.654.409	<i>Interest cost</i>
Biaya jasa kini	18.829.763	20.482.960	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	(3.491.092)	-	<i>Past service cost</i>
Pembayaran imbalan	(45.695.879)	(47.408.772)	<i>Benefits paid</i>
Nilai kini liabilitas - akhir periode (ekspektasi)	499.363.607	427.408.710	<i>Present value liability - end of period (expectation)</i>

*) Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

c. Post-retirement benefits program

The Company recorded severance benefits and rewards program of the employees in accordance with PSAK 24 (Revised 2013) regarding Employee Benefits. The Company implemented Statement January 1, 2015 - December, 31 2015. Based on the "Transitional Provisions (Para 173)", the Company adopted this Statement retrospectively. Therefore, the calculation as of December 31, 2014 was restated in accordance with the new regulation.

Employee benefits liabilities are estimated using the Projected-Unit-Credit method based on long-term actuarial assumptions. The Company maintains its program based on collective labor agreement. The Company committed funding the employee benefits program on insurance program managed by AJB Bumiputera.

The number of employees as of December 31, 2015 entitled to this benefits are 4,580 employees.

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows:

*) After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Program purna karya (lanjutan)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014[*]
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto		
- Keuntungan/kerugian dari perubahan asumsi	(33.700.258)	2.928.344
- Penyesuaian atas pengalaman	67.263.960	(1.108.945)
Penyesuaian segera	-	67.736.219
Nilai kini liabilitas - akhir periode	<u>532.927.309</u>	<u>496.964.328</u>
Nilai kini liabilitas tidak didanai - akhir periode	532.927.309	496.964.328
Nilai kini liabilitas didanai - akhir periode	<u>(417.210.101)</u>	<u>(295.278.581)</u>
Nilai kini liabilitas - akhir periode	<u>115.717.208</u>	<u>201.685.747</u>

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari aset program adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014¹⁾
Nilai wajar aset program awal periode	295.278.583	292.818.808
Ekspektasi imbal hasil dari aset program	26.199.491	26.353.693
Pengukuran kembali liabilitas (aset) Imbalan pasti neto		
- imbal hasil aset program	23.010.922	(35.583.297)
Pembayaran iuran - pemberi kerja	121.908.076	59.098.151
Pembayaran imbalan kerja	(45.695.879)	(47.408.772)
Dampak pengurangan karyawan	(3.491.092)	-
Nilai wajar aset - akhir periode	<u>417.210.101</u>	<u>295.278.583</u>

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

c. Post-retirement benefits program (continued)

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of liabilities is as follows: (continued)

Re-Measurement of actuarial gain (loss)	
Gain/loss from changes in assumptions -	
Experience adjustments -	
Direct adjustment	
Present value liability - end of period	
Present value liability unfunded - end of period	
Present value liability funded - end of period	
Present value liability - end of period	

The reconciliation of beginning and ending balance of asset program is as follows:

Fair value assets program - beginning of period	
Return on investments	
Re-measurement of liability (asset) Net defined return of program's asset -	
Payment of contributions from employer	
Benefits paid	
Impact of employee reduction	
Assets program - end of period	

^{*}) Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

^{*}) After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

c. Program purna karya (lanjutan)

c. Post-retirement benefits program (continued)

Rincian keuntungan (kerugian) aktuarial dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of of actuarial gain (loss) in the consolidated statement of financial position are as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014*)	
Penghasilan komprehensif lain			Other comprehensive income
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto			Re-measurement of liability (asset) net defined return
Keuntungan dan kerugian aktuarial			Actuarial gain and loss
- perubahan asumsi aktuarial	(33.700.258)	2.928.344	actuarial assumption changes -
- penyesuaian atas pengalaman	67.263.960	(1.108.945)	adjustment for experience -
Imbal hasil atas aset program	(23.010.922)	35.583.297	Return of asset program
Biaya yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	10.552.780	37.402.696	Recognized expenses at other comprehensive income

Rincian beban yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the consolidated statement of financial position are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014*)	
Biaya jasa kini	18.829.763	20.482.960	Current service cost
Biaya bunga	6.556.994	7.300.717	Interest cost
Penyesuaian segera	-	67.736.219	Direct adjustment
Beban yang diakui	25.386.757	95.519.896	Recognized expenses

Mutasi saldo pengukuran kembali atas liabilitas/(aset) neto di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of re-measurement on net of liability/(asset) in the consolidated statement of financial position are as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014*)	
Jumlah pengukuran kembali - awal periode	76.483.723	48.431.700	Re-measurement amount - beginning of period
(Keuntungan) kerugian aktuarial	7.914.585	28.052.023	Actuarial gain (Loss)
Akumulasi jumlah pengukuran kembali	84.398.308	76.483.723	Accumulated amount of re-measurement

*) Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

*) After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

c. Program purna karya (lanjutan)

c. Post-retirement benefits program (continued)

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movement in the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014*)	
Liabilitas bersih awal tahun	201.685.747	127.861.306	Net liability - beginning of year
Beban periode berjalan	25.386.757	95.519.896	Recognized expenses
Pembayaran iuran periode berjalan	(121.908.076)	(59.098.151)	Contribution of employer for the period
Pengukuran kembali liabilitas/aset	10.552.780	37.402.696	Re-measurement of liability/assets
Liabilitas bersih akhir periode	115.717.208	201.685.747	Net liability - end of period

Pada tahun berjalan dan lima tahun sebelumnya dari nilai kini kewajiban imbalan pasti, nilai wajar aset program dan defisit pada program adalah sebagai berikut:

The current year and previous five years of funded status of present value of benefit obligation, fair value of plan asset and deficit in the program are as follows:

	2015	2014	2013	2012	2011	
Nilai kini liabilitas manfaat pasti	532.927.309	496.964.329	420.680.114	457.261.315	369.489.979	Present value of defined benefits liability
Nilai wajar aset program	(417.210.101)	(295.278.582)	(292.818.808)	(249.834.059)	(159.107.655)	Fair value of program assets
Posisi pendanaan	115.717.208	201.685.747	127.861.306	207.427.256	210.382.324	Funding

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used to determine post-employment benefit expenses and liabilities are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014 ^{*)}	
Tingkat diskonto	9,00%	7,90%	Discount rate
Estimasi kenaikan gaji pegawai	6,50%	6,50%	Salary increment
Tingkat mortalita	100% TMI3	100% TMI3	Mortality rate
Tingkat cacat	10% dari TMI3	10 % dari TMI3	Disability rate
Tingkat mengundurkan diri			Early retirement rate
<u>Usia/ Age</u>		<u>Tingkat</u>	
15 – 29		6%	
30 – 34		3%	
35 – 39		1.8%	
40 – 50		1.2%	
51 – 52		0.6%	
> 52		0%	
Metode aktuarial		Projected Unit Credit	Actuarial method
Usia pensiun normal		56 tahun/ year	Pension normal age
Proporsi pengambilan usia pensiun normal		100,0%	

*) Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

*) After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

c. Program purna karya (lanjutan)

Analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Analisis sensitivitas Nilai kini kewajiban imbalan pasti	532.927.309
Asumsi Tingkat Diskonto	
+ 1,00%	567.532.798
- 1,00%	501.746.162
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji	
+ 1,00%	500.707.974
- 1,00%	568.097.558

d. Program pasca kerja lainnya

Perusahaan membukukan program manfaat pesangon dan penghargaan masa kerja karyawan sesuai PSAK 24 (Revisi 2013). Perusahaan menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku 1 Januari 2015 - 31 Desember 2015. Berdasarkan "Ketentuan Transisi (Par 173)" maka Perusahaan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif. Untuk itu perhitungan pada tanggal 31 Desember 2014 disajikan kembali sesuai dengan ketentuan yang baru.

Kewajiban atas masa kerja lalu diestimasi dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit Method* berdasarkan asumsi aktuarial jangka panjang. Perusahaan menyelenggarakan program manfaat PHK karyawan (post-retirement benefit) sesuai perjanjian kerja bersama dengan memberikan imbalan sesuai UU. No. 13/2003 bagi karyawan meninggal atau sakit berkepanjangan dan imbalan emas untuk karyawan yang berhenti bekerja selain dikarenakan pengunduran diri. Perusahaan tidak melakukan pendanaan sehubungan dengan program manfaat karyawan tersebut.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan tersebut pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebanyak 4.580 karyawan.

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

c. Post-retirement benefits program (continued)

Sensitivity analysis on December 31, 2015 is as follows:

Sensitivity analysis PV defined benefits obligations	
Discount Rate Assumptions	
+ 1.00%	+ 1.00%
- 1.00%	- 1.00%
Salary Increment Assumptions	
+ 1.00%	+ 1.00%
- 1.00%	- 1.00%

d. Post-retirement benefits program

The Company recorded severance benefits and rewards program of the employees in accordance with PSAK 24 (Revised 2013). The Company implemented Statement January 1, 2015 - December, 31 2015. Based on the "Transitional Provisions (Par 173)", the Company adopted this Statement retrospectively. Therefore, the calculation as of December 31, 2014 was restated in accordance with the new determination.

Employee benefits liabilities are estimated using the *Projected-Unit-Credit* method based on long-term actuarial assumptions. The Company maintains its employee post-retirement benefits program based on collective labor agreement by providing benefits according to UU. No. 13/2003 for employee who decease or has a prolonged illness and gold reward benefits for employee who retire besides due to resign. The Company does not undertake any funding for this program.

The number of employees (as of December 31, 2015) entitled to this benefits are 4,580 employees.

*) Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

*) After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

d. Program pasca kerja lainnya (lanjutan)

d. Post-retirement benefits program (continued)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas yang adalah sebagai berikut:

The reconciliation of beginning and ending balance of present value of obligation is as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014*)	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	77.746.491	72.454.824	Current service cost of year
Biaya bunga	6.297.958	5.652.119	Interest cost
Biaya jasa kini	2.235.442	1.906.064	Current service cost
Nilai kini liabilitas - akhir periode (ekspektasi)	86.279.891	80.013.007	Present value liability - end of period (expectation)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) Imbalan pasti neto			Re-Measurement of actuarial gain (loss)
- Keuntungan/kerugian dari perubahan asumsi	(716.269)	699.184	Gain/loss from changes in assumptions -
- Penyesuaian atas pengalaman	(961.969)	(2.965.700)	Experience adjustments -
Nilai kini liabilitas - akhir Periode	84.601.653	77.746.491	Present value liability - end of period
Nilai kini liabilitas tidak didanai - akhir periode	84.601.653	77.746.491	Present value liability unfunded - end of period
Nilai kini liabilitas didanai - akhir periode	-	-	Present value liability funded - end of period
Nilai kini liabilitas - akhir periode	84.601.653	77.746.491	Present value liability - end of period

Rincian Keuntungan (kerugian) aktuarial dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of of actuarial gain (loss) in the consolidated statement of financial position are as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014*)	
Penghasilan komprehensif lain			Other comprehensive income
Pengukuran kembali liabilitas (aset) Imbalan pasti neto			Re-measurement of liability (asset) nett defined return
Keuntungan dan kerugian aktuarial			Actuarial gain and loss
- perubahan asumsi aktuarial	(716.269)	699.184	actuarial assumption changes -
- penyesuaian atas pengalaman	(961.969)	(2.965.700)	adjustment for experience -
Biaya yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(1.678.238)	(2.266.516)	Recognized expenses at other comprehensive income

*) Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

*) After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

d. Program pasca kerja lainnya (lanjutan)

d. Post-retirement benefits program (continued)

Rincian beban yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of expenses recognized in the consolidated statement of financial position are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014*)	
Biaya jasa kini	2.235.442	1.906.064	Current service cost
Biaya bunga	6.297.958	5.652.119	Interest cost
Penyesuaian segera	-	-	Direct adjustment
Beban yang diakui	8.533.400	7.558.183	Recognized expenses

Mutasi saldo pengukuran kembali atas liabilitas/(aset) neto di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of re-measurement on net of liability/(asset) in the consolidated statement of financial position are as follow:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014*)	
Jumlah pengukuran kembali - awal periode	(1.699.886)	-	Re-measurement amount - beginning of period
(Keuntungan) kerugian aktuarial	(1.258.679)	(1.699.887)	Actuarial gain (loss)
Akumulasi jumlah pengukuran kembali	(2.958.565)	(1.699.887)	Accumulated amount of re-measurement

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements in the liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014*)	
Liabilitas bersih awal tahun	77.746.491	72.454.824	Net liability - beginning of year
Beban periode berjalan	8.533.400	7.558.183	Recognized expenses
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(1.678.238)	(2.266.516)	Recognized expenses at other comprehensive income
Liabilitas bersih akhir periode	84.601.653	77.746.491	Net liability - end of period

*) Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

*) After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

d. Program pasca kerja lainnya (lanjutan)

d. Post-retirement benefits program (continued)

Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used to determine post-employment benefit expenses and liabilities are as follows:

		31 Desember/December 31,		
		2015	2014 ¹⁾	
Tingkat diskonto		9,00%	7,90%	Discount rate
Estimasi kenaikan gaji pegawai		6,50%	6,50%	Salary increment
Tingkat mortalita		100% TMI3	100% TMI3	Mortality rate
Tingkat cacat		5% dari TMI3	5% dari TMI3	Disability rate
Tingkat mengundurkan diri				Early retirement rate
<u>Usia/ Age</u>	<u>Tingkat</u>			
15 – 29			6%	
30 – 34			3%	
35 – 39			1.8%	
40 – 50			1.2%	
51 – 52			0.6%	
> 52			0%	
Metode aktuarial			Projected Unit Credit	Actuarial method
Usia pensiun normal			56 tahun/ year	Pension normal age
Proporsi pengambilan usia pensiun normal			100,0%	

Analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Sensitivity analysis on December 31, 2015 is as follows:

	84.601.653	Sensitivity analysis PV defined benefits obligations
Analisis sensitivitas		
Nilai kini kewajiban imbalan pasti		
Asumsi Tingkat Diskonto		Discount Rate Assumptions
+ 1,00%	90.095.238	+ 1.00%
- 1,00%	79.651.679	- 1.00%
Asumsi Tingkat Kenaikan Gaji		Salary Increment Assumptions
+ 1,00%	79.486.867	+ 1.00%
- 1,00%	90.184.893	- 1.00%

^{*)} Setelah penyesuaian transisi PSAK 24 (Revisi 2013) (Catatan 4)

^{*)} After the transition adjustment to PSAK 24 (Revised 2013) (Note 4)

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

33. MODAL SAHAM

Pemegang Saham Seri A mempunyai hak istimewa tertentu sebagai tambahan atas hak Pemegang Saham Seri B. Hak istimewa tersebut mencakup hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan komisaris dan untuk memberikan persetujuan atas : (a) peningkatan modal, (b) perubahan anggaran dasar, (c) penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, (d) pembubaran dan likuidasi, (e) pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris.

33. CAPITAL STOCK

The Shareholder of Series A shares has certain privileges in addition to any rights of Series B Shareholders. These privileges include the exclusive rights to nominate directors and commissioners and to give approval for : (a) an increase in capital, (b) changes in the article of association, (c) merger, consolidation and acquisition, (d) dissolution and liquidation, (e) appointment and dismissal of directors and commissioners.

31 Desember 2015/December 31, 2015

Pemegang Saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh /Number of shares issued and fully paid	Persentase(%) kepemilikan/ Percentage of ownership(%)	Total (dalam rupiah penuh)/Total (in Rp full amount)	Shareholders
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia	1	-	500	Series A Dwiwarna - Share The government of the Republic of Indonesia
Saham Seri B Pemerintah Republik Indonesia Manajemen dan karyawan; Ir. Adityawarman Ir. Hasanudin, M.Eng.Sc Ir. Reynaldi Hermansjah Ir. Muh Najib Fauzan, M.Sc Karyawan	4.759.999.999 134.500 8.500 200.000 110.200 8.856.761	70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13	2.379.999.999.500 67.250.000 4.250.000 100.000.000 55.100.000 4.428.380.500	The Government of the Republic of Indonesia Management and employees; Ir. Adityawarman Ir. Hasanudin, M.Eng.Sc., Ir. Reynaldi Hermansjah Ir. Muh Najib Fauzan, M.Sc. Employees
Sub total	9.309.961	70,13	4.654.980.500	Sub total
BPJS Ketenagakerjaan - JHT Masyarakat (masing-masing dibawah 2%)	188.688.200 1.842.001.839	2,77 27,10	94.344.100.000 921.000.919.500	BPJS Ketenagakerjaan - JHT Public (each below 2%)
Total	6.800.000.000	100,00	3.400.000.000.000	Total

31 Desember 2014/December 31, 2014

Pemegang Saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh /Number of shares issued and fully paid	Persentase(%) kepemilikan/ Percentage of ownership(%)	Total (dalam rupiah penuh)/Total (in Rp full amount)	Shareholders
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia	1	-	500	Series A Dwiwarna - Share The government of the Republic of Indonesia
Saham Seri B Pemerintah Republik Indonesia Manajemen dan karyawan; Ir. Agoes Widjanarko, M.I.P. Ibnu Purna Muchtar, S.E., M.A. Ir. Adityawarman Ir. Hasanudin, M.Eng.Sc Ir. Abdul Hadi HS, M.M. Ir. Reynaldi Hermansjah Ir. Muh Najib Fauzan, M.Sc. Karyawan	4.759.999.999 80.000 10.500 134.500 8.500 260.500 200.000 107.500 12.537.761	70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18	2.379.999.999.500 40.000.000 5.250.000 67.250.000 4.250.000 130.250.000 100.000.000 53.750.000 6.268.880.500	The Government of the Republic of Indonesia Management and employees; Ir. Agoes Widjanarko, M.I.P. Ibnu Purna Muchtar, S.E., M.A. Ir. Adityawarman Ir. Hasanudin, M.Eng.Sc., Ir. Abdul Hadi HS, M.M. Ir. Reynaldi Hermansjah Ir. Muh Najib Fauzan, M.Sc. Employees
Sub total	13.339.261	70,18	6.669.630.500	Sub total
Masyarakat (masing-masing dibawah 2%)	2.026.660.739	30,00	1.013.330.369.500	Public (each below 2%)
Total	6.800.000.000	100,00	3.400.000.000.000	Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

34. TAMBAHAN MODAL DISETOR-NETO

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
Tambahan modal disetor dari:		
Penawaran umum perdana saham tahun 2007	2.343.266.337	2.343.266.337
Pembelian saham kembali (<i>treasury shares</i>)	(7.741.303)	(7.741.303)
Hasil bersih penjualan <i>treasury shares</i>	118.365.066	118.365.066
Total	2.453.890.100	2.453.890.100

34. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL-NET

*Additional paid in capital from:
Initial public offering
Year 2007*

*Repurchase of shares
Net proceeds from
sales of treasury shares*

Total

35. DIVIDEN DAN LABA YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 mengenai Perseroan Terbatas mengharuskan untuk membuat penyisihan cadangan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. UU tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk penyisihan cadangan tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut maka dengan memperhatikan Keputusan RUPS tanggal 29 April 2008 dan Keputusan Rapat Direksi No. 51 tahun 2008 tanggal 9 Desember 2008, Perusahaan memutuskan membentuk Dana Cadangan Wajib sebesar Rp25.000.000.

Berdasarkan Keputusan RUPS, penggunaan laba untuk tahun buku 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015	2014
Dividen	491.199.561	534.526.920
Cadangan umum	887.228.495	776.790.041
Cadangan wajib	25.000.000	25.000.000
Total	1.403.428.056	1.336.316.961

35. DIVIDENDS AND APPROPRIATE OF RETAINED EARNINGS

Based on the Law No. 40 Year 2007 dated August 16, 2007 regarding Limited Liability Company requires a company to provide reserves up to at least 20% of the issued and paid up capital. The Law does not require a time frame for the provision of such reserves. Based on decision in the General Meeting of Shareholders dated April 29, 2008 and decision of Directors Meeting No. 51 Year 2008 dated December 9, 2008, the Company decided to provide statutory reserves amounting to Rp 25,000,000.

Based on the General Meeting of Shareholders, the following are distribution for profit of the year 2015 and 2014 are as follows:

*Dividend
Appropriation for general reserve
Appropriated reserve*

Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

36. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

Akun ini merupakan hak pemegang saham non pengendali atas aset bersih dan bagian rugi bersih entitas anak yang dikonsolidasikan.

- a. Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
PT Trans Marga Jateng	370.048.686	341.873.901
PT Marga Nujyasumo Agung	348.349.728	375.634.566
PT Jasamarga Bali Tol	335.456.568	337.602.725
PT Solo Ngawi Jaya	252.604.109	-
PT Marga Lingkar Jakarta	136.943.133	167.577.287
PT Marga Sarana Jabar	121.295.549	124.984.834
PT Cinere Serpong Jaya	107.770.388	-
PT Marga Trans Nusantara	75.540.874	55.540.417
PT Ngawi Kertosono Jaya	63.711.388	-
PT Jasamarga Kualanamu Tol	51.917.763	36.477.808
PT Marga Kunciran Cengkareng	46.869.480	40.695.338
PT Jasamarga Pandaan Tol	31.794.062	70.892.436
PT Transmarga Jatim Pasuruan	6.895.897	7.641.299
PT Jasamarga Properti	1.053.798	1.112.413
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	233.478	479.710
PT Jasa Layanan Operasi	26.324	-
PT Jasa Layanan Pemeliharaan	(352.044)	70.826
Total	1.950.159.181	1.560.583.560

- b. Laba rugi bersih dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014
PT Solo Ngawi Jaya	356.187	-
PT Jasamarga Kualanamu Tol	270.690	124.105
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	18.601	281.551
PT Jasamarga Properti	6.686	(22.602)
PT Jasa Layanan Operasi	2.581	-
PT Transmarga Jatim Pasuruan	(4.611)	47.180
PT Jasa Layanan Pemeliharaan	(174.944)	(448.064)
PT Ngawi Kertosono Jaya	(363.316)	-
PT Marga Trans Nusantara	(429.595)	(202.943)
PT Marga Kunciran Cengkareng	(546.515)	(390.176)
PT Cinere Serpong Jaya	(932.265)	-
PT Jasamarga Pandaan Tol	(5.584.962)	(97.293)
PT Marga Sarana Jabar	(10.437.177)	(11.893.830)
PT Marga Nujyasumo Agung	(18.775.708)	(20.288.219)
PT Marga Lingkar Jakarta	(22.127.634)	(42.111.186)
PT Jasamarga Bali Tol	(41.407.038)	(50.665.205)
PT Trans Marga Jateng	(47.052.020)	(59.048.318)
Neto	(147.181.040)	(184.715.000)

36. NON-CONTROLLING INTEREST

This account represent non-controlling interests in net assets and portion of net loss of the consolidated subsidiaries.

- a. Net equity attributable to non-controlling interests:

PT Trans Marga Jateng
PT Marga Nujyasumo Agung
PT Jasamarga Bali Tol
PT Solo Ngawi Jaya
PT Marga Lingkar Jakarta
PT Marga Sarana Jabar
PT Cinere Serpong Jaya
PT Marga Trans Nusantara
PT Ngawi Kertosono Jaya
PT Jasamarga Kualanamu Tol
PT Marga Kunciran Cengkareng
PT Jasamarga Pandaan Tol
PT Transmarga Jatim Pasuruan
PT Jasamarga Properti
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta
PT Jasa Layanan Operasi
PT Jasa Layanan Pemeliharaan

- b. Net profit or loss and other comprehensive income for the year attributable to non-controlling interests:

PT Solo Ngawi Jaya
PT Jasamarga Kualanamu Tol
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta
PT Jasamarga Properti
PT Jasa Layanan Operasi
PT Transmarga Jatim Pasuruan
PT Jasa Layanan Pemeliharaan
PT Ngawi Kertosono Jaya
PT Marga Trans Nusantara
PT Marga Kunciran Cengkareng
PT Cinere Serpong Jaya
PT Jasamarga Pandaan Tol
PT Marga Sarana Jabar
PT Marga Nujyasumo Agung
PT Marga Lingkar Jakarta
PT Jasamarga Bali Tol
PT Trans Marga Jateng

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

37. PENDAPATAN TOL DAN USAHA LAINNYA

Rincian pendapatan tol dan usaha lainnya adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014
Perusahaan:		
Jakarta - Cikampek	1.137.849.976	1.023.430.461
Cikampek - Padalarang	867.261.082	835.992.083
JORR Seksi Non S	836.850.642	848.929.473
Cawang - Tomang - Pluit	791.412.780	754.275.560
Jakarta - Bogor - Ciawi	620.188.543	607.461.070
Jakarta - Tangerang	507.524.728	467.116.715
Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	455.583.922	458.046.022
Surabaya - Gempol	335.771.274	309.024.660
Padalarang - Cileunyi	330.259.396	339.934.058
JORR S	213.586.791	210.821.056
Palimanan - Kanci	132.986.335	112.435.751
Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	113.271.614	122.698.516
Semarang Seksi A,B,C	113.188.337	106.496.438
Belawan - Medan - Tanjung Morawa	90.168.513	91.347.977
	6.545.903.933	6.288.009.840
Entitas Anak:		
Ulujami - Kebon Jeruk	188.033.908	59.035.018
Semarang - Solo	129.479.169	107.250.609
Nusa Dua - Benoa	122.710.789	106.140.831
Bogor Outer Ring Road	86.912.540	67.171.369
Gempol - Pandaan	27.842.220	-
Surabaya - Mojokerto	20.142.143	18.784.879
	575.120.769	358.382.706
Sub total pendapatan tol	7.121.024.702	6.646.392.546
Pendapatan usaha lainnya		
Pendapatan BBM SPBU	204.561.536	178.707.288
Sewa lahan	123.538.172	104.360.355
Jasa pengoperasian jalan tol pihak lain	13.661.864	100.599.915
Pendapatan iklan	6.061.001	6.313.541
Lain-lain	161.830.844	191.412.367
	509.653.417	581.393.466
Total	7.630.678.119	7.227.786.012

Berdasarkan Kepmen PU No. 522/KPTS/M/2014 tanggal 11 September 2014 untuk ruas Prof. Dr. Ir. Sedyatmo dan berlaku sejak tanggal 19 September 2014, tarif terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

37. TOLL AND OTHER OPERATING REVENUES

The details of toll and other operating revenues are as follows:

<i>The Company:</i>
<i>Jakarta - Cikampek</i>
<i>Cikampek - Padalarang</i>
<i>JORR Seksi Non S</i>
<i>Cawang - Tomang - Pluit</i>
<i>Jakarta - Bogor - Ciawi</i>
<i>Jakarta - Tangerang</i>
<i>Prof. Dr. Ir. Sedyatmo</i>
<i>Surabaya - Gempol</i>
<i>Padalarang - Cileunyi</i>
<i>JORR S</i>
<i>Palimanan - Kanci</i>
<i>Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami</i>
<i>Semarang Seksi A,B,C</i>
<i>Belawan - Medan - Tanjung Morawa</i>
<i>Subsidiaries:</i>
<i>Ulujami-Kebon Jeruk</i>
<i>Semarang - Solo</i>
<i>Nusa Dua - Benoa</i>
<i>Bogor Outer Ring Road</i>
<i>Gempol - Pandaan</i>
<i>Surabaya - Mojokerto</i>
<i>Sub total toll revenue</i>
<i>Other operating revenues</i>
<i>Petroleum revenues</i>
<i>Land rent</i>
<i>Toll road operating service</i>
<i>Advertisement</i>
<i>Others</i>
Total

Based on the Decree of Minister of Public Works No. 522/KPTS/M/2014, dated September 11, 2014, effective on September 19, 2014, the toll tariff for Prof. Dr. Ir. Sedyatmo section toll road is as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. PENDAPATAN TOL DAN USAHA LAINNYA
(lanjutan)**

No	Ruas/ Section	Golongan/ Group				
		I	II	III	IV	V
1	Prof DR IR Sedyatmo	6.000	7.500	9.500	11.500	14.000

Berdasarkan Kepmen PU No. 490/KPTS/M/2013 tanggal 28 November 2013 untuk ruas Tol Dalam Kota Jakarta dan berlaku sejak tanggal 6 November 2014, tarif terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of Minister of Public Works No. 490/KPTS/M/2013 dated November 28, 2013, effective on November 06, 2014, the toll tariff for Tol Dalam Kota section toll road is as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/ Group				
		I	II	III	IV	V
1	Jalan tol dalam kota	8.000	10.000	13.000	16.000	19.000

Berdasarkan Kepmen PU No. 507/KPTS/M/2015 tanggal 28 Oktober 2015 untuk ruas Tol Dalam Kota Jakarta dan berlaku sejak tanggal 1 November 2015, tarif terjauh untuk ruas tersebut dirubah menjadi sebagai berikut:

Based on the Decree of Minister of Public Works No. 507/KPTS/M/2015 dated October 28, 2015, and effective on November 1, 2015, the toll tariff for Tol Dalam Kota section toll road has changed as as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/ Group				
		I	II	III	IV	V
1	Jalan tol dalam kota	9.000	11.000	14.500	18.000	21.500

Tarif tol berdasarkan KEPMEN PU RI No. 539/KPTS/M/2014 tanggal 8 Oktober 2014 untuk ruas Jakarta - Cikampek dan berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2014, berikut tarif terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of Minister of Public Works No. 539/KPTS/M/2014 dated October 8, 2014, effective on October 19, 2014, the toll tariff for Jakarta - Cikampek section toll road is as follows:

No	Ruas/ Section	Golongan/ Group				
		I	II	III	IV	V
1	Sistem transaksi terbuka/ Open system transaction	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000
2	Sistem transaksi tertutup/ Close system transaction	9.500	15.500	19.000	24.000	29.000
3	Ramp/ Ramp	1.500	1.500	1.500	2.000	2.500

Berdasarkan Kepmen PU No. 507/KPTS/M/2015 tanggal 28 Oktober 2015 untuk ruas Tol Dalam Kota Jakarta dan berlaku sejak tanggal 1 November 2015 untuk ruas-ruas Jakarta - Tangerang, Serpong - Pondok Aren, Ulujami - Pondok Aren, Padaleunyi, Cipularang, Surabaya - Gempol, Belmera, Palikanci, Semarang (Seksi A.B. dan C), JORR (W.S.E) dan Jagorawi, tarif terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of Minister of Public Works No. 507/KPTS/M/2015 dated October 28, 2015, effective on November 1, 2015, the long distance of toll tariff for toll road sections: Jakarta - Tangerang, Serpong - Pondok Aren, Ulujami - Pondok Aren, Padaleunyi, Cipularang, Surabaya - Gempol, Belmera, Palikanci, Semarang (Section A.B. and C). JORR (W.S.E) and Jagorawi is as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. PENDAPATAN TOL DAN USAHA LAINNYA
(lanjutan)**

**37. TOLL AND OTHER OPERATING REVENUES
(continued)**

No.	Ruas/ Section	Golongan/ Group				
		I	II	III	IV	V
1	Jakarta-Bogor-Ciawi					
	- Ramp Taman Mini / Dukuh	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
	- Jakarta IC-Cimanggis (Sitem transaksi terbuka)	3.500	4.000	5.000	6.000	7.500
	- Cimanggis Ciawi (Sistem transaksi tertutup)	5.000	6.000	9.500	11.500	13.500
2	Lingkar Luar Jakarta (JORR)	9.500	11.500	13.500	17.000	20.500
3	Serpong - Pondok Aren	6.000	11.000	13.000	16.500	19.500
4	Pondok Aren - Ulujami	3.000	5.500	6.500	8.500	10.000
4	Jakarta – Tangerang					
	- Ramp Meruya/Meruya Utara/Kebon Jeruk	2.500	2.500	2.500	3.000	3.500
	- Tomang IC-Tangerang Barat	5.500	6.500	9.000	11.000	13.000
5	Cipularang	37.500	56.000	75.000	93.500	112.000
6	Padaleunyi	9.000	14.500	16.500	21.000	25.000
7	Palikanci	5.500	6.500	10.000	12.500	15.000
8	Semarang (Jatingaleh - Krapyak)	2.500	2.500	3.500	4.500	5.000
	Semarang (Jatingaleh - Sronдол)	2.500	2.500	3.500	4.500	5.000
	Semarang (Jatingaleh - Kaligawe)	2.500	3.500	4.500	5.500	7.000
	Semarang (Jatingaleh - Gayamsari)	2.500	3.500	4.500	5.500	7.000
	Semarang (Gayamsari - Kaligawe)	2.500	3.500	4.500	5.500	7.000
9	Surabaya – Gempol					
	Sistem Transaksi Terbuka/ <i>Open System Transaction</i> (Dupak - Waru)	3.500	4.500	5.500	7.000	8.000
	Sistem Transaksi Tertutup/ <i>Close System Transaction</i>	4.500	5.500	9.000	11.000	13.000
10	Belmera	7.000	12.000	13.000	16.500	19.500

38. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

38. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSE

Pendapatan konstruksi adalah kompensasi untuk jasa yang dilakukan Kelompok Usaha dalam pembangunan jalan tol baru dan peningkatan kapasitas jalan tol. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode *cost-plus*, dimana seluruh biaya yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tambahan dengan marjin tertentu.

Construction revenue is the compensation for the service performed by the Group for building new toll roads and upgrading toll roads capacity. Construction revenue is measured using cost-plus method, which specified the margin and added up to all cost directly attributable to the acquiring cost of the assets.

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2015	2014	
Pendapatan konstruksi	2.217.563.931	1.946.031.295	Construction revenues
Beban konstruksi	(2.202.400.639)	(1.921.067.434)	Construction expenses
Margin konstruksi - neto	15.163.292	24.963.861	Construction margin - net

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

39. BEBAN TOL DAN USAHA LAINNYA

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014
Gaji dan tunjangan	1.033.369.685	934.375.417
Penyusutan dan amortisasi	677.119.204	794.046.895
Provisi pelapisan ulang, pembersihan jalan dan pertamanan	361.644.648	417.660.225
HPP Jasa layanan pemeliharaan BBM SPBU dan properti	354.282.610	385.718.659
Beban kerja sama operasi	294.224.080	313.039.817
Beban pajak	290.575.012	279.907.911
Perbaikan dan pemeliharaan aset	152.032.207	146.626.203
Bahan bakar, listrik dan air	99.669.571	96.494.846
Sewa kendaraan dan peralatan tol	56.599.848	46.406.233
Administrasi dan perlengkapan tol	43.153.523	40.147.917
Pelayanan pemakai jalan tol	42.530.324	37.146.089
Jasa penjemputan hasil tol	36.969.714	36.395.737
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp3 miliar)	75.851.024	34.792.022
Total	3.518.021.450	3.562.757.971

Beban Kerjasama Operasi merupakan selisih antara jumlah pendapatan tol untuk investor dengan pembayaran liabilitas kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan, termasuk bagian bunga atas liabilitas kerjasama operasi dalam bentuk bagi pendapatan tol dengan jumlah minimum dan angsuran pasti. Beban ini merupakan beban kerjasama operasi dengan PT Bangun Tjipta Sarana dan PT Surya Cipta Swadaya.

40. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014
Gaji dan tunjangan	524.702.786	540.135.225
Penyusutan dan amortisasi	61.076.657	49.160.510
Perbaikan dan pemeliharaan aset tetap	58.265.713	39.873.725
Administrasi kantor dan sumbangan	55.262.752	79.805.273
Pajak, iuran dan retribusi	52.364.416	32.212.751
Jasa profesional	27.105.288	21.785.431
Bahan bakar, listrik dan air	24.100.509	25.261.023
Sewa	23.954.453	35.474.113
Transportasi dan perjalanan dinas	18.705.240	23.013.763
Publikasi	11.744.195	16.934.103
Provisi dan administrasi fasilitas pembiayaan	3.671.611	3.121.376
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp3 miliar)	32.305.228	18.065.503
Total	893.258.848	884.842.796

39. TOLL AND OTHER OPERATING EXPENSES

*Salaries and allowances
Depreciation and amortization
Provision for overlay, road and park
cleaning
Cost of sales maintenance services,
fuel sold and property
Joint operation expenses
Tax expense
Asset repairs and maintenance
Fuel, electricity and water
Car rental and equipment tol
Administration and toll supplies
Toll road user services
Delivery services toll revenue
Others (each below Rp3 billion)*

Total

Joint operations expenses represent the difference between the amount of toll revenues for investors' share over the liabilities under joint operation agreements without concession rights, including the share of interest charges on joint operation payable in the form of revenue sharing with minimum payments and fixed installments. These expenses are related with PT Bangun Tjipta Sarana and PT Surya Cipta Swadaya.

40. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of general and administrative expenses are as follows:

*Salaries and allowances
Depreciation and amortization
Fixed asset repairs and maintenance
Office administration and donation
Taxes, contribution and retribution
Professional fees
Fuel, electricity and water
Rental
Transportation and business travel
Publications
Provision and administration finance
facility
Others (each below Rp3 billion)*

Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

41. PENGHASILAN LAIN-LAIN

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014
Penghasilan bunga deposito	163.066.766	258.560.991
Penghasilan jasa giro	11.174.481	6.937.089
Keuntungan penjualan aset tetap	1.346.027	342.264
Lainnya	97.321.538	22.017.264
Total	272.908.812	287.857.608

41. OTHER INCOME

<i>Interest income on deposit</i>
<i>Current accounts income</i>
<i>Gains on disposal of fixed assets</i>
<i>Others</i>
Total

42. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan beban administrasi bank, provisi pinjaman, penghapusan piutang dan lainnya.

42. OTHER EXPENSES

Other expenses represent bank administration expenses, loan provision, receivable written off and other.

43. BIAYA KEUANGAN-NETO

Rincian biaya keuangan adalah sebagai berikut:

43. FINANCE COSTS-NET

The detail of finance costs are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2015	2014
Utang bank	724.064.776	590.686.471
Utang obligasi	646.771.152	624.633.784
Utang lembaga keuangan bukan bank	34.207.014	-
Total	1.405.042.942	1.215.320.255

<i>Bank loans</i>
<i>Bonds</i>
<i>Non-Bank financial institutions loan</i>
Total

44. LABA PER SAHAM

Pada tanggal 1 November 2007, Perusahaan memperoleh pernyataan dari BAPEPAM-LK melalui Surat No. S-5526/BL/2007 untuk efektifitas melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 2.040.000.000 lembar saham atas nama seri B dengan nilai nominal Rp 500 (rupiah penuh) setiap lembar saham (lihat Catatan 1.b dan 33). Perusahaan telah melakukan pembelian kembali sebagian atas saham yang beredar (*Treasury Shares*) pada tahun 2008 sebanyak 8.758.000 lembar saham dan sampai dengan tahun 2009, Perusahaan telah menarik kembali saham yang beredar sebanyak 24.523.500 lembar saham. Hal ini mengakibatkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar berubah menjadi sebanyak 6.775.840.609 lembar. Pada tahun 2012 Perusahaan menjual kembali seluruh saham treasury tersebut, sehingga pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar menjadi 6.800.000.000 lembar saham.

44. EARNINGS PER SHARE

On November 1, 2007, the Company obtained a statement from Bapepam-LK through Letter No. S-5526/BL/2007 for the effectivity of initial public offering as much as 2,040,000,000 shares of series B shares with a par value of Rp 500 (full amount) per share (see Note 1.b and 33). The Company has repurchased portion of its outstanding shares (*Treasury Stocks*) in the 2008 as many as 8,758,000 shares and in 2009 the Company has purchased as many as 24,523,500 shares outstanding. These resulted in weighted average number of shares to be as much as 6,775,840,609 outstanding shares. In 2012, the Company has sold all of the treasury shares. Thereafter, as of December 31, 2015, the weighted average number of shares become as much as 6,800,000,000 shares.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

44. LABA PER SAHAM (lanjutan)

Laba bersih per saham dihitung dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun yang berakhir pada tanggal	Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ <i>Income for the year attributable to owners of the parent entity</i>	Jumlah rata - rata tertimbang saham selama tahun berjalan/ <i>Weighted average number of outstanding shares during the year</i>	Laba per saham / <i>Earnings per share</i>	Years ended
31 Desember 2015	1.466.381.586	6.800.000.000	215,64	December 31, 2015
31 Desember 2014	1.421.729.172	6.800.000.000	209,08	December 31, 2014

44. EARNINGS PER SHARE (continued)

Earnings per share is calculated from profit of the current year attributable to owners of the parent divided by the weighted average of outstanding shares, with details as follows:

45. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi tersebut sama dengan apabila Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Berikut adalah transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang material:

Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	Hubungan/ <i>Nature of Relationship</i>	Jenis Transaksi/ <i>Nature of Transactions</i>
Pemerintah Republik Indonesia Kementerian Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Hak Konsesi atas Jalan Tol, Utang Bantuan Pemerintah. Dana Talangan Pembebasan Tanah dan Perpajakan/ <i>Grantor of Toll Road Concession Rights, Loan from Government Bail Out of Land Acquisition and Taxation</i>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Tol/ <i>Contractor for Construction and Maintenance of Fixed Assets and Toll Roads</i>
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Beban Penghargaan Masa Kerja kepada Karyawan/ <i>Expenses of Achievement Rewards to Employees</i>
PT Askes (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Beban Asuransi Kesehatan Karyawan/ <i>Health Insurance Expenses for Employees</i>
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Beban Asuransi Jiwa Pensiunan Karyawan/ <i>Life Insurance Expenses for Pension Employees</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Investasi Jangka Pendek, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Modal Kerja, Fasilitas Kredit Sindikasi, Biaya Keuangan dan Pendapatan Bunga/ <i>Placement of Current Accounts, Time Deposits, Short Term Investments, Appropriated Funds, Working Capital Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Finance Charges and Interest Income</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Fasilitas Kredit Investasi, Fasilitas Kredit Sindikasi, Bank untuk Pengumpulan Tol, Biaya Keuangan dan Pendapatan Bunga/ <i>Placement of Current Accounts, Time Deposits, Investment Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Bank for Toll Collection, Finance Charges and Interest Income</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Fasilitas Kredit Investasi, Fasilitas Kredit Sindikasi, Bank untuk Pengumpulan Tol, Biaya Keuangan dan Pendapatan Bunga/ <i>Placement of Current Accounts, Time Deposits, Investment Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Bank for Toll Collection, Finance Charges and Interest Income</i>

45. BALANCES AND NATURE OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS

The Group normally enters into transactions with related parties. The Company's policy requires that the pricing of these transactions should be the same as if the Company entered into transactions with the third parties. Below are the material transactions with related parties:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

45. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

45. BALANCES AND NATURE OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)

Pihak Berelasi/ Related Parties	Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transactions
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Fasilitas Kredit Investasi, Fasilitas Kredit Sindikasi, Biaya Keuangan dan Pendapatan Bunga/ Placement of Current Accounts, Time Deposits, Investment Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Finance Charges and Interest Income
PT Hutama Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Tol/ Contractor for Construction and Maintenance of Fixed Assets and Toll Roads
PT Istaka Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Tol/ Contractor for Construction and Maintenance of Fixed Assets and Toll Roads
PT Jamsostek (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Beban Asuransi Kecelakaan Kerja Karyawan, Pemegang Saham Non Pengendali/ Insurance Expenses for Employees and Non Controlling Shareholder
PT Nindya Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Tol/ Contractor for Construction and Maintenance of Fixed Assets and Toll Roads
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Tol/ Contractor for Construction and Maintenance of Fixed Assets and Toll Roads
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Kerjasama Bagi Hasil SPBU, Beban Bahan Bakar Minyak Sebagai Pemasok Persediaan Bahan Bakar Tempat Istirahat/ Revenue from Profit Sharing of SPBU, Engine Fuel Expenses as Supplier of Rest Area's Fuel Inventory
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Beban Listrik Peralatan Tol dan Gedung/ Electricity for Toll Equipment and Buildings
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Tol/ Contractor for Construction and Maintenance of Fixed Assets and Toll Roads
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Tol/ Contractor for Construction and Maintenance of Fixed Assets and Toll Roads
Wika - Adhi - Hutama JO	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Aset Tetap dan Jalan Tol/ Contractor for Construction and Maintenance of Property and Equipment and Toll Roads
Koperasi Jasa Marga Bhakti	Pengendalian Manajemen Kunci/ Key Management Control	Pembelian Aset dan Perlengkapan, Beban Outsourcing Pegawai, Sewa Kendaraan dan Peralatan Tol/ Purchase of Property and Equipment, Outsourcing Expenses, Vehicles and Toll Equipment Lease
Yayasan Dana Pensiun Jasa Marga	Pengendalian Manajemen Kunci/ Key Management Control	Penempatan Dana Imbalan Kerja Karyawan/ Placement of Employee Benefit Funds
PT Ismawa Trimitra	Entitas Asosiasi/ Associated Company	Pengusahaan jasa sewa ruangan perkantoran dan tempat istirahat di ruas Tol/ Providing services in office space and rest area in toll road
PT Trans Lingkar Kita Jaya	Entitas Asosiasi/ Associated Company	Penyelenggaraan ruas jalan tol Cinere - Jagorawi/ Operator of the Cinere - Jagorawi toll road

a. Pemerintah

Kelompok Usaha memiliki Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT) mengenai penggunaan fasilitas pinjaman dana untuk pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol baru. Ketika PPJT dialihkan dari Entitas Induk ke Entitas Anak, utang BLU secara otomatis menjadi milik Entitas Anak, dengan rincian sebagai berikut:

a. Government

The Group has a Toll Road Concession Agreements (PPJT) with the General Services Agency-Toll Road Regulatory Agency (BLU-BPJT), Regarding to using of funds loan facilities for land acquisition designated for the development of new toll roads. When PPJT is transferred from the Parent Company to its subsidiaries, these BLU payables automatically belonged to the subsidiaries, with detail as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

45. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

a. Pemerintah (lanjutan)

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
PT Marga Kunciran Cengkareng	764.593.304	764.848.936
PT Marga Trans Nusantara	645.432.549	645.432.549
PT Marga Lingkar Jakarta	218.272.715	443.482.173
PT Marga Nujyasumo Agung	305.814.893	334.871.795
PT Trans Marga Jateng	343.840.183	317.993.278
PT Transmarga Jatim Pasuruan	165.705.060	165.705.060
Perusahaan	109.008.350	109.008.350
PT Jasamarga Pandaan Tol	89.925.714	88.600.211
Total	2.642.592.768	2.869.942.352

Kelompok Usaha melakukan transaksi atas pekerjaan pelapisan ulang aset takberwujud jalan tol untuk memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pekerjaan pelapisan ulang diserahkan kepada kontraktor BUMN maupun kontraktor swasta. Total pekerjaan pelapisan ulang dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing - masing adalah sebesar Rp35.164.265 dan Rp32.412.194.

Dalam kegiatan usahanya, Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat-syarat dan kondisi normal. Transaksi ini termasuk pembayaran oleh Kelompok Usaha atas beban-beban pihak-pihak berelasi atau sebaliknya. Saldo transaksi dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2015/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ December 31, 2014	Persentase dari Total Aset /Liabilitas/ Percentage from Total Assets/Liabilities		
			31 Desember 2015/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ December 31, 2014	
Aset					Assets
Kas dan Setara Kas					Cash and Cash Equivalents
Bank					Cash in Banks
Rupiah					Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	193.450.796	115.453.821	0,53%	0,36%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	158.159.752	96.051.771	0,43%	0,30%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	48.856.431	18.304.829	0,13%	0,06%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	6.395.960	3.629.160	0,02%	0,01%	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Sub Total	406.862.939	233.439.581	1,11%	0,73%	Sub Total

45. BALANCES AND NATURE OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)

a. Government (continued)

PT Marga Kunciran Cengkareng	
PT Marga Trans Nusantara	
PT Marga Lingkar Jakarta	
PT Marga Nujyasumo Agung	
PT Trans Marga Jateng	
PT Transmarga Jatim Pasuruan	
The Company	
PT Jasamarga Pandaan Tol	
Total	2.869.942.352

The Group entered into toll roads overlay transactions for its intangible assets in fulfilling the minimum level of services (Standar Pelayanan Minimum – SPM) decided by the Indonesian Toll Road Authority (Badan Pengatur Jalan Tol – BPJT). The work of overlay are submitted to both the BUMN and private contractors. The total work of overlay transaction with PT Adhi Karya (Persero) Tbk as of December 31, 2015 and 2014 amounting to Rp35,164,265 and Rp32,412,194 respectively.

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with the related parties conducted by normal terms and conditions. These transactions include payments made by the Group to the related parties or vice versa. Balance of related parties accounts as of December 31, 2015 and 2014 are as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG
BERELASI (lanjutan)**

a. Pemerintah (lanjutan)

	31 Desember 2015/ December 31, 2015		31 Desember 2014/ December 31, 2014		31 Desember 2015/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ December 31, 2014
Bank - Dolar Amerika Serikat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	797.154	1.116.701	0,00%	0,00%		
Deposito Berjangka Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	399.010.000	913.600.000	1,09%	2,87%		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	462.250.000	100.600.000	1,26%	0,27%		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	467.000.000	246.250.000	1,27%	0,67%		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	350.000.000	661.886.000	0,95%	1,80%		
Sub Total	1.678.260.000	1.922.336.000	4,57%	5,61%		
Dolar Amerika Serikat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.174.500	13.684.000	0,04%	0,04%		
Sub total deposito berjangka	15.174.500	13.684.000	0,04%	0,04%		
Total kas dan setara Kas	2.101.094.593	2.170.576.282	5,72%	6,28%		
Investasi Jangka Pendek Deposito Berjangka - Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.529.650	4.529.650	0,01%	0,01%		
Total Investasi Jangka Pendek	4.529.650	4.529.650	0,01%	0,00%		
Piutang Lain-lain Lancar PT Waskita Toll Road	15.488.501	-	0,04%	-		
Kementerian Pekerjaan Umum	10.693.698	11.579.644	0,03%	0,04%		
PT Jakarta Propertindo	3.289.669	-	0,01%	-		
Lainnya	26.053.075	10.768.749	0,04%	0,03%		
Sub Total	55.524.943	22.348.393	0,32%	0,07%		
Tidak lancar Badan Pengatur Jalan Tol	132.813.579	99.281.519	0,36%	0,31%		
Total	188.338.522	121.629.912	0,51%	0,38%		
Dana yang ditetapkan penggunaannya Jaminan Pelaksanaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	162.122.226	16.350.000	0,44%	0,04%		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	114	-	0,00%	-		
Sub Total	162.122.340	16.350.000	0,44%	0,04%		
Jaminan Pembebasan tanah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	256.517	7.530.940	0,00%	0,02%		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	14.100.000	0,00%	0,04%		
Sub Total	256.517	21.630.940	0,00%	0,06%		

**45. BALANCES AND NATURE OF RELATED
PARTIES TRANSACTIONS (continued)**

a. Government (continued)

	31 Desember 2015/ December 31, 2015		31 Desember 2014/ December 31, 2014		31 Desember 2015/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ December 31, 2014
Bank United States Dollar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk						
Time Deposits Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk						
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk						
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk						
Sub Total						
United States Dollar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk						
Time deposits						
Cash and cash equivalents						
Short - Term Investments Time Deposits - Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk						
Short - Term Investments						
Other Receivables Current PT Waskita Toll Road						
Kementerian Pekerjaan Umum						
PT Jakarta Propertindo						
Others						
Sub Total						
Non-current Badan Pengatur Jalan Tol						
Total						
Restricted Funds Performance Bond PT Bank Mandiri (Persero) Tbk						
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk						
Sub Total						
Land Acquisition Guarantees PT Bank Mandiri (Persero) Tbk						
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk						
Sub Total						

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG
BERELASI (lanjutan)**

**45. BALANCES AND NATURE OF RELATED
PARTIES TRANSACTIONS (continued)**

a. Pemerintah (lanjutan)

a. Government (continued)

	31 Desember 2015/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ December 31, 2014	Persentase dari Total Aset /Liabilitas/Percentage from Total Asset/Liabilities		
			31 Desember 2015/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ December 31, 2014	
Jaminan Sindikasi Bank					Syndicated Bank Guarantee
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	158.973.982	92.699.009	0,43%	0,29%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	27.266.532	19.340.834	0,07%	0,06%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16.259.286	18.627.875	0,04%	0,06%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Sub Total	202.499.800	130.667.718	0,55%	0,41%	Sub Total
Total Dana Ditetapkan Penggunaannya	364.878.658	168.648.658	0,99%	0,53%	Restricted Funds
Liabilitas					Liabilities
Utang Bank					Bank Loans
Utang Jangka Pendek					Short Term Loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	543.305.246	11.247.894	2,23%	0,05%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	77.664.896	24.737.997	0,32%	0,12%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	77.716.697	5.253.451	0,32%	0,03%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	740.478	359.937	0,00%	0,00%	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Sub Total	699.427.316	41.599.279	2,87%	0,20%	Sub Total
Utang Jangka Panjang					Long Term Loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.749.386.397	2.547.473.133	11,29%	12,22%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.830.583.394	1.626.727.819	7,51%	7,81%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.460.099.082	1.283.973.781	5,99%	6,16%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	73.536.612	71.627.438	0,30%	0,34%	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Sub Total	6.113.605.486	5.529.802.171	25,10%	26,54%	Sub Total
Total Utang Bank	6.813.032.802	5.571.401.450	27,97%	26,74%	Bank Loans
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.916.441	1.949.473	0,02%	0,01%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Koperasi Jasa Marga Bhakti	2.003.346	3.153.882	0,01%	0,02%	Koperasi Jasa Marga Bhakti
Dana Pensiun Jasa Marga	2.261.626	258.334	0,01%	0,00%	Dana Pensiun Jasa Marga
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	83.085	846	0,00%	0,00%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pertamina Retail	12.622	-	0,00%	-	Pertamina Retail
Karyawan/ Employees	-	26.466	-	0,00%	Karyawan/ Employees
Lainnya	56.717.975	-	0,23%	-	Others
Total Utang Usaha	65.995.095	5.389.001	0,27%	0,03%	Total Trade Payables
Utang Kontraktor					Contractors Payable
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	883.483.396	258.552.200	3,63%	1,24%	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	208.792.806	201.309.998	0,86%	0,97%	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	144.709.299	192.219.139	0,59%	0,92%	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	134.793.135	32.214.073	0,55%	0,15%	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Nindya Karya (Persero)	22.861.043	-	0,09%	0,00%	PT Nindya Karya (Persero)
Wika - Adhi - Hutama JO	18.282.640	57.336.834	0,08%	0,28%	Wika - Adhi - Hutama JO
PT Hutama Karya (Persero)	6.324.867	4.535.077	0,03%	0,02%	PT Hutama Karya (Persero)
PT Yodya Karya (Persero)	4.177.617	2.939.804	0,02%	0,01%	PT Yodya Karya (Persero)
PT Virama Karya	3.319.143	-	0,01%	-	PT Virama Karya
Lainnya (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	658.695	13.240.342	0,00%	0,06%	Other (each below Rp2 billion)
Total Utang Kontraktor	1.427.402.641	762.347.467	5,86%	3,66%	Total Contractors Payable

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

45. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

b. Remunerasi Komisaris dan Direksi

- (i). Jumlah remunerasi yang diterima Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp11.901.596 dan Rp9.518.926.
- (ii) Jumlah remunerasi yang diterima Dewan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp23.667.097 dan Rp21.105.824.

46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)

- (i) Perusahaan telah memperoleh penetapan hak pengusahaan jalan tol (Hak Konsesi) yang diterbitkan oleh Pemerintah meliputi 13 (tiga belas) ruas jalan tol berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 242/KPTS/M/2006, tanggal 8 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada tanggal 7 Juli 2006 untuk masing-masing ruas jalan tol, dengan masa konsesi selama 40 (empat puluh) tahun, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2045, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ruas Jakarta - Bogor - Ciawi, berdasarkan PPJT No. 246/PPJT/VII/Mn/2006;
2. Ruas Jakarta - Tangerang, berdasarkan PPJT No. 247/PPJT/VII/Mn/2006;
3. Ruas Surabaya - Gempol, berdasarkan PPJT No. 248/PPJT/VII/Mn/2006;
4. Ruas Jakarta - Cikampek, berdasarkan PPJT No. 249/PPJT/VII/Mn/2006;
5. Ruas Padalarang - Cileunyi, berdasarkan PPJT No. 250/PPJT/VII/Mn/2006;
6. Ruas Prof. Dr. Ir. Sedyatmo, berdasarkan PPJT No. 251/PPJT/VII/Mn/2006;

45. BALANCES AND NATURE OF RELATED PARTIES TRANSACTIONS (continued)

b. Remuneration of Commissioners and Directors

- (i) Total remuneration received by the Board of Commissioners for the years ended on December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp11,901,596 and Rp9,518,926 respectively.
- (ii) Total remuneration received by the Board of Directors for the years ended on December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp23,667,097 and Rp21,105,824, respectively.

46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. Concession Agreements

- (i) The Company has acquired the right of toll road concession (Concession Right) issued by the Government, which consists of 13 (thirteen) toll roads, in accordance with the Minister of Public Works Decree No. 242/KPTS/M/2006, dated June 8, 2006, followed by the signing of the Toll Road Concession Agreement (PPJT) for each toll road dated July 7, 2006 with concession period of 40 (forty) years, and effective on January 1, 2005 until December 31, 2045 with details as follows:

1. Jakarta - Bogor - Ciawi Toll Road, according to PPJT No. 246/PPJT/VII/Mn/2006;
2. Jakarta - Tangerang Toll Road, according to PPJT No. 247/PPJT/VII/Mn/2006;
3. Surabaya - Gempol Toll Road, according to PPJT No. 248/PPJT/VII/Mn/2006;
4. Jakarta - Cikampek Toll Road, according to PPJT No. 249/PPJT/VII/Mn/2006;
5. Padalarang - Cileunyi Toll Road, according to PPJT No. 250/PPJT/VII/Mn/2006;
6. Prof. Dr. Ir. Sedyatmo Toll Road, according to PPJT No. 251/PPJT/VII/Mn/2006;

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

7. Ruas Cawang - Tomang - Pluit, berdasarkan PPJT No. 252/PPJT/VII/Mn/2006;
8. Ruas Belawan - Medan - Tanjung Morawa, PPJT No. 253/PPJT/VII/Mn/2006;
9. Ruas Semarang Seksi A. B. C, berdasarkan PPJT No. 254/PPJT/VII/Mn/2006;
10. Ruas Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami, berdasarkan PPJT No. 255/PPJT/VII/Mn/2006;
11. Ruas Palimanan - Kanci, berdasarkan PPJT No. 256/PPJT/VII/Mn/2006;
12. Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Ruas E1. E2. E3. W2, berdasarkan PPJT No.257/PPJT/VII/Mn/2006; dan
13. Ruas Cikampek - Padalarang, berdasarkan PPJT No. 258/PPJT/VII/Mn/2006.

Sehubungan dengan perolehan Hak Konsesi dimaksud, Perusahaan diwajibkan membentuk jaminan pemeliharaan dengan nilai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari realisasi pendapatan tol dan pendapatan usaha lain yang diterima pada atau sebelum tahun terakhir masa konsesi dimana besarnya berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang tersedia dan telah diaudit. Jaminan pemeliharaan tersebut diserahkan kepada Pemerintah melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa konsesi berakhir dan jaminan pemeliharaan ini tetap berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya masa konsesi.

46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

a. Concession Agreements (continued)

7. Cawang - Tomang - Pluit Toll Road, according to PPJT No. 252/PPJT/VII/Mn/2006;
8. Belawan - Medan - Tanjung Morawa Toll Road, according to PPJT No. 253/PPJT/VII/Mn/2006;
9. Semarang Toll Road, Sections A. B. C according to PPJT No. 254/PPJT/VII/Mn/2006;
10. Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami Toll Road, according to PPJT No. 255/PPJT/VII/Mn/2006;
11. Palimanan - Kanci Toll Road, according to PPJT No. 256/PPJT/VII/Mn/2006;
12. Jakarta Outer Ring Road Toll Road, Sections E1. E2. E3. W2, according to PPJT No. 257/PPJT/VII/Mn/2006; and
13. Cikampek - Padalarang Toll Road, according to PPJT No. 258/PPJT/VII/Mn/2006.

With regard to the aforementioned Concession Rights, the Company is required to establish a maintenance guarantee with a value of not less than 10% (ten percent) from the actual toll revenue and revenue obtained from other businesses on or before the last year of the concession period whereby such amount is calculated based on the latest audited annual financial statements. The aforementioned maintenance guarantee shall be given to the Government through Indonesian Toll Road Authority (BPJT) within 6 (six) months before the expiration of concession period and shall continue for the successive 12 (twelve) months following the expiration of concession period.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol

1. Ruas Bogor Outer Ring Road

Perusahaan dan PT Jasa Sarana telah menandatangani Akta Kerjasama Pendanaan dan Investasi Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar No. 10 tanggal 3 Oktober 2006 dari Notaris Agus Madjid, S.H., dan Perjanjian Usaha Patungan No. 9 tanggal 11 Mei 2007, dari Notaris Iwan Ridwan, S.H., untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya yang terkait. Perjanjian Usaha Patungan tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan akhir masa konsesi sesuai PPJT (Catatan 1e).

2. Ruas tol Gempol - Pasuruan

Perusahaan dan PT Jatim Marga Utama telah menandatangani Akta Kerjasama Pendanaan dan Investasi Pengusahaan Jalan Tol Gempol - Pasuruan No. 11 tanggal 3 Oktober 2006, dari Notaris Agus Madjid, S.H., dan Akta Perjanjian Usaha Patungan No. 28 tanggal 8 Mei 2007 dari Notaris Retno Suharti, S.H., untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya yang terkait. Perjanjian Usaha Patungan tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan akhir masa konsesi sesuai PPJT.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

a. Concession Agreements (continued)

(ii) Toll Road Investment Agreements

1. Bogor Outer Ring Road

The Company and PT Jasa Sarana have signed a Deed of Financing and Investment of Toll Road Concession Cooperation for Bogor Outer Ring Road No. 10 dated October 3 2006, from Notary Agus Madjid, S.H., and Deed of Joint Venture Agreement No. 9 dated May 11, 2007, from Notary Iwan Ridwan, S.H., in order to implement the toll road concession, which consists of financing, technical planning, constructing, operating and maintaining of the toll roads, as well as other related businesses. Such Joint Venture Agreement is effective from the date of signing until the expiration date of concession period in accordance with the PPJT (Note 1e).

2. Gempol - Pasuruan Toll Road

The Company and PT Jatim Marga Utama have signed a Deed of Financing and Investment of Toll Road Concession Cooperation of Gempol - Pasuruan No. 11 dated October 3, 2006, from Notary Agus Madjid, S.H., and Deed of Joint Venture Agreement No. 28 dated May 8, 2007, from Notary Retno Suharti, S.H., in order to implement the toll road concession, which consists of financing, technical plan, construction, operation and maintenance of the toll road, as well as other related businesses. Such Joint Venture Agreement is effective from the date of signing until the expiration date of concession period in accordance with the PPJT.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

3. Ruas tol Semarang - Solo

Perusahaan dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah telah menandatangani Akta Perjanjian Usaha Patungan No. 35 tanggal 8 Juni 2007 dari Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya yang terkait. Perjanjian Usaha Patungan tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan akhir masa konsesi sesuai PPJT (Catatan 1e).

4. Ruas tol Cengkareng - Kunciran

Perusahaan telah menandatangani Akta Perjanjian Konsorsium No. 03/CMS/PKK-XII/05 berdasarkan Akta No. 53 tanggal 21 Mei 2007 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH. Notaris Konsorsium tersebut terdiri dari (i) Perusahaan; (ii) CMS Works International Limited. Malaysia; (iii) PT Wijaya Karya (Persero); (iv) PT Nindya Karya (Persero); dan (v) PT Istaka Karya (Persero) untuk membangun ruas tol Cengkareng – Kunciran. Porsi Perusahaan dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 20% (dua puluh persen).

Berdasarkan Adendum Perjanjian Konsorsium No. 03/CMS/PKK-XII/05 dengan Akta No. 52 tanggal 21 Mei 2007 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., porsi Perusahaan dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar 55%.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

a. Concession Agreements (continued)

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

3. Semarang - Solo Toll Road

The Company and PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah have signed a Deed of Joint Venture Agreement No. 35 dated June 8, 2007 from Notary Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., in order to implement the toll road concession, which consists of financing, technical planning, constructing, operating and maintaining of the toll road as well as other related businesses. Such Joint Venture Agreement is effective from the date of signing until the expiration date of concession period in accordance with the PPJT (Note 1e).

4. Cengkareng - Kunciran Toll Road

The Company has entered into the Consortium Agreement No. 03/CMS/PKK-XII/05 as set forth in Deed No. 53 dated May 21, 2007 from Notary Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notary. The Consortium consists of (i) the Company; (ii) CMS Works International Limited. Malaysia; (iii) PT Wijaya Karya (Persero); (iv) PT Nindya Karya (Persero); and (v) PT Istaka Karya (Persero) to build Cengkareng – Kunciran Toll Road Segment. The Company's shares portion in such Consortium is 20% (twenty percent).

According to Amendment of Consortium Agreement No. 03/CMS/PKK-XII/05 as set forth in Deed No. 52 dated May 21, 2007 from Notary Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., the Company's shares portion in such Consortium has increased to 55%.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

**4. Ruas tol Cengkareng - Kunciran
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 14 Mei 2008 dari Notaris Suzy Angraini Muharam, S.H., telah didirikan PT Marga Kunciran Cengkareng sehubungan dengan proyek Jalan Tol Kunciran – Cengkareng.

Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 13 Desember 2010, Akta No. 23 tanggal 13 Desember 2010, Akta No. 32 tanggal 15 Desember 2010 dan Akta No. 37 tanggal 16 Desember 2010 yang seluruhnya dari Notaris Dra. Ayu Tiara Siregar, S.H., perihal Jual Beli Saham antara Perusahaan dengan PT Istaka Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan CMS Works International Limited (CMS WIL) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Marga Kunciran Cengkareng No. 40 tanggal 17 Desember 2010, Proporsi Perusahaan dalam penyertaan saham atas PT Marga Kunciran Cengkareng berubah menjadi 75%.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

a. Concession Agreements (continued)

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

**4. Cengkareng - Kunciran Toll Road
(continued)**

According to Deed of Establishment No. 7 dated May 14, 2008, from Notary Suzy Angraini Muharam S.H., Notary in Jakarta, PT Marga Kunciran Cengkareng was established in relation to the Kunciran – Cengkareng Toll Road project.

According to Deed No. 22 dated December 13, 2010, Deed No. 23 dated December 13, 2010, Deed No. 32 dated December 15, 2010 and Deed No. 37 dated December 16, 2010, all of which from Notary Dra. Ayu Tiara Siregar, S.H., regarding the Sale and Purchase of Shares between PT Istaka Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and CMS Works International Limited (CMS WIL), and Deed of Statement of Resolution of General Meeting of Shareholders of PT Marga Kunciran Cengkareng No. 40 dated December 17, 2010, has the Company's shares portion in PT Marga Kunciran Cengkareng is increased to 75%.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

5. Ruas Tol Kunciran - Serpong

Perusahaan telah menandatangani Akta Perjanjian Konsorsium No. 60 tanggal 22 Mei 2007, dari Notaris Benny Kristianto, S.H., Konsorsium tersebut terdiri dari (i) Perusahaan; (ii) PT Astratel Nusantara; (iii) PT Leighton Contractors Indonesia; dan (iv) PT Transutama Arya Sejahtera untuk membangun ruas tol Kunciran – Serpong. Porsi Perusahaan dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 10%.

Perjanjian Para Pendiri Konsorsium dengan Akta No. 24 tanggal 22 Mei 2007 dari Notaris Benny Kristianto, S.H., antara lain menyebutkan bahwa porsi kepemilikan Perusahaan dalam konsorsium tersebut meningkat menjadi 60%, dimana para pihak setuju untuk merealisasikan porsi kepemilikan final sesegera mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada. Para pihak mengindikasikan bahwa realisasi tersebut akan diusahakan untuk diberlakukan segera setelah konsorsium dinyatakan sebagai pemenang proyek dan sebelum pembentukan Perusahaan.

Pada tanggal 14 Mei 2008, telah berdiri perusahaan konsorsium PT Marga Trans Nusantara berdasarkan Akta No. 8 dari Notaris Suzy Anggraini Muharam, S.H., sehubungan dengan proyek Jalan Tol Kunciran-Serpong.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

a. Concession Agreements (continued)

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

5. Kunciran - Serpong Toll Road

The Company has signed a Deed of Consortium Agreement No. 60 dated May 22, 2007 from Notary Benny Kristianto, S.H., The Consortium consists of (i) the Company; (ii) PT Astratel Nusantara; (iii) PT Leighton Contractors Indonesia; and (iv) PT Transutama Arya Sejahtera to build Kunciran – Serpong Toll Road. The Company's shares portion in such Consortium is 10%.

According to the Deed of Consortium Founder Agreement No. 24 dated May, 22, 2007 from Notary Benny Kristianto, S.H., the Company's shares portion in the Consortium has increased to 60%, whereby the parties agreed to promptly finalize the realization of such shares proportion in accordance with the prevailing terms and conditions of the consortium. The Parties indicated that such realization shall be made effective when the Consortium got with the bid for the project and prior to the establishment of the Toll Road Company.

Based on the Deed of Establishment No. 8 dated May 14, 2008 from Notary Suzy Anggraini Muharam, S.H., PT Marga Trans Nusantara was established in relation to the Kunciran - Serpong Toll Road project.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

6. Ruas tol JORR seksi W2 utara

Pada tanggal 2 April 2007, Perusahaan bersama-sama dengan PT Jakarta Propertindo telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan tentang Rencana Kerjasama Pengusahaan Jalan Tol JORR W2 Utara. Pada tanggal 24 Agustus 2009, berdiri Perusahaan konsorsium PT Marga Lingkar Jakarta berdasarkan Akta No. 26 dari Notaris Edi Priyono, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-98-HT.03.02-Th 2002. Porsi Perusahaan dalam penyertaan saham dalam konsorsium tersebut sebesar 65%.

**7. Ruas tol Medan – Kualanamu -
Tebing Tinggi**

Perusahaan sebagai salah satu peserta konsorsium telah menandatangani Akta Perjanjian Konsorsium pada tanggal 5 Desember 2012. Akta telah disahkan berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-36748.40.10.2014 tanggal 27 November 2014 dengan kemitraan terdiri dari (i) Perusahaan; (ii) PT Waskita Karya (Persero) Tbk; (iii) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk; dan (iv) PT Utama Karya (Persero); untuk membangun ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Porsi Perusahaan dalam penyertaan saham di konsorsium tersebut sebesar 55%.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tanggal 25 November 2014 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., telah didirikan PT Jasamarga Kualanamu Tol sehubungan dengan proyek Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

a. Concession Agreements (continued)

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

6. JORR toll road section W2 north

On April 2, 2007, the Company and PT Jakarta Propertindo have signed the Preliminary Agreement concerning Cooperation Plan of Toll Road Concession of North Jakarta Outer Ring Road Section W2. Furthermore, by Deed No. 26 dated August 24, 2009 of notary Edi Priyono, S.H., the Consortium Party has incorporated PT Marga Lingkar Jakarta, which has been legalized with the Minister of Law and Human Rights Decree No. C-98-HT.03.02-Th 2002. The shares portion of the Company shares in such Consortium has been defined as 65%.

**7. Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi
Toll Road**

The Company, as one of consortium participants signed a notarial deed of Consortium Agreement dated December 5, 2012. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-36748.40.10.2014 dated on November 27, 2014, with the partnership consists of (i) The Company; (ii) PT Waskita Karya (Persero) Tbk; (iii) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk; and (iv) PT Utama Karya (Persero); to build Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Toll Road. The portion of the Company's shareholding in the consortium is 55%.

Based on the notarial deed of establishment No. 56 dated on November 25, 2014 of Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., PT Jasamarga Kualanamu Tol was established and aimed to develop Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi toll road.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

8. Ruas tol Solo-Ngawi-Kertosono

Perusahaan bersama-sama dengan PT Waskita Toll Road memiliki SNJ selaku badan usaha pemegang hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Solo-Ngawi dan NKJ selaku badan usaha pemegang hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Ngawi-Kertosono.

Pengambilalihan dilakukan melalui Perjanjian Penjualan dan Pembelian saham Bersyarat sesuai Akta No. 71 tanggal 31 Maret 2015 dan Amandemen Perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham Bersyarat sesuai Akta No. 54 tanggal 29 Mei 2015 serta ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli No. 33 tanggal 15 Mei 2015.

Dengan adanya pengambilalihan tersebut, maka Perusahaan memiliki penyertaan saham pada SNJ sebesar 59,99% dan pada NKJ sebesar 59,99%.

9. Ruas tol Cinere-Serpong

Perusahaan bersama-sama dengan PT Waskita Toll Road dan PT Jakarta Propertindo telah melakukan pengambilalihan saham CSJ selaku badan usaha pemegang hak pengusahaan Jalan Tol Ruas Cinere-Serpong.

Pengambilalihan dilakukan melalui Perjanjian Penjualan dan Pembelian saham Bersyarat sesuai Akta No. 33, tanggal 15 Mei 2015, serta ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli No. 79 tanggal 29 Juni 2015.

Dengan adanya pengambilalihan tersebut, maka Perusahaan memiliki penyertaan saham dalam CSJ sebesar 55%.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

a. Concession Agreements (continued)

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

8. Solo-Ngawi-Kertosono Toll Road

The Company, together with PT Waskita Toll Road, has SNJ as business entity concession holder for Solo-Ngawi Toll Road, and NKJ as business entity concession holder for Ngawi-Kertosono Toll Road.

The takeover is done through the Agreement of Sale and Purchase of shares in accordance with Conditional Deed No. 71 dated March 31, 2015 and Amendment of Conditional Sales and Purchase of Shares Agreement in accordance with Deed No. 54 dated May 29, 2015, and followed up by the Sale and Purchase notarial deed No. 33 dated May 15, 2015.

After the takeover, the Company owns 59.99% of shares of SNJ and 59.99% of shares of NKJ.

9. Cinere-Serpong Toll Road

The Company together with PT Waskita Toll Road and PT Jakarta Propertindo takeover CSJ as business entity concession holder of Cinere-Serpong Toll Road.

The takeover is done through the Agreement of Sale and Purchase of shares in accordance with Conditional Deed No. 33 dated May 15, 2015 and followed up with the Sale and Purchase Deed No. 79 dated June 29, 2015.

After the takeover, the Company owns 55% of shares of CSJ.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

10. Ruas tol Gempol – Pandaan

Perusahaan bersama dengan PT Margabumi Matraya, PT Tirtobumi Adyatunggal dan PT Adhika Prakarsatama mengadakan Perjanjian Usaha Patungan No. 141 tanggal 25 September 1996 untuk menyelenggarakan Jalan Tol Gempol - Pandaan dengan mendirikan PT Margabumi Adhikaraya berdasarkan Akta No. 142 tanggal 25 September 1996.

PT Margabumi Adhikaraya berubah nama menjadi PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) melalui Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 20 Juni 2013.

Perusahaan melakukan pembelian saham PT Margabumi Matraya melalui Akta Jual Beli No. 30 tanggal 17 Juni 2015 sebesar 9,01 %. Sehingga dengan adanya pembelian saham tersebut, maka Perusahaan memiliki penyertaan saham di JPT sebesar 88,86%.

Pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham JPT tanggal 26 November 2015 telah terjadi kesepakatan untuk peningkatan modal dasar JPT sehingga dengan penyeteroran yang dilakukan oleh Perusahaan maka porsi saham Perusahaan pada JPT menjadi sebesar 90,71%.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

a. Concession Agreements (continued)

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

10. Gempol - Pandaan Toll Road

The Company, together with PT Margabumi Matraya, PT Tirtobumi Adyatunggal, PT Adhika Prakarsatama, has signed a Deed of Joint Venture Agreement No. 141 dated September 25, 1996 in order to operate Gempol - Pandanaan Toll Road by establishing PT Margabumi Adhikaraya based on Deed No. 142 dated September 25, 1996.

PT Margabumi Adhikaraya changed its name to PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) through the Resolution of Meeting of Outstanding Shareholders No. 4 dated June 20, 2013.

The Company purchased shares of PT Margabumi Matraya through the Sale and Purchase Deed No. 30 dated June 17, 2015, represent 9.01%. Thereafter, the Company holds an equity stake in JPT of 88.86%.

In the Deed of Shareholders outside the Shareholders General Meeting of JPT dated November 26, 2015, agreed to increase the authorized capital of JPT. Therefore, the portion of the Company's shares in JPT increased by 90.71%.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
(lanjutan)**

(ii) Perjanjian Investasi Jalan Tol (lanjutan)

**11. Ruas tol Nusa Dua - Tanjung
Benoa**

PT Jasamarga Bali Tol (JBT) didirikan berdasarkan akta notaris No. 2 tanggal 22 Agustus 2011 dari Paulina S.S. Endah Putri, S.H., dalam rangka pengusahaan ruas tol Nusa Dua-Tanjung Benoa. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011.

JBT mulai beroperasi secara komersial tanggal 1 Oktober 2013. Pada tanggal 31 Desember 2015, kepemilikan saham Perusahaan di JBT adalah sebesar 55%.

b. Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 7 Maret 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp2.881.802.800 terdiri dari: (i) Perjanjian Kredit Investasi No. KP.COD/PK.KI/006/2007 sebesar Rp1.879.184.000 untuk pembiayaan Proyek Pembangunan Jalan Tol ruas Semarang - Solo, dengan jangka waktu fasilitas kredit selama 15 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan dengan *floating rate* tingkat bunga pinjaman 14% per tahun (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. KP.COD/PK.KI/007/2007 sebesar Rp450.682.000 untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol ruas Bogor Outer Ring Road dengan jangka waktu fasilitas kredit selama 15 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan dengan *floating rate* tingkat bunga pinjaman 14% per tahun dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. KP.COD/PK.KI/008/2007

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

a. Concession Agreements (continued)

(ii) Toll Road Investment Agreements
(continued)

**11. Nusa Dua - Tanjung Benoa Toll
Road**

PT Jasamarga Bali Tol (JBT) was established based on notarial deed No. 2 dated August 22, 2011 of Paulina S.S. Endah Putri, S.H., aimed to develop Nusa Dua-Tanjung Benoa toll road. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-57740.AH.01.01 Year 2011 dated November 25, 2011.

JBT started its operation on October 01, 2013. As of December 31, 2015, the Company's ownership in JBT is 55%.

b. Investment Credit Facility Agreements

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On March 7, 2007, the Company obtained investment credit facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp2,881,802,800 consisting of: (i) Investment Credit Agreement No. KP.COD/PK.KI/006/2007 amounting to Rp1,879,184,000 for financing the Construction of the Semarang-Solo toll road section, with credit facility term of 15 years and interest to be paid monthly at a floating rate interest rate of 14% per annum; (ii) Investment Credit Agreement No. KP.COD/PK.KI/007/2007 amounting to Rp450,682,000 for financing the construction of the Bogor Outer Ring Road toll road section, with credit facility term of 15 years and interest to be paid monthly at a floating rate interest rate of 14% per annum; and (iii) Investment Credit Agreement No. KP.COD/PK.KI/008/2007 amounting to Rp551,936,800 for financing the Construction of the Gempol - Pasuruan toll road section with

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**b. Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi
(lanjutan)**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

sebesar Rp551.936.800 untuk pembiayaan Proyek Pembangunan Jalan Tol ruas Gempol - Pasuruan dengan jangka waktu fasilitas kredit selama 13 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan dengan *floating rate* tingkat bunga pinjaman 14% per tahun.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 7 Maret 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp2.521.577.450 terdiri dari: (i) Perjanjian Kredit Investasi No. 13/PK/KPI/2007 sebesar Rp394.346.750 untuk pembiayaan Proyek Pembangunan Jalan Tol ruas Bogor Outer Ring Road dengan jangka waktu fasilitas kredit selama 15 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan dengan *floating rate* tingkat bunga pinjaman 14% per tahun; (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. 14/PK/KPI/2007 sebesar Rp482.944.700 untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol ruas Gempol - Pasuruan dengan jangka waktu fasilitas kredit selama 15 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan dengan *floating rate* tingkat bunga pinjaman 14% per tahun; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. 15/PK/KPI/2007 sebesar Rp1.644.286.000 untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol ruas Semarang - Solo dengan jangka waktu fasilitas kredit selama 15 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan dengan *floating rate* tingkat bunga pinjaman 14% per tahun.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**b. Investment Credit Facility Agreements
(continued)**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

credit facility term of 13 years and interest to be paid monthly with a floating rate interest rate of 14% per annum.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

On March 7, 2007, the Company obtained investment credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp2,521,577,450 consisting of: (i) Investment Credit Agreement No. 13/PK/KPI/2007 amounting to Rp394,346,750 for financing the Construction of the Bogor Outer Ring Road toll road section with credit facility term of is 15 years and interest to be paid monthly with a floating rate interest rate of 14% per annum; (ii) Investment Credit Agreement No. 14/PK/KPI/2007 amounting to Rp482,944,700 for financing the construction of the Gempol - Pasuruan toll road section with credit facility term of 15 years and interest is to be paid monthly with a floating rate interest rate 14% per annum; and (iii) Investment Credit Agreement No. 15/PK/KPI/2007 amounting to Rp1,644,286,000 for financing with the Construction of the Semarang - Solo toll road section with credit facility term of 15 years and interest is to be paid monthly with a floating rate interest rate of 14% per annum.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**b. Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi
(lanjutan)**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 7 Maret 2007, Perusahaan menandatangani Perjanjian untuk Memberikan Fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp1.537.089.043 yang akan berlaku efektif setelah Perjanjian Kredit Investasi atas fasilitas pinjaman tersebut ditandatangani terdiri dari: (i) Perjanjian untuk memberikan fasilitas kredit investasi No. 12/2007 sebesar Rp184.750.000 untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol ruas Bogor Outer Ring Road. (ii) Perjanjian untuk memberikan fasilitas kredit investasi No. 13/2007 sebesar Rp326.500.000 untuk pembiayaan proyek pembangunan jalan tol ruas Gempol - Pasuruan dan (iii) Perjanjian untuk memberikan fasilitas kredit investasi No. 14/2007 sebesar Rp1.025.839.043 untuk pembiayaan Proyek Pembangunan Jalan Tol ruas Semarang - Solo.

c. Perjanjian Penggunaan Dana Bergulir Pembelian Tanah untuk Jalan Tol dengan Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol (BLU - BPJT)

Entitas anak memiliki perjanjian dengan BLU - BPJT mengenai penggunaan dana bergulir untuk penggantian pembelian tanah dalam rangka pengusahaan ruas jalan tol yang dikelola oleh Entitas Anak dengan jumlah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,	
	2015	2014
PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC)	1.191.745.000	1.191.745.000
PT Marga Trans Nusantara (MTN)	973.636.000	973.636.000
PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)	610.170.000	610.170.000
PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)	216.000.000	216.000.000
PT Trans Marga Jateng (TMJ)	127.000.000	127.000.000
PT Marga Nujyasumo Agung (MNA)	125.000.000	125.000.000
PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)	100.000.000	100.000.000
PT Marga Sarana Jabar (MSJ)	80.000.000	80.000.000
Total	3.423.551.000	3.423.551.000

46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

b. Investment Credit Facility Agreements (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

On March 7, 2007, the Company signed an agreement to obtain investment credit facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp1,537,089,043 that will be effective after the Investment Credit Agreement has been signed. The facilities include: (i) agreement for the provision of investment credit facility No. 12/2007 amounting to Rp184,750,000 for financing the construction of the Bogor Outer Ring Road toll road section; (ii) agreement for the provision of investment credit facility No.13/2007 amounting to Rp326,500,000 for financing the construction of the Gempol - Pasuruan toll road section; and (iii) agreement for the provision of investment credit facility No. 14/2007 amounting to Rp1,025,839,043 for financing The Construction of the Semarang - Solo toll road.

c. Agreement of Fund Facility for Reimbursement of Land Acquisition for Toll Road with BLU - BPJT

The Subsidiaries has agreement with the BLU - BPJT in accordance with the financing of land acquisition of toll roads developed by its Subsidiaries with values shown below:

PT Marga Kunciran Cengkareng (MKC)	1.191.745.000
PT Marga Trans Nusantara (MTN)	973.636.000
PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ)	610.170.000
PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT)	216.000.000
PT Trans Marga Jateng (TMJ)	127.000.000
PT Marga Nujyasumo Agung (MNA)	125.000.000
PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP)	100.000.000
PT Marga Sarana Jabar (MSJ)	80.000.000
Total	3.423.551.000

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**c. Perjanjian Penggunaan Dana Bergulir
Pembelian Tanah untuk Jalan Tol dengan
Badan Layanan Umum - Badan Pengatur
Jalan Tol (BLU - BPJT) (lanjutan)**

Tata cara penggunaan dana bergulir pada BLU-BPJT untuk pengadaan tanah jalan tol diatur dalam Peraturan Menteri PU No.04/PRT/M/2007, tanggal 26 Februari 2007. BLU-BPJT akan melaksanakan pembayaran terlebih dahulu (dana talangan), untuk pembelian tanah untuk pembangunan ruas jalan tol yang merupakan kewajiban dari Perusahaan kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam PPJT. Dalam hal 1 (satu) seksi selesai dibebaskan, Perusahaan harus mentransfer seluruh biaya ganti rugi tanah termasuk bunga ke Rekening BLU-BPJT dan BLU-BPJT membuat Berita Acara Serah Terima Tanah kepada entitas.

Dalam hal Perjanjian Pengusahaan Ruas Jalan Tol untuk ruas jalan tol dialihkan kepada Entitas Anak dari Perusahaan, maka hak dan kewajiban Perusahaan dalam Perjanjian Penggunaan Dana BLU ini akan dialihkan kepada Entitas Anak.

Menunjuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2008 tentang tata cara penggunaan dana bergulir pada Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol untuk pengadaan tanah jalan tol diatur penghapusan *surety bond* (jaminan) dalam perjanjian Penggunaan Dana Bergulir BLU, maka sebagai pengganti jaminan atas pengembalian dana bergulir ini akan diberlakukan *cross default* PPJT apabila Perusahaan gagal membayar dana bergulir BLU.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**c. Agreement of Fund Facility for
Reimbursement of Land Aquisition for Toll
Road with BLU - BPJT (continued)**

The procedure using of pre-fund at BLU-BPJT for toll road land acquisition is based on the Decree of Public Works No.04/PRT/M/2007 dated February 26, 2007. BLU-BPJT will conduct the payment firstly, for acquisition land for toll road construction, which represents the Company's obligation to the Government, according to concession rights agreement (PPJT). In case one section has been completed, the Company should transfer all indemnity costs including interest to BLU-BPJT account and BLU-BPJT should make minutes of land hand over to the entity.

After the transfer of the Company's rights under the Concession to its subsidiaries, the Company's rights and obligations in the BLU Fund Usage Agreement will be transferred to its subsidiaries.

Referring to the Decree of the Minister of Public Works No.14/PRT/M/2008 regarding the procedure for pre-fund usage at Public Service Assistance Unit ("Badan Layanan Umum /BLU") for land acquisition of toll road manage the surety bond erasing on pre-fund usage agreement of BLU therefore as a replacement of guarantee on the pre-fund return. then will be occurred cross default PPJT if the Company failed to pay such pre-fund from BLU.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**d. Kerjasama Pengoperasian Jalan Tol
dengan PT Jalan tol Lingkarluar Jakarta**

Berdasarkan Surat Kuasa No.111/SK/2003 tanggal 21 November 2003, Perusahaan telah memberi kuasa kepada JLJ, entitas anak, untuk melakukan pengoperasian, pengamanan dan pemeliharaan aset proyek JORR termasuk penyerahan pelaksanaan pekerjaan usaha lain. Surat Kuasa tersebut terakhir diubah dengan Surat Perubahan II tanggal 29 Desember 2006 jangka waktu kuasa selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 29 Desember 2006.

Berdasarkan akta perjanjian No. 068/KONTRAK-DIR/2010 tanggal 30 Desember 2010, Perusahaan telah menyerahkan pelaksanaan pengoperasian, pengamanan dan pemeliharaan jalan tol ruas JORR dan ruas Ulujami-Pondok Aren selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Pada tanggal 29 Desember 2011 akta perjanjian tersebut telah diubah dengan Adendum I, Adendum II, Adendum III, Adendum IV, Adendum V dan Adendum VI atas Perjanjian Pengoperasian, Pengamanan dan Pemeliharaan Jalan Tol Ruas JORR Seksi W2, S, E1 dan E2+E3 serta Ruas Ulujami - Pondok Aren. Berdasarkan Adendum I, Adendum II, Adendum III, Adendum IV dan Adendum V kedua belah pihak menyepakati tentang perubahan biaya pengoperasian, pengamanan dan pemeliharaan atas ruas tersebut untuk tahun 2012 dan 2013. Sedangkan berdasarkan Adendum VI kedua belah pihak menyepakati tentang penambahan jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun dan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Selanjutnya, pada Adendum VII, Adendum VIII, dan Adendum IX, kedua belah pihak menyepakati tentang perubahan biaya pengoperasian, pengamanan dan pemeliharaan atas ruas tersebut untuk tahun 2014 dan 2015.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENT AND COMMITMENT
(continued)**

**d. Toll Road Joint Operation with PT Jalantol
Lingkarluar Jakarta**

Based on the Power of Attorney No.111/SK/2003 dated November 21, 2003, the Company has given authority JLJ, a subsidiary, to operate, safeguard and maintain JORR project assets and to manage other operations. The Power of Attorney mentioned was changed with Alteration Letter II dated December 29, 2006, to extend the due date for 1 (one) year effective from December 29, 2006.

Based on the agreement No. 068/KONTRAK-DIR/2010 dated December 30, 2010, the Company has appointed the implementation of the operation, safe guarding and maintenance of the JORR and Ulujami-Pondok Aren toll road sections for over 3 years start which be effective since January 1, 2011 until December 31, 2013. On December 29, 2011, the agreement amended with Amendment I, Amendment II, Amendment III, Amendment IV, Amendment V, Amendment VI of Agreement of the Operation, Safe Guarding and Maintenance of JORR W2, S, E1 and E2+E3 Toll Road section and Ulujami - Pondok Aren toll road section. Based on the Amendment I, Amendment II, Amendment III, Amendment IV and Amendment V both of the parties agreed the changes of cost of operation. safe guarding and maintenance of these sections for 2012 and 2013. Thus, based on Amendment VI both parties agreed to extend the agreement period for 3 (three) years and commencing from January 1, 2014 up to December 31, 2016. Furthermore, on Addendum VII, Addendum VIII, and Addendum IX, both of parties agreed about operating costs, security, and maintenance cost changes of these toll road section for year 2014 and 2015 .

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**e. Kerjasama Pengoperasian Jalan Tol
dengan PT Citra Marga Nusaphala Persada
Tbk (CMNP)**

Perusahaan mengadakan kerjasama dengan CMNP dalam bentuk pengoperasian jalan tol secara terpadu yang dimuat dalam Akta No. 42 tanggal 4 Juni 1993 juncto Akta No. 386 tanggal 31 Desember 1994. Dalam Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum No. 272- A/KPTS/2996 dan Menteri Keuangan No. 434/ KMK.016/2996 tanggal 20 Juni 1996 tentang Pengoperasian Terpadu Jalan Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta (Tomang - Cawang Tanjung Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga Pluit - Grogol Tomang) serta Penetapan Angka Perbandingan Pembagian Pendapatan Tol dinyatakan bahwa jalan tol lingkar dalam kota dijadikan sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan tol dalam kota Jakarta yang pengoperasiannya dilakukan secara terpadu dengan bagi pendapatan tol masing-masing sebesar 25% untuk Perusahaan dan sebesar 75% untuk CMNP.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.JL.01.04-Mn/582 tanggal 7 November 2002, ditetapkan persentase bagi hasil jalan tol dalam kota Jakarta antara CMNP dan Perusahaan sebagai berikut:

	Persentase Bagi Hasil/ Percentage of Revenue Sharing		
	CMNP	Perusahaan/ Company	
Mulai awal konsesi sampai dengan tanggal 9 Mei 2002	75%	25%	Beginning of concession period until May 9, 2002
Mulai tanggal 10 Mei 2002 sampai dengan tanggal 31 Desember 2002	65%	35%	From May 10, 2002 to December 31, 2002
Mulai tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan akhir masa konsensi (Tahun 2025)	55%	45%	From January 1, 2003 to the end of concession period (Year 2025)

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**e. Toll Road Joint Operation with PT Citra
Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP)**

The Company has entered into a joint operation agreement with CMNP in the form of integrated toll road operation as put forth in the Deed No. 42 dated June 4, 1993 in conjunction with the Deed No.386 dated December 31, 1994. Based on the Joint Decrees of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia No. 272-A/KPTS/2996 and the Minister of Finance No. 434/KMK.016/2996 dated June 20, 1996 regarding the integrated operation of the Jakarta Inner Ring Road (Tomang-Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga Pluit-Grogol Tomang) and determination of Toll Revenue Sharing Ratio, the inner city ring road will be operated as one toll road network system with toll road revenue sharing of 25% for the Company and 75% for CMNP.

Based on the subsequent Decree of the Minister of Housing and Regional Infrastructure No.JL.01.04-Mn/582 dated November 7, 2002, the Jakarta Inner Ring Road revenue sharing between CMNP and the Company is set forth as follows:

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**f. Kerjasama Pengoperasian Jalan Tol
dengan PT Bintaro Serpong Damai (BSD)**

Perusahaan telah mengadakan kerjasama kontrak manajemen dengan BSD sebagai operator jalan tol berdasarkan perjanjian kerjasama pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol Pondok Aren - Serpong No.004/SPK-DIR/1998 tanggal 19 Mei 1998, yaitu dimulai sejak tanggal pengoperasian sampai dengan berakhirnya masa penyelenggaraan jalan tol Pondok Aren-Serpong atau pada saat diakhirinya perjanjian ini mana yang lebih awal. Berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.217/1/ARB-BANI/2006 tanggal 31 Agustus 2006, lingkup pengoperasian Perusahaan sebagai berikut:

1. Pengoperasian gerbang tol Pondok Ranji (Pondok Aren Timur).
2. Pelayanan lalu lintas dan keamanan pengguna jalan tol serta pengamanan aset, dengan catatan yang dilakukan oleh Perusahaan adalah yang menyangkut patroli seperti kendaraan rusak dan kecelakaan sesuai lingkup pekerjaan patroli sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol yang dikeluarkan Menteri Pekerjaan Umum.

g. Perjanjian Kerjasama Operasi

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama operasi dengan sejumlah investor dalam rangka pembangunan, pembiayaan dan penyelenggaraan jalan tol. Secara umum, pokok yang diatur dalam perjanjian kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan adalah sebagai berikut:

- (i) Investor membangun dan mendanai pembangunan jalan tol sesuai dengan desain, spesifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (ii) Investor menyerahkan jalan tol tersebut yang telah selesai dibangun kepada Perusahaan untuk dikelola dan dioperasikan.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**f. Toll Road Joint Operation with PT Bintaro
Serpong Damai (BSD)**

The Company has entered into a joint operation agreement with BSD as toll road operator for Pondok Aren - Serpong section based on toll road operation and maintenance agreement No.004/SPK-DIR/1998 dated May 19, 1998, which started from the date of operation until the expiration of the toll concession for Pondok Aren-Serpong or at the time of the termination of the agreement, which ever is earlier. Based on the Decree of the Indonesian Board of Arbitration No.217/1/ARB-BANI/2006 dated August 31, 2006, the scope of operations are as follows:

1. *Operation of Pondok Ranji toll gates (East Pondok Aren).*
2. *Providing patrol and safety service for toll road users and safeguarding toll road assets whereby the Company is dealing with toll road users in the patrol area including damaged vehicles and accidents on toll roads on compliance with Standard of Minimum Service for toll roads issued by the Minister of Public Works.*

g. Joint Operation Agreements

The Company has entered into joint operation agreements with several investors for the construction, financing and operation of toll roads. Generally, the key provisions stipulated in such agreements are as follows:

- (i) *The investor builds and finances toll road projects according to the design, specification and requirements.*
- (ii) *The investor hands over the completed toll road projects to be managed and operated by the Company.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

g. Perjanjian Kerjasama Operasi (lanjutan)

- (iii) Perusahaan menanggung seluruh beban dan risiko yang timbul sehubungan dengan pengelolaan dan pengoperasian jalan tol.
- (iv) Pembayaran kepada investor selama masa kerja operasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Bagi hasil pendapatan tol; atau
 2. Bagi hasil pendapatan tol dengan jaminan pembayaran minimum; atau
 3. Pembayaran secara angsuran dalam jumlah tetap (angsuran pasti) selama masa kerjasama operasi.

Rincian proyek kerjasama operasi tanpa kuasa penyelenggaraan pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

Investor	Proyek Kerjasama Operasi/ Joint Operation Project	Bagian Pendapatan Tol/Toll Revenue Sharing	Masa Kerjasama Operasi/ Joint Operation Period	Investors
<u>Bagi Hasil Pendapatan Tol</u>				<u>Toll Revenue Sharing</u>
Pelebaran Ruas Jalan				Widening of Toll Road
PT Bangun Tjipta Sarana	Cikampek - Cibitung	69%	20 Tahun sejak 1989/ 20 Years since 1989	PT Bangun Tjipta Sarana
PT Bangun Tjipta Sarana	Cawang - Cibitung	41%	22 Tahun sejak 1994/ 22 Years since 1994	PT Bangun Tjipta Sarana
PT Adhika Prakarsatama	Jakarta - Tangerang	27%	17 Tahun 9 Bulan sejak 1994/ 17 Years 9 Months since 1994	PT Adhika Prakarsatama
<u>Simpang Susun</u>				<u>Toll Road Interchanges</u>
PT Surya Cipta Swadaya	Karawang Timur II	4 - 14%	17 Tahun sejak 1998/ 17 Years since 1998	PT Surya Cipta Swadaya

Perjanjian kerjasama operasi yang telah mengalami perubahan dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Operasi dengan PT Bangun Tjipta Sarana (BTS)

BTS dan Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama pelebaran jalan tol Jakarta-Cikampek sebagai berikut:

a. Kerjasama Ruas Cibitung-Cikampek

Kerjasama ini berdasarkan akta notaris No. 109 tanggal 16 Oktober 1992 beserta perubahannya, berlaku untuk jangka waktu 26 tahun sejak Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 10 Juli 1989.

46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

g. Joint Operation Agreements (continued)

- (iii) The Company has responsibility to take any expenses and risks arising from the management and operations of the toll road.
- (iv) Payments to the investors during the operations period are arranged under one of the following:
1. Toll revenue sharing; or
 2. Toll revenue sharing with minimum guaranteed payment; or
 3. Fixed installments during the joint operations period.

Details of joint operations agreement without operating rights as of December 31, 2015 are as follows:

The joint operation agreements that have been recently amended are summarized below:

1. Joint Operation Agreement with PT Bangun Tjipta Sarana (BTS)

BTS and the Company signed an agreement for the widening of Jakarta-Cikampek Toll Road as follows:

a. Agreement for Segment Cibitung-Cikampek

This agreement was stated in Notarial Deed No. 109 dated October 16, 1992 and its amendment is valid for 26 years started from the date of Construction Order on July 10, 1989.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

g. Perjanjian Kerjasama Operasi (lanjutan)

**1. Perjanjian Kerjasama Operasi dengan
PT Bangun Tjipta Sarana (BTS)
(lanjutan)**

Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir pada tanggal 10 Juli 2015.

b. Kerjasama Ruas Cawang-Cibitung

Perusahaan dan BTS telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pelebaran Jalan Tol Jakarta-Cikampek ruas Cawang-Cibitung sesuai Akta No. 171 tanggal 17 Maret 1993, yang kemudian diubah dengan Akta No. 139 tanggal 15 Februari 1997 dan Akta No. 236 tanggal 23 September 2004.

**2. Perjanjian Kerjasama Operasi dengan
PT Surya Cipta Swadaya Tbk (SCS)**

SCS melakukan pembangunan Modifikasi Simpang Susun Karawang Timur Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang tertuang dalam Akta Notaris No. 50 tanggal 13 Juli 1998 oleh Notaris Agus Madjid, S.H., dengan Addendum I No.171 tanggal 20 September 1998 dan Addendum ke II No. 1 Tanggal 1 Maret 1998, bagi Hasil dilakukan apabila SCS telah menyelesaikan proyek tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Ayat (3), dan Pasal 2 ayat (7) Perjanjian, Perusahaan berkewajiban untuk membayar bagi hasil kepada SCS atas pembangunan modifikasi Simpang Susun Karawang Timur Jalan Tol Jakarta - Cikampek selama 16 tahun 4 bulan terhitung sejak Simpang Susun dioperasikan dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2015.

Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir yang ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Pembayaran Bagi Hasil Terakhir dan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil dalam Rangka Pembangunan Modifikasi Simpang Susun Karawang Timur Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada tanggal 28 April 2015.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

g. Joint Operation Agreements (continued)

**1. Joint Operation Agreement with
PT Bangun Tjipta Sarana (BTS)
(continued)**

The agreement has ended on July 10, 2015.

b. Agreement for Segment Cawang-Cibitung

The Company and BTS signed an Agreement for Revenue Sharing From The Widening Of Jakarta-Cikampek Toll Road Segment Cawang-Cibitung as stated in notarial deed No. 171 dated March 17, 1993, which later was amended by notarial deed No. 139 dated February 15, 1997 and No. 236 dated September 23, 2004.

**2. Joint Operation Agreement with
PT Surya Cipta Swadaya Tbk (SCS)**

SCS conducted modification of construction on Karawang Timur Interchange of Jakarta-Cikampek toll road. Based on Joint Agreement No. 50 dated July 13, 1998 of Notary Agus Madjid, S.H., and its Amendment I No.171 dated September 20, 1998 and Amendment II No. 1 dated March 1, 1998, profit sharing will be made when SCS has completed the project.

Based on the provisions of Article 8 paragraph (4) Paragraph (3) and Article 2 (7) of the Agreement, the Company is obliged to pay to SCS for the development of modified Simpang Susun Karawang Timur Jakarta - Cikampek Toll Road for 16 years and 4 months since Simpang Susun operated and until it ended on January 31, 2015.

This joint agreement has ended by signed minutes Payment of Last Profit Sharing and Termination of Profit Sharing Agreement in order to construct Karawang Timur Interchange modification in Jakarta-Cikampek Toll Road on April 28, 2015.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

h. Restrukturisasi Utang JORR

h. JORR Debt Restructuring

Estimasi nilai liabilitas yang diambil alih sesuai dengan Surat Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSKS) No.KEP-02/K.KSKS/02/2001 tanggal 5 Februari 2001, sebesar Rp1.070.521.000 dengan rincian sebagai berikut:

The estimated of liability to be taken over, according to the Decree of the Committee for Financial Sector Policy No.KEP-02/K.KSKS/02/2001 dated February 5, 2001, was Rp1,070,521,000, with details as follows:

Ruas Jalan Tol dan Investor/ JORR Sections and Investors	Estimasi Kewajiban/ Estimated Liabilities	Surat Ketetapan Dasar Estimasi/ Letter of Liability Estimation Basis
Pondok Pinang - Cikunir (Seksi/Section S dan/ and E1) - MNB	721.149.000	No. IJK/5/0257 tanggal 12 Januari 2001/ dated January 12, 2001
Cikunir - Tanjung Priok (Seksi/Section E2. E3. N) - CBMP	243.415.000	No. SFN/031/2000 tanggal 11 Januari 2000/ dated January 11, 2000
Kebon Jeruk - Pondok Pinang (Seksi/Section W2) - CMSP	105.957.000	No. 2000.1128/DIRCO - DPI tanggal 1 November 2000/ dated November 1, 2000
Total	1.070.521.000	

Berdasarkan Akta No. 42 dan 43 tanggal 19 November 2003 dari Notaris Imas Fatimah S.H., dicapai kesepakatan antara Perusahaan, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA sebelumnya disebut Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN) dan para kreditur JORR berkenaan dengan penyelesaian utang yang terkait dengan proyek JORR sebagai berikut:

Based on the Deed No. 42 and 43 dated November 19, 2003 of Notary Imas Fatimah S.H., the Company has reached agreements with PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA formerly the Indonesian Banking Restructuring Agency or IBRA) and other JORR creditors regarding the final settlement of JORR debt obligation as follows:

- Utang kepada PPA dan para kreditur JORR lainnya senilai Rp1.070.521.000 tidak dikonversi menjadi ekuitas di JLJ melainkan akan diselesaikan oleh Perusahaan;
- Utang yang berhubungan dengan JORR Seksi non S sebesar Rp548.521.000 diselesaikan dengan pembayaran tunai sebesar Rp274.260.500 dan sisanya dengan penerbitan obligasi JORR I Tahun 2003 sebesar Rp274.260.500 kepada PPA dan para kreditur JORR; dan
- Sisa utang JORR sebesar Rp522.000.000 yang berhubungan dengan Seksi S ("JORR Seksi S") akan diselesaikan Perusahaan setelah terdapat pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung.

- JORR debt obligations to PPA and other JORR creditors amounting to Rp1,070,521,000 will be settled by the Company instead of being converted into equity in JLJ;
- Part of debt obligations associated with JORR Section excluding Section S, amounting to Rp548,521,000, will be settled by cash payment of Rp274,260,500 and the remaining balance of Rp274,260,500 will be settled by the issuance of JORR I Bond year 2003 series to PPA and the other JORR creditors; and
- The remaining JORR debt obligations associated with Sections ("JORR Section S"), amounting to Rp522,000,000, will be settled by the Company after the execution of the Supreme Court Verdict validating the Company's concession rights for Section S.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

h. Restrukturisasi Utang JORR (lanjutan)

Memperhatikan Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2001, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No. 154/01.10/FU.1/10/2003 tanggal 14 Oktober 2003 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Perampasan Barang Bukti tanggal 7 April 2004, Menteri Pekerjaan Umum dalam Surat Keputusan No.276/KPTS/M/2005. tanggal 9 Juni 2005 tentang Perubahan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang - Jagorawi (JORR Seksi S) kepada Perusahaan, telah diputuskan antara lain:

1. Mengubah wewenang penyelenggaraan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang - Jagorawi (JORR Seksi S) kepada Perusahaan untuk melunasi kredit dari Kreditur Sindikasi; dan
2. Dana sebesar Rp50.431.648 dalam *Escrow Account* yang tidak ada kaitan dan relevansi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tegas dan jelas terhadap JORR Seksi S untuk sementara tidak diperhitungkan dalam pembayaran utang sampai adanya klarifikasi berdasarkan penelitian lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Setelah seluruh kredit dari Kreditur Sindikasi untuk pembangunan JORR S dilunasi, Pemerintah akan menentukan kemudian pengelolaan JORR Seksi S sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 276/KPTS/M/2005 dan Perjanjian Penyelesaian Utang (PPH) JORR Seksi S tanggal 29 Desember 2005, Perusahaan mencatat aset hak perusahaan jalan tol dan kewajiban karena pemberian hak perusahaan jalan tol masing-masing sebesar Rp522.000.000. Perusahaan telah melunasi kewajiban JORR Seksi S sebesar Rp522.000.000 dengan pembayaran tunai sebesar Rp261.000.000 pada tanggal 3 Januari 2006 dan sisanya diselesaikan melalui penerbitan obligasi JORR II Tahun 2005 pada tanggal 5 Januari 2006.

46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

h. JORR Debt Restructuring (continued)

By reference to the Decree of the Supreme Court No.720 K/Pid/2001 dated October 11, 2001, Instruction Letter of Execution of the Decree from District Attorney of Central Jakarta No.154/01.10/FU.1/10/2003 dated October 14, 2003, Minutes of Execution of the Confiscation of Evidence dated April 7, 2004, the Minister of Public Works Decision Letter No.276/KPTS/M/2005 dated June 9, 2005, regarding the change of authority of the operator of JORR Pondok Pinang - Jagorawi Section (JORR Section S) to the Company, it has been decided as follows:

1. *To change the authority of the operator of JORR Pondok Pinang - Jagorawi Section (JORR Section S) to the Company in order to settle the credits from the syndicated loans; and*
2. *The funds of Rp50,431,648 in the escrow account, which were not related to and relevant to the project accountability were temporarily not included for debt repayment until there is a clarification based on further investigation by the Development and Finance Supervisory Board.*
3. *After the syndicated loans for construction of JORR S are fully repaid, the Government will decide the authority upon JORR Section S in accordance to the Decree of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.*

Based on Decree of Minister of Public Works No. 276/KPTS/M/2005 and the Debt Settlement Agreement for JORR Section S dated December 29, 2005, the Company registers its toll roads concession right and obligation for handing over the right to development of toll roads each in the amount of Rp522,000,000. The Company has settled the JORR Section S debt obligations in the amount of Rp522,000,000 by paying in cash of Rp261,000,000 on January 3, 2006 and the remaining balance through the issuance of JORR II Year 2005 bonds on January 5, 2006.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

h. Restrukturisasi Utang JORR (lanjutan)

Di dalam surat dari BPJT No. 845/BPJT/KE/PW.10.01/ 2009 tanggal 15 Oktober 2009 dan No. 993/BPJT/KU.09.03/2009 tanggal 15 Desember 2009, disebutkan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan tol JORR Section S diberikan kepada Perusahaan sampai dengan tercapainya pelunasan utang dari Kreditur Sindikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penunjukan pihak independen untuk melakukan analisa/kajian terhadap pendapatan tol, beban serta arus kas JORR Seksi S dalam kaitannya dengan proyeksi pelunasan utang tersebut.

Perusahaan telah mengirimkan surat kepada BPJT pada bulan September 2011 mengenai hasil analisa/kajian pihak independen tersebut. Pada tanggal 23 Januari 2013, Perusahaan mendapatkan surat dari Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum (PU) perihal pemisahan pendapatan tol JORR Seksi S dari pendapatan JORR dan Perusahaan telah melakukannya.

Pada tanggal 20 Maret 2013, Perusahaan telah menerima Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 80.1/KPTS/M/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkarluar Jakarta Seksi Pondok Pinang – Jagorawi (JORR Seksi S) yang berisi antara lain:

1. Menugaskan Perusahaan untuk melaksanakan pengoperasian sementara dan pemeliharaan Jalan Tol JORR Seksi S sampai dengan BPJT menetapkan operator tetap.
2. Tugas operasi dan pemeliharaan jalan tol JORR S meliputi sebagai berikut:
 - a. Pengoperasian dan pemeliharaan rutin Jalan Tol JORR Seksi S termasuk penanganan darurat.
 - b. Pemeliharaan berkala dan rehabilitasi/ rekonstruksi kerusakan akibat bencana alam setelah mendapat persetujuan Menteri cq. Kepala BPJT.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

h. JORR Debt Restructuring (continued)

In the letters from BPJT No. 845/BPJT/KE/PW.10.01/2009 dated October 15, 2009 and No. 993/BPJT/KU.09.03/2009 dated December 15, 2009, it was stated that the authority of developing JORR Seksi S Toll Road is handed over to Company until debt obligations towards the Syndicated Creditors have been fully settled. As such an independent body must be selected to perform an analysis/review of the toll revenues, liabilities as well as the cash flow of JORR Section S in relation to the projected settlement of such debt.

The Company has sent letters to BPJT in September 2011 the results of analysis/assessment independent parties. On January 23, 2013, the Company to get a letter from the Secretary-General of the Ministry of Public Works (PU) with respect to separation of toll revenue from income JORR Section S and the Company has separated the revenue.

On March 20, 2013, the Company received Decree Letter from the Minister of Public Works No. 80.1/KPTS/M/2013 dated February 25, 2013, regarding the temporary operation of Jakarta Outer Ring Road Section Pondok Pinang - Jagorawi (JORR Section S) which stipulated that:

1. Assigned the Company to temporarily operate and maintain JORR Section S until BPJT legally decides the legitimate operator.
2. Operation and maintenance of JORR Section "S" includes among others are:
 - a. Regular operation and maintenance of JORR Section S including emergency responses.
 - b. Periodic maintenance and rehabilitation/ reconstruction of damages due to natural disasters, after obtaining approval from the Head of BPJT.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

h. Restrukturisasi Utang JORR (lanjutan)

3. Pendapatan dari Pengoperasian Jalan Tol JORR Seksi S setelah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud diktum kedua, dipisahkan dan dimasukkan kedalam rekening khusus.
4. Melaporkan secara periodik setiap bulan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol JORR Seksi S termasuk status rekening khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum cq. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol.
5. Konsesi Jalan Tol JORR Seksi S akan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum secara proporsional berdasarkan hasil audit dari auditor yang ditunjuk bersama Perusahaan, PT Utama Karya (Persero) dan PT Marga Nurindo Bhakti.
6. Sampai dengan tanggal berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 276/KPTS/M/2005 tentang Perubahan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol Lingkarluar Jakarta Seksi Pondok Pinang – Jagorawi (JORR Seksi S) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada tanggal 26 Juni 2013, melalui surat No. JL.01.03-Mn/417 Menteri Pekerjaan Umum memerintahkan agar PT Utama Karya (Persero), PT Marga Nurindo Bhakti dan Perusahaan membuat kesepakatan bersama untuk menunjuk auditor independen dalam rangka mengaudit JORR Seksi S selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal diterimanya surat dimaksud. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan PT Utama Karya, PT Marga Nurindo Bhakti dan Perusahaan tidak menyerahkan kesepakatan bersama terkait penunjukan auditor independen dimaksud maka Pemerintah akan menunjuk auditor untuk mengaudit Perusahaan Tol JORR Seksi S.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

h. JORR Debt Restructuring (continued)

3. Operation and toll revenue of JORR Section S, after deduction of fees referred in the second point, is separated and placed in a particular bank account.
4. Periodic report is compulsory to be submitted monthly to the Minister of Public Works cq. Head of BPJT clarifying the operation and maintenance of JORR Section S, including the statement of balance of particular bank accounts.
5. JORR Section S concession will be determined by the Minister of Public Works proportionally based on the results of the audit by the appointed auditors agreed by the Company, PT Utama Karya (Persero) and PT Marga Nurindo Bhakti.
6. As of the date of this Decree Letter is, the Decree of the Minister of Public Works No. 276/KPTS/M/2005 regarding the change of authority of JORR Section S operation is revoked and no longer valid.
7. This decree is valid started from the date of enactment.

On June 26, 2013, by letter No. JL.01.03-Mn/417, the Minister of Public Works has assigned PT Utama Karya (Persero), PT Marga Nurindo Bhakti and the Company to make a mutual agreement regarding the appointment of an independent auditor to perform audit of JORR Section S at the latest 14 days after date of receipt of the letter referred to. If until the specified time, PT Utama Karya, PT Marga Nurindo Bhakti and the Company did not submit the relevant collective agreement referred to the appointment of independent auditors, the government would appoint an auditor to audit the JORR Section S Toll Concession.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

h. Restrukturisasi Utang JORR (lanjutan)

Mengingat tidak tercapainya kesepakatan dalam waktu 14 hari tersebut, maka Pemerintah menunjuk BPK sebagai auditor untuk melakukan audit terhadap JORR Seksi S.

Pada tanggal 5 September 2014, Perusahaan menerima Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 515/KPTS/M/2014 dimana antara lain berisi;

1. Hak Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR "S") diberikan kepada: (i) PT Marga Nurindo Bhakti untuk melunasi kewajiban sisa hutang kepada sindikasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; dan (ii) Perusahaan untuk pengembalian biaya investasi terkait Jalan Tol JORR "S" dengan masa konsesi sampai tahun 2029.
2. Sisa hutang PT Marga Nurindo Bhakti kepada sindikasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, sedangkan pengembalian biaya investasi Perusahaan sesuai dengan hasil audit BPK.
3. PT Marga Nurindo Bhakti dan Perusahaan berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan rutin dan berkala serta rehabilitasi/ rekonstruksi kerusakan Jalan Tol JORR "S" akibat Bencana Alam.
 - b. Memenuhi aturan Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 390/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaporkan secara periodik setiap triwulan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol JORR "S" termasuk tetapi tidak terbatas mengenai pendapatan tol kepada Menteri PU cq. Kepala BPJT.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

h. JORR Debt Restructuring (continued)

Considering the disagreement within such 14 days, then the Government appointed BPK as the auditor to perform audit of JORR Section S.

On September 5, 2014, the Company received the Decision Letter of the Minister of Public Works No. 515/KPTS/M/2014 with some important points as follows:

1. The Concession Rights of Jakarta Outer Ring Road Section Pondok Pinang-Jagorawi (JORR S) is delegated to: (i) PT Marga Nurindo Bakti in order to settle up remaining debt to syndicate of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; and (ii) the Company as the repayment of investment costs related to JORR S toll road, for a period up to 2029.
2. The remaining debt of PT Marga Nurindo Bakti to syndicate of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is defined in accordance with the FIRST dictum, which was determined by the Directorate General of State of Ministry of Finance, while the repayment of the investment costs of the Company is defined in accordance with the BPK audit results.
3. PT Marga Nurindo Bhakti and the Company are obliged to:
 - a. Carry out the operation, routine and periodical maintenance, and also rehabilitation/ reconstruction of defective JORR S toll road, which was caused by Natural Disasters.
 - b. Comply to the Minimum Service Standards of toll road as specified in the regulation from the Minister of Public Works No. 390/PRT/M/2005 on Minimum Service Standards of Toll Road, and comply to all associated legislation.
 - c. Submit quarterly report on the implementation of operation and maintenance of JORR S toll road, including but not limited to the toll revenue report to the Minister of Public Works cq. Head of BPJT.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

h. Restrukturisasi Utang JORR (lanjutan)

4. PT Marga Nurindo Bhakti wajib membayar hutangnya kepada negara cq. Kementerian Keuangan RI qq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan melaporkan status pelunasan hutang secara periodik setiap triwulan kepada Menteri PU cq. Kepala BPJT.
5. PT Marga Nurindo Bhakti dan Perusahaan berhak mendapatkan jasa pengoperasian dan keuntungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama masa pengoperasian sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA.
6. Dalam hal pelunasan sisa hutang PT Marga Nurindo Bhakti dan pengembalian biaya investasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA telah terpenuhi sebelum masa konsesi berakhir sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, maka perusahaan Jalan Tol JORR S wajib diserahkan kepada Negara/Pemerintah cq PT Hutama Karya (Persero).
7. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol JORR "S" akan ditandatangani oleh Badan Pengatur Jalan Tol berdasarkan kesepakatan antara PT Marga Nurindo Bhakti dan Perusahaan, dengan masa konsesi yang berlaku sejak pelunasan hutang PT Marga Nurindo Bhakti yang ditanggung PPA oleh Perusahaan, sedangkan hal-hal terkait tindakan korporasi dari pihak lain wajib diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 80.1/KPTS/M/2013 tentang Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang - Jagorawi (JORR S) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol JORR "S".

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

h. JORR Debt Restructuring (continued)

4. *PT Marga Nurindo Bhakti is obliged to pay its debt to the state. cq. Directorate General of State of Ministry of Finance as referred to the SECOND dictum and to submit report on the status of debt payment, periodically every three months, to the Minister of Public Works cq. Head of BPJT.*
5. *PT Marga Nurindo Bhakti and the Company are entitled to the economic benefits in accordance with the services performed during the operation period, as stated in the FIRST dictum.*
6. *In terms of the repayment of the remaining debt of PT Marga Nurindo Bhakti and the repayment of investment costs of the Company, as referred to in the SECOND dictum, as achieved before the end of concession period, as referred to in the FIRST dictum, the concession rights of JORR S toll road must be handed over to the State/government cq. PT Hutama Karya (Persero).*
7. *Concession Agreement of JORR S toll road will be signed by the Toll Road Regulatory Agency, based on agreement between PT Marga Nurindo Bhakti and The Company, with the concession period since the debt settlement of PT Marga Nurindo Bhakti, which is guaranteed by Indonesian PPA by the Company, meanwhile the related matters to corporate actions with the other party shall be resolved in accordance with the legislation.*
8. *With the enactment of this decree, the decree of The Minister of Public Works No. 80.1/KPTS/M/2013 on Temporary Operation of Jakarta Outer Ring Road Section Pondok Pinang - Jagorawi (JORR S) is revoked and declared invalid.*
9. *This decision takes effect from the signing date of Concession Agreement of JORR S toll road.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

h. Restrukturisasi Utang JORR (lanjutan)

Perusahaan telah menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 515/KPTS/M/2014 dengan mengirimkan surat No. AA.HK.1092 tanggal 16 Oktober 2014. dimana antara lain berisi:

- Perusahaan telah menghitung kembali tambahan investasi di JORR S dan fee jasa pengoperasian. Atas perhitungan tersebut, Perusahaan menyatakan lunas pada bulan April 2013.
- Dengan penyelesaian Penetapan Pengembalian tambahan investasi dan fee jasa pengoperasian, Perusahaan tidak menjadi pihak dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) JORR S.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia melalui surat No. JL 03.04-Mn/546 menyampaikan sebagai berikut:

1. Kementerian PU memahami bahwa seluruh nilai investasi tambahan dari Perusahaan dan fee jasa pengoperasian jalan Tol JORR "S" sudah terlunasi pada bulan April 2013, dan juga usulan mengenai Perusahaan tidak menjadi pihak dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
2. Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka penetapan PPJT JORR S kiranya Perusahaan segera membahas lebih lanjut dengan Badan Pengatur Jalan Tol untuk: i) penetapan pengembalian investasi. dan ii) fee jasa pengoperasian jalan Tol JORR S.

Atas hal tersebut, mengingat investasi di JORR S telah lunas sejak bulan April 2013 dan selain itu sejak tanggal 25 Februari 2013, Perusahaan tidak lagi mengakui pendapatan tol dari aset tersebut, maka Perusahaan mengubah kebijakan akuntansi atas aset perusahaan jalan tol JORR S dan menghapusbukukan aset JORR S dari laporan keuangan Perusahaan mulai bulan Mei 2013.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

h. JORR Debt Restructuring (continued)

The Company responded to Decision Letter from the Minister of Public Works No. 515/KPTS/M/2014 by letter No. AA.HK.1092 dated October 16, 2014, with some important points as follows:

- *The Company had made recalculations of additional investment and its associated operating fees. From the recalculations, the Company stated that the cost that had been disbursed was fully repaid in April 2013.*
- *At the time the decision of return on additional investment and its associated operation fees was assigned, the Company was no longer a part of the Concession Agreement of JORR S.*

The Company received a response from the Minister of Public Works by letter No. JL 03:04-Mn/546 dated October 17, 2014, which stated that:

1. *The Ministry of Public Works comprehends that the total amount of additional investment and its associated operating fees, which the Company had been disbursed for JORR S, had been paid off in April 2013 and has received proposal of withdrawal from the concession agreement (PPJT).*
2. *Based on the above statement and in accordance with the arrangement of Concession Agreement of JORR S, the Company should immediately discuss with the Toll Road Regulatory Agency in order to determine the repayment of: i) additional investment, and ii) the associated operational fees of JORR S.*

Given these conditions, the investment in JORR S has been paid since April 2013, and in addition to that, from February 25, 2013, the Company no longer recognized toll revenue from these assets, and changed its accounting treatment on toll road concession rights for JORR S and write-off JORR S asset in the Company's financial statements starting in May 2013.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**i. Perjanjian Pengoperasian Jalan Tol
Jembatan Surabaya - Madura (Suramadu)**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Penugasan Kepada Kepala Badan Pengatur Jalan Tol untuk menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, maka Perusahaan telah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja No. 446/BPJT/SPMK/KE/2009 dengan Badan Pengatur Jalan Tol atas nama Menteri Pekerjaan Umum.

Sesuai surat Menteri Pekerjaan Umum No. KU.03.01-Mn/339 tanggal 18 Juni 2012, perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Suramadu, Perusahaan ditetapkan untuk melaksanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Jembatan Suramadu dengan jadwal pelaksanaan selama 6 tahun (2012-2017).

Pada tanggal 11 Juli 2014, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Suramadu, Perusahaan (BP-BPWS) No. 72/KONTRAK-DIR/2014 mengenai pengusahaan Jalan Tol Jembatan Suramadu yang merupakan bagian dari pengusahaan Jalan Tol Jembatan Suramadu.

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Jembatan Suramadu telah ditandatangani antara Perusahaan dengan BPJT dalam akta notaris Rina Utami Djauhari, S.H. No. 15 tanggal 20 Agustus 2014.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**i. Agreement Toll Road Operation of
Surabaya - Madura (Suramadu) Bridge**

Based on the Decree of Minister of Public Works No. 391/KPTS/M/2009 dated June 4, 2009 about the Assignment for Head of Toll Road Coordination to sign the concession toll road, the Company signed Instruction Letter Work Beginning No. 446/BPJT/SPMK/KE/2009 with Toll Road Coordination Board in the name of the Minister of Public Works.

Based on the Decree of Minister of Public Works No. KU.03.01-Mn/339 dated June 18, 2012, about the Auction Winner Determination of Suramadu Toll Road Operation and Maintenance, the Company was assigned to perform Suramadu Toll Road operation and maintenance with the implementation schedule for six years (2012-2017).

On July 11, 2014, the Company signed the agreement with Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS) as stated in the minutes No. 72/CONTRACT-DIR/2014 regarding Concession of Suramadu Toll Road, which is part of the concession of Suramadu Toll Road.

Concession Agreement of Suramadu Toll Road was signed by the Company and BPJT as stated in notarial deed No. 15 dated August 20, 2014 of Rina Utami Djauhari, S.H.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**46. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING
(lanjutan)**

**j. PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
(KKDM)**

KKDM didirikan berdasarkan Akta No. 94 tanggal 20 Desember 1996 dari Notaris Mudofir Hadi, S.H. Penyerahan pada KKDM dilakukan sehubungan dengan penyelenggaraan proyek jalan tol Bekasi Timur-Cawang-Kampung Melayu yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Perusahaan memiliki 7.650.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (rupiah penuh) per lembar saham atau setara dengan Rp7.650.000.000 (rupiah penuh) yang merupakan 10% kepemilikan di KKDM. Berdasarkan akta notaris No. 24 tanggal 17 Oktober 2014 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., kepemilikan Perusahaan terdilusi dari 10% menjadi 1,03%. Sampai dengan tanggal laporan ini, Perusahaan belum melakukan penyeteroran saham tersebut.

Pada tanggal 29 Desember 2006, melalui Surat Perusahaan No.AA.KU05.2002 kepada Menteri BUMN. Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan pelepasan penyerahan saham Perusahaan di KKDM dan Perusahaan telah memperoleh persetujuan pelepasan saham KKDM dari Menteri BUMN melalui Surat No. S-175/MBU/2007 tanggal 29 Maret 2007. Sampai dengan tanggal laporan ini, Perusahaan belum melakukan pelepasan saham tersebut.

47. KONTINJENSI

a. Kewajiban Karena Pengakhiran Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan

Pada tahun 1994, Perusahaan melakukan kerjasama operasi dengan PT Citra Ganesh Marga Nusantara (CGMN) untuk pembangunan Jalan Tol Cikampek - Padalarang, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) No. 297 tanggal 21 Desember 1994. Namun demikian, pada 18 Juli 2001, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil) dengan Surat Keputusan No.417 mencabut keputusan pemberian izin Kerjasama Penyelenggaraan Jalan Tol antara Perusahaan dengan CGMN. Pada tanggal 25 Juli 2001, Perusahaan mengakhiri PKP dengan CGMN.

**46. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

**j. PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
(KKDM)**

KKDM was established based on the Deed No. 94 dated December 20, 1996 of Notary Mudofir Hadi, S.H., The investment in KKDM relates to the operation of the Bekasi Timur-Cawang Kampung Melayu toll road project including the construction, operation and maintenance of the toll road. The Company owns 7,650,000 shares with a par value of Rp1,000 (full amount) per share or equivalent to Rp7,650,000,000 (full amount) which represent 10% ownership of KKDM. Based on notarial deed No. 24 dated October 17, 2014 from Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the Company's ownership was diluted from 10% to 1,03%. Up to the date of this report, the subscribed of shares have not been paid by the Company.

On December 29, 2006, through Letter of the Company No.AA.KU05.2002 to the Minister of State-Owned Enterprises, the Company requested approval for disposal of the Company's investment in KKDM and the Company obtained approval for the share disposal from the Minister of State Owned Enterprises through Letter No. S-175/MBU/2007 dated March 29, 2007. Until the date of this report, the Company has not yet disposed the shares.

47. CONTINGENCIES

a. Obligation Due Termination of Concession Agreement

In 1994, the Company entered into a joint operation in 1994 with PT Citra Ganesh Marga Nusantara (CGMN) for construction of the Cikampek - Padalarang Toll Road as set forth in the Concession Agreement No. 297 dated December 21, 1994. However, on July 18, 2001, the Minister of Housing and Regional Infrastructure with the Letter No.417 revoked the decision granting permission of Toll Road Joint Operation license between the Company and CGMN. For that reason, on July 25, 2001, the Company terminated the Concession Agreement with CGMN.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

47. KONTINJENSI (lanjutan)

a. Kewajiban Karena Pengakhiran Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (lanjutan)

Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) No. 297 tanggal 21 Desember 1994 menyebutkan bahwa bila terjadi pengakhiran masa penyelenggaraan jalan tol lebih awal sebelum masa konsesi berakhir, maka Perusahaan berkewajiban untuk mengambil alih seluruh utang dan harus memenuhi hak Penanam Modal (CGMN). Dalam pasal 14.1 PKP disebutkan bahwa Perusahaan harus membayar sejumlah uang atas nilai buku jalan tol setelah dikurangi nilai kewajiban yang harus diambil alih Perusahaan.

Perusahaan telah melakukan estimasi nilai aset akibat pengakhiran PKP dengan CGMN sebesar Rp202.454.407 yang merupakan nilai buku yang telah diaudit atas aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 1999. Perusahaan masih terus mengupayakan penyelesaian penetapan secara definitif atas jumlah liabilitas.

Perusahaan telah membentuk tim untuk mengkaji penyelesaian permasalahan akibat pengakhiran PKP Jalan Tol Cikampek - Padalarang antara Perusahaan dan CGMN.

Pada tanggal 23 Juni 2014 melalui surat No. AA.HK05.0.645, Perusahaan telah memberikan tanggapan atas surat dari Kementerian BUMN No. S-268/MBU/D2/2014 tanggal 10 Juni 2014 mengenai rencana pengajuan gugatan oleh Trafalgar House Construction (Jersey) Limited (THCJ) yang bertindak sebagai pemegang saham mayoritas CGMN melalui Arbitrase Internasional kepada Pemerintah Republik Indonesia.

47. CONTINGENCIES (continued)

a. Obligation Due Termination of Concession Agreement (continued)

The Concession Agreement No. 297 dated December 21, 1994 states that if there is termination of concession agreement before the concession period is due, the Company has an obligation to take over the overall liabilities and should fulfill the rights of shareholders (CGMN). Article 14.1 of the Concession Agreement states that the Company should pay some amount over the book value of the toll road after deducting amount of liabilities taken over by the Company.

The Company has recorded the estimated assets value as a result of termination of PKP with CGMN amounting to Rp202,454,407, which constitutes the book value that has been audited on the settlement assets on December 31, 1999. The Company is still on the process on determining the definitive value of liabilities.

The Company has formed a team to analyze the disputed settlement that has arisen from the termination of the Cikampek-Padalarang Toll Road PKP between the Company and CGMN.

On June 23, 2014, through Letter No. AA.HK05.0.645, the Company has responded to the letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No. S-268/MBU/D2/2014 dated June 10, 2014, regarding the filing plan by Trafalgar House Construction (Jersey) Limited, (THCJ) which acts as the majority shareholder of CGMN, through International Arbitration to the government of the Republic of Indonesia.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

47. KONTINJENSI (lanjutan)

b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol Surabaya - Gempol Seksi Porong - Gempol

Sebagai dampak dari bencana luapan Lumpur PT Lapindo Brantas yang mengakibatkan kerusakan pada sebagian jalan tol Surabaya - Gempol, Perusahaan telah mengirimkan beberapa surat permintaan ganti rugi dan somasi pada tahun 2006 atas kehilangan pendapatan tol dan pengeluaran berbagai biaya kepada PT Lapindo Brantas. Klaim kerusakan jalan tol tersebut akan meningkat menjadi klaim biaya relokasi ruas jalan tol Porong - Gempol, yang akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Surabaya - Gempol dan kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian dampak semburan Lumpur di Sidoarjo, sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 394/KPTS/M/2006 tanggal 30 November 2006 tentang penutupan sebagian Jalan Tol Surabaya -Gempol.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2006 tanggal 3 September 2006 mengenai Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, semua biaya yang timbul sebagai akibat relokasi pembangunan jalan tol dimaksud selain biaya rehabilitasi kerusakan sarana menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas. Selain itu, Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 394/KPTS/M/2006 tanggal 30 November 2006, mengenai Penutupan sebagian Jalan Tol Surabaya - Gempol seksi Porong Gempol. menyatakan antara lain sebagai berikut:

1. Menutup dan tidak mengoperasikan kembali sebagian jalan tol Surabaya - Gempol Seksi Porong -Gempol; dan
2. Segala hal yang timbul pada perusahaan jalan tol Surabaya - Gempol sebagai akibat dari penutupan seksi Porong - Gempol akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam PPJT Surabaya - Gempol dan kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian dampak semburan lumpur di Sidoarjo.

47. CONTINGENCIES (continued)

b. Claim of Compensation Against PT Lapindo Brantas and Closing of Part of the Surabaya - Gempol Toll Road Section Porong - Gempol

As a consequence of the mud flood disaster in PT Lapindo Brantas, was damaged part of the Surabaya - Gempol toll road. In 2006, the Company has submitted several claims of compensation to PT Lapindo Brantas covering loss of toll revenues and expenditures. The claim for damage to the toll roads is expected to increase and later include a claim for cost to relocated the Porong - Gempol Section toll road and will be settled in connection with the stipulation on the Concession Agreement of the Surabaya - Gempol toll road and the Government policy in settlement of the effects of the mud flood disaster at Sidoarjo in accordance with the Decree of the Minister of Public Works No. 394/KPTS/M/2006 dated November 30, 2006 regarding the Closure of Part of the Surabaya -Gempol Toll Road.

Based on the Decree of the President No. 13 Year 2006 dated September 3, 2006 regarding the National Team for Mud Floods Disaster at Sidoarjo, all expenditures incurred due to the relocation of toll road development, except for rehabilitation expenses for damaged facilities, will become the responsibility of PT Lapindo Brantas. In addition, the Decree of the Minister of Public Works No. 394/KPTS/M/2006 dated November 30, 2006 related to the Closure of Part of the Surabaya - Gempol Toll Road Porong - Gempol Section provides:

1. *To close and stop the operation of a part of the Surabaya - Gempol toll road Porong Gempol Section; and*
2. *Those all matter which impacted on the operation of the Surabaya - Gempol toll road as a result of the closure of the Porong Gempol Section will be handled according to the regulation of Surabaya - Gempol Toll Road Concession Agreement and the Government policy for settlement of the effect of the mud flood disaster at Sidoarjo.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

47. KONTINJENSI (lanjutan)

b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol Surabaya - Gempol Seksi Porong - Gempol (lanjutan)

Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum No. JL. 0103-Mn/131 tanggal 30 Maret 2007, dalam rangka relokasi jalan tol seksi Porong - Gempol, kebutuhan tanah untuk relokasi infrastruktur akan disediakan oleh Pemerintah dan pelaksana konstruksi.

Berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-196/MBU/2007 tanggal 4 April 2007 kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan sehubungan dengan kerugian atas hilangnya sebagian aset jalan tol seksi Porong - Gempol, maka sejalan dengan Undang-undang Jalan No. 38 Tahun 2004 dan Undang-undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003, klaim atas kerugian dimaksud seyogyanya dilakukan oleh Pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum kepada PT Lapindo Brantas.

Pada tanggal 17 Juli 2007, melalui Surat Perusahaan No. AA.TN.02.1153, Perusahaan mengajukan tuntutan ganti rugi akibat genangan lumpur pada ruas jalan tol seksi Porong - Gempol kepada PT Lapindo Brantas. Klaim atas kerugian kehilangan pendapatan tol dan biaya tambahan lainnya akibat genangan lumpur pada ruas Porong - Gempol sampai dengan bulan Mei 2007 adalah sebesar Rp24.724.788 dan klaim atas kerusakan jalan tol sebesar Rp16.334.396.

Dalam Surat Perusahaan No.AA.KU.02.1268. tanggal 7 Agustus 2007 kepada Menteri Pekerjaan Umum, Perusahaan menyampaikan antara lain mengenai kesediaan Perusahaan untuk membiayai pembangunan relokasi ruas jalan tol Porong - Gempol dengan memperhitungkan pengembalian investasi dari tarif baru (termasuk pengembalian akibat tidak berfungsinya ruas jalan tol Porong-Gempol).

Surat Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo/ Menteri Pekerjaan Umum No. 20/DPBPLS/2007 tanggal 24 September 2007 kepada Menteri Negara BUMN menyebutkan antara lain mengenai usulan pelaksanaan konstruksi jalan tol Porong-Gempol dapat dilakukan oleh Perusahaan.

47. CONTINGENCIES (continued)

b. Claim of Compensation Against PT Lapindo Brantas and Closing of Part of the Surabaya - Gempol Toll Road Section Porong - Gempol (continued)

Based on the Minister of Public Works Letter No. JL.0103-Mn/131 dated March 30, 2007 in order to relocated the Porong - Gempol toll road section, the land requirements for relocation of the infrastructure will be provided by the Government and contractors.

Based on the Minister of State-Owned Enterprises Letter No. S-196/MBU/2007 dated April 4, 2007 regarding the loss of part of Porong - Gempol toll road assets and according to the Road Law No. 38 of 2004 and the State Finance Law No. 17 of 2003, the claim for losses should be submitted by the Government through the Departement of Public Works to PT Lapindo Brantas.

On July 17, 2007, through the Company's Letter No.AA.TN.02.1153, the Company claimed compensation caused by mud floods in Porong Gempol Section to PT Lapindo Brantas. The claim for loss of toll revenue and additional expenditures arising from mud in Porong - Gempol Section until May 2007 amounted to Rp24,724,788 and the claim for damage to the toll road amounted to Rp16,334,396.

Based on the Company's Letter No.AA.KU.02.1268 dated August 7, 2007, to the Minister of Public Works, the Company delivered such of readiness to finance development for relocation Porong - Gempol toll road by estimating the reversion of investment from new tariff (included reversion caused by un-function Porong - Gempol toll road section).

The letter of the Chairman of Direction Board of Mud Prevention Agency Sidoarjo/ the Minister of Public Works No. 20/DP-BPLS/2007 dated September 24, 2007 to Minister of State-Owned Enterprises, mentioned such proposal of construction and implementation of Porong - Gempol toll road can be performed by the Company.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

47. KONTINJENSI (lanjutan)

b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol Surabaya - Gempol Seksi Porong - Gempol (lanjutan)

Pada tanggal 14 Januari 2008, melalui Surat Perusahaan No. AA.TN.02.50 kepada Menteri Negara BUMN. Perusahaan menyampaikan antara lain mengenai jumlah klaim total kerugian sampai dengan bulan Mei 2007 sebesar Rp24.724.788 dan permohonan bantuan agar Pemerintah memfasilitasi melalui Biro Hukum dan Humas Kementerian BUMN dalam menyelesaikan permasalahan dengan PT Lapindo Brantas dengan musyawarah mufakat dan apabila musyawarah mufakat tersebut tidak dapat ditempuh dapat mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum di Pengadilan.

Pada tanggal 13 Mei 2009, melalui Surat Perusahaan No. AA.TN.02.730 kepada Direktur Utama PT Lapindo Brantas, Perusahaan kembali mengajukan tuntutan ganti rugi akibat penutupan Ruas Jalan Tol Porong - Gempol. Adapun klaim atas kehilangan pendapatan tol dan kehilangan keuntungan atas bunga sampai dengan bulan Maret 2009 beserta biaya-biaya lainnya, termasuk biaya pembongkaran Jembatan Tol Porong adalah sebesar Rp71.976.187.

Pada tanggal 17 September 2009, melalui surat Perusahaan No. AA.TN.02.1286 kepada Direktur Utama PT Lapindo Brantas. Perusahaan kembali mengajukan tambahan kenaikan besaran rugi atas kehilangan pendapatan tol sebesar Rp76.942.149 dan kehilangan keuntungan atas bunga sampai dengan bulan Juni 2009 yakni sebesar Rp4.965.962.

Pada tanggal 9 Februari 2010. Perusahaan mengirimkan surat No. AA.PR.02.94 tentang Relokasi Jalan Tol Ruas Porong-Gempol kepada BPJT yang ditembuskan kepada Menteri Negara BUMN. Surat tersebut dibuat dengan dasar bahwa Pemerintah (Kementerian PU) mempunyai rencana untuk melakukan relokasi terhadap jalan tol Ruas Porong - Gempol yang terendam luapan lumpur Sidoarjo.

47. CONTINGENCIES (continued)

b. Claim of Compensation Against PT Lapindo Brantas and Closing of Part of the Surabaya - Gempol Toll Road Section Porong - Gempol (continued)

On January 14, 2008, through the Company's Letter No. AATN.02.50 to the Minister of State-Owned Enterprises, the Company reported loss until May 2007 amounting to Rp24,724,788 and requested assistance from the Government to facilitate through Law Bureau and Public Relation of the Minister of State-Owned Enterprises in solving the problem with PT Lapindo Brantas by deliberation. Otherwise, the Company will take the case to the court.

On May 13, 2009, through Letter No.AA.TN.02.730 to the President Director of PT Lapindo Brantas, the Company claimed compensation due to closure of the Porong-Gempol Toll Road Section. The claim for loss of toll revenue, loss of interest income and other expenses, including demolishing cost of Porong Toll Bridge until March 2009 totaling Rp71,976,187.

On September 17, 2009, through Letter No. AA.TN.02.1286 to the President Director of PT Lapindo Brantas, the Company claimed additional compensation for the loss of toll revenue amounting to Rp 76,942,149 and the loss of interest income until June 2009 amounting to Rp4,965,962.

On February 9, 2010, the Company sent Letter No. AA.PR.02.94 to BPJT and the copy was forwarded to the Minister of State-Owned Enterprises. The letter was made based on the plan of Government (Ministry of Public Works) to relocate Porong - Gempol Toll Road affected by the mudflow.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

47. KONTINJENSI (lanjutan)

b. Tuntutan Ganti Rugi Kepada PT Lapindo Brantas dan Penutupan Sebagian Jalan Tol Surabaya - Gempol Seksi Porong - Gempol (lanjutan)

Sejak bulan Mei 2011, Perusahaan telah melakukan aktivitas pembangunan relokasi jalan tol ruas Porong-Gempol dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan telah mengeluarkan dana sebesar Rp573.344.412.

c. Gugatan Ganti Rugi dari Pemilik Tanah untuk Jalan Tol

Perusahaan masih menghadapi perkara litigasi/ gugatan dari beberapa orang yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang tanahnya digunakan untuk pembangunan Ruas Jalan Tol JORR S, Jalan Tol JORR E1, Jalan Tol Sedyatmo, Jalan Tol JORR W2, Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami, Jalan Tol Belmera (Gerbang Tol Mabar dan Kantor Cabang Belmera). Penanganan perkara litigasi tersebut masih dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung.

d. Tagihan dari PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) Terkait Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cawang-Cibitung

Perusahaan dan BTS telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Pelebaran Jalan Tol Jakarta-Cikampek ruas Cawang-Cibitung. Perjanjian ini dinyatakan di dalam akta notaris No. 171 tanggal 17 Maret 1993 yang kemudian diubah dengan Akte No. 139 tanggal 15 Februari 1997 dan Akta No. 236 tanggal 23 September 2004 (selanjutnya disebut Perjanjian Bagi Hasil).

BTS berkewajiban membangun atau melebarkan 2 lajur Jalan Tol tambahan dari arah Cawang ke arah Cibitung dan sebaliknya beserta sarana penunjangnya dan atas hal tersebut BTS akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.

47. CONTINGENCIES (continued)

b. Claim of Compensation Against PT Lapindo Brantas and Closing of Part of the Surabaya - Gempol Toll Road Section Porong - Gempol (continued)

Since May 2011, the Company has constructed the relocation of Porong-Gempol toll road, and until December 31, 2015, the Company has spent Rp573,344,412 for this project.

c. Claims from Land Owners for Toll Road

The Company is still facing a litigation from certain persons who claimed to be the land owners whose land were used for JORR S Toll Road Section, JORR E1 Toll Road Section, Sedyatmo Toll Road, JORR W2 Toll Road Section, Pondok Aren-Ulujami Toll Road, and Belmera Toll Road (Mabar Toll Gate and Belmera Branch Office). These claims are still processed in the District Courts, the High Courts and the Supreme Court.

d. Lawsuit from PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) Regarding Toll Revenue Sharing of Jakarta-Cikampek Toll Road Section Cawang-Cibitung

The Company and PT Bangun Tjipta Sarana signed an Agreement of Widening of Jakarta-Cikampek Toll Road Segment Cawang-Cibitung. This agreement was stated in notarial deed No. 171 dated March 17, 1993, and was later amended by notarial deed No. 139 dated February 15, 1997 and No. 236 dated September 23, 2004 (hereinafter referred to as Revenue-Sharing Agreement).

BTS was obliged to build or widen additional two lane of the toll road from and to Cawang-Cibitung, along with its supporting facilities. This was the underlying reason for BTS to get the sharing revenue, in accordance with the related agreement.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

47. KONTINJENSI (lanjutan)

d. Tagihan dari PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) Terkait Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cawang-Cibitung (lanjutan)

Sampai ada kesepakatan rekonsiliasi data, Perusahaan menunda pembayaran atas bagi hasil pendapatan tol kepada BTS dan telah mencatat utang bagi hasil tersebut dalam Catatan 8 laporan keuangan konsolidasian tentang beban akrual sebesar Rp66.098.674 dan telah dibayarkan oleh Perusahaan pada tanggal 10 September 2014.

Pada tanggal 13 Oktober 2014, sesuai dengan surat No. 04/BTS/X/2014, BTS mengajukan kompensasi atas keterlambatan pembayaran bagi hasil dimaksud.

Di dalam Perjanjian Kerjasama Bagi hasil Pelebaran Jalan Tol Jakarta-Cikampek ruas Cawang-Cibitung tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur terkait denda atau bunga akibat keterlambatan pembayaran bagi hasil pendapatan tol kepada BTS. Untuk itu atas tagihan kompensasi tersebut Perusahaan meminta pendapat dan rekomendasi kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat No. AA.KS01.02.1137 tanggal 23 Oktober 2014.

Hasil Audit BPKP Nomor LHR-12/0501/3/2015 tanggal 20 Februari 2015, menyatakan bahwa Perusahaan tidak punya dasar untuk membayar denda atau bunga keterlambatan.

e. Gugatan terkait Perjanjian Kerjasama Bagi hasil Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cikampek-Cibitung dari BTS

Saat ini Perusahaan sedang berperkara dengan BTS terkait Akta No.109 tanggal 16 Oktober 1992 beserta perubahannya. Perkara tersebut telah diputus ditingkat Mahkamah Agung pada tanggal 24 Juli 2012 dengan bunyi "Menolak permohonan kasasi dari para pemohon: 1. Perusahaan, 2. PT Bangun Tjipta Sarana". Salinan resmi pemberitahuan isi putusan diterima oleh Perusahaan pada tanggal 24 April 2013.

47. CONTINGENCIES (continued)

d. Lawsuit from PT Bangun Tjipta Sarana (BTS) Regarding Toll Revenue Sharing of Jakarta-Cikampek Toll Road Section Cawang-Cibitung (continued)

Until there was a data reconciliation agreement, the Company had deferred the payment of sharing revenue to BTS and had recognized payable from revenue sharing in the consolidated financial statement and had disclosed it in the Note 8 to the consolidated financial statement regarding accrued expenses amounting to Rp66,098,674 was finally paid by the Company on September 10, 2014.

On October 13, 2014, in the letter No. 04/BTS/X/2014, BTS requested some amount as compensation for the late payment of sharing revenue.

In the Agreement of the Widening of Jakarta-Cikampek Toll Road Segment Cawang-Cibitung, there has never been a clause arranging penalty or interest for late payment of sharing revenue to BTS. For this, the Company requested for opinion and recommendation from Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) in the Letter No. AA.KS01.02.1137 dated October 23, 2014.

Based on BPKP Audit Results No. LHR-12/0501/3/2015 dated February 20, 2015, stated that the Company has no basis to pay a penalty or interest for late payment.

e. Lawsuit with BTS Regarding Toll Revenue Sharing of Jakarta-Cikampek Toll Road Section Cikampek-Cibitung

The Company has litigated with BTS in accordance with notarial deed No. 109 dated October 16, 1992 along with its amendments. The case has been decided by the Supreme Court on July 24, 2012 stating "Rejecting the appeal of the applicants. 1. The Company, 2. PT Bangun Tjipta Sarana". A copy of the official notification of the decision was received by the Company on April 24, 2013.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

47. KONTINJENSI (lanjutan)

e. Gugatan terkait Perjanjian Kerjasama Bagi hasil Jalan Tol Jakarta-Cikampek Ruas Cikampek-Cibitung dari BTS (lanjutan)

Atas putusan tersebut, pada tanggal 9 Oktober 2013, Perusahaan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan akta No: 20/SRT.PDT.PK/2013/ PN.JKT.PSTJo. Nomor: 200/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. Permohonan PK Perusahaan telah ditanggapi BTS dengan kontra memori PK yang telah dikirimkan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Desember 2013.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, masih belum terdapat hasil atas permohonan PK tersebut.

f. Gugatan Perpanjangan Bagi Hasil Pendapatan Tol untuk Pelebaran Kebon Jeruk - Tangerang dari PT Tirtobumi Prakarsatama

Berdasarkan amandemen kerjasama bagi hasil pembangunan pelebaran jalan tol Jakarta - Merak No. 8 tanggal 28 Februari 2003, Perusahaan dan PT Adhika Prakarsatama telah menyepakati pengurangan masa kerjasama bagi hasil yang semula 18 tahun menjadi 17 tahun 9 bulan dan berakhir pada tanggal 29 Februari 2012.

Pada tanggal 4 Januari 2011 dan 2 Februari 2011, PT Tirtobumi Prakarsatama (dahulu bernama PT Adhika Prakarsatama) menyampaikan permohonan kepada Perusahaan untuk melakukan pengkajian perpanjangan masa kerjasama bagi hasil dan meminta Perusahaan meneruskan hal tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum. Alasan permohonan perpanjangan adalah karena PT Tirtobumi Prakarsatama berpendapat tidak ada kenaikan tarif tol dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2005. Masa perpanjangan kerjasama bagi hasil yang diajukan sekitar 24 tahun 2 bulan. Perusahaan telah menjawab permohonan tersebut dengan surat No. EC.HK.02.082 pada tanggal 9 Februari 2011 yang intinya menyatakan bahwa Perusahaan sedang mengkaji permohonan dimaksud.

47. CONTINGENCIES (continued)

e. Lawsuit with BTS Regarding Toll Revenue Sharing of Jakarta-Cikampek Toll Road Section Cikampek-Cibitung (continued)

Of that decision, on October 9, 2013, the Company filed a request for reconsideration to the Central Jakarta District Court by notarial deed No. 20/SRT.PDT.PK/2013/PN.JKT. PST Jo No: 200/PDT.G/2009/PN.JKT.PST, BTS responded by filing a counter request against the reconsideration to Supreme Court through the Central Jakarta District Court on December 16, 2013.

As of December 31, 2015, there are still no results for the reconsideration.

f. Claim of Toll Revenue Sharing Against PT Tirtobumi Prakarsatama for Widening Kebon Jeruk - Tangerang Highway

Based on the amendment of revenue sharing agreement of Jakarta - Merak toll road extension No. 8 dated February 28, 2003, the Company and PT Adhika Prakarsatama agreed to reduce the period of agreement from 18 years to 17 years and 9 months ended on February 29, 2012.

On January 4, 2011 and February 2, 2011, PT Tirtobumi Prakarsatama (formerly named as PT Adhika Prakarsatama) submitted requests to the Company to review the extension period of revenue sharing agreement and urged the Company to forward the proposal to the Minister of Public Works. The reason of this proposal was due to PT Tirtobumi Prakarsatama claimed that there has never been toll rates increase which during the years 1993 to 2005. The extension period proposed by PT Tirtobumi Prakarsatama was approximately 24 years and 2 months. The Company responded the requests with the letter No. EC.HK.02.082 dated February 9, 2011, which mainly stated that the Company is in the process of review the respective requests.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

47. KONTINJENSI (lanjutan)

f. Gugatan Perpanjangan Bagi Hasil Pendapatan Tol untuk Pelebaran Kebon Jeruk - Tangerang dari PT Tirtobumi Prakarsatama (lanjutan)

Pada tanggal 7 Juni 2011, PT Tirtobumi Prakarsatama mengajukan gugatan di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perusahaan tidak berhak dan/ atau berwenang untuk melakukan kajian dan/ atau mengambil pertimbangan apapun terkait permohonan perpanjangan masa kerjasama bagi hasil oleh PT Tirtobumi Prakarsatama melalui Perusahaan kepada pihak yang berwenang.
3. Kelalaian Perusahaan untuk meneruskan permohonan perpanjangan masa kerjasama bagi hasil kepada pihak yang berwenang dapat menimbulkan kerugian bagi PT Tirtobumi Prakarsatama.
4. Memerintahkan Perusahaan untuk dengan segera meneruskan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama tersebut di atas kepada pihak yang berwenang.
5. Menghukum Perusahaan untuk mengganti segala kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat kelalaian tersebut di atas serta membayar seluruh biaya proses arbitrase ini, termasuk biaya yang telah dan akan terjadi oleh PT Tirtobumi Prakarsatama.

BANI menerbitkan keputusan No. 406/VI/ARB-BANI/2011 pada tanggal 5 Januari 2012 dengan uraian sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama untuk sebagian.
2. Mewajibkan Perusahaan untuk menyampaikan dan mendiskusikan kajian mengenai perpanjangan kerjasama bagi hasil kepada PT Tirtobumi Prakarsatama dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal Putusan.
3. Mewajibkan Perusahaan dalam Jangka waktu 40 hari sejak Putusan diterbitkan untuk meneruskan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama disertai hasil Kajian Perusahaan kepada Menteri Pekerjaan Umum.

47. CONTINGENCIES (continued)

f. Claim of Toll Revenue Sharing Against PT Tirtobumi Prakarsatama for Widening Kebon Jeruk - Tangerang Highway (continued)

On June 7, 2011, PT Tirtobumi Prakarsatama sued the Company in the National Arbitration Board (BANI) with the following terms:

1. Accept the proposal for PT Tirtobumi Prakarsatama entirely.
2. Declare that the Company has no right and/ or authorized to conduct the review and/ or take any considerations related to the proposed extension period of revenue sharing agreement by PT Tirtobumi Prakarsatama through the Company to the Authorities.
3. Omission of the Company to forward the proposal to the Authorities may create damages for PT Tirtobumi Prakarsatama.
4. Instruct the Company to immediately forward the proposal of PT Tirtobumi Prakarsatama to the Authorities.
5. Punish the Company to replace any losses that might arise as a result of that omission and pay all costs that may arise from the arbitration process, including the costs that have been and will be incurred by PT Tirtobumi Prakarsatama.

BANI issued the verdict No. 406/VI/ARB-BANI/2011 on January 5, 2012 with the following terms:

1. Consented to the claim of PT Tirtobumi Prakarsatama partially.
2. Obligated the Company to discuss the review with PT Tirtobumi Prakarsatama within 30 days from the date this decision.
3. Obligated the Company to forward the request of PT Tirtobumi Prakarsatama along with the result of the review to the Minister of Public Works within 40 days from the date this decision.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

47. KONTINJENSI (lanjutan)

f. Gugatan Perpanjangan Bagi Hasil Pendapatan Tol untuk Pelebaran Kebon Jeruk - Tangerang dari PT Tirtobumi Prakarsatama (lanjutan)

4. Menolak permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama untuk selebihnya.
5. Menyatakan Putusan ini merupakan Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Para Pihak.
6. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan Putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BANI mendaftarkan keputusan No. 406/VI/ARB-BANI/2011 tanggal 5 Januari 2012 dan pada tanggal 30 Januari 2012 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan disampaikan kepada para pihak oleh BANI melalui surat No. 12.209/II/BANI/ED tanggal 7 Februari 2012 dengan tambahan amar putusan menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama untuk sebagian.
2. Mewajibkan Perusahaan untuk menyampaikan dan mendiskusikan kajian mengenai perpanjangan kerjasama bagi hasil kepada PT Tirtobumi Prakarsatama dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal Putusan diucapkan.
3. Mewajibkan Perusahaan dalam Jangka waktu 40 hari sejak Putusan diucapkan. untuk meneruskan permohonan PT Tirtobumi Prakarsatama disertai hasil Kajian Perusahaan kepada Menteri Pekerjaan Umum
4. Menolak Permohonan PT Tirtobumi untuk selebihnya.
5. Menyatakan Putusan ini merupakan Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat Para Pihak.
6. Mewajibkan Perusahaan untuk mengembalikan setengah biaya administrasi sebesar Rp255.000 kepada PT Tirtobumi Prakarsatama.
7. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan Putusan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada tanggal 27 Februari 2012, Perusahaan telah melaksanakan keputusan BANI tersebut dengan mengirimkan hasil kajian dan permohonan perpanjangan kerjasama bagi hasil kepada Menteri Pekerjaan Umum.

47. CONTINGENCIES (continued)

f. Claim of Toll Revenue Sharing Against PT Tirtobumi Prakarsatama for Widening Kebon Jeruk - Tangerang Highway (continued)

4. Rejected the rest of PT Tirtobumi Prakarsatama's claims.
5. Declared the Verdict as the first decree and final and bounded all parties.
6. Asked to the Secretary Council to register the Verdict to Central Jakarta District Court.

BANI has registered the above Verdict No. 406/VI/ARB-BANI/2011 on January 5, 2012 and to the Central Jakarta District Court on January 30, 2012 and delivered to all parties through letter No. 12.209/II/BANI/ED dated February 7, 2012 with additional verdict as follows:

1. Consented the claim of PT Tirtobumi Prakarsatama partially.
2. Obligated the Company to submit and discuss the review of extension of revenue sharing agreement with PT Tirtobumi Prakarsatama within 30 days from the date this decision.
3. Obligated the Company to forward the request of PT Tirtobumi Prakarsatama along with the result of the review to the Minister of Public Works within 40 days from the date this decision.
4. Rejected the rest of PT Tirtobumi Prakarsatama's claims.
5. Declared the Verdict as the first decree and final and bounded all parties.
6. Obligated the Company to indemnify half of the administration fee amounting to Rp255,000 to PT Tirtobumi Prakarsatama.
7. Asked to the Secretary Council to register the Verdict to Central Jakarta District Court.

On February 27, 2012, the Company has conducted BANI's Verdicts by forwarding the review and the proposed of extension period of revenue sharing agreement to the Minister of Public Works.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

47. KONTINJENSI (lanjutan)

f. Gugatan Perpanjangan Bagi Hasil Pendapatan Tol untuk Pelebaran Kebon Jeruk - Tangerang dari PT Tirtobumi Prakarsatama (lanjutan)

Pada tanggal 15 Maret 2012, Perusahaan telah membayarkan setengah dari biaya perkara sebesar Rp255.000 kepada PT Tirtobumi Prakarsatama.

Terdapat perbedaan persepsi terhadap Putusan BANI: PT Tirtobumi Prakarsatama berpendapat bahwa hasil Putusan tersebut seharusnya dipenuhi setelah Putusan diterbitkan, sedangkan Perusahaan meyakini bahwa berdasarkan Hukum Arbitrase Pasal 59, seharusnya Putusan BANI dilaksanakan setelah Putusan didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan perbedaan persepsi di atas PT Tirtobumi Prakarsatama menuntut Perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan Perusahaan tidak melaksanakan putusan BANI. Perkara ini telah diputuskan berdasarkan Putusan No. 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM pada tanggal 10 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Perusahaan harus mengganti rugi kepada PT Tirtobumi Prakarsatama sebesar Rp1.247.576.000 atau setara dengan perpanjangan waktu bagi hasil tol selama 24 tahun 2 bulan.

Atas putusan ini Perusahaan telah mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan banding telah dibacakan pada tanggal 15 Juli 2013 dengan inti putusan mengabulkan permohonan banding Perusahaan dan Menteri Pekerjaan Umum dan membatalkan Putusan No. 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM pada tanggal 10 Desember 2012.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Juli 2013, PT Tirtobumi Prakarsatama mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan pada tanggal 17 Februari 2014, Perusahaan telah menerima pemberitahuan pernyataan kasasi tersebut beserta Memori Kasasi yang diajukan oleh PT Tirtobumi Prakarsatama. Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan telah menyampaikan Kontra Memori Kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perusahaan belum menerima putusan Kasasi tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

47. CONTINGENCIES (continued)

f. Claim of Toll Revenue Sharing Against PT Tirtobumi Prakarsatama for Widening Kebon Jeruk - Tangerang Highway (continued)

On March 15, 2012, the Company has paid half of the administration fee amounting to Rp255,000 to PT Tirtobumi Prakarsatama.

There was a different perception on BANI's verdicts: PT Tirtobumi Prakarsatama believed that the verdicts should be executed after the verdicts were declared, whereas the Company believed that, based on Law of Arbitration Article 59, the verdicts should be executed after they were registered at District Court.

Based on the different perception stated above, PT Tirtobumi Prakarsatama sued the Company in District Court of Jakarta Timur with the argument that the Company did not fulfill the BANI's verdicts. The claims had been declared based on the verdict No. 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM on December 10, 2012, which stated that the Company had to indemnify PT Tirtobumi Prakarsatama for Rp1,247,576,000 or equivalent to the extension period of the toll roads for 24 years and 2 months.

The verdict was read on July 15, 2013, which granted the appeal from the Company and the Minister of Public Works and cancelled the verdict No. 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM on December 10, 2012. According to the Verdict, the Company had registered the appeal statement to the Jakarta High Court.

Over the Jakarta High Court Decision dated July 15, 2013, PT Tirtobumi Prakarsatama filed an appeal to the Supreme Court and on February 17, 2014 the Company received a notice of the appeal statement along with the memory of Appeal filed by PT Tirtobumi Prakarsatama. On February 24, 2014, the Company has delivered a Counter Appeal to the Supreme Court by the District Court of Jakarta Timur. The Company has not received the appeal decision as of December 31, 2015.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

47. KONTINJENSI (lanjutan)

g. Permasalahan Pembayaran Tanah

JBT, entitas anak, memiliki kewajiban untuk membangun gedung kantor sesuai ketentuan di PPJT. Pembangunan gedung kantor tersebut akan dilakukan di area lahan yang dimiliki oleh PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Pelindo III (Persero) (Pelindo III). Karena pembangunan gedung kantor tersebut di area lahan AP I dan Pelindo III, maka JBT memiliki kewajiban untuk memberikan penggantian lahan untuk AP I dan Pelindo III dengan nilai sebagai berikut:

Nomor/ Number	Dimiliki/ Owned by	Area/ Area	NJOP/ NJOP	Harga Penilaian/ Appraisal Price
1.	Angkasa Pura I	3.404 m ²	3.581.003.000	29.291.420
2.	Pelindo III (darat) Pelindo III (perairan)	522 m ² 41.490 m ²	1.227.744.000 -	2.589.120 -
Total			4.808.747.000	31.880.540

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, penggantian lahan masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

h. Permasalahan Potensi Klaim Kontraktor

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Waskita) adalah kontraktor untuk paket 2 dan 4 jalan tol ruas Nusa Dua - Ngurah Rai – Benoa. Pada tanggal 5 November 2015, kantor hukum Nengah Sujana & Rekan dalam hal ini bertindak sebagai perwakilan Waskita telah mengirimkan surat kepada JBT terkait klaim atas penambahan pekerjaan untuk paket 2 dan 4 dengan total nilai klaim sebesar Rp54.342.889 (tidak termasuk PPN dan bunga). JBT dan Waskita telah menunjuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai mediator atas kondisi ini. BPKP telah berkonsultasi kepada Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan LPJKN telah menunjuk Bapak Sarwono Hadjomujadi sebagai tenaga ahli FIDIC.

47. CONTINGENCIES (continued)

g. Issue of Payment Land

JBT, a subsidiary, has a liability to construct office building as required in PPJT. The construction of office building will be conducted in land owned by PT Angkasa Pura I (AP I) and PT Pelindo III (Persero) (Pelindo III). Since the construction of the office building conducted in land owned by AP I and Pelindo III, JBT has liabilities to give the land compensation to AP I and Pelindo III as follows:

Until December 31, 2015, this land compensation is still in process in Badan Pertanahan Nasional (BPN).

h. Issue of Potential Claim Contractor

PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") is contractor of Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Highway for Package 2 and 4. In November 5, 2015, Nengah Sujana & Rekan as Waskita's Law Firm, had given summon letter to JBT related to the claim for extra piling for package 2 and 4 with total claim amounting to Rp54,342,889 (excluded VAT and interest). JBT and Waskita have chosen Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) as mediator for this case. BPKP has already consulted to Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) and LPJKN has already appointed Mr. Sarwono Hadjomujadi as FIDIC expert.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

47. KONTINJENSI (lanjutan)

h. Permasalahan Potensi Klaim Kontraktor (lanjutan)

Pada tanggal 14 Desember 2015, JBT telah menerima surat pemanggilan dari Pengadilan Negeri Denpasar. Berdasarkan berita acara menyatakan bahwa JBT telah diminta untuk membayar klaim dengan nilai sebesar Rp54.342.889, bunga sebesar Rp9.633.177 dan klaim tidak material sebesar Rp30.000.000 dan Waskita meminta untuk menggabungkan paket 2 dan 4 dari ruas jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa.

Pada tanggal 23 Desember 2015, JBT dan Waskita telah mendaftarkan kasus ini ke pengadilan negeri Denpasar dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, JBT masih terus melakukan negosiasi dengan Waskita.

i. Pengembalian Investasi Pemerintah

JMKT, entitas anak, wajib mengembalikan investasi Pemerintah sebesar Rp203.792.000 yang dilakukan atas pembangunan ruas tol seksi I dan II, investasi tersebut akan dikembalikan sesuai berita acara yang terlampir di PPJT. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, JMKT belum mengakui besaran jumlah terhutang karena belum adanya nilai estimasi yang valid atas progres dan belum ada serah terima atas aset tersebut.

47. CONTINGENCIES (continued)

h. Issue of Potential Claim Contractor (continued)

On December 14, 2015, JBT has received the court summon letter from Denpasar District Court. The minutes of the court stated that JBT has requested to pay the claim with total amount of Rp54,342,889, interest of Rp9,633,177 and immaterial claim of Rp30,000,000 and Waskita's request to seize the Package 2 and 4 of Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa highway.

On December 23, 2015, JBT and Waskita has submitted this case to Denpasar Court and as of December 31, 2015, JBT still in negotiation with Waskita.

i. Return on Government Investment

JMKT, a subsidiary, is obliged to return the Government's investment amounted to Rp203,792,000 made on the construction of toll road sections I and II, the investment will be returned according to the minutes attached on PPJT. As of December 31, 2015, JMKT has not recognized the magnitude of the amount owed because of the absence of a valid estimate of the value on the progress and no handover of the asset.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

48. INFORMASI SEGMENT

Kelompok Usaha dikelola dan dikelompokkan dalam segmen usaha yang terdiri dari beberapa cabang sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

48. SEGMENT INFORMATION

The Group is managed and classified into business segments which consist of branches as follow (in million rupiah):

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015/Year ended December 31, 2015										
	Kantor Pusat/ Head Office	Jagorawi	Jakarta Cikampek	Purbaleunyi	Jakarta Tangerang	Camareng	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
Pendapatan										Revenues
Pendapatan tol dan usaha lainnya	1.176.023	633.023	1.165.415	1.212.719	518.585	1.281.658	2.100.488	(457.233)	7.630.678	Toll and other operating revenues
Pendapatan konstruksi	16.857	-	-	-	-	-	2.200.707	-	2.217.564	Construction revenues
Total pendapatan	1.192.880	633.023	1.165.415	1.212.719	518.585	1.281.658	4.301.195	(457.233)	9.848.242	Total revenues
Beban pendapatan										Cost of revenues
Beban tol dan usaha lainnya	(525.329)	(262.023)	(645.496)	(303.793)	(210.377)	(387.535)	(1.396.780)	213.312	(3.518.021)	Toll and other operating expense
Beban konstruksi	(16.543)	-	-	-	-	-	(2.185.858)	-	(2.202.401)	Construction expense
Laba bruto	651.008	371.000	519.919	908.926	308.208	894.123	718.557	(243.921)	4.127.819	Gross profit
Penghasilan lain-lain	191.217	1.485	23.690	819	1.931	4.636	22.644	26.487	272.909	Other revenues
Beban umum dan administrasi	(722.677)	(39.532)	(27.306)	(23.024)	(26.846)	(31.913)	(265.881)	243.920	(893.259)	General and administrative expenses
Beban lain-lain	(375.314)	(4.202)	(3.855)	(245)	(5.450)	(3.439)	9.023	353.677	(29.805)	Other expenses
Laba usaha	(255.766)	328.751	512.448	886.476	277.843	863.407	484.343	380.163	3.477.665	Profit from operation
Biaya keuangan – netto	(708.110)	-	-	-	-	-	(696.933)	-	(1.405.043)	Finance cost – net
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi	(4.318)	-	-	-	-	-	-	-	(4.318)	Share in net loss of associates
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(968.194)	328.751	512.448	886.476	277.843	863.407	(212.590)	380.163	2.068.304	Profit (loss) before income tax
Beban pajak penghasilan	(619.657)	-	-	-	-	-	(129.446)	-	(749.103)	Income tax
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319.201	Income for the year
Aset segmen dilaporkan	(404.493)	2.798.984	3.403.217	5.488.197	1.995.688	7.832.889	20.449.085	(4.838.585)	36.724.982	Segment assets
Liabilitas segmen dilaporkan	10.809.506	95.373	1.421	174.784	92.528	195.376	13.091.447	(104.117)	24.356.318	Segment liabilities

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014/Year ended December 31, 2014										
	Kantor Pusat/ Head Office	Jagorawi	Jakarta Cikampek	Purbaleunyi	Jakarta Tangerang	Camareng	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidated	
Pendapatan										Revenues
Pendapatan tol dan usaha lainnya	1.194.652	619.170	1.044.652	1.194.544	476.255	1.247.617	1.861.268	(410.372)	7.227.786	Toll and other operating revenues
Pendapatan konstruksi	243.104	-	-	-	-	-	1.702.927	-	1.946.031	Construction revenues
Total pendapatan	1.437.756	619.170	1.044.652	1.194.544	476.255	1.247.617	3.564.195	(410.372)	9.173.817	Total revenues
Beban pendapatan										Cost of revenues
Beban tol dan usaha lainnya	(410.628)	(293.319)	(685.240)	(281.447)	(231.000)	(360.585)	(1.492.413)	191.874	(3.562.758)	Toll and other operating expense
Beban konstruksi	(238.571)	-	-	-	-	-	(1.682.496)	-	(1.921.067)	Interest income
Laba bruto	788.557	325.851	359.412	913.097	245.255	887.032	389.286	(218.498)	3.689.992	Gross profit
Penghasilan lain-lain	227.896	538	2.302	554	2.653	2.744	73.178	(22.007)	287.858	Other revenues
Beban umum dan administrasi	(693.118)	(34.615)	(33.638)	(24.714)	(24.785)	(34.741)	(261.177)	221.945	(884.843)	General and administrative expenses
Beban lain-lain	(395.871)	(336)	(304)	(4.807)	(171)	(8)	(10.635)	391.849	(20.283)	Other expenses
Laba usaha	(72.536)	291.438	327.772	884.130	222.952	855.027	190.652	373.289	3.072.724	Profit from operation
Biaya keuangan – netto	(708.110)	-	-	-	-	-	(507.211)	-	(1.215.321)	Finance cost – net
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi	(6.742)	-	-	-	-	-	-	-	(6.742)	Share in net loss of associates
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(787.388)	291.438	327.772	884.130	222.952	855.027	(316.559)	373.289	1.850.661	Profit (loss) before income tax
Beban pajak penghasilan	(620.464)	-	-	-	-	-	6.817	-	(613.647)	Income tax
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.237.014	Income for the year
Aset segmen dilaporkan	461.122	2.464.892	2.919.549	4.536.267	1.703.185	6.975.584	16.134.813	(3.335.449)	31.859.963	Segment assets
Liabilitas segmen dilaporkan	9.186.625	90.031	170.881	109.331	77.868	201.477	11.062.242	(59.222)	20.839.233	Segment liabilities

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

49. RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN

Bisnis Kelompok Usaha mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan dan Entitas Anak adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola sistem manajemen resiko.

Kelompok Usaha mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.

Tujuan Kelompok Usaha dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Kelompok Usaha.

Risiko keuangan utama yang dihadapi Kelompok Usaha adalah risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia dan internasional.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak dari instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

	0 - 1 Tahun/ Year	> 1 Tahun/ Years	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	
Piutang lain-lain				Other receivables
Lancar - bersih				Current - net
Pihak berelasi	59.944.597	-	59.944.597	Related party
Pihak ketiga	104.429.791	-	104.429.791	Third party
Total	164.374.388	-	164.374.388	Total
Tidak lancar - bersih				Non current - net
Pihak ketiga	132.813.579	-	132.813.579	Third Party
Total	132.813.579	-	132.813.579	Total

Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang lain dan investasi tertentu. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The business of the Group include risks - taking activities with certain target by professional management. The main function of the risk management of the Company and its subsidiaries is to identify all key risks, to measure these risks and manage risk positions.

The Group define financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by internal factors as well as external factors that may potentially have negative impact on achievement of Company goals.

The purpose of the Group in managing financial risks is to achieve an appropriate balance between risks and returns and minimize potential adverse effects of the financial performance of the Group.

The main financial risks of the Group are credit risk, interest rate risk, liquidity risk, foreign currency exchange rates and the risk of changes in government policy, socio - economic and political conditions. Attention to this risk management has increased significantly by considering changes and financial market volatility in Indonesia and internationally.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that one party of a financial instrument will fail to meet its obligations and cause the other party to suffer financial losses.

The Company's financial instruments that have the potential for credit risk consist of cash and cash equivalents, other receivables and certain investments. Total maximum credit risk exposure equal to the carrying value of these accounts.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

49. RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Pendapatan, pendanaan dan sebagian besar biaya operasi dari Kelompok Usaha dilakukan dalam mata uang Rupiah oleh karena itu Kelompok Usaha tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

c. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko di mana Kelompok Usaha akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan.

Kelompok Usaha mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Kelompok Usaha dalam memenuhi komitmen Kelompok Usaha untuk operasi normal Kelompok Usaha. Selain itu Kelompok Usaha juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

d. Risiko Suku Bunga

Risiko bunga atas arus kas adalah risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Eksposur terhadap suku bunga Kelompok Usaha dinilai rendah apabila ditinjau dari sisi posisi keuangan, namun Kelompok Usaha terus memonitor hal ini untuk meminimalkan dampak negatif terhadap perusahaan. Pinjaman yang dikeluarkan pada tingkat suku bunga variabel mengekspos Kelompok Usaha terhadap arus kas dari risiko tingkat suku bunga.

e. Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan. Aset dan liabilitas keuangan Kelompok Usaha yang diukur dan diakui pada nilai wajar adalah piutang dan utang derivatif.

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Currency Risk

Currency risk is the risk of fluctuations in the value of financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.

Revenue, funding and most of the operating costs of the Group are made in the Rupiah currency and therefore the Group do not have significant exposure to fluctuations in foreign currency exchange rates.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk in which the Group will experience difficulties in acquiring funds to meet commitments associated with financial instruments.

The Group manages liquidity risk by maintaining sufficient cash and cash equivalents to enable the Group to meet its commitment to the normal operation of the Group. In addition, the Group also controls its cash flow projections and actual cash flow and continuously monitors the maturity dates of financial assets and liabilities.

d. Interest Rate Risk

Interest on the cash flow risk is the risk that future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates.

The Group's exposure to interest rate is considered low when viewed from the statement of financial position, but continue to monitor these companies to minimize the negative impact on the company. Borrowings issued at variable interest rates expose the Company to cash flows from interest rate risk.

e. Fair Value

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes. The Group's financial assets and liabilities that are measured and recognised at fair value are derivative receivables and payables.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

49. RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

e. Nilai Wajar (lanjutan)

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Kelompok Usaha untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan adalah harga permintaan (*ask price*).

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi, apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	31 December 2015/ December 31, 2015	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Aset Keuangan		
Kas dan setara kas	3.323.221.103	3.323.221.103
Dana ditetapkan penggunaannya	1.486.630.839	1.486.630.839
Aset keuangan lainnya	329.107.444	329.107.444
Piutang lain-lain	297.487.967	297.487.967
Investasi jangka pendek	6.955.133	6.955.133
Total	5.443.402.486	5.443.402.486

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Fair Value (continued)

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by the Group is the current bid price, while financial liabilities is the current ask price.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates, if all significant inputs required to fair value an instrument are observable.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, specific valuation techniques are used to value financial instrument include:

- The use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;
- Other techniques, such as discounted cash flows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

The fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts, are as follow:

Financial Assets
Cash and cash equivalents
Restricted funds
Other financial assets
Other receivables
Short term investments
Total

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

49. RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Nilai Wajar (lanjutan)

e. Fair Value (continued)

	31 December 2015/ December 31, 2015		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang kontraktor	1.661.724.335	1.661.724.335	Contractors payables
Utang usaha	137.465.749	137.465.749	Trade payables
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	47.430.707	47.430.707	Other financial liabilities
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			Current maturities of long - term liability
Liabilitas pembebasan tanah	1.119.336.038	1.425.150.931	Land acquisition liabilities
Utang bank	1.121.696.392	1.121.696.392	Bank loans
Provisi pelapisan jalan tol	163.710.293	163.710.293	Provision for overlay
Utang sewa pembiayaan	14.246.400	14.246.400	Capital lease payable
Utang obligasi	1.477.377.192	1.477.377.192	Bonds payable
Utang lembaga keuangan bukan bank	1.347.897.302	1.347.897.302	Non-bank financial institutions loan
Liabilitas jangka panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			Long - term liabilities net of current maturity
Utang bank	7.303.051.412	7.303.051.412	Bank loans
Utang obligasi	4.671.253.480	4.671.253.480	Bonds payable
Liabilitas pembebasan tanah	1.523.256.730	1.217.441.837	Land acquisition liabilities
Provisi pelapisan jalan tol	176.067.644	176.067.644	Provision for overlay
Utang sewa pembiayaan	21.890.917	21.890.917	Capital lease payable
Liabilitas kerjasama operasi	820.300	820.300	Joint operation liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	1.281.190.306	1.281.190.306	Other long term liabilities
Total	22.068.415.197	22.068.415.197	Total

Manajemen Permodalan

Tujuan dari Kelompok Usaha dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Capital Management

The Group purpose in managing capital is to protect the ability of the entity in maintaining business continuity, so that entities can still deliver results for shareholders and benefits for other stakeholders, and to provide adequate returns to shareholders by pricing products and services that are commensurate with the level of risk.

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

49. RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

e. Nilai Wajar (lanjutan)

Kelompok Usaha menetapkan sejumlah rasio modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Konsisten dengan Perusahaan lain dalam industri, Perusahaan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Modal yang disesuaikan terdiri dari seluruh komponen ekuitas (meliputi modal saham, selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing dan saldo laba).

Selama tahun 2015, strategi Perusahaan tidak berubah yaitu mempertahankan rasio utang terhadap sebesar maksimum 5:1. Rasio utang terhadap pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Fair Value (continued)

The Group set a number of capitals ratios proportion to the risk. The Company manages its capital structure and makes adjustments taking into account changes in economic conditions and risk characteristics of the underlying asset. Consistent with other companies in the industry, the Company monitors capital on the basis of the ratio of adjusted debt to capital. This ratio is calculated as follows: net debt divided by adjusted capital. Net debt is total debt (as the amount in the statement of financial position) less cash and cash equivalents. Adjusted capital comprises all components of equity (including capital stock, foreign exchange translation adjustment of foreign currency and retained earnings).

During the year 2015, the Company's strategy has not changed, namely, to maintain the debt to equity ratio at maximum 5:1. The ratio of debt to equity as at December 31, 2015 are as follows:

	2015	
	Rp	
Liabilitas Jangka Pendek	7.743.786.951	Short-term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	16.612.531.070	Long-term Liabilities
Total Liabilitas	24.356.318.021	Total Liabilities
Total Ekuitas	12.368.664.466	Total Equity
Rasio Utang terhadap Ekuitas	2 : 1	Debt to Equity Ratio

50. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Informasi tambahan atas laporan arus kas terkait aktivitas investasi non kas adalah sebagai berikut:

50. NON-CASH TRANSACTIONS

Supplemental cash flows information non-cash investing activities is as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2015	2014	
Provisi pelapasan jalan tol	327.438.763	382.184.123	Provision for overlay
Hak pengusahaan jalan tol	15.163.292	24.757.377	Toll road concession rights

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**51. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan dibawah ini. Kelompok Usaha bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- a. Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan. Amandemen ini mengklarifikasi, bukan mengubah secara signifikan, persyaratan PSAK 1, antara lain, mengklasifikasi mengenai materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.
- b. Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi. Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK 16 dan PSAK 19 Aset Takberwujud bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) dari pada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Sebagai kesimpulan bahwa penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.
- c. Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja. PSAK 24 meminta entitas untuk memperhatikan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada alokasi iuran tersebut pada periode jasa.

**51. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE**

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current consolidated financial statements are disclosed below. The Group intend to adopt these standards, if applicable, when they become effective

- a. *Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements on Disclosures initiative. This amendments clarify, rather than significantly change, existing PSAK 1 requirements, among others, to clarify the materiality, flexibility as to financial statements and identification of significant accounting policies*
- b. *Amendments to PSAK 16: Property, Plant and Equipment on Clarification of the accepted method for depreciation and amortization. The amendments clarify the principle in PSAK 16 and PSAK 19 Intangible Asset that revenue reflects a pattern of economic benefits that are generated from operating a business (of which the asset is part) rather than the economic benefits that are consumed through use of the asset. As a result, a revenue based method cannot be used to depreciate the Property, Plant and Equipment.*
- c. *Amendment to PSAK 24: Employee Benefits on Defined benefit plans: Employee Contributions. PSAK 24 requires an entity to consider contributions from employees or third parties when accounting for defined benefit plans. Where the contributions are linked to service, they should be attributed to periods of service as a negative benefit. These amendments clarify that, if the amount of the contributions is independent of the number of years of service, an entity is permitted to recognise such contributions as a reduction in the service cost in the period in which the service is rendered, instead of allocating the contributions to the periods of service.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**51. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF
(lanjutan)**

- d. Amandemen PSAK 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasian. Amandemen ini memberikan klarifikasi pada paragraf 36A tentang pengecualian konsolidasian untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.
- e. PSAK 5 (Penyesuaian 2015): Segmen Operasi. Penyesuaian ini mengklarifikasi:
- Entitas mengungkapkan pertimbangan yang dibuat manajemen dalam penerapan kriteria agregasi PSAK 5 paragraf 12 termasuk penjelasan singkat segmen operasi yang digabungkan dan karakteristik ekonomi.
 - Pengungkapan rekonsiliasi aset segmen terhadap total aset jika rekonsiliasi dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional, demikian juga untuk pengungkapan liabilitas segmen.
- f. PSAK 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak berelasi. Dan entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang terjadi untuk jasa manajemennya.
- g. PSAK 13 (Penyesuaian 2015): Properti Investasi. Penyesuaian ini memberikan klarifikasi bahwa PSAK 13 dan PSAK 22 saling mempengaruhi. Entitas dapat mengacu pada PSAK 13 untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Entitas juga dapat mengacu pada PSAK 22 sebagai pedoman apakah akuisisi properti investasi merupakan kombinasi bisnis.
- h. PSAK 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK 16 dan PSAK 19 aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

**51. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

- d. *Amendments to PSAK 15: Investment in Associates and Joint Ventures related to Investment Entities: Applying the Consolidation Exceptions. The amendments clarify the paragraph 36A that the exemption from presenting consolidated financial statements applies to investment entity when such criteria meet.*
- e. *PSAK 5 (2015 Improvement): Operating Segments. The improvement clarifies that:*
- *An entity must disclose the judgements made by management in applying the aggregation criteria in paragraph 12 of PSAK 5 including a brief description of operating segments that have been aggregated and the economic characteristics.*
 - *Disclose the reconciliation of segment assets to total assets if the reconciliation is reported to the chief operating decision maker, similar to the required disclosure for segment liabilities.*
- f. *PSAK 7 (2015 Improvement): Related Party Disclosures. The improvement clarifies that a management entity (an entity that provides key management personnel services) is a related party subject to the related party disclosures. In addition, an entity that uses a management entity is required to disclose the expenses incurred for management services.*
- g. *PSAK 13 (2015 Improvement): Investment Property. The improvement clarify that PSAK 13 and PSAK 22 is related. An Entity shall refer to PSAK 13 to differentiates between investment property and owner-occupied property. An Entity shall refer to PSAK 22 as guidance to determine whether the acquisition of investment property is a business combination.*
- h. *PSAK 16 (2015 Improvement): Property, Plant and Equipment. The improvement clarifies that in PSAK 16 and PSAK 19 that the asset may be revalued by reference to observable data on either the gross or the net carrying amount. In addition, the accumulated depreciation or amortisation is the difference between the gross and carrying amounts of the asset. Carrying amounts of the asset is restated by revalved amounts.*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2015 and
for the year then ended
(Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated)**

**51. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF
(lanjutan)**

- i. PSAK 19 (Penyesuaian 2015): Aset Takberwujud. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK 16 dan PSAK 19 aset dapat direvaluasi dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto. Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan atau amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
- j. PSAK 22 (Penyesuaian 2015): Kombinasi Bisnis. Penyesuaian ini memberikan klarifikasi ruang lingkup dan kewajiban membayar imbalan kontijensi yang memenuhi definisi instrumen keuangan diakui sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas.
- k. PSAK 25 (Penyesuaian 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. Penyesuaian ini memberikan koreksi editorial pada PSAK 25 paragraf 27.
- l. PSAK 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio dalam PSAK 68 dapat diterapkan tidak hanya kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan, tetapi juga diterapkan pada kontrak lain dalam ruang lingkup PSAK 55.
- m. ISAK 31: Interpretasi atas ruang lingkup PSAK 13: Properti Investasi. ISAK 13 ini memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi property investasi dalam PSAK 13.

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**52. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 29 Januari 2016.

**51. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

- i. PSAK 19 (2015 Improvement): Intangible Assets. The improvement clarifies that in PSAK 16 and PSAK 19 that the asset may be revalued by reference to observable data on either the gross or the net carrying amount. In addition, the accumulated depreciation or amortisation is the difference between the gross and carrying amounts of the asset. Carrying amounts of the asset is restated by revalued amounts.
- j. PSAK 22 (2015 Improvement): Business Combination. The improvement clarify the scope and obligation to pay contingent benefit which meet the financial instrument definition recognized as financial liabilities or equity.
- k. PSAK 25 (2015 Improvement): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. The improvement provides editorial correction for paragraph 27 of PSAK 25.
- l. PSAK 68 (2015 Improvement): Fair Value Measurement. The improvement clarifies that the portfolio exception in PSAK 68 can be applied not only to financial assets and financial liabilities, but also to other contracts within the scope of PSAK 55.
- m. ISAK 31: Interpretation of scope for PSAK 13: Investment property. ISAK 31 provides interpretation to building characteristic which has been used as a part of investment property definition on PSAK 13.

The Group is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its financial statements.

**52. THE MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY ON
THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

The Company's management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were authorized for issued on January 29, 2016.

2015

LAPORAN TAHUNAN



PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah
Jakarta, 13550 Indonesia

Telp. : +6221 841 3630,
+6221 841 3526

Fax. : +6221 841 3540

Email : jasmar@jasamarga.com

www.jasamarga.com